FAKULTAS
ILMU SOSIAL DAN
POLITIK

RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD) KABUPATEN SIKKA

TAHUN 2025

Disusun Oleh:

1. Dr. Laurensius P. Sayrani, M.PA
2. Dr. Ajis Salim Adang Djaha, M.Si
3. Dr. I Putu Yoga Bumi Pradana, M.Si
4. Dr. Nursalam, M.Si;
5. Lazarus Jehamat, S.Sos., M.Si;
6. Dr. Syukur M. Adang Djaha, M.AP

PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
UNIVERSITAS NUSA CENDANA

HALAMAN PENGESAHAN

RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD) KABUPATEN SIKKA

Disusun Oleh:

Ketua Tim Penelitian

Dr. Laurensius P. Sayrani, M.PA

Anggota Tim Penelitian

Dr. Ajis Salim Adang Djaha, M.Si
Dr. I Putu Yoga Bumi Pradana, M.Si
Dr. Nursalam, M.Si;
Lazarus Jehamat, S.Sos., M.Si;
Dr. Syukur M. Adang Djaha, M.AP

Dokumen ini telah disetujui dan disahkan pada
tanggal 05 November 2025

Ketua Tim Pelaksana Kajian

Dr. Laurensius P. Sayrani, M.PA
NIP. 19780205 200604 1 001

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr.William Djani, M.Si
19641014 198501 1 001

Untuk dan Atas Nama
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sikka/
Pejabat Pembuat Komitmen

Margaretha M. Da Maga Bapa, ST, M.Eng
19641014 198501 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Sikka Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Dokumen RPKD ini merupakan panduan strategis dan kerangka kerja komprehensif Pemerintah Kabupaten Sikka untuk periode mendatang dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan. Penyusunan dokumen ini adalah amanat peraturan perundang-undangan dan wujud komitmen nyata Pemerintah Daerah untuk mencapai target penurunan angka kemiskinan, terutama penghapusan kemiskinan ekstrem.

RPKD ini disusun berdasarkan hasil analisis data terkini mengenai profil kemiskinan di Kabupaten Sikka dan telah melalui proses konsultasi publik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Keterlibatan aktif Organisasi Perangkat Daerah (OPD), lembaga vertikal, dunia usaha, akademisi, serta perwakilan masyarakat miskin, telah memastikan bahwa rencana aksi yang termuat dalam dokumen ini bersifat terpadu, relevan, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penanggulangan kemiskinan adalah tugas multidimensi yang membutuhkan sinergi dan kolaborasi kuat dari seluruh elemen daerah. Oleh karena itu, kami berharap RPKD ini dapat menjadi acuan utama bagi semua pihak, baik di tingkat kabupaten hingga desa, dalam merencanakan, menganggarkan, dan melaksanakan program-program pengentasan kemiskinan secara efektif.

Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), tim penyusun, dan semua pihak yang telah memberikan sumbangsih pemikiran, waktu, dan energi dalam perumusan dokumen strategis ini.

Semoga RPKD Kabupaten Sikka Tahun 2025 ini dapat diimplementasikan dengan optimal, membawa masyarakat Sikka menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan berkeadilan.

Kupang, Juni 2025

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PENGESAHAN ii
KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI iv
DAFTAR TABEL vii
DAFTAR GAMBAR x
BAB I. PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Dasar Hukum 6
1.2.1. Dasar Hukum Kebijakan Penyusunan Dokumen Kajian Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sikka: 6
1.2.2. Dasar Hukum Pelaksanaan Kegiatan Kajian Evaluasi Kebijakan Penangggulangan Kemiskinan 6
BAB II. KONDISI UMUM KABUPATEN SIKKA 7
2.1. Aspek Geografi dan Demografi 7
2.1.1. Aspek Geografis 7
B. Wilayah Rawan Bencana 17
2.1.2. Aspek Demografi 19
1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 21
2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah 33
2.1.4. Aspek Pelayanan Umum 35
2.1.5. Fokus Layanan Urusan pemerintahan Pilihan 88
e. Urusan Perdagangan 104
2.1.6. Fokus Layanan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan 106
2.2. Pengawasan 112
BAB III. PROFIL KEMISKINAN DAERAH 114
3.1 Gambaran Umum Penelitian Lapangan 114
3.1.1 Desil 1 114
3.1.2 Desil 2 140
3.1.3 Desil 3 152
3.1.4 Desil 4 159
3.1.5 Rasionalisasi pemilihan lokasi berdasarkan kategori desil kemiskinan 175
3.2 Temuan Kasus Tunggal Per Desil 185
3.2.1 Desil 1: Kemiskinan Ekstrem 185
3.2.2 Desil 2: Kemiskinan Multidimensi Tinggi (Pak Ajis) 244
3.2.3 Desil 3: Kemiskinan Relatif (Pak Nursalam) 276
3.2.4 Desil 4: Kemiskinan Menurun / Potensial Berdaya (Mas Syukur) 294
3.3 Pembahasan Teoritis 357
BAB IV PROGRAM PRIORITAS 363
4.1. Level Survival (Tahun 2025) 363
4.1.1. Sumur bor & kios air komunitas 363
4.1.2. Distribusi Air Murah 363
4.1.3. Lumbung Pangan Komunitas 364
4.1.4. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni 364
4.1.5. Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) 364
4.2. Level Resilience (Tahun 2026) 365
4.2.1. Embung Komunitas dan Irigasi Sederhana. 365
4.2.2. Jagung tahan kering & hortikultura bernilai ekonomi 365
4.2.3. Modernisasi Alat Tangkap 366

4.2.4. Kredit Mikro Koperasi Komunitas 366
4.3. Level Empowerment (Tahun 2027) 367
4.3.1. Pelatihan UMKM komunitas (olah hasil laut/pertanian, tenun, kerajinan) 367
4.3.2. Penguatan BUMDes 368
4.3.3. Kelompok Simpan Pinjam Perempuan 368
4.4. Level Resilience–Empowerment (Tahun 2028) 369
4.4.1. Posyandu Komunitas dan Pangan Tambahan 369
4.4.2. Sanitasi Sehat 369
4.4.3. Dialog Adat 370
4.4.4. Reformasi Bansos Berbasis Komunitas 370
4.4.5. Arisan Pangan 370
4.5. Level Sustainability I (Tahun 2029) 371
4.5.1. Integrasi Program Desa Tangguh Berbasis Komunitas 371
4.5.2. Dokumentasi Praktik Baik Komunitas Pilot 371
4.5.3. Replikasi Ke Komunitas Lain 372
4.5.4. Kemitraan NGO–Universitas–CSR 372
4.6. Level Sustainability II (Tahun 2030) 372
4.6.1. Institusionalisasi Komunitas Tangguh ke RPJMD 372
4.6.3. Integrasi SDGs Lokal Dengan Indikator Kemiskinan Multidimensi 373
BAB V. LOKASI PRIORITAS: BERBASIS DESIL 374
5.1. Ringkasan Temuan per Desil (Pola Umum dan Perbedaan Lokasi) 374
5.1.1. Desil 1 (Wuring, Rubit, Nangahale): Kemiskinan Ekstrem dengan Ketergantungan Tinggi. 374
5.1.2. Desil 2 (Wolomarang, Tanarawa): Subsistensi Persisten, Program Tidak Nyambung. 374
5.1.3. Desil 3 (Madawat): Working Poverty dan Biaya Hidup Urban-Periurban. 374
5.1.4. Desil 4 (Umauta, Wairbleler): Sedikit Lebih Baik, Namun Masih Rapuh terhadap Guncangan. 375
5.2. Karakteristik Kemiskinan di Sikka: Multidimensi, Kultural, Struktural, Geografis, dan (Ditambahkan) Kapabilitas 375
5.2.1. Multidimensi: Deprivasi pada Banyak Aspek Non-Moneter. 375
5.2.2. Kultural: Beban Adat, Habitus Konsumtif, dan Patron–Klien. 375
5.2.3. Struktural: Policy Alienation, Error Distribusi, dan Lemahnya Kelembagaan Lokal. 376
5.2.4. Geografis–Lingkungan: Batas-Batas Ekologis dan Aksesibilitas 376
5.2.5. Kapabilitas: Pendidikan, Kesehatan, Literasi, Aspirasi, dan Agency. 376
5.2.6. Pola Bantuan: Dominan Kuratif, Belum Membangun Kemandirian 377
5.2.7. Temuan Lintas Faktor, Lintas Dimensi, dan Lintas Kasus 377
5.2.8. Akar Masalah dan Posisi Variabel dalam Pohon Masalah 378
BAB VI PENUTUP 380
6.1 Kesimpulan 380
6.2 Implikasi Penelitian 380
6.2.1 Implikasi Teoritis 380
6.2.2 Implikasi Praktis 381
6.2.3 Implikasi Kebijakan 382
6.3 Saran 383
6.3.2 Jangka Pendek: Verifikasi Data Partisipatif dan Perbaikan Targeting Bansos 383
6.3.3 Jangka Menengah: Diversifikasi Ekonomi Lokal 383

6.3.4 Jangka Panjang: Reformasi Budaya Sosial, Pendidikan Vokasional, dan Literasi Keuangan 384
6.3.5 Penegasan Akhir: Apa yang Mesti Berubah 384
6.4 Rencana Aksi Tahunan 385

DAFTAR TABEL

Table 1. Nama Ibukota Kecamatan dan Luas Wilayah Per Kecamatan ... 8
Table 2. Kondisi Suhu Udara dan Kelembaban Udara Kabupaten Sikka Tahun 2023 ... 9
Table 3. Jumlah Curah Hujan dan Jumlah Hari Hujan Kabupaten Sikka Tahun 2023 ... 10
Table 4. Rata-rata Kecepatan Angin dan Tekanan Udara ... 10
Table 5. Data Curah Hujan Kabupaten Sikka ... 12
Table 6. Wilayah potensi air tanah di CAT Maumere ... 14
Table 7. Distribusi PDRB per Lapangan Usaha ... 22
Table 8. Laju Pertumbuhan Sektor PDRB Kabupaten Sikka ... 24
Table 9. Profil Kemiskinan Kabupaten Sikka ... 25
Table 10. Persentase Penduduk Miskin per-Kabupaten/Kota Se-Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tahun 2019-2023 ... 26
Table 11. Inflasi Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nasional ... 27
Table 12. Indeks Harga Konsumen Menurut Kelompok Pengeluaran Kabupaten Sikka Tahun 2020 – 2023 (Per Desember) ... 27
Table 13. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja ... 31
Table 14. Jumlah Desa berdasar Klasifikasi Desa Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023 ... 32
Table 15. Capaian Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023 ... 32
Table 16. Jumlah Tenaga Kesehatan Kabupaten Sikka yang tersebar di Puskesmas Tahun 2023 ... 44
Table 17. Rasio Panjang Jalan Kabupaten Per Satuan Penduduk ... 49
Table 18. Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023 ... 50
Table 19. Persentase Penegakan Perda dan Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023 ... 54
20. Kinerja Pelayanan Umum Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023 ... 54
Table 21. Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023 ... 58
Table 22. Keadaan Tenaga Kerja, Kesempatan Kerja dan Pengangguran Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023 ... 58
Table 23. Kinerja Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023 ... 59
Table 24. Sertifikat Hak Milik Pemerintah Tahun 2023 ... 62
Table 25. Capaian Kinerja Pelayanan Kependudukan Kabupaten Sikka 68
Table 26. Cakupan peserta KB aktif ... 70
Table 27. Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bus ... 75
Table 28. Medika di Kabupaten Sikka ... 75
Table 29. Aplikasi Layanan Publik Online Terintegrasi ... 77
Table 30. Titik Hotspot di Kabupaten Sikka ... 79
Table 31. Visat Tahun 2023 ... 79
Table 32. Kinerja Statistik Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022 ... 82
Table 33. Jumlah Sanggar Seni di Kabupaten Sikka ... 83
Table 34. Status Nelayan Kabupaten Sikka Tahun 2023 ... 88
Table 35. Jenis Alat Tangkap Yang Digunakan ... 89

Table 36. Jenis Armada yang digunakan Nelayan 89
Table 37. Jenis Komoditi yang dikirim keluar wilayah Kabupaten Sikka 90
Table 38. Data Obyek Daya Tarik Wisata Alam 97
Table 39. Data Obyek Daya Tarik Wisata Budaya Kabupaten Sikka 98
Table 40. Data Obyek Daya Tarik Wisata Rohani 100
Table 41. Data Obyek Daya Tarik Wisata Bahari Kabupaten Sikka 101
Table 42. Luas Areal dan Produksi dan Produktivitas Komoditi Perkebunan 104
Table 43. Opini BPK Atas Pengelolaan Keuangan Daerah 107
Table 44. Jumlah Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 108
Table 45. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah 108
Table 46. Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 108
Table 47. Jumlah ASN Kabupaten Sikka 109
Table 48. Data PNS Berdasarkan Golongan 109
Table 49. Jumlah Tindak Lanjut Hasil Temuan di Kabupaten Sikka s/d Tahun 2023 112
Table 50. Data Kependudukan Kelurahan Wuring, Kecamatan Wolomarang 115
Table 51. Data Penduduk Disabilitas Di Kelurahan Wuring, Kecamatan Wolomarang 115
Table 52. Kesehatan dan Stunting di Kelurahan Wuring 117
Table 53. Fasilitas Kesehatan di Kelurahan Wuring 119
Table 54. Sarana Pendidikan di Kelurahan Wuring 120
Table 55. Sosial-Politik Kelurahan Wuring 122
Table 56. Data Kemiskinan Kelurahan Wuring 123
Table 57. Data Kependudukan Desa Rubit 125
Table 58. Data Penduduk Disabilitas Di Kelurahan Rubit, Kecamatan Hewokloang 126
Table 59. Data Stunting Desa Rubit, Kecamatan Hewokloang 127
Table 60. Sarana Pendidikan di Desa Rubit 129
Table 61. Fasilitas Kesehatan Desa Rubit, Kecamatan Hewokloang 131
Table 62. Data Kemiskinan Desa Rubit 132
Table 63. Data Kependudukan Desa Nangahale, Kecamatan Talibura 135
Table 64. umlah Lembaga Pendidikan di Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, 2024 135
Table 65. Jumlah Fasilitas Kesehatan di Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, 2024 136
Table 66. Jumlah Penduduk Difabel di Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, 2024 137
Table 67. Data Stunting Balita di Desa Nangahale, Puskesmas Watubaing, 2024 139
Table 68. Distribusi Penduduk Miskin di Desa Nangahale Berdasarkan Desil, 2024 140
Table 69. Jumlah Penduduk Kelurahan Wolomarang Berdasarkan Jenis Kelamin, 2024 141
Table 70. Jumlah Lembaga Pendidikan di Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, 2024 142
Table 71. Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, 2024 143
Table 72. Jumlah Penduduk Difabel di Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, 2024 144

Table 73. Data Stunting di Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, 2024 145
Table 74. Distribusi Penduduk Miskin di Kelurahan Wolomarang Berdasarkan Desil, 2024 146
Table 75. Jumlah Penduduk Desa Tanarawa Berdasarkan Jenis Kelamin, 2024. 147
Table 76. Jumlah Lembaga Pendidikan di Desa Tanarawa, Kecamatan Waiblama, 2024 148
Table 77. Fasilitas Kesehatan Desa Tanarawa, Kecamatan Waiblama, 2024..... 149
Table 78. Jumlah Penduduk Difabel di Desa Tanarawa, Kecamatan Waiblama, 2024 150
Table 79. Data Stunting Balita di Desa Tanarawa, Kecamatan Waiblama, 2024 . 151
Table 80. Distribusi Penduduk Miskin di Desa Tanarawa Berdasarkan Desil, 2024 152
Table 81. Jumlah Penduduk Kelurahan Madawat Kecamatan Alok 153
Table 82. Sarana Pendidikan di Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok 154
Table 83 Fasilitas Kesehatan Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, 2024 155
Table 84. Jumlah Penduduk Difabel di Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, 2024 156
Table 85. Data Stunting Balita di Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, 2024.... 157
Table 86. . Distribusi Penduduk Miskin di Kelurahan Madawat Berdasarkan Desil, 2024 158
Table 87. Jumlah Penduduk Desa Umauta Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2024 160
Table 88. Jumlah Fasilitas Pendidikan di Desa Umauta, Kecamatan Bola (2024) 161
Table 89. Fasilitas Kesehatan di Desa Umauta, Kecamatan Bola..... 162
Table 90. Jumlah Penyandang Disabilitas di Desa Umauta, Kecamatan Bola 163
Table 91. Data Stunting di Desa Umauta, Kecamatan Bola 164
Table 92. Data Kemiskinan Berdasarkan Desil di Desa Umauta, Kecamatan Bola 166
Table 93. Jumlah Penduduk Desa Wairbleler, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka 167
Table 94. Fasilitas Pendidikan di Desa Wairbleler, Kecamatan Waigete..... 169
Table 95. Fasilitas Kesehatan di Desa Wairbleler, Kecamatan Waigete 170
Table 96. Jumlah Penyandang Disabilitas di Desa Wairbleler, Kecamatan Waigete 171
Table 97. Data Stunting di Desa Wairbleler, Kecamatan Waigete..... 173
Table 98. Data Kemiskinan Menurut Desil di Desa Wairbleler, Kecamatan Waigete 174
Table 99. Ringkasan Analisis Lintas Faktor Kasus Berganda Desil 2..... 274
Table 100. Ringkasan Analisis Lintas Faktor Kasus Berganda Desil 3: Kemiskinan Relatif (Madawat) 292
Table 101. Ringkasan Desil 4: Kemiskinan Menurun / Potensial Berdaya..... 322
Table 102. Pohon Masalah Kemiskinan Kabupaten Sikka 349
Table 103. Ringkasan Analisis Posisi Variabel dalam Pohon Masalah Kemiskinan Kabupaten Sikka 356
Table 104. Rencana Aksi Tahunan 2025–2030 Berbasis Kontinum Ekosistem Resiliensi,..... 387

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Geografis Kabupaten Sikka 7
Gambar 2. Peta Ketinggian Lahan Kabupaten Sikka 9
Gambar 3. Peta Hidrologi Kabupaten Sikka 11
Gambar 4. Peta curah hujan kabupaten sikka 13
Gambar 5. Peta Cekungan Air tanah Kabupaten Sikka 15
Gambar 6. Peta aliran sungai Kabupaten Sikka 16
Gambar 7. Lokasi danau, embung rawa di Kabupaten Sikka 17
Gambar 8. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (juta) 21
Gambar 9. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (juta) 22
Gambar 10. UHH Kabupaten Sikka Tahun 2019- 2023 29
Gambar 11. Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupatan Sikka 29
Gambar 12. Perkembangan Angka Melek Huruf (AMH) 30
Gambar 13. Angka Rata-Rata Lama Sekolah 31
Gambar 14. Angka Partisipasi Murni SD/MI 35
Gambar 15. Angka Partisipasi Murni SMP/MTs 36
Gambar 16. Angka Partisipasi Kasar SD/MI 37
Gambar 17. Angka artisipasi Kasar SMP/MTs 38
Gambar 18. Rasio guru murid jenjang SD/MI Kabupaten Sikka 39
Gambar 19. Rasio guru murid jenjang SMP/MTs Kabupaten Sikka 40
Gambar 20. Angka Kematian Bayi 41
Gambar 21. Perkembangan Angka Kematian Ibu 41
Gambar 22. Prevelensi Stunting 42
Gambar 23. Rasio Posyandu per-Satuan Balita 43
Gambar 24. Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan 43
Gambar 25. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh nakes yang memiliki kompetensi kebidanan 45
Gambar 26. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Imunization (UCI) 46
Gambar 27. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA .. 47
Gambar 28. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita DBD 47
Gambar 29. Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (>40 km/jam) Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023 49
Gambar 30. Jumlah Sarana Sosial 56
Gambar 31. Indeks Pembangunan Gender 60
Gambar 32. IDG Kabupaten Sikka 60
Gambar 33. Skor PPH Konsumsi dan Skor PPH Ketersediaan berdasarkan Analisis NBM 61
Gambar 34. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 66
Gambar 35. Volume Sampah yang tertangani diKabupaten Sikka (Ton) 67
Gambar 36. Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga 70
Gambar 37. Rasio Ijin Trayek 72
Gambar 38. Jumlah layanan kendaraan yang di uji Pada Tahun 2023 73
Gambar 39. Jumlah Angkutan Kota Per Rute Tahun 2023 73
Gambar 40. Jumlah Angkutan Yang Berbadan Hukum Tahun 2023 74
Gambar 41. Rasio Jumlah Perpustakaan Per 10.000 Penduduk 86
Gambar 42. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun 87

Gambar 43. Persentase Perangkat Daerah yang mengelolah arsip secara baku 88
Gambar 44. Jenis Komoditi yang dikirim keluar wilayah Kabupaten Sikka 92
Gambar 45. Konsumsi Ikan 92
Gambar 46. Bina Kelompok Perikanan 94
Gambar 47. Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Akomodasi dan Makan Minum Terhadap PDRB 95
Gambar 48. Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan 96
Gambar 49. Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Pertanian Terhadap PDRB 102
Gambar 50. Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Perkebunan 103
Gambar 51. Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Perdagangan Terhadap PDRB 105
Gambar 52. Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Industri Terhadap PDRB 106
Gambar 53. Model Kontinum Kegagalan- Keberhasilan 359

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu tantangan klasik dalam pembangunan yang terus mengalami redefinisi baik secara konseptual maupun kebijakan. Selama beberapa dekade terakhir, orientasi kebijakan penanggulangan kemiskinan telah bergerak dari pendekatan yang bersifat karitatif menuju pendekatan yang lebih struktural, partisipatoris, dan berbasis bukti. Perubahan ini sejalan dengan pemahaman baru bahwa kemiskinan tidak sekadar ketiadaan pendapatan, melainkan berkaitan erat dengan keterbatasan akses terhadap layanan dasar, rendahnya kapasitas individu, ketimpangan geografis, serta ketidakberdayaan sosial dan politik. Seperti dikemukakan oleh Amartya Sen (1999), kemiskinan harus dilihat sebagai "*deprivation of basic capabilities*," bukan hanya rendahnya penghasilan semata. Perspektif ini menuntut adanya kebijakan publik yang mampu mengatasi akar struktural kemiskinan dengan pendekatan yang kontekstual dan berkelanjutan.

Dalam konteks Indonesia, kebijakan penanggulangan kemiskinan telah menjadi agenda prioritas nasional dan daerah. Berbagai instrumen kelembagaan telah dibentuk untuk mendukung hal ini, mulai dari pembentukan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS-NG), hingga kebijakan berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Namun, efektivitas kebijakan sangat bergantung pada kemampuan daerah dalam mengimplementasikan program secara tepat sasaran, adaptif terhadap konteks lokal, dan mampu menjangkau kelompok rentan secara akurat dan berkeadilan.

Evaluasi kebijakan menjadi bagian penting dari siklus kebijakan publik yang tidak hanya bertujuan untuk menilai keberhasilan teknokratis (*output* dan *outcome*), tetapi juga untuk mengkaji relevansi, efisiensi, dampak, dan keberlanjutan suatu kebijakan (Patton, 2015; Weiss, 1999). Evaluasi yang komprehensif memungkinkan pemerintah daerah tidak hanya mengetahui sejauh mana tujuan program tercapai, tetapi juga mengidentifikasi hambatan implementasi, ketimpangan distribusi manfaat, serta potensi inovasi kebijakan. Dalam literatur evaluasi kebijakan, konsep "*utilization-focused evaluation*" (Patton, 2008) menekankan pentingnya menjadikan hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan berkelanjutan, bukan sekadar laporan administratif.

Salah satu daerah yang menghadirkan dinamika menarik dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan adalah Kabupaten Sikka di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Secara statistik, Sikka menunjukkan tren positif dalam penurunan angka kemiskinan. Berdasarkan data Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sikka Tahun 2024, jumlah penduduk miskin pada tahun 2023 tercatat sebanyak 40.810 jiwa atau sekitar 12,56% dari total penduduk, menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai 12,61%. Namun, angka ini masih lebih tinggi dari rata-rata nasional (9,36%) dan menunjukkan bahwa Kabupaten Sikka tetap menghadapi persoalan kemiskinan yang bersifat struktural dan geografis.

Yang menjadi lebih penting bukan sekadar angka statistik, melainkan bagaimana kebijakan dan program yang telah dilaksanakan mampu menjawab karakteristik kemiskinan lokal yang sangat beragam. Kabupaten Sikka memiliki tipologi wilayah yang kompleks: desa-desa pesisir yang rentan terhadap degradasi sumber daya laut dan abrasi; desa pegunungan yang menghadapi keterisolasian fisik; dan kawasan perkotaan yang mengalami kemiskinan perkotaan dan pengangguran terselubung. Kondisi ini menuntut pendekatan kebijakan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan lokal masing-masing wilayah. Evaluasi yang bersifat menyeluruh sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dirancang tidak sekadar berbasis pada skema pusat, tetapi mampu menjawab kebutuhan faktual warga miskin Sikka.

Sejauh ini, Pemerintah Kabupaten Sikka telah mengalokasikan anggaran cukup besar untuk program-program penanggulangan kemiskinan. Pada tahun 2023, total belanja penanggulangan kemiskinan dari berbagai sektor (pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat) mencapai Rp 128,91 miliar, meningkat dari Rp 111,08 miliar pada tahun 2022. Namun, pertanyaannya adalah sejauh mana anggaran tersebut benar-benar berdampak terhadap perubahan substantif dalam kehidupan masyarakat miskin? Bagaimana desain dan pelaksanaan program tersebut dievaluasi, dan sejauh mana umpan balik dari masyarakat miskin menjadi bagian dari siklus kebijakan?.

Pertanyaan-pertanyaan evaluatif tersebut menjadi krusial mengingat sejumlah catatan kritis yang muncul dari hasil simulasi verifikasi dan validasi data P3KE Kabupaten Sikka tahun 2023. Proses verval menunjukkan adanya deviasi yang signifikan antara data awal dan hasil koreksi di lapangan. Jumlah kepala keluarga (KK) miskin yang semula tercatat sebanyak 31.834 menyusut menjadi 28.446 setelah verval, dengan ditemukan 1.088 KK baru dan 4.476 kasus kesalahan data (*data error*). Pada tingkat individu, data menunjukkan penyusutan dari 139.102 jiwa menjadi 117.018 jiwa, dengan *error data* sebesar 10.607 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa validitas data dasar untuk kebijakan penanggulangan kemiskinan masih jauh dari ideal.

Seperti dikemukakan oleh Grosh et al. (2008), sistem penargetan bantuan sosial yang tidak akurat akan menciptakan *leakage and undercoverage*: yaitu masuknya kelompok yang tidak berhak dan tertinggalnya kelompok miskin sejati dari jangkauan program. Dalam jangka panjang, kondisi ini bukan hanya menyebabkan pemborosan fiskal, tetapi juga memperburuk ketidakpercayaan publik terhadap negara dan melemahkan legitimasi kebijakan sosial.

Selain masalah data, catatan penting lainnya dalam evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Sikka adalah fragmentasi program dan tumpang tindih antar instansi pelaksana. Menurut RAT Sikka, lebih dari 10 OPD terlibat dalam implementasi kebijakan kemiskinan, namun koordinasi antar sektor seringkali berjalan parsial. Banyak program berjalan dalam kerangka sektoral yang sempit, tanpa integrasi perencanaan lintas desa atau lintas wilayah. Hal ini berisiko menciptakan duplikasi program dan lemahnya akuntabilitas kebijakan.

Dalam laporan evaluasi internal tahun 2023, Bappeda Kabupaten Sikka mengakui bahwa belum semua program mengadopsi pendekatan berbasis data terkini dan tidak semua desa memiliki kemampuan kelembagaan yang cukup untuk menyusun perencanaan dan penganggaran yang responsif terhadap kemiskinan. Beberapa desa justru belum pernah menggunakan hasil verifikasi data sebagai dasar pengambilan keputusan, menandakan adanya gap administratif dan teknokratis antara level kabupaten dan desa.

Salah satu dimensi penting dalam evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan adalah mempertimbangkan konteks sosial-politik lokal, termasuk keberadaan dan kualitas modal sosial di tingkat komunitas. Woolcock dan Narayan (2000) menjelaskan bahwa modal sosial merupakan prasyarat penting bagi keberhasilan pembangunan karena mencerminkan kapasitas kolektif masyarakat untuk mengakses sumber daya, menyelesaikan konflik, dan mendorong partisipasi. Dalam kerangka evaluasi, keberadaan modal sosial yang kuat dapat menjadi variabel penting yang menjelaskan mengapa program dengan desain serupa menghasilkan capaian berbeda di lokasi yang berbeda. Namun, mekanisme ini tidak selalu sinergis dengan sistem kebijakan formal yang diterapkan oleh pemerintah. Dalam banyak kasus, program pemerintah yang tidak melibatkan struktur informal lokal mengalami resistensi, atau malah hanya menyasar elite lokal tanpa menyentuh kelompok miskin sejati.

Literatur evaluasi kebijakan menggarisbawahi pentingnya memahami konteks lokal dan aktor-aktor informal dalam proses implementasi. Seperti yang dikemukakan oleh Pressman dan Wildavsky (1984), keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada jaringan pelaksana di tingkat bawah, termasuk relasi antar aktor formal dan informal. Namun, hasil evaluasi internal Pemerintah Kabupaten Sikka menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam siklus kebijakan masih rendah, terutama pada tahap perencanaan dan pengawasan. Forum musrenbang desa belum secara optimal digunakan untuk menyuarakan kebutuhan kelompok miskin, dan masih didominasi oleh kelompok elite desa. Selain itu, tidak semua desa memiliki kapasitas untuk menganalisis data kemiskinan dan menerjemahkannya dalam bentuk usulan kegiatan yang berbasis kebutuhan nyata.

Kondisi ini selaras dengan temuan Gaventa dan Barrett (2012) yang mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan tidak otomatis menghasilkan transformasi sosial, kecuali jika partisipasi tersebut bersifat deliberatif, inklusif, dan didukung oleh struktur kelembagaan yang adil. Evaluasi kebijakan yang tidak memperhitungkan dimensi ini cenderung mengabaikan faktor-faktor kunci yang mempengaruhi efektivitas implementasi.

Lebih jauh, banyak desa di Sikka yang belum memiliki mekanisme pemantauan internal atau sistem akuntabilitas berbasis komunitas dalam pelaksanaan program kemiskinan. Pengawasan program masih bersifat administratif-*top-down* dan tidak berbasis pada kontrol sosial horizontal. Padahal, sebagaimana dijelaskan oleh Fox (2015), keberadaan *social accountability mechanisms* sangat penting dalam memastikan

agar bantuan sosial dan program pemberdayaan tidak hanya menjangkau masyarakat miskin, tetapi juga meningkatkan kepercayaan dan akuntabilitas antar pihak.

Kelemahan partisipasi komunitas dan akuntabilitas sosial ini berdampak pada tingkat efektivitas program. Misalnya, dalam program bantuan langsung tunai, sejumlah warga menyatakan tidak mengetahui dasar penetapan penerima manfaat dan mekanisme pengaduan. Program padat karya juga kerap dijalankan tanpa pelibatan warga miskin sebagai target utama. Kondisi semacam ini menunjukkan bahwa kebijakan yang "berhasil" secara administratif, misalnya karena serapan anggaran tinggi atau laporan output terpenuhi, belum tentu berhasil secara substantif dari perspektif masyarakat miskin itu sendiri.

Dalam banyak kasus, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga gagal menyasar dimensi ketahanan jangka panjang. Sebagian besar program masih bersifat temporer dan reaktif, tidak memiliki komponen pembangunan kapasitas (*capacity building*) atau *exit strategy yang jelas*. Seperti dicatat oleh De Janvry et al. (2006), kebijakan yang hanya memberikan bantuan tanpa memfasilitasi jalan keluar dari kemiskinan akan memperkuat ketergantungan (*dependency trap*) dan membatasi mobilitas ekonomi penerima manfaat.

Hal ini diperparah dengan minimnya evaluasi dampak jangka panjang (*long-term impact assessment*) terhadap program-program kemiskinan di Kabupaten Sikka. Sebagian besar evaluasi yang dilakukan masih bersifat teknokratik dan menekankan pada indikator *input-output*, seperti jumlah bantuan disalurkan, jumlah penerima manfaat, atau capaian serapan anggaran. Pendekatan ini luput mengkaji apakah program benar-benar menciptakan transformasi sosial, peningkatan kemandirian, atau pelepasan dari perangkap kemiskinan.

Padahal, pendekatan evaluasi berbasis teori perubahan (*theory of change*) yang kini digunakan secara luas dalam evaluasi pembangunan internasional menyarankan agar evaluasi kebijakan tidak hanya bertumpu pada pertanyaan "apa yang dicapai?" tetapi juga "bagaimana dan mengapa capaian itu terjadi (atau tidak terjadi)?" (Weiss, 1999; Stein & Valters, 2012). Dengan mengadopsi pendekatan ini, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi titik-titik kegagalan dalam rantai nilai kebijakan dan mengembangkan inovasi kelembagaan untuk memperkuat efektivitas dan keberlanjutan program.

Melihat berbagai permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sikka, mulai dari ketidak-tepatan data, lemahnya koordinasi antar-sektor, partisipasi komunitas yang terbatas, hingga kurangnya evaluasi dampak jangka panjang, maka muncul kebutuhan mendesak akan paradigma evaluasi kebijakan yang lebih transformatif. Evaluasi transformatif tidak hanya berfokus pada pencapaian indikator teknis, tetapi juga mengungkap asumsi-asumsi dasar yang melandasi desain program, menilai sejauh mana kebijakan mampu memperkuat posisi sosial kelompok rentan, dan mendorong perubahan kelembagaan secara struktural (Greene, 2005; Mertens, 2009).

Kabupaten Sikka sebagai unit administratif yang mencerminkan beragam kompleksitas wilayah Indonesia bagian timur, membutuhkan sistem evaluasi yang tidak

hanya mengukur *output* dan *outcome* program, tetapi juga mengaitkan pelaksanaan kebijakan dengan konteks sosial, budaya, dan geografis masyarakatnya. Dalam laporan RAT 2024, disebutkan bahwa dari total 194 desa dan kelurahan, hanya 36% desa yang aktif dalam forum perencanaan kemiskinan berbasis data terkini. Ini menandakan bahwa proses evaluasi belum melibatkan aktor lokal secara substansial.

Dalam konteks evaluasi transformatif, keadilan sosial (*social justice*) menjadi salah satu pilar utama. Evaluasi yang adil harus mampu mengungkap siapa yang diuntungkan dan siapa yang terpinggirkan oleh kebijakan. Ini penting karena seringkali program sosial justru diperkuat oleh relasi kuasa lokal yang tidak inklusif. Studi oleh Hickey dan Mohan (2005) menunjukkan bahwa tanpa kritik terhadap struktur kekuasaan lokal, partisipasi hanya menjadi prosedur formalitas dan tidak menghasilkan transformasi substantif. Oleh karena itu, penelitian ini memandang bahwa evaluasi kebijakan di Kabupaten Sikka perlu difokuskan pada relasi antar-aktor (pemerintah, desa, tokoh adat, dan warga miskin) dalam proses desain, implementasi, dan monitoring kebijakan.

Lebih dari itu, pendekatan evaluatif dalam studi ini juga mempertimbangkan konsep *governance* adaptif, yakni kemampuan pemerintah daerah untuk menyesuaikan desain kebijakan berdasarkan masukan evaluasi, konteks lokal, dan dinamika sosial-ekonomi masyarakat. *Adaptive governance* menekankan pentingnya *feedback loop*, pembelajaran kelembagaan, dan fleksibilitas kebijakan untuk merespons perubahan kebutuhan di lapangan (Brunner et al., 2005). Dalam konteks Sikka, pendekatan ini menjadi penting mengingat tantangan kemiskinan sangat dinamis dan tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan satu ukuran untuk semua (*one-size-fits-all*).

Riset ini, dengan demikian, memposisikan dirinya dalam dua ranah sekaligus. Pertama, secara empiris, riset ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dan ketepatan program penanggulangan kemiskinan yang telah dijalankan Pemerintah Kabupaten Sikka tahun 2023–2024, baik yang bersifat kuratif (BLT, bansos), preventif (akses pendidikan dan kesehatan), maupun rehabilitatif (padat karya, pemulihan pasca-bencana). Evaluasi dilakukan dengan mengaitkan tipe program dengan karakteristik wilayah, daya dukung kelembagaan desa, serta tipologi rumah tangga miskin. Kedua, secara konseptual, riset ini menyumbangkan kerangka evaluasi berbasis konteks lokal dan transformatif, yang menggabungkan pendekatan evaluasi teknokratis dengan nilai-nilai keadilan sosial dan pemberdayaan komunitas.

Akhirnya, penelitian ini memiliki urgensi strategis bagi Pemerintah Kabupaten Sikka, terutama dalam rangka menyusun kebijakan pengentasan kemiskinan yang lebih responsif, inklusif, dan berkelanjutan. Rekomendasi dari riset ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penguatan perencanaan pembangunan, peningkatan validitas data, perbaikan sistem *targeting*, serta reformulasi mekanisme pelibatan komunitas dalam evaluasi kebijakan. Dalam jangka panjang, kontribusi riset ini tidak hanya bersifat lokal, tetapi juga dapat memberikan pelajaran bagi kabupaten-kabupaten lain di Indonesia Timur yang memiliki tantangan dan kompleksitas serupa dalam penanggulangan kemiskinan.

1.2. Dasar Hukum

1.2.1. Dasar Hukum Kebijakan Penyusunan Dokumen Kajian Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sikka:

a. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
b. Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggukangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;
e. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
f. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional.

1.2.2. Dasar Hukum Pelaksanaan Kegiatan Kajian Evaluasi Kebijakan Penangggulangan Kemiskinan

1. MOU Kabupaten Sikka dengan Undana
2. Surat Kontrak Kajian Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

BAB II. KONDISI UMUM KABUPATEN SIKKA

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Aspek Geografis

2.1.1.1. Letak, Batas dan Luas Wilayah

Kabupaten Sikka terletak di Pulau Flores, memiliki luas wilayah1.731,91Km^2 atau 173.191 Ha dengan batas-batas administrasi wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Laut Flores;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Flores Timur;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Ende;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Laut Sawu.

Secara geografis Kabupaten Sikka terletak antara 80 22’ LS sampai dengan 80 50’ LS dan 121º 55’ 40” BT sampai 122º 41’ 30” BT

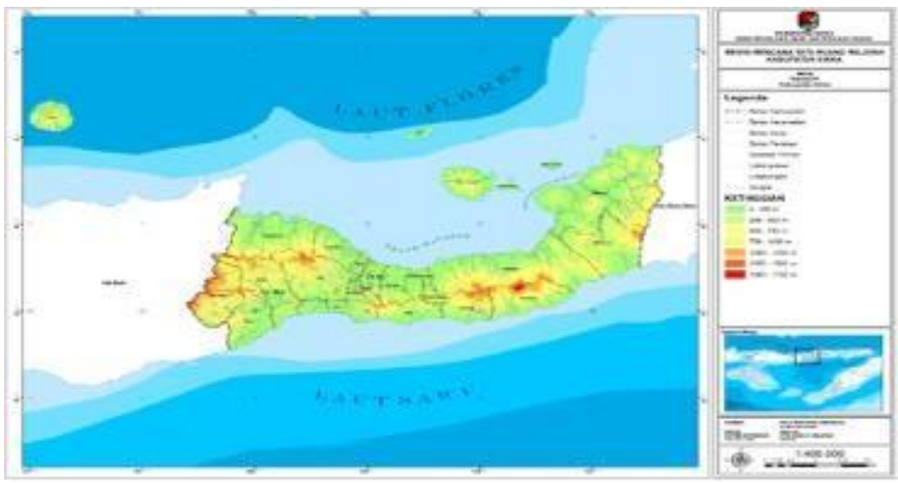

Gambar 1. Peta Geografis Kabupaten Sikka

Sumber : Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2024

Secara administratif Kabupaten Sikka terbagi atas 21 Kecamatan, 13 Kelurahan, 181 Desa. Kecamatan dengan desa terbanyak terdapat di Kecamatan Talibura sebanyak 20 desa, sedangkan kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan paling sedikit adalah Kecamatan Mapitara sebanyak 4 desa dan Kecamatan Alok Barat sebanyak 4 kelurahan.

Nama kecamatan dan ibukota kecamatan dan luas wilayah per kecamatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Table 1. Nama Ibukota Kecamatan dan Luas Wilayah Per Kecamatan

No	Kecamatan	Ibukota	Luas Wilayah	
			Km	%
1	Paga	Paga	82,85	4,78
2	Tanawawo	Wolofeo	79,78	4,61
3	Mego	Lekebai	111,26	6,42
4	Lela	Lela	31,33	1,81
5	Bola	Bola	56,83	3,28
6	Doreng	Edat	30,41	1,76
7	Mapitara	Hebing	81,02	4,61
8	Talibura	Talibura	260,11	15,02
9	Waiblama	Tanarawa	144,36	8,34
10	Waigete	Waigete	217,65	12,57
11	Kewapante	Kewapante	24,14	1,39
12	Hewokloang	Baowunut	17,58	1,02
13	Kangae	Waipare	38,43	2,22
14	Nelle	Nelle Urung	14,65	0,85
15	Koting	Koting B	23,56	1,36
16	PaluE	Uwa	41	2,37
17	Nita	Nita	141,07	8,15
18	Magepanda	Magepanda	166,15	9,59
19	Alok	Kota Uneng	14,64	0,85
20	Alok Barat	Wailiti	62,75	3,62
21	Alok Timur	Waioti	92,34	5,33
	JUMLAH		1.731,91	100

Sumber : Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2024

Berdasarkan data luas wilayah per kecamatan di atas dapat dijelaskan bahwa kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Talibura dengan luas wilayah 260,11 Km^2 atau 15,02%, sedangkan kecamatan yang paling kecil luas wilayahnya adalah Kecamatan Alok 14,64 Km^2 atau 0,85%.

2.1.1.2. Topografi

Topografi adalah keadaan permukaan bumi pada suatu kawasan atau daerah. Berdasarkan peta ketinggian lahan di atas dapat dijelaskan bahwa topografi Kabupaten Sikka diklasifikasikan dalam lima kelas ketinggian dengan uraian sebagai berikut:

1. Topografi dengan ketinggian 0-25 m dpl, yaitu dengan luas 29.863 Ha atau 17,24%;
2. Topografi dengan ketinggian 25-100 m dpl, yaitu dengan luas 20.843 Ha atau 12,03%;
3. Topografi dengan ketinggian 100-500 m dpl, yaitu seluas 48.171 Ha atau 27,81%;
4. Topografi dengan ketinggian 500-1000 m dpl, yaitu seluas 70.216 Ha atau 40,54%;

5. Topografi dengan ketinggian lebih dari 1000 m dpl, yaitu seluas 4.098 ha atau 2,37%

Gambar 2.2.
Peta Ketinggian Lahan Kabupaten Sikka

Gambar 2. Peta **Ketinggian** Lahan Kabupaten Sikka

Sumber: RTRW Kabupaten Sikka, 2012–2032

2.1.1.3. Klimatologi

Klimatologi merupakan gambaran dan penjelasan sifat iklim di suatu wilayah yang terdiri dari komponen suhu udara, kelembapan udara, tekanan udara, curah hujan, dan hari hujan. Kondisi suhu udara dan kelembaban udara di wilayah Kabupaten Sikka dapat dilihat pada tabel berikut.

Table 2. Kondisi Suhu Udara dan Kelembaban Udara Kabupaten Sikka Tahun 2023

Bulan	Suhu Udara (C)			Kelembaban Udara (%)		
	Minimum	Rata-rata	Maksimum	Minimum	Rata-rata	Maksimum
Januari	22.20	27.44	33.40	56.00	81.10	99.00
Februari	23.00	26.63	31.60	70.00	88.07	99.00
Maret	23.10	27.54	34.70	57.00	82.35	97.00
April	22.40	27.69	34.40	56.00	80.47	98.00
Mei	22.20	27.66	34.00	46.00	71.06	88.00
Juni	21.80	27.00	34.00	47.00	73.97	99.00
Juli	22.00	27.00	33.10	44.00	72.45	98.00
Agustus	19.60	26.84	35.10	31.00	64.52	87.00
September	19.60	27.23	35.30	24.00	62.63	89.00
Oktober	22.80	28.47	35.40	51.00	68.81	81.00
November	23.20	29.69	36.80	46.00	69.37	97.00
Desember	23.70	29.44	36.80	48.00	73.74	93.00

Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Kabupaten dikelilingi oleh Laut Flores dan Laut Sawu dengan iklim tropis yang terbagi menjadi 2 musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Wilayah di kabupaten memiliki suhu yang cenderung panas. Dari stasiun meteorologi Maumere tercatat suhu maksimum pada tahun 2023 adalah pada bulan November dan Desember 36,80°C dan suhu minimum pada bulan Agustus dan September 19,60°C. Kelembaban udara minimum terjadi pada bulan September sebesar 24%. Sebaliknya kelembaban tertinggi terjadi pada Bulan Januari sampai Februari dan Juni dengan besaran 99%. Sedangkan secara umum rata-rata curah hujan dan hari hujan dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Table 3. Jumlah Curah Hujan dan Jumlah Hari Hujan Kabupaten Sikka Tahun 2023

Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan (hari)	Penyinaran Matahari (Jam)
Januari	126.20	16	96.8
Februari	385.30	24	91.0
Maret	43.00	13	96.8
April	104.20	18	95.9
Mei	1.00	4	100.0
Juni	77.10	5	96.7
Juli	7.70	5	100.0
Agustus	0.20	1	97.3
September	0.00	1	100.0
Oktober	1.00	3	100.0
November	38.80	12	100.0
Desember	79.70	18	100.0

Sumber: BMKG Kabupaten Sikka, 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Curah hujan terendah terjadi pada Bulan September karena tidak ada hujan, sedangkan curah hujan tertinggi terjadi pada Bulan Februari 385,30 mm. sedangkan Penyinaran matahari terendah pada bulan Februari sebesar 91 jam dan tertinggi pada bulan Mei, Juli, September, Oktober, November dan Desember sebesar 100 Jam.

Kecepatan angin dan tekanan udara di Kabupaten Sikka secara detail dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Table 4. Rata-rata Kecepatan Angin dan Tekanan Udara

Bulan	Kecepatan Angin (Knot)			Tekanan Udara (mb)		
	Minimum	Rata-rata	Maksimum	Minimum	Rata-rata	Maksimum
Januari	1.28	2.19	8.23	1.003,90	1.006,42	1.009,70
Februari	1.28	2.16	7.71	1.004,10	1.006,10	1.008,20
Maret	1.49	1.91	6.17	1.006,00	1.008,36	1.011,50
April	1.64	2.22	7.20	1.006,20	1.007,60	1.010,40
Mei	1.69	3.13	7.20	1.006,20	1.010,32	1.013,60

Juni	1.54	2.59	7.20	1.007,90	1.010,14	1.011,60
Juli	2.05	3.11	7.20	1.009,40	1.011,01	1.013,10
Agustus	1.23	2.48	8.74	1.010,70	1.012,20	1.014,50
Septembe r	1.80	2.29	7.71	1.010,50	1.011,49	1.012,50
Oktober	1.69	2.27	8.23	1.009,50	1.011,37	1.012,50
November	1.54	2.35	7.71	1.006,70	1.008,74	1.010,30
Desember	1.64	2.34	7.71	1.005,10	1.007,63	1.010,50

Sumber : BMKG Kabupaten Sikka, 2024

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa tekanan udara tertinggi terjadi pada bulan Agustus tahun 2023 sebesar 1014,50 mb dan tekanan udara terendah terjadi pada bulan Februari tahun 2023 sebesar 1008,20 mb. Kecepatan angin tertinggi pada bulan Agustus tahun 2023 sebesar 8,74 knot, sedangkan kecepatan angin terendah terjadi pada bulan Maret tahun 2023 sebesar 6,17 knot.

2.1.1.4. Hidrologi

Kondisi Hidrologi adalah keadaan yang menggambarkan tentang air di bawah tanah, ketersediaannya, peredaran dan sebarannya, sifat kimia dan fisikanya, reaksi dengan lingkungan termasuk hubungannya dengan makhluk hidup di suatu wilayah. Kondisi hidrologi Kabupaten Sikka dapat dilihat pada gambar berikut.

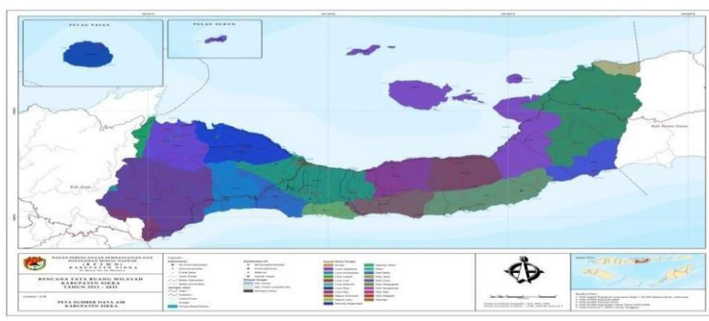

Gambar 3. Peta Hidrologi Kabupaten Sikka

Sumber : RTRW Kabupaten Sikka, 2012 – 2032

Berdasarkan Peta Hidrologi tersebut dapat dijelaskan bahwa potensi sumber air di wilayah Kabupaten Sikka dapat diidentifikasi dari tiga sumber yaitu air hujan, air tanah dan air permukaan;

1) Sumber Air Hujan dan Air Hujan

Sumber air hujan di wilayah Kabupaten Sikka dipengaruhi oleh iklim dan curah hujan. Pada umumnya kondisi iklim di wilayah ini dipengaruhi oleh angin muson yang mengakibatkan kering, dengan

musim hujan yang pendek yang jatuh pada sekitar bulan November hingga Mei. Akibat rendahnya curah hujan dan sedikitnya hari hujan sangat mempengaruhi keadaan air tanah dan keadaan debit air sungai yang ada di wilayah Kabupaten Sikka. Data curah hujan pertahun dari 2018 hingga 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Table 5. Data Curah Hujan Kabupaten Sikka

Bulan	2018-2019		2019-2020		2020-2021		2021-2022		2022-2023	
	Curah hujan (mm)	Hari hujan (hh)	Curah hujan (mm)	Hari hujan (hh)	Curah hujan (mm)	Hari hujan (hh)	Curah hujan (mm)	Hari hujan (hh)	Curah hujan (mm)	Hari hujan (hh)
Januari	166,7	23	311,3	20	80,9	18	181	17	126,20	16
Februari	225,3	16	219,3	14	99	20	409,8	24	385,30	24
Maret	65,6	8	115,2	16	81,5	19	154,3	15	43,00	13
April	16,3	3	42,8	9	102,7	10	94,3	9	104,20	18
Mei	-	-	15	2	116,4	12	-	-	1,00	4
Juni	-	-	4	1	24,1	5	22,8	5	77,10	5
Juli	-	-	-	-	-	1	-	-	7,70	5
Agustus	12,9	3	-	-	0,4	3	9,3	4	0,20	1
September	0,5	1	TTU	1	1,5	3	27,6	5	-	1
Oktober	21,6	1	12,5	2	18,4	9	28	3	1,00	3
November	76,2	15	18	4	54,5	15	287,2	17	38,80	12
Desember	288,4	18	93,6	10	381,9	24	210,5	16	79,70	18

TTU : hujan tidak terukur

(Sumber : BPS Sikka dalam Angka, 2019-2024)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan peta curah hujan berdasarkan RDTR Kabupaten Sikka. Didalam peta terlihat bahwa daerah dengan curah hujan yang paling tinggi yaitu sekitar 200-300 mm meliputi wilayah Talibura. Data curah hujan sekitar 150 – 200 mm meliputi Sebagian wilayah Waiblama. Kemudian data curah hujan 100 -150 mm meliputi daerah Mapitara, Doreng, dan sebagian wilayah Lela. Selain wilayah yang disebutkan sebelumnya, merupakan daerah dengan catatan curah hujan rendah.

Gambar 2. 5

Peta curah hujan kabupaten sikka

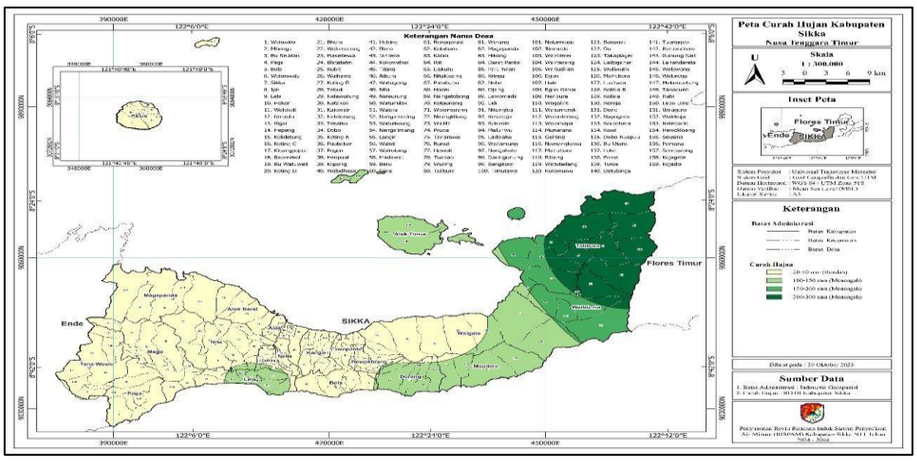

Gambar 4. Peta curah hujan kabupaten sikka

Sumber : Dokumen RISPAM 2024-2044

2) Air Tanah

Struktur batuan geologi wilayah Kabupaten Sikka sangat mempengaruhi terhadap potensi air tanah, batuan yang terdapat di wilayah ini, yaitu batuan gunung api kuarter dan alluvial, secara umum menunjukkan potensi air tanah yang baik. Struktur hidrogeologi wilayah ini cenderung kompleks dan sangat dipengaruhi oleh aktivitas tektonik dan vulkanik pada masa lampau. Aliran air tanah mengalir melalui celah antar butir (pasir dan butiran batu halus), mengalir di antara retakan dan celah batuan keras, aliran melalui celah, retakan dan saluran. Sumber air tanah ini sangat dipengaruhi oleh produktifitas aquifernya.

Menurut (Jone, 2018) diketahui bahwa kedalaman muka air tanah sangat dalam dibagian Tenggara daerah penelitian yaitu wilayah Kopong, Kecamatan kewapante dan dangkal dibagian Barat Laut daerah penelitian yaitu wilayah Kolisia sampai wilayah Magepanda. Kedalaman muka air tanah ini mengikuti keadaan topografi daerah setempat. wilayah potensi air tanah sedang - tinggi dengan debit aliran berkisar

8.47 – 17.05 liter/detik meliputi wilayah Kecamatan Magepanda dan Bagian Barat Kecamatan Alok Barat dan wilayah potensi air tanah kecil – sedang dengan debit aliran berkisar 1.59 – 8.31 liter/detik meliputi wilayah Kecamatan Alok Barat, Alok Timur, Kangae, Kewapante, Bagian Utara Kecamatan Nita, Nele dan Koting.

Table 6. Wilayah potensi air tanah di CAT Maumere

Potensi	**Wilayah**
Tinggi	Kecamatan Magepanda dan Bagian Barat Kecamatan Alok Barat
Rendah	Bagian Barat Magepanda, Barat – Barat Laut Magepanda dan Bagian Utara Magepanda
Tinggi	Kecamatan Alok Barat, Alok Timur, Bagian Utara AlokTimur, Kangae, Bagian Utara Kangae, Kewapante, Waigete, Hewokloang
Rendah	Bagian Utara Kecamatan Nita, Nele, Koting, Bagian Selatan Kecamatan Kangae, dan Selatan KecamatanKewapante

Gambar 2. 6

Peta Cekungan Air tanah Kabupaten Sikka

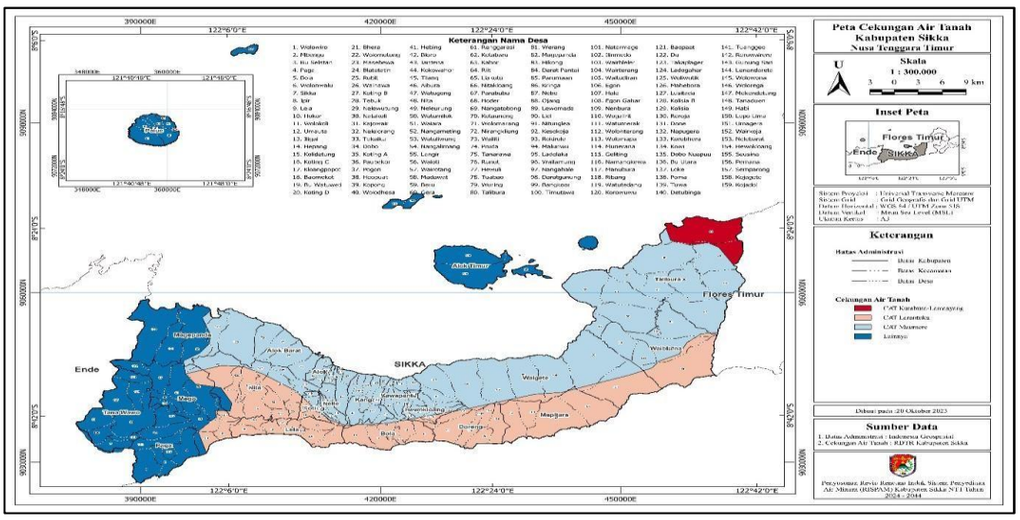

Gambar 5. Peta Cekungan Air tanah Kabupaten Sikka

Sumber : Dokumen RISPAM 2024-2044

Selain potensi air tanah yang ditunjukkan pada data cekungan air tanah, Kabupaten Sikka juga tersebar sumur-sumur sebagai sumber air utama untuk memenuhi kebutuhan air baku.

3) Air Permukaan

Air permukaan berasal dari air sungai-sungai yang berada di wilayah Kabupaten Sikka dalam skala kecil dan sedang. Iklim yang relatif kering dan musim hujan yang berlangsung hanya 3-4 bulan dalam setahun menyebabkan sungai-sungai tersebut juga banyak yang kering terutama pada musim kemarau. Pola aliran sungai di wilayah ini pada umumnya adalah dendritik, yaitu aliran sungai yang membentuk cabang pohon, berair pada musim hujan dan kering/berkurang debitnya pada musim kemarau. Berdasarkan data yang ada, jumlah sungai yang mengalir di wilayah ini hampir terdapat di semua kecamatan, tetapi pada umumnya hanya mengalir pada musim hujan. (Tatanan Transportasi Lokal Kabupaten Sikka, 2021). Visualiasi dari letak sungai yang tersebari di Kabupaten Sikka dengan total panjang sungai sekitar 4,342.56 km dari data natural RDTR dapat diihat pada gambar berikut.

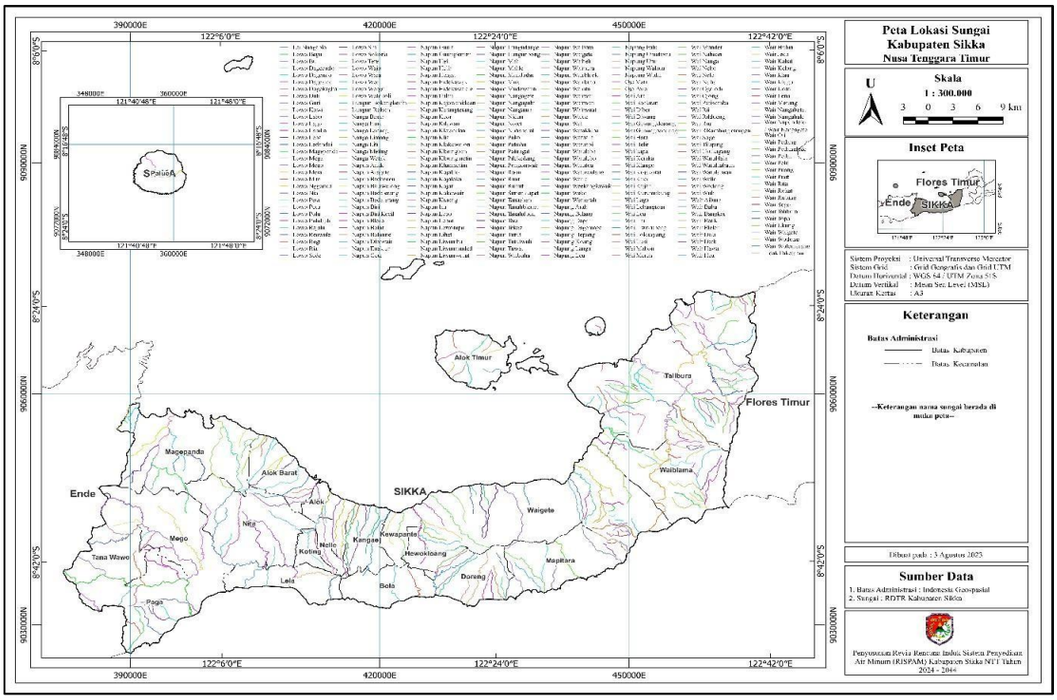

Gambar 6. Peta aliran sungai Kabupaten Sikka

Sumber : Dokumen RISPAM 2024-2044

Selain Sungai, Kabupaten Sikka memiliki danau dan rawa. Kabupaten Sikka memiliki 4 danau di Desa Hale, Egon Gahar, Wair Bleler, Semparong. Pada beberapa daerah juga memiliki rawa yang berpotensi untuk dimanfaatkan, yaitu berjumlah 7 yang berlokasi di Desa Wolomarang, Runut, Magepanda, Darat Pantai, Wailamung, Parumaan, Semparong. Dan juga memiliki 12 embung yang tersebar di Kabupaten Sikka. Tetapi untuk air rawa yada pada umumnya memiliki kualitas air yang sulit diolah maka menurut Kemenkes-Permenkes no.492 tahun 2010, mengolah air rawa menjadi air bersih harus melalui saringan secara fisik dan pengolahan secara kimia dan biologi agar air yang menjadi hasil olahan bisa digunakan untuk air minum. Pengolahan air rawa menjadi air bersih bisa dilakukan dengan cara saringan secara fisik yang terdiri dari pasir, krikil halus, krikil kasar, ijuk serta arang. Tetapi untuk mengolah air rawa menjadi air minum tidak dapat hanya memenui syarat fisik, namun harus memenuhi secara kimia dan biologi (menambahkan tawas sebagai koagulant dan kaporit sebagai zat pembunuh bakteri) agar air tersebut bisa digunakan arang serta memenuhi persyaratan untuk air minum. Untuk menghilangkan bau bisa digunakan arang beserta ijuk yang bisa berfungsi untuk menyerap aroma yang terdapat didalam air.

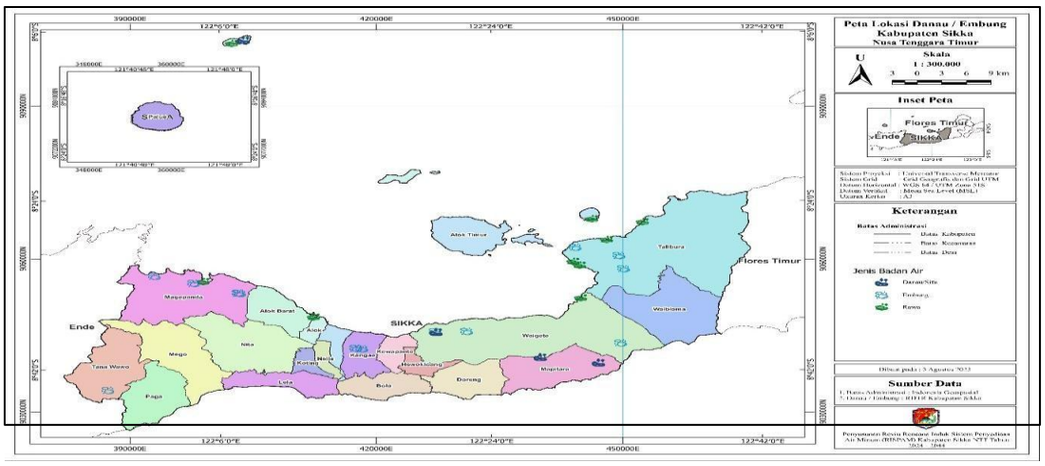

Gambar 7. Lokasi danau, embung rawa di Kabupaten Sikka

B. Wilayah Rawan Bencana

Kabupaten Sikka termasuk kabupaten rawan bencana. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Di dalam RTRWN, Kabupaten Sikka termasuk dalam wilayah sebaran gunung berapi di Indonesia. Selain itu Kabupaten Sikka juga termasuk wilayah episenter gempa di Indonesia selama Tahun 1990-2000. Sedangkan berdasarkan RTRW Kabupaten Sikka, wilayah Kabupaten Sikka rawan terhadap bencana tanah longsor, gelombang pasang, banjir, angin topan, gempa dan gerakan tanah, letusan gunung berapi, dan tsunami.

Berdasarkan hasil kajian Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sikka, diidentifikasi beberapa jenis bencana yang dapat mengancam Kabupaten Sikka, yakni :

1. Risiko Bencana Banjir

   Wilayah Kabupaten Sikka yang berisiko bencana banjir berada di bagian tengah dan sebagian pantai utara Kabupaten Sikka, yaitu berada di wilayah Kecamatan Magepanda, Alok Barat, Alok, Alok Timur dan Kewapante.

2. Risiko Cuaca Ekstrim

   Wilayah Kabupaten Sikka yang berisiko cuaca ekstrim berada di wilayah utara dan wilayah selatan Kabupaten Sikka, yaitu berada di wilayah Kecamatan Alok Barat, Alok, Alok Timur, Kewapante, Paga, Tanawawo, Mego, Doreng dan Mapitara.

3. Risiko Gelombang Ekstrim dan Abrasi Pantai

   Wilayah Kabupaten Sikka yang berisiko gelombang ekstrim dan abrasi pantai berada di pantai selatan dan utara Kabupaten Sikka, dengan

tingkat risiko sedang sampai tinggi. Wilayah tersebut berada di Kecamatan Magepanda, Alok Barat, Kangae, Kewapante, Doreng, Bola, Lela, Talibura, dan Paga.

4. Risiko Letusan Gunung Api

   Wilayah Kabupaten Sikka yang berisiko letusan gunung api berada di sekitar Gunung Rokatenda dan Gunung Egon. Di wilayah sekitar Gunung Egon risiko bencana berada di tingkat rendah sampai tinggi. Wilayah yang terkena risiko ini berada di Kecamatan Mapitara dan Waigete. Sedangkan di wilayah sekitar Gunung Rokatenda risiko bencana pada tingkat sedang sampai tinggi, dan berada di Kecamatan Palue.

5. Risiko Tanah Longsor

   Wilayah Kabupaten Sikka yang berisiko tanah longsor tersebar hampir di seluruh wilayah kecamatan dengan tingkat risiko sedang sampai tinggi. Kecamatan dengan resiko tinggi di bagian barat berada di Kecamatan Magepanda, Mego, Tanawawo dan Alok Barat. Sedangkan di bagian timur berada di Kecamatan Mapitara, Bola, Waigete dan Waiblama.

6. Risiko Tsunami

   Wilayah Kabupaten Sikka yang berisiko tsunami berada di pantai utara dengan tingkat risiko sedang sampai tinggi. Daerah tersebut meliputi wilayah Kecamatan Magepanda, Alok Barat, Alok, Alok Timur, Kangae, Kewapante, Waigete, dan Talibura.

7. Risiko Gempa Bumi

   Wilayah Kabupaten Sikka yang berisiko gempa bumi di wilayah ini dengan risiko rendah sampai sedang. Di bagian barat terlihat sebagian mempunyai tingkat risiko tinggi. Wilayah ini adalah Kecamatan Magepanda, Nita, Alok Barat, dan Alok.

8. Risiko Kebakaran Hutan dan Lahan

   Wilayah Kabupaten Sikka yang berisiko kebakaran hutan dan lahan berada di hampir seluruh wilayah kecamatan dengan tingkat risiko sedang sampai tinggi. Risiko kebakaran hutan dan lahan di bagian barat terjadi di Kecamatan Magepanda, Kecamatan Tanawawo, Kecamatan Mego dan Alok Barat. Sedangkan di bagian timur terletak di Kecamatan Talibura dan Kecamatan Waiblama.

9. Risiko Kekeringan

   Wilayah Kabupaten Sikka yang berisiko kekeringan berada di Kecamatan Magepanda, Kecamatan Mego dan Alok Barat, Kecamatan Talibura, Kecamatan Waiblama dan Kecamatan Alok Timur.

10. Bencana ROB

    Wilayah Kabupaten Sikka yang beresiko mengalami bencana banjir ROB atau Pasang Besar ang menyebabkan luapan air laut yaitu kecamatan

Alok Timur, Kecamatan Alok, Kecamatan Alok Barat, Kecamatan Talibura dan Kecamatan Palue dan Kecamatan Kewapante

2.1.2. Aspek Demografi

2.1.2.1. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk merupakan perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah. Kepadatan penduduk dapat menunjukkan distribusi penduduk secara kasar per satuan luas wilayah. Jumlah penduduk Kabupaten Sikka Tahun 2023 sebanyak 337.011 Jiwa. Angka kepadatan penduduk di Kabupaten Sikka Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.7.
Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut
Kecamatan di Kabupaten Sikka Tahun 2023

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km^2)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Persentase Penduduk (%)	Kepadatan penduduk (jiwa per
1	Paga	82,85	17.308	5,14	80
2	Mego	111,26	13.816	4,10	167
3	Tanawawo	79,78	9.572	2,84	86
4	Lela	31,33	11.949	3,55	150
5	Bola	56,83	10.893	3,23	348
6	Doreng	30,41	12.382	3,67	218
7	Mapitara	81,02	7.022	2,08	231
8	Talibura	260,11	24.436	7,25	302
9	Waigete	217,65	26.998	8,01	104
10	Waiblama	144,36	8.536	2,53	59
11	Kewapante	24,14	15.334	4,55	635
12	Hewokloang	17,58	9.691	2,88	551
13	Kangae	38,43	19.039	5,65	495
14	Palue	41,00	9.874	2,93	241
15	Koting	23,56	6.751	2,00	287
16	Nelle	14,65	6.331	1,88	432
17	Nita	141,07	22.796	6,76	162
18	Magepanda	166,15	14.152	4,20	85
19	Alok	14,64	32.673	9,69	2.232
20	Alok Barat	62,75	23.890	7,09	381
21	Alok Timur	92,34	33.568	9,96	364

	Jumlah	**1.731,91**	**337.011**	**94,03**	***195***

Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2024

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa pada Tahun 2024 kepadatan penduduk di Kabupaten Sikka yaitu 195 jiwa/km^2. Kepadatan penduduk tertinggi terdapat pada Kecamatan Alok sebanyak 2.232 jiwa/km^2 sedangkan kepadatan penduduk terendah terdapat pada Kecamatan Waiblama sebanyak 59 jiwa/km^2.

2.1.2.2. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur

Komposisi penduduk menurut umur dapat memberikan suatu ciri terhadap penduduk apakah tergolong sebagai penduduk yang produktif atau yang tidak produktif. Komposisi seperti ini dapat menggambarkan pola perilaku sosial ekonomi penduduk. Penduduk yang berumur 0-14 tahun dan yang berumur lebih dari 64 tahun dikategorikan sebagai penduduk yang tidak produktif. Komposisi penduduk menurut umur di Kabupaten Sikka Tahun 2023 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.1.
Jumlah Penduduk Kabupaten
Sikka Berdasarkan Kelompok Umur

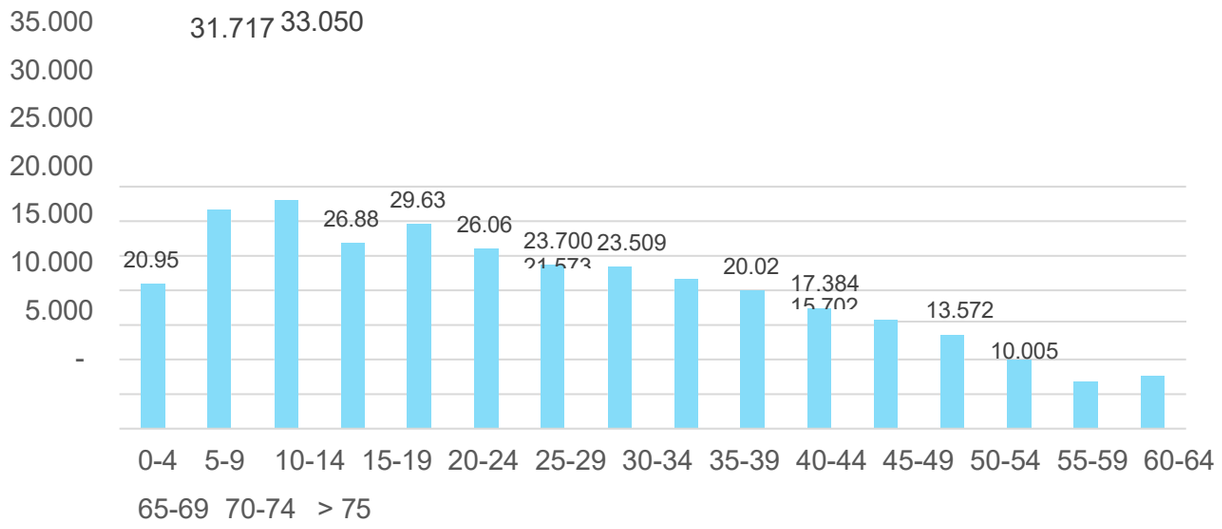

Sumber: Data olahan Bapperida, 2024

**data sementara Agregat Semester I, 2023*

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan, jumlah penduduk terbanyak adalah kelompok umur 10-14 tahun diikuti 5-9 tahun dan 20-24 tahun. Jumlah penduduk paling sedikit adalah kelompok umur 70-74 tahun. Usia produktif di Kabupaten Sikka pada kelompok umur 15-64 tahun sebanyak 218,250 jiwa atau 66,43% dan jumlah penduduk usia non produktif sebanyak 24,426 jiwa atau 7,44%. Dari uraian diatas dapat diketahui rasio ketergantungan Tahun 2021 sebesar 84.3%.

2.1.2.3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.3.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Keberhasilan pembangunan dapat dilihat pada beberapa indikator utama ekonomi antara lain Pertumbuhan PDRB, Laju Inflasi, PDRB perkapita dan Indeks Gini serta Ratio Penduduk Miskin. Capaian indikator- indikator tersebut selama beberapa tahun terakhir, diuraikan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui perkembangan perekonomian suatu daerah dalam suatu periode secara makro dapat digambarkan dari data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Besaran PDRB dapat digunakan sebagai indikator dalam menilai kinerja perekonomian suatu wilayah pada suatu periode tertentu, terutama yang dikaitkan dengan kemampuan suatu wilayah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki.

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB adalah semua barang dan jasa sebagai hasil dari kegiatan ekonomi dari masyarakat dalam wilayah domestik suatu daerah. PDRB terdiri dari : (1) PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan (2) PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). PDRB ADHB menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun perhitungan. PDRB ADHK dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB ADHB Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada grafik berikut.

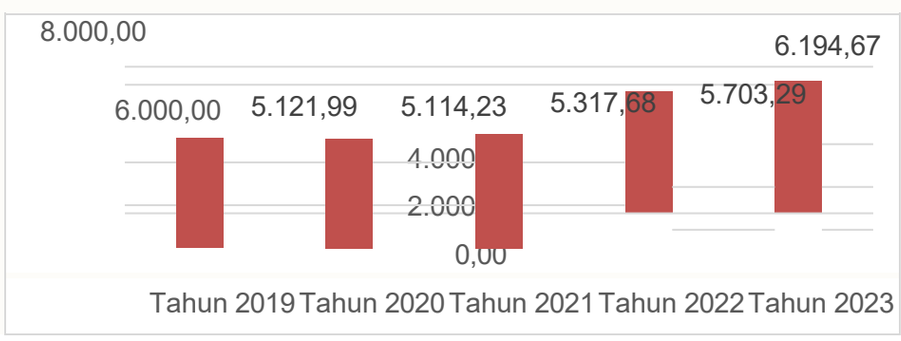

Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2024

Gambar 8. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (juta)

Berdasarkan data tersebut dapat dijelaskan bahwa PDRB ADHB Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi. Tahun Tahun 2019 sebesar Rp5.121.99, Tahun 2020 turun menjadi Rp5.114.23, Tahun 2021 meningkat menjadi Rp5.317,68, Tahun 2022 meningkat menjadi Rp5.703,29 dan pada Tahun 2023 sebesar Rp6.194,67.

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa kontribusi terbesar masih dinominasi oleh sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada tahun 2023 sebesar 38,53% sedangkan yang terendah adalah sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 0,08%.

Selanjutnya Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2024

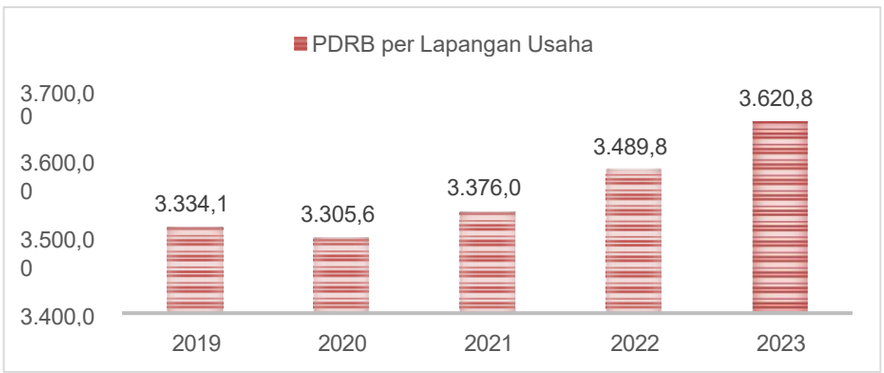

Gambar 9. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (juta)

PDRB ADHK Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2019 sebesar Rp3.334,18, pada Tahun 2020 mengalami penurunan menjadi Rp3.305,67, pada Tahun 2021 meningkat menjadi Rp3.376,03, pada Tahun 2022 meningkat menjadi Rp3.489,82 dan pada Tahun 2023 menjadi sebesar Rp3.620,86.

b. Struktur Ekonomi

Struktur ekonomi sangat dipengaruhi oleh besarnya berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah dari setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan memproduksi dari setiap lapangan usaha. Distribusi PDRB menurut lapangan usaha disajikan pada tabel berikut.

Table 7. Distribusi PDRB per Lapangan Usaha

No	Lapangan Usaha	Kontribusi

		2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.816,24	1.816,34	1.990,48	2.176,91	2.386,89
2	Pertambangan dan Penggalian	57,02	58,08	59,52	62,13	64,72
3	Industri Pengolahan	89,52	89,33	90,46	97,65	113,67
4	Pengadaan Listrik dan Gas	5,78	6,30	6,80	7,27	8,43
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,25	4,50	4,90	4,97	5,10
6	Konstruksi	265,79	242,07	252,93	268,55	300,71
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	549,93	535,61	551,09	615,43	688,85
8	Transportasi dan Pergudangan	337,53	263,36	269,16	307,66	344,89
9	Penyediaan Akomodasi Makan Minum	37,54	31,77	32,87	35,09	38,61
10	Informasi dan Komunikasi	299,77	319,75	334,87	353,02	369,41
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	184,15	197,12	208,69	225,29	232,56
12	Real Estate	102,65	99,21	101,50	113,80	127,30
13	Jasa Perusahaan	14,50	10,31	9,34	10,01	10,77
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	657,20	676,02	683,59	688,68	715,51
15	Jasa Pendidikan	527,49	543,19	540,60	550,63	582,91
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	101,78	110,78	119,20	121,98	135,48
17	Jasa Lainnya	70,88	63,59	61,68	64,22	68,86
PDRB			5121,99	5112,02	5317,68	6194,67

Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2024

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa kontribusi terbesar masih dinominasi oleh sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada tahun 2023 sebesar Rp2.386.000.000,89 sedangkan yang terendah adalah sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar Rp5.000.000,10.

c. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sikka dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 2.4.

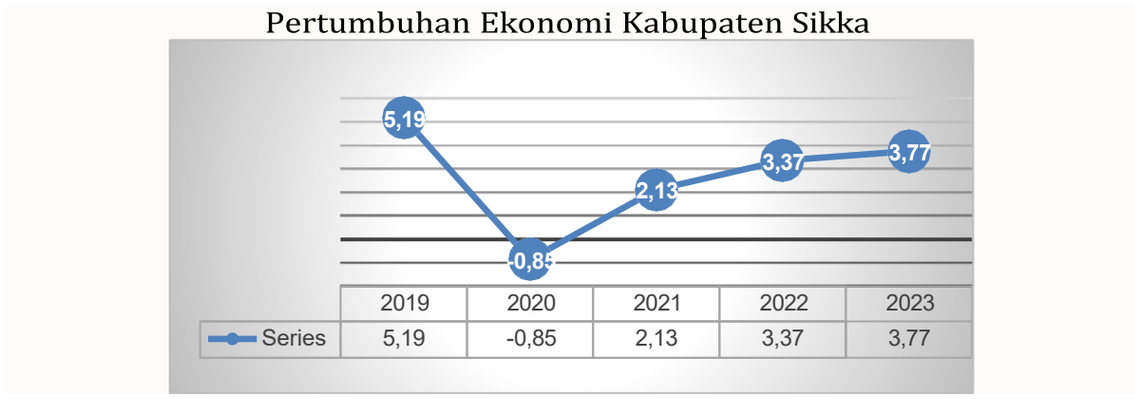

Sumber : Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2024

Berdasarkan data tersebut dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi. Tahun 2019 sebesar 5,19%, Tahun 2020 turun menjadi -0,85%, Tahun 2021 meningkat menjadi 2,13%, Tahun 2022 meningkat menjadi sebesar 3,37% dan Tahun 2023 menjadi sebesar 3,77%. Selanjutnya per masing-masing sektor sebagai sebuah indikator untuk menilai pertumbuhan sektor–sektor potensial, cepat maju dan cepat tumbuh dapat dilihat pada tabel berikut.

Table 8. Laju Pertumbuhan Sektor PDRB Kabupaten Sikka

NO	Lapangan Usaha	Kontribusi				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4	0,8	3,58	4,29	4,32
2	Pertambangan dan Penggalian	3,82	1,29	2,16	2,24	2,10
3	Industri Pengolahan	6,43	-3,26	0,95	6,54	7,53
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,54	8,73	6,12	1,73	11,28
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,69	4,18	7,71	0,83	1,73
6	Konstruksi	4,38	-8,71	2,54	0,85	7,86
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,54	-5,18	1,42	7,03	5,71
8	Transportasi dan Pergudangan	6,99	-17,35	2,11	4,55	2,33
9	Penyediaan Akomodasi Makan Minum	5,19	-15,24	3,63	5,35	6,19
10	Informasi dan Komunikasi	6,72	7,21	4,46	4,93	4,06
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,25	7,44	1,77	0,78	0,79
12	Real Estate	0,09	-2,32	-10,12	2,87	3,41
13	Jasa Perusahaan	4,16	-31,07	-10,12	2,87	6,09

14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	7,71	4,14	-0,11	0,20	0,13
15	Jasa Pendidikan	3,88	0,72	-1,61	-0,17	2,96
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,43	2,90	4,57	1,74	2,04
17	Jasa Lainnya	5,11	-11,52	-4,35	1,4	4,87
PDRB		5,19	-0,85	2,13	3,37	3,77

Sumber : Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2024

2.1.2.3.2. Persentase Penduduk Miskin

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan atau batas kemiskinan menurut BPS adalah representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.

Garis kemiskinan Kabupaten Sikka pada tahun 2019 sebesar Rp301.994 terus meningkat menjadi Rp389.455 pada tahun 2023. Data persentase penduduk miskin Kabupaten Sikka yang dirilis BPS dari tahun 2018 sampai dengan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Table 9. Profil Kemiskinan Kabupaten Sikka

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah penduduk miskin	44.320	42.180	43.090	40.870	40.810
2	Persentase penduduk miskin (%)	13,53	13,12	13,35	12,61	12,56
3	Indeks kedalaman kemiskinan	2,11	1,89	1,26	1,80	1,58
4	Indeks keparahan kemiskinan	0,47	0,38	0,21	0,40	0,29
5	Garis kemiskinan (Rp/kapita/bln)	301.994	324.775	354.234	389.455	428.352

Sumber: BPS Kabupaten Sikka, 2024

Tabel di atas menggambarkan bahwa persentase penduduk miskin mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023 persentase penduduk miskin sebesar 12,56% turun 0,05% dari tahun sebelumnya yakni sebesar 12,61%. Persentase penduduk miskin tersebut menempatkan Kabupaten Sikka berada pada urutan keempat terendah setelah Kabupaten Nagekeo. Rincian persentase penduduk miskin berdasarkan Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT dapat dilihat pada tabel berikut.

Table 10. Persentase Penduduk Miskin per-Kabupaten/Kota Se-Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tahun 2019-2023

Kabupaten Kota	Persentase Penduduk Miskin (%)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Sumba Barat	28.29	28.17	28.39	27.47	27,17
Sumba Timur	30.02	29.65	29.68	28.22	28,08
Kupang	23.03	22.77	22.98	21.70	21,78
Timor Tengah Selatan	27.87	27.49	26.64	25.45	25,18
Timor Tengah Utara	22.45	22.28	22.62	21.50	21,85
Belu	15.54	15.37	15.68	14.84	14,30
Alor	21.59	21.09	21.09	20.25	19,97
Lembata	26.30	26.14	26.21	25.18	24,78
Flores Timur	10.90	10.84	10.19	10.75	11,77
Sikka	**13.53**	**13.12**	**13.35**	**12.61**	**12,56**
Ende	23.18	23.76	24.13	23.00	22,86
Ngada	12.48	12.51	12.58	11.93	12,06
Manggarai	20.55	20.34	20.48	19.84	19,69
Rote Ndao	27.95	27.54	28.08	27.45	27,05
Manggarai Barat	18.01	17.71	17.92	17.15	16,82
Sumba Tengah	34.62	34.49	34.27	32.51	31,78
Sumba Barat Daya	28.06	28.00	28.08	27.16	27,48
Nagekeo	12.85	12.61	12.91	12.05	12,33
Kabupaten Kota	**Persentase Penduduk Miskin (%)**				
	2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Manggarai Timur	26.49	26.52	26.50	25.35	
Sabu Raijua	30.52	30.18	30.13	28.73	25,06
Malaka	16.12	16.04	16.33	15.26	28,37
Kota Kupang	9.22	8.96	9.17	8.61	14,42
Nusa Tenggara Timur	21.09	20.90	20.99	20.05	19,96

Sumber: BPS. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), 2024

Garis kemiskinan diukur dari belanja per kapita per bulan. Belanja ditentukan oleh pendapatan. sehingga perlakuan yang diperlukan haruslah memiliki keterkaitan dengan berbagai sektor yang memberikan dampak langsung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Dengan demikian. sektor ekonomi seperti pertanian, pertambangan, industri, perdagangan, koperasi dan UMKM memainkan peranan yang sangat penting dalam pengentasan kemiskinan.

2.1.2.3.3. Laju Inflasi

Inflasi adalah proses kenaikan harga barang-barang secara umum. Apabila terjadi kenaikan harga barang (inflasi) tanpa dibarengi dengan kenaikan pendapatan masyarakat, maka akan menyebabkan turunnya daya beli masyarakat dan akibatnya adalah terjadinya kemacetan transaksi yang selanjutnya akan berdampak pada sektor produksi dan perekonomian secara keseluruhan.

Table 11. Inflasi Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nasional

No	Wilayah	Tahun (%)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Kabupaten Sikka	1,84	2,24	0,34	1,08	3,57
2.	Provinsi NTT	0,67	0,61	1,67	6,65	2,42
3.	Nasional	2,72	1,68	1,87	5,51	2,61

Sumber: BPS Nasional, BPS Provinsi NTT Dalam Angka, 2024

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa inflasi Kabupaten Sikka mengalami fluktuatif. Pada tahun 2019 inflasi sebesar 1,84 persen, pada tahun 2020 sebesar 2,24 persen, menurun pada tahun 2021 menjadi sebesar 0,34 persen, dan naik pada tahun 2022 sebesar 1,08 persen, dan meningkat lagi pada tahun 2023 menjadi sebesar 3,57 persen.

Indeks Harga Konsumen Kabupaten Sikka menurut kelompok pengeluaran dapat dilihat pada tabel berikut.

Table 12. Indeks Harga Konsumen Menurut Kelompok Pengeluaran Kabupaten Sikka Tahun 2020 – 2023 (Per Desember)

No	Kelompok pengeluaran	Indeks Harga Konsumen			
		2020	2021	2022	2023
1.	Makanan, Minuman dan Tembakau	109,85	109,85	114,06	123,52
2.	Pakaian dan alas kaki	108,46	107,83	108,76	110,30
3.	Perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga	100,63	102,11	102,81	104,35
4.	Perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga	102,94	104,26	109,68	111,72

No	Kelompok pengeluaran	Indeks Harga Konsumen			
		2020	2021	2022	2023
5.	Kesehatan	109,47	109,83	111,21	114,71
6.	Transportasi	105,48	103,52	132,21	138,76
7.	Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	97,03	98,45	98,24	97,19
8.	Rekreasi, Olahraga dan Budaya	109,89	115,03	120,93	114,65
9.	Pendidikan	102,49	103,41	103,41	104,99
10.	Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	108,48	110,51	116,04	118,63
11.	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	112,48	115,01	123,17	127,96

Sumber : Sikka Dalam Angka, 2021-2024

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa data indeks harga konsumen di Kabupaten Sikka mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga 2023. Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Sikka memiliki tugas rumah untuk merumuskan kebijakan dan strategi yang tepat untuk mengatasi kenaikan harga pada sektor-sektor yang dianggap cukup krusial.

2.1.2.4. Fokus Kesejahteraan Sosial

Pembangunan pada fokus kesejahteraan sosial meliputi pembangunan yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat antara lain pendidikan. kesehatan dan pemenuhan kebutuhan dasar sosial masyarakat lainnya.

2.1.2.4.1. Usia Harapan Hidup dan Indeks Pembangunan Manusia

Tinggi rendahnya Usia Harapan Hidup (UHH) menggambarkan tinggi rendahnya taraf hidup suatu daerah, semakin tinggi UHH di suatu daerah maka kondisi kesehatan di daerah tersebut akan semakin baik. UHH masyarakat Kabupaten Sikka tahun 2019 adalah 67,07 tahun,pada tahun 2020 menjadi 67,42 tahun, pada tahun 2021 menjadi 67,45 tahun, pada

tahun 2022 menjadi 67,86 tahun dan pada tahun 2023 menjadi 68,34 tahun. Hal ini menunjukkan dampak dari keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan dan bidang-bidang pendukung lainnya. UHH Kabupaten Sikka dapat dilihat pada grafik berikut

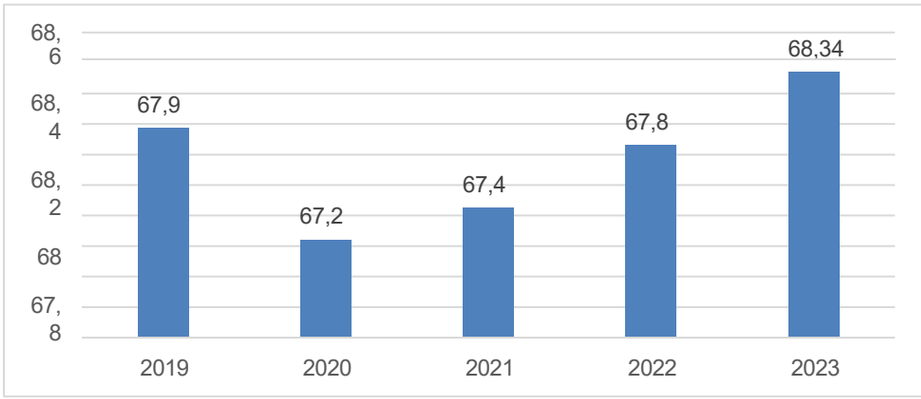

Gambar 10. UHH Kabupaten Sikka Tahun 2019- 2023

Sumber : Sikka Dalam Angka, 2024

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks komposit dari gabungan 3 (tiga) indikator, yaitu usia harapan hidup, angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah serta pengeluaran per kapita. IPM mengukur secara spesifik pencapaian masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi, untuk mencapai dan mempertahankan standar kehidupan yang layak. Trend IPM Kabupaten Sikka dapat dilihat pada grafik berikut.

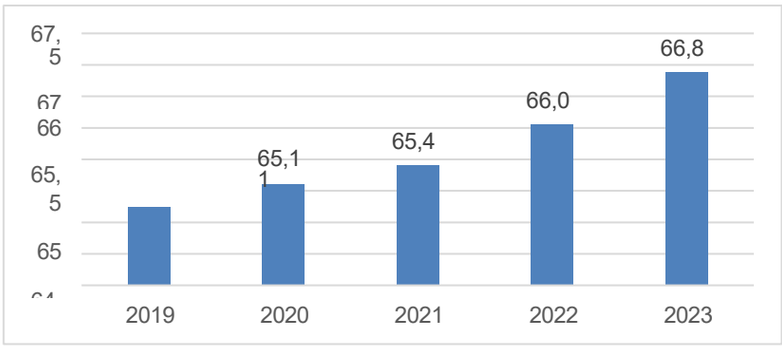

Gambar 11. Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupatan Sikka

Sumber : Sikka Dalam Angka, 2024

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata- rata lama sekolah, sedangkan untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Pada tahun 2023, IPM Kabupaten Sikka mencapai 66,89. Hal ini

menunjukan peningkatan IPM sebesar 0,83 dari Tahun 2022 sebesar 66,06.

2.1.2.4.2. Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf (AMH) adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya. tanpa harus mengerti apa yang dibaca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. AMH Kabupaten Sikka selama periode tahun 2019-2023 selalu meningkat sebagaimana terlihat pada grafik berikut.

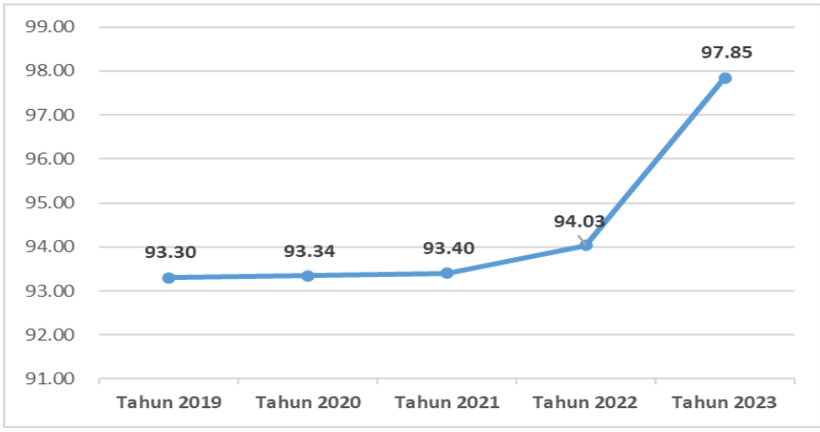

Gambar 12. Perkembangan Angka Melek Huruf (AMH)

Sumber: Data Dinas PKO Kabupaten Sikka, 2024

Grafik di atas memperlihatkan perkembangan angka melek huruf di Kabupaten Sikka terus mengalami peningkatan, pada Tahun 2019 sebesar 93,3, pada Tahun 2020 sebesar 93,34, pada Tahun 2021 meningkat menjadi 93,40,pada Tahun 2022 meningkat menjadi 94,03 dan pada Tahun 2023 meningkat menjadi 97,85.

2.1.2.4.3. Angka Rata-rata Lama Sekolah

Angka Rata-rata Lama Sekolah adalah rata-rata jumlah yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menepuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada grafik berikut.

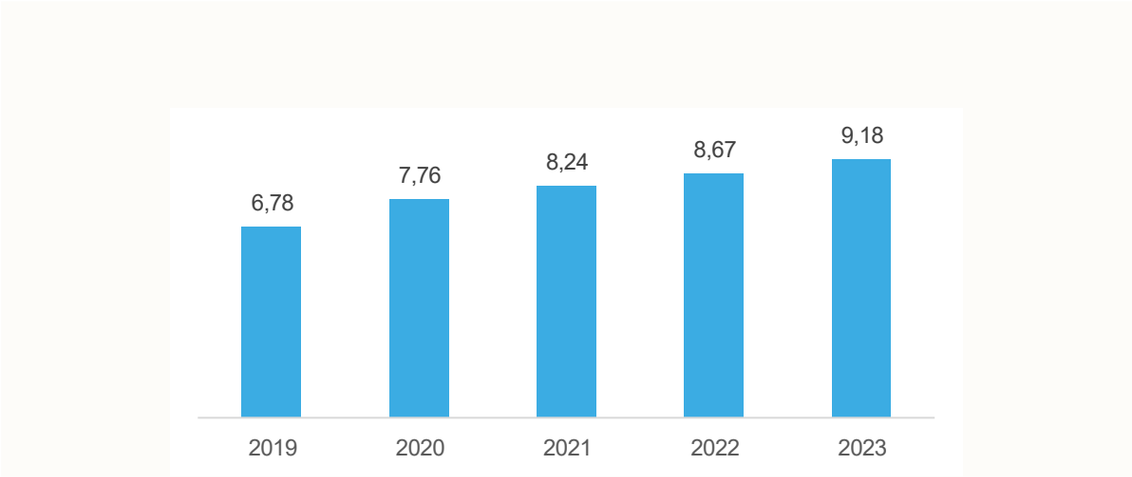

Gambar 13. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Sumber: Dinas PKO Kabupaten Sikka, 2024

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023 terus mengalami peningkatan. Angka rata-rata lama sekolah Tahun 2019 6,78, Tahun 2020 naik menjadi 7,76, Tahun 2021 naik menjadi sebesar 8,24 dan pada Tahun 2022 naik menjadi 8,67 sedangkan pada Tahun 2023 meningkat menjadi 9,18.

2.1.2.4.4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja (penduduk usia kerja 15 tahun dan lebih) yang masih sekolah. mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Gambaran TPAK Kabupaten Sikka pada tahun 2023 sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Table 13. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Kegiatan Utama		Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
Angkatan Kerja		**101.625**	**82.818**	**184.443**
1	Bekerja	99.686	80.115	179.801
2	Pengangguran Terbuka	1.939	2.703	4.642
Bukan Angkatan Kerja		**18.923**	**42.291**	**61.214**
1	Sekolah	10.006	10.839	20.845
2	Mengurus Rumah Tangga	2.889	27.001	29.890
3	Lainnya	6.028	4.451	10.479
Jumlah		**120.548**	**125.109**	**245.657**

Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2024

Tabel di atas menggambarkan bahwa tingkat partisipasi angkatan

kerja di Kabupaten Sikka pada tahun 2023 adalah 74,35% dan tingkat pengangguran terbuka 2,62%.

2.1.2.4.5. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan suatu proses dan strategi yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan partisipasi aktif masyarakat dan desa dalam mengelola sumber daya dan mengambil keputusan yang berkaitan dengan pembangunan dan perencanaan wilayah. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat dan desa sejatinya dapat dilakukan melalui pengukuran indeks desa membangun.

Table 14. Jumlah Desa berdasar Klasifikasi Desa Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023

No	Klasifikasi Desa	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Desa Mandiri	0	0	0	0	3
2.	Desa Maju	6	8	14	21	26
3.	Desa Berkembang	40	45	57	79	95
3.	Desa Tertinggal	75	73	63	45	47
4.	Desa Sangat Tertinggal	26	21	13	36	10
	Jumlah Desa	147	147	147	181	181

Sumber: Dinas PMD Kabupaten Sikka, 2024

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa desa yang berada di Kabupaten Sikka didominasi Desa Berkembang. Namun, masih ada Desa Sangat Tertinggal sejumlah 10 Desa. Untuk Desa mandiri mengalami peningkatan dari Tahun 2022 yang semula berjumlah 0 menjadi 3 Desa mandiri pada Tahun 2023.

Table 15. Capaian Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	13 dan 147	13 dan 147	13 dan 147	13 dan 147	13 dan 169
2.	Jumlah kelompok binaan PKK	3741	3741	3741	3741	3741
3.	Jumlah LSM	4	4	4	4	4
4.	LPM Berprestasi	0	0	0	0	0
5.	PKK aktif	169	169	169	169	169
6.	Posyandu aktif	628	628	650	650	650

Sumber: Dinas PMD Kabupaten Sikka, 2024

Data capaian pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Sikka dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan beberapa indikator yang mencerminkan perkembangan dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan dan pemberdayaan diri. Pertama, rata-rata jumlah kelompok binaan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) cukup stabil dalam 5 tahun terakhir. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan terhadap dorongan dan dukungan dari LPM untuk membina dan mengaktifkan lebih banyak kelompok masyarakat, yang mungkin memiliki peran penting dalam menggerakkan inisiatif lokal dan partisipasi masyarakat. Kedua, rata-rata jumlah kelompok binaan PKK juga cukup stabil dan menunjukkan adanya konsistensi dan kekuatan keterlibatan dari PKK dalam pemberdayaan keluarga dan menggerakkan kesejahteraan masyarakat.

Partisipasi aktif dari kelompok PKK serta peningkatan partisipasi dalam dua tahun terakhir dari Posyandu yang mencerminkan komitmen pemerintah daerah dan lembaga terkait dalam menggerakkan partisipasi aktif masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sikka.

2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah

2.1.3.1. Ekonomi Makro Regional

Perekonomian Kabupaten Sikka pada 2023 tumbuh sebesar 3,77%, lebih tinggi jika dibandingkan dengan Provinsi NTT yang tumbuh sebesar 3,52%. Dari sisi pengeluaran, peningkatan ini didorong oleh akselerasi konsumsi rumah tangga seiring dengan pelonggaran kebijakan pembatasan melalui penurunan level PPKM di tengah penyebaran COVID-19 yang semakin mereda. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), sebagian besar LU mengalami perbaikan ekonomi terutama LU utama yaitu LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Sementara itu, peningkatan aktivitas masyarakat di tengah melandainya pandemi COVID-19 serta momen libur hari raya keagamaan turut mendorong LU Perdagangan. Adapun pertumbuhan LU Konstruksi didorong oleh berlanjutnya pembangunan proyek-proyek pemerintah di Kabupaten Sikka.

Kinerja ekonomi Kabupaten Sikka pada tahun 2023 terutama bersumber dari Konsumsi Rumah Tangga (KRT) Konsumsi Pemerintah dan Ekspor. Sementara dari sisi lapangan usaha ((LU) kinerja LU Pertanian, LU Administrasi Pemerintah, dan dan LU Perdagangan Besar dan Eceran menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sikka. Program pemerintah seperti Pembangunan Infrastruktur dari Pinjaman PT. SMI dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

2.1.3.2. Keuangan Pemerintah Daerah

Realisasi pendapatan pada tahun 2023 mencapai Rp1.183.986.324.425,83 atau sebesar 96,68% dari total pagu sebesar Rp1.224.627.500.000,00, lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai realisasi 91,82% atau sebesar Rp1.075.772.304.642,58.

Di sisi lain, realisasi belanja APBD Kabupaten Sikka pada tahun 2023 tercatat sebesar Rp1.168.555.359.415,00. Atau sebesar 89,55% dari total pagu sebesar Rp1.304.979.359.282,00, lebih tinggi 5,99% dibandingkan tahun 2022 yang mencapai realisasi 83,56% dari total pagu sebesar Rp Rp1.392.308.960.033,00. Jenis belanja APBD Kabupaten Sikka yang memiliki share terbesar adalah belanja operasional sebesar 89,02% diikuti belanja transfer sebesar 99,99%, lalu belanja modal sebesar 82,84% dan belanja tidak terduga 9,92%. Realisasi anggaran pemerintah menjadi salah satu penopang perekonomian Kabupaten Sikka, sehingga perlu terus didorong agar dapat mengakselerasi pemulihan ekonomi.

2.1.3.3. Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Sikka pada Desember 2023 tercatat sebesar 184.443 orang, turun 2,73% dibandingkan dengan keadaan yang sama di Tahun 2022 sebesar 172.333 orang. Jumlah tersebut terdiri atas yang Bekerja sebanyak 179.801 dan Pengangguran Terbuka sebanyak 4.642. Jumlah Bukan Angkatan Kerja sebanyak 61.214 orang terdiri atas Sekolah sebesar 20.845 orang, Mengurus Rumah Tangga sebesar 29.890 orang dan lainnya sebesar 10.479 orang.

Selama Desember 2022-Desember 2023, persentase bekerja terhadap angkatan kerja sebesar 97,38%, angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja sebesar 74,34%.

Status pekerjaan utama dengan jumlah terbesar ada pada pekerja keluarga sebanyak 172.801 orang, diikuti oleh berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar sebanyak 46.391, berusaha sendiri sebanyak 33.038 orang, pekerja bebas sebanyak 29.071, berusaha dibantu buruh tidak tetap/ buruh tidak dibayar sebanyak 2.638 orang dan yang terakhir buruh/karyawan/pegawai sebanyak 2.054 orang.

Lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan menjadi sektor tertinggi penyerap tenaga kerja di Kabupaten Sikka dengan PDRB sebesar 2.386,89 diikuti administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 715,51, lalu perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 688,85, jasa pendidikan sebesar 582,91 diikuti oleh jasa informasi dan komunikasi sebesar 369,41 dan selanjutnya transportasi dan pergudangan sebesar 344,89 lalu paling terkecil adalah pengadaan air/pengelolaan sampah sebesar 5,10.

2.1.4. Aspek Pelayanan Umum

2.1.4.1. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib

2.1.4.1.1. Urusan Pendidikan

a. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut.

1) APM SD/MI Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023

APM SD/MI Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada gambar berikut:

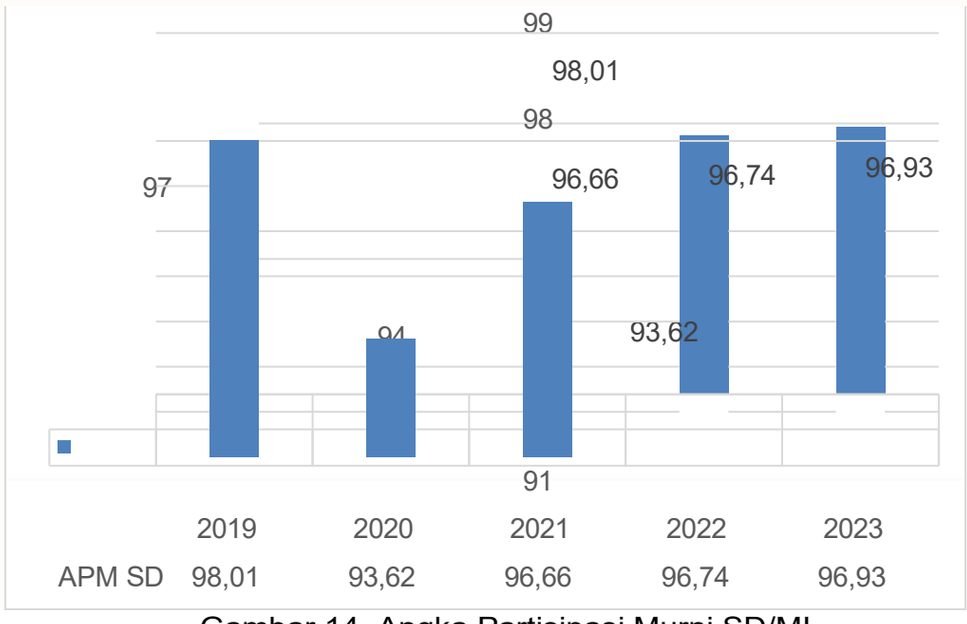

Gambar 14. Angka Partisipasi Murni SD/MI

Sumber : Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun Anggaran 2023 Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sikka, Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sikka, 2024 dan Statistik Pendidikan NTT, 2024

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa APM SD/MI Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2019 sebesar 98,01%, pada Tahun 2020 menjadi 93,62%, pada Tahun 2021 naik menjadi 96,66%, pada Tahun 2022 naik menjadi 96,74% dan pada Tahun 2023 menjadi sebesar 96,93%.

b) APM SMP/MTs Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023

APM SMP/MTs Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada grafik berikut.

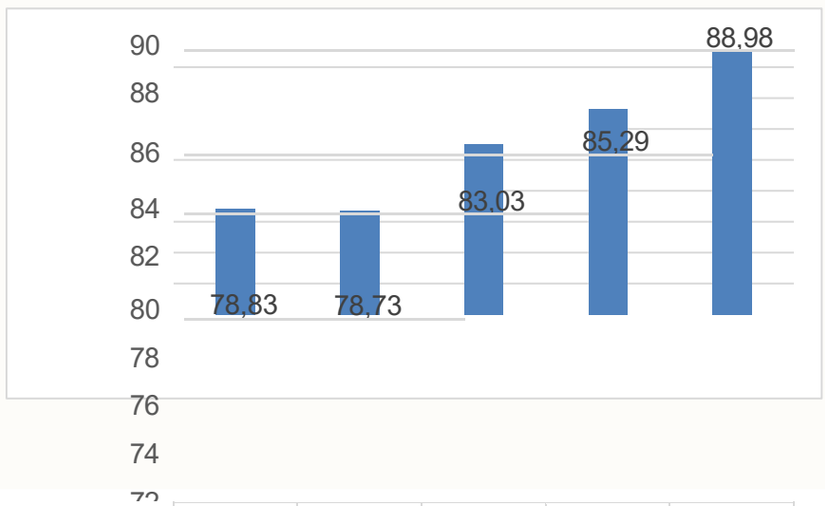

	2019	2020	2021	2022	2023
APM SMP	78,83	78,73	83,03	85,29	88,98

Gambar 15. Angka Partisipasi Murni SMP/MTs

Sumber : Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun Anggaran 2023 Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sikka, Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sikka, 2024 dan Statistik Pendidikan NTT, 2024

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa APM SMP/MTs Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2019 sebesar 78,83%, Tahun 2020 menjadi 78.73%, pada Tahun 2021 naik menjadi 83,03%, pada Tahun 2022 naik menjadi 85,29% dan pada Tahun 2023 menjadi sebesar 88,98%.

c) Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah angka yang menunjukkan jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan

jenjang pendidikan tertentu.

1) APK SD/MI Kabupaten Sikka pada Tahun 2019-2023

APK SD/MI Kabupaten Sikka pada Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada grafik berikut.

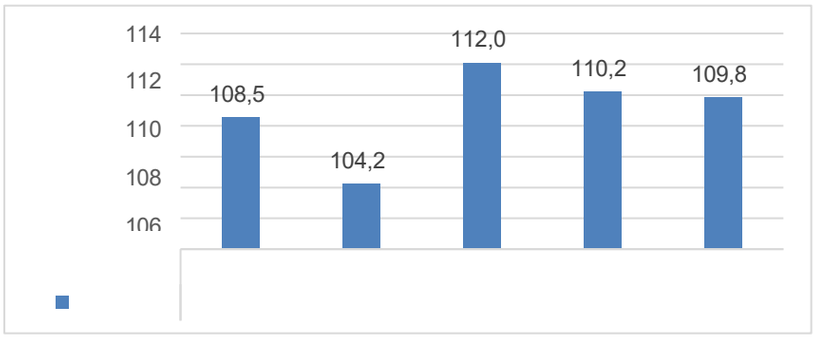

100	2019	2020	2021	2022	2023
APK SD/MI	108,53	104,23	112,07	110,21	109,83

Gambar 16. Angka Partisipasi Kasar SD/MI

Sumber : Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun Anggaran 2023 Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sikka, Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sikka, 2024 dan Statistik Pendidikan NTT, 2024

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa APK SD/MI Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi. APK SD/MI Kabupaten Sikka pada Tahun 2019 sebesar 108,53, pada Tahun 2020 menjadi 104,23, pada Tahun 2021 menjadi sebesar 112,07, pada Tahun 2022 menjadi sebesar 110,21 dan pada Tahun 2023 menjadi sebesar 109,83.

2) Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs Kabupaten Sikka pada Tahun 2019-2023

Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs Kabupaten Sikka pada Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada grafik berikut.

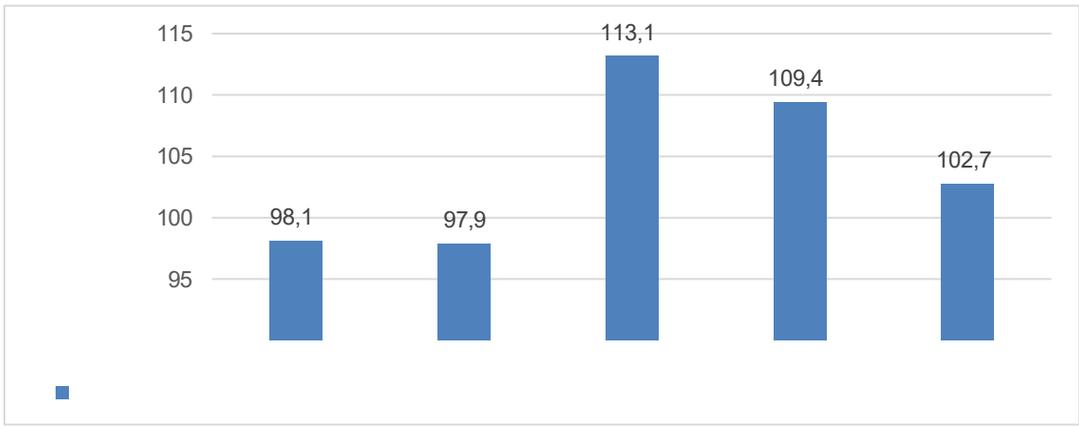

	2019	2020	2021	2022	2023
APK SMP/MTs	98,12	97,9	113,16	109,41	102,75

Gambar 17. Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs

Sumber : Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun Anggaran 2023 Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sikka, Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sikka, 2024 dan Statistik Pendidikan NTT, 2024

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa APK SMP/MTs Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi. APK SMP/MTs Kabupaten Sikka Tahun 2019 sebesar 98,12%, pada Tahun 2020 menjadi 97,90%, Tahun 2021 menjadi 113,16%, Tahun 2022 menjadi 109,41% dan

pada Tahun 2023 menjadi 102,75%.

3) Rasio Guru/Murid

Rasio guru terhadap murid adalah perbandingan jumlah guru tingkat pendidikan dasar/menengah per 1.000 jumlah murid pendidikan dasar/menengah. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar per kelas. Selain itu, untuk mengukur jumlah ideal guru per kelas terhadap jumlah murid agar tercapai mutu pengajaran.

1. Perkembangan rasio guru murid jenjang SD/MI Kabupaten Sikka sampai dengan Tahun 2023 dapat dilihat pada grafik berikut.

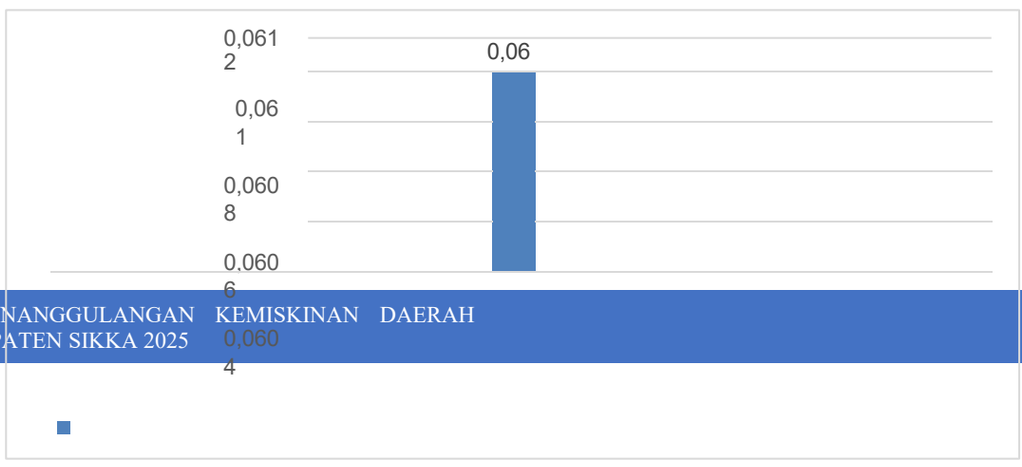

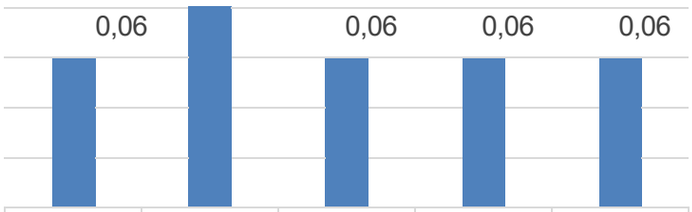

	2019	2020	2021	2022	2023
Rasio Guru Murid SD/MI	0,06	0,061	0,06	0,06	0,06

Sumber : Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sikka, 2024

Gambar 18. Rasio guru murid jenjang SD/MI Kabupaten Sikka

2. Perkembangan rasio guru murid jenjang SMP/MTs Kabupaten Sikka sampai dengan Tahun 2023 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.13

Rasio guru murid jenjang SMP/MTs Kabupaten Sikka

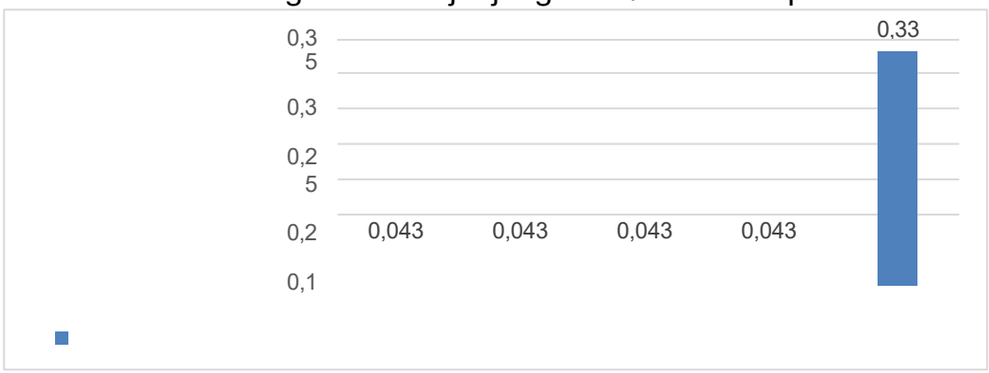

	2019	2020	2021	2022	2023
Rasio Guru Murid SMP/MTs	0,0438	0,0438	0,0438	0,0438	0,33

Sumber : Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sikka, 2024

Gambar 19. Rasio guru murid jenjang SMP/MTs Kabupaten Sikka

2.1.4.1.2. Urusan Kesehatan

a. Angka Kematian Bayi

Angka kematian bayi merupakan salah satu indikator yang berkaitan langsung dengan tingkat kelangsungan hidup anak dan merefleksikan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan tempat tinggal anak-anak termasuk pemeliharaan kesehatannya. Angka kematian Bayi per 1000 kelahiran selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuasi, pada Tahun 2019 sebanyak 11 per 1000 kelahiran, pada tahun 2020 menurun menjadi 8,6 per 1000 kelahiran, pada tahun 2021 menurun menjadi 3,6 per 1000 kelahiran, pada Tahun 2022 menjadi 13,73 per 1000 kelahiran dan pada Tahun 2023 menjadi 9 per 1000 kelahiran. Gambaran kondisi ini dapat dilihat pada grafik berikut.

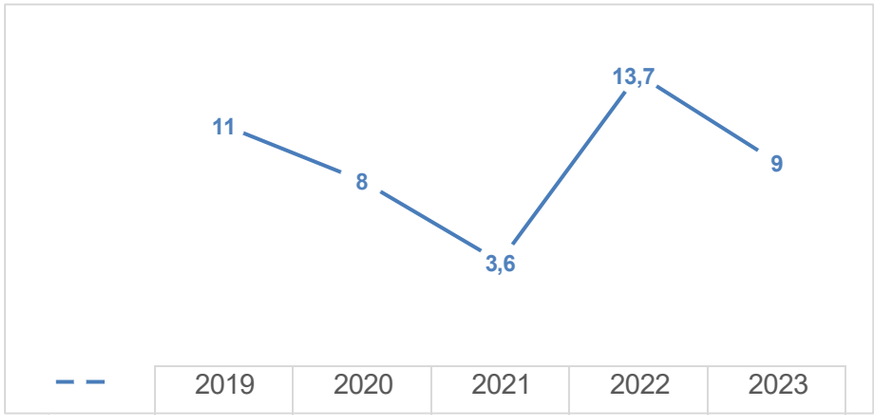

	2019	2020	2021	2022	2023
AKB	11	8	3,6	13,73	9

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, 2024

Gambar 20. Angka Kematian Bayi

b. Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi indikator keberhasilan pembangunan sektor kesehatan. Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup. AKI Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada grafik berikut.

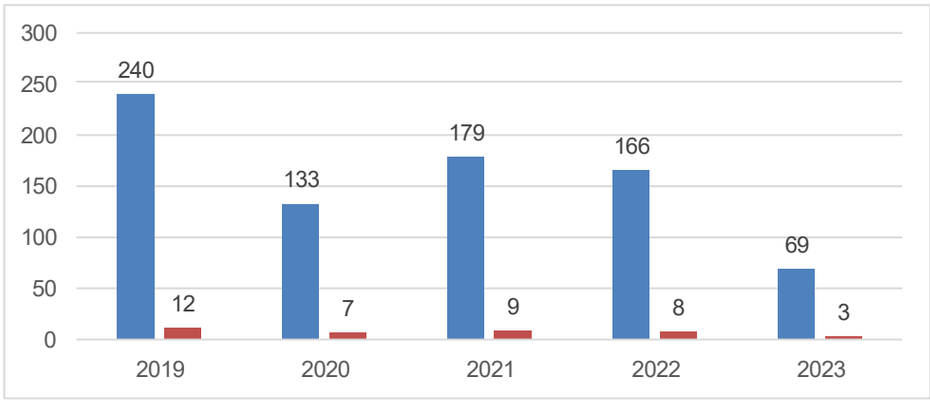

Gambar 21. Perkembangan Angka Kematian Ibu

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, 2024

Dilihat dari grafik kematian ibu di Kabupaten Sikka mengalami fluktuasi. Walaupun masih dibawah target Nasional. AKI Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019 sebanyak 240 per

100.000 KH (12 kasus), Tahun 2020 turun menjadi sebanyak 133 per 100.000 KH (7 kasus), pada Tahun 2021 sebesar 179 per 100.000 KH (9 kasus), pada Tahun 2022 sebesar 166 per 100.000 KH (8 kasus) dan pada

Tahun 2023 sebesar 69 per 100.000 KH (3 kasus).

c. Prevalensi Stunting

Stunting merupakan masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standard usianya. Masalah *stunting* dipengaruhi oleh rendahnya akses terhadap makanan dari segi jumlah dan kualitas gizi, pola asuh yang kurang baik, rendahnya akses pelayanan kesehatan termasuk di dalamnya adalah akses sanitasi dan air bersih. Prevalensi Stunting Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada grafik berikut.

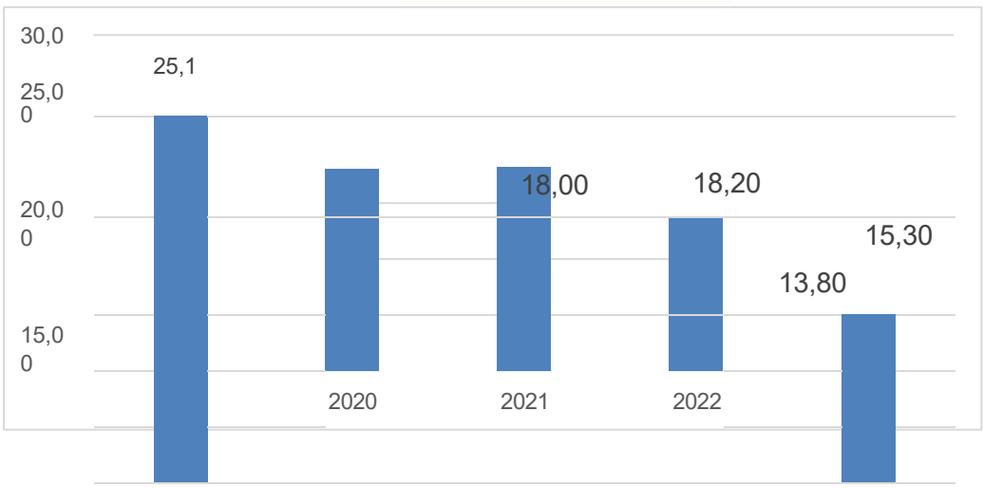

Gambar 22. Prevelensi Stunting

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, 2024

Berdasarkan grafik diatas menunjukan bahwa capaian data *stunting* di Kabupaten Sikka sejak tahun 2019 sampai 2023 mengalami fluktuasi. Kondisi data *stunting* di Kabupaten Sikka pada periode Agustus 2023 tercatat sebesar 15,3 persen. Capaian prevalensi stunting pada tahun 2023 ini mengalami kenaikan sebesar 1,5 persen bila dibandingkan dengan prevalensi *stunting* tahun sebelumnya.

d. Rasio Pelayanan Terpadu (Posyandu) per Satuan Balita

Rasio Posyandu Per Satuan Balita adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Rasio Posyandu Per Satuan Balita Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada grafik berikut.

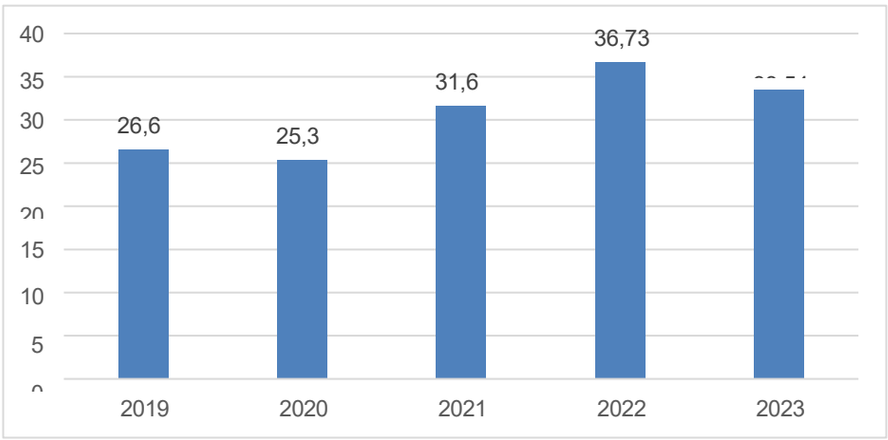

Gambar 23. Rasio Posyandu per-Satuan Balita

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, 2024

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Rasio Posyandu Per Satuan Balita Kabupaten Sikka Tahun 2019 sebesar 26,61, Tahun 2020 menjadi sebesar 25,36, pada Tahun 2021 menjadi 31,66, pada Tahun 2022 menjadi sebesar 36,73 dan pada Tahun 2023 menjadi sebesar 33,54.

e. Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Tenaga Kesehatan

Perkembangan pelayanan kesehatan dapat diketahui dari ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan. Gambaran kondisi ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan di Kabupaten Sikka dapat dilihat pada tabel berikut.

Fasilitas Kesehatan	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
	Pemilikan/Pengelola			Pemilikan/Pengelola			Pemilikan/Pengelola		
	Pemerintah	Swasta	Jumlah	Pemerintah	Swasta	Jumlah	Pemerintah	Swasta	Jumlah
Rumah sakit umum	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Puskesmas Rawat Inap	14		14	14		14	14		14
Puskesmas non Rawat Inap	11		11	11		11	11		11
Puskesmas pembantu	61		61	61		61	61		61
Posyandu	650		650	650		650	650		650

Gambar 24. Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, 2024

Dari tabel diatas menggambarkan bahwa jumlah sarana kesehatan yang ada di Kabupaten Sikka tahun pada 2023.

Gambaran perkembangan sumber daya manusia di bidang kesehatan Kabupaten Sikka selama 5 (lima) tahun terakhir disajikan pada tabel berikut:

Table 16. Jumlah Tenaga Kesehatan Kabupaten Sikka yang tersebar di Puskesmas Tahun 2023

No	Jenis Profesi	Jumlah
1	Dokter	27
2	Dokter Gigi	5
3	Perawat	592
4	Bidan	716
5	Apoteker	12
6	Asisten Apoteker	35
7	Kesehatan Masyarakat	60
8	Kesehatan Lingkungan	46
9	Gizi	52
10	Analis Kesehatan	55
11	Terapis Gigi Dan Mulut	53
12	Fisioterapi	9
13	Tenaga Lain	165
	Total	**1.827**

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, 2024

f. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi Kebidanan

Proses persalinan dapat menentukan keselamatan ibu dan bayinya sehingga mempengaruhi angka kematian bayi maupun angka kematian ibu saat melahirkan. Pemerintah Provinsi NTT melalui Peraturan Gubernur NTT No. 42 Tahun 2009 telah membuat kebijakan tentang Revolusi Kesehatan Ibu dan Anak. Perkembangan cakupan pertolongan persalinan di Kabupaten Sikka selama periode tahun 2019-2023 sebagaimana terlihat pada grafik berikut.

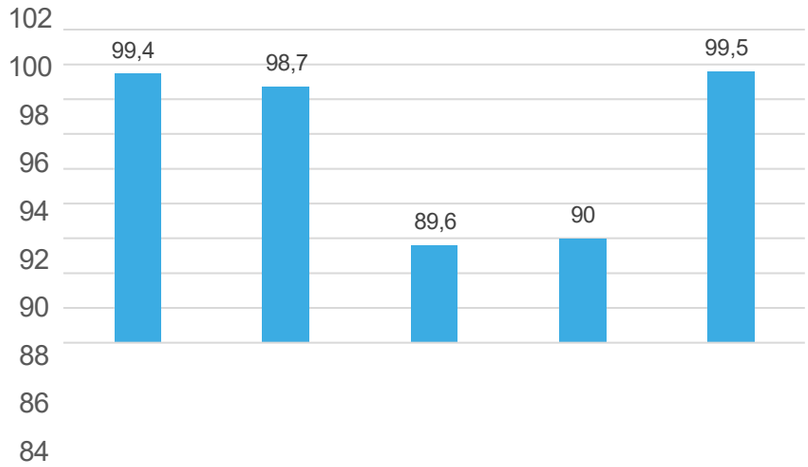

Gambar 25. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh nakes yang memiliki kompetensi kebidanan

Grafik di atas terlihat bahwa cakupan pelayanan persalinan yang ditangani oleh tenaga kesehatan yang berkompetensi mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2019 cakupan pertolongan persalinan sebesar 99,46%, pada Tahun 2020 turun menjadi 98,7%, pada tahun 2021 menjadi sebesar 89,6% dan pada Tahun 2022 menjadi sebesar 90% sedangkan Tahun 2023 menjadi 99,58%.

g. Imunisasi

Pencapaian *Universal Child Immunization* (UCI) pada dasarnya merupakan proporsi terhadap cakupan sasaran bayi yang telah mendapatkan imunisasi dasar secara lengkap. Cakupan UCI dikaitkan dengan batasan suatu wilayah tertentu, berarti dalam wilayah tersebut juga menggambarkan besarnya tingkat perlindungan terhadap penularan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I). Suatu desa/kelurahan telah mencapai target UCI apabila ≥ 80 % bayi (0-11 bulan) di desa/kelurahan tersebut mendapat imunisasi dasar lengkap.

Pencapaian UCI di Kabupaten Sikka tahun dari Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Grafik 2.19

Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Imunization (UCI)

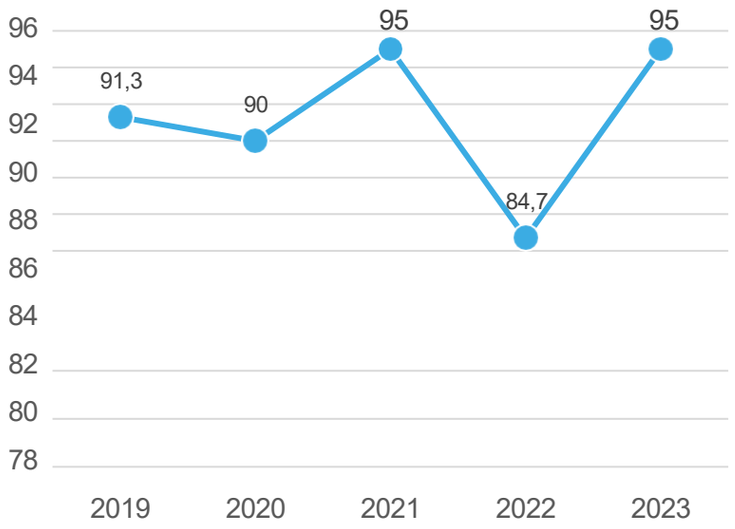

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, 2024

Gambar 26. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Imunization (UCI)

h. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Penanganan

Berdasarkan hasil penimbangan Balita di Posyandu tahun 2019-2023 kasus gizi kurang yang mendapatkan perhatian dan penanganan dari Pemerintah Kabupaten Sikka yaitu sebesar 100% atau semua balita gizi kurang mendapatkan perhatian dari Pemerintah.

i. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC

Tuberkolosis (TBC) merupakan suatu penyakit bakteri menular yang berpotensi serius yang terutama mempengaruhi paru-paru. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA dapat dilihat pada grafik berikut.

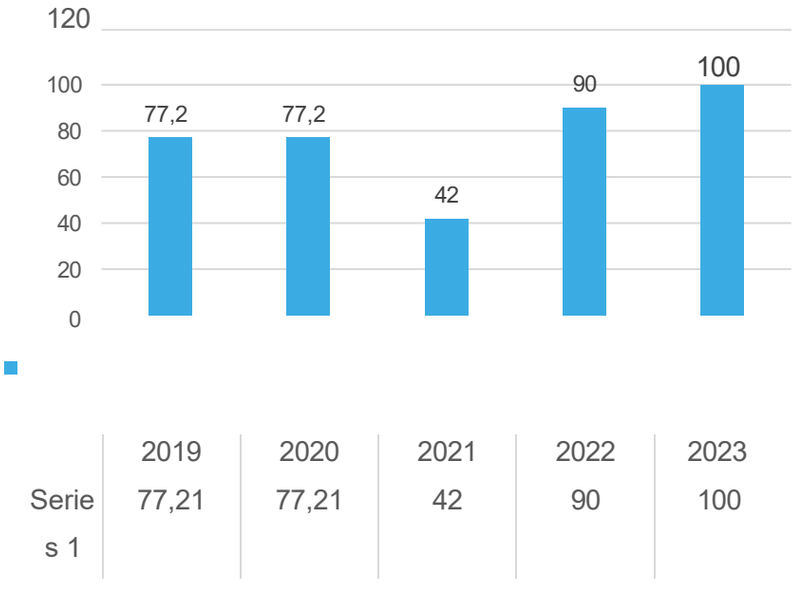

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, 2024

Gambar 27. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA

Berdasarkan grafik di atas dapat dijelaskan Cakupan penemuan dan penangan penderita penyakit TBC BTA di Kabupaten Sikka pada Tahun 2019-2023 mengalami penurunan. Pada Tahun 2019-2020 sebesar 77,21%, pada Tahun 2021 menjadi 42% dan pada Tahun 2022 meningkat menjadi 90% sedangkan pada Tahun 2023 sebesar 100%.

j. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit Demam Berdarah Dengue

Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue, yang masuk ke peredaran darah manusia melalui gigitan nyamuk dari genus Aedes, misalnya Aedes Aegepty atau Aedes Albopictus. Penyakit ini berkaitan dengan kondisi lingkungan dan perilaku masyarakat. Cakupan penderita DBD tahun 2019-2023 semuanya tertangani oleh petugas kesehatan yang berada di wilayah tersebut sebagaimana terlihat pada grafik berikut.

Grafik 2.21

Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita DBD

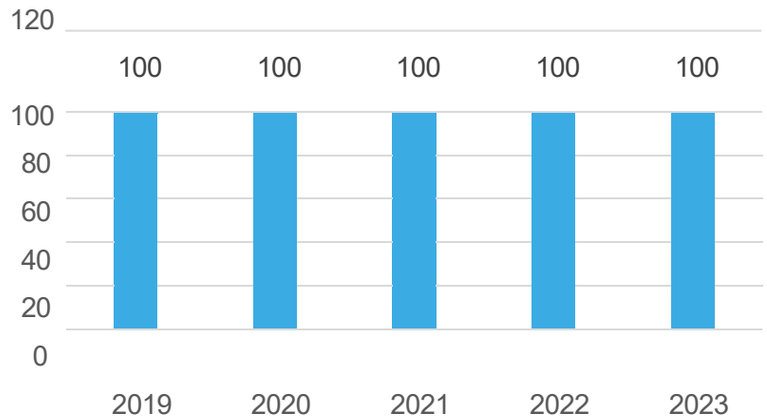

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, 2024

Gambar 28. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita DBD

2.1.4.1.3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik

Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik adalah luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik dibandingkan luas irigasi kabupaten. Luas irigasi Kabupaten Sikka dalam kondisi baik pada Tahun 2019 dan 2020 sebesar 50,71%, pada Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023 sebesar 46,25%.

b. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak

Rumah Tangga Pengguna Air Bersih adalah jumlah rumah tangga yang memiliki akses air bersih. Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Kabupaten Sikka sampai dengan Tahun 2022 sebanyak 68.799 Rumah Tangga sedangkan pada Tahun 2023 sebanyak35.254 rumah tangga dari total keseluruhan rumah tangga 64.436 rumah tangga.

Persentase Penduduk Berakses Air Bersih adalah penduduk berakses air bersihberbandingdengan jumlah penduduk. Persentase Penduduk Berakses Air Bersih di Kabupaten Sikka padaTahun 2019 dan 2020 sebesar 38,36%, pada Tahun 2021 naik menjadi 41,86% , pada Tahun 2022 naik menjadi 53,51% dan pada tahun 2023 naik menjadi 54,71%. Capaian ini masih lebih rendah dari target SDGs sebesar 65%.

c. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Limbah atau Sanitasi Layak

Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Limbah atau Sanitasi Layak adalah jumlah rumah tinggal yang bersanitasi layak berbanding jumlah seluruh rumah tinggal. Rumah Tangga dengan Akses Air Limbah atau Sanitasi Layak di Kabupaten Sikka pada Tahun 2019 sebesar 46,9%, pada Tahun 2020 sebesar 46,9% padaTahun 2021 naik menjadi 49,34%, pada Tahun 2022 naik menjadi 50,97% dan pada Tahun 2023 naik menjadi 51,28%.

d. Persentase Drainase Skala Kota dalam Kondisi Baik

Persentase Drainase Skala Kota dalam Kondisi Baik adalah panjang drainase dalam kondisi baik berbanding panjang seluruh drainase kabupaten. Drainase Skala Kota dalam Kondisi Baik di Kabupaten Sikka pada Tahun 2019 sebesar 57,53%, pada Tahun 2020 sebesar 57,53% pada Tahun 2021 sebesar 67,67%, pada Tahun 2022 dan Tahun 2023 naik menjadi sebesar 64,94%.

e. Persentase Kualitas Sarana dan Prasarana Jalan dan Jembatan

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalulintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air,serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori,dan jalan kabel.

Persentase Kualitas Sarana dan Prasarana Jalan dan Jembatan merupakan panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik berbanding panjang seluruh jalan kabupaten di daerah tersebut.Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (>40 km/jam) di Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.22

Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (>40 km/jam) Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023

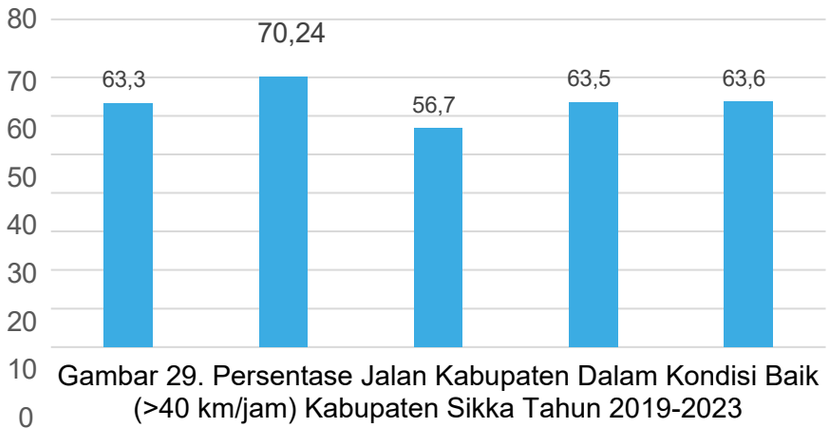

Gambar 29. Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (>40 km/jam) Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Sikka, 2024

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (>40 km/jam) di Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi. Tahun 2019 sebesar 63,32%, pada Tahun 2020 naik menjadi 70,24%, Tahun 2021 turun menjadi 56,75% , pada Tahun 2022 naik menjadi 63,57% dan Tahun 2023 naik menjadi 63,66 %.

f. Rasio Panjang Jalan Per Satuan Penduduk

Rasio Panjang Jalan Per Satuan Penduduk diperoleh dengan membagi jumlah panjang jalan (Km) dengan jumlah penduduk suatu wilayah. Rasio ini memiliki arti 1 Km jalan di wilayah tersebut berbanding dengan akses untuk melayani sejumlah penduduk. Semakin tinggi nilai rasio, maka semakin tinggi pula masyarakat yang dilayani. Rasio Panjang Jalan Per Satuan Penduduk Kabupaten Sikka Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Table 17. Rasio Panjang Jalan Kabupaten Per Satuan Penduduk

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Panjang Jalan	Km	844,25	844,25	844,25	844,25	844,25
Jumlah Penduduk	Jiwa	321.765	323.828	324.252	327.000	322.181
Rasio Panjang Jalan Per Satuan Penduduk	**Km/jiwa**	**0,002647**	**0,002624**	**0,002607**	**0,00258**	**0,002620**

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Sikka, 2024

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Rasio Panjang Jalan Per Satuan Penduduk Kabupaten Sikka Tahun 2019-2022 mengalami penurunan disebabkan karena bertambahnya jumlah penduduk setiap tahun sedangkan panjang jalan Kabupaten tetap.

2.1.4.1.4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Aspek perumahan rakyat dan kawasan permukiman menjadi sangat penting dalam menjaga kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Untuk menganalisis kinerja urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman selama periode tertentu, kita dapat mempertimbangkan beberapa indikator kunci yang mencerminkan kondisi dan perkembangan dalam hal ini. Salah satu indikator penting adalah Rasio Rumah Layak Huni, yang mengukur proporsi rumah di wilayah ini yang memenuhi standar keamanan, kesehatan, dan kenyamanan. Rasio Luas Permukiman Layak Huni adalah parameter yang menunjukkan seberapa besar luas wilayah yang telah dibangun dengan permukiman yang memadai. Persentase Luas Permukiman Kumuh adalah indikator yang menggambarkan sejauh mana wilayah ini menderita dari permukiman yang tidak layak. Indikator lain yang relevan adalah Persentase Jaringan Irigasi, yang mencerminkan sejauh mana wilayah ini memiliki infrastruktur penting untuk pertanian dan distribusi air. Selain itu, Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Limbah atau Sanitasi Layak menunjukkan sejauh mana penduduk memiliki akses ke fasilitas sanitasi yang aman dan sehat. Terakhir, Persentase Drainase Skala Kota dalam Kondisi Baik mencerminkan kemampuan wilayah ini dalam mengelola air hujan dan meminimalkan risiko banjir serta dampak lingkungan lainnya.

Melalui pemantauan dan analisis indikator-indikator ini, kita dapat memahami kinerja urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman di Kabupaten Sikka selama periode 2019-2023, mengidentifikasi aspek yang perlu ditingkatkan, dan merencanakan tindakan yang sesuai untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan penduduk yang tersedia pada tabel berikut.

Table 18. Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Rasio Rumah Layak Huni	1,03	0,37	0,89	0,52	0,52
2	Rasio luas permukiman layak huni	N/A	99,62	99,36	97,59	97,59
3	Persentase Luas Permukiman Kumuh	N/A	0,38	0,64	2,41	2,41
4	Jumlah Rumah Tidak Layak	21.175	20.890	20.425	20.004	20.004

	Huni (RTLH)					
5	Persentase Jaringan Irigasi	50,71%	50,71 %	46,25 %	46,25%	46,25%
6	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Limbah atau Sanitasi Layak	46,9%	46,9%	49,34 %	50,97%	50,97%
7	Persentase Drainase Skala Kota	57,53%	57,53 %	67,67 %	64,94%	64,94%
8	Jumlah Produksi Listrik	N/A	N/A	N/A	91.854 Kva	91.854 Kva
9	Jumlah Daya Listrik Terpasang	N/A	N/A	89.335 Kva	89.335 Kva	89.335 Kva

Sumber: Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026

Jika dilihat pada tabel di atas, kinerja urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman di Kabupaten Sikka antara tahun 2019 hingga 2023 mengungkapkan beberapa perubahan yang signifikan. Adanya fluktuasi rasio rumah layak huni. Pada tahun 2020, terjadi penurunan dalam rasio ini, yang mungkin mencerminkan tantangan dalam pemeliharaan dan pembangunan perumahan layak huni. Meskipun ada perbaikan di tahun 2021, 2022 dan 2023, masih ada pekerjaan yang harus dilakukan untuk memastikan proporsi rumah layak huni yang lebih besar. Luas permukiman layak huni relatif stabil dalam beberapa tahun terakhir. Walaupun terdapat penurunan kecil pada tahun 2022 dan 2023, masih sebagian besar wilayah permukiman memenuhi standar kelayakan. Tetapi, perlu tetap memperhatikan pemeliharaan dan perluasan area ini untuk menjaga kualitas perumahan.

Kemudian terjadi peningkatan yang signifikan dalam persentase luas permukiman kumuh dari tahun 2022 hingga 2023. Ini bisa menjadi perhatian serius, karena peningkatan permukiman kumuh dapat mengindikasikan masalah kesejahteraan dan sanitasi di beberapa wilayah. Persentase jaringan irigasi stabil dari tahun 2019 hingga 2020, tetapi mengalami penurunan pada tahun 2021 dan tetap rendah pada tahun 2022 dan 2023. Hal ini dapat mempengaruhi sektor pertanian dan akses air bagi masyarakat. Selanjutnya, adanya peningkatan dalam akses air limbah atau sanitasi layak, yang merupakan perkembangan positif dalam hal kesehatan masyarakat. Meskipun ada peningkatan pada tahun 2020 , kondisi drainase kota mengalami peningkatan lagi pada tahun 2022 dan 2023. Drainase yang baik penting untuk

mengurangi risiko banjir dan masalah lingkungan.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan tantangan dan pencapaian dalam urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman di Kabupaten Sikka. Penurunan rasio rumah layak huni dan peningkatan luas permukiman kumuh menjadi perhatian utama yang memerlukan perhatian dan perbaikan. Selain itu, pengelolaan jaringan irigasi, drainase kota, dan sanitasi juga harus terus diperbaiki untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

2.1.4.1.5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Tingkat kejahatan rendah dan suasana yang aman membuat warga dan pengunjung merasa nyaman beraktivitas. Ketentraman mengacu pada keadaan di wilayah atau masyarakat berada dalam keadaan damai, tenang dan bebas dari gangguan atau ancaman yang dapat menimbulkan ketidakamanan atau kecemasan. Ketertiban umum mengacu pada keadaan di mana masyarakat mematuhi aturan, norma, dan hukum yang berlaku. Hal ini seperti perilaku warga yang tidak melanggar norma-norma sosial atau hukum, sehingga menciptakan lingkungan yang teratur, terkendali dan aman bagi seluruh anggota masyarakat. Perlindungan masyarakat merujuk pada upaya dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait untuk melindungi keamanan, hak dan kesejahteraan warga dari potensi ancaman atau bahaya baik dari faktor internal maupun eksternal. Berikut data angka kriminalitas di Kabupaten Sikka.

Tabel 2.21.

Angka Kriminalitas Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023

No	Jenis Kriminal	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Kasus Narkoba	3	1	1	1	1
2	Jumlah Kasus Pembunuhan	2	1	4	3	3
3	Jumlah Kejahatan Seksual	1	5	1	5	5
4	Jumlah Kasus Penganiayaan	21	39	36	54	54
5	Jumlah Kasus Pencurian	4	25	98	41	41
6	Jumlah Kasus Penipuan	10	9	10	1	1
7	Jumlah Kasus Pemalsuan Uang	0	0	0	0	0
8	Jumlah Tindak Kriminal selama 1 tahun	39	80	190	286	286
9	Jumlah Penduduk	321.765	321.953	324.252	327.000	327.000

10	Angka Kriminalitas (8)/(9)	0,00012	0,00024	0,00058	0,00087	0,00087

Sumber: Statistik Kriminal Provinsi NTT 2019-2024, BPS

Berdasarkan data tersebut maka dapat dilihat mayoritas jenis kriminal ada pada kasus penganiayaan dan pencurian. Terjadi kenaikan kasus penganiayaan dari tahun 2020 sebanyak 39 kasus jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebanyak 21 kasus, hal ini menunjukkan perlunya upaya untuk mencegah kasus penganiayaan. Tahun 2021 mengalami penurunan dalam jumlah kasus penganiayaan, mencapai 36 kasus. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk situasi sosial atau faktor ekonomi. Meskipun terjadi sedikit penurunan pada tahun 2021 sekitar 36 kasus, jumlah kasus penganiayaan masih cukup tinggi. Tahun 2022 dan Tahun 2023 menunjukkan peningkatan signifikan dalam kasus penganiayaan, mencapai 54 kasus. Hal ini memerlukan tindakan serius untuk menganalisis dan mengatasi potensi penyebab peningkatan ini.

Kasus pencurian di Tahun 2019 memiliki tingkat kasus pencurian mencapai 4 kasus. Hal ini merupakan indikasi masalah keamanan di wilayah Kabupaten Sikka. Selanjutnya pada tahun 2020 menunjukkan adanya peningkatan dalam jumlah kasus pencurian, yaitu ada 25 kasus. Hal ini disebabkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi tingkat kejahatan. Kemudian tahun 2021 mengalami kenaikan jumlah kasus pencurian menjadi 98 kasus, hal ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan untuk memperketat tindakan keamanan, tentunya ini merupakan peningkatan yang sangat besar dan membutuhkan tindakan cepat dan serius untuk menanggulanginya. Tahun 2022 dan Tahun 2023 menunjukkan penurunan jumlah kasus pencurian menjadi 41 kasus. Meskipun masih tinggi, tetapi hal ini menunjukkan adanya upaya untuk mengurangi kasus pencurian.

Kasus penganiayaan dan pencurian mengalami fluktuasi dalam tingkat kriminalitas selama periode 2019 hingga 2023. Kasus penganiayaan mengalami kenaikan signifikan pada tahun 2022 dan 2023, sementara kasus pencurian mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2021. Keseluruhan Kabupaten Sikka mengalami fluktuasi yang signifikan dalam tingkat kriminalitas selama periode 2019 hingga 2023 dan mencapai puncaknya pada tahun 2022 dan 23 dengan 286 kasus. Hal ini menunjukkan pentingnya upaya yang berkelanjutan dalam memperkuat tindakan keamanan dan pencegahan kejahatan di Kabupaten Sikka ini. Pihak berwenang perlu melakukan analisis mendalam untuk mengidentifikasi penyebab fluktuasi ini dan mengimplementasikan strategi yang tepat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Sikka. Selanjutnya akan dibahas terkait penegakan perda dan tingkat penyelesaian pelanggaran K3.

Table 19. Persentase Penegakan Perda dan Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3	100	100	100	100	100
2	Persentase Penegakan PERDA	100	100	100	100	100

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja, 2024

Selama kurun waktu lima tahun, dari 2019 hingga 2023, Kabupaten Sikka telah mencapai prestasi yang sangat baik dalam hal Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta Penegakan Peraturan Daerah (PERDA). Persentase baik dalam Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 dan Persentase Penegakan PERDA selama lima tahun menunjukkan komitmen dan kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Sikka dalam mengelola dan mempertahankan standar tinggi terkait keselamatan dan kesehatan kerja serta kepatuhan terhadap aturan hukum setempat. Pencapaian ini tidak hanya mencerminkan tata kelola pemerintahan yang baik, tetapi juga memberikan dampak positif pada kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Sikka.

Selanjutnya pada Kinerja Pelayanan Umum Perlindungan Masyarakat mengacu pada evaluasi dan penilaian terhadap efisiensi, efektivitas, dan kualitas dari layanan-layanan yang disediakan oleh instansi pemerintah dalam rangka melindungi dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini meliputi berbagai aspek, termasuk respons terhadap kejadian atau situasi darurat, penanganan kasus-kasus hukum, keamanan umum, serta upaya-upaya untuk mencegah dan mengatasi potensi ancaman terhadap keamanan dan kesejahteraan masyarakat.

20. Kinerja Pelayanan Umum Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	3:10000	3:10000	3:10000	3:10000	3:10000
2.	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 +-Penduduk	116:10.000	N/A	N/A	78:1000	78:1000
3.	Rasio Pos Siskamling per jumlah	3:1	3:1	3:1	3:1	3:1

	desa/kelurahan					
4.	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	18 Menit	18 Menit	18 Menit	18 Menit	18 Menit
5.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	5.30%	21.69%	21.69%	21.69%	21.69%

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja, 2024

Indikator Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK), terdapat perlambatan tingkat waktu tanggap yang mencapai 18 menit, yang mana standar yang seharusnya adalah 15 menit. Waktu tanggap merupakan indikator krusial dalam mengevaluasi kinerja tim pemadam kebakaran dalam merespons situasi darurat. Perlunya upaya untuk memperbaiki respons dan memastikan bahwa tim dapat tiba di lokasi secepat mungkin. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan dalam waktu tanggap dan mengambil tindakan yang tepat, Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) dapat memperbaiki kinerja mereka dalam memberikan layanan yang cepat dan efektif dalam situasi darurat kebakaran. Lebih lanjut dalam hal Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota pada tahun 2019, cakupan pelayanan bencana kebakaran stabil di sekitar 5%. Hal ini menunjukkan bahwa pada awal periode, pelayanan terkait kebakaran di Kabupaten Sikka masih belum mengalami perkembangan yang signifikan. Tahun 2020,2021, 2022 dan 2023 menunjukkan lonjakan yang signifikan dalam cakupan pelayanan bencana kebakaran, mencapai 21,69%. Ini menandakan kemajuan yang berarti dalam upaya pemerintah daerah untuk memperbaiki kesiapan dan respons terhadap kebakaran.

2.1.4.1.6. Urusan Sosial

a. Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Rehabilitasi Sarana Sosial adalah fasilitas yang diadakan oleh pemerintah atau pihak swasta yang dapat dimanfaatkan masyarakat umum. Jumlah Sarana Sosial Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada grafik berikut.

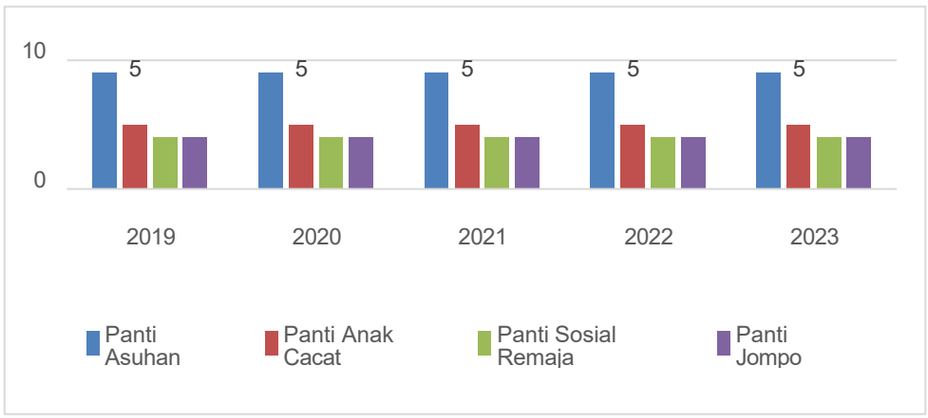

Gambar 30. Jumlah Sarana Sosial

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Sikka, 2024

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Jumlah Sarana Sosial Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023 terdiri dari Panti Asuhan sebanyak 9 lembaga, Panti Anak Cacat sebanyak 5 lembaga, Panti Sosial Remaja sebanyak 4 lembaga dan Panti Jompo sebanyak 4 lembaga. Dari total 22 sarana sosial yang ada di Kabupaten Sikka hanya 1 panti jompo yang dikelola oleh Pemerintah sedangkan 21 sarana sosial lainnya dikelola oleh pihak swasta (*filantropis*).

b. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Yang Memperoleh Bantuan Sosial

Pelayanan urusan sosial yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sikka menyasar kepada masyarakat yang masuk dalam kategori penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). PMKS sendiri merupakan seseorang keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan yang tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan oleh karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik secara jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan, dan gangguan tersebut bisa berupa kemiskinan, keterlantaran, kejahatan, ketunaan, keterbelakangan, atau keterasingan dan kondisi atau perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung.

Dalam rangka mengurangi jumlah Penduduk Miskin dan Keluarga Sasaran (PMKS), pemerintah daerah berupaya memberikan bantuan dan mengatasi masalah kesejahteraan sosial. Terdapat peningkatan persentase PMKS yang menerima bantuan sosial dari pemerintah daerah, yang meningkat dari 23% pada tahun 2019 menjadi 53,77 persen pada tahun 2023. Sementara itu, persentase PMKS yang ditangani juga mengalami peningkatan dari 55,40 persen pada tahun 2019 menjadi 1,80 persen pada

tahun 2023. Ini menunjukkan komitmen serius pemerintah daerah dalam mengurangi jumlah PMKS di Kabupaten Sikka. Namun, pemerintah daerah belum melaksanakan indikator persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya, serta persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial, karena belum ada pembangunan panti sosial yang dilakukan.

PPKS yang memperoleh Bantuan Sosial adalah seseorang, kelompok maupun masyarakat yang karena sesuatu hambatan, kesulitan atau gangguan sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, yang mengakibatkan tidak terpenuhi kebetuhan hidup, baik jasmani, rohani maupun sosial dengan wajar. Persentase PPKS yang memperoleh Bantuan Sosial Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.24.

Persentase PPKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial

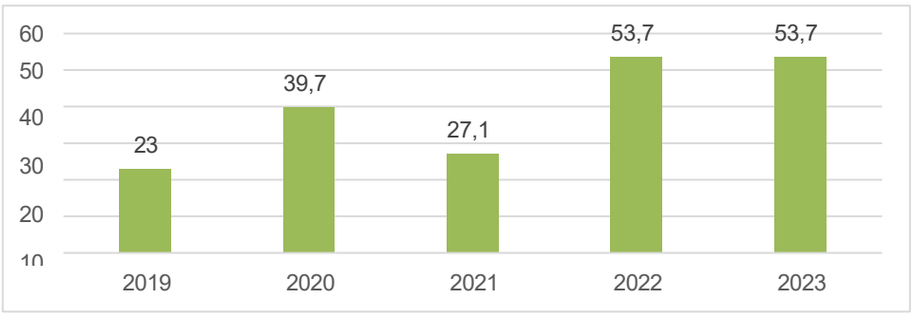

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Sikka, 2024

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2019 sebesar 23%, Tahun 2020 sebesar 39,79%, Tahun 2021 menjadi 27,11% dan pada Tahun 2022 dan Tahun

2023 sebesar 53,77%.

2.1.4.1.7. Urusan Tenaga Kerja

Kondisi ketenagakerjaan suatu wilayah dapat dipandang sebagai refleksi perekonomian dari wilayah tersebut. Sehingga perubahan perekonomian yang terjadi pada suatu wilayah akan berdampak pada masalah ketenagakerjaan yang diantaranya berkaitan dengan masalah pasar kerja di wilayah itu. Kondisi pasar kerja tersebut merupakan elemen penting dalam penentuan permintaan barang dan jasa dalam perekonomian. Permintaan terhadap barang dan jasa ini selanjutnya akan menentukan permintaan terhadap pekerja yang berarti juga mempengaruhi sisi penawaran pekerja. Selain itu, perubahan komposisi penduduk menurut usia dan jenis kelamin menentukan siapa yang berpotensi masuk dalam pasar kerja, disamping mutu pendidikan juga mempengaruhi pasar

kerja. Secara teoritis, ketenagakerjaan (khususnya sisi penawaran tenaga kerja) dipengaruhi oleh banyak faktor termasuk jumlah penduduk, struktur umur, jenis kelamin, tingkat pendapatan riil dan distribusinya, angka upah riil, struktur ekonomi, partisipasi dalam sistem pendidikan, kebiasaan atau tradisi peran kerja dan partisipasi kerja. Tanpa pertambahan penduduk sekalipun, sebagian besar angkatan kerja di masa mendatang kini sudah lahir.

Penduduk dipandang dari sisi ketenagakerjaan merupakan suplai bagi pasar tenaga kerja di suatu wilayah. Namun tidak semua penduduk mampu melakukannya karena hanya penduduk yang berusia kerjalah yang bisa menawarkan tenaganya di pasar kerja. Penduduk usia kerja dibagi menjadi dua golongan yaitu yang termasuk angkatan kerja dan yang termasuk bukan angkatan kerja. Penggolongan usia kerja di Indonesia mengikuti standar internasional yaitu usia 15 tahun atau lebih. Angkatan kerja sendiri terdiri dari mereka yang aktif bekerja dan mereka yang sedang mencari pekerjaan. Mereka yang terakhir itulah yang dinamakan sebagai pengangguran terbuka. Sedangkan yang termasuk dalam kelompok bukan angkatan kerja adalah mereka yang masih bersekolah, mengurus rumah tangga, pensiunan dan lain-lain. Partisipasi angkatan kerja kabupaten sikka dapat di lihat pada tabel berikut.

Table 21. Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023

No.	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Tingkat pengangguran terbuka	3,56	4,00	4,54	4,5	2,62
2.	Tingkat partisipasi angkatan kerja	65,51	73,42	73,92	71,62	74,35
3.	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	122	2166	311	211	93

Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2024

Pada tabel di atas menunjukan Keadaan ketenagakerjaan Kabupaten Sikka sejak tahun 2020 menunjukkan kondisi yang cukup menggembirakan, dimana telah terjadi penurunan tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2023 menjadi 2,62. Sementara, berdasarkan informasi ketenagakerjaan yang dikumpulkan terlihat bahwa keterlibatan penduduk usia 15 tahun keatas dalam angkatan kerja selama periode 2019-2023 mengalami peningkatan yakni dari 65,91 persen pada tahun 2019 menjadi 74,35 persen pada tahun 2023.

Table 22. Keadaan Tenaga Kerja, Kesempatan Kerja dan Pengangguran Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Tingkat partisipasi angkatan kerja	65,91	73,42	73.29	68,40	74,35
2	Angka partisipasi angkatan kerja	0,70	0,73	0,73	0,71	

3	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	67	45	45	55	44
4	Pencari kerja yang ditempatkan	20	5	6	320	93
5	Tingkat pengangguran terbuka	3,56	4,00	4,54	4.51	2,62
6	Keselamatan dan perlindungan	2.286	2.086	2.286	2.486	
7	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Renstra Dinas Nakertrans 2024-2026, RPJMD Perubahan Kab. Sikka 2019-2023 dan Sikka Dalam Angka 2020-2024

2.1.4.1.8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Rasio KDRT adalah jumlah KDRT berbanding dengan jumlah Rumah Tangga. KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Rasio KDRT Tehadap Anak dan Terhadap Perempuan Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Table 23. Kinerja Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023

No.	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Rasio KDRT :	0,13	0,12	0,11	0,10	0,02
2.	Rasio Kekerasan Anak	6,60	6,10	5,60	5,10	12,51

Sumber: Dinas P2KBP3A, 2024

Berdasarkan data tersebut Kondisi di Kabupaten Sikka menunjukkan masih terdapat kasusnya kekerasan pada anak sebanyak 6,60 persen kasus 2019, mengalami penurunan menjadi 6,10 persen kasus 2020, terjadi lagi penurunan di tahun 2021 dan di tahun 2022 kemudian mengalami peningkatan yang cukup drastis pada tahun 2023 sebesar 12,51 persen kasus kekerasan anak di Kabupaten Sikka.

b. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

IPG adalah penghitungan ukuran pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia

antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPG sama dengan IPM. IPG Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.25.

Indeks Pembangunan Gender

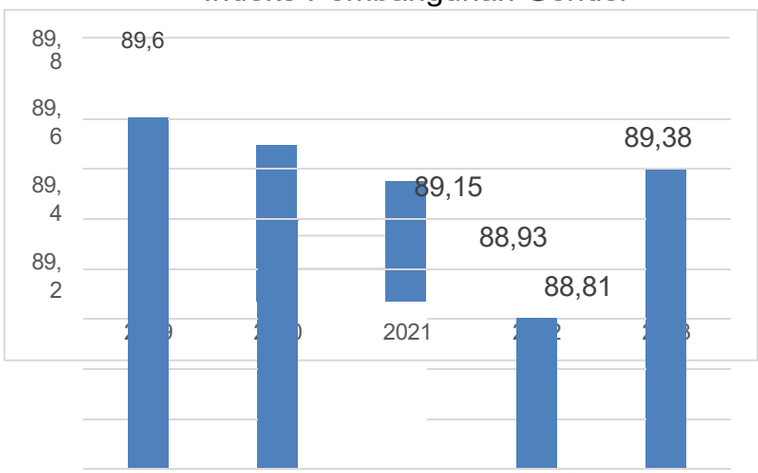

Gambar 31. Indeks Pembangunan Gender

Sumber: BPS 2018-2024

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa IPG Kabupaten Sikka Tahun 2019 sebesar 88,64, Tahun 2020 sebesar 89,15, pada Tahun 2021 sebesar 88,93, pada Tahun 2022 sebesar 88,81 dan pada Tahun 2023 sebesar 89,38.

c. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

IDG digunakan untuk mengukur persamaan peranan antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan ekonomi, politik dan pengembilan keputusan. IDG diharapkan mampu memberikan penjelasan tentang kesetaraan dan keadilan gender yang telah dicapai melalui berbagai program pembangunan serta dapat digunakan sebagai bahan dalam menentukan arah kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan keadilan gender. IDG dibentuk berdasarkan tiga komponen, yaitu keterwakilan perempuan dalam parlemen; perempuan sebagai tenaga profesional, teknisi, kepemimpinan dan ketatalaksanaan; dan sumbangan pendapatan. IDG Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada grafik berikut.

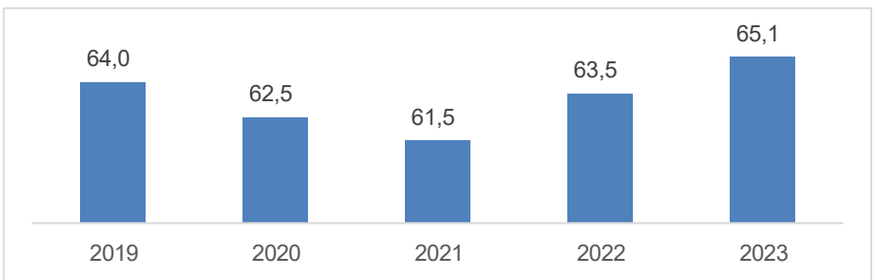

Gambar 32. IDG Kabupaten Sikka

Sumber: BPS 2019-2024

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa IDG Kabupaten Sikka

Tahun 2019 sebesar 64,03, Tahun 2020 sebesar 62,53, pada Tahun 2021 sebesar 61,53, pada Tahun 2022 sebesar 63,55 dan pada Tahun 2023 sebesar 65,10.

2.1.4.1.9. Urusan Pangan

Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergisi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Ketahanan Pangan dapat dilihat dari Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi dan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan berdasarkan Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM).

Skor PPH konsumsi adalah jenis dan jumlah bahan makanan rata rata perorang perhari yang umum dikonsumsi/dimakan penduduk dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan Skor PPH Ketersediaan berdasarkan Analisis NBM adalah jenis dan jumlah kelompok pangan utama yang dianjurkan untuk memenuhi kebutuhan energi dan Gizi. Skor PPH Konsumsi dan Skor PPH Ketersediaan berdasarkan Analisis NBM Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada grafik berikut.

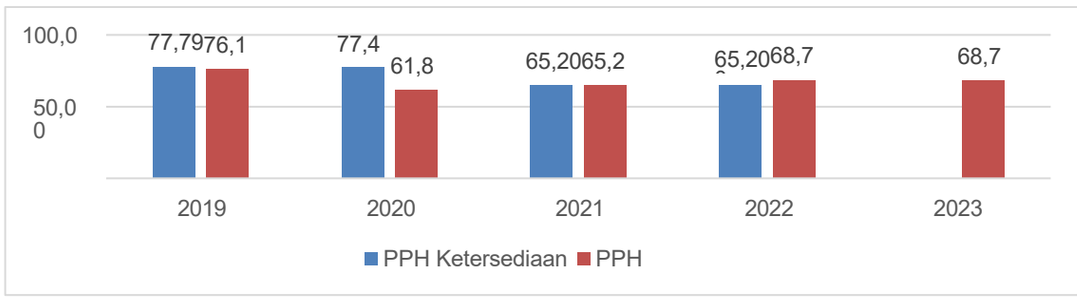

Gambar 33. Skor PPH Konsumsi dan Skor PPH Ketersediaan berdasarkan Analisis NBM

Sumber: Statistik Ketahanan Pangan 2019-2024 (Badan Ketahanan Pangan) dan BPS 2020-2023

Berdasarkan data di atas, Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan Kabupaten Sikka Tahun 2019–2022 mengalami fluktuasi. Skor PPH Ketersediaan pada Tahun 2019 sebesar 77,79, Tahun 2020 sebesar 77,42, pada Tahun 2021 dan Tahun 2022 menjadi sebesar 65,2 pada Tahun 2023 belum dirilis.

Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Kabupaten Sikka Tahun 2019 sebesar 76,10, pada tahun 2020 sebesar 61,80, Tahun 2021 sebesar 65,20, Tahun 2022 menjadi sebesar 68,70 dan untuk Tahun 2023 sebesar 69,70.

2.1.4.1.10. Pertanahan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 sertifikat tanah merupakan dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data

fisik suatu obyek pendaftaran tanah yang telah ada haknya. Pada Tahun 2019-2023, luas lahan yang telah tersertifikat di Kabupaten Sikka sebesar 340.776.332 m^2 atau sebanyak 91.469 bidang. Sementara pada Tahun 2020 sebesar 115.645 m^2 atau 40 bidang dan Tahun 2021 sebesar 230.745 m^2 atau 54 bidang.

a. Persentase Konflik Pertanahan yang Diselesaikan

Persentase Konflik Pertanahan yang Diselesaikan adalah jumlah konflik pertanahan yang diselesaikan berbanding konflik pertanahan yang dilaporkan. Persentase Konflik Pertanahan yang diselesaikan di Kabupaten Sikka selama Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 sebesar 100%.

b. Sertifikat Hak Milik Pemerintah

Sertifikat Hak Milik Pemerintah Kabupaten Sikka berupa tanah yang diperoleh dari hasil pembelian dan hibah dapat dilihat pada tabel berikut.

Table 24. Sertifikat Hak Milik Pemerintah Tahun 2023

No	Penggunaan	Asal_usul	Keterangan
1	Terminal Darat	Pembelian	Tanah Rencana Terminal Darat (Bidang 1)
2	Terminal Darat	Pembelian	Tanah rencana Terminal Darat (Bidang 2)
3	Jalan akses masuk pelabuhan	Pembelian	Tanah jalan akses masuk pelabuhan
4	Puskesmas Nita	Pembelian	Tanah untuk Bangunan Puskesmas Nita_Koreksi luas 2.033 M2 menjadi 1.892 sesuai sertifikat HP 26
5	Rawat Inap Puskesmas Nita	Pembelian	SK Bupati Nomor 209/HK/2017 Tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Objek Pajak Permukaan Bumi berupa Tanh di Wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2017 halaman 156
6	Bangunan sekolah	Hibah	SDN Nuabari /Koreksi Luas 1.000 Menjadi 1.790/SK.01/HP/BPN.53.07/1/2022
7	Bangunan Sekolah	Pembelian	SDI Wairhubing/Koreksi Luas 2.030 M2 menjadi 1.885 M2 sesuai sertifikat HP 11
8	Bangunan SDI Sapanjawa	Pembelian	SDI Sapanjawa _Koreksi Luas 2.120 M2 menjadi 2.327 M2 sesuai sertifikat HP 04
9	SDI Hagarahu	Pembelian	SDI Hagarahu /Koreksi Luas 2.889 M2 menjadi 1.918 M2 sesuai sertifikat HP

			01
10	SDI Ladubewa	Pembelian	SDI Ladubewa /Koreksi Luas 2.289 M2 menjadi 6.425 sesuai sertifikat HP 02
11	Tanah Pemda	Pembelian	Tanah Pemda yang di tempati Hernimus Alo Ruha, Tgl perolehan tdk diketahui dicatat 31 des. 2004_koreksi luas sebelumnya 126 M2 menjadi 133 M2 sesuai sertifikat HP 38
12	Tanah Posyandu	Hibah	Tanah Posyandu Bolatobong di RT 007 / RW 001_Koreksi Luas sebelumnya 88 M2 menjadi 307 sesuai Sertifikat HP 04
13	Tanah Pos Jaga	Hibah	Tanah Pos Jaga di RT.021 / RW.007_koreksi Luas sebelumnya 100 M2 menjadi 99 M2 Sesuai Sertifikat HP 05
14	Tanah MCK Komunal	Hibah	Tanah MCK Komunal di RT 12 / RW.04_Koreksi Luas Sebelumnya 10.30 M2 menjadi 64 M2 sesuai Sertifikat HP 0007
15	Tanah MCK	Hibah	Tanah MCK RT.12 / RW. 04 (Pekarangan Bapak Niko Pele)_koreksi luas sebelumnya 92 M2 menjadi 94 M2 sesuai sertifikat HP 0008
16	Tanah Kosong	Hibah	Tanah Sang Prabu di RT 07 / RW 003_koreksi luas sebelumnya 132 M2 menjadi 155 M2 sesuai sertifikat HP 0009
17	Tanah Eks HGU	Pembelian	Tanah Belakang Askes Samping RD Lanal Eks HGU/SK 301/659/2004_TGL 9/8/2004 (Luas awal 2.445 nilai 489.000.000._Hibah Ke MUI dan Majelis Agama Budha masing -masing luas 400 nilai 80.000.000.-sesuai SK Penghapusan Nomor:443/HK/2021 dari 68
18	Tanah Kosong	Pembelian	Keputusan Pemgelolah BMD Nomor ; 86/VIII/2022 _12 Agustus 2022
19	Tanah Kosong	Pembelian	Keputusan Pemgelolah BMD Nomor ; 86/VIII/2022 _12 Agustus 2022
20	Ruang Terbuka Hijau	Hibah	SK Bupati Nomor 209/HK/2017 Tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Objek Pajak Permukaan Bumi berupa Tanah di

			Wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2017 halaman 335
21	RTH Jalan Mawar	Hibah	SK Bupati Nomor 209/HK/2017 Tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Objek Pajak Permukaan Bumi berupa Tanah di Wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2017 halaman 335
22	Fasum	Hibah	SK Bupati Nomor 209/HK/2017 Tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Objek Pajak Permukaan Bumi berupa Tanah di Wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2017 halaman 376
23	Fasum/ Depan SMPN 3 Maumere	Hibah	SK Bupati Nomor 209/HK/2017 Tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Objek Pajak Permukaan Bumi berupa Tanah di Wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2017 halaman 376
24	Fasum/ Batas Hendrik Kasi dan Goldensius Lerang	Hibah	SK Bupati Nomor 209/HK/2017 Tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Objek Pajak Permukaan Bumi berupa Tanah di Wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2017 halaman 376
25	Fasum/ Batas Kanilius Weko, Roberus Lili Noa, Wilh	Hibah	SK Bupati Nomor 209/HK/2017 Tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Objek Pajak Permukaan Bumi berupa Tanah di Wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2017 halaman 376
26	Fasum/Batas Kaladin (Poros Maumere - Magepanda)	Hibah	SK Bupati Nomor 209/HK/2017 Tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Objek Pajak Permukaan Bumi berupa Tanah di Wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2017 halaman 376
27	Jalan masuk LANAL Tengah	Hibah	SK Bupati Nomor 209/HK/2017 Tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Objek Pajak Permukaan Bumi berupa Tanah di Wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2017 halaman 376
28	Disewakan Asianti	Hibah	SK Bupati Nomor 209/HK/2017 Tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Objek Pajak Permukaan Bumi berupa Tanah di

			Wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2017 halaman 376
29	Jalan	Hibah	SK Bupati Nomor 209/HK/2017 Tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Objek Pajak Permukaan Bumi berupa Tanah di Wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2017 halaman 376
30	Disewakan oleh Narti	Hibah	SK Bupati Nomor 209/HK/2017 Tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Objek Pajak Permukaan Bumi berupa Tanah di Wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2017 halaman 376
31	PAUD/Samping Taman Doa	Hibah	SK Bupati Nomor 209/HK/2017 Tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Objek Pajak Permukaan Bumi berupa Tanah di Wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2017 halaman 376
32	RTH Jalan Dahlia	Hibah	SK Bupati Nomor 209/HK/2017 Tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Objek Pajak Permukaan Bumi berupa Tanah di Wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2017 halaman 355
33	Jalan Samping Masuk LANAL ujung	Hibah	SK Bupati Nomor 209/HK/2017 Tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Objek Pajak Permukaan Bumi berupa Tanah di Wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2017 halaman 376
34	Fasum Samping BenyaminJa	Hibah	SK Bupati Nomor 209/HK/2017 Tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Objek Pajak Permukaan Bumi berupa Tanah di Wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2017 halaman 376
35	Penyuluh KB	Hibah	SK Bupati Nomor 209/HK/2017 Tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Objek Pajak Permukaan Bumi berupa Tanah di Wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2017 halaman 380
36	Fasum/Posyandu Ona	Hibah	SK Bupati Nomor 209/HK/2017 Tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Objek Pajak Permukaan Bumi berupa Tanah di

			Wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2017 halaman 380
37	SMPN Reroroja	Hibah	SK Bupati Nomor 209/HK/2017 Tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Objek Pajak Permukaan Bumi berupa Tanah di Wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2017 halaman 380

2.1.4.1.11. Urusan Lingkungan Hidup

a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Indikator yang digunakan dalam perhitungan IKLH adalah Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Hutan/Lahan. Adapun Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.28.
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

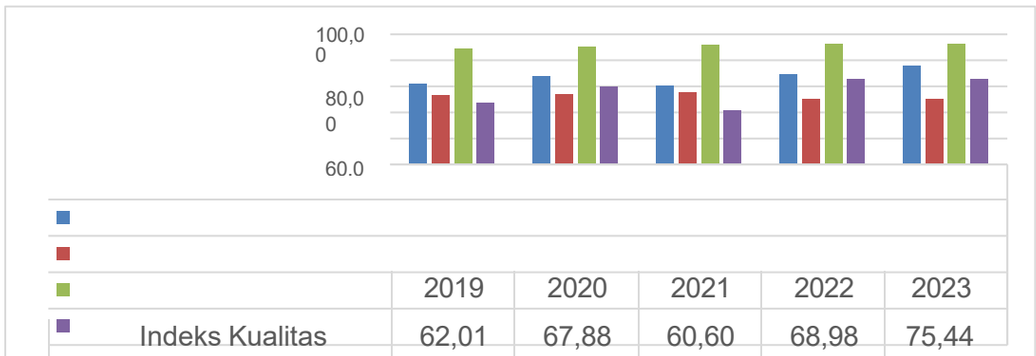

	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	62,01	67,88	60,60	68,98	75,44
Indeks Kualitas Air	53,33	53,75	55,45	50,00	50,00
Indeks Kualitas Udara	88,82	90,03	91,67	92,37	92,37
Indeks Kualitas Tutupan Lahan	46,92	59,59	41,17	65,66	65,66

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka, 2024

Gambar 34. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada Tahun 2019 sebesar 62,01. Pada Tahun 2020 naik menjadi 67,88, pada Tahun 2021 turun menjadi 60,60, pada Tahun 2022 naik menjadi 68,98 dan pada Tahun 2023 menjadi sebesar 75,44.

b. Ruang Terbuka Hijau

Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau

mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Proporsi 20% luasan ruang terbuka hijau kota merupakan ukuran minimal yang disyaratkan untuk mencapai keseimbangan ekosistem kota baik keseimbangan sistem hidrologi dan keseimbangan mikroklimat maupun sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat. Selain itu ruang terbuka hijau diperlukan bagi aktivitas publik sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota.

Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Sikka meliputi Taman Tsunami, Lapangan Kota Baru, jalur hijau jalan, taman lingkungan, resapan air dan RTH makam.

c. Volume Sampah yang tertangani

Indikator penanganan sampah didapatkan dari volume sampah yang terangkut ke TPA. Volume Sampah yang terangkut ke TPA di Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada grafik berikut.

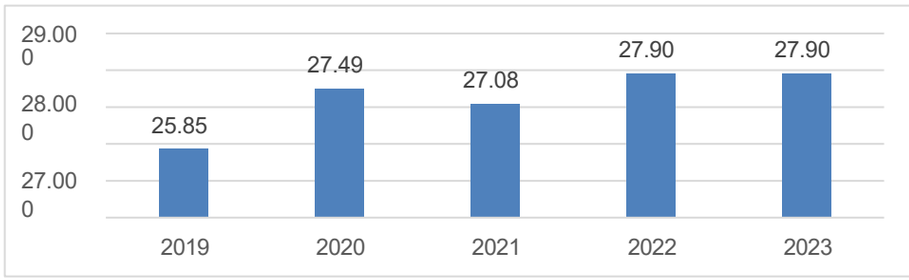

Gambar 35. Volume Sampah yang tertangani diKabupaten Sikka (Ton)

Sumber: Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Volume Sampah yang tertangani di Kabupaten Sikka Tahun 2019 sebesar 25.855 ton. Tahun 2020 sebesar 27.479 ton, Tahun 2021 sebesar 27.086 dan pada Tahun 2022-2003 sebesar 27.907 ton.

d. Jumlah Sarana Prasana Persampahan

Jumlah Sarana Prasana Persampahan yang digunakan untuk mengangkut sampah dalam wilayah Kabupaten Sikka terdiri dari :

- Dump Truck : 8 Unit (Kondisi Baik 5, Rusak 3)
- Amroll : 4 Unit (Kondisi Baik 3, Rusak 1)
- Pick Up : 1 Unit
- Roda 3 : 6 Unit (Kondisi Baik 5, Rusak 1)
- Gerobak Dorong : 5 Unit (Kondisi Baik 2, Rusak 3)
- Excavator : 1 Unit
- Doozer : 1 Unit
- Container : 41 Unit (Kondisi Baik 40, Rusak 1)
- TPS : 48 Lokasi

- TPA : 1 Lokasi

2.1.4.1.12. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik, pemerintahan dan pembangunan. Pelayanan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi penduduk sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Table 25. Capaian Kinerja Pelayanan Kependudukan Kabupaten Sikka

No.	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Rasio penduduk ber KTP	95.97	95,92	94,34	95,5	95,5
2.	Rasio bayi berakte kelahiran	85,2	85,4	86,04	85,08	85,08
3.	Rasio pasangan berakte nikah	40,79	43,39	49,15	51,62	51,62
4.	Kepemilikan KTP	200.684	207.037	214.290	226.210	226.210
5.	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	439:1000	448:1000	461:1000	464:1000	464:1000
6.	Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten	Ada Jumlah: 1	Ada Jumlah: 1	Ada Jumlah: 1	Ada Jumlah: 1	Ada Jumlah: 1
7.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, 2024

Berdasarkan data tersebut khususnya pada rasio penduduk ber-KTP pada periode tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019, Kabupaten Sikka memiliki rasio penduduk yang memiliki KTP sebesar 95,97 persen. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk telah terdaftar dan memiliki dokumen identifikasi resmi, yakni KTP. Meskipun capaian ini sudah cukup baik, masih ada ruang untuk meningkatkan jumlah penduduk yang memiliki KTP. Selanjutnya pada tahun 2020 rasio penduduk ber-KTP, mencapai 95,92 persen. Capaian ini mencerminkan kesuksesan pihak berwenang dalam meningkatkan pelayanan kependudukan dan mengajak masyarakat untuk mendaftar dan memiliki KTP sebagai dokumen identifikasi resmi. Kabupaten Sikka pada tahun 2021 mengalami sedikit penurunan rasio penduduk ber-KTP

menjadi 94,34 persen. Meskipun ada penurunan, tingkat ini masih tinggi dan menunjukkan bahwa pelayanan kependudukan tetap efektif dalam mendaftarkan dan memproses KTP bagi sebagian besar penduduk, Pada Tahun 2022 dan Tahun 2023, rasio penduduk ber-KTP kembali meningkat menjadi 95,5 persen. Ini menandakan bahwa pelayanan kependudukan terus berjalan dengan baik dan masyarakat tetap aktif dalam melakukan registrasi dan memperbaharui KTP mereka.

Jika dilihat pada Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kabupaten Sikka selama lima tahun terakhir menunjukkan tren positif. Pada tahun 2019 mencapai angka 200.684 orang. Tren peningkatan terus berlanjut pada tahun 2020, dengan jumlah kepemilikan KTP mencapai

207.037 orang. Tahun 2021 mencatat pertumbuhan lanjutan dalam kepemilikan KTP mencapai angka 214.290 orang. Pada tahun 2022 dan 2023, jumlah kepemilikan KTP mencapai 226.210 orang, menunjukkan peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun.

2.1.4.1.13. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a. Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

LPMK dan BPD adalah lembaga kemasyarakatan yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat yang selanjutnya dimanfaatkan sebagai wahana partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan masyarakat. Selain merupakan lembaga yang sifatnya dari, oleh dan untuk rakyat, LPMK dan BPD adalah mitra pemerintah dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan.

LPMK menjadi wadah dalam mensosialisasikan dan menggerakkan sebuah program pembangunan di kelurahan. Indikator jumlah kelompok binaan LPMK ini seharusnya dapat menggambarkan jumlah kelompok binaan LPMK, sehingga dapat diketahui berapa banyak kelompok binaan yang telah diberikan pemberdayaan dan penguatan kapasitas oleh LPMK. LPMK dan BPD pada umumnya memiliki fungsi koordinatif dengan Pemerintah Daerah dan tidak memiliki kelompok binaan. Jumlah LPMK dan BPD di Kabupaten Sikka Tahun sampai dengan tahun 2023 yaitu 194 lembaga yang terdiri dari 13 LPMK dan 181 BPD.

b. Jumlah Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Aktif

PKK adalah kegiatan sekelompok kaum perempuan yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan keluarga. Peran PKK menjadi sangat strategis untuk merealisasikan visi dan misi pemerintah pada lingkup yang paling kecil. Jumlah PKK aktif di Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023 sebanyak 169 kelompok yang terdiri dari 1 PKK Tingkat Kabupaten, 21 PKK

Tingkat Kecamatan dan 181 PKK Tingkat Desa.

2.1.4.1.14. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a. Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga

Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah anak dan jumlah keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah samping dengan derajat ketiga. Anak adalah penduduk berusia 0-17 tahun. Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga di Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.30.

Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga

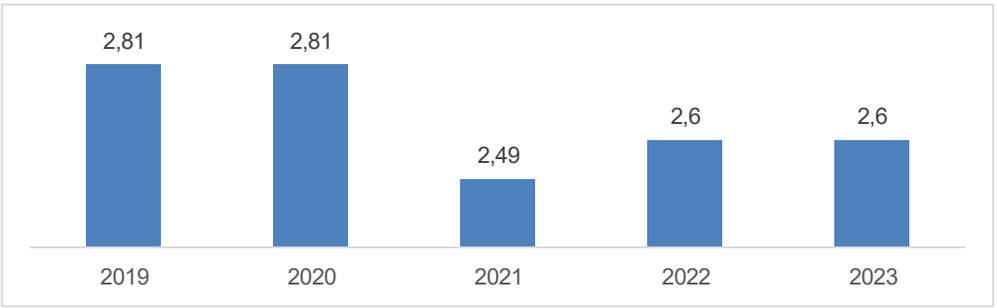

Gambar 36. Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga

Sumber: Dinas P2KBP3A Kabupaten Sikka, 2024

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga di Kabupaten Sikka Tahun 2019 sebesar 2,81, Tahun 2020 sebesar 2,81, Tahun 2021 sebesar 2,49 dan pada Tahun 2022-2923 sebesar 2,60.

b. Cakupan Peserta Keluarga Berencana (KB) Aktif

Peserta KB aktif merupakan Pasangan Usia Subur (PUS) yang pada saat ini masih menggunakan salah satu cara atau alat kontrasepsi. Cakupan peserta KB aktif dilihat berdasarkan proporsi jumlah peserta program KB aktif terhadap jumlah pasangan usia subur. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk. Cakupan peserta KB aktif Kabupaten Sikka Tahun 2019-2022 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Table 26. Cakupan peserta KB aktif

No.	Indikator Kinerja	Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Rasio Akseptor KB	1:0,678	1:0,692	1:0,712	1:0,550	1:0,550

Sumber : Dinas P2KBP3A Kabupaten Sikka, 2024

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Cakupan peserta KB aktif Kabupaten Sikka Tahun 2019 sebesar 1:0,678, Tahun 2020 sebesar 1:0,692, Tahun 2021 sebesar 1:0,712, pada Tahun 2022 dan Tahun 2023 sebesar 1:0,550.

2.1.4.1.15. Urusan Perhubungan

a. Jumlah Angkutan Umum yang Melayani Wilayah yang Telah Tersedia Jaringan Jalan

Indikator Angkutan Umum yang Melayani Wilayah yang Tersedia Jaringan Jalan adalah perbandingan antara jumlah angkutan umum yang sudah ada yang melayani wilayah dengan jumlah angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan. Jumlah Angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan di Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.31.
Jumlah Angkutan Umum yang Melayani Wilayah yang Telah Tersedia Jaringan Jalan

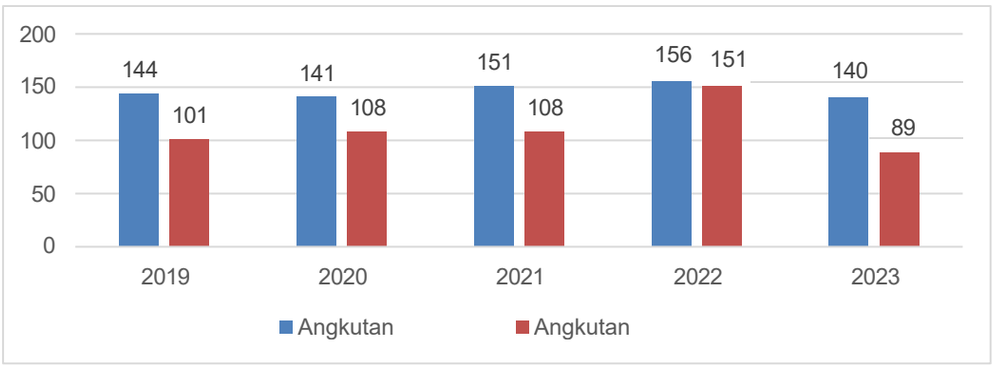

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka, 2024

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Jumlah Angkutan umum yang melayani wilayah Perkotaan di Kabupaten Sikka Tahun 2019 sebanyak 101 unit, Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021 sebanyak 108 unit, Tahun 2022 sebanyak 151 unit dan Tahun 2023 sebanyak 89 unit, sedangkan angkutan umum yang melayani wilayah Pedesaan di Kabupaten Sikka 2019 sebanyak 144 unit, Tahun 2020 sebanyak 141 unit, Tahun 2021 sebanyak 151 unit, Tahun 2022 sebanyak 156 unit dan pada Tahun 2023 sebanyak 140 unit.

b. Rasio Ijin Trayek

Izin Trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan/atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek, dimana jaringan trayek terdiri atas jaringan trayek lintas batas negara, jaringan trayek antar

kota antar provinsi, jaringan trayek antar kota dalam provinsi, jaringan trayek perkotaan, serta jaringan trayek perdesaan. Rasio ijin trayek adalah perbandingan jumlah ijin trayek yang dikeluarkan dengan jumlah penduduk. Rasio Ijin Trayek di Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada grafik berikut.

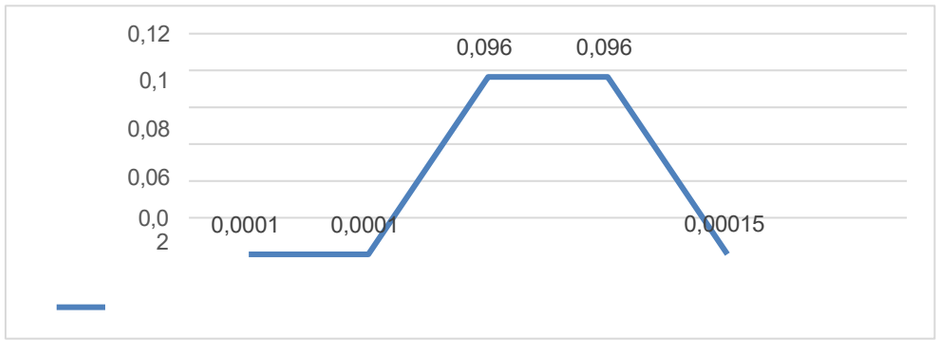

	2019	2020	2021	2022	2023	
Series 1	0,00013	0,00013	0,0965	0,0965	0,000153	

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka, 2024

Gambar 37. Rasio Ijin Trayek

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Rasio Ijin Trayek di Kabupaten Sikka Tahun 2019 dan Tahun 2020 sebesar 0,00013, Tahun 2021 dan Tahun 2022 sebesar 0,0965 sedangkan Tahun 2023 sebesar 0,000153.

c. Jumlah Uji KIR Angkutan Umum

Jumlah Uji KIR Angkutan Umum merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Pengujian dimaksud meliputi (1) Uji tipe yaitu pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan yang dilakukan terhadap landasan kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor dalam keadaan lengkap dan penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor yang dilakukan terhadap rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan bermotor yang dimodifikasi tipenya; dan (2) Uji berkala yaitu diwajibkan untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan, meliputi pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor dan pengesahan hasil uji. Jumlah Uji KIR Angkutan Umum selama Tahun 2022 dapat dilihat pada grafik berikut.

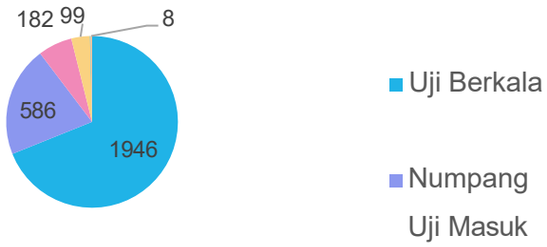

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka, 2024

Gambar 38. Jumlah layanan kendaraan yang di uji Pada Tahun 2023

Grafik 2.34.

Jumlah Angkutan Kota Per Rute Tahun 2023

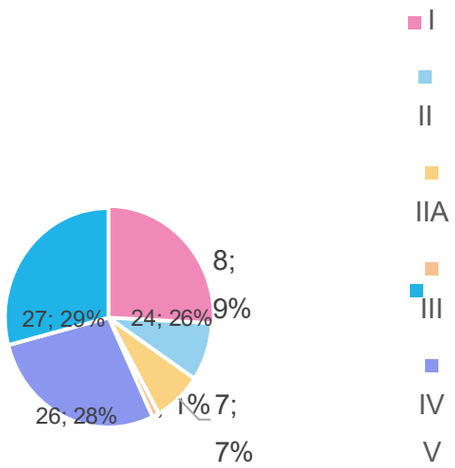

Gambar 39. Jumlah Angkutan Kota Per Rute Tahun 2023

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka, 2024

Dari grafik diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah kendaraan yang melayani rute masing-masing Lin tidak sama. Paling sedikit pada lin 1 sejumlah 1 unit dan paling banyak pada Lin 5 sebanyak 27 unit.

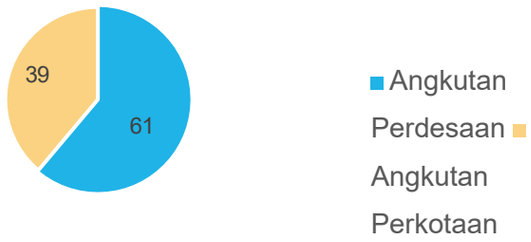

Gambar 40. Jumlah Angkutan Yang Berbadan Hukum Tahun 2023

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka, 2024

Dari grafik diatas dapat dijelaskan bahwa Angkutan kota yang telah berbadan hukum pada tahun 2023 sebanyak 89 unit dari jumlah kendaraan 89 unit, Sedangkan angkutan pedesaan yang telah berbadan hukum sebanyak 140 unit dari 140 angkutan pedesaan yang ada pada tahun 2023.

d. Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR)

Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum adalah lamanya waktu yang digunakan untuk melakukan KIR kendaraan. Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum di Kabupaten Sikka selama 26 menit sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Pengujian Kendaraan Bermotor (SOP PKB). Kegiatan pengujian meliputi pendaftaran dan verifikasi data pemohon selama 5 menit, pengisian formulir selama 3 menit, pengujian atau pemeriksaan selama 5 menit, pengetokan plat dan pemberian tanda samping selama 5 menit, dan pengesahan hasil uji selama 5 menit, pengambilan buku selama 3 menit. Sehingga total waktu yang dibutuhkan adalah 26 menit untuk masing-masing kendaraan. Selama tahun 2022 Lamanya pengujian kendaraan bermotor telah mengacu pada Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka Nomor : Dishub.551.2.21/15/III/2021 tentang Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

e. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bus

Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bus adalah sarana transportasi yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat pemberhentian sementara kendaraan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang dan barang hingga sampai ke tujuan akhir suatu perjalanan, juga sebagai tempat

pengendalian, pengawasan, pengaturan dan pengoperasian.Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bus di Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Table 27. Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bus

No.	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Bandara Udara	1	1	1	1	1
2	Terminal Angkutan Darat	2	2	2	2	2
3	Dermaga/Pelabuhan Penyeberangan	5	5	5	5	5
4	Tambatan Perahu	11	11	11	11	11

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka, 2024

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa sampai dengan Tahun 2022 jumlah pelabuhan udara sebanyak 1 unit, terminal angkutan darat sebanyak 2 unit, dermaga/pelabuhan penyeberangan 5 unit dan tambatan perahu sebanyak 11 unit.

2.1.4.1.16. Urusan Komunikasi dan Informatika

Urusan Komunikasi dan Informatika difokuskan pada pembinaan, pengawasan sarana dan prasarana komunikasi informatika. Capaian konerjanya dapat dilihat dari Indeks SPBE Kabupaten Sikka mencapai 1,94. Pemerintah mendorong kemudahan akses telekomunikasi bagi masyarakat, dengan capaian melakukan fasilitasi keberadaan menara telekomunikasi sebanyak 142 tower yang tersebar di 21 Kecamatan, yang dilayani oleh operator Telkomsel, XL Asiata dan Indosat.

Capaian pelaksanaan Urusan Komunikasi dan Informatika yang dapat dilihat dari beberapa indikator sasaran dan indikator program sebagai berikut.

a. Jumlah Media

Jumlah Media yang ada di Kabupaten Sikka dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Table 28. Medika di Kabupaten Sikka

NO	NAMA MEDIA	KETERANGAN
1	VICTORY NEWS	ELEKTRONIK / ON LINE DAN CETAK
2	LIPUTAN 6.COM	ELEKTRONIK/ON LINE
3	CENDANA NEWS.COM	ELEKTRONIK/ON LINE
4	METRODUNIA.id/METROTIMOR .id	ELEKTRONIK/ON LINE

5	KUMPARAN.COM	ELEKTRONIK/ON LINE
6	BENTARA.NET	ELEKTRONIK/ON LINE
7	OPOSISI.NEWS	ELEKTRONIK/ON LINE
8	LENTERA POS	ELEKTRONIK/ON LINE
9	TIMEX KUPANG	ELEKTRONIK/ON LINE DAN CETAK
10	SUARA FLORES	ELEKTRONIK/ON LINE
11	TV ONE	ELEKTRONIK/ON LINE
12	TVRI	ELEKTRONIK/ON LINE
13	VOXNTT.COM	ELEKTRONIK/ON LINE
14	MNC	ELEKTRONIK/ON LINE
15	EKORA NTT	ELEKTRONIK/ON LINE
16	KOMPAS TV	ELEKTRONIK/ON LINE
17	ZONALINE NEWS.COM	ELEKTRONIK/ON LINE
18	POS KUPANG	ELEKTRONIK / ON LINE DAN CETAK
19	MAUMERE NEWS. COM	ELEKTRONIK/ON LINE
20	RADIO SUARA SIKKA	ELEKTRONIK/ON LINE
21	SUARA SIKKA.COM	ELEKTRONIK/ON LINE
22	FLORES POS	ELEKTRONIK/ON LINE DAN CETAK
23	MEDIA INDONESIA	ELEKTRONIK/ON LINE
24	PROTOKOL DAN HUMAS	ELEKTRONIK/ON LINE
25	SELATAN INDONESIA	ELEKTRONIK/ON LINE
26	VIVATIMUR.COM	ELEKTRONIK/ON LINE
27	DETAK TERKINICOM	ELEKTRONIK/ON LINE
28	NTT PEDIA.id	ELEKTRONIK/ON LINE
29	FLORESKU	ELEKTRONIK/ON LINE
30	FLORES NEWS	ELEKTRONIK/ON LINE
31	HAK RAKYAT	ELEKTRONIK/ON LINE
32	SUARA BURUH	ELEKTRONIK/ON LINE

b. Jumlah Penyiaran Radio Lokal

Indikator jumlah penyiaran radio lokal adalah jumlah penyiaran radio yang masuk ke daerah.Jumlah penyiaran radio di Kabupaten Sikka berjumlah 1 unit yaitu LPPL Radio Suara Sikka.

c. Website Milik Pemerintah Daerah

Kabupaten Sikka memiliki website yang rutin diisi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka, yakni

www.sikkakab.go.id.Website tersebut memperbarui (update) berita dan foto hampir setiap hari. Dalam pengembangan manajemen sistem informasi untuk menunjang kinerja serta membangun sistem pemerintahan yang akuntabel telah dikembangkan berbagai aplikasi seperti LPSE. Selain itu juga terdapat beberapa website perangkat daerah.

d. Penyediaan Sarana Telekomunikasi

Sarana Telekomunikasi yang tersedia di Kabupaten Sikka berupa menara telekomunikasi sebanyak 140 tower yang tersebar di 21 Kecamatan, yang dilayani oleh operator Telkomsel, XL Asiata dan IM3.

e. Cakupan Pelayanan Publik berbasis aplikasi

Cakupan Pelayanan Publik berbasis aplikasi dapat dilihat dari pelayanan perangkat daerah menggunakan aplikasi yang sudah memiliki jaringan internet, antara lain: E-KTP, SIAK, E-KEUR, SIPD, SIMRS, SIMLUTAN, OSS, SANTER, E-Lapak, SIMPEG, E-POSS, SIRUP, SIBARU, SIPKP, JELAJAH MAUMERE.

Data Aplikasi Layanan Publik Yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi

Table 29. Aplikasi Layanan Publik Online Terintegrasi

No.	Nama OPD	Aplikasi	Keterangan / Fungsi
1	BPKAD	**SIPD**	SIPD adalah suatu aplikasi yang mendokumentasikan, mengadministrasikan serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang di sajikan kepada masyarakat
		Aplikasi Barang Milik Daerah	Aplikasi Barang Milik Daerah adalah aplikasi yang digunakan untuk menginventarisasi Brang Milik daerah
2	BAPENDA	**Aplikasi Pajak Daerah**	Aplikasi Pajak Daerah adalah aplikasi yang digunakan untuk pelayanan Pajak Daerah, Pajak Hotel, Pajak Restoran, pajak Parkir
		Smart PBB	aplikasi yang digunakan untuk pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan serta Pajak Bea Perolehan Tanah Bangunan
3	Bagian Organisasi	**E_Lapor**	Aplikasi E_Lapor adalah aplikasi layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan masyarakat yang di kelolah oleh PanRB
		Absen Santerkabsikka	Aplikasi Santer kabsikka adalah aplikasi absen dan Kinerja harian ASN Kabupaten Sikka

4	Bagian Hukum	**JDIH**	Aplikasi JDIH adalah aplikasi yang memuat tentang prodak – prodak hokum Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka
5	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	**SIMONEV**	Simonev atau Sistem Informasi Evaluasi dan Monitoring
		LPSE	Pengorganisasian Barang dan Jasa Secara Elektronik
		eCatalog	Apliakasi e_catalog adalah aplikasi belanja online yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengembangan Barang dan jasa apliaksi ini menyediakan bebagai macam produk dan pelbagai komuditas yang dibutuhkan oleh pemerintah
6	BKD	**Aplikasi SIPINTER**	Aplikasi SIPINTER adalah Sistem Informasi penilaian Mandiri penilaiaan system merit (kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan kepada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja.
		MySapk	Aplikasi MySAPK adalah aplikasi berbasis teknologi seluler untuk Pegawai Negeri Sipil yang terintegrasi dan terhubung secara daring dengan database PNS nasional untuk Profil Pegawai Negeri Sipil
		SAPK	Aplikasi SAPK adalah Sistem Informasi berbasis computer yang disusun sedemikian rupa untuk pelayanan kepegawaian
7	Dinas Penanaman Modal	**Aplikasi SICANTIK**	Aplikasi SICANTIK atau Aplikasi cerdas layanan perizinan dimanfaatkan untuk layanan perizinan berusaha maupun layanan izin lain yang digunakan oleh Dinas Penanaman Modal
8	Dinas Perumahan	**Aplikasi RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)**	Aplikasi Rumah Tidak Layak Huni yang di gunakan untuk mengiinventaris rumah tidak layak huni secara keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuni

9	Dispenduk	**SIAK**	Aplikasi SIAK adalah Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang memanfatkan teknologi dan Informasi dan Komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan Instansi Pelaksana
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	**Aplikasi SISKEUDES**	SISKEUDES adalah merupakan aplikasi keuangan Desa yang di gunakan untuk mengawal transparansi keuangan Desa
11	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	**Srikandi**	Aplikasi umum untuk mewujudkan kearsipan berbasis elektronik
12	Dinas PKO	**Dapodik**	Memudahkan proses Pelayanan Pendidikan
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	**SIDEKA – NG**	Aplikasi Desa Berbasis Web dan Layanan Administrasi Desa

Pemerintah Kabupaten Sikka juga memberikan layanan gratis internet (Hotspot) sebanyak 10 titik dengan Visat penguat sinyal terdapat di 21 titik. Berikut 10 titik Hotspot yang terdapat di Kabupaten Sikka, sebagai berikut :

Table 30. Titik Hotspot di Kabupaten Sikka

No.	Lokasi	Layanan	Bandwitch
1.	Kantor Suara Sikka	WMS	20 Mbps
2.	Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika	WMS	20 Mbps
3.	Toko Ban Sebelah Utara Patung Selamat Datang	WMS	20 Mbps
4.	Kios Foto Copy Sebelah BKKBN	WMS	20 Mbps
5.	Kantor Pengurus Taman Tsunami	WMS	20 Mbps
6.	Rumah Paroki Gereja Misir	WMS	20 Mbps
7.	Show Room Moobil Bento	WMS	20 Mbps
8.	Paroki Thomas Morus	WMS	20 Mbps
9.	Pos Satpam TKK Sang Timur	WMS	20 Mbps
10	Kios Kefen	WMS	20 Mbps
11.	Seminari Bunda Segala Bangsa	WMS	20 Mbps
12	Terminal Lokaria	WMS	20 Mbps

Table 31. Visat Tahun 2023

No	Lokasi
1	UPTD. PuskesmasHewokloang

2	UPTD. PuskesmasKewapante
3	R.S ST. Elisabeth Lela
4	R.S T.C Hillers
5	SDI Baokremot
6	Kantor Camat Bola
7	SDK 050 Wailamung
8	SDK 041 Talibura
9	Kantor Kepala Desa Hepang
10	PoliklinikST.Rafael
11	Kantor Desa Nelle Wutung
12	Min Al Iklas Tanjung Darat
13	PuskesmasTanarawa
14	SMPK Bunga Fatima Lela
15	SMP Negeri 1 Waigete
16	SMP Negeri 1 Talibura

No	Lokasi
17	SMP SUPRA Talibura
18	SMP Negeri Werang
19	Kantor BPP Waiblama
20	Kantor BPP Doreng
21	UPTD. Puskesmas Habibola
22	SMPK ST.Antonius Boganatar
23	SMPK Negeri Satap Bloro
24	Puskesmas Mapitara
25	Puskesmas Pembantu Watugong
26	SMP Negeri 1 Nita
27	Puskesmas Boganatar
28	Puskesmas Feondari
29	Akamdemi Keperawatan St.Elisabeth Lela
30	Puskesmas Wolofeo
31	Puskesmas Kota Uneng
32	Pastoral Watubala
33	Kantor Desa Nita
34	Puskesmas Paga
35	Polindes Natakoli
36	Puskesmas Watubaing
37	SMA Negeri Role Delu

38 SMP Negeri 1 Alok Timur
39 SMA Negeri 1 Waigete
40 Kantor Kepala Desa Nirangkliung
41 Kantor Kepala Desa Lela
42 SMA Negeri 1 Bola
43 SMA Negeri Magepanda
44 SMA Katholik Alvarez Paga
45 Kantor Desa Sikka

2.1.4.1.17. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

a. Jumlah Koperasi Aktif

Koperasi merupakan salah satu sarana perekonomian yang difungsikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat kalangan menengah ke bawah. Pentingnya fungsi koperasi ditunjukkan melalui peranannya dalam mendukung usaha mikro, kecil dan menengah. Jumlah koperasi aktif mencapai 130 unit dan yang koperasi berbadan hukum 187 unit

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Koperasi Serba Usaha (KSU) Aktif di Kabupaten Sikka Tahun 2023 terdapat 126 koperasi aktif, yang terdiri dari Koperasi Fungsional sebanyak 57 unit, KUD senyak 3 unit, KOPKAR sebanyak 4 unit, Koperasi Lainnya sebanyak 5 unit, KPN sebanyak 8 unit, KOPDIT/KSP sebanyak 5 unit, Koperasi Pemasaran sebanyak 4 unit, Koperasi Konsumsi sebanyak 3 unit, Koperasi Jasa sebanyak 4 unit, Koperasi Produsn sebanyak 2 unit dan KSU sebanyak 34 unit.

b. Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Jumlah UMKM di Kabupaten Sikka tahun 2023 mengalami penambahan sebenyak 2.980 UMKM dari 5.025 UMKM di tahun 2022 menjadi 8.005 UMKM di tahun 2023.

2.1.4.1.18. Urusan Penanaman Modal

a. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN)

Jumlah Investor Berskala Nasional di Kabupaten Sikka Tahun 2019 2019 sampai dengan Tahun 2021 sebanyak 1.478, pada Tahun 2022 danTahun 2023 sebanyak 2.887.

b. Jumlah Nilai Investasi Penanaman Modal Asing (PMA)

Pelaksanaan urusan penanaman modal diarahkan pada peningkatan iklim investasi melalui fasilitasi kerja sama dan peningkatan promosi dan kerjasama investasi, yang dapat dilihat dari capaian jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional dan PMA sebesar Rp4.876.600.000,- yang bersumber dari 6 perusahaan.

c. Daya Serap Tenaga Kerja

Pertumbuhan jumlah perusahaan maupun nilai investasi PMA dan PMDN diharapkan memberikan efek yang positif terhadap perekonomian penduduk. Salah satu efek positif tersebut dapat dilihat dari segi peningkatan rasio daya serap tenaga kerja. Rasio daya serap tenaga kerja di Kabupaten Sikka pada Tahun 2022 sebanyak 1.635 orang.

2.1.4.1.19. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Dalam proses pembangunan bangsa, pemuda merupakan kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan sebagai perwujudan dari fungsi, peran, karakteristik, dan kedudukannya yang strategis dalam pembangunan nasional. Untuk itu, tanggung jawab dan peran strategis pemuda di segala dimensi pembangunan perlu ditingkatkan dalam kerangka hukum nasional sesuai dengan nilai yang terkandung di dalam Pancasila danamanat UUD 1945 berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, kebangsaan, kebhinekaan, demokratis, keadilan, partisipatif, kebersamaan, kesetaraan dan kemandirian. Organisasi kepemudaan merupakan sebuah lembaga yang menghimpun segenap potensi anak muda baik mahasiswa maupun anak sekolah yang masuk kategori pemudabahkan mereka yang tidak menjadi anak terdidik.

2.1.4.1.20. Urusan Statistik

Statistik berupa pengumpulan, analisis, interpretasi, dan penyajian data. Tujuan dari statistik adalah untuk menyediakan metode dan alat yang dapat digunakan untuk mengorganisir dan menyajikan informasi numerik secara sistematis. Berikut Tabel Kinerja Statistik Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022

Table 32. Kinerja Statistik Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Dokumen Statistik yang telah diterbitkan	N/A	N/A	N/A	29	29

Sumber: Bidang Litbang pada Bapelitbang Kabupaten Sikka

Pada tiga tahun pertama dari periode 2018-2020, data tidak tersedia yang menunjukkan keterbatasan dalam penyediaan dan publikasi informasi statistik selama periode tersebut. Tetapi pada tahun 2021, terjadi lonjakan yang signifikan dalam publikasi dokumen statistik, dengan terbitnya 29 dokumen. Hal ini menunjukkan komitmen dan peningkatan aktivitas dalam mengumpulkan, menganalisis, dan mempublikasikan data statistik terkait Kabupaten Sikka. Peningkatan jumlah dokumen statistik yang diterbitkan pada tahun 2021 dan dipertahankan pada tahun 2022 mencerminkan peningkatan kapasitas dan komitmen dalam melaksanakan kegiatan statistik.

2.1.4.1.21. Urusan Persandian

Urusan persandian meliputi kegiatan pengamanan data dan konten informasi Pemerintah Daerah yang tersedia. Urusan persandian, yang diarahkan sebagai upaya untuk mewujudkan pelayanan yang efektif dan efisien. Saat ini Pemerintah Kabupaten Sikka sedang menyiapkan penerapan tanda tangan elektronik.

2.1.4.1.22. Urusan Kebudayaan

Potensi seni budaya di Kabupaten Sikka dapat dilihat dari beberapa aspek yakni : keberadaan situs dan benda cagar budaya serta sanggar seni budaya. Sampai dengan tahun 2023 terdapat 39 jenis cagar budaya dan 111 sanggar yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Sikka. Rincian sebaran jumlah sanggar seni budaya binaan di Kabupaten Sikka dapat dilihat pada tabel berikut:

Table 33. Jumlah Sanggar Seni di Kabupaten Sikka

No.	Kecamatan	Nama Sanggar	Desa/Kelurahan
1	Alok	Lero Bekor	Kota Uneng
2	Alok	Blutuk Lunung Ha	Kabor
3	Alok	Sadang Bui	Kota Uneng
4	Alok	Bekor Bliran	Thomas Morus
5	Alok	Hogor Hini	Kampung Garam
6	Alok	Lunung Kunung	SDI Maumere
7	Alok	Lamalino	Kojadoi
8	Alok	SDI Wairklau	Wairklau
9	Alok	Nian Tana	Kelurahan Madawat
10	Alok	Sigo Siang	SMP Bunda Segala Bangsa
11	Alok	SDI Madawat	Madawat
12	Alok	Sinar kayu Rangka	Desa Gunung Sari
13	Alok	Semparong	Desa Semparong
14	Alok	Sinar Tani	Kelurahan Nangalimang
15	Alok	Napun Hoba	Kelurahan Nangalimang
16	Alok Barat	Benza	Waidoko
17	Alok Barat	Cogo Sanda	Hewuli
18	Alok Barat	Cua Kabe	Hewuli
19	Alok Barat	Songgo Mori	Palue
20	Alok Barat	Sanggar Desa Lidi	Palue Desa Lidi
21	Alok Barat	Sanggar Desa Lado Laka	Palue
22	Alok Timur	Kibo Libok	Kesokuit
23	Alok Timur	Uwun Kloda	SMP Yapenthom II

24	Alok Timur	Sanggar SMPK Vifi	SMPK Vifi
25	Alok Timur	SD Contoh	SD Contoh
26	Alok Timur	SDK Maria Ferari	SDK Ferari
27	Alok Timur	SMPN I Tampil	Kelurahan Nangameting
28	Alok Timur	Moreska	Watugong
29	Alok Timur	Mikael Brai	Watugong
30	Alok Timur	Remaja Mesjid AT. Tagwa	Beru
31	Alok Timur	Baka Likat	SDI Nangameting
32	Alok Timur	Warna 12	Kelurahan nangameting
33	Nita	Mawarane	Nita Tebuk
34	Nita	Rudun Blutuk Lero Bekor	Nita Tebuk
35	Nita	Lala Along	Nirangkliung
36	Nita	Wolon Guut	Nirangkliung
37	Nita	Bao Lero Wulang	Nirangkliung
38	Nita	Orkestra Satu Sikka	Nita
39	Nita	Lado Gahar	Lado Gahar
40	Nita	Nilo Indah	Wuliwutik
41	Nita	Lepo Lorun	Desa Nita
42	Nita	Jero Ni	Desa Nirangkliung
43	Nita	Dubi Bui Hagong Nawang	Desa Nita
44	Paga	Begu Lagu	Wolowiro
45	Paga	Tembu Tana Sula Nuwa	Wolowiro
46	Paga	Rawi Ria	Mbengu- Maulo'o
47	Paga	Nusa Koka	Paga
48	Paga	Oro Wolo	Paga
49	Mego	Lodo Fao	Feondari Desa Wolodhesa
50	Lela	Jiro Jaro	Desa Lela
51	Lela	Watu Tedang	Desa Watu Tedang
52	Lela	Suka Maju	Desa Lela
53	Lela	Wuwu Tere	Wukur
54	Lela	Nona Wini	Desa Sikka
55	Lela	Soka Toja	Desa Lela
56	Lela	Kumak Bura	Desa Du
57	Lela	Puan Pliti	Desa Iligai
58	Koting	Sora Raga Regut	Desa Koting D
59	Nelle	Hibir Priti	Desa Nele Wutung

60	Nelle	Sora Dendang	Desa Nele Lorang
61	Nelle	Aurau	Desa Nele Barat
62	Nelle	Orkes Getaran Rimba	Desa Nele Barat
63	Kangae	Seka Dendang	Watuliwung
64	Kangae	Nibon Naitawa	Watuliwung
65	Kangae	Skala Langir	Blatatating
66	Kangae	Blatatating	Desa Blatatating
67	Kangae	Manu Mekeng	Meken Detun
68	Kewapante	Jong Dobo	Desa Ian Tena
69	Kewapante	Wair Koja Menik Meteng	Desa Wairkoja
70	Kewapante	Namang Djawa	Desa Namangkewa
71	Kewapante	Bunga Kelan	Desa Kopong
72	Kewapante	Bang Boler	Desa Waiara
73	Kewapante	Fortes	Desa Waiara
74	Kewapante	Tawa Tana	Desa Waiara
75	Hewokloang	Bliran Sina	Desa Wairkoja
76	Hewokloang	Wolomapa	Desa Wolomapa
77	Hewokloang	Heo Puat Tawa Tana	Desa Heo Puat
78	Hewokloang	Wini Li'in	Desa Hewokloang
79	Hewokloang	Depo Hagong Munerana	Desa Munerana
80	Hewokloang	Mugen Ledun	Desa Munerana
81	Bola	Pesa Lin TunaPeni	Desa Uma Uta
82	Bola	Raga Dara	Desa Hokor
83	Bola	Doka tawa Tana	Desa Uma Uta
84	Bola	Watu Kebar	Desa Ipir
85	Bola	Gawi Mai Lembah Sunyi	Desa Bola
86	Bola	Geke Gole	Desa Bola
87	Talibura	Gong Ilin Puan	Desa Darat Gunung
88	Talibura	Kroa Soa	Desa Hikong
89	Talibura	Bekol Ekan Gere	Desa Wailamung
90	Waigete	Bunga Nukak	Desa Pogon
91	Waigete	PGRI Egon	Desa Wairbleler
92	Waigete	Runut Puhun	Desa Runut
93	Waigete	Gong Gaging Bintang Timur	Desa Wairbleler
94	Waigete	Watu Jajin	Desa Aibura
95	Waigete	Rotan Sese	Desa Wolomapa
96	Palue	Cua Kabe	Desa Kesokoja
97	Palue	Songgo Mori	Desa Reruwairere

98	Palue	Desa Lidi	Desa Lidi
99	Palue	Lado Laka	Desa Maluriwu
100	Palue	Roa Rero	Nitung Lea
101	Palue	Roki Role	Roki Role
102	Palue	Tuanggeo	Desa Tuanggeo
103	Palue	Lado Laka II	Desa Ladolaka
104	Doreng	Dala Elat	Desa Kloangpopot
105	Doreng	Jogo Bekor	Desa Wolon Terang
106	Doreng	Jong Sawu Kolit	Kloangpopot
107	Magepanda	Magendero	Magepanda
108	Magepanda	Sinar Watu Klong	Nangarasong
109	Mapitara	Mapitara	Desa Egon
110	Tanawawo	Moa Kolo	Wolofeo Desa Ranggarasi
111	Waiblama	Eba Lewa	Desa Ilin Medo

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka, 2024

2.1.4.1.23. Urusan Perpustakaan

1. Jumlah Perpustakaan

Perpustakaan merupakan sumber ilmu dan sumber referensi dalam penyelenggaraan pendidikan baik formal maupun informal. Jumlah perpustakaan di Kabupaten Sikka sampai dengan Tahun 2022 sebanyak 520 perpustakaan yang terdiri dari perpustakaan pemerintah, sekolah dan perpustakaan desa.

2. Rasio Jumlah Perpustakaan Per 10.000 Penduduk

Rasio Jumlah Perpustakaan per 10.000 Penduduk adalah jumlah perpustakaan dibandingkan dengan jumlah penduduk. Rasio Jumlah Perpustakaan Per 10.000 Penduduk di Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada grafik berikut

Grafik 2.36.

Rasio Jumlah Perpustakaan Per 10.000 Penduduk

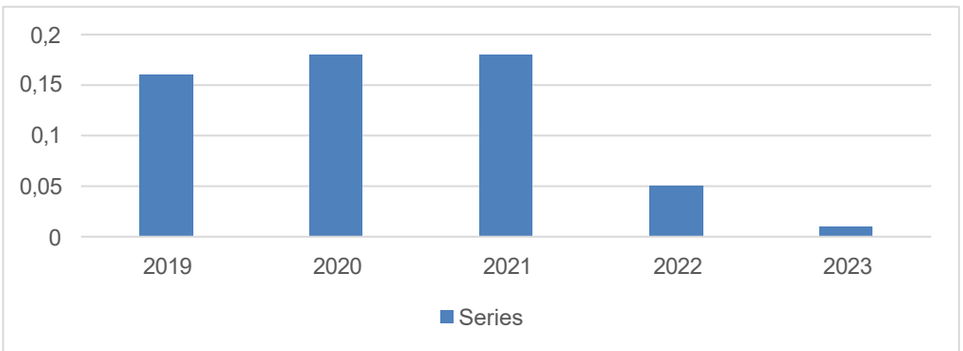

Gambar 41. Rasio Jumlah Perpustakaan Per 10.000 Penduduk

Sumber : Dinas Perpustakaan *dan Kearsipan Kabupaten Sikka, 2024*

Berdasarkan data tersebut dapat dijelaskan bahwa Rasio Jumlah

Perpustakaan Per 10.000 Penduduk di Kabupaten Sikka Tahun 2019 sebesar 0,16, pada tahun 2020 sebesar 0,18, Tahun 2021 sebesar 0,18, Tahun 2022 sebesar 0,05 dan Tahun 2023 sebesar 0,01.

3. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun

Jumlah Pengunjung Perpustakaan dihitung berdasarkan pengunjung yang mengisi daftar kehadiran atau berdasarkan data yang diperoleh melalui sistem pendataan pengunjung. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun di Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.37.

Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun

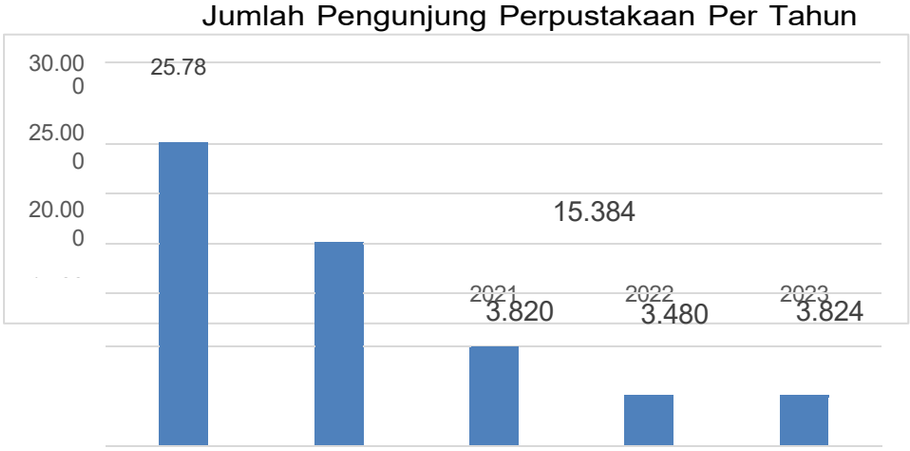

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sikka, 2024

Gambar 42. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun di Kabupaten Sikka Tahun 2019 sebanyak 25.786 pengunjung, Tahun 2020 sebanyak 15.384 pengunjung, Tahun 2021 sebanyak 3.820 pengunjung, Tahun 2022 sebanyak 3.480 pengunjung dan pada Tahun 2023 sebanyak 3.824 pengunjung.

4. Koleksi Buku yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah

Koleksi judul buku dan jumlah buku di perpustakaan memiliki pengaruh terhadap jumlah pengunjung perpustakaan. Jumlah Koleksi Buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah sampai dengan Tahun 2023 sebanyak 21.144 Judul Buku.

2.1.4.1.24. Urusan Kearsipan

Arsip merupakan dokumen penting yang diperlukan sebagai sumber informasi hukum, historis dan perkembangan kekinian. Sistem informasi kearsipan di Kabupaten Sikka mewajibkan semua perangkat daerah yang menghasilkan dokumen pemerintah dapat menyerahkan dokumennya untuk dijadikan Arsip. Persentase Perangkat Daerah yang mengelolah arsip secara baku di Kabupaten Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 2.38.

Persentase Perangkat Daerah yang mengelolah arsip secara baku

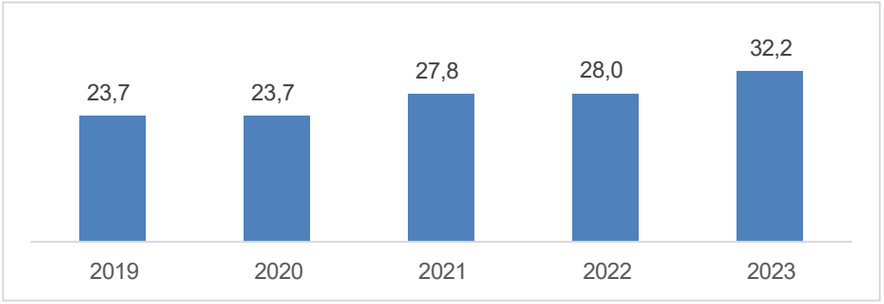

Gambar 43. Persentase Perangkat Daerah yang mengelolah arsip secara baku

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sikka, 2024

Berdasarkan data di atas dapat dijelasakan bahwa Persentase Perangkat Daerah yang mengelolah arsip secara baku di Kabupaten Tahun 2019Sebesar 23,73%, Tahun 2020 sebesar 23,73%, pada Tahun 2021 sebesar 27,87%, pada Tahun 2022 sebesar 28,02% dan pada Tahun 2023 sebesar 32,20%.

2.1.5. Fokus Layanan Urusan pemerintahan Pilihan

2.1.5.1.1. Urusan Kelautan dan Perikanan

a. Potensi Perikanan

Sebagai wilayah kepulauan dengan sebagian wilayahnya adalah lautan, potensi lestari perikanan tangkap diperkirakan mencapai 25.000 ton/tahun. Potensi ini dikelola oleh 5.085 RTP, yang terdiri dari nelayan penuh sebanyak 1.985 Rumah Tangga Perikanan (RTP), nelayan sambilan utama sebanyak 892 RTP, nelayan sambilan tambahan sebanyak 406 RTP, dan buruh nelayan sebanyak 1.802 RTP. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Table 34. Status Nelayan Kabupaten Sikka Tahun 2023

No	Status Nelayan	Jumlah RTP
1.	Nelayan Penuh	1.985
2.	Nelayan Sambilan Utama	892
3.	Nelayan Sambilan Tambahan	406
4.	Buruh Nelayan	1.802
	Jumlah	**5.085**

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Sikka, 2024

Untuk melakukan penangkapan ikan nelayan Kabupaten Sikka menggunakan pancing, jaring ikan hanyut, dan jaring insang tetap. Secara rinci jenis alat tangkap nelayan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Table 35. Jenis Alat Tangkap Yang Digunakan

No	Jenis Alat Tangkap	Jumlah
1.	Pukat Pantai	644
2.	Pukat Cincin	132
3.	Jaring Isang tetap	463
4.	Jaring Isang hanyut	990
5.	Bagan	153
6.	Longline	3
7.	Huhate	75
8.	Pancing	9.048
9.	Bubu	179
10.	Lain-lain	1171
	Jumlah	**12.858**

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Sikka, 2024

Armada yang digunakan para nelayan untuk mencari ikan di laut meliputi: Jukung, Perahu papan kecil sampan fibre glass < 5 M, Perahu papan sedang/sampan fiber glass >5 M, perahu papan besar, Motor tempel <5 GT, Motor tempel 5 – 10 GT, Motor tempel 10 – 20 GT, Kapal Motor <5 GT, Kapal Motor 5-10 GT, Kapal Motor 10-20 GT, Kapal Motor 20-30 GT dan Kapal Motor 30-50 GT. Jumlah yang paling banyak digunakan adalah Kapal Motor <5 GT,dengan jumlah sebanyak 1.296 unit. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Table 36. Jenis Armada yang digunakan Nelayan

No	Jenis Armada	Jumlah(unit)
1.	Jukung	50
2.	Perahu papan kecil sampan fibre glass < 5 M	307
3.	Perahu papan sedang/sampan fiber glass >5 M	255
4.	Motor tempel <5 GT	88
5.	Kapal Motor <5 GT	452
6.	Kapal Motor 5-10 GT	102
7.	Kapal Motor 10-20 GT	8
8.	Kapal Motor 20-30 GT	67
9.	Kapal Motor 30-50 GT	1
Jumlah		**1.330**

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Sikka, 2024

Beberapa komoditi diekspor ke luar dari wilayah Kabupaten Sikka. Beberapa daerah yang menjadi wilayah tujuan pengiriman hasil ikan dan non ikan Kabupaten Sikka, antara lain Jakarta, Surabaya, Denpasar, Makasar, Labuhan Bajo, Bima, Kendari, Sidoarjo, Jepang dan Korea Selatan. Jenis

ikan maupun non ikan yang dikirim ke luar wilayah Kabupaten Sikka dengan jumlah besaran yang dikirim serta nilai rupiahnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Beberapa komoditi diekspor ke luar dari wilayah Kabupaten Sikka. Beberapa daerah yang menjadi wilayah tujuan pengiriman hasil ikan dan non ikan Kabupaten Sikka, antara lain Jakarta, Surabaya, Denpasar, Padang, Juwana, Banyuwangi, Makasar, Bau-Bau, Kupang dan Labuhan Bajo. Jenis komoditi yang dikirim keluar wilayah Kabupaten Sikka dengan jumlah besaran yang dikirim dapat dilihat pada tabel berikut.

Table 37. Jenis Komoditi yang dikirim keluar wilayah Kabupaten Sikka

NO	JENIS KOMODITI	JUMLAH (Kg)	DAERAH TUJUAN
1	Tuna Loin	165.954,0	Denpasar, Makassar, Surabaya, Jakarta, Padang-Minangkabau
2	Ikan Baby Tuna	22.200,0	Jakarta, Juwana-Jawa Tengah, Surabaya
3	Ikan Tuna	18.500,0	Jakarta
4	Tetelan	8.150,0	Jakarta, Denpasar
5	Lobster	4.210,00	Jakarta,Denpasar,Labuan Bajo
6	Gurita	78.700,0	Makassar, Jakarta, Banyuwangi, Indramayu-Jawa Barat
7	Ikan Cakalang	598.322,0	Jakarta, Surabaya, Denpasar
8	Ikan Layang	16.550,0	Jakarta
9	Ikan Meka	1.400,0	Jakarta
10	Cumi/ Sotong	1.636,0	Makassar, Denpasar, Jakarta
11	Ikan Kerapu	3.635,0	Makassar, Denpasar, Kalimantan Timur
12	Ikan Kakatua	1.290,0	Denpasar, Makassar
13	Ikan Sunuk	380,0	Labuan Bajo
14	Ikan Kakap	100,0	Makassar
15	Tenggiri	8.801,0	Makassar
16	Ikan Layur	130,0	Jakarta
17	Udang Ronggeng	1.635,0	Jakarta, Makassar
18	Ikan Tongkol/ Deho	90.040,0	Jakarta, Surabaya
19	Teripang	11,0	Denpasar
20	Kepiting	153,0	Jakarta, Makassar
21	Sirip Hiu Hitam	40,0	Jakarta
22	Ikan Sukang	1.800,0	Bau-Bau
23	Ikan Ande-Ande	50,0	Jakarta
24	Ikan Dasar	80,0	Maros-Makassar
25	Ikan Jaket	400,0	Jakarta
26	Ikan Sori (Kering)	2.500,0	Kupang

JUMLAH	**1.026.667,0**

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Sikka, 2024

b. Produksi Perikanan

Produksi Perikanan adalah semua hasil produksi penangkapan, budidaya ikan yang ditangkap atau dipanen dari sumber perikanan alami atau dari tempat pemeliharaan baik yang diusahakan oleh perusahaan perikanan maupun rumah tangga perikanan. Produksi Perikanan di Kabupaten Sikka Tahun 2019-2022 dapat dilihat pada grafik berikut.

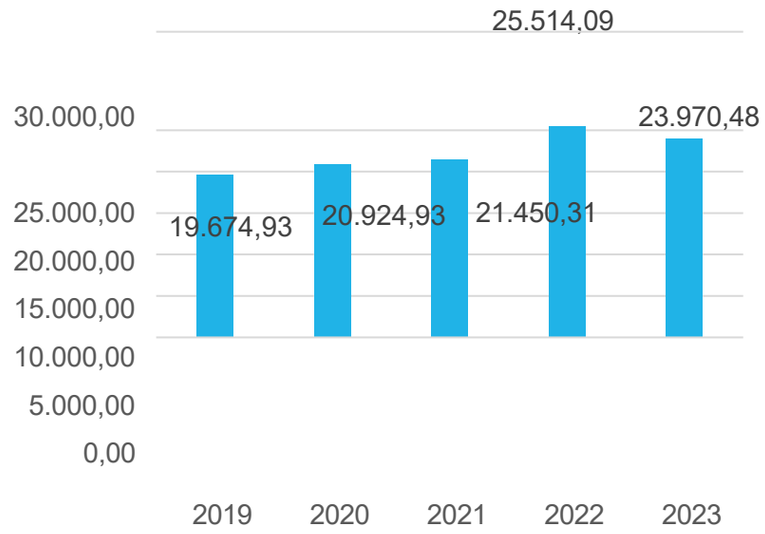

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Sikka, 2024

Gambar 44. Jenis Komoditi yang dikirim keluar wilayah Kabupaten Sikka

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Produksi Perikanan Kabupaten Sikka Tahun 2019 sebesar 19.674.93 ton. Tahun 2020 sebesar 20.924,93 ton, Tahun 2021 menjadi 21.450,31 ton, Tahun 2022 sebesar 25.514,09 dan pada Tahun 2023 sebesar 23.970,40 ton.

c. Konsumsi Ikan

Angka Konsumsi Ikan merupakan tingkat konsumsi masyarakat terhadap komoditas ikan yang dikonversi dalam satuan Kg/Kapita/Tahun. Konsumsi Ikan di Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 2.40

Konsumsi Ikan

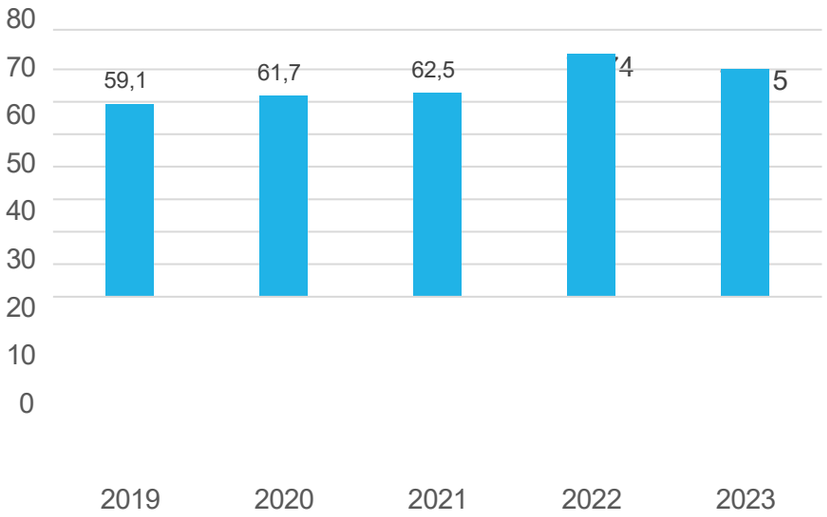

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Sikka, 2024

Gambar 45. Konsumsi Ikan

erdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Konsumsi Ikan di Kabupaten Sikka Tahun 2019 sebesar 59,19 kg/kapita/tahun. Tahun 2020 sebesar 61,73 kg/kapita/tahun, Tahun2021 menjadi 62,54 kg/kapita/tahun danTahun2022 sebesar 74,74 kg/kapita/tahun sedangkan Tahun 2023 sebesar 70,15 kg/kapita/tahun.

d. Cakupan Bina Kelompok Perikanan

Kelompok Perikanan adalah kumpulan para pelaku utama yang terdiri dari nelayan, pembudidaya ikan, dan pengola ikan yang terikat secara informal atas dasar keserasian dan kebutuhan bersama serta didalam lingkungan berpengaruh dan pimpinan seorang ketua kelompok pelaku utama perikanan. Cakupan Bina Kelompok Perikanan adalah jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan pemerintah daerah berbanding dengan jumlah kelompok nelayan di wilayah tertentu setiap tahunnya. Cakupan Bina Kelompok Perikanan di Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.41 Cakupan Bina Kelompok Perikanan

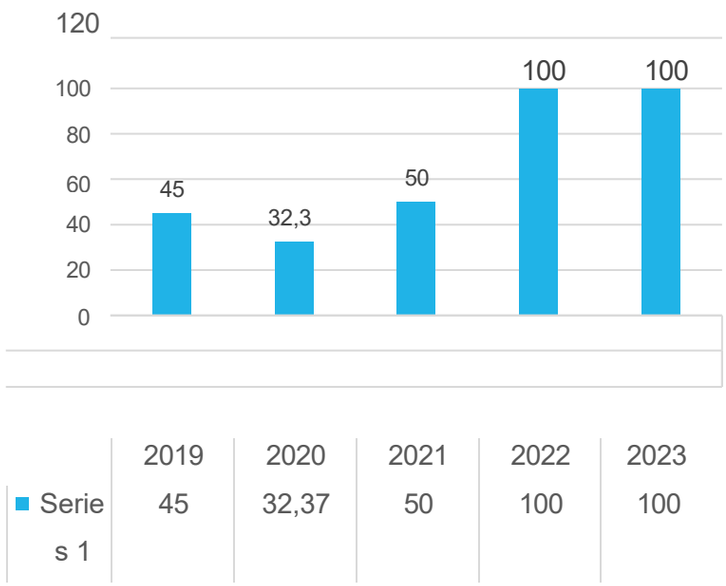

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Sikka, 2024

Gambar 46. Bina Kelompok Perikanan

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Cakupan Bina Kelompok Perikanan di Kabupaten Sikka Tahun 2019 sebesar 45%. Tahun 2020 sebesar 32,37%, Tahun 2021 menjadi 50% sedangkan Tahun 2022 dan 2023 sebesar 100%.

2.1.5.1.2. Urusan Pariwisata

Sektor pariwisata di Kabupaten Sikka merupakan salah satu sektor yang cukup berpotensi dalam pengembangan. Pariwisata merupakan satu fenomena baru yang bersifat multi sektor dan melibatkan berbagai kegiatan, di mana Pariwisata itu sendiri adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk objek dan daya tarik wisata juga pengusaha objek dan usaha-usaha yang terkait dibidang tersebut.

Pariwisata merupakan salah satu sektor jasa terpenting yang berpotensi memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian. Perkembangan pariwisata yang baik akan memberikan pengaruh yang positif dalam perekonomian, penciptaan lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan masyarakat dan pertumbuhan sektor lain yang terkait dengan sektor pariwisata, dengan demikian pariwisata juga merupakan satu bisnis. Pencapaian kinerja pariwisata dapat dilihat dari indikator sebagai berikut :

a. Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Akomodasi dan Makan Minum Terhadap PDRB

Perhitungan Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Akomodasi dan Makan Minum Terhadap PDRB tidak tersedia secara khusus. Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Akomodasi dan Makan Minum Terhadap PDRB di

Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada grafik berikut.

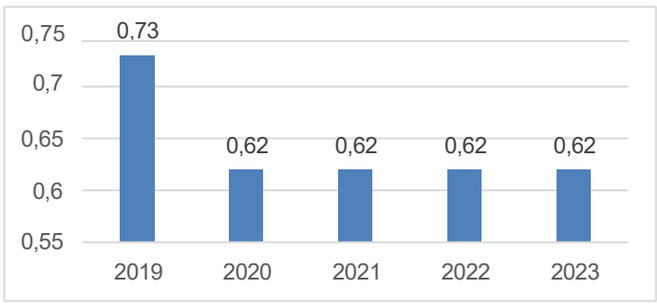

Gambar 47. Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Akomodasi dan Makan Minum Terhadap PDRB

Sumber : Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2024

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Kontribusi Sektor Akomodasi dan Makan Minum Terhadap PDRB Kabupaten Sikka Tahun 2019 sebesar 0,73%, Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 sebesar 0,62%.

b. Kunjungan Wisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian di Kabupaten Sikka. Sektor Pariwisata memiliki potensi wisata alam, wisata budaya dan wisata rohani yang berpengaruh terhadap jumlah kunjungan wisata. Keberadaan sektor ini bukan hanya sebagai pembentuk nilai PDRB namun juga sebagai stimulator bagi sektor-sektor lainnya. Jumlah Kunjungan Wisata di Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.43.

Jumlah Kunjungan Wisata

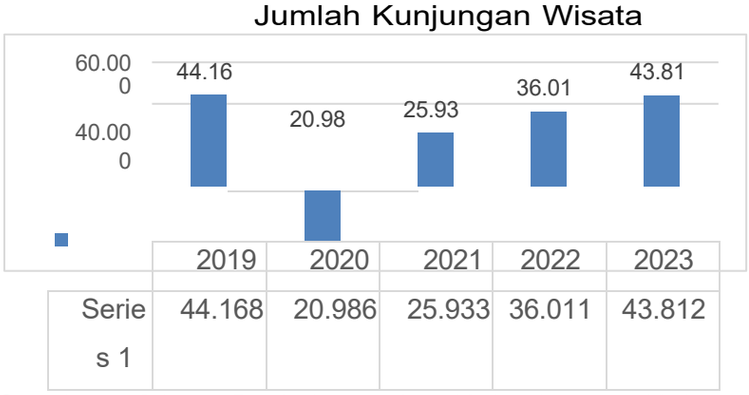

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka, 2024

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Jumlah Kunjungan Wisata di Kabupaten Sikka Tahun 2019 sebanyak 44.168 Wisatawan, Tahun 2020 sebanyak 20.986 wisatawan, Tahun 2021 sebanyak 25.933 wisatawan dan Tahun 2022 sebanyak 36.011 wisatawan sedangkan pada Tahun 2023 sebanyak 43.812 Wisatawan.

c. Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan

Rata-rata lama tinggal wisatawan adalah rata-rata waktu tinggal wisatawan mancanegara di suatu wilayah untuk satu kali kunjungan. Rata-rata lama tinggal wisatawan di Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023 dapat

dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.44.

Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan

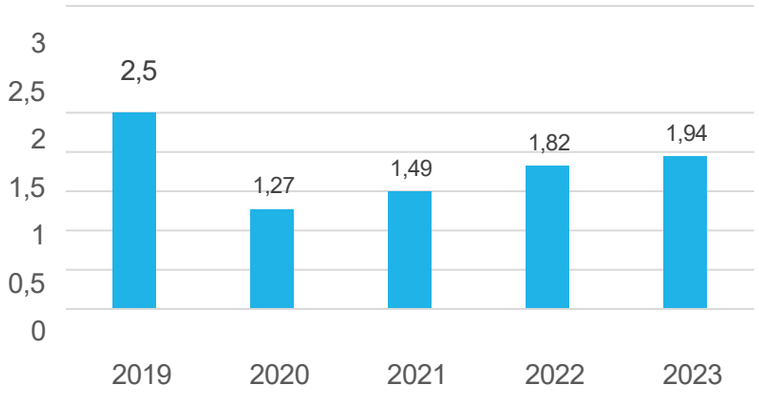

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka, 2024

Gambar 48. Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa rata-rata lama tinggal wisatawan di Kabupaten Sikka Tahun 2019 sebanyak 2,5 hari, Tahun 2020 turun 1,27 hari, Tahun 2021 naik menjadi 1,49 hari dan Tahun 2022 menjadi 1,82 hari sedangkan pada Tahun 2023 menjadi 1.94 hari.

d. Potensi Wisata

Potensi wisata di Kabupaten Sikka terdiri dari wisata alam, wisata budaya dan wisata rohani yang berpengaruh terhadap jumlah kunjungan wisata.

1) Potensi wisata alam, yang dapat di dilihat pada tabel berikut :

Table 38. Data Obyek Daya Tarik Wisata Alam

No.	Jenis Data	Keterangan
1.	Kawasan taman wisata alam gugus pulau teluk Maumere	Memiliki variasi / corak terumbu karang, ikan hias, hutan bakau dan padang lumut
2.	Kawasan hutan wisata Pulau Besar	Memiliki keragaman Flora dan Fauna seperti rusa, babi hutan dan kelelawar
3.	Puncak Buleng	Keindahan panorama alam dengan keragaman tanaman holtikultura
4.	Puncak Kimang	Keindahan panorama alam dengan keragaman tanaman holtikultura
5.	Mata Air Panas Blidit	Sumber mata air panas dengan suhu 50-80 di dalam kawasan hutan
6.	Air Terjun Tunaohok	Air terjun setinggi 40 meter di Kawasan hutan lindung Egon
7.	Gua alam Patiahu	Gua alam dengan stalaktit dan stalakmit yang menarik dan terdapat banyak kelelawar
8.	Hutan wisata Egon	Memiliki panorama hutan dan berbagai jenis satwa
9.	Gunung api egon	Memiliki panorama kawa vulkanik dan untuk kegiatan hiking
10.	Tebing alam Halar Hawua	Tebing alam yang menarik dan terdapat berbagai jenis tanaman perkebunan
11.	Mata air panas Krenget	Sumber mata air panas dengan suhu 50-80
12.	Gua alam Keitimu	Gua alam dengan habitat kelelawar kecil
13.	Liang nipon Rengsina	Benteng pertahanan Jepang pada perang dunia II
14.	Gua alam Warut	Gua alam dijadikan sebagai benteng pertahanan Jepang pada perang dunia II
15.	Dala Elat	Batu meteor berdiameter 25 cm yang memiliki daya magic dan sakral
16.	Tebing alam Watu Ngesu	Tebing alam yang menarik dengan susunan batu berlapis
17.	Gunung api Rokatenda	Memiliki panorama gunung api dengan kawa vulkanik

18.	Penyulingan uap panas bumi	Penyulingan uap panas bumi secara tradisional untuk kebutuhan air minum
19.	Mata air panas Poha	Mata air panas pada pinggir pantai dengan suhu 75- 100 C
20.	Air terjun Lianiki	Air terjun dengan ketinggian kurang lebih 50 meter
21.	Pulau Kondo	Pulau kecil, tidak dihuni, nyaman bagi wisatawan
22.	Tebing alam Natar	Tebing alam yang menarik terdapat tanaman perkebunan di sekitarnya
23.	Mata air panas Liwun Huler	Mata air panas dengan suhu 75-100 C

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sikka, 2024

2) Potensi wisata budaya yang dapat di dilihat pada tabel berikut :

Table 39. Data Obyek Daya Tarik Wisata Budaya Kabupaten Sikka

No	Jenis Data	Keterangan
1.	Rumah Adat Lepo Kirek	Rumah adat dengan koleksi peninggalan bersejarah seperti gading tua, keramik cina dan artefak lainnya
2.	Rumah Adat Lepo Gete	Peninggalan istana Raja Sikka
3.	Rumah Adat Mbengu	Rumah Adat dengan koleksi peninggalan sejarah seperti kris, perisai, piring cina, peralatan tenun tradisional dan Gong Waning
4.	Rumah Adat Wolo Bela	Rumah Adat dengan koleksi peninggalan sejarah seperti meriam miniatur, piring cina dan peralatan upacara Ka Uwi
5.	Rumah Adat Nuabari	Rumah Adat juga terdapat benda warisan leluhur
6.	Museum Bikon	Museum terbesar di NTT yang dikelola oleh STFK Ledalero
No	**Jenis Data**	**Keterangan**
	Blewut	yang menghimpun berbagai koleksi peninggalan purbakala seperti stagedon, berbagai alat musik, mata uang kuno dan berbagai fosil tua
7.	Kubu Batu Nuabari	Warisan Megalitikum yang merupakan situs pekuburan batu tradisional masyarakat setempat
8.	Miniatur Jong Dobo	Warisan budaya Dongson berupa miniatur perahu yang memiliki daya sakral dan magic yang tinggi

9.	Perkampung tradisional Wuring	Perumahan tradisional suku Bajo di atas laut dengan berbagai tata kehidupan tradisional
10.	Regalia Kerajaan Sikka	Warisan pakaian kerajaan yang terbuat dari emas berupa mahkota, kalung, kris, dan tongkat sebagai simbol kebesaran Raja Sikka
11.	Regalia Kerajaan Nita	Warisan kerajaan Nita berupa gading, emas, pakaian, tongkat kerajaan sebagai simbol kebesaran Raja Nita
12.	Regalia kerajaan Kangae	Rumah adat dan terdapat beberapa benda warisan leluhur
13.	Pigang Tawatana	Piring porselin buatan cina terdiri dari pigang zoroni, Lerohae, Retarai, Laueri, Lero Meseng dan Pigang Unu Nereng Tawu Klewak
14.	Rumah adat Watulaki	Rumah adat ukuran 3x4m, terdapat tombak dan perisai
15.	Rumah adat Tubu Kobe	Peninggalan purbakala dan pusat upacara Tu Teu
16.	Rumah adat Ndeo	Peninggalan purbakala dan pusat upacara Patikarapau
17.	Rumah adat Lei	Peninggalan purbakala dan pusat upacara Patikarapau
18.	Rumah adat Tomu	Peninggalan purbakala dan pusat upacara Patikarapau
19.	Rumah adat Cawalo	Peninggalan purbakala dan pusat upacara Patikarapau
20.	Rumah adat Koa	Peninggalan purbakala dan pusat upacara Patikarapau
21.	Rumah adat Nitung	Peninggalan purbakala dan pusat upacara Patikarapau
22.	Rumah adat Cua	Peninggalan purbakala dan pusat upacara Patikarapau
23.	Liang Nipon Rengsina	Benteng pertahanan Jepang pada perang dunia II melawan sekutu
24.	Megalit Romanduru	Batu besar tempat pemberian sesajen pada leluhur
25.	Liang Nipon Watuliwuwung	Benteng pertahanan Jepang pada perang dunia II melawan sekutu
26.	Utan Beke Hewokloang	Memiliki nilai magic dan sakral
27.	Nua Bharaka Lekebai	Kubur batu tempat disemayamkan tulang belulang leluhur rumpun mego
28.	Pondok Tradisional Wailamung	Pondok dengan konstruksi lokal, tersimpan alba/juba pastor, kaliks emas dan piring keramik peninggalan portugis.

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sikka, 2024

3) Potensi wisata rohani, yang dapat di dilihat pada tabel berikut :

Table 40. Data Obyek Daya Tarik Wisata Rohani

No	Jenis Data	Keterangan
1.	Patung Kristus Raja	Simbol kekatolikan Kabupaten Sikka dan Pelindung Kota Maumere yang diberkati oleh Sri Paus Yohanes Paulus II pada tahun 1989
2.	Wisung Fatima Lela, Bangunan Tua dan Gereja Tua Lela	Tempat ziarah umat katolik tertua di Flores dengan arca Bunda Maria Portugis
3.	Tempat Ziarah Nilo	Terdapat patung Bunda Maria Segala Bangsa
4.	Gua Maria Watusoking	Tempat ziarah umat katolik dan terdapat panorama alam
5.	Gua Maria Dian Desa	Tempat ziarah umat katolik dan dapat menikmati panorama pantai
6.	Gua Fatima Hokor	Tempat ziarah umat katolik
7.	Rumah Retret St. Nabi Elia	Pusat Kegiatan Rohani
8.	Pertapaan Kelikeo	Pertapaan Rohani dan memiliki panorama alam pegunungan yang indah dan sejuk.
9.	Gereja Tua Sikka	Gereja dengan arsitek kuno Eropa terdapat salib Senhor, Menino
10.	Gua Maria Kesokoja	Tempat ziarah umat katolik dipuncak bukit terdapat penyulingan uap panas bumi Nuhan Kaju
11.	Gua Maria Krokowolon	Tempat wisata rohani pada pinggir pantai
12.	Wair Nokerua	Sumber air panas di tepi pantai yang keluar dari batu cadas, menurut iman katolik dapat menyembuhkan penyakit karena hasil tancapan tongkat St. Fransiskus Xaverius dalam misi menyebarkan agam katolik di Pulau Flores
13.	Watu Krus Bola	Salib peninggalan Protugis di atas batu karang di kawasan laut.

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sikka, 2024

4) Wisata Bahari yang dapat dilihat pada tabel berikut

Table 41. Data Obyek Daya Tarik Wisata Bahari Kabupaten Sikka

No	Jenis Data	Keterangan
1.	Taman Wisata Alam Laut Gugus Pulau Teluk Maumere	Memiliki keindahan panorama alam bawah laut dengan variasi coral, ikan hias, hutan bakau dan bentangan pantai pasir putih
2.	Pantai Sikka	Pantai berpasir putih dengan variasi koral
3.	Pantai Koka	Pantai berpasir putih dengan variasi koral
4.	Pantai Doreng	Pantai berpasir putih
5.	Pantai Paga	Pantai berpasir putih
6.	Pantai Pulau Besar	Pantai berpasir putih
7.	Pantai Pulau Kambing	Pantai berpasir putih
8.	Pantai Reruwairere	Pantai berpasir putih
9.	Pantai Ngolo	Pantai berpasir putih
10.	Pantai Bangboler	Panorama pantai yang indah
11.	Pantai Ipir	Panorama pantai yang indah
12.	Pantai Pulau Pangabatang	Pantai berpasir putih dan terdapat hutan bakau
13.	Pantai Pulau Babi	Pantai berpasir putih dan terdapat hutan bakau
14.	Pantai Waiara	Pantai berpasir putih, terdapat hotel Sao Wisata dan Pondok Dunia Laut (Sea Word Club)
15.	Pantai Wailiti	Pantai berpasir putih. hutan bakau, kera, lebah dan madu
16.	Pantai Wingawoka	Pantai berpasir putih. hutan bakau, kera, lebah dan madu
17.	Pantai Nangahure	Pantai berpasir putih,hutan bakau dan terdapat hotel Gading Beach
18.	Pantai Waturia	Pantai berpasir
19.	Pantai Nangatobong	Pantai berpasir
20.	Pantai Kajuwulu	Pantai berpasir, hutan bakau dan Puncak Bukit terdapat Salib Besar
21.	Pantai Wailamung	Pantai berpasir dalam kawasan teluk
22.	Pantai Wairterang	Pantai berpasir terdapat Cottage Egon, Cottage Wodong

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sikka, 2024

2.1.5.1.3. Urusan Pertanian

Pelaksanaan urusan pertanian lebih difokuskan pada upaya peningkatan produksi dan produktivitas hasil pertanian/perkebunan/ peternakan, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani, yang capaian pelaksanaanya dapat

dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut.

a. Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Pertanian Terhadap PDRB

Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kabupaten Sikka Tahun 2019 sebesar 35,46%, pada Tahun 2020 naik menjadi 36,41%, pada Tahun 2021 naik menjadi 37,43% dan Tahun 2022 sebesar 38,17% dan Tahun 2023 sebesar 38,53%. Sedangkan Pertumbuhan Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kabupaten Sikka Tahun 2018 sebesar 4,83%, pada tahun 2019 sebesar 4,00%, Tahun 2020 sebesar 0,80 %, Tahun 2021 menjadi 3,58%.

Pada Tahun 2022 dan 2023 sebesar 4,29%. Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada grafik berikut.

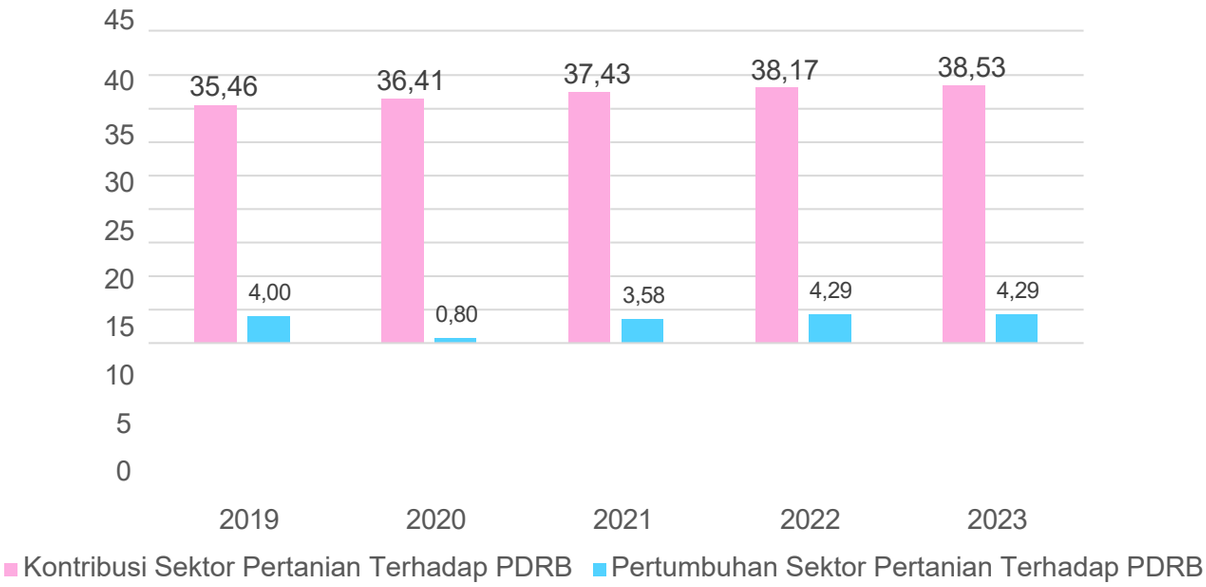

Sumber : Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2024

Gambar 49. Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Pertanian Terhadap PDRB

b. Peningkatan Produktivitas Pertanian Dan Perkebunan

Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Perkebunan di suatu daerah bertujuan untuk mengukur kemampuan daerah tersebut dalam memenuhi kebutuhan pangan penduduknya. Nilai produktivitas ditentukan oleh jumlah panen serta luas lahan yang ada. Adapun faktor yang memengaruhi produktivitas tanaman meliputi (1) genetik tanaman, (2) lingkungan tumbuh, serta (3) manajemen budidaya tanaman. Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada grafik berikut.

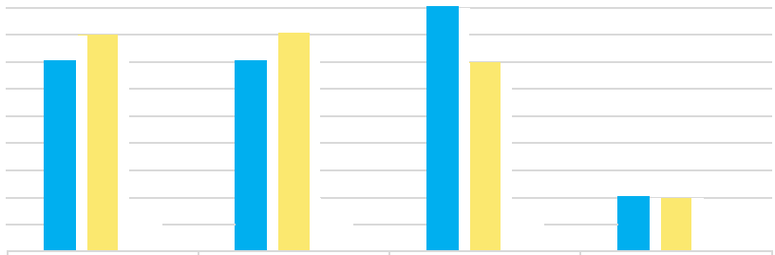

	2019	2020	2021	2022
Produksi padi dan palawija	144.797,30	143.313,71	182.694	43.051,65
Produksi Hortikultura	158.134	163.747,43	136.433	35.161,8
Produksi Perkebunan	28.929,97	29.045,10	28.908	28.883,54

Gambar 50. Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Perkebunan

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Sikka, 2024

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sikka Tahun 2019- 2022 berdasarkan sub sektor berturut-turut sebagai berikut :

i. Produksi Padi dan Palawija Pada Tahun 2019 sebesar 144.797,3 ton, Tahun 2020 sebesar 143.313,71 ton, Tahun 2021 sebesar 182.694 ton dan pada Tahun 2022 sebesar 43.051,65 ton, dan Tahun 2023 sebesar 115.485,50 ton.
ii. Produksi Hortikultura Pada Tahun 2019 sebesar 158.134 ton, Tahun 2020 sebesar 163.747,43 ton, Tahun 2021 sebesar 136.433 ton dan pada Tahun 2022 sebesar 35.161,8 ton dan tahun 2023 sebesar 151.296,36 ton
iii. Produksi Perkebunan pada tahun 2019 sebesar 28.929,97 ton, Tahun 2020 sebesar 29.045,10 ton, Tahun 2021 sebesar 28.908 ton dan pada Tahun 2022 sebesar 28.883,54 ton dan tahun 2023 sebesar 28.883,54 ton.

c. Pengembangan Sektor Perkebunan

Untuk sub sektor Perkebunan, komoditi yang mempunyai produksi yang cukup besar selama kurun waktu 4 tahun terakhir adalah komoditi Kelapa, Jambu Mente, dan Kakao. Rincan produksi tanamanperkebunan dapat dilihat pada tabel berikut.

Table 42. Luas Areal dan Produksi dan Produktivitas Komoditi Perkebunan

NO	KOMODITI	ATAP 2022						
		LUAS AREAL(Ha)				PRODUKSI (TON)	PRODUKTIVITAS (kg/Ha)	Jml KK
		TBM	TM	TT/TR	Jml			
1	Kelapa	3.578,79	4.350,00	1.157,21	9.086,00	10.574,50	737	29.363
2	Jambu Mete	7.888,00	10.533,00	2.853,00	21.274,00	8.913,85	846	31.823
3	Kopi	87,00	263,00	1.171,00	1.521,00	129,63	493	2.340
4	Kakao	7.835,00	12.191,50	2.462,30	22.488,80	8.015,57	657	34.657
5	Kemiri	506,00	428,00	90,00	1.024,00	194,30	454	1.575
6	Kapuk	43,00	262,00	63,00	368,00	69,60	266	566
7	Cengkeh	552,29	930,00	2,00	1.484,29	461,94	497	2.284
8	Pinang	32,00	70,00	4,00	106,00	36,70	524	163
9	Vanili	463,62	338,00	61,00	862,62	113,79	337	996
10	Lada	37,50	124,00	7,00	168,50	37,75	304	254
11	Asam	151,00	174,00	27,20	352,20	76,10	437	542
12	Jarak Pagar	31,00	155,00	30,50	216,50	1,40	9	333
13	Pala	279,00	257,00	27,00	563,00	94,60	368	866
14	Kapas	-	-	-	-	-	-	-
15	Tembakau	77,00	90,50	-	167,50	37,81	418	129
16	Sirih	36,00	40,00	5,00	81,00	8,00	200	120
17	Lontar	19,00	456,00	15,07	490,07	118,00	259	642
18	Kelor	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	21.616,20	40.662,00	7.975,28	70.253,48	28.883,54	710	106.654

Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sikka, 2024

d. Cakupan Bina Kelompok Petani

Kelompok Tani merupakan bagian penting dalam dinamika kegiatan pertanian di Kabupaten Sikka. Cakupan Bina Kelompok Petani di Kabupaten Sikka Tahun sampai dengan Tahun 2023 sebesar 100%.

e. Urusan Perdagangan

Sektor Perdagangan merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang berkembang di Kabupaten Sikka. Sektor perdagangan dalam PDRB Kabupaten Sikka terdiri dari dua sub sektor, yaitu: (1) Perdagangan Besar dan Eceran dan (2) Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Perdagangan Terhadap PDRB di Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada grafik berikut.

28,20

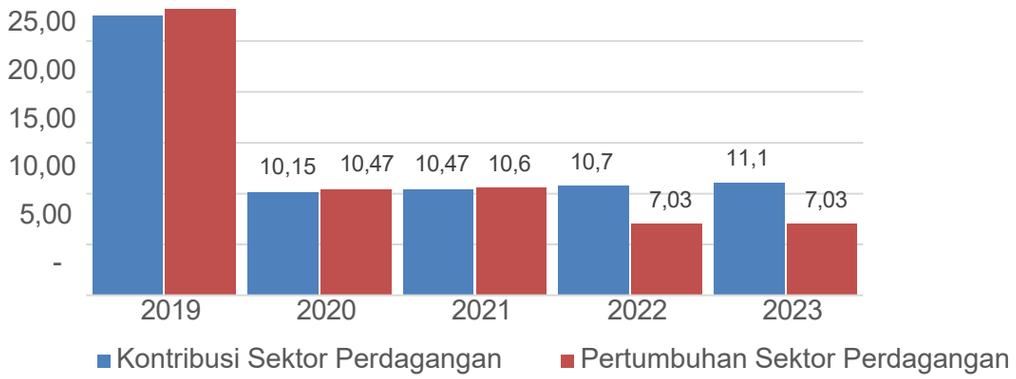

Sumber : Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2024

Gambar 51. Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Perdagangan Terhadap PDRB

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Kabupaten Sikka Tahun 2019 sebesar 27,48%, Tahun 2020 sebesar 10,15%, Tahun 2021 menjadi 10,47% dan

Tahun 2022 sebesar 10,79 sedangkan Tahun 2023 sebesar 11,12 Sedangkan Pertumbuhan Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Tahun 2019 sebesar 28,2%, Tahun 2020 sebesar 10,47%, Tahun 2021 menjadi 10,60%.

Pada Tahun 2022 dan 2023 sebesar 7,03%.

2.1.5.1.4. Urusan Perindustrian

Urusan perindustrian diarahkan pada pengembangan industri kecil dan menengah, peningkatan fasilitasi industri kecil dan menengah melalui pemanfaatan sumber daya/potensi lokal. Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Industri Terhadap PDRB di Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

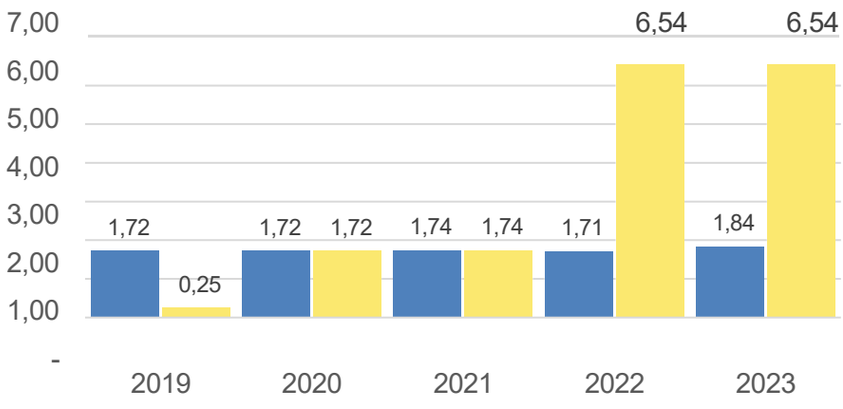

Sumber : Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2024

Gambar 52. Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Industri Terhadap PDRB

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Kabupaten Sikka Tahun 2019 sebesar 1,72%. Tahun 2020 sebesar 1,72%, Tahun 2021 menjadi 1,74% , Tahun 2022 sebesar 1,71 dan Tahun 2023 1,84%. Sedangkan Pertumbuhan Sektor Industri Terhadap PDRB Kabupaten Sikka Tahun 2019 sebesar 0,25%, Tahun 2020 sebesar 1,72%, Tahun 2021 menjadi 1,74%, Tahun 2022 dan 2023 sebesar 6,54%.

2.1.5.1.5. Urusan Transmigrasi

Pelayanan bidang transmigrasi tidak terlepas dari upaya penyelenggaraan pemerintah daerah dalam mengurangi tingkat kemiskinan, pengangguran, melalui pemberdayaan warga masyarakat transmigran serta penyediaaan sarana prasarana di wilayah transmigrasi, dan penyediaan lokasi transmigrasi baru di Kabupaten Sikka.

Terdapat tiga jenis transmigrasi, yaitu transmigrasi swakarsa berbantu, transmigrasi swakarsa mandiri, dan transmigrasi umum. Transmigrasi swakarsa merupakan jenis transmigrasi yang didorong oleh keinginan sendiri akan tetapi tetap mendapatkan bimbingan dari pemerintah. Pada Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Sikka mengirimkan warga Kabupaten Sikka ke Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 4 KK.

2.1.6. Fokus Layanan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

2.1.6.1. Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan diarahkan pada peningkatan kualitas managemen perencanaan yang pro publik serta meningkatkan proporsi serapan anggaran yang memihak pada masyarakat dengan indikator sebagai berikut :

a. Tersedianya dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Rencana pembangunan merupakan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan secara periodik. Pembangunan jangka panjang mengarahkan pelaksanaan pembangunan dalam jangka waktu 20 tahun, karena didalamnya memuat visi dan misi. Adanya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sangat penting, agar

pembangunan dapat mencapai visi dan misi secara tepat. RPJPD Tahun 2005-2025 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 dan Peraturan Bupati Sikka Nomor 2 Tahun 2023 tentang Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah (DPPMD) Tahun 2024-2026.

b. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Pelaksanaan pembangunan dalam periode DPPMD diturunkan kedalam dokumen perencanaan tahunan. Untuk itulah RKPD disusun setiap tahun dengan menerjemahkan DPPMD yang telah ditetapkan. Dokumen RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 telah ditetapkan sebagai berikut :

- Peraturan Bupati Sikka Nomor 19 Tahun 2017 Tentang RKPD Kab. Sikka Tahun 2018;
- Peraturan Bupati Sikka Nomor 15 Tahun 2018 Tentang RKPD Kab. Sikka Tahun 2019;
- Peraturan Bupati Sikka Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sikka Nomor 14 Tahun 2019 Tentang RKPD Kab. Sikka Tahun 2020;
- Peraturan Bupati Sikka Nomor 25 Tahun 2020 Tentang RKPD Kab. Sikka Tahun 2021.
- Peraturan Bupati Sikka Nomor 15 Tahun 2021 Tentang RKPD Kab. Sikka Tahun 2022.
- Peraturan Bupati Sikka Nomor 8 Tahun 2022 Tentang RKPD Kab. Sikka Tahun 2023.
- Peraturan Bupati Sikka Nomor 5 Tahun 2023 Tentang RKPD Kab. Sikka Tahun 2024.

2.1.6.2. Keuangan

Keuangan diarahkan pada peningkatan kapasitas dan akuntabilitas aparatur daerah, peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah

a. Pengelolaan Keuangan

Kinerja keuangan daerah Kabupaten Sikka sampai dengan tahun 2022 berdasarkan opini BPK berada pada level Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sedangkan untuk Tahun 2023 masih dalam proses audit. Gambaran Kinerja pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sikka. sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Table 43. Opini BPK Atas Pengelolaan Keuangan Daerah

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka, 2024

b. Pendapatan Daerah

Pendapatan Asli Daerah terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Jumlah pendapatan dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Sikka dan capaian kinerja pendapatan daerah dapat dilihat pada tabel berikut;

Table 44. Jumlah Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

No	Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah
1	2019	21.530.813.226,80	10.096.895.298
2	2020	19.161.863.076,19	9.165.525.046
3	2021	19.494.028.872,90	7.837.377.672
4	2022	19.685.397.337	7.117.817.482
5	2023	21.267.105.601	8.039.856.473

Sumber: BPKAD Kabupaten Sikka, 2024

Table 45. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

TAHUN	TARGET PAD	REALISASI PAD	%
2019	104,401,857,125.00	99,619,556,108.26	95.419
2020	108,613,927,900.59	119,601,046,361.49	110.116
2021	106,431,778,313.00	90,816,311,412.52	85.328
2022	105,724,221,360.00	92,983,642,048.58	87.949
2023	107.640.931.980,00	97.509.756.987.00	90,58

Sumber: BPKAD Kabupaten Sikka, 2024

Table 46. Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka Tahun

TAHUN	PAD	Pendapatan	%
2019	99,619,556,108.26	1,239,199,874,138.26	8.04
2020	119,601,046,361.49	1,102,491,657,749.49	10.85
2021	106,431,778,313.00	1,122,667,568,386.52	9.48
2022	105,724,221,360.00	1,075,772,304,642.58	9.83
2023	107.640.931.980,00	1.194.121.598.920,00	9,01

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka, 2023

2.1.6.3. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Sikka sampai dengan tahun 2022 tercatat sebanyak 5.154 orang. yang rinciannya berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Table 47. Jumlah ASN Kabupaten Sikka

NO.	Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	JUMLAH
1	SD	39	8	47
2	SLTP Kejuruan	-	1	1
3	SLTP	42	2	44
4	SLTA	402	423	825
5	SLTA Kejuruan	56	77	133
6	Diploma I	4	26	30
7	Diploma II	40	59	99
8	Diploma III/ Sarjana Muda	217	1.024	1.241
9	Diploma IV	48	53	101
10	S-1 / Sarjana	907	1.634	2.541
11	S-2 / Sarjana	48	44	92
	Jumlah	**1.803**	**3.351**	**5.154**

Sumber: BKPSDM Tahun 2024

Tabel 2.47

Data PNS Berdasarkan Golongan

Ruang	Jumlah
	Jenis Kelamin
Golongan ruang	L P
GOLONGAN IV	

Table 48. Data PNS Berdasarkan Golongan

	Golongan Ruang	L	P	
1.	Pembina, IV/a	178	224	**402**
2.	Pembina Tk. I, IV/b	137	173	**310**
3.	Pembina Utama Muda, IV/c	26	13	**39**
4.	Pembina Utama Madya, IV/d	-	-	
GOLONGAN III				
1.	Penata Muda, III/a	243	520	**763**
2.	Penata Muda Tk.I, III/b	263	662	**925**
3.	Penata, III/c	187	590	**777**
4.	Penata Tk. I, III/d	397	686	**1.083**
GOLONGAN II				
1.	Pengatur Muda, II/a	29	11	**40**
2.	Pengatur Muda Tk. I, II/b	52	16	**68**
3.	Pengatur, II/c	125	211	**336**

4.	Pengatur Tk. I, II/d	140	244	**384**
	GOLONGAN I			
1.	Juru Muda, I/a	-	-	
2.	Juru Muda Tk. I, I/b	2	-	**2**
3.	Juru, I/c	8	1	**9**
4.	Juru Tk. I, I/d	16	0	**16**
	Jumlah	**1.803**	**3.351**	**5.154**

Sumber : BKPSDM Tahun 2024

Tabel 2.48

Jumlah ASN Berdasarkan Jabatan

NO	JABATAN	Jenis Kelamin		TOTAL
		L	P	
1.	Jabatan Pimpinan	32	4	36
2.	Administrator	150	54	204
3.	Pengawas	166	152	318
4.	Fungsional Umum	604	638	1.242
5.	Fungsional Tertentu	851	2.503	3.354
	Jumlah	**1.803**	**3.351**	**5.154**

Sumber

2.2. Pengawasan

Indikator kinerja pengawasan tergambar dari tindak lanjut hasil temuan. Data tindak lanjut hasil temuan di Kabupaten Sikka sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Table 49. Jumlah Tindak Lanjut Hasil Temuan di Kabupaten Sikka s/d Tahun 2023

NO	APF	TAHUN	REKOMENDASI		REKOMENDASI YANG TELAH DITINDAKLANJUTI		SISA		PERSENTASE CAPAIAN TINDAKLANJUT	
			JUMLAH	NILAI	JUMLAH	NILAI	JUMLAH	NILAI	JUMLAH	NILAI
I	EKSTERNAL									
	BPK RI PERWAKILAN PROV. NTT	2005 - 2020	817	42.507.925.817,71	559	24.570.290.704,72	258	17.937.635.112,99	68,42%	57,80%
		2021	13	147.770.619,00	5	80.150.000,00	8	67.620.619,00	38,46%	54,24%
		2022	32	1.787.152.931,16	11	791.438.832,71	21	995.714.098,45	34,38%	44,28%
		2023	31	179.437.834,90	0	82.281.010,31	31	97.156.824,59	0,00%	45,85%
		s.d 2023	**893**	**44.622.287.202,77**	**575**	**25.524.160.547,74**	**318**	**19.098.126.655,03**	**64,39%**	**57,20%**
		2024	0	-	81	555.055.104,16				
		s.d Maret 2024	**893**	**44.622.287.202,77**	**656**	**26.079.215.651,90**	**237**	**18.543.071.550,87**	**73,46%**	**58,44%**
II	INTERNAL									
	1 Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Prov. NTT	s.d 2021		5.407.950.829,35		1.869.289.202,29		3.538.661.627,06		34,57%
		2023	21	-	10		11	-	47,62%	
		s.d Maret 2024	**21**	**5.407.950.829,35**	**10**	**1.869.289.202,29**	**11**	**3.538.661.627,06**	**47,62%**	**34,57%**
	2 Inspektorat Provinsi Nusa	**s.d Maret 2024**	**185**	**31.743.409,00**	**89**	**30.000.000,00**	**96**	**1.743.409,00**	**48,11%**	**94,51%**

	Tenggara Timur									
3	Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka	1990 s.d 2021	357	44.841.484.517,75	253	7.705.620.363,54	104	37.135.864.154,21	70,87%	17,18%
		2022	45	3.615.829.831,71	24	1.399.633.282,54	21	2.216.196.549,17	53,33%	38,71%
		2023	132	5.611.474.188,22	16	1.966.143.417,83	116	3.645.330.770,39	12,12%	35,04%
		2024	10	209.657.740,00	2	100.728.260,00	8	108.929.480,00	20,00%	48,04%
		s.d Maret 2024	**544**	**54.278.446.277,68**	**295**	**11.172.125.323,91**	**249**	**43.106.320.953,77**	**54,23%**	**20,58%**

Sumber: Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka. 2024

BAB III. PROFIL KEMISKINAN DAERAH

3.1 Gambaran Umum Penelitian Lapangan

Penelitian ini dilaksanakan di delapan lokasi yang mewakili empat kategori desil kemiskinan di Kabupaten Sikka. Pemilihan lokasi didasarkan pada keragaman karakteristik sosial-ekonomi, ekologi, budaya, dan tingkat ketergantungan masyarakat terhadap sumber penghidupan serta program bantuan sosial. Pemilahan ini memungkinkan peneliti untuk membaca dinamika kemiskinan secara lebih komprehensif, mulai dari kategori kemiskinan ekstrem hingga kemiskinan menurun/potensial berdaya.

3.1.1 Desil 1

3.1.1.1 Kelurahan Wuring

Kelurahan Wuring adalah sebuah kampung pesisir di Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur. Terletak di Teluk Maumere, Wuring terkenal sebagai kampung nelayan terbesar dan menjadi pusat pemukiman masyarakat Bajo yang identik dengan rumah panggung di atas laut. Letaknya yang strategis menjadikan Wuring pusat aktivitas perikanan, perdagangan ikan, dan kehidupan maritim masyarakat pesisir. Namun, di balik potensi besar tersebut, Wuring juga menghadapi berbagai persoalan serius, terutama dalam bidang kesehatan, gizi, dan kesejahteraan sosial.

Secara administratif, Wuring berada dalam wilayah Kecamatan Alok Barat. Data kependudukan menunjukkan bahwa Kecamatan Alok Barat termasuk wilayah padat di Kabupaten Sikka, dengan jumlah penduduk yang terus bertumbuh dari tahun ke tahun. Menurut *Kabupaten Sikka Dalam Angka 2023*, jumlah penduduk di kecamatan ini pada tahun 2022 mencapai 23.580 jiwa, dengan tingkat kepadatan penduduk 376 jiwa per kilometer persegi, serta laju pertumbuhan sebesar 2,92% pada periode 2021–2022. Angka-angka ini mencerminkan dinamika kependudukan yang cukup pesat, dan sebagai kelurahan dengan populasi terbesar, Wuring berkontribusi signifikan terhadap total penduduk Alok Barat. Hal ini juga berarti bahwa berbagai masalah kependudukan, kesehatan, dan gizi yang tercatat di tingkat kecamatan sebagian besar nyata terjadi di Wuring sebagai pusat konsentrasi penduduk. Berikut akan ditampilkan data kependudukan di Kelurahan Wuring:

Table 50. Data Kependudukan Kelurahan Wuring, Kecamatan Wolomarang

Indikator	Jumlah
Jumlah penduduk (2024)	**5.697 jiwa**
Laki-laki	2.830 jiwa
Perempuan	2.867 jiwa

Sumber: Sikka Dalam Angka 2023

Dengan jumlah penduduk terbesar di kecamatan, Wuring menjadi kelurahan yang paling padat. Struktur sosial-ekonominya didominasi oleh keluarga nelayan dengan aktivitas ekonomi sehari-hari yang sangat bergantung pada laut, baik melalui penangkapan ikan, perdagangan hasil tangkapan, maupun usaha kecil yang mendukung kegiatan perikanan seperti perbaikan perahu dan penyediaan kebutuhan melaut. Ketergantungan yang kuat pada sektor maritim menjadikan laut sebagai penopang utama kehidupan masyarakat, namun sekaligus membuat mereka rentan terhadap perubahan cuaca, musim tangkap, dan fluktuasi harga ikan di pasar. Kondisi ini memengaruhi kestabilan pendapatan rumah tangga dan berimplikasi langsung pada kemampuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar, termasuk pangan bergizi dan akses terhadap layanan kesehatan. Oleh karena itu, meskipun Wuring memiliki potensi besar dalam bidang kelautan, tekanan kependudukan dan keterbatasan sumber daya menjadikannya wilayah dengan tantangan sosial-ekonomi yang kompleks.

Selain jumlah penduduk secara keseluruhan, kondisi sosial masyarakat Kelurahan Wuring juga ditandai dengan keberadaan penyandang disabilitas yang tersebar dalam berbagai kategori. Data tahun 2024 menunjukkan bahwa jumlah penduduk difabel di Kelurahan Wuring mencapai 58 jiwa.

Table 51. Data Penduduk Disabilitas Di Kelurahan Wuring, Kecamatan Wolomarang

No	Jenis Disabilitas	Jumlah
1	Tuna Netra (Buta)	10
2	Tuna Rungu (Tuli)	5
3	Tuna Wicara (Bisu)	3
4	Tuli-Bisu	3
5	Tuna Daksa	27
6	Tuna Grahita	9

No	Jenis Disabilitas	Jumlah
7	Tuna Laras	1
8	Tuna Eks-sakit Kusta	0
9	Tuna Ganda	0
	Jumlah	**58**

Sumber: Data Kependudukan Kecamatan Alok Barat, 2024

Jumlah total penyandang disabilitas di Kelurahan Wuring mencapai 58 jiwa. Jika dibandingkan dengan total penduduk Wuring sebesar 5.697 jiwa (data sebelumnya), maka jumlah difabel ini setara dengan sekitar 1 persen dari total populasi.

Distribusi jenis disabilitas menunjukkan bahwa kelompok tuna daksa merupakan yang paling dominan dengan 27 jiwa, atau hampir setengah dari total difabel. Kondisi ini mengindikasikan bahwa keterbatasan fisik menjadi masalah utama yang dialami masyarakat penyandang disabilitas di Wuring. Selain itu, terdapat 10 jiwa tuna netra, 9 jiwa tuna grahita, serta sejumlah kecil tuna rungu, tuna wicara, dan tuli-bisu. Jumlah tuna laras hanya tercatat 1 jiwa, sementara kategori tuna eks-sakit kusta maupun tuna ganda tidak ditemukan di kelurahan ini.

Kehadiran kelompok difabel tersebut menunjukkan bahwa Kelurahan Wuring memiliki keragaman kebutuhan layanan sosial. Dari sisi pendidikan, anak-anak difabel memerlukan dukungan pendidikan inklusif yang hingga kini belum tersedia di tingkat kelurahan. Dari sisi kesehatan, mereka membutuhkan akses pada layanan rehabilitasi medis dan fasilitas kesehatan yang ramah difabel, sementara saat ini layanan kesehatan di Wuring masih sebatas tingkat dasar. Dari sisi sosial-ekonomi, kelompok difabel berpotensi lebih rentan terhadap kemiskinan akibat keterbatasan akses pendidikan, pekerjaan, dan keterampilan.

Gambaran umum penduduk difabel di Kelurahan Wuring memperlihatkan bahwa terdapat 58 jiwa penyandang disabilitas dengan variasi jenis keterbatasan, di mana tuna daksa menjadi kelompok terbanyak. Data ini menunjukkan pentingnya perencanaan pembangunan yang berorientasi pada inklusi sosial, agar kelompok difabel dapat memperoleh kesempatan yang sama dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi, sehingga mereka dapat hidup secara lebih mandiri dan berkontribusi dalam pembangunan masyarakat Wuring.

Masalah gizi anak menjadi salah satu isu krusial juga di Wuring. Ketergantungan masyarakat pada sektor perikanan tradisional yang sangat dipengaruhi musim sering kali membuat pendapatan keluarga tidak stabil. Dalam kondisi seperti ini, akses terhadap pangan bergizi dan layanan kesehatan kerap terabaikan, sehingga berdampak langsung pada status gizi anak-anak. Tingginya kepadatan penduduk di kawasan pesisir yang padat rumah panggung di atas laut juga memperburuk situasi, karena keterbatasan air bersih, sanitasi, dan lingkungan sehat menjadi faktor tambahan yang mempertinggi risiko masalah gizi. Hasil pemantauan Data Stunting Februari 2025 kemudian memberikan gambaran nyata mengenai situasi ini, memperlihatkan bahwa sebagian anak-anak di Wuring masih menghadapi persoalan gizi kronis yang berimplikasi pada tumbuh kembang mereka. Berikut ditampilkan data terkait kesehatan dan stunting di Kelurahan Wuring:

Table 52. Kesehatan dan Stunting di Kelurahan Wuring

Indikator	Jumlah	Persentase
Balita sasaran (terdaftar)	534	100%
Balita hadir/diukur	296	55,4% dari sasaran
Sangat pendek (severe stunted)	15	5,07% dari yang diukur
Pendek (moderate stunted)	37	12,50% dari yang diukur
Total stunting (SP+P)	52	17,6% dari yang diukur / 9,7% dari sasaran
Normal	243	82,1% dari yang diukur
Tinggi (di atas normal)	1	0,3% dari yang diukur

Sumber: Sikka Dalam Angka 2023

Berdasarkan hasil pemantauan Data Stunting Februari 2025, tercatat bahwa dari 534 balita yang menjadi sasaran di Kelurahan Wuring, hanya 296 anak (55,4%) yang hadir untuk diukur status gizinya. Rendahnya cakupan pengukuran ini menunjukkan adanya masalah partisipasi keluarga dalam kegiatan posyandu maupun hambatan akses layanan kesehatan, yang bisa disebabkan oleh kesibukan orang tua nelayan, kurangnya kesadaran akan pentingnya pemeriksaan rutin, maupun kendala geografis terkait permukiman di atas laut.

Dari 296 anak yang berhasil diukur, ditemukan 52 balita (17,6%) mengalami stunting. Rinciannya, 15 anak (5,07%) masuk kategori sangat

pendek *(severe stunted),* sementara 37 anak (12,50%) masuk kategori pendek *(moderate stunted).* Jika dibandingkan dengan total sasaran balita, prevalensi stunting minimal di Wuring berada pada angka 9,7%, meskipun potensi angka sebenarnya bisa lebih tinggi karena hampir setengah dari balita sasaran tidak hadir saat pengukuran. Kondisi ini mengindikasikan bahwa stunting masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang cukup serius di Wuring, terutama karena proporsinya sudah mendekati batas ambang masalah serius menurut standar WHO, yakni 20%.

Selain itu, distribusi status gizi juga memperlihatkan bahwa sebagian besar balita, yakni 243 anak (82,1%), tergolong normal, dan hanya 1 anak (0,3%) yang masuk kategori tinggi. Fakta ini memperlihatkan adanya kesenjangan nyata dalam status gizi: sebagian besar anak tumbuh normal, tetapi terdapat kelompok signifikan yang mengalami hambatan pertumbuhan. Keberadaan 15 anak dengan kondisi sangat pendek juga menunjukkan adanya masalah gizi kronis yang berlangsung lama dan membutuhkan intervensi segera serta berkelanjutan.

Dengan demikian, data ini memberikan gambaran bahwa meskipun sebagian besar anak di Wuring tumbuh normal, masih terdapat kelompok anak yang rentan dan mengalami hambatan pertumbuhan serius. Permasalahan ini tidak bisa dilepaskan dari kondisi sosial-ekonomi masyarakat Wuring yang bergantung pada sektor perikanan tradisional dengan pendapatan yang tidak stabil, serta keterbatasan sanitasi dan akses layanan kesehatan di kawasan pesisir padat penduduk.

Kondisi di atas semakin diperparah oleh keterbatasan layanan kesehatan yang tersedia di Kecamatan Alok Barat, termasuk di Kelurahan Wuring. Berdasarkan data tahun 2022, wilayah ini hanya memiliki 1 Puskesmas sebagai pusat pelayanan utama dengan dukungan yang sangat terbatas, yakni 1 dokter, 32 perawat, 28 bidan, dan 2 tenaga farmasi untuk melayani lebih dari dua puluh ribu penduduk. Jumlah tenaga kesehatan yang minim ini tentu tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat, apalagi Wuring merupakan kelurahan terpadat dengan karakter permukiman padat di atas laut yang memiliki risiko tinggi terhadap penyakit infeksi dan masalah gizi. Keterbatasan fasilitas dan tenaga medis ini berdampak pada rendahnya jangkauan pelayanan, termasuk pada pemantauan pertumbuhan balita. Hal ini sejalan dengan rendahnya tingkat kehadiran anak dalam pengukuran status gizi, sehingga masalah stunting

di Wuring tidak hanya mencerminkan persoalan ekonomi keluarga nelayan dan sanitasi lingkungan, tetapi juga erat kaitannya dengan akses kesehatan yang belum memadai. Berikut ditampilkan data terkait fasilitas Kesehatan yang ada di Kelurahan Wuring:

Table 53. Fasilitas Kesehatan di Kelurahan Wuring

Jenis Fasilitas/SDM Kesehatan (2022)	Jumlah
Puskesmas	1
Dokter	1
Perawat	32
Bidan	28
Tenaga farmasi	2

Sumber: Sikka Dalam Angka 2023

Masyarakat Wuring dilayani oleh Puskesmas Alok Barat serta beberapa posyandu di tingkat kelurahan yang menjadi garda terdepan layanan kesehatan ibu dan anak. Namun, dengan jumlah tenaga medis yang terbatas, pelayanan kesehatan di wilayah padat penduduk seperti Wuring sering kali tidak berjalan optimal. Keterbatasan ini menyebabkan pemeriksaan rutin, pemantauan pertumbuhan balita, hingga upaya pencegahan stunting tidak dapat menjangkau seluruh sasaran. Situasi semakin kompleks karena kondisi pemukiman khas Wuring yang berada di atas laut dalam bentuk rumah panggung dengan jarak rapat antarbangunan. Lingkungan padat semacam ini tidak hanya menyulitkan akses transportasi dan mobilitas petugas kesehatan, tetapi juga membuat sistem sanitasi dan pengelolaan limbah menjadi sangat terbatas. Air bersih sulit diperoleh, pembuangan sampah dan limbah rumah tangga seringkali langsung ke laut, sehingga meningkatkan risiko penyebaran penyakit menular seperti diare, infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), dan penyakit kulit. Semua faktor tersebut berkelindan dan berkontribusi besar terhadap masalah gizi, termasuk stunting, yang masih menjadi persoalan krusial di Wuring.

Keterbatasan layanan kesehatan dan buruknya kondisi sanitasi di Wuring semakin diperparah oleh faktor pendidikan masyarakat. Secara umum, Kabupaten Sikka mencatat angka melek huruf sebesar 95,55% pada tahun 2022, yang menunjukkan tingkat literasi penduduk cukup tinggi. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di Wuring masih menghadapi tantangan besar. Anak-anak nelayan sering kali

harus membantu orang tua mereka melaut atau terlibat dalam pekerjaan domestik, sehingga partisipasi sekolah tidak selalu maksimal. Rendahnya tingkat kehadiran dan kesinambungan pendidikan ini bukan hanya berdampak pada pencapaian akademik anak, tetapi juga berimplikasi pada rendahnya pemahaman keluarga tentang pentingnya gizi seimbang, praktik kesehatan, dan perawatan balita. Akibatnya, kemampuan rumah tangga dalam mencegah masalah gizi kronis seperti stunting menjadi sangat terbatas. Dengan demikian, rendahnya akses pendidikan dan kesenjangan literasi di Wuring turut menjadi faktor penting yang memperburuk kondisi kesehatan masyarakat pesisir, terutama pada kelompok anak-anak.

Dari sisi pendidikan, Kelurahan Wuring telah memiliki sejumlah sarana pendidikan yang tersebar dari jenjang usia dini hingga menengah. Berdasarkan data tahun 2024, terdapat 2 Taman Kanak-Kanak (TK), 2 Sekolah Dasar (SD), dan 1 Madrasah Ibtidaiyah (MI) pada jenjang pendidikan dasar. Untuk tingkat menengah pertama terdapat 1 SMP dan 1 MTs, sedangkan pada jenjang menengah atas terdapat 1 Madrasah Aliyah (MA) dan 1 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Namun, tidak terdapat Sekolah Menengah Atas (SMA) umum, sekolah luar biasa (SDLB, SMPLB, SMALB), perguruan tinggi, maupun pondok pesantren. Data ini menunjukkan bahwa sarana pendidikan di Wuring relatif lengkap pada tingkat dasar dan menengah, meskipun masih terdapat keterbatasan di jenjang yang lebih tinggi maupun pendidikan khusus.

Table 54. Sarana Pendidikan di Kelurahan Wuring

Jenjang Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan
Taman Kanak-Kanak (TK)	2
Sekolah Dasar (SD)	2
Madrasah Ibtidaiyah (MI)	1
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	1
Madrasah Tsanawiyah (MTs)	1
Sekolah Menengah Atas (SMA)	0
Madrasah Aliyah (MA)	1
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	1
Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB)	0
Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB)	0
Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB)	0
Perguruan Tinggi	0
Pondok Pesantren	0

Sumber: Data Pendidikan Kecamatan Alok Barat, 2024

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa ketersediaan fasilitas pendidikan di Kelurahan Wuring cukup berlapis dari tingkat TK hingga SMK/MA. Keberadaan SMK di tingkat kelurahan menjadi penting karena dapat menyalurkan minat peserta didik pada bidang keterampilan dan vokasi yang sesuai dengan potensi ekonomi masyarakat pesisir. Sementara itu, ketiadaan SMA umum, sekolah luar biasa, perguruan tinggi, dan pondok pesantren menunjukkan adanya keterbatasan akses masyarakat terhadap jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan layanan pendidikan inklusif.

Berdasarkan penjelasan di atas memperlihatkan wilayah dengan jumlah penduduk cukup padat, komposisi gender seimbang, serta ketersediaan sarana pendidikan dasar dan menengah yang relatif lengkap. Namun demikian, masih terdapat kekurangan pada layanan pendidikan menengah atas umum, pendidikan tinggi, dan pendidikan khusus. Dengan kondisi sosial ekonomi berbasis kelautan dan identitas budaya masyarakat Bajo, Kelurahan Wuring memiliki potensi strategis untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi maritim sekaligus wilayah yang memerlukan perhatian lebih dalam peningkatan sarana pendidikan, infrastruktur dasar, dan pelayanan publik yang inklusif.

Rendahnya partisipasi pendidikan dan keterbatasan literasi gizi di Wuring tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial-ekonomi masyarakatnya. Perekonomian warga sebagian besar bertumpu pada sektor perikanan tangkap, yang hasilnya sangat bergantung pada musim, kondisi cuaca, dan fluktuasi harga ikan di pasar. Pasar Ikan Wuring bahkan menjadi pusat perdagangan ikan terbesar di Maumere, menegaskan peran strategis kelurahan ini dalam rantai distribusi hasil laut di Kabupaten Sikka. Namun, ketergantungan yang besar pada perikanan tradisional membuat penghasilan keluarga sering kali tidak stabil, sehingga memengaruhi kemampuan mereka dalam membiayai pendidikan anak maupun memenuhi kebutuhan pangan bergizi. Selain perikanan, masyarakat juga mengandalkan usaha kecil seperti warung, jasa transportasi laut, dan perdagangan antar pulau, tetapi aktivitas ekonomi ini umumnya bersifat informal dengan margin keuntungan yang terbatas. Ketidakstabilan ekonomi inilah yang kemudian berkelindan dengan rendahnya kesadaran pendidikan dan praktik kesehatan dalam rumah tangga, sehingga

memperkuat lingkaran masalah sosial dan kesehatan, termasuk tingginya angka stunting di Wuring. Berikut ditampilkan data tentang kehidupan sosial ekonomi di Kelurahan Wuring:

Table 55. Sosial-Politik Kelurahan Wuring

Indikator	Nilai
Sektor utama	Perikanan tangkap & perdagangan ikan
Pusat distribusi ikan	Pasar Ikan Wuring (Maumere)
Persentase penduduk miskin Kabupaten Sikka (2022)	11,37%

Sumber: Sikka Dalam Angka 2023

Meski sektor perikanan memberikan potensi besar bagi perekonomian lokal, ketergantungan yang hampir sepenuhnya pada laut menjadikan masyarakat Wuring sangat rentan terhadap faktor eksternal seperti cuaca ekstrem, gelombang pasang, maupun musim paceklik ikan. Pada saat hasil tangkapan menurun, pendapatan keluarga pun ikut merosot, sehingga mereka kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Kondisi ini diperburuk dengan tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Sikka yang pada tahun 2022 tercatat sebesar 11,37%, sebuah angka yang juga mencerminkan realitas kehidupan keluarga-keluarga nelayan di Wuring. Hidup dalam keterbatasan membuat sebagian besar rumah tangga tidak mampu secara konsisten menyediakan pangan bergizi maupun mengakses layanan pendidikan dan kesehatan yang memadai. Akibatnya, persoalan kemiskinan tidak hanya berdampak pada kesejahteraan ekonomi, tetapi juga berimplikasi langsung pada masalah kesehatan masyarakat, terutama tingginya prevalensi stunting yang masih menjadi tantangan utama di Wuring.

Kelurahan Wuring memiliki potensi yang besar untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Letaknya di Teluk Maumere memberikan akses langsung terhadap sumber daya laut yang melimpah, baik untuk kegiatan perikanan tangkap maupun budidaya laut. Aktivitas ini telah menjadi tulang punggung perekonomian lokal dan menjadikan Wuring sebagai pusat perdagangan ikan terbesar di Maumere. Selain itu, keberadaan masyarakat Bajo dengan tradisi dan budaya maritim yang khas menambah nilai sosial-budaya yang unik. Keunikan ini tidak hanya menjadi

identitas Wuring, tetapi juga menyimpan daya tarik untuk dikembangkan sebagai potensi pariwisata bahari dan budaya. Lokasi Wuring yang strategis di pesisir juga membuka peluang bagi pengembangan perdagangan antarwilayah serta pariwisata berbasis masyarakat.

Namun, di balik potensi tersebut, Wuring juga menghadapi tantangan yang tidak kecil. Data menunjukkan bahwa angka stunting di wilayah ini masih cukup tinggi, yakni 17,6% dari balita yang diukur, sementara cakupan pengukuran sendiri masih rendah, hanya 55% dari total balita sasaran. Rendahnya partisipasi dalam pemantauan gizi anak ini menjadi indikasi adanya masalah dalam akses maupun kesadaran kesehatan. Selain itu, kondisi permukiman yang padat di atas laut membuat sanitasi dan akses air bersih sangat terbatas, sehingga memperbesar risiko penyakit menular dan masalah gizi. Dari sisi ekonomi, meskipun perikanan menjadi kekuatan utama, ketergantungan pada laut menjadikan penghidupan masyarakat sangat fluktuatif karena dipengaruhi musim tangkap, cuaca ekstrem, dan harga pasar yang tidak stabil. Wuring juga menghadapi kerentanan tinggi terhadap bencana pesisir seperti banjir rob dan gelombang pasang, yang tidak hanya mengganggu aktivitas ekonomi, tetapi juga mengancam keselamatan penduduk.

Dengan demikian, potensi besar yang dimiliki Wuring di sektor perikanan, budaya, dan pariwisata harus diimbangi dengan strategi untuk menjawab tantangan yang ada. Jika dikelola dengan baik, potensi tersebut dapat menjadi pintu keluar dari lingkaran masalah sosial-ekonomi dan kesehatan, termasuk dalam upaya menurunkan angka stunting yang masih menjadi persoalan utama di wilayah pesisir ini.

Kelurahan Wuring merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, yang menjadi lokasi penelitian dengan perhatian khusus pada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Berdasarkan data kemiskinan tahun 2024, jumlah penduduk miskin di Kelurahan Wuring tercatat sebanyak 1.797 jiwa atau sekitar 0,52% dari total penduduk.

Table 56. Data Kemiskinan Kelurahan Wuring

No	Indikator	Jumlah
1	Desil 1 (paling miskin)	1.744
2	Desil 2	47
3	Desil 3	6
4	Desil 4	0

No	Indikator	Jumlah
	Total Penduduk Miskin	**1.797**
	% Penduduk Miskin per Desa	**0,52%**

Sumber: Data Kemiskinan Kecamatan Alok Barat, 2024

Data di atas memperlihatkan bahwa kemiskinan di Kelurahan Wuring sangat terkonsentrasi pada desil 1, yaitu kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah. Jumlah penduduk miskin pada desil ini mencapai 1.744 jiwa, atau hampir seluruh dari total penduduk miskin. Pada desil 2, jumlah penduduk miskin tercatat 47 jiwa, sedangkan pada desil 3 hanya 6 jiwa, dan pada desil 4 tidak terdapat penduduk miskin.

Distribusi ini menunjukkan bahwa kemiskinan di Wuring bersifat struktural, di mana sebagian besar masyarakat berada pada lapisan paling bawah dalam struktur kesejahteraan. Hal ini mencerminkan kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir yang rentan, dengan keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi, lapangan kerja, serta layanan pendidikan dan kesehatan.

Meskipun secara persentase hanya 0,52% dari total penduduk Wuring, jumlah absolutnya cukup signifikan, yakni hampir 1.800 jiwa. Angka ini menegaskan bahwa persoalan kemiskinan masih menjadi tantangan utama yang harus ditangani secara serius melalui program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, peningkatan keterampilan kerja, serta diversifikasi sumber mata pencaharian selain sektor perikanan tradisional.

Gambaran umum ini memperlihatkan bahwa Kelurahan Wuring adalah wilayah pesisir dengan potensi besar di bidang perikanan dan pariwisata, namun juga menghadapi tantangan serius dalam bidang kesehatan, gizi, dan kesejahteraan sosial. Dari 534 balita terdaftar, hanya 296 anak yang hadir untuk diukur, dan 52 di antaranya (17,6%) mengalami stunting. Kondisi ini jelas menunjukkan adanya beban gizi yang tinggi dan perlunya perhatian khusus dalam pembangunan kesehatan masyarakat.

Dengan kondisi sosial-ekonomi yang rapuh, keterbatasan layanan dasar, serta kerentanan terhadap bencana, Wuring menjadi lokasi penelitian yang sangat representatif untuk mengkaji faktor penyebab stunting sekaligus mencari solusi berbasis potensi lokal.

3.1.1.2 Desa Rubit

Desa Rubit terletak di Kecamatan Hewokloang, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Desa ini merupakan salah satu dari tujuh desa yang berada di Kecamatan Hewokloang. Secara geografis, Desa Rubit memiliki luas wilayah sekitar 10,5 km² dengan ketinggian antara 0–300 meter di atas permukaan laut. Wilayah desa sebagian besar berupa dataran rendah yang cocok untuk pertanian dan pemukiman.

Mayoritas penduduk Desa Rubit beragama Katolik, dengan sebagian kecil beragama Islam. Dalam hal ekonomi, mayoritas masyarakat bermata pencaharian sebagai petani, dengan komoditas utama berupa kopi, cokelat, dan hasil pertanian lainnya. Di bidang pendidikan, Desa Rubit memiliki dua sekolah dasar (SD), satu sekolah menengah pertama (SMP), dan satu sekolah menengah atas (SMA). Sedangkan di bidang kesehatan, terdapat fasilitas kesehatan tingkat pertama berupa puskesmas pembantu yang melayani kebutuhan dasar masyarakat.

Meskipun memiliki potensi alam dan budaya yang kaya, Desa Rubit menghadapi beberapa tantangan, antara lain keterbatasan infrastruktur dasar seperti jalan dan air bersih, serta akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan yang masih perlu ditingkatkan. Dengan kondisi tersebut, pembangunan berkelanjutan di Desa Rubit memerlukan perhatian terhadap peningkatan infrastruktur, penguatan layanan sosial, serta pemanfaatan potensi ekonomi lokal secara optimal agar kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara merata.

Sebagaimana yang telah dijelaskan desa Rubit merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Hewokloang, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Secara administratif, Desa Rubit berperan sebagai bagian dari struktur pemerintahan desa di Kabupaten Sikka yang mendukung penyelenggaraan pembangunan, pelayanan masyarakat, serta pelestarian nilai sosial budaya masyarakat setempat.

Berdasarkan data kependudukan terbaru tahun 2024, jumlah penduduk Desa Rubit tercatat sebanyak 2.005 jiwa, dengan rincian 978 jiwa laki-laki dan 1.027 jiwa perempuan.

Table 57. Data Kependudukan Desa Rubit

Kecamatan	Desa	Laki-laki	Perempuan	Jumlah

Hewokloang	Rubit	978	1.027	2.005

Sumber: Data Kependudukan Kabupaten Sikka, 2024

Jumlah penduduk perempuan sedikit lebih banyak dibandingkan laki-laki dengan selisih 49 jiwa. Rasio jenis kelamin berada pada kisaran 95, yang berarti untuk setiap 100 perempuan terdapat sekitar 95 laki-laki. Komposisi ini menunjukkan struktur kependudukan yang relatif seimbang dari sisi gender. Dengan jumlah penduduk lebih dari dua ribu jiwa, Desa Rubit dapat digolongkan sebagai desa dengan populasi menengah di Kecamatan Hewokloang.

Selain jumlah penduduk secara keseluruhan, Desa Rubit di Kecamatan Hewokloang juga memiliki kelompok masyarakat penyandang disabilitas. Berdasarkan data tahun 2024, jumlah penduduk difabel di desa ini mencapai 25 jiwa dengan variasi jenis disabilitas.

Table 58. Data Penduduk Disabilitas Di Kelurahan Rubit, Kecamatan Hewokloang

No	Jenis Disabilitas	Jumlah
1	Tuna Netra (Buta)	1
2	Tuna Rungu (Tuli)	4
3	Tuna Wicara (Bisu)	5
4	Tuli-Bisu	2
5	Tuna Daksa	3
6	Tuna Grahita	6
7	Tuna Laras	2
8	Tuna Eks-sakit Kusta	2
9	Tuna Ganda	0
	Jumlah	**25**

Sumber: Data Kependudukan Kecamatan Hewokloang, 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tuna grahita merupakan kategori disabilitas dengan jumlah terbanyak, yakni 6 jiwa. Kondisi ini mengindikasikan bahwa di Desa Rubit terdapat cukup banyak penduduk dengan keterbatasan intelektual yang membutuhkan pendampingan dalam aktivitas sehari-hari, terutama di bidang pendidikan dan sosial.

Disabilitas dengan jumlah cukup tinggi berikutnya adalah tuna wicara sebanyak 5 jiwa dan tuna rungu sebanyak 4 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan komunikasi juga cukup menonjol di desa ini, sehingga penyediaan layanan pendidikan inklusif dan dukungan komunikasi alternatif

sangat diperlukan. Selain itu, terdapat 3 jiwa tuna daksa, 2 jiwa tuli-bisu, 2 jiwa tuna laras, dan 2 jiwa tuna eks-sakit kusta. Jumlah yang relatif kecil ini tetap perlu diperhatikan, karena setiap jenis disabilitas memerlukan pendekatan layanan yang berbeda. Tuna netra hanya tercatat 1 jiwa, sedangkan kategori tuna ganda tidak ditemukan di Desa Rubit.

Jika dibandingkan dengan jumlah total penduduk Desa Rubit sebesar 2.005 jiwa, maka jumlah penyandang disabilitas sekitar 1,2 persen dari populasi. Meskipun secara persentase kecil, keberadaan kelompok ini tetap signifikan karena mereka merupakan bagian dari masyarakat yang rentan dan membutuhkan perhatian lebih dalam pembangunan desa.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa penyandang disabilitas di Desa Rubit menghadapi keterbatasan beragam, baik fisik, sensorik, maupun intelektual. Hal ini menegaskan pentingnya penyediaan layanan pendidikan yang inklusif, fasilitas kesehatan yang ramah difabel, serta program pemberdayaan sosial-ekonomi untuk memastikan mereka dapat hidup mandiri dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat desa.

Selain adanya kelompok difabel, persoalan kesehatan anak juga menjadi perhatian penting di Desa Rubit, khususnya terkait masalah stunting. Berdasarkan data Puskesmas Hewokloang tahun 2024, jumlah sasaran anak yang dipantau di Desa Rubit sebanyak 107 anak, dengan 98 anak yang hadir dalam pemeriksaan status gizi.

Table 59. Data Stunting Desa Rubit, Kecamatan Hewokloang

No	Indikator	Jumlah
1	Sasaran	107
2	Datang	98
3	Sangat Pendek	3
4	Pendek	6
5	Normal	89
6	Tinggi	0
	Jumlah Kasus	**9**
	Persentase (%)	**9,2**

Sumber: Data Puskesmas Hewokloang, 2024

Dari hasil pengukuran tersebut, ditemukan adanya 9 anak yang mengalami stunting, terdiri atas 3 anak dengan kondisi sangat pendek dan 6 anak dengan kondisi pendek. Jika dibandingkan dengan jumlah sasaran yang hadir, prevalensi stunting di Desa Rubit mencapai 9,2 persen.

Mayoritas anak di Desa Rubit, yaitu 89 anak, tercatat dalam kategori normal, sementara tidak ada anak yang tercatat dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar anak tumbuh dengan status gizi yang baik, keberadaan kasus stunting tetap menjadi persoalan serius yang memerlukan penanganan khusus.

Stunting berdampak jangka panjang pada kualitas sumber daya manusia, mulai dari gangguan pertumbuhan fisik, hambatan perkembangan kognitif, hingga rendahnya produktivitas di masa depan. Oleh karena itu, angka 9,2 persen di Desa Rubit meskipun lebih rendah dari rata-rata nasional, tetap harus menjadi perhatian dalam pembangunan kesehatan desa. Upaya penanggulangan stunting dapat dilakukan dengan memperkuat program gizi seimbang, pemberian makanan tambahan bagi balita, peningkatan kesadaran orang tua terkait pola asuh dan asupan gizi, serta mengoptimalkan peran Posyandu, Pustu, dan tenaga kesehatan desa.

Gambaran umum kondisi stunting di Desa Rubit menunjukkan bahwa dari 107 anak sasaran, terdapat 9 anak (9,2 persen) yang mengalami stunting. Hal ini menegaskan perlunya strategi kesehatan masyarakat yang lebih terarah agar kasus stunting dapat terus ditekan, sehingga anak-anak Desa Rubit dapat tumbuh sehat, cerdas, dan produktif sebagai generasi penerus desa.

Selanjutnya sebagai desa di wilayah pedalaman Kabupaten Sikka, masyarakat Desa Rubit pada umumnya mengandalkan sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan sebagai mata pencaharian utama. Selain itu, sebagian masyarakat juga melakukan perdagangan kecil-kecilan serta pekerjaan informal lainnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketergantungan pada sektor primer ini menjadikan kondisi ekonomi masyarakat masih rentan terhadap perubahan iklim, ketersediaan air, dan akses pasar. Budaya gotong royong masih menjadi salah satu ciri khas masyarakat Desa Rubit, yang tercermin dalam aktivitas sosial kemasyarakatan seperti kerja bakti, perayaan keagamaan, dan adat istiadat. Nilai-nilai kekeluargaan dan kebersamaan menjadi modal sosial yang kuat dalam mendukung pembangunan desa.

Jumlah penduduk yang mencapai lebih dari dua ribu jiwa menuntut tersedianya layanan dasar yang memadai. Umumnya, desa-desa di Kecamatan Hewokloang memiliki fasilitas pendidikan dasar berupa sekolah dasar (SD) dan pendidikan usia dini (PAUD/TK). Namun, untuk jenjang

menengah pertama dan menengah atas, masyarakat Desa Rubit masih banyak yang harus menempuh pendidikan di desa atau kecamatan tetangga. Dari sisi kesehatan, masyarakat biasanya mengakses layanan kesehatan melalui posyandu atau puskesmas pembantu, dengan rujukan ke puskesmas kecamatan atau rumah sakit di Maumere untuk pelayanan kesehatan yang lebih kompleks.

Desa Rubit yang berada di Kecamatan Hewokloang, Kabupaten Sikka, memiliki ketersediaan sarana pendidikan yang cukup berlapis mulai dari tingkat dasar hingga menengah atas. Berdasarkan data tahun 2024, Desa Rubit tercatat memiliki 2 Taman Kanak-Kanak (TK), 2 Sekolah Dasar (SD), 1 Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan 1 Sekolah Menengah Atas (SMA). Sementara itu, tidak terdapat madrasah (MI, MTs, MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), sekolah luar biasa (SDLB, SMPLB, SMALB), perguruan tinggi, maupun pondok pesantren di wilayah desa ini.

Table 60. Sarana Pendidikan di Desa Rubit

Jenjang Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan
Taman Kanak-Kanak (TK)	2
Sekolah Dasar (SD)	2
Madrasah Ibtidaiyah (MI)	0
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	1
Madrasah Tsanawiyah (MTs)	0
Sekolah Menengah Atas (SMA)	1
Madrasah Aliyah (MA)	0
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	0
Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB)	0
Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB)	0
Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB)	0
Perguruan Tinggi	0
Pondok Pesantren	0

Sumber: Data Pendidikan Kecamatan Hewokloang, 2024

Berdasarkan pada data di atas kondisi pendidikan di Desa Rubit, Kecamatan Hewokloang, menunjukkan adanya ketersediaan sarana pendidikan yang relatif lengkap pada jenjang dasar hingga menengah atas. Pada tingkat pendidikan anak usia dini dan dasar, terdapat 2 Taman Kanak-Kanak (TK) dan 2 Sekolah Dasar (SD) yang menjadi fondasi awal pembentukan pengetahuan, keterampilan, dan karakter anak-anak. Keberadaan fasilitas ini mencerminkan adanya perhatian terhadap

pendidikan generasi muda sejak usia dini, meskipun jumlahnya masih terbatas untuk menjangkau seluruh kebutuhan masyarakat desa.

Pada jenjang pendidikan menengah pertama, Desa Rubit memiliki 1 Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang menjadi tempat melanjutkan pendidikan bagi lulusan SD. Namun, tidak tersedia Madrasah Tsanawiyah (MTs), sehingga pilihan pendidikan berbasis agama formal pada jenjang ini belum dapat diakses oleh masyarakat di dalam desa.

Sementara itu, pada jenjang pendidikan menengah atas, Desa Rubit memiliki 1 Sekolah Menengah Atas (SMA). Kehadiran sekolah ini cukup strategis karena memberikan akses lebih dekat bagi peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah atas tanpa harus keluar desa. Akan tetapi, ketiadaan Madrasah Aliyah (MA) maupun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) membuat jalur pendidikan lanjutan masih terbatas pada SMA umum, sehingga belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat yang menginginkan jalur pendidikan berbasis agama maupun keterampilan vokasi.

Selain itu, hingga saat ini Desa Rubit belum memiliki lembaga pendidikan khusus seperti Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), maupun Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB). Kondisi ini memperlihatkan keterbatasan layanan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Tidak tersedianya perguruan tinggi maupun pondok pesantren juga menunjukkan bahwa masyarakat Desa Rubit harus mencari akses pendidikan lanjutan di luar wilayah desa.

Secara keseluruhan, sarana pendidikan di Desa Rubit sudah mencakup jenjang dasar hingga menengah atas dengan adanya SD, SMP, dan SMA. Namun demikian, ketersediaan jalur pendidikan masih terbatas pada pendidikan umum, sementara jalur pendidikan berbasis agama maupun kejuruan belum tersedia. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di desa ini, diperlukan perhatian lebih dari pemerintah dan pemangku kepentingan terkait dalam mengembangkan sarana pendidikan alternatif, termasuk pendidikan kejuruan, pendidikan berbasis agama, serta pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus.

Selain pendidikan, aspek kesehatan juga menjadi faktor penting dalam menunjang kualitas hidup masyarakat Desa Rubit. Berdasarkan data tahun 2024, fasilitas kesehatan di desa ini masih sangat terbatas. Desa

Rubit tidak memiliki rumah sakit, rumah sakit bersalin, maupun puskesmas baik rawat inap maupun tanpa rawat inap. Hal ini berarti untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tingkat lanjut, masyarakat harus pergi ke pusat kecamatan atau bahkan ke Kabupaten Sikka.

Meski demikian, Desa Rubit tetap memiliki layanan kesehatan dasar yang cukup penting. Terdapat 1 unit Puskesmas Pembantu (Pustu) yang berfungsi sebagai sarana pelayanan kesehatan pertama bagi masyarakat. Selain itu, terdapat 4 Posyandu yang berperan aktif dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak, seperti imunisasi, pemeriksaan gizi, serta pencegahan stunting. Desa Rubit juga memiliki 1 unit Polindes (Pondok Bersalin Desa) yang memberikan pelayanan persalinan dasar dan pemeriksaan ibu hamil, sehingga sangat membantu masyarakat di tengah keterbatasan fasilitas kesehatan tingkat menengah.

Table 61. Fasilitas Kesehatan Desa Rubit, Kecamatan Hewokloang

No	Indikator	Jumlah
1	Rumah Sakit	0
2	Rumah Sakit Bersalin	0
3	Puskesmas Rawat Inap	0
4	Puskesmas Tanpa Rawat Inap	0
5	Puskesmas Pembantu (Pustu)	1
6	Poskesdes	0
7	Posyandu	4
8	Polindes	1
	Poliklinik	0

Sumber: Data Fasilitas Kesehatan Kecamatan Hewokloang, 2024

Potensi Desa Rubit terutama terletak pada sektor pertanian lahan kering, perkebunan, dan peternakan rakyat. Komoditas seperti jagung, ubi, kelapa, dan hasil ternak (babi, ayam, kambing) menjadi sumber ekonomi penting bagi masyarakat. Selain itu, kekayaan budaya lokal dan tradisi gotong royong yang masih kuat dapat menjadi modal sosial untuk memperkuat pembangunan desa secara partisipatif.

Secara umum, Desa Rubit memiliki jumlah penduduk yang relatif seimbang antara laki-laki dan perempuan dengan total populasi 2.005 jiwa. Masyarakat masih sangat bergantung pada sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan, dengan fasilitas pendidikan dan kesehatan dasar yang perlu terus ditingkatkan. Potensi ekonomi berbasis sumber daya lokal dan kekayaan budaya masyarakat menjadi modal penting bagi pengembangan

desa, meskipun masih menghadapi tantangan keterbatasan infrastruktur dan kerentanan ekonomi akibat ketergantungan pada sektor primer.

Sebagai penutup dari gambaran umum Desa Rubit, salah satu persoalan mendasar yang masih dihadapi masyarakat adalah kemiskinan. Data tahun 2024 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di desa ini mencapai 1.158 jiwa yang tersebar pada berbagai kategori desil. Dari jumlah tersebut, 353 jiwa termasuk dalam kategori desil 1 (paling miskin), 304 jiwa dalam desil 2, 460 jiwa dalam desil 3, dan 41 jiwa dalam desil 4. Angka ini menunjukkan bahwa hampir setengah dari total penduduk Desa Rubit yang berjumlah 2.005 jiwa hidup dalam keterbatasan ekonomi.

Table 62. Data Kemiskinan Desa Rubit

No	Indikator	Jumlah
1	Desil 1 (paling miskin)	353
2	Desil 2	304
3	Desil 3	460
4	Desil 4	41
	Total Penduduk Miskin	**1.158**
	% Penduduk Miskin per Desa	**0,33**

Sumber: Data Kemiskinan Kecamatan Hewokloang, 2024

Berdasarkan tabel di atas, jumlah total penduduk miskin di Desa Rubit tercatat sebanyak 1.158 jiwa. Jika dibandingkan dengan jumlah total penduduk desa sebesar 2.005 jiwa, maka hampir setengah dari total penduduk Desa Rubit berada dalam kondisi miskin. Distribusi penduduk miskin menunjukkan bahwa:

1. Desil 1 (paling miskin) berjumlah 353 jiwa, yang menggambarkan kelompok masyarakat dengan kondisi sosial-ekonomi paling rentan.
2. Desil 2 berjumlah 304 jiwa, menunjukkan kelompok yang masih menghadapi keterbatasan ekonomi namun sedikit lebih baik dibanding desil pertama.
3. Desil 3 memiliki jumlah terbesar, yakni 460 jiwa, menandakan masih banyak penduduk yang berada dalam kategori menengah bawah dengan kondisi ekonomi terbatas.
4. Desil 4 hanya 41 jiwa, menggambarkan sebagian kecil masyarakat miskin yang berada di ambang batas menuju kondisi ekonomi lebih baik.

Jika dilihat dari proporsi, angka 0,33 persen dalam tabel menunjukkan perbandingan jumlah penduduk miskin di Desa Rubit terhadap total populasi pada level kabupaten. Namun, jika dianalisis secara internal, jumlah 1.158 jiwa penduduk miskin dari total 2.005 jiwa menegaskan bahwa Desa Rubit menghadapi tingkat kemiskinan yang cukup tinggi di tingkat desa.

Kondisi ini berkorelasi dengan keterbatasan fasilitas pendidikan, kesehatan, serta rendahnya akses ekonomi masyarakat. Sebagian besar penduduk Desa Rubit menggantungkan hidup dari sektor pertanian dan pekerjaan informal, yang rentan terhadap perubahan musim, iklim, dan ketersediaan lapangan kerja.

Dengan kondisi demikian, kemiskinan menjadi faktor yang memperkuat kerentanan masyarakat di berbagai bidang. Rendahnya daya beli keluarga miskin berdampak pada keterbatasan akses terhadap pangan bergizi, layanan kesehatan, serta pendidikan yang berkualitas, sehingga menciptakan lingkaran kemiskinan yang sulit diputus. Oleh karena itu, pembangunan di Desa Rubit perlu diarahkan pada strategi yang lebih komprehensif, yakni mengintegrasikan peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, pemberdayaan difabel, serta program pengentasan kemiskinan berbasis potensi lokal.

Dengan demikian, gambaran umum Desa Rubit tidak hanya menampilkan kondisi demografi, pendidikan, kesehatan, difabel, dan stunting, tetapi juga menegaskan bahwa kemiskinan merupakan persoalan struktural yang harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan desa, agar seluruh lapisan masyarakat dapat memperoleh kesempatan yang lebih adil untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Gambaran umum kemiskinan di Desa Rubit menunjukkan bahwa dari 2.005 jiwa penduduk, terdapat 1.158 jiwa yang masuk dalam kategori miskin, tersebar pada desil 1 hingga desil 4. Kondisi ini menggambarkan bahwa hampir separuh masyarakat desa hidup dalam keterbatasan ekonomi. Dengan demikian, upaya penanggulangan kemiskinan di Desa Rubit perlu diarahkan pada peningkatan akses pendidikan, penguatan layanan kesehatan, serta program pemberdayaan ekonomi produktif berbasis potensi lokal.

Tingginya jumlah penduduk miskin ini memperlihatkan bahwa tantangan pembangunan di Desa Rubit tidak hanya berkaitan dengan

penyediaan fasilitas pendidikan, kesehatan, atau penanganan masalah gizi dan disabilitas, tetapi juga dengan keterbatasan akses ekonomi yang dialami oleh sebagian besar warganya. Mayoritas masyarakat masih menggantungkan hidup dari sektor pertanian dan pekerjaan informal yang rentan terhadap perubahan iklim, harga pasar, serta keterbatasan sarana produksi.

3.1.1.3 Desa Nangahale

Desa Nangahale terletak di Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Desa ini merupakan salah satu dari 12 desa dan kelurahan yang ada di Kecamatan Talibura (BPS Kabupaten Sikka, 2020). Berdasarkan data sensus penduduk tahun 2020, Desa Nangahale memiliki jumlah penduduk 4.233 jiwa, terdiri dari 2.056 laki-laki dan 2.177 perempuan. Desa ini terbagi menjadi tiga dusun utama, yaitu Nangahale, Namandoi, dan Utangwair (Stahn MPukuturan, 2023).

Secara geografis, Desa Nangahale memiliki luas wilayah sekitar 10,8 km² dan berada pada ketinggian 0–250 meter di atas permukaan laut. Sebagian besar wilayah desa merupakan dataran rendah yang cocok untuk pertanian dan pemukiman (Stahn MPukuturan, 2023). Mayoritas penduduk Desa Nangahale memeluk agama Islam, dengan sebagian kecil beragama Katolik. Secara sosial, masyarakat desa terdiri dari dua suku utama, yaitu Suku Soge Natarmage dan Suku Goban Runut, yang masih memelihara struktur adat, hukum, budaya, dan kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun (Mongabay Indonesia, 2025). Secara ekonomi, mayoritas penduduk Desa Nangahale bermata pencaharian sebagai nelayan, petani, dan pedagang. Aktivitas ekonomi ini didukung oleh adanya pasar mingguan sebagai pusat perdagangan lokal (Tribun Flores, 2025).

Desa Nangahale terletak di Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, NTT. Kecamatan Talibura merupakan kecamatan paling timur dan terluas di Kabupaten Sikka, dengan pusat pemerintahan berada di Desa Talibura. Desa Nangahale merupakan salah satu dari 12 desa dan kelurahan yang berada di Kecamatan Talibura BPS.

Desa Nangahale merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Talibura. Berdasarkan data kependudukan terbaru, desa ini memiliki total penduduk sebanyak 3.734 jiwa, dengan komposisi 1.839 laki-laki dan 1.895 perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk

perempuan sedikit lebih banyak dibandingkan laki-laki, dengan rasio laki-laki terhadap perempuan sekitar 0,97:1.

Table 63. Data Kependudukan Desa Nangahale, Kecamatan Talibura

Desa	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Nangahale	1.839	1.895	3.734

Sumber: Data Kependudukan Kecamatan Talibura, 2024

Analisis data ini menunjukkan bahwa distribusi penduduk berdasarkan jenis kelamin relatif seimbang. Keseimbangan ini menjadi indikator penting dalam perencanaan pembangunan desa, terutama dalam penyediaan fasilitas dan layanan publik. Misalnya, keseimbangan gender yang terjaga dapat menjadi dasar pertimbangan dalam perencanaan layanan kesehatan, pendidikan, dan program pemberdayaan masyarakat, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh penduduk.

Selain itu, data ini memberikan gambaran awal tentang karakter demografis desa, yang dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan intervensi sosial maupun perencanaan pembangunan ekonomi lokal. Keseimbangan jumlah laki-laki dan perempuan juga membuka peluang bagi pelaksanaan program sosial-ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa Nangahale.

Desa Nangahale, yang terletak di Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, memiliki fasilitas pendidikan yang melayani penduduk dari jenjang pra-sekolah hingga sekolah menengah atas dan kejuruan. Berdasarkan data yang tersedia, ketersediaan lembaga pendidikan di desa ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Table 64. umlah Lembaga Pendidikan di Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, 2024

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	Taman Kanak-Kanak (TK)	1
2	Sekolah Dasar (SD)	2
3	Madrasah Ibtidaiyah (MI)	1
4	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	1
5	Madrasah Tsanawiyah (MTs)	1
6	Sekolah Menengah Atas (SMA)	1
7	Madrasah Aliyah (MA)	0
8	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	1
9	Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB)	0

10	Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB)	0
11	Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB)	0
12	Perguruan Tinggi	0
13	Pondok Pesantren	0

Sumber: Data Pendidikan Kecamatan Talibura, 2024

Dari tabel di atas, terlihat bahwa Desa Nangahale memiliki akses pendidikan yang cukup lengkap untuk jenjang dasar dan menengah. Desa ini memiliki satu TK dan dua SD serta satu MI, yang memastikan sebagian besar anak usia sekolah dasar memiliki kesempatan belajar. Pada jenjang menengah, desa memiliki satu SMP, satu MTs, satu SMA, dan satu SMK, yang memberikan kesempatan bagi remaja untuk melanjutkan pendidikan baik secara akademik maupun kejuruan. Keberadaan SMK juga mendukung pengembangan keterampilan praktis bagi generasi muda di desa. Meskipun demikian, desa ini masih belum memiliki lembaga pendidikan tinggi, sekolah luar biasa, maupun pondok pesantren. Hal ini menunjukkan keterbatasan akses pendidikan bagi warga yang membutuhkan pendidikan lanjutan khusus atau pendidikan tinggi, sehingga mereka harus menempuh perjalanan ke luar desa.

Secara keseluruhan, Desa Nangahale memiliki fasilitas pendidikan dasar dan menengah yang relatif memadai dengan variasi sekolah umum dan kejuruan. Namun, masih diperlukan pembangunan fasilitas pendidikan tambahan, terutama pada jenjang pendidikan tinggi, pendidikan luar biasa, dan pendidikan keagamaan, agar seluruh lapisan masyarakat memperoleh kesempatan pendidikan yang lebih lengkap dan inklusif.

Selain sektor pendidikan, fasilitas kesehatan menjadi komponen penting dalam menunjang kualitas hidup masyarakat Desa Nangahale. Berdasarkan data yang tersedia, desa ini memiliki beberapa jenis fasilitas kesehatan yang melayani kebutuhan warga, meskipun belum tersedia rumah sakit maupun puskesmas rawat inap. Rincian fasilitas kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Table 65. Jumlah Fasilitas Kesehatan di Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, 2024

No	Jenis Fasilitas Kesehatan	Jumlah
1	Rumah Sakit	0
2	Rumah Sakit Bersalin	0
3	Puskesmas Rawat Inap	0
4	Puskesmas Tanpa Rawat Inap	0
5	Pustu (Puskesmas Pembantu)	0

6	Poskesdes	0
7	Posyandu	4
8	Polindes (Poliklinik Desa)	1
9	Poliklinik	0

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, 2024

Dari tabel tersebut terlihat bahwa Desa Nangahale belum memiliki rumah sakit, rumah sakit bersalin, puskesmas rawat inap maupun puskesmas tanpa rawat inap. Fasilitas kesehatan yang ada sebagian besar berbentuk posyandu sebanyak 4 unit dan polindes (poliklinik desa) sebanyak 1 unit. Ketersediaan posyandu ini sangat penting untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak, termasuk imunisasi, pemantauan pertumbuhan balita, serta edukasi kesehatan masyarakat. Sementara polindes berperan sebagai layanan kesehatan dasar yang menangani kasus ringan dan rujukan awal sebelum pasien harus pergi ke puskesmas atau rumah sakit di wilayah lain.

Analisis data ini menunjukkan bahwa meskipun fasilitas kesehatan dasar tersedia, masyarakat Desa Nangahale masih menghadapi keterbatasan dalam akses layanan kesehatan yang lebih lengkap dan intensif. Warga yang memerlukan perawatan khusus atau rawat inap harus mengakses fasilitas di luar desa, misalnya di kecamatan atau kabupaten, yang dapat memerlukan waktu dan biaya tambahan. Dengan kondisi tersebut, pembangunan fasilitas kesehatan tambahan, termasuk puskesmas atau rumah sakit bersalin, menjadi salah satu kebutuhan strategis untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di Desa Nangahale.

Selain sektor pendidikan dan kesehatan, informasi mengenai penduduk difabel di Desa Nangahale menjadi indikator penting untuk memahami kebutuhan sosial dan layanan inklusif di desa. Berdasarkan data yang tersedia, Desa Nangahale memiliki penduduk difabel dengan berbagai jenis disabilitas. Rincian data difabel dapat dilihat pada tabel berikut:

Table 66. Jumlah Penduduk Difabel di Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, 2024

No	Jenis Disabilitas	Jumlah
1	Tuna Netra (Buta)	1
2	Tuna Rungu (Tuli)	5

No	Jenis Disabilitas	Jumlah
3	Tuna Wicara (Bisu)	0
4	Tuli-Bisu	0
5	Tuna Daksa	4
6	Tuna Grahita	1
7	Tuna Laras	1
8	Tuna Eks-Sakit Kusta	0
9	Tuna Ganda	0
	Jumlah	**12**

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Sikka, 2024

Berdasarkan tabel di atas, Desa Nangahale memiliki total 12 penduduk difabel yang tersebar di berbagai jenis disabilitas. Jenis disabilitas yang paling banyak dijumpai adalah tuna rungu (tuli) sebanyak 5 orang, diikuti oleh tuna daksa sebanyak 4 orang, serta masing-masing 1 orang untuk tuna netra, tuna grahita, dan tuna laras. Desa ini tidak memiliki penduduk dengan disabilitas tuli-bisu, tuna wicara, tuna eks-sakit kusta, maupun tuna ganda. Data ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah penduduk difabel relatif kecil dibanding total populasi desa, kebutuhan layanan khusus tetap penting, terutama untuk penduduk dengan tuna rungu dan tuna daksa yang membutuhkan akses pendidikan, kesehatan, dan fasilitas publik yang mendukung inklusi sosial. Penyediaan fasilitas pendukung seperti sekolah inklusif, pelayanan kesehatan yang ramah difabel, dan program pemberdayaan sosial-ekonomi dapat membantu meningkatkan kualitas hidup mereka.

Secara keseluruhan, pemetaan penduduk difabel di Desa Nangahale menjadi dasar bagi perencanaan program sosial yang lebih inklusif, serta membantu pemerintah desa dalam merancang intervensi yang sesuai untuk memastikan semua warga, termasuk penyandang disabilitas, dapat menikmati layanan publik secara adil dan merata.

Selanjutnya stunting juga merupakan salah satu indikator penting dalam menilai status gizi anak dan kesehatan masyarakat. Berdasarkan data pelayanan kesehatan di Puskesmas Watubaing, Desa Nangahale memiliki sasaran 292 balita untuk pemantauan tumbuh kembang. Semua balita hadir dalam kegiatan pemeriksaan (datang = 292), sehingga cakupan pemantauan 100%.

Rincian hasil pengukuran tinggi badan per umur (TB/U) menunjukkan bahwa dari 292 balita yang diperiksa, terdapat 12 balita

dengan kategori sangat pendek, 37 balita kategori pendek, 243 balita dengan tinggi badan normal, dan tidak ada balita dengan tinggi badan di atas normal. Berdasarkan kriteria ini, jumlah balita stunting (kategori sangat pendek dan pendek) mencapai 49 anak, sehingga persentase stunting sebesar 16,8% dari total sasaran balita di desa.

Table 67. Data Stunting Balita di Desa Nangahale, Puskesmas Watubaing, 2024

No	Indikator	Jumlah
1	Sasaran	292
2	Datang	292
3	Sangat Pendek	12
4	Pendek	37
5	Normal	243
6	Tinggi	0
	Jumlah Stunting	**49**
	% Stunting	**16,8%**

Sumber: Puskesmas Watubaing, 2024

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa sebagian besar balita Desa Nangahale memiliki tinggi badan normal, namun masih terdapat sekitar 16,8% balita yang mengalami stunting. Angka ini menunjukkan adanya tantangan gizi di desa yang perlu menjadi perhatian pemerintah desa, fasilitas kesehatan, serta program intervensi gizi untuk balita. Upaya pencegahan stunting dapat dilakukan melalui edukasi gizi bagi orang tua, pemantauan pertumbuhan balita secara rutin, serta penyediaan makanan tambahan bagi anak yang berisiko.

Secara keseluruhan, meskipun cakupan pemeriksaan balita di Desa Nangahale sudah baik, angka stunting sebesar 16,8% menunjukkan perlunya peningkatan program intervensi gizi dan kesehatan anak untuk memastikan pertumbuhan optimal bagi seluruh balita di desa.

Selain pendidikan, fasilitas kesehatan, difabel, dan status gizi, kondisi ekonomi masyarakat Desa Nangahale juga menjadi salah satu aspek penting yang mempengaruhi kesejahteraan warga. Berdasarkan data kemiskinan terbaru, penduduk desa terbagi dalam beberapa desil untuk mengukur distribusi kemiskinan. Desa Nangahale memiliki total 1.696 penduduk miskin, dengan sebagian besar berada di desil 2, yaitu 1.497 orang, sedangkan desil 1 yang tergolong paling miskin berjumlah 199 orang. Tidak terdapat penduduk miskin pada desil 3 dan desil 4. Dengan

demikian, persentase penduduk miskin per desa mencapai 0,49%, yang menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Desa Nangahale relatif rendah.

Table 68. Distribusi Penduduk Miskin di Desa Nangahale Berdasarkan Desil, 2024

No	Indikator	Jumlah
1	Desil 1 (Paling Miskin)	199
2	Desil 2	1.497
3	Desil 3	0
4	Desil 4	0
	Total Penduduk Miskin	**1.696**
	% Penduduk Miskin per Desa	**0,49%**

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Sikka, 2024

Analisis data ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk miskin Desa Nangahale berada pada desil 2, yang berarti mereka masih berada di tingkat ekonomi menengah ke bawah, tetapi tidak termasuk kategori termiskin. Hanya sebagian kecil penduduk yang tergolong sangat miskin (desil 1), dan desa ini tidak memiliki penduduk miskin pada desil 3 dan 4, yang menunjukkan tidak ada kemiskinan ekstrem di kelompok atas. Kondisi ini menjadi indikator bahwa Desa Nangahale relatif stabil secara ekonomi, namun tetap diperlukan perhatian untuk meningkatkan kesejahteraan warga di desil 1 dan 2 melalui program ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat, dan bantuan sosial yang tepat sasaran.

3.1.2 Desil 2

3.1.2.1 Kelurahan Wolomarang

Kelurahan Wolomarang terletak di Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan termasuk dalam wilayah perkotaan yang berkembang di kabupaten ini. Wilayah kelurahan ini memiliki kepadatan penduduk sedang hingga tinggi, dengan masyarakat yang mayoritas merupakan suku Flores, yang masih memelihara adat, budaya, dan tradisi lokal. Kelurahan Wolomarang, yang berada di Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, memiliki jumlah penduduk yang relatif besar dibandingkan kelurahan lain di kecamatan tersebut. Berdasarkan data kependudukan terbaru, total penduduk Kelurahan Wolomarang mencapai 11.694 jiwa, yang terdiri dari 5.834 laki-laki dan 5.860 perempuan. Komposisi ini menunjukkan distribusi gender yang hampir seimbang, dengan jumlah perempuan sedikit lebih banyak dibanding laki-laki.

Table 69. Jumlah Penduduk Kelurahan Wolomarang Berdasarkan Jenis Kelamin, 2024

Kecamatan	Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Alok Barat	Wolomarang	5.834	5.860	11.694

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, 2024

Data di atas menunjukkan bahwa Kelurahan Wolomarang memiliki basis penduduk yang cukup besar untuk mendukung berbagai aktivitas sosial, ekonomi, dan pelayanan publik. Dengan jumlah penduduk yang seimbang antara laki-laki dan perempuan, perencanaan layanan pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan seluruh kelompok masyarakat. Jumlah penduduk yang besar ini juga menjadi potensi dalam pengembangan ekonomi lokal, seperti perdagangan, jasa, dan usaha mikro, yang menjadi tulang punggung aktivitas ekonomi warga kelurahan.

Secara geografis, Kelurahan Wolomarang berada di dataran rendah hingga menengah, sehingga memungkinkan untuk pemukiman, perdagangan, dan aktivitas ekonomi masyarakat. Wilayahnya memiliki akses yang cukup baik ke jalan utama dan fasilitas publik di kabupaten, menjadikan kelurahan ini relatif strategis untuk kegiatan sosial-ekonomi. Penduduk Kelurahan Wolomarang tersebar di berbagai kelompok usia, dengan sebagian besar bekerja di sektor perdagangan, jasa, dan pekerjaan informal. Aktivitas ekonomi ini didukung oleh pasar lokal, kios, dan usaha mikro yang banyak dijalankan oleh warga. Selain itu, sebagian masyarakat juga bermata pencaharian di sektor pertanian skala kecil dan perikanan, tergantung kondisi geografis dan sumber daya setempat.

Dalam hal pendidikan, kelurahan ini dilengkapi dengan fasilitas sekolah dasar dan menengah, yang memberikan akses belajar bagi anak-anak dan remaja setempat. Namun, untuk jenjang pendidikan tinggi, warga biasanya harus menempuh perjalanan ke kota atau kabupaten lain. Di sektor kesehatan, Kelurahan Wolomarang memiliki fasilitas kesehatan dasar berupa puskesmas pembantu, posyandu, dan poliklinik kecil untuk pelayanan awal, sementara layanan kesehatan yang lebih lengkap seperti rumah sakit berada di luar kelurahan.

Kelurahan Wolomarang, yang berada di Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, memiliki sejumlah fasilitas pendidikan yang melayani

penduduk dari jenjang pra-sekolah hingga sekolah menengah pertama. Berdasarkan data terbaru, kelurahan ini memiliki 1 Taman Kanak-Kanak (TK), 3 Sekolah Dasar (SD), dan 1 Madrasah Ibtidaiyah (MI). Fasilitas pendidikan pada jenjang menengah dan atas relatif terbatas, di mana Kelurahan Wolomarang tidak memiliki SMP, MTs, SMA, MA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB, perguruan tinggi, maupun pondok pesantren. Hal ini menunjukkan bahwa untuk pendidikan lanjutan, terutama di jenjang menengah dan atas, warga kelurahan harus mengakses sekolah di wilayah sekitarnya atau kecamatan lain.

Table 70. Jumlah Lembaga Pendidikan di Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, 2024

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	Taman Kanak-Kanak (TK)	1
2	Sekolah Dasar (SD)	3
3	Madrasah Ibtidaiyah (MI)	1
4	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	0
5	Madrasah Tsanawiyah (MTs)	0
6	Sekolah Menengah Atas (SMA)	0
7	Madrasah Aliyah (MA)	0
8	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	0
9	Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB)	0
10	Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB)	0
11	Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB)	0
12	Perguruan Tinggi	0
13	Pondok Pesantren	0

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Sikka, 2024

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa Kelurahan Wolomarang memiliki akses pendidikan dasar yang memadai, terutama pada jenjang TK dan SD. Namun, keterbatasan fasilitas untuk jenjang menengah dan atas menjadi tantangan bagi masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan di dalam wilayah kelurahan. Keterbatasan ini menekankan perlunya perencanaan dan kerja sama dengan sekolah di wilayah sekitar untuk memastikan anak-anak dan remaja Kelurahan Wolomarang dapat melanjutkan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi.

Kelurahan Wolomarang, yang berada di Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, memiliki sejumlah fasilitas kesehatan yang melayani kebutuhan dasar masyarakat. Berdasarkan data terbaru, kelurahan ini belum memiliki rumah sakit maupun rumah sakit bersalin, serta tidak memiliki

puskesmas rawat inap maupun puskesmas tanpa rawat inap. Meskipun demikian, terdapat 1 Pustu (Puskesmas Pembantu), yang berfungsi sebagai pusat pelayanan kesehatan dasar dan rujukan awal bagi masyarakat.

Selain itu, desa ini memiliki 9 posyandu, 1 polindes (poliklinik desa), dan 1 poliklinik. Posyandu menjadi salah satu fasilitas penting untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak, termasuk imunisasi, pemantauan pertumbuhan balita, dan edukasi kesehatan masyarakat. Polindes dan poliklinik berperan sebagai layanan kesehatan primer yang menangani kasus ringan dan memberikan rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap di luar kelurahan.

Table 71. Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, 2024

No	Jenis Fasilitas Kesehatan	Jumlah
1	Rumah Sakit	0
2	Rumah Sakit Bersalin	0
3	Puskesmas Rawat Inap	0
4	Puskesmas Tanpa Rawat Inap	0
5	Pustu (Puskesmas Pembantu)	1
6	Poskesdes	0
7	Posyandu	9
8	Polindes (Poliklinik Desa)	1
9	Poliklinik	1

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, 2024

Dari tabel di atas terlihat bahwa Kelurahan Wolomarang memiliki akses fasilitas kesehatan dasar yang cukup memadai, terutama melalui posyandu dan polindes. Namun, keterbatasan layanan kesehatan tingkat lanjut, seperti rumah sakit dan puskesmas rawat inap, menunjukkan bahwa warga yang memerlukan perawatan serius harus mengakses fasilitas di kecamatan atau kabupaten lain. Kondisi ini menekankan pentingnya peningkatan kapasitas fasilitas kesehatan di kelurahan atau peningkatan aksesibilitas ke layanan kesehatan di luar wilayah, agar seluruh warga dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai dan tepat waktu.

Selain pendidikan dan fasilitas kesehatan, kondisi penduduk difabel di Kelurahan Wolomarang menjadi aspek penting dalam perencanaan sosial dan layanan inklusif. Berdasarkan data terbaru, kelurahan ini memiliki 84 penduduk difabel yang tersebar pada berbagai jenis disabilitas. Jenis disabilitas yang paling banyak dijumpai adalah tuna netra (buta) sebanyak 25

orang dan tuna daksa sebanyak 23 orang, diikuti oleh tuna rungu (tuli) 10 orang, tuna grahita 10 orang, tuna wicara (bisu) 5 orang, tuna laras 5 orang, dan tuli-bisu 6 orang. Tidak terdapat penduduk dengan disabilitas tuna eks-sakit kusta maupun tuna ganda.

Table 72. Jumlah Penduduk Difabel di Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, 2024

No	Jenis Disabilitas	Jumlah
1	Tuna Netra (Buta)	25
2	Tuna Rungu (Tuli)	10
3	Tuna Wicara (Bisu)	5
4	Tuli-Bisu	6
5	Tuna Daksa	23
6	Tuna Grahita	10
7	Tuna Laras	5
8	Tuna Eks-Sakit Kusta	0
9	Tuna Ganda	0
	Jumlah	**84**

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Sikka, 2024

Data di atas menunjukkan bahwa Kelurahan Wolomarang memiliki penduduk difabel yang relatif signifikan, dengan beragam jenis disabilitas. Keberadaan penduduk difabel menekankan perlunya program layanan sosial, pendidikan inklusif, serta aksesibilitas fasilitas publik yang memadai. Misalnya, penduduk tuna netra membutuhkan aksesibilitas fisik dan informasi, sementara tuna daksa memerlukan fasilitas pendukung untuk mobilitas. Penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi yang inklusif menjadi strategi penting untuk meningkatkan kualitas hidup seluruh warga kelurahan, termasuk penyandang disabilitas.

Selain pendidikan, fasilitas kesehatan, dan penduduk difabel, status gizi anak juga menjadi salah satu indikator penting di Kelurahan Wolomarang. Berdasarkan data Puskesmas Wolomarang, kelurahan ini memiliki sasaran 1.095 balita untuk pemantauan tinggi badan per umur (TB/U), namun hanya 456 balita yang hadir dalam pemeriksaan, sehingga cakupan pemantauan sekitar 41,6%.

Hasil pengukuran TB/U menunjukkan bahwa terdapat 15 balita dengan tinggi badan sangat pendek, 32 balita kategori pendek, 407 balita dengan tinggi badan normal, dan 2 balita dengan tinggi badan tinggi. Dengan demikian, jumlah balita yang mengalami stunting (kategori sangat pendek dan

pendek) mencapai 47 anak, sehingga persentase stunting di Kelurahan Wolomarang sebesar 10,3% dari total balita yang hadir.

Table 73. Data Stunting di Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, 2024

No	Indikator	Jumlah
1	Desa/Kelurahan	Wolomarang
2	Sasaran	1.095
3	Datang	456
4	Sangat Pendek	15
5	Pendek	32
6	Normal	407
7	Tinggi	2
	Jumlah Stunting	**47**
	% Stunting	**10,3%**

Sumber: Puskesmas Wolomarang, 2024

Analisis data di atas menunjukkan bahwa sebagian besar balita yang hadir memiliki tinggi badan normal, tetapi masih terdapat sekitar 10,3% balita yang mengalami stunting. Tingkat stunting ini tergolong rendah dibanding beberapa wilayah lain, namun tetap memerlukan perhatian serius. Faktor penyebab stunting dapat meliputi pola makan, asupan gizi, dan akses layanan kesehatan ibu-anak. Selain itu, rendahnya jumlah balita yang hadir (456 dari 1.095) menunjukkan perlunya peningkatan partisipasi orang tua dalam program pemantauan tumbuh kembang balita. Upaya pencegahan stunting di Kelurahan Wolomarang dapat dilakukan melalui edukasi gizi, pemberian makanan tambahan, dan pemantauan rutin pertumbuhan anak di posyandu maupun fasilitas kesehatan lainnya.

Sementara itu secara sosial, masyarakat Kelurahan Wolomarang menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dan gotong royong, sehingga kegiatan sosial dan budaya kerap dilakukan secara bersama-sama. Meski demikian, kelurahan ini masih menghadapi tantangan terkait infrastruktur, layanan publik, dan kesejahteraan ekonomi, yang perlu menjadi fokus pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Sebagai penutup gambaran umum Kelurahan Wolomarang, kondisi ekonomi masyarakat menjadi salah satu aspek penting untuk memahami kesejahteraan warga. Berdasarkan data desil kemiskinan terbaru, Kelurahan Wolomarang memiliki total 2.288 penduduk miskin, yang terbagi dalam beberapa kategori desil. Penduduk miskin terbanyak berada pada desil 2

dengan 1.558 orang, sedangkan desil 1 (paling miskin) berjumlah 246 orang. Jumlah penduduk pada desil 3 dan 4 masing-masing sebanyak 148 dan 336 orang. Persentase penduduk miskin per desa mencapai 0,66%, yang menunjukkan tingkat kemiskinan relatif rendah.

Table 74. Distribusi Penduduk Miskin di Kelurahan Wolomarang Berdasarkan Desil, 2024

Indikator	Jumlah
Desil 1 (Paling Miskin)	246
Desil 2	1.558
Desil 3	148
Desil 4	336
Total Penduduk Miskin	**2.288**
% Penduduk Miskin per Desa	**0,66%**

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Sikka, 2024

Analisis data di atas menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk miskin Kelurahan Wolomarang berada pada desil 2, artinya mereka berada di kategori menengah ke bawah. Jumlah penduduk yang sangat miskin (desil 1) lebih sedikit, sedangkan desil 3 dan 4 menunjukkan adanya kelompok miskin yang tersebar di tingkat ekonomi lebih tinggi. Kondisi ini menunjukkan stabilitas ekonomi relatif, namun tetap perlu perhatian melalui program pemberdayaan masyarakat, pelatihan keterampilan, dan bantuan sosial yang tepat sasaran, terutama bagi penduduk di desil 1 dan 2.

Secara keseluruhan, data desil ini menutup gambaran umum Kelurahan Wolomarang dengan menunjukkan profil ekonomi masyarakat yang relatif stabil, dukungan fasilitas pendidikan dan kesehatan dasar, serta perhatian terhadap kelompok difabel dan status gizi anak. Informasi ini menjadi dasar penting bagi perencanaan pembangunan dan intervensi sosial-ekonomi yang lebih menyeluruh, agar kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara merata.

3.1.2.2 Desa Tanarawa

Desa Tanarawa terletak di Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, termasuk dalam wilayah yang sebagian besar berada di dataran rendah dengan beberapa bagian berbukit. Desa ini memiliki letak strategis yang memudahkan akses ke pusat kecamatan dan kabupaten, sehingga memengaruhi aktivitas sosial, ekonomi, dan pelayanan publik di wilayah tersebut.

Desa Tanarawa, yang berada di Kecamatan Waiblama, Kabupaten Sikka, memiliki total 1.541 jiwa penduduk. Dari jumlah tersebut, terdiri dari 768 laki-laki dan 773 perempuan, menunjukkan distribusi gender yang seimbang dengan jumlah perempuan sedikit lebih banyak dibanding laki-laki.

Table 75. Jumlah Penduduk Desa Tanarawa Berdasarkan Jenis Kelamin, 2024

Kecamatan	Desa	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Waiblama	Tanarawa	768	773	1.541

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, 2024

Analisis data di atas menunjukkan bahwa Desa Tanarawa merupakan desa dengan jumlah penduduk relatif kecil hingga menengah, dibanding beberapa desa lain di Kabupaten Sikka. Keseimbangan gender yang hampir merata menjadi indikator positif dalam perencanaan pembangunan sosial, pendidikan, dan kesehatan, karena layanan dapat dirancang untuk memenuhi kebutuhan laki-laki maupun perempuan secara proporsional.

Selain itu, total populasi yang mencapai 1.541 jiwa memberikan gambaran tentang potensi sumber daya manusia desa. Jumlah penduduk yang moderat ini dapat memudahkan pemerintah desa dalam perencanaan dan distribusi layanan publik, seperti pendidikan, fasilitas kesehatan, dan program pemberdayaan masyarakat. Namun, angka ini juga menandakan perlunya perhatian terhadap penyediaan layanan yang merata di seluruh wilayah desa, terutama jika letak geografis desa cukup luas atau terpisah menjadi beberapa dusun.

Penduduk Desa Tanarawa mayoritas merupakan masyarakat adat Flores yang masih memegang kuat nilai-nilai tradisional dan budaya lokal. Mata pencaharian utama masyarakat berada pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan pekerjaan informal. Pertanian skala kecil menjadi sumber pendapatan utama, dengan komoditas lokal yang disesuaikan dengan kondisi lahan dan iklim setempat. Selain itu, sebagian masyarakat juga terlibat dalam perdagangan kecil dan jasa, terutama di area pusat desa.

Selain profil kependudukan, pendidikan menjadi aspek penting dalam gambaran umum Desa Tanarawa. Berdasarkan data terbaru, desa ini memiliki 1 Taman Kanak-Kanak (TK), 1 Sekolah Dasar (SD), dan 1 Sekolah Menengah Pertama (SMP). Untuk jenjang pendidikan menengah atas, tersedia 1 Sekolah Menengah Atas (SMA), sedangkan jenjang pendidikan lain

seperti Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), SMK, SDLB, SMPLB, SMALB, perguruan tinggi, dan pondok pesantren tidak terdapat di desa ini.

Table 76. Jumlah Lembaga Pendidikan di Desa Tanarawa, Kecamatan Waiblama, 2024

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	Taman Kanak-Kanak (TK)	1
2	Sekolah Dasar (SD)	1
3	Madrasah Ibtidaiyah (MI)	0
4	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	1
5	Madrasah Tsanawiyah (MTs)	0
6	Sekolah Menengah Atas (SMA)	1
7	Madrasah Aliyah (MA)	0
8	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	0
9	Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB)	0
10	Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB)	0
11	Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB)	0
12	Perguruan Tinggi	0
13	Pondok Pesantren	0

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Sikka, 2024

Analisis data di atas menunjukkan bahwa Desa Tanarawa memiliki akses pendidikan dasar yang memadai, namun keterbatasan pada pendidikan keagamaan dan kejuruan dapat menjadi kendala bagi pengembangan keterampilan dan pendidikan lanjutan bagi anak-anak dan remaja di desa. Upaya pengembangan pendidikan, baik melalui kerja sama dengan sekolah di wilayah sekitar maupun peningkatan fasilitas lokal, penting untuk mendukung kualitas sumber daya manusia di desa ini.

Ketersediaan fasilitas pendidikan ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Tanarawa memiliki akses untuk pendidikan dasar hingga menengah atas, meskipun untuk pendidikan keagamaan dan pendidikan kejuruan masih harus mengakses wilayah lain. Keterbatasan fasilitas pada beberapa jenjang menekankan perlunya perencanaan pendidikan yang lebih merata dan peningkatan akses bagi seluruh warga.

Selain pendidikan, aspek kesehatan menjadi faktor penting dalam memahami kondisi sosial Desa Tanarawa. Berdasarkan data terbaru, desa ini tidak memiliki rumah sakit maupun rumah sakit bersalin, namun terdapat 1 puskesmas rawat inap yang melayani kebutuhan kesehatan masyarakat,

terutama untuk kasus yang memerlukan perawatan lebih dari satu hari. Desa ini tidak memiliki puskesmas tanpa rawat inap, pustu, atau poskesdes.

Untuk pelayanan kesehatan dasar dan preventif, desa ini memiliki 5 posyandu yang melayani pemantauan pertumbuhan balita, imunisasi, serta edukasi kesehatan ibu dan anak. Selain itu, terdapat 1 polindes (poliklinik desa) untuk pelayanan medis ringan. Tidak ada poliklinik lain di desa ini. Fasilitas-fasilitas ini menjadi pusat pelayanan kesehatan utama bagi warga, meskipun untuk kasus yang lebih kompleks warga harus mengakses fasilitas di kecamatan atau kabupaten.

Table 77. Fasilitas Kesehatan Desa Tanarawa, Kecamatan Waiblama, 2024

No	Jenis Fasilitas Kesehatan	Jumlah
1	Rumah Sakit	0
2	Rumah Sakit Bersalin	0
3	Puskesmas Rawat Inap	1
4	Puskesmas Tanpa Rawat Inap	0
5	Pustu (Puskesmas Pembantu)	0
6	Poskesdes	0
7	Posyandu	5
8	Polindes (Poliklinik Desa)	1
9	Poliklinik	0

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, 2024

Analisis data data di atas menunjukkan bahwa Desa Tanarawa memiliki akses fasilitas kesehatan dasar yang cukup, terutama melalui posyandu dan polindes, serta dukungan puskesmas rawat inap untuk kebutuhan perawatan lebih kompleks. Namun, keterbatasan fasilitas kesehatan lanjutan dan spesialis mengindikasikan bahwa warga desa masih bergantung pada layanan di luar desa untuk penanganan kasus serius. Hal ini menekankan pentingnya peningkatan aksesibilitas ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut, sekaligus memperkuat pelayanan kesehatan primer di desa agar dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara lebih efektif.

Desa ini juga memiliki infrastruktur dasar yang cukup, seperti jaringan jalan desa, akses listrik, dan air bersih, meskipun beberapa wilayah masih memerlukan perbaikan untuk mendukung mobilitas dan aktivitas ekonomi. Fasilitas publik seperti sekolah dasar dan menengah tersedia, namun untuk pendidikan menengah atas dan perguruan tinggi, warga umumnya harus mengakses sekolah di wilayah kecamatan atau kabupaten lain.

Selain pendidikan dan fasilitas kesehatan, kondisi penduduk difabel menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan dalam gambaran umum Desa Tanarawa. Berdasarkan data terbaru, desa ini memiliki 17 penduduk difabel dengan berbagai jenis disabilitas. Jumlah penduduk difabel terbanyak adalah tuna daksa sebanyak 6 orang, diikuti oleh tuna netra (buta) dan tuna rungu (tuli) masing-masing 4 orang, serta tuna grahita sebanyak 2 orang, tuna wicara (bisu) 1 orang, dan tidak terdapat penduduk dengan disabilitas tuli-bisu, tuna laras, tuna eks-sakit kusta, maupun tuna ganda.

Table 78. Jumlah Penduduk Difabel di Desa Tanarawa, Kecamatan Waiblama, 2024

No	Jenis Disabilitas	Jumlah
1	Tuna Netra (Buta)	4
2	Tuna Rungu (Tuli)	4
3	Tuna Wicara (Bisu)	1
4	Tuli-Bisu	0
5	Tuna Daksa	6
6	Tuna Grahita	2
7	Tuna Laras	0
8	Tuna Eks-Sakit Kusta	0
9	Tuna Ganda	0
	Jumlah	**17**

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Sikka, 2024

Analisis data di atas menunjukkan bahwa Desa Tanarawa memiliki jumlah penduduk difabel yang relatif kecil, namun tetap membutuhkan perhatian khusus dalam perencanaan layanan sosial, pendidikan, dan aksesibilitas fasilitas publik. Misalnya, penduduk tuna netra membutuhkan fasilitas pendukung seperti jalur khusus atau bantuan alat bantu, sedangkan penduduk tuna daksa membutuhkan aksesibilitas fisik yang memadai. Penyediaan layanan kesehatan, pendidikan inklusif, serta program pemberdayaan ekonomi bagi kelompok difabel menjadi strategi penting untuk meningkatkan kualitas hidup seluruh warga desa.

Secara sosial, masyarakat Desa Tanarawa menjunjung tinggi nilai gotong royong dan partisipasi bersama dalam kegiatan adat, ekonomi, dan sosial. Meskipun begitu, desa masih menghadapi beberapa tantangan terkait peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi, sehingga perencanaan pembangunan yang tepat sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Selain pendidikan, fasilitas kesehatan, dan penduduk difabel, status gizi anak menjadi indikator penting dalam gambaran umum Desa Tanarawa. Berdasarkan data Puskesmas Tanarawa, desa ini memiliki 119 balita yang hadir dari total sasaran 119 anak untuk pemeriksaan tinggi badan per umur (TB/U).

Hasil pengukuran menunjukkan bahwa terdapat 8 balita dengan tinggi badan sangat pendek dan 30 balita kategori pendek, sedangkan 81 balita memiliki tinggi badan normal dan tidak ada balita dengan tinggi badan tinggi. Dengan demikian, jumlah balita yang mengalami stunting mencapai 38 anak, sehingga persentase stunting di desa ini adalah 31,9% dari total balita yang diperiksa.

Table 79. Data Stunting Balita di Desa Tanarawa, Kecamatan Waiblama, 2024

No	Indikator	Jumlah
1	Sasaran	119
2	Datang	119
3	Sangat Pendek	8
4	Pendek	30
5	Normal	81
6	Tinggi	0
	Jumlah Stunting	**38**
	% Stunting	**31,9%**

Analisis data di atas menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar balita memiliki tinggi badan normal, tingkat stunting di Desa Tanarawa cukup tinggi yaitu 31,9%, yang tergolong signifikan. Hal ini menunjukkan perlunya intervensi gizi dan kesehatan anak, termasuk edukasi gizi untuk orang tua, penyediaan makanan tambahan bergizi, dan pemantauan pertumbuhan balita secara rutin melalui posyandu maupun fasilitas kesehatan lainnya. Upaya ini penting untuk mencegah dampak jangka panjang stunting terhadap perkembangan fisik dan kognitif anak, sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di desa.

Sebagai penutup gambaran umum Desa Tanarawa, kondisi ekonomi masyarakat menjadi salah satu aspek penting dalam memahami kesejahteraan warga. Berdasarkan data desil kemiskinan terbaru, desa ini memiliki total 983 penduduk miskin, yang terbagi dalam beberapa kategori desil. Sebagian besar penduduk miskin berada pada desil 2 sebanyak 976 orang, sedangkan desil 1 (paling miskin) hanya 7 orang, dan tidak terdapat

penduduk miskin pada desil 3 dan 4. Persentase penduduk miskin per desa tercatat 0,28%, yang menunjukkan tingkat kemiskinan yang relatif rendah dibanding desa lain di Kabupaten Sikka.

Table 80. Distribusi Penduduk Miskin di Desa Tanarawa Berdasarkan Desil, 2024

No	Indikator	Jumlah
1	Desil 1 (Paling Miskin)	7
2	Desil 2	976
3	Desil 3	0
4	Desil 4	0
	Total Penduduk Miskin	**983**
	% Penduduk Miskin per Desa	**0,28%**

Sumber: Puskesmas Tanarawa, 2024

Analisis data di atas menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk miskin Desa Tanarawa berada pada kategori menengah ke bawah (desil 2), sedangkan jumlah penduduk yang sangat miskin relatif sedikit. Kondisi ini menandakan bahwa secara umum desa memiliki stabilitas ekonomi yang baik, namun tetap diperlukan program pemberdayaan masyarakat dan bantuan sosial yang tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok miskin, terutama bagi penduduk pada desil 1 dan 2.

3.1.3 Desil 3

3.1.3.1 Kelurahan Madawat

Kelurahan Madawat merupakan salah satu wilayah administratif di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, yang berada pada kawasan pesisir dan dataran rendah. Letak geografisnya strategis karena relatif mudah diakses dari pusat kecamatan dan kabupaten, sehingga memengaruhi aktivitas sosial, ekonomi, dan mobilitas penduduk di wilayah ini. Topografi yang didominasi dataran rendah memudahkan pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan desa, jaringan listrik, dan akses air bersih.

Penduduk Kelurahan Madawat mayoritas merupakan masyarakat adat Flores yang masih mempertahankan nilai-nilai budaya lokal, termasuk gotong royong, adat tradisional, dan pola hidup komunitas. Mata pencaharian utama masyarakat berada pada sektor pertanian, perikanan, perkebunan, dan perdagangan skala kecil. Sebagian masyarakat juga terlibat dalam pekerjaan informal dan jasa lokal, khususnya di pusat kelurahan.

Berdasarkan data kependudukan, jumlah penduduk di Kelurahan Madawat tercatat sebanyak 8.915 jiwa, yang terdiri dari 4.350 jiwa laki-laki dan 4.565 jiwa perempuan. Komposisi ini menunjukkan bahwa jumlah perempuan sedikit lebih banyak dibandingkan laki-laki, meskipun selisihnya relatif kecil, yakni hanya 215 jiwa.

Table 81. Jumlah Penduduk Kelurahan Madawat Kecamatan Alok

Kecamatan	Desa/Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Alok	Madawat	4,350	4,565	8,915

Sumber: Data Kependudukan Kecamatan Alok, 2024

Dari distribusi data di atas dapat dilihat bahwa Kelurahan Madawat merupakan salah satu wilayah dengan populasi cukup besar di Kabupaten Sikka, sehingga menempati posisi penting dalam konteks perencanaan pembangunan daerah. Keseimbangan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan juga mencerminkan potensi tenaga kerja yang relatif seimbang di berbagai sektor, baik pertanian, perikanan, perdagangan, maupun jasa.

Jumlah penduduk yang mencapai hampir sembilan ribu jiwa ini juga berimplikasi pada tingginya kebutuhan terhadap layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Oleh karena itu, peran Kelurahan Madawat dalam pembangunan wilayah Kecamatan Alok menjadi sangat signifikan, sekaligus menuntut perhatian khusus untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara merata.

Selain dari sisi kependudukan, potensi sumber daya manusia di Kelurahan Madawat juga dapat dilihat dari ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan. Data berikut memperlihatkan variasi lembaga pendidikan yang ada di kelurahan ini. Kelurahan ini memiliki infrastruktur pendidikan dasar hingga menengah, dengan beberapa sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) yang tersedia di wilayah kelurahan. Untuk jenjang pendidikan menengah atas dan pendidikan kejuruan, penduduk umumnya mengakses sekolah di wilayah kecamatan atau kabupaten lain. Pendidikan agama juga menjadi bagian penting bagi masyarakat, dengan keberadaan beberapa fasilitas seperti pondok pesantren.

Table 82. Sarana Pendidikan di Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok

No	Indikator	Jumlah
1	TK	1
2	SD	4
3	MI	1
4	SMP	1
5	MTs	0
6	SMA	1
7	MA	0
8	SMK	0
9	SDLB	1
10	SMPLB	1
11	SMALB	1
12	Perguruan Tinggi	1
13	Pondok Pesantren	0

Sumber: Data Pendidikan Kecamatan Alok, 2024

Berdasarkan tabel tersebut, Kelurahan Madawat memiliki 1 Taman Kanak-Kanak (TK), 4 Sekolah Dasar (SD), dan 1 Madrasah Ibtidaiyah (MI), yang menjadi dasar penting bagi layanan pendidikan usia dini hingga sekolah dasar. Untuk jenjang menengah, tersedia 1 Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan 1 Sekolah Menengah Atas (SMA), yang menunjukkan bahwa akses pendidikan hingga tingkat menengah atas dapat dijangkau langsung di wilayah ini tanpa harus keluar kelurahan. Menariknya, di Madawat juga terdapat fasilitas pendidikan khusus, yakni 1 Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), 1 Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), serta 1 Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB). Kehadiran sekolah luar biasa ini menandakan adanya perhatian terhadap kelompok difabel atau anak berkebutuhan khusus, sehingga mereka mendapatkan akses pendidikan yang setara. Selain itu, keberadaan 1 Perguruan Tinggi menunjukkan peran Madawat sebagai salah satu pusat pendidikan tinggi di wilayah Kecamatan Alok. Hal ini memberikan peluang bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia, sekaligus menjadi daya tarik bagi masyarakat dari luar wilayah untuk mengakses pendidikan.

Namun, dari sisi pendidikan berbasis keagamaan, terlihat bahwa belum terdapat pondok pesantren di Madawat. Meskipun terdapat 1 MI, keberadaan lembaga pendidikan Islam formal lainnya seperti madrasah tsanawiyah (MTs) maupun madrasah aliyah (MA) belum ada, sehingga kebutuhan masyarakat

terkait pendidikan berbasis agama kemungkinan besar dipenuhi di luar kelurahan.

Dengan komposisi fasilitas pendidikan yang cukup beragam tersebut, Madawat dapat dikatakan sebagai salah satu kelurahan yang memiliki layanan pendidikan relatif lengkap, mulai dari jenjang dasar hingga perguruan tinggi, serta pendidikan khusus bagi anak berkebutuhan. Hal ini menjadi modal penting bagi pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas di wilayah tersebut.

Selain memiliki sarana pendidikan yang relatif lengkap, Kelurahan Madawat juga ditunjang oleh keberadaan fasilitas kesehatan yang melayani kebutuhan masyarakat. Data berikut memperlihatkan jenis dan jumlah fasilitas kesehatan yang tersedia di wilayah ini. Fasilitas kesehatan di Kelurahan Madawat meliputi posyandu dan puskesmas pembantu, yang menjadi pusat layanan kesehatan dasar, imunisasi, dan pemantauan tumbuh kembang anak. Layanan kesehatan lanjutan, seperti rumah sakit dan puskesmas rawat inap, tersedia di kecamatan atau kabupaten.

Table 83 Fasilitas Kesehatan Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, 2024

No	Indikator	Jumlah
1	Rumah Sakit	0
2	Rumah Sakit Bersalin	0
3	Puskesmas Rawat Inap	0
4	Puskesmas Tanpa Rawat Inap	0
5	Pustu	0
6	Poskesdes	0
7	Posyandu	8
8	Polindes	1
9	Poliklinik	1

Sumber: Data Kesehatan Kecamatan Alok, 2024

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa Kelurahan Madawat tidak memiliki rumah sakit maupun puskesmas, baik yang menyediakan rawat inap maupun tanpa rawat inap. Kondisi ini menandakan bahwa masyarakat Madawat harus mengakses layanan kesehatan dasar dan layanan medis lanjutan di luar wilayah kelurahan, misalnya di puskesmas atau rumah sakit yang berada di kecamatan atau kabupaten.

Meskipun tidak memiliki puskesmas, Madawat memiliki 8 Posyandu, 1 Polindes, dan 1 Poliklinik. Kehadiran Posyandu yang cukup banyak menjadi

indikator kuat adanya perhatian terhadap kesehatan ibu dan anak, termasuk program gizi, imunisasi, serta pelayanan kesehatan dasar yang berbasis masyarakat. Sementara itu, keberadaan Polindes (Pondok Bersalin Desa) sangat penting untuk menunjang layanan persalinan normal dan kesehatan ibu hamil, meskipun tidak ada rumah sakit bersalin di wilayah ini.

Poliklinik yang ada di Madawat menjadi salah satu fasilitas kesehatan penting, karena berfungsi melayani masyarakat dalam skala yang lebih luas daripada Posyandu maupun Polindes. Kehadiran poliklinik juga memberi akses yang lebih cepat untuk pemeriksaan dasar sebelum masyarakat dirujuk ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang lebih besar di luar kelurahan.

Secara umum, ketiadaan rumah sakit dan puskesmas di Madawat dapat dipandang sebagai kelemahan dalam penyediaan layanan kesehatan primer dan lanjutan. Namun, jumlah Posyandu yang relatif banyak, ditambah keberadaan Polindes dan Poliklinik, menunjukkan bahwa layanan kesehatan dasar di tingkat masyarakat masih cukup terjangkau. Hal ini mencerminkan strategi pemerintah untuk memperkuat pelayanan kesehatan berbasis masyarakat di kelurahan dengan jumlah penduduk yang besar seperti Madawat.

Selain aspek kependudukan, pendidikan, dan kesehatan, kondisi sosial masyarakat Kelurahan Madawat juga dapat dilihat melalui jumlah penyandang disabilitas. Data berikut memperlihatkan jumlah penyandang disabilitas menurut jenisnya.

Table 84. Jumlah Penduduk Difabel di Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, 2024

No	Jenis Disabilitas	Jumlah
1	Tuna Netra (Buta)	7
2	Tuna Rungu (Tuli)	6
3	Tuna Wicara (Bisu)	0
4	Tuli-Bisu	0
5	Tuna Daksa	0
6	Tuna Grahita	3
7	Tuna Laras	0
8	Tuna Eks-Sakit Kusta	0
9	Tuna Ganda	0
	Total	**16**

Sumber: Data Sosial Kecamatan Alok, 2024

Berdasarkan tabel di atas, jumlah penyandang disabilitas di Kelurahan Madawat mencapai 16 orang. Dari jumlah tersebut, kategori terbanyak adalah

tuna netra (7 orang) dan tuna rungu (6 orang). Selain itu, terdapat 3 orang tuna grahita, sementara jenis disabilitas lainnya seperti tuna wicara, tuli-bisu, tuna daksa, tuna laras, tuna eks-sakit kusta, maupun tuna ganda tidak tercatat di wilayah ini.

Data ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah penyandang disabilitas di Madawat relatif kecil dibandingkan total jumlah penduduk (8.915 jiwa), keberadaannya tetap menjadi perhatian penting dalam perencanaan pembangunan sosial. Kehadiran mereka menuntut penyediaan fasilitas umum yang inklusif, dukungan layanan kesehatan khusus, serta program pemberdayaan sosial-ekonomi yang memungkinkan penyandang disabilitas tetap berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Konsentrasi terbesar pada tuna netra dan tuna rungu juga menegaskan perlunya layanan kesehatan mata dan pendengaran, serta pendampingan pendidikan inklusif untuk memastikan mereka mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan dan pekerjaan.

Selain kondisi demografi, pendidikan, fasilitas kesehatan, serta keberadaan kelompok difabel, aspek gizi masyarakat khususnya terkait stunting juga menjadi indikator penting dalam memahami gambaran umum Kelurahan Madawat. Data stunting berikut memberikan informasi mengenai kualitas tumbuh kembang balita sebagai cerminan kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

Table 85. Data Stunting Balita di Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, 2024

No	Keterangan	Jumlah
1	Sasaran	505
2	Datang	498
3	Sangat Pendek	17
4	Pendek	36
5	Normal	445
6	Tinggi	0
	Jumlah Stunting	**53**
	% Stunting	**10,6%**

Sumber: Data Kesehatan Kecamatan Alok, 2024

Berdasarkan data di atas, dari 505 balita sasaran, tercatat 498 balita hadir dalam pemantauan. Dari hasil pengukuran, 53 balita (10,6%) teridentifikasi mengalami stunting, dengan rincian 17 balita sangat pendek

dan 36 balita pendek. Sementara itu, mayoritas balita (445 orang) memiliki status gizi normal, dan tidak ada balita yang masuk kategori tinggi.

Analisis ini menunjukkan bahwa angka stunting di Madawat masih berada di atas standar ideal yang ditetapkan WHO (<10%), meskipun tidak tergolong sangat tinggi. Hal ini memberikan gambaran bahwa upaya pencegahan dan penanganan stunting masih perlu diperkuat melalui peningkatan gizi, edukasi kesehatan ibu dan anak, serta penguatan layanan posyandu yang sudah ada (8 posyandu di Madawat).

Kondisi ini juga mencerminkan adanya tantangan dalam pemenuhan gizi anak balita, baik karena faktor ekonomi, pengetahuan, maupun akses terhadap layanan kesehatan. Oleh karena itu, stunting di Madawat perlu menjadi prioritas dalam program pembangunan sosial dan kesehatan, agar kualitas sumber daya manusia di masa depan dapat terjamin.

Secara sosial, masyarakat Kelurahan Madawat menunjukkan partisipasi yang aktif dalam kegiatan adat, ekonomi, dan sosial, meskipun masih terdapat beberapa tantangan terkait peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi. Kondisi ini menekankan perlunya perencanaan pembangunan yang menyeluruh, termasuk program pemberdayaan masyarakat, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta penguatan ekonomi lokal. Kelurahan Madawat dengan karakteristik demografis dan sosial-ekonomi seperti ini menjadi lokasi penelitian yang representatif untuk memahami kondisi masyarakat, tantangan pembangunan, serta intervensi yang dapat meningkatkan kesejahteraan warga.

Sebagai penutup gambaran umum, kondisi kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Madawat dapat dilihat dari distribusi penduduk berdasarkan desil kesejahteraan. Data berikut menunjukkan persebaran jumlah penduduk menurut tingkat kesejahteraan dari desil 1 hingga desil 4.

Table 86. . Distribusi Penduduk Miskin di Kelurahan Madawat Berdasarkan Desil, 2024

No	Keterangan	Jumlah
1	Desil 1 (sangat miskin)	191
2	Desil 2 (miskin)	270
3	Desil 3 (menengah bawah)	192
4	Desil 4 (menengah)	181
	Total Penduduk Miskin	**834**
	% Penduduk Miskin per Desa	**0,24**

Sumber: BPS Kabupaten Sikka, 2025

Berdasarkan tabel tersebut, jumlah total penduduk miskin di Kelurahan Madawat adalah 834 jiwa atau 24% dari total populasi. Angka ini menunjukkan bahwa hampir seperempat penduduk Madawat masih berada dalam kategori miskin, sehingga tingkat kerentanan sosial-ekonomi di wilayah ini tergolong cukup signifikan. Distribusi terbesar berada pada desil 2 dengan 270 jiwa, yang berarti sebagian besar masyarakat berada dalam kategori miskin namun tidak termasuk sangat miskin. Hal ini menunjukkan bahwa masalah utama di Madawat bukan semata-mata kemiskinan ekstrem (desil 1) yang berjumlah 191 jiwa, melainkan dominasi kemiskinan moderat pada desil 2.

Sementara itu, jumlah penduduk pada desil 3 (menengah bawah) sebanyak 192 jiwa dan desil 4 (menengah) sebanyak 181 jiwa memperlihatkan bahwa ada potensi mobilitas sosial, di mana sebagian masyarakat mulai masuk kategori lebih sejahtera. Akan tetapi, ketimpangan distribusi antara kelompok miskin dan menengah masih cukup tajam. Hal ini menandakan bahwa meskipun ada peluang peningkatan kesejahteraan, risiko kerentanan ekonomi tetap tinggi karena basis masyarakat yang miskin lebih dominan dibanding kelompok menengah.

Secara umum, data ini memperlihatkan bahwa Kelurahan Madawat memiliki tantangan besar dalam pengentasan kemiskinan, meskipun berada di wilayah perkotaan dengan akses pendidikan, kesehatan, dan layanan publik yang relatif lebih baik dibanding desa-desa lain di Kabupaten Sikka. Kondisi ini mengindikasikan bahwa faktor struktural seperti keterbatasan lapangan pekerjaan, akses terhadap modal usaha, serta ketimpangan distribusi sumber daya menjadi penyebab utama masih tingginya angka kemiskinan.

3.1.4 Desil 4

3.1.4.1 Desa Umauta

Desa Umauta merupakan salah satu desa yang berada di wilayah administratif Kecamatan Bola, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Secara geografis, desa ini terletak di Pulau Flores bagian utara dengan kondisi wilayah yang umumnya berbukit dan bergelombang, serta memiliki kedekatan dengan kawasan pesisir yang memberi pengaruh terhadap pola kehidupan masyarakat. Akses menuju Desa Umauta dapat

ditempuh melalui jalur darat dari Kota Maumere, ibu kota Kabupaten Sikka, dengan jarak yang relatif mudah dijangkau meskipun kondisi jalan bervariasi sesuai musim. Sebagian besar masyarakat Umauta masih menggantungkan hidup pada sektor pertanian lahan kering dan peternakan kecil, sementara dalam beberapa tahun terakhir desa ini juga dikenal sebagai desa wisata, bahkan masuk dalam 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) tahun 2022. Hal ini menunjukkan adanya kombinasi antara potensi agraris dan potensi wisata budaya yang dikelola berbasis komunitas.

Table 87. Jumlah Penduduk Desa Umauta Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2024

Kecamatan	Desa	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Bola	Umauta	915	1.093	2.008

Sumber: Data Kependudukan Kecamatan Bola (2024).

Berdasarkan tabel di atas, jumlah penduduk Desa Umauta mencapai 2.008 jiwa, terdiri atas 915 jiwa laki-laki (45,6%) dan 1.093 jiwa perempuan (54,4%). Selisih jumlah penduduk antara laki-laki dan perempuan adalah 178 jiwa dengan kecenderungan dominasi penduduk perempuan. Perhitungan rasio jenis kelamin (sex ratio) menghasilkan angka 83,7, yang berarti dalam setiap 100 perempuan hanya terdapat sekitar 84 laki-laki. Kondisi demografis ini memiliki implikasi terhadap dinamika sosial dan ekonomi desa. Jumlah perempuan yang lebih besar dapat menjadi potensi penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi produktif, terutama pada sektor pertanian, kerajinan, dan pariwisata komunitas yang menjadi unggulan Umauta. Namun, hal ini juga menuntut perhatian khusus dalam perencanaan pembangunan desa agar tidak menambah beban ganda perempuan yang kerap terlibat dalam pekerjaan domestik sekaligus produktif.

Secara keseluruhan, gambaran demografi Desa Umauta memperlihatkan potensi sumber daya manusia yang cukup besar dengan karakteristik unik. Dominasi jumlah perempuan dalam struktur penduduk memberikan warna tersendiri dalam strategi pembangunan desa, terutama dalam konteks pemberdayaan masyarakat dan pengembangan pariwisata berbasis budaya.

Sementara itu, Desa Umauta di Kecamatan Bola, Kabupaten Sikka, memiliki fasilitas pendidikan yang masih terbatas. Berdasarkan data terbaru tahun 2023, di desa ini terdapat 1 Taman Kanak-Kanak (TK) dan 2 Sekolah Dasar (SD). Sementara itu, jenjang pendidikan lainnya seperti Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Luar Biasa (SDLB, SMPLB, SMALB), perguruan tinggi, maupun pondok pesantren belum tersedia di Desa Umauta.

Table 88. Jumlah Fasilitas Pendidikan di Desa Umauta, Kecamatan Bola (2024)

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	Taman Kanak-Kanak (TK)	1
2	Sekolah Dasar (SD)	2
3	Madrasah Ibtidaiyah (MI)	0
4	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	0
5	Madrasah Tsanawiyah (MTs)	0
6	Sekolah Menengah Atas (SMA)	0
7	Madrasah Aliyah (MA)	0
8	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	0
9	Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB)	0
10	Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB)	0
11	Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB)	0
12	Perguruan Tinggi	0
13	Pondok Pesantren	0

Sumber: Data Pendidikan Desa Umauta, Kecamatan Bola, Kabupaten Sikka (2024).

Data di atas memperlihatkan bahwa akses pendidikan di Desa Umauta baru menjangkau pendidikan usia dini dan pendidikan dasar. Anak-anak dapat menempuh pendidikan TK dan SD di dalam desa, tetapi untuk melanjutkan ke jenjang SMP, SMA, maupun pendidikan tinggi, mereka harus keluar desa menuju pusat kecamatan atau bahkan ke ibu kota kabupaten di Maumere. Keterbatasan fasilitas pendidikan ini berimplikasi pada beberapa hal. Pertama, terdapat tantangan aksesibilitas karena jarak dan biaya transportasi menjadi faktor penentu keberlanjutan pendidikan anak-anak. Kedua, kondisi ini juga berpotensi menimbulkan tingkat putus sekolah pada jenjang menengah jika dukungan keluarga terbatas. Ketiga, dalam jangka panjang, keterbatasan sarana pendidikan menengah dan tinggi dapat memengaruhi kualitas sumber daya manusia di Desa Umauta,

terutama dalam mendukung sektor unggulan seperti pariwisata dan pengembangan ekonomi lokal.

Dengan demikian, data terbaru mengenai fasilitas pendidikan di Desa Umauta menegaskan perlunya perhatian serius dalam pembangunan sektor pendidikan desa. Upaya peningkatan akses pendidikan menengah dan penguatan program beasiswa atau dukungan transportasi menjadi kunci untuk mendorong pemerataan kesempatan belajar bagi generasi muda Umauta.

Sementara itu berdasarkan data fasilitas kesehatan, terlihat bahwa Desa Umauta tidak memiliki rumah sakit, rumah sakit bersalin, puskesmas rawat inap, maupun puskesmas tanpa rawat inap. Namun, tersedia 1 unit Pustu (Puskesmas Pembantu) dan 1 unit Poskesdes (Pos Kesehatan Desa) yang menjadi garda terdepan dalam pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa. Selain itu, keberadaan 4 Posyandu juga menjadi instrumen penting dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak, khususnya dalam pemantauan tumbuh kembang balita serta upaya pencegahan stunting.

Table 89. Fasilitas Kesehatan di Desa Umauta, Kecamatan Bola

No	Jenis Fasilitas Kesehatan	Jumlah
1	Rumah Sakit	0
2	Rumah Sakit Bersalin	0
3	Puskesmas Rawat Inap	0
4	Puskesmas Tanpa Rawat Inap	0
5	Pustu	1
6	Poskesdes	1
7	Posyandu	4
8	Polindes	0
9	Poliklinik	0

Sumber: Data Kesehatan Kecamatan Bola (2024)

Dari tabel di atas, terlihat bahwa Desa Umauta tidak memiliki rumah sakit, rumah sakit bersalin, puskesmas rawat inap, maupun puskesmas tanpa rawat inap. Namun, tersedia 1 unit Pustu (Puskesmas Pembantu) dan 1 unit Poskesdes (Pos Kesehatan Desa) yang menjadi garda terdepan dalam pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa. Selain itu, keberadaan 4 Posyandu juga menjadi instrumen penting dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak, khususnya dalam pemantauan tumbuh kembang balita serta upaya pencegahan stunting.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan di Desa Umauta masih terbatas dan lebih bertumpu pada fasilitas kesehatan tingkat dasar. Tidak adanya rumah sakit maupun puskesmas menunjukkan bahwa masyarakat harus bergantung pada Pustu, Poskesdes, dan Posyandu untuk mendapatkan layanan kesehatan dasar. Untuk layanan kesehatan yang lebih kompleks, masyarakat kemungkinan harus dirujuk ke puskesmas di desa lain atau ke rumah sakit di kecamatan/kabupaten terdekat.

Keberadaan 1 Pustu dan 1 Poskesdes menunjukkan adanya akses awal terhadap pelayanan kesehatan, meskipun kapasitasnya terbatas dari sisi tenaga medis maupun sarana prasarana. Sementara itu, 4 Posyandu berperan strategis dalam pelayanan promotif dan preventif, meskipun cakupan pelayanan kuratifnya masih rendah.

Dengan demikian, gambaran umum fasilitas kesehatan di Desa Umauta memperlihatkan bahwa masyarakat memiliki akses awal terhadap layanan kesehatan, tetapi masih menghadapi keterbatasan dalam hal pelayanan kesehatan tingkat lanjut. Hal ini mengindikasikan perlunya penguatan fasilitas puskesmas atau peningkatan kapasitas Pustu agar pelayanan kesehatan dapat lebih merata dan menjangkau kebutuhan masyarakat desa.

Setelah membahas kondisi fasilitas kesehatan di Desa Umauta yang masih terbatas pada pelayanan tingkat dasar, penting juga untuk melihat kondisi sosial masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. Berdasarkan data yang ada, jumlah penyandang disabilitas di Desa Umauta dapat dilihat pada tabel berikut:

Table 90. Jumlah Penyandang Disabilitas di Desa Umauta, Kecamatan Bola

No	Jenis Disabilitas	Jumlah
1	Tuna Netra (Buta)	2
2	Tuna Rungu (Tuli)	1
3	Tuna Wicara (Bisu)	3
4	Tuli-Bisu	0
5	Tuna Daksa	2
6	Tuna Grahita	0
7	Tuna Laras	3
8	Tuna Eks-Sakit Kusta	0
9	Tuna Ganda	1
	Total	12

Sumber: Data Kecamatan Bola, Bidang Sosial Kependudukan, 2025

Dari tabel di atas diketahui bahwa jumlah total penyandang disabilitas di Desa Umauta adalah 12 orang. Penyandang disabilitas terbanyak adalah tuna wicara (3 orang) dan tuna laras (3 orang). Selanjutnya terdapat 2 orang tuna netra dan 2 orang tuna daksa, serta 1 orang tuna rungu dan 1 orang dengan disabilitas ganda. Adapun kategori tuli-bisu, tuna grahita, dan tuna eks-sakit kusta tidak ditemukan di desa ini.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah penyandang disabilitas di Desa Umauta relatif kecil dibandingkan total populasi, namun mereka tetap merupakan kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus. Dominasi penyandang tuna wicara dan tuna laras menggambarkan adanya kebutuhan layanan pendidikan dan kesehatan yang inklusif, terutama terkait dengan komunikasi dan gangguan perilaku. Keberadaan penyandang tuna netra dan tuna daksa juga menegaskan pentingnya penyediaan aksesibilitas pada fasilitas umum, seperti sarana pendidikan, fasilitas kesehatan, maupun infrastruktur desa yang ramah disabilitas. Sementara itu, jumlah penyandang tuna ganda meskipun hanya satu orang, tetap memerlukan dukungan yang lebih intensif karena memiliki kerentanan ganda dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian, data ini memperlihatkan bahwa pembangunan desa ke depan perlu diarahkan untuk memperkuat aspek inklusivitas sosial. Hal ini penting agar kelompok penyandang disabilitas di Desa Umauta dapat memperoleh layanan kesehatan, pendidikan, serta kesempatan partisipasi sosial yang setara dengan masyarakat lainnya.

Setelah melihat kondisi fasilitas kesehatan dan jumlah penyandang disabilitas di Desa Umauta, aspek lain yang juga penting untuk ditinjau adalah status gizi anak, khususnya terkait masalah stunting. Stunting merupakan salah satu indikator penting kesehatan masyarakat yang menggambarkan kualitas tumbuh kembang anak. Data stunting di Desa Umauta dapat dilihat pada tabel berikut:

Table 91. Data Stunting di Desa Umauta, Kecamatan Bola

No	Keterangan	Jumlah
1	Sasaran	99
2	Datang	99
3	Sangat Pendek	0
4	Pendek	5

5	Normal	94
6	Tinggi	0
	Jumlah Kasus Stunting	**5**
	Persentase Stunting (%)	**5,1**

Sumber: Data Kesehatan, Kecamatan Bola (2025)

Berdasarkan tabel di atas, jumlah sasaran balita yang diperiksa adalah 99 anak dan seluruhnya hadir (100% cakupan datang). Dari hasil pengukuran, terdapat 5 anak (5,1%) yang masuk kategori stunting dengan rincian seluruhnya berada pada kategori pendek. Tidak ditemukan anak dengan status sangat pendek, sementara sebagian besar anak (94 orang) berada pada status gizi normal.

Kondisi ini menunjukkan bahwa prevalensi stunting di Desa Umauta berada pada angka 5,1% dari total balita yang diukur. Persentase ini relatif rendah bila dibandingkan dengan standar nasional yang menargetkan prevalensi stunting turun hingga di bawah 14% pada tahun 2024. Dengan demikian, Desa Umauta dapat dikategorikan memiliki kondisi gizi balita yang cukup baik. Namun demikian, tetap perlu diperhatikan bahwa 5 anak yang mengalami stunting harus mendapatkan pendampingan intensif, baik melalui intervensi gizi spesifik (seperti pemberian makanan tambahan dan suplemen gizi) maupun intervensi gizi sensitif (peningkatan sanitasi, penyediaan air bersih, serta edukasi pola asuh dan pola makan keluarga). Fakta bahwa tidak ditemukan balita dengan kategori sangat pendek menjadi indikator positif, namun keberadaan anak stunting kategori pendek menandakan adanya faktor risiko yang masih harus diatasi, misalnya asupan gizi yang kurang optimal atau pola asuh yang belum memadai.

Dengan demikian, data ini memberikan gambaran bahwa secara umum status gizi anak balita di Desa Umauta cukup baik, tetapi intervensi pencegahan tetap penting untuk memastikan tidak ada penambahan kasus stunting baru dan mendorong perbaikan status gizi anak yang sudah teridentifikasi stunting.

Masyarakat Desa Umauta pada dasarnya masih mengandalkan sektor pertanian tradisional seperti padi ladang, jagung, dan ubi kayu, serta peternakan skala kecil sebagai sumber mata pencaharian utama. Namun, dalam beberapa tahun terakhir desa ini mulai dikenal luas melalui program pengembangan desa wisata. Penetapan Umauta sebagai salah satu Desa

Wisata dan keberhasilannya masuk dalam 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) tahun 2022 menunjukkan adanya potensi besar untuk mengembangkan sektor pariwisata berbasis masyarakat. Kehadiran homestay, atraksi budaya, serta kerajinan lokal seperti tenun ikat memberikan nilai tambah bagi ekonomi rumah tangga sekaligus memperkuat identitas budaya setempat.

Dari sisi sosial budaya, masyarakat Umauta masih memegang kuat tradisi lokal yang tercermin dalam berbagai ritual adat, tarian, kuliner khas, hingga bentuk arsitektur tradisional. Kekayaan budaya ini tidak hanya menjadi warisan identitas masyarakat, tetapi juga modal penting dalam pengembangan pariwisata berbasis komunitas. Di sisi lain, keterbatasan infrastruktur, variasi akses layanan dasar, dan ketergantungan pada faktor alam masih menjadi tantangan dalam mendorong kemandirian desa.

Sebagai penutup dari gambaran umum Desa Umauta, aspek ekonomi masyarakat dapat dilihat melalui data kemiskinan yang diukur berdasarkan desil. Data ini memberikan informasi mengenai sebaran penduduk miskin di setiap kategori kesejahteraan. Rincian jumlah penduduk miskin di Desa Umauta ditampilkan pada tabel berikut:

Table 92. Data Kemiskinan Berdasarkan Desil di Desa Umauta, Kecamatan Bola

No	Keterangan	Jumlah
1	Desil 1 (sangat miskin)	92
2	Desil 2 (miskin sedang)	146
3	Desil 3 (miskin menengah ke bawah)	715
4	Desil 4	0
	Total Penduduk Miskin	**953**
	Persentase Penduduk Miskin (%)	**27%**

Sumber: Data Kecamatan Bola, Bidang Sosial Ekonomi, 2024

Berdasarkan data di atas, jumlah penduduk miskin di Desa Umauta mencapai 953 jiwa atau 27% dari total penduduk desa. Sebagian besar berada pada kategori Desil 3 (715 jiwa), disusul Desil 2 (146 jiwa) dan Desil 1 (92 jiwa). Tidak terdapat penduduk miskin pada Desil 4, yang menunjukkan bahwa kelompok masyarakat menengah ke atas di desa ini relatif tidak termasuk dalam kategori miskin. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa tantangan utama Desa Umauta adalah mendorong perbaikan kesejahteraan bagi kelompok besar yang masih berada pada

Desil 3. Meskipun kelompok sangat miskin (Desil 1) jumlahnya lebih sedikit, namun tetap membutuhkan perhatian khusus dalam bentuk program bantuan sosial. Sementara itu, kelompok Desil 3 perlu diarahkan pada upaya pemberdayaan ekonomi, peningkatan keterampilan, serta akses yang lebih luas terhadap lapangan pekerjaan dan potensi lokal.

Dengan demikian, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa permasalahan kemiskinan di Desa Umauta masih menjadi isu strategis yang harus ditangani secara terpadu, sejalan dengan kebutuhan penguatan layanan kesehatan, penanganan stunting, serta perhatian terhadap kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. Hal ini penting untuk mewujudkan pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan.

3.1.4.2 Desa Wairbleler

Desa Wairbleler merupakan salah satu desa yang berada di wilayah administratif Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Desa ini terletak di pesisir pantai utara Pulau Flores dan dikenal sebagai salah satu desa nelayan dengan aktivitas ekonomi utama masyarakatnya bertumpu pada sektor perikanan tangkap, budidaya laut, serta perdagangan hasil laut. Lokasi Desa Wairbleler yang berada di jalur pesisir menjadikannya memiliki potensi strategis baik dari segi ekonomi perikanan maupun pengembangan pariwisata bahari.

Dari sisi demografi, masyarakat Desa Wairbleler terdiri dari beberapa kelompok etnis dengan dominasi masyarakat lokal Flores. Sebagian besar penduduk bekerja sebagai nelayan, petani lahan kering, serta pelaku usaha kecil di bidang perdagangan ikan. Kehidupan sosial masyarakat masih kental dengan nilai-nilai tradisional dan kebersamaan komunitas, termasuk praktik budaya yang terkait dengan laut sebagai bagian dari identitas masyarakat pesisir. Berdasarkan data kependudukan terbaru, jumlah penduduk di Desa Wairbleler dapat dilihat pada tabel berikut:

Table 93. Jumlah Penduduk Desa Wairbleler, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka

Kecamatan	Desa	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Waigete	Wairbleler	1.744	1.820	3.564

Sumber: Data Kecamatan Waigete, 2025

Berdasarkan data di atas, jumlah penduduk Desa Wairbleler tercatat sebanyak 3.564 jiwa. Dari total tersebut, penduduk laki-laki berjumlah 1.744 orang, sedangkan penduduk perempuan sebanyak 1.820 orang. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah perempuan sedikit lebih banyak dibandingkan jumlah laki-laki, dengan selisih 76 jiwa.

Kondisi kependudukan di atas memberikan gambaran bahwa Desa Wairbleler memiliki struktur penduduk yang relatif seimbang antara laki-laki dan perempuan. Rasio jenis kelamin (sex ratio) yaitu perbandingan antara jumlah laki-laki dan perempuan berada pada angka sekitar 95,8 (artinya terdapat ±96 laki-laki untuk setiap 100 perempuan).

Keseimbangan jumlah penduduk ini dapat menjadi potensi dalam pembangunan desa, karena tenaga kerja tersedia hampir merata antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki umumnya mendominasi sektor pekerjaan berat seperti perikanan tangkap, pertanian, atau pekerjaan konstruksi, sementara perempuan berperan penting dalam aktivitas perdagangan ikan, pengelolaan rumah tangga, serta peran sosial di masyarakat.

Selain itu, jumlah total penduduk yang mencapai lebih dari 3.500 jiwa menandakan bahwa Desa Wairbleler termasuk desa dengan populasi cukup besar di Kecamatan Waigete. Hal ini berdampak pada kebutuhan pelayanan publik, baik di bidang pendidikan, kesehatan, maupun infrastruktur dasar, yang harus mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Dengan demikian, secara umum struktur kependudukan Desa Wairbleler menunjukkan keseimbangan gender yang baik, dengan dominasi kecil pada jumlah penduduk perempuan. Kondisi ini dapat menjadi modal sosial dan ekonomi dalam pembangunan desa, terutama bila didukung dengan kebijakan yang mendorong keterlibatan aktif laki-laki maupun perempuan dalam berbagai bidang pembangunan.

Setelah melihat kondisi kependudukan Desa Wairbleler yang memiliki jumlah penduduk relatif besar yaitu 3.564 jiwa dengan komposisi laki-laki 1.744 orang dan perempuan 1.820 orang, penting juga ditinjau ketersediaan fasilitas pendidikan yang ada di desa ini. Fasilitas pendidikan merupakan salah satu aspek dasar dalam pembangunan sumber daya manusia. Data fasilitas pendidikan di Desa Wairbleler dapat dilihat pada tabel berikut:

Table 94. Fasilitas Pendidikan di Desa Wairbleler, Kecamatan Waigete

No	Jenis Fasilitas Pendidikan	Jumlah
1	Taman Kanak-kanak (TK)	2
2	Sekolah Dasar (SD)	3
3	Madrasah Ibtidaiyah (MI)	0
4	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	0
5	Madrasah Tsanawiyah (MTs)	0
6	Sekolah Menengah Atas (SMA)	0
7	Madrasah Aliyah (MA)	0
8	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	0
9	Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB)	0
10	Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB)	0
11	Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB)	0
12	Perguruan Tinggi	0
13	Pondok Pesantren	0

Sumber: Data Kecamatan Waigete, 2025

Berdasarkan tabel di atas, Desa Wairbleler memiliki 2 unit Taman Kanak-kanak (TK) dan 3 unit Sekolah Dasar (SD) sebagai sarana pendidikan formal. Namun, pada jenjang pendidikan selanjutnya seperti SMP, SMA, SMK maupun lembaga pendidikan keagamaan (MI, MTs, MA, dan pesantren) belum tersedia. Demikian pula, fasilitas pendidikan khusus (sekolah luar biasa) maupun pendidikan tinggi juga belum ada di desa ini.

Kondisi ini menunjukkan bahwa akses pendidikan di Desa Wairbleler hanya tersedia pada jenjang dasar, yaitu TK dan SD. Anak-anak yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah (SMP atau SMA) harus bersekolah di desa lain atau pusat kecamatan. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat, terutama dalam hal biaya, jarak tempuh, dan ketersediaan sarana transportasi. Di sisi lain, keberadaan 2 TK dan 3 SD di dalam desa merupakan potensi positif karena memastikan akses pendidikan usia dini dan dasar dapat dijangkau oleh seluruh anak di Wairbleler. Dengan jumlah penduduk yang relatif besar (lebih dari 3.500 jiwa), ketersediaan sekolah dasar yang cukup memadai menjadi landasan awal dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia desa.

Namun demikian, tidak tersedianya sekolah lanjutan di desa ini berpotensi meningkatkan angka putus sekolah, terutama bagi keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Oleh karena itu, upaya pembangunan pendidikan di Wairbleler ke depan perlu diarahkan pada penguatan akses

pendidikan menengah dan fasilitas pendukungnya, agar masyarakat dapat melanjutkan pendidikan secara berkelanjutan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendidikan dasar di Desa Wairbleler relatif sudah terpenuhi, tetapi akses pendidikan menengah ke atas masih menjadi tantangan besar. Hal ini harus menjadi perhatian penting, mengingat pendidikan yang berkesinambungan merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Setelah membahas mengenai jumlah penduduk serta ketersediaan fasilitas pendidikan di Desa Wairbleler, aspek lain yang tidak kalah penting adalah fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat, karena berhubungan langsung dengan kualitas hidup dan kemampuan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan dasar. Adapun data mengenai fasilitas kesehatan di Desa Wairbleler dapat dilihat pada tabel berikut:

Table 95. Fasilitas Kesehatan di Desa Wairbleler, Kecamatan Waigete

No	Jenis Fasilitas Kesehatan	Jumlah
1	Rumah Sakit	0
2	Rumah Sakit Bersalin	0
3	Puskesmas Rawat Inap	0
4	Puskesmas Tanpa Rawat Inap	0
5	Pustu (Puskesmas Pembantu)	1
6	Poskesdes	0
7	Posyandu	5
8	Polindes (Pondok Bersalin Desa)	1
9	Poliklinik	0

Sumber: Data Kecamatan Waigete, 2025

Berdasarkan tabel di atas, Desa Wairbleler tidak memiliki rumah sakit maupun puskesmas sebagai fasilitas kesehatan utama. Namun, terdapat 1 unit Puskesmas Pembantu (Pustu) yang menjadi pusat pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat. Selain itu, tersedia pula 5 unit Posyandu yang berfungsi memberikan layanan kesehatan ibu dan anak serta pemantauan gizi, serta 1 unit Polindes yang dapat mendukung layanan persalinan sederhana di tingkat desa.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan di Wairbleler lebih banyak bertumpu pada fasilitas kesehatan tingkat dasar. Meskipun keberadaan Posyandu cukup memadai untuk melayani masyarakat, namun ketiadaan puskesmas maupun rumah sakit di dalam desa membuat

masyarakat harus mengakses pelayanan kesehatan lanjutan di luar desa, bahkan ke pusat kecamatan atau kabupaten.

Jika dikaitkan dengan jumlah penduduk Desa Wairbleler yang mencapai 3.564 jiwa, jumlah fasilitas kesehatan yang ada masih terbatas. Hal ini berpotensi menimbulkan kendala dalam penanganan kasus-kasus kesehatan yang membutuhkan tindakan medis lebih lanjut. Dengan demikian, penguatan pelayanan kesehatan melalui peningkatan kapasitas Pustu, pengembangan fasilitas kesehatan desa, serta penguatan peran tenaga kesehatan menjadi kebutuhan mendesak di Wairbleler.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa Wairbleler sudah memiliki layanan kesehatan dasar melalui Pustu, Posyandu, dan Polindes, tetapi masih sangat terbatas untuk pelayanan kesehatan tingkat lanjut. Kondisi ini perlu menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan desa, mengingat kesehatan masyarakat merupakan salah satu pilar penting pembangunan manusia.

Setelah membahas kondisi penduduk, pendidikan, serta fasilitas kesehatan di Desa Wairbleler, penting pula melihat aspek kerentanan sosial, khususnya terkait keberadaan penyandang disabilitas. Data ini memberi gambaran mengenai kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus dalam pelayanan sosial, pendidikan, maupun kesehatan. Berikut data penyandang disabilitas di Desa Wairbleler:

Table 96. Jumlah Penyandang Disabilitas di Desa Wairbleler, Kecamatan Waigete

No	Jenis Disabilitas	Jumlah
1	Tuna Netra (Buta)	0
2	Tuna Rungu (Tuli)	6
3	Tuna Wicara (Bisu)	0
4	Tuli-Bisu	0
5	Tuna Daksa	3
6	Tuna Grahita	3
7	Tuna Laras	1
8	Tuna Eks-Sakit Kusta	0
9	Tuna Ganda	0
10	Jumlah	13

Sumber: Data Kecamatan Waigete, 2025

Berdasarkan tabel di atas, jumlah penyandang disabilitas di Desa Wairbleler tercatat sebanyak 13 orang. Kelompok terbesar adalah penyandang tuna rungu (6 orang), disusul oleh tuna daksa (3 orang), tuna

grahita (3 orang), dan tuna laras (1 orang). Sementara itu, kategori lainnya seperti tuna netra, tuna wicara, tuli-bisu, eks-sakit kusta, maupun tuna ganda tidak tercatat pada desa ini.

Jika dikaitkan dengan jumlah penduduk Desa Wairbleler yang mencapai 3.564 jiwa, maka persentase penyandang disabilitas relatif kecil. Namun, secara sosial keberadaan kelompok ini tetap signifikan dan perlu perhatian khusus, terutama dalam hal akses pendidikan (mengingat sekolah luar biasa tidak tersedia di desa ini), serta pelayanan kesehatan yang masih terbatas pada fasilitas dasar (Pustu, Posyandu, dan Polindes). Dengan demikian, penyandang disabilitas di Desa Wairbleler menghadapi tantangan ganda: keterbatasan akses pendidikan khusus dan keterbatasan sarana kesehatan tingkat lanjut. Hal ini menegaskan pentingnya dukungan sosial, pemberdayaan, dan kebijakan inklusif agar kelompok ini dapat memperoleh hak dan kesempatan yang sama dalam pembangunan desa.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa penyandang disabilitas di Desa Wairbleler meskipun jumlahnya tidak banyak, namun keberadaannya harus menjadi perhatian serius dalam perencanaan pembangunan, terutama terkait pendidikan inklusif dan pelayanan kesehatan yang memadai.

Setelah melihat kondisi penduduk, pendidikan, fasilitas kesehatan, serta jumlah penyandang disabilitas di Desa Wairbleler, aspek lain yang tidak kalah penting adalah status gizi anak, khususnya terkait kasus stunting. Stunting menjadi salah satu indikator penting dalam pembangunan kesehatan masyarakat karena berhubungan langsung dengan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Data stunting di Desa Wairbleler dapat dilihat pada tabel berikut:

Table 97. Data Stunting di Desa Wairbleler, Kecamatan Waigete

No	Uraian	Jumlah
1	Sasaran	248
2	Datang	248
3	Sangat Pendek	0
4	Pendek	7
5	Normal	241
6	Tinggi	0
	Jumlah Kasus Stunting	**7**
	Persentase (%)	**2.8**

Sumber: Data Kecamatan Waigete, 2025

Berdasarkan tabel di atas, dari 248 balita sasaran yang diukur seluruhnya hadir (100%), ditemukan 7 balita mengalami kondisi pendek (stunting) atau sebesar 2,8% dari total sasaran. Sementara itu, sebagian besar balita berada pada kategori normal (241 anak atau 97,2%), dan tidak ditemukan kasus sangat pendek maupun tinggi. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Desa Wairbleler yang mencapai 3.564 jiwa, angka stunting 2,8% dapat dikatakan relatif rendah. Namun, meskipun persentasenya kecil, kasus stunting ini tetap harus menjadi perhatian serius karena dapat berdampak pada tumbuh kembang anak dalam jangka panjang.

Keterbatasan fasilitas kesehatan di desa, yang hanya memiliki 1 Pustu, 5 Posyandu, dan 1 Polindes, menunjukkan bahwa penanganan stunting sangat bergantung pada layanan dasar yang tersedia. Oleh karena itu, keberadaan Posyandu menjadi kunci penting dalam upaya pencegahan stunting melalui program pemantauan pertumbuhan, pemberian makanan tambahan, serta edukasi gizi bagi ibu dan keluarga.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa angka stunting di Desa Wairbleler tergolong rendah, namun upaya pencegahan dan intervensi harus terus diperkuat. Hal ini penting untuk menjaga kualitas kesehatan anak-anak sebagai generasi penerus desa, sekaligus mendukung pembangunan sumber daya manusia yang lebih baik.

Di bidang pendidikan dan kesehatan, Desa Wairbleler menghadapi sejumlah tantangan. Akses terhadap layanan pendidikan sudah tersedia hingga tingkat sekolah dasar, sementara untuk jenjang pendidikan menengah masyarakat umumnya harus mengakses sekolah di desa atau kecamatan terdekat. Dari sisi kesehatan, layanan dasar tersedia melalui

posyandu dan poskesdes, namun untuk kebutuhan pelayanan kesehatan yang lebih lengkap, masyarakat biasanya dirujuk ke puskesmas di kecamatan atau ke rumah sakit di Maumere sebagai ibu kota Kabupaten Sikka.

Potensi utama desa ini terletak pada sumber daya kelautan dan perikanan. Wairbleler dikenal sebagai salah satu pusat aktivitas nelayan tradisional di Kabupaten Sikka, dengan hasil tangkapan laut yang cukup melimpah. Selain itu, kawasan pesisirnya memiliki panorama laut yang indah dan berpotensi dikembangkan sebagai destinasi wisata bahari. Namun demikian, tantangan yang dihadapi antara lain masih tingginya angka kemiskinan, keterbatasan sarana prasarana dasar, serta kerentanan terhadap masalah lingkungan seperti abrasi pantai dan pencemaran laut.

Sebagai penutup dari gambaran umum Desa Wairbleler, perlu ditinjau kondisi kemiskinan yang menjadi salah satu persoalan mendasar masyarakat.

Table 98. Data Kemiskinan Menurut Desil di Desa Wairbleler, Kecamatan Waigete

No	Keterangan	Jumlah
1	Desil 1 (sangat miskin)	7
2	Desil 2 (miskin sedang)	44
3	Desil 3 (miskin menengah ke bawah)	1.479
4	Desil 4	4
	Total Penduduk Miskin	**1.534**
	Persentase Penduduk Miskin	**44%**

Sumber: Data Kemiskinan Kabupaten Sikka (2024)

Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah penduduk miskin di Desa Wairbleler mencapai 1.534 jiwa, atau sekitar 44 persen dari total penduduk (3.564 jiwa). Mayoritas berada pada Desil 3 dengan jumlah 1.479 orang, yang menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk miskin tergolong pada kelompok menengah ke bawah. Sementara itu, hanya terdapat 7 orang pada Desil 1 (kategori sangat miskin) dan 44 orang pada Desil 2, sedangkan Desil 4 tercatat 4 orang.

Distribusi ini memperlihatkan bahwa kemiskinan di Wairbleler bukan hanya menyentuh lapisan masyarakat paling miskin, tetapi juga meluas pada kelompok rentan yang jumlahnya besar. Keterbatasan akses pendidikan menengah, fasilitas kesehatan yang masih sederhana, serta

kondisi sosial-ekonomi yang belum stabil menjadi faktor yang berpotensi memperkuat siklus kemiskinan. Meskipun angka stunting relatif rendah dan fasilitas pendidikan dasar tersedia, tantangan terbesar tetap terletak pada bagaimana meningkatkan daya dukung ekonomi rumah tangga agar keluar dari kemiskinan struktural.

Dengan demikian, gambaran umum Desa Wairbleler menunjukkan adanya potensi sekaligus tantangan besar. Desa ini telah memiliki pondasi dasar melalui pendidikan dan kesehatan dasar, namun tingginya angka kemiskinan menuntut adanya langkah nyata berupa pemberdayaan ekonomi, peningkatan akses pendidikan menengah, penguatan layanan kesehatan, serta kebijakan inklusif bagi kelompok rentan. Arah pembangunan desa ke depan harus mampu menjawab tantangan tersebut agar Wairbleler dapat berkembang menjadi desa yang lebih sejahtera dan berdaya saing.

3.1.5 Rasionalisasi pemilihan lokasi berdasarkan kategori desil kemiskinan

3.1.5.1 Analisis Penentuan Lokasi Penelitian Berdasarkan Pertimbangan Akademis Tipologi Lokasi Penelitian

Kabupaten Sikka, terletak di wilayah pesisir timur Nusa Tenggara Timur, menghadapi tantangan kemiskinan yang kompleks dan beragam. Dengan berbagai faktor yang memengaruhi kesejahteraan penduduk, seperti geografi, ekonomi, budaya, dan akses terhadap layanan dasar, pemetaan kemiskinan di Kabupaten Sikka memerlukan pendekatan yang tepat untuk dapat memberikan gambaran yang komprehensif. Salah satu metode yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kemiskinan adalah dengan memanfaatkan data desil, yang membagi populasi ke dalam sepuluh kelompok berdasarkan tingkat kesejahteraan mereka. Dalam konteks penelitian ini, Desil 1 hingga Desil 4 dipilih sebagai fokus utama untuk mengeksplorasi kemiskinan ekstrem, multidimensi, dan relatif, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi pemicu ketidaksetaraan sosial-ekonomi di Kabupaten Sikka.

Penentuan lokasi penelitian didasarkan pada diversitas tipologi kemiskinan yang ada di Kabupaten Sikka, yang mencakup wilayah pesisir, pedalaman, dan semi-urban. Setiap lokasi yang dipilih mewakili kelompok-kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi yang berbeda-beda, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai

faktor-faktor yang memengaruhi kemiskinan di daerah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan mendesak di masing-masing wilayah dan merumuskan intervensi kebijakan yang tepat sasaran.

A. Desil 1: Kemiskinan Ekstrem

Kelurahan Wuring yang terletak di pesisir Teluk Maumere merupakan salah satu wilayah yang memiliki karakteristik kemiskinan ekstrem. Dengan lebih dari 1.700 jiwa penduduknya yang termasuk dalam Desil 1, Kelurahan Wuring menghadapi tantangan besar dalam hal akses terhadap layanan dasar, pendidikan, dan kesehatan. Wuring didominasi oleh masyarakat nelayan dengan ketergantungan tinggi pada hasil tangkapan ikan, yang sangat bergantung pada musim dan fluktuasi harga ikan di pasar. Selain itu, akses terhadap air bersih dan sanitasi sangat terbatas, memperburuk kualitas hidup masyarakat setempat. Berdasarkan data kemiskinan, hampir seluruh penduduk miskin di Wuring berada pada Desil 1, menandakan bahwa hampir semua rumah tangga hidup dalam kemiskinan ekstrem. Oleh karena itu, Kelurahan Wuring dipilih sebagai lokasi penelitian untuk menggali lebih dalam penyebab kemiskinan ekstrem yang terjadi di wilayah pesisir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat di Wuring terperangkap dalam kemiskinan, terutama dalam hal ketergantungan pada sumber daya alam yang rentan terhadap perubahan cuaca dan fluktuasi pasar.

Desa Rubit, yang terletak di pedalaman Kabupaten Sikka, juga dipilih sebagai lokasi penelitian dengan fokus pada kemiskinan ekstrem. Masyarakat Desa Rubit sebagian besar berprofesi sebagai petani kecil dengan ketergantungan yang tinggi pada bantuan sosial dan utang. Desa ini menghadapi tantangan dalam hal infrastruktur, dengan jalan yang sulit dijangkau dan keterbatasan akses air bersih. Budaya adat dan perayaan besar yang masih kuat, seringkali memengaruhi pengeluaran rumah tangga, yang pada akhirnya memperburuk kemiskinan di desa ini. Dengan lebih dari 350 jiwa penduduknya yang termasuk dalam Desil 1, penelitian di Desa Rubit bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memperburuk kemiskinan struktural di daerah pedalaman, serta menganalisis bagaimana kebijakan pengentasan kemiskinan dapat diimplementasikan dengan memperhatikan budaya dan kondisi ekonomi lokal.

Desa Nangahale di Kecamatan Talibura juga menjadi lokasi penelitian dengan fokus pada kemiskinan ekstrem. Masyarakat di Desa Nangahale sangat bergantung pada koperasi mingguan dan memiliki masalah hutang yang tinggi. Sebagian besar rumah tangga di desa ini berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar karena ketergantungan pada sektor nelayan dan pertanian yang tidak stabil. Desa ini memiliki populasi yang lebih kecil, tetapi jumlah penduduk yang mengalami kemiskinan ekstrem tetap signifikan. Penelitian ini akan mengeksplorasi hubungan antara ekonomi berbasis perikanan dan pertanian dengan tingkat kemiskinan, serta mengidentifikasi langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengurangi ketergantungan pada pinjaman informal yang berbunga tinggi.

B. Desil 2: Kemiskinan Multidimensi Tinggi

Kelurahan Wolomarang mewakili kemiskinan multidimensi tinggi di pesisir Kabupaten Sikka. Meskipun penduduk di kelurahan ini tidak berada dalam kategori miskin ekstrem, mereka masih menghadapi tantangan serius, seperti stunting, lingkungan kumuh, dan ketergantungan pada koperasi harian yang memiliki bunga tinggi. Buruh nelayan dan papalele yang bekerja di sektor informal sering kali menghadapi masalah akses terhadap pendidikan dan kesehatan, yang semakin memperburuk kemiskinan mereka. Penelitian di Kelurahan Wolomarang akan fokus pada aspek multidimensi kemiskinan, terutama dalam hal kesehatan, pendidikan, dan akses terhadap layanan dasar, dengan tujuan untuk menganalisis bagaimana ketergantungan pada sektor informal dan koperasi dapat berkontribusi pada kemiskinan jangka panjang.

Desa Tanarawa yang terletak di pedalaman juga mengalami kemiskinan multidimensi tinggi. Masyarakat di sini mayoritas bekerja sebagai petani subsisten, dengan penghasilan yang sangat bergantung pada hasil pertanian dan musim. Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi penyokong utama pendapatan rumah tangga, namun ketergantungan pada bantuan sosial ini seringkali menyebabkan anak-anak putus sekolah dan terhambatnya pembangunan ekonomi keluarga. Penelitian di Desa Tanarawa bertujuan untuk menganalisis dampak kemiskinan multidimensi yang mencakup ketergantungan pada bantuan sosial, serta menganalisis bagaimana program sosial dapat dioptimalkan untuk membantu keluarga keluar dari kemiskinan.

C. Desil 3: Kemiskinan Relatif

Kelurahan Madawat merupakan lokasi penelitian yang mewakili kemiskinan relatif di kawasan semi-urban Kabupaten Sikka. Masyarakat di kelurahan ini sebagian besar bekerja di sektor jasa informal, dengan pendapatan yang lebih stabil dibandingkan dengan masyarakat di daerah pesisir atau pedalaman. Namun, biaya hidup yang tinggi di kawasan semi-urban ini menyebabkan banyak keluarga kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, meskipun mereka tidak termasuk dalam kategori miskin ekstrem. Penelitian di Kelurahan Madawat akan menggali lebih dalam tantangan yang dihadapi masyarakat yang hidup dengan pendapatan yang relatif lebih baik, namun tetap kesulitan memenuhi kebutuhan hidup mereka karena faktor biaya hidup yang tinggi di kawasan semi-urban.

D. Desil 4: Kemiskinan Menurun/Potensial Berdaya

Desa Umauta yang terletak di pedalaman dengan basis pertanian tadah hujan menjadi lokasi penelitian yang mewakili kemiskinan menurun. Meskipun desa ini menghadapi masalah besar dalam hal akses air bersih dan perumahan darurat, potensi ekonomi pertanian di desa ini masih memiliki peluang besar untuk berkembang. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana sektor pertanian dapat dikelola secara berkelanjutan dan bagaimana akses terhadap air bersih dapat diperbaiki untuk mendukung kemajuan desa ini.

Desa Wairbleler yang menggabungkan petani kecil dan nelayan mulai berkembang dengan adanya UMKM lokal. Desa ini menunjukkan potensi besar untuk keluar dari ketergantungan pada bantuan sosial berkat adanya usaha mikro yang berkembang. Penelitian ini akan fokus pada bagaimana pengembangan ekonomi lokal dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial, dengan memberikan contoh bagaimana UMKM lokal dapat berfungsi sebagai kunci untuk keluar dari kemiskinan.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kemiskinan di Kabupaten Sikka, dengan fokus pada wilayah pesisir, pedalaman, dan semi-urban. Pemilihan lokasi penelitian yang mewakili Desil 1 hingga Desil 4 di berbagai tipologi wilayah ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi kemiskinan, serta solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah tersebut di setiap wilayah.

Dengan pendekatan yang berbasis pada kondisi lokal dan potensi yang ada, penelitian ini berpotensi memberikan kontribusi penting dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Sikka.

3.1.5.2 Analisis Penentuan Lokasi Penelitian Berdasarkan Efektivitas Program Pemerintah di Setiap Strata Kemiskinan di Kabupaten Sikka

Kabupaten Sikka di Nusa Tenggara Timur menghadapi tantangan besar dalam mengatasi kemiskinan, dengan tingkat kemiskinan yang beragam antara daerah pesisir, pedalaman, dan semi-urban. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai program sosial untuk mengurangi kemiskinan, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP), yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari berbagai strata kemiskinan. Dalam konteks ini, pemetaan efektivitas program pemerintah di tiap strata kemiskinan sangat penting untuk mengevaluasi dampak yang ditimbulkan dan memastikan bahwa bantuan sosial dan intervensi pembangunan tepat sasaran.

Untuk tujuan ini, delapan lokasi penelitian di Kabupaten Sikka dipilih, masing-masing mewakili tingkat kemiskinan yang berbeda, dari kemiskinan ekstrem di Desil 1 hingga kemiskinan yang hampir mandiri di Desil 4. Pemilihan lokasi-lokasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi seberapa efektif program-program pemerintah dalam mengatasi kemiskinan di berbagai strata dan untuk mengembangkan rekomendasi kebijakan yang dapat memperbaiki pencapaian program di setiap tingkat kemiskinan.

Pemilihan Lokasi Penelitian Berdasarkan Efektivitas Program Pemerintah

Penelitian ini mengfokuskan pada wilayah dengan berbagai tipologi kemiskinan, yakni pesisir, pedalaman, dan semi-urban, yang merepresentasikan beragam tantangan yang dihadapi masyarakat Sikka dalam memperoleh akses terhadap program pemerintah. Dengan memetakan efektivitas program pemerintah pada delapan lokasi yang berbeda, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana program-program tersebut dapat mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di setiap tingkat strata kemiskinan.

A) Desil 1: Kemiskinan Ekstrem

Kelurahan Wuring merupakan salah satu kelurahan yang terletak di pesisir Kabupaten Sikka dan mengalami kemiskinan ekstrem. Sebagian besar penduduk di Kelurahan Wuring bekerja sebagai buruh nelayan atau di sektor informal, dengan pendapatan yang sangat bergantung pada hasil tangkapan laut. Pada tahun 2024, 1.744 jiwa di Kelurahan Wuring tercatat dalam Desil 1, yang menggambarkan tingkat kemiskinan yang sangat tinggi. Meskipun program bantuan sosial seperti BLT dan PKH telah diperkenalkan di wilayah ini, akses terhadap layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan air bersih, masih sangat terbatas.

Alasan pemilihan Kelurahan Wuring sebagai lokasi penelitian adalah untuk mengevaluasi efektivitas program pemerintah dalam mengatasi kemiskinan ekstrem di kawasan pesisir. Kelurahan ini menghadapi tantangan besar dalam hal ketergantungan pada sumber daya alam yang rentan terhadap perubahan cuaca dan ketidakstabilan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah program bantuan sosial yang ada dapat secara signifikan mengurangi tingkat kemiskinan di Wuring, atau apakah intervensi tambahan diperlukan untuk memastikan keberlanjutan kesejahteraan masyarakat di daerah pesisir.

Desa Rubit yang terletak di pedalaman Kabupaten Sikka juga mengalami kemiskinan ekstrem, dengan sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani kecil. Desa ini tercatat memiliki Desil 1 yang signifikan, yaitu 353 jiwa. Desa Rubit, meskipun kaya akan potensi alam, seperti kopi dan cokelat, menghadapi tantangan dalam hal infrastruktur dan akses ke layanan dasar. Masyarakat di sini sangat bergantung pada bantuan sosial dan sering terperangkap dalam utang. Pemilihan Desa Rubit bertujuan untuk menilai seberapa efektif bantuan sosial yang diterima oleh penduduk, serta untuk mengidentifikasi apakah program-program pemberdayaan ekonomi seperti pelatihan keterampilan dan dukungan usaha mikro kecil dapat membantu masyarakat keluar dari kemiskinan ekstrem.

Desa Nangahale di Kecamatan Talibura juga dipilih sebagai lokasi penelitian dengan fokus pada kemiskinan ekstrem. Desa ini memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi pada koperasi mingguan dan pinjaman informal, serta hampir seluruh rumah tangga memiliki hutang. Pemilihan Desa Nangahale bertujuan untuk mengkaji dampak program pemerintah, terutama dalam hal bantuan mikro, yang diberikan untuk membantu

masyarakat meningkatkan pendapatan mereka. Penelitian ini akan mengevaluasi apakah intervensi seperti pendampingan usaha kecil dan pemberian bantuan produktif dapat mengurangi ketergantungan pada pinjaman berbunga tinggi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

B) Desil 2: Kemiskinan Multidimensi Tinggi

Kelurahan Wolomarang merupakan wilayah pesisir yang dihuni oleh buruh nelayan dan papalele. Di sini, meskipun penduduknya tidak tergolong miskin ekstrem, kemiskinan multidimensi tinggi tetap menjadi masalah besar. Tercatat bahwa stunting, lingkungan kumuh, dan ketergantungan pada koperasi harian yang berbunga tinggi menghambat upaya masyarakat untuk keluar dari kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana program bantuan kesehatan dan pendidikan, seperti Posyandu dan PKH, dapat membantu meningkatkan status gizi dan akses pendidikan bagi anak-anak di Wolomarang.

Desa Tanarawa juga termasuk dalam kategori kemiskinan multidimensi tinggi. Di desa ini, banyak keluarga yang mengandalkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Namun, masalah besar muncul ketika anak-anak putus sekolah dan terhambatnya pembangunan ekonomi keluarga akibat ketergantungan pada bantuan sosial. Penelitian di Desa Tanarawa akan fokus pada efektivitas program pemerintah dalam memperbaiki akses pendidikan dan membantu keluarga petani subsisten untuk meningkatkan pendapatan mereka melalui pendidikan keterampilan dan akses pasar.

C) Desil 3: Kemiskinan Relatif

Kelurahan Madawat mewakili kemiskinan relatif di wilayah semi-urban Kabupaten Sikka. Penduduk di Kelurahan Madawat sebagian besar bekerja di sektor jasa informal, dengan pendapatan yang lebih stabil dibandingkan dengan wilayah pesisir atau pedalaman. Namun, biaya hidup yang tinggi dan tingginya harga kebutuhan dasar membuat mereka kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pemilihan Kelurahan Madawat bertujuan untuk mengkaji efektivitas program pemerintah dalam mengurangi kemiskinan relatif, terutama dalam hal akses pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kesejahteraan sosial di kawasan yang lebih urban.

D) Desil 4: Kemiskinan Menurun/Potensial Berdaya

Desa Umauta yang berada di wilayah pedalaman dengan basis pertanian tadah hujan dipilih karena memiliki kemiskinan menurun.

Meskipun desa ini menghadapi masalah besar dalam akses air bersih dan perumahan darurat, ada potensi besar untuk berkembang melalui pengelolaan sektor pertanian yang lebih berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah program pemberdayaan ekonomi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketergantungan mereka pada bantuan sosial.

Desa Wairbleler, yang menggabungkan sektor pertanian dan perikanan, memiliki potensi besar untuk keluar dari kemiskinan berkat adanya UMKM lokal yang berkembang. Pemilihan Desa Wairbleler bertujuan untuk mengkaji efektivitas program pemerintah dalam mengembangkan UMKM dan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Penelitian ini juga akan melihat seberapa besar peluang desa ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program pemberdayaan ekonomi berbasis lokal.

Delapan lokasi penelitian yang dipilih di Kabupaten Sikka ini mencakup berbagai strata kemiskinan, mulai dari kemiskinan ekstrem di Desil 1 hingga kemiskinan menurun di Desil 4. Pemilihan lokasi-lokasi ini bertujuan untuk memetakan efektivitas program pemerintah dalam mengurangi kemiskinan di setiap strata, mulai dari yang paling rentan hingga yang hampir mandiri. Dengan mengevaluasi program-program bantuan sosial seperti PKH, BLT, dan pendampingan usaha mikro, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sikka.

3.1.5.3 Analisis Penentuan Lokasi Penelitian Berdasarkan Pendekatan Komparatif dalam Menilai Faktor Kemiskinan Antar Desil di Kabupaten Sikka

Kabupaten Sikka di Nusa Tenggara Timur menghadapi tantangan besar terkait kemiskinan, yang sangat beragam antara kawasan pesisir, pedalaman, dan semi-urban. Untuk mengatasi masalah ini, berbagai program pemerintah telah diterapkan, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan berbagai intervensi lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka mengevaluasi efektivitas program-program pemerintah ini, penting untuk melakukan analisis yang komprehensif terhadap faktor-faktor

kemiskinan di wilayah yang berbeda. Penelitian ini mengusung pendekatan komparatif, dengan tujuan untuk menganalisis perbedaan dan kesamaan faktor kemiskinan yang ada di setiap Desil di Kabupaten Sikka. Dengan membandingkan kemiskinan antara berbagai wilayah yang terhimpun dalam Desil 1 hingga Desil 4, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana faktor kemiskinan mempengaruhi kehidupan masyarakat dan seberapa efektif kebijakan yang diterapkan dalam mengurangi kemiskinan di berbagai strata.

Penelitian ini memilih delapan lokasi penelitian yang tersebar di Kabupaten Sikka, masing-masing mewakili strata kemiskinan yang berbeda. Lokasi-lokasi ini dipilih berdasarkan kriteria Desil 1 hingga Desil 4, yang mewakili masyarakat dengan tingkat kemiskinan ekstrem, multidimensi tinggi, relatif, hingga kemiskinan menurun. Tujuan utama dari pemilihan lokasi ini adalah untuk memungkinkan analisis cross-case antara wilayah-wilayah yang memiliki perbedaan karakteristik kemiskinan, seperti faktor ekonomi, sosial, pendidikan, dan kesehatan.

A. Desil 1: Kemiskinan Ekstrem

Di wilayah Desil 1, masyarakat umumnya hidup dalam kemiskinan ekstrem dengan akses terbatas terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar. Desa-desa yang termasuk dalam desil ini, seperti Kelurahan Wuring, Desa Rubit, dan Desa Nangahale, menunjukkan ketergantungan tinggi pada sektor informal atau pertanian subsisten, yang menjadikan mereka sangat rentan terhadap fluktuasi ekonomi dan bencana alam. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan bagaimana program bantuan sosial dapat membantu masyarakat di wilayah kemiskinan ekstrem, serta apakah pendekatan berbasis lokal lebih efektif dalam mengatasi tantangan kemiskinan yang ada.

B. Desil 2: Kemiskinan Multidimensi Tinggi

Desil 2 mencakup wilayah dengan kemiskinan multidimensi tinggi, di mana meskipun masyarakat tidak terperangkap dalam kemiskinan ekstrem, mereka masih menghadapi kesulitan ekonomi yang dipengaruhi oleh kurangnya akses ke pendidikan berkualitas, stunting, dan keterbatasan infrastruktur. Lokasi-lokasi seperti Kelurahan Wolomarang dan Desa Tanarawa mewakili kelompok ini, dengan tantangan besar yang melibatkan akses layanan dasar dan kesejahteraan sosial. Penelitian akan menganalisis kesamaan dan perbedaan dalam hal pengaruh bantuan sosial

terhadap ketahanan ekonomi masyarakat di wilayah ini dibandingkan dengan wilayah Desil 1.

C. Desil 3: Kemiskinan Relatif

Masyarakat yang berada di Desil 3 menghadapi kemiskinan relatif, di mana mereka memiliki akses lebih baik terhadap layanan dasar dibandingkan dengan Desil 1 dan Desil 2, namun mereka masih kesulitan dalam memenuhi biaya hidup yang tinggi. Kelurahan Madawat, yang terletak di kawasan semi-urban, menggambarkan kondisi ini, di mana penduduk bekerja di sektor jasa informal dan memiliki penghasilan yang lebih stabil, namun tetap terhambat oleh tingginya biaya hidup di kawasan urban. Penelitian ini akan fokus pada bagaimana masyarakat di Desil 3 mengalami kesulitan yang disebabkan oleh biaya hidup tinggi, meskipun mereka tidak termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem. Perbandingan dengan Desil 1 dan 2 akan memberikan wawasan tentang bagaimana pendapatan relatif dan biaya hidup mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.

D. Desil 4: Kemiskinan Menurun/Potensial Berdaya

Masyarakat yang berada di Desil 4 tergolong dalam kemiskinan menurun, yang memiliki potensi besar untuk berdaya secara ekonomi. Wilayah ini termasuk Desa Umauta dan Desa Wairbleler, yang memiliki potensi pertanian dan usaha mikro lokal. Meskipun mereka masih menghadapi beberapa tantangan terkait akses air bersih, perumahan darurat, dan diversifikasi ekonomi, desa-desa ini menunjukkan tanda-tanda kemajuan. Penelitian ini akan mengevaluasi perbedaan transisi kemiskinan di Desil 4, mengingat banyak keluarga yang mulai keluar dari ketergantungan pada bantuan sosial dan mulai mengembangkan usaha mikro. Perbandingan dengan Desil 3 akan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana pemberdayaan ekonomi dan pengelolaan potensi lokal berperan dalam mengurangi kemiskinan.

Pendekatan komparatif yang diterapkan dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan dan kesamaan faktor kemiskinan antar desil yang ada di Kabupaten Sikka, mulai dari kemiskinan ekstrem hingga kemiskinan yang hampir mandiri. Dengan membandingkan lokasi-lokasi yang mewakili berbagai strata kemiskinan, penelitian ini memberikan gambaran tentang bagaimana program-program pemerintah dapat mengurangi kemiskinan di setiap strata dan bagaimana kebijakan yang

lebih tepat dapat ditetapkan untuk masing-masing wilayah. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang lebih terarah mengenai intervensi sosial-ekonomi yang lebih efektif untuk mengatasi kemiskinan di Kabupaten Sikka.

3.2 Temuan Kasus Tunggal Per Desil

3.2.1 Desil 1: Kemiskinan Ekstrem

3.2.1.1 Kelurahan Wuring

3.2.1.1.1 Faktor Ketergantungan Negatif pada Nelayan Buruh, Buruh Angkut, dan Jeratan Hutang

Kemiskinan ekstrem di Kelurahan Wuring secara nyata tercermin dari ketergantungan masyarakatnya pada sektor perikanan tradisional yang rapuh dan tidak memberikan kepastian hidup. Basis ekonomi rumah tangga hampir sepenuhnya ditopang oleh laut, baik melalui pekerjaan sebagai nelayan buruh maupun buruh angkut ikan di pelabuhan. Namun, pekerjaan-pekerjaan ini tidak berdiri di atas fondasi kemandirian ekonomi, melainkan terikat erat pada sistem patron–klien dengan juragan dan tengkulak yang menguasai modal, akses, serta distribusi pasar. Dengan kondisi seperti ini, masyarakat Wuring berada dalam posisi subordinat, sehingga produktivitas kerja mereka tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan yang diperoleh.

Dalam penelitian lapangan, terlihat jelas bahwa sebagian besar nelayan di Wuring tidak memiliki aset produksi. Kapal motor, jaring modern, atau peralatan tangkap yang lebih efisien hanya dimiliki oleh segelintir juragan. Sementara nelayan buruh bekerja dengan sistem bagi hasil, di mana seluruh biaya operasional mulai dari BBM, es balok, hingga jaring ditanggung juragan, tetapi hasil tangkapan dijual kembali dengan harga yang juga ditentukan juragan. Pola ini menempatkan nelayan buruh dalam situasi tanpa daya tawar: mereka bergantung penuh pada juragan untuk bisa melaut, namun tidak pernah menikmati keuntungan penuh dari hasil jerih payah mereka. Pada wawancara tanggal 12 Agustus 2025, Pak Ismail (47 tahun, nelayan buruh) menyampaikan: *“Kalau tidak pinjam ke juragan, kita tidak bisa melaut, semua biaya juragan yang kasih, tapi*

setelah ikan dapat, harganya juga juragan yang tentukan, jadi kita selalu rugi tapi tetap harus ikut." Testimoni ini memperlihatkan secara gamblang bagaimana sistem patron–klien mengekalkan kemiskinan di Wuring.

Ketergantungan ini tidak hanya dialami laki-laki sebagai nelayan buruh, tetapi juga perempuan yang bekerja di sektor informal perikanan. Perempuan di Wuring banyak yang berperan sebagai buruh angkut ikan di pelabuhan dengan upah rendah, rata-rata Rp30.000–Rp50.000 per hari. Pekerjaan ini menguras tenaga dan waktu, namun penghasilan yang diperoleh habis pada hari itu juga untuk membeli beras atau kebutuhan dapur lain. Tidak ada ruang untuk menabung, apalagi berinvestasi dalam pendidikan anak. Dalam wawancara 14 Agustus 2025, Ibu Nur (35 tahun, buruh angkut) menuturkan: *"Uang angkut habis langsung untuk beli beras, besoknya harus kerja lagi kalau mau makan."* Pernyataan ini menegaskan bahwa kerja perempuan miskin di Wuring bercorak subsisten, bekerja hanya untuk memenuhi kebutuhan harian tanpa ada akumulasi modal.

Selain itu, jeratan hutang menjadi salah satu faktor paling menonjol dalam mempertahankan sekaligus memperdalam kondisi kemiskinan di Wuring. Hutang mingguan kepada koperasi maupun rentenir lokal adalah strategi bertahan hidup yang paling mudah diakses, meskipun konsekuensinya sangat memberatkan. Pinjaman biasanya digunakan untuk membayar biaya sekolah anak, kebutuhan kesehatan, hingga pengeluaran adat yang dianggap tidak bisa ditunda. Bunga yang tinggi membuat hutang ini bersifat konsumtif dan jarang sekali produktif. Pada wawancara 15 Agustus 2025, Ibu Halimah (49 tahun, ibu rumah tangga) menyatakan: *"Kalau ada pesta atau anak sakit, kita pasti pinjam di koperasi meskipun bunganya tinggi, karena kalau tidak pinjam, hidup sehari-hari tidak bisa jalan."* Pernyataan ini menegaskan bahwa hutang telah menjadi bagian melekat dari kehidupan rumah tangga miskin di Wuring.

Lebih jauh lagi, substansi serupa juga diungkapkan oleh beberapa informan lain, termasuk seorang nelayan, seorang pemuda, dan seorang tokoh masyarakat. Ketiganya menegaskan bahwa hutang di Wuring bukan sekadar pilihan rasional, melainkan kewajiban sosial-ekonomi yang melembaga. Dalam wawancara gabungan tanggal 13–16 Agustus 2025, seorang pemuda menambahkan: *"Semua orang di sini pasti punya utang, kalau tidak ke koperasi ya ke juragan, kalau tidak ada utang berarti dia*

bukan orang Wuring." Gabungan pandangan ini memperlihatkan pola besar bahwa hutang telah menjadi identitas sosial sekaligus mekanisme survival yang justru memperdalam kemiskinan.

Analisis temuan ini dapat dibaca melalui kerangka livelihood vulnerability (Chambers & Conway, 1992), di mana sumber penghidupan masyarakat Wuring sangat rapuh karena bergantung pada faktor eksternal seperti cuaca, musim, dan harga ikan yang tidak dapat mereka kendalikan, serta faktor internal berupa ketiadaan aset produktif. Lebih jauh lagi, sistem patron–klien yang berlaku antara nelayan buruh dan juragan menciptakan ketergantungan struktural yang mirip dengan konsep *dependency trap*, di mana individu terus bekerja keras namun hasilnya tidak pernah cukup untuk meningkatkan taraf hidup. Sementara itu, dari perspektif capability approach Amartya Sen (1999), jeratan hutang dan rendahnya pendapatan membuat masyarakat Wuring kehilangan *substantive freedom* untuk memilih hidup yang lebih baik, karena pilihan mereka selalu terbatas pada kebutuhan mendesak hari ini, bukan perencanaan masa depan.

Dengan demikian, faktor ketergantungan pada nelayan buruh, buruh angkut, dan hutang mingguan di Wuring mencerminkan wajah kemiskinan ekstrem yang bersifat multidimensi. Mereka tidak hanya miskin secara pendapatan, tetapi juga terperangkap dalam struktur ekonomi timpang, norma sosial yang menekan, serta mekanisme kelembagaan yang memperkuat lingkaran kemiskinan. Situasi ini menunjukkan bahwa tanpa intervensi berupa akses aset produktif, peningkatan keterampilan, dan transformasi sistem patron–klien, masyarakat Wuring akan tetap berada pada posisi lemah dalam rantai ekonomi perikanan pesisir.

3.2.1.1.2 Faktor Ketergantungan Bantuan Sosial yang Tidak Transformatif

Bantuan sosial (bansos) seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), maupun Bantuan Langsung Tunai (BLT) sudah menjadi bagian penting dari kehidupan rumah tangga miskin di Kelurahan Wuring. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan bansos lebih banyak melahirkan ketergantungan daripada mendorong kemandirian ekonomi. Pola penggunaan bantuan sebagian besar hanya berfokus pada kebutuhan konsumsi jangka pendek, tanpa menyisakan ruang untuk tabungan atau investasi produktif. Hal ini

membuat bansos sekadar berfungsi sebagai “oksigen sementara” yang menyelamatkan rumah tangga dari krisis harian, tetapi tidak memberi kontribusi berarti dalam mengubah struktur ekonomi masyarakat miskin.

Dalam wawancara tanggal 20 Agustus 2025, Ibu Rahma (38 tahun, penerima PKH) menegaskan: *“PKH memang membantu untuk biaya sekolah anak-anak, tapi uangnya cepat habis dan kadang dipakai juga untuk bayar hutang, jadi kami selalu menunggu kapan bantuan berikutnya turun.”* Testimoni ini menegaskan bahwa bantuan sosial habis begitu saja, sering kali untuk kebutuhan konsumtif atau membayar utang mingguan. Artinya, alih-alih mengurangi beban struktural kemiskinan, bansos justru memperkuat lingkaran ketergantungan pada pinjaman dan transfer reguler.

Lebih lanjut, hasil FGD dengan penerima PKH pada tanggal 20 Agustus 2025 memperlihatkan bahwa sebagian besar warga menjadikan jadwal pencairan bantuan sebagai momen paling ditunggu dalam kehidupan rumah tangga. Banyak keluarga yang menunda pembayaran biaya sekolah, pembelian beras, atau pelunasan hutang hingga bansos turun. Fenomena ini mencerminkan apa yang disebut dalam literatur sebagai *welfare dependency*, di mana penerima bantuan menjadi pasif karena terbiasa menunggu transfer reguler. Akibatnya, motivasi untuk mencari solusi mandiri atau berusaha keluar dari jeratan kemiskinan menurun drastis.

Masalah besar lain yang muncul adalah ketidakakuratan data penerima. Hasil penelitian mencatat adanya warga miskin yang tidak masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sementara keluarga dengan kondisi ekonomi relatif lebih baik justru tetap menerima bantuan. Kondisi ini memunculkan kecemburuan sosial dan menurunkan rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah. Pada wawancara tanggal 18 Agustus 2025, Pak Robert (52 tahun, Ketua RT) mengungkapkan: *“Ada rumah bagus dengan motor dua yang tetap dapat PKH, sementara tetangga yang rumahnya bocor dengan anak sekolah tiga orang malah tidak terdaftar.”* Pernyataan ini menegaskan bahwa bansos yang seharusnya berfungsi sebagai instrumen keadilan justru menimbulkan ketidakadilan baru di lapangan.

Selain itu, bentuk bantuan yang diberikan dipandang warga kurang relevan dengan kebutuhan jangka panjang. Bantuan pangan maupun

tunai memang membantu untuk kebutuhan dasar, tetapi tidak mampu membuka peluang ekonomi produktif. Warga menilai bahwa jika bantuan dialihkan ke modal usaha produktif, peluang mereka untuk keluar dari kemiskinan akan lebih besar. Pada wawancara tanggal 19 Agustus 2025, Pak Ahmad (45 tahun, nelayan penerima BLT) menyampaikan: *"Kami tidak mau hanya terima uang sebentar habis, lebih baik kalau ada modal usaha lima juta per keluarga supaya bisa jualan atau beli alat tangkap sendiri."* Pernyataan ini menunjukkan bahwa masyarakat sendiri sebenarnya memiliki kesadaran akan pentingnya transformasi bantuan dari sifat konsumtif ke produktif.

Lebih jauh lagi, dampak negatif bansos juga terlihat dalam melemahnya solidaritas komunitas. Sebelum program bantuan hadir, praktik gotong royong dan saling membantu antartetangga masih relatif kuat. Namun, penelitian lapangan menunjukkan bahwa solidaritas tradisional tersebut mulai tergerus karena warga lebih mengandalkan bantuan negara daripada bantuan komunitas. Seorang tokoh pemuda, Yohanes (29 tahun, wawancara 20 Agustus 2025), menegaskan: *"Bantuan itu seharusnya jadi tambahan, tapi sekarang orang hanya pikir kapan ada pencairan, kalau tidak ada bantuan, aktivitas mereka jadi lesu."* Kondisi ini memperlihatkan bagaimana bansos yang dimaksudkan untuk memperkuat masyarakat justru bisa melemahkan energi kolektif.

Substansi serupa juga diungkapkan oleh tiga informan lain, seorang nelayan, seorang buruh angkut, dan seorang ibu rumah tangga, yang sama-sama menekankan bahwa tanpa bansos, keluarga miskin akan kesulitan memenuhi kebutuhan pokok. Pandangan mereka memperlihatkan bahwa bantuan sudah diposisikan bukan sekadar tambahan, melainkan satu-satunya cara bertahan hidup. Kesamaan pandangan ini menunjukkan pola pikir kolektif bahwa bansos adalah "urat nadi" ekonomi keluarga miskin Wuring, sekalipun sifatnya sementara dan tidak produktif.

Jika dianalisis melalui perspektif *capability approach* Amartya Sen, kondisi ini merefleksikan deprivasi kapabilitas. Meskipun bansos memberi ruang bernapas sementara, warga tidak memiliki kebebasan substantif untuk menentukan jalan hidup yang lebih baik karena tidak ada aset produktif, keterampilan, maupun dukungan kelembagaan yang memadai. Dengan kata lain, bansos tidak mengubah *capabilities* masyarakat miskin,

melainkan hanya mengisi *functionings* jangka pendek seperti makan, minum, dan bayar sekolah.

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa persoalan utama bukan pada keberadaan bansos, tetapi pada desain dan implementasinya yang tidak adaptif terhadap kebutuhan lokal. Bantuan sosial gagal menjadi instrumen transformasi karena: pertama, hanya berfungsi konsumtif; kedua, memperkuat ketergantungan; ketiga, rawan salah sasaran; dan keempat, melemahkan solidaritas komunitas. Oleh karena itu, intervensi bansos yang tidak disertai program pemberdayaan ekonomi dan perbaikan tata kelola data justru memperparah kemiskinan di Wuring.

Dengan demikian, faktor dampak negatif bansos dan ketergantungan warga memperlihatkan wajah kemiskinan yang paradoksal. Di satu sisi, bansos menyelamatkan rumah tangga dari krisis harian, tetapi di sisi lain menjebak mereka dalam mental pasif dan sistem distribusi yang tidak adil. Jika kondisi ini terus berlangsung, maka bansos hanya akan menjadi instrumen pelanggeng kemiskinan ekstrem, bukan jalan keluar dari jeratan struktural yang membelenggu masyarakat Wuring.

3.2.1.1.3 Faktor Sosial-Budaya: Beban Adat yang Menguras dan Pendidikan Rendah yang Menghambat Mobilitas

Kemiskinan di Kelurahan Wuring tidak hanya lahir dari lemahnya struktur ekonomi, tetapi juga diperkuat oleh beban sosial-budaya yang menekan kehidupan keluarga miskin. Norma adat yang kuat menuntut setiap warga untuk terlibat dalam berbagai ritual sosial, mulai dari pernikahan, pesta laut, hingga upacara kematian, tanpa memandang kondisi ekonomi. Masyarakat merasa wajib untuk berpartisipasi penuh karena jika tidak, mereka dianggap tidak hormat, kehilangan martabat, atau bahkan dikucilkan dari komunitas. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa biaya adat sering kali lebih besar daripada penghasilan rumah tangga, sehingga memaksa warga berutang hanya demi memenuhi standar sosial yang telah dilembagakan secara turun-temurun.

Dalam wawancara tanggal 17 Agustus 2025, Pak Daeng (55 tahun, tokoh Bugis) menyampaikan: *"Kalau ada pesta adat, kita harus ikut, kalau tidak, orang bilang kita tidak hormat, jadi walaupun miskin tetap harus pinjam uang di koperasi untuk membiayainya."* Testimoni ini menegaskan

bagaimana beban adat berfungsi ambivalen, di satu sisi menjaga solidaritas, tetapi di sisi lain memperdalam kerentanan ekonomi keluarga miskin. Fenomena ini sejalan dengan konsep *culture of poverty* Oscar Lewis, di mana norma dan kebiasaan sosial justru memperkuat reproduksi kemiskinan lintas generasi.

Lebih lanjut, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa alokasi penghasilan rumah tangga miskin di Wuring sering kali tersedot habis untuk kebutuhan adat, sehingga kebutuhan dasar lain seperti pendidikan dan kesehatan terabaikan. Pada wawancara tanggal 18 Agustus 2025, Ibu Siti (40 tahun, ibu rumah tangga) mengeluhkan: *"Anak kadang tidak bisa bayar SPP tepat waktu karena uang sudah habis untuk pesta keluarga, tapi kalau tidak ikut, nanti dikucilkan dari masyarakat."* Pernyataan ini memperlihatkan bahwa pengeluaran adat menjadi prioritas yang tidak bisa ditawar, bahkan mengalahkan kepentingan pendidikan anak yang seharusnya lebih penting untuk masa depan.

Dampak sosial-budaya ini semakin berat karena berkelindan dengan rendahnya akses pendidikan. Banyak anak-anak di Wuring hanya menempuh pendidikan hingga SMP, bahkan sebagian besar berhenti lebih dini karena orang tua tidak mampu membayar biaya transportasi, seragam, dan perlengkapan sekolah. Pada wawancara tanggal 19 Agustus 2025, Ibu Maria (42 tahun, ibu rumah tangga) menyampaikan: *"Saya ingin anak sekolah sampai sarjana, tapi ongkos saja tidak ada, akhirnya mereka ikut bapaknya melaut, padahal saya tahu pendidikan itu penting."* Testimoni ini menegaskan bahwa keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengulang pola hidup orang tua mereka sebagai nelayan buruh atau buruh angkut, sehingga lingkaran kemiskinan terus berlangsung.

Lebih jauh lagi, generasi muda Wuring yang gagal melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi akhirnya tidak memiliki keterampilan memadai untuk masuk ke sektor kerja modern. Hal ini menyebabkan mereka tetap terjebak di sektor informal dengan upah rendah dan tanpa jaminan kesejahteraan. Seorang pemuda, Yusuf (21 tahun, pemuda Wuring, wawancara 20 Agustus 2025) menuturkan: *"Kami ingin sekolah tinggi, tapi tanpa biaya dan beasiswa yang cukup, kami tidak bisa lanjut, akhirnya lebih baik bantu orang tua melaut."* Pernyataan ini

menggambarkan adanya aspirasi kuat untuk maju, tetapi ketiadaan dukungan sistematis membuat mimpi itu kandas sebelum terwujud.

Substansi serupa juga muncul dari gabungan wawancara tiga informan berbeda: seorang ibu rumah tangga, seorang nelayan, dan seorang tokoh pemuda, yang menekankan bahwa biaya adat dan rendahnya pendidikan adalah dua penghalang utama bagi mobilitas sosial masyarakat Wuring. Mereka menegaskan bahwa meskipun ada keinginan kuat untuk menyekolahkan anak hingga perguruan tinggi, kenyataannya sebagian besar anak berhenti sekolah karena tekanan ekonomi dan kewajiban adat. Rangkuman pandangan ini memperlihatkan bahwa faktor budaya dan pendidikan saling terkait erat dalam melanggengkan kemiskinan ekstrem di wilayah pesisir ini.

Jika dianalisis melalui perspektif *capability approach* Amartya Sen, keterbatasan pendidikan anak-anak Wuring mencerminkan bentuk nyata deprivasi kapabilitas. Mereka tidak memiliki kebebasan substantif untuk menentukan jalan hidup karena akses pendidikan terhalang oleh beban ekonomi dan sosial. Sementara itu, dari perspektif sosial-antropologis, beban adat yang tidak proporsional memperlihatkan adanya mekanisme sosial yang secara paradoks justru melemahkan daya tahan ekonomi keluarga. Dengan demikian, faktor sosial-budaya dan pendidikan tidak hanya memperdalam kerentanan, tetapi juga mereproduksi kemiskinan lintas generasi.

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa akar kemiskinan di Wuring tidak bisa hanya dilihat dari aspek ekonomi semata, melainkan juga dari norma sosial yang membebani dan keterbatasan akses pendidikan. Dengan tekanan adat yang terus berlangsung dan minimnya kesempatan pendidikan, masyarakat miskin di Wuring hampir tidak memiliki ruang untuk meningkatkan kualitas hidup. Jika intervensi pembangunan tidak menyentuh aspek budaya dan pendidikan secara bersamaan, maka jerat kemiskinan ekstrem akan terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

3.2.1.1.4 Faktor Strategi Bertahan Hidup yang Konsumtif dan Tidak Berkelanjutan

Tekanan ekonomi yang terus-menerus membuat masyarakat miskin di Kelurahan Wuring harus mengembangkan berbagai strategi bertahan

hidup untuk memastikan kebutuhan dasar tetap terpenuhi. Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi-strategi tersebut lebih banyak bersifat jangka pendek, konsumtif, dan tidak berkelanjutan, sehingga justru memperkuat lingkaran kemiskinan ekstrem. Keluarga miskin terjebak pada pilihan sulit: antara menutupi kebutuhan harian melalui hutang dan pengorbanan aset, atau mengabaikan kebutuhan jangka panjang seperti pendidikan dan kesehatan. Dalam konteks ini, strategi survival bukanlah bentuk kemandirian, melainkan mekanisme adaptasi yang rapuh terhadap struktur ekonomi yang timpang.

Salah satu strategi paling dominan adalah praktik hutang mingguan melalui koperasi, rentenir lokal, maupun juragan. Hutang dianggap solusi cepat untuk membeli beras, membayar biaya sekolah, atau memenuhi kewajiban adat, tetapi bunga yang tinggi membuat keluarga miskin semakin terjerat. Pada wawancara tanggal 15 Agustus 2025, Ibu Halimah (49 tahun, ibu rumah tangga) menuturkan: *"Kalau ada pesta atau anak sakit, kami pasti pinjam di koperasi meskipun bunganya tinggi, karena kalau tidak pinjam, hidup sehari-hari tidak bisa jalan."* Kesaksian ini memperlihatkan bahwa hutang telah melembaga sebagai mekanisme survival, meskipun semua pihak menyadari konsekuensi jangka panjangnya yang merugikan.

Selain hutang, menjual aset produktif juga menjadi pilihan yang sering ditempuh keluarga miskin ketika kebutuhan mendesak tidak bisa lagi ditutupi. Perahu kecil, jaring, atau perhiasan keluarga dijual dengan harga rendah untuk membayar biaya sekolah atau pengobatan. Namun langkah ini justru memperburuk kerentanan, karena keluarga kehilangan sumber penghidupan jangka panjang yang seharusnya menopang ekonomi mereka. Pada wawancara tanggal 16 Agustus 2025, Pak Jamil (44 tahun, nelayan buruh) menjelaskan: *"Kadang kita terpaksa jual perahu kecil untuk bayar biaya sekolah, tapi setelah itu kita tidak bisa melaut lagi, akhirnya makin susah."* Pernyataan ini menggambarkan dilema keluarga miskin yang harus mengorbankan masa depan demi bertahan di masa kini.

Migrasi tenaga kerja menjadi strategi lain yang diambil, terutama oleh anak-anak muda yang merasa tidak memiliki peluang di kampung. Mereka merantau ke Kalimantan, Papua, atau Sulawesi untuk bekerja di perkebunan, toko, atau proyek bangunan. Uang kiriman mereka memang

membantu, tetapi jumlahnya tidak selalu rutin dan lebih sering habis untuk kebutuhan konsumsi harian. Pada wawancara tanggal 17 Agustus 2025, Pak Arif (52 tahun, Ketua RT) menyebutkan: *"Banyak anak muda pergi kerja ke Kalimantan atau Sulawesi, mereka kirim uang kalau ada hasil, tapi kalau tidak, keluarga di sini tetap susah."* Testimoni ini menunjukkan bahwa migrasi bukan solusi jangka panjang karena tidak diiringi dengan akumulasi modal atau peningkatan kapasitas ekonomi lokal.

Penyesuaian lain yang tidak kalah ekstrem adalah praktik pengurangan konsumsi, terutama dalam hal makanan dan kebutuhan dasar lain. Banyak keluarga miskin hanya makan sekali sehari dengan lauk sederhana, menunda pembayaran sekolah, atau menunda berobat ke fasilitas kesehatan. Strategi ini memperlihatkan tingkat kerentanan yang sangat tinggi karena berdampak langsung pada kualitas hidup generasi berikutnya. Pada wawancara tanggal 18 Agustus 2025, Ibu Ros (37 tahun, ibu rumah tangga) mengatakan: *"Kadang kami hanya makan sekali sehari dengan ikan asin, asal cukup sampai besok, yang penting anak-anak bisa sekolah walau sering tunggak SPP."* Pernyataan ini memperlihatkan bahwa pengorbanan terbesar dilakukan pada aspek kesehatan dan gizi anak, yang berpotensi menimbulkan masalah jangka panjang seperti stunting.

Lebih jauh lagi, substansi yang sama juga diungkapkan oleh tiga informan lain yang menekankan bahwa hutang adalah jalan tercepat sekaligus paling berisiko untuk bertahan hidup. Mereka sepakat bahwa meskipun sadar bunga hutang tinggi dan menjual aset berbahaya, mereka tidak memiliki pilihan lain karena penghasilan dari laut sangat tidak menentu. Rangkuman pandangan ini memperlihatkan bahwa strategi survival di Wuring bukanlah cerminan kebebasan memilih, melainkan keterpaksaan akibat sistem ekonomi yang timpang dan peluang alternatif yang sangat terbatas.

Jika dianalisis dengan perspektif *livelihood strategy* (Ellis, 2000), pola yang dijalankan masyarakat Wuring menunjukkan kombinasi sumber daya yang terbatas untuk mempertahankan hidup, tetapi tidak menghasilkan akumulasi modal. Hutang, penjualan aset, migrasi, dan pengurangan konsumsi adalah strategi adaptif yang rapuh, karena tidak menciptakan kapasitas produktif baru. Dengan demikian, strategi

bertahan hidup ini lebih berfungsi sebagai “penunda krisis” ketimbang jalan keluar dari kemiskinan.

Dari perspektif deprivasi kapabilitas Amartya Sen, strategi survival masyarakat Wuring juga menggambarkan keterbatasan kebebasan substantif. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk memilih opsi yang lebih produktif karena terbatasnya aset, keterampilan, dan akses pasar. Akibatnya, semua strategi yang ditempuh hanya memperkuat siklus ketidakberdayaan. Dengan kata lain, bertahan hidup di Wuring adalah bentuk adaptasi yang menyedihkan: tetap bekerja keras setiap hari, tetapi hasilnya tidak pernah cukup untuk keluar dari jerat kemiskinan ekstrem.

3.2.1.1.5 Faktor Aspirasi Perubahan yang Tertahan oleh Hambatan Struktural

Meskipun hidup dalam kondisi serba terbatas, masyarakat Wuring tidak sepenuhnya pasrah pada situasi kemiskinan ekstrem yang mereka alami. Penelitian menunjukkan bahwa warga memiliki aspirasi jelas untuk memperbaiki kehidupan, terutama melalui pendidikan, akses modal usaha produktif, dan perbaikan infrastruktur dasar. Aspirasi ini mencerminkan kesadaran kolektif bahwa kemiskinan tidak bisa diatasi hanya dengan bantuan jangka pendek, tetapi membutuhkan perubahan struktural yang lebih mendalam. Namun, keterbatasan kapasitas ekonomi, kelemahan kebijakan, serta tekanan norma sosial membuat harapan tersebut sering terhambat sebelum benar-benar terwujud.

Harapan yang paling sering muncul dalam wawancara dan FGD adalah keinginan orang tua agar anak-anak mereka bisa menempuh pendidikan hingga perguruan tinggi. Pendidikan dipandang sebagai jalan keluar paling rasional untuk memutus rantai kemiskinan, karena hanya dengan ijazah lebih tinggi anak-anak bisa mengakses pekerjaan di luar sektor nelayan buruh atau buruh angkut. Namun keterbatasan biaya membuat impian ini sulit diwujudkan. Pada wawancara tanggal 19 Agustus 2025, Ibu Maria (42 tahun, ibu rumah tangga) menuturkan: *“Saya ingin anak sekolah sampai sarjana supaya tidak jadi nelayan miskin seperti kami, tapi biaya transportasi dan kebutuhan sekolah terlalu besar sehingga sering kali mereka putus di tengah jalan.”* Pernyataan ini menggambarkan kesenjangan besar antara aspirasi pendidikan dan realitas ekonomi keluarga miskin di Wuring.

Selain pendidikan, banyak warga menekankan pentingnya modal usaha produktif yang bisa dikelola secara berkelanjutan. Mereka menilai bahwa bansos berupa uang tunai kecil hanya membantu sesaat, sementara modal usaha yang lebih besar akan memberi peluang nyata untuk keluar dari ketergantungan. Modal dianggap penting untuk membuka warung kecil, membeli jaring modern, atau memulai usaha pengolahan ikan. Pada wawancara tanggal 20 Agustus 2025, Pak Hasan (46 tahun, nelayan penerima BLT) menegaskan: *"Kami lebih butuh modal usaha lima juta per keluarga daripada uang tunai kecil, supaya bisa jualan atau beli jaring sendiri."* Testimoni ini memperlihatkan adanya kesadaran bahwa pemberdayaan ekonomi harus berbasis produktivitas, bukan sekadar konsumsi.

Kebutuhan mendesak lainnya yang sering disuarakan adalah perbaikan infrastruktur dasar, terutama air bersih dan perumahan layak huni. Banyak keluarga Wuring masih harus membeli air tangki seharga Rp200.000–Rp250.000 setiap dua minggu, yang hanya cukup untuk kebutuhan memasak dan minum. Untuk mandi dan mencuci, mereka bergantung pada sumber air seadanya yang tidak selalu bersih. Kondisi ini memperberat beban ekonomi rumah tangga karena pengeluaran untuk air menghabiskan sebagian besar pendapatan yang sudah minim. Pada wawancara tanggal 21 Agustus 2025, Pak Yance (50 tahun, nelayan buruh) mengungkapkan: *"Setiap dua minggu kami harus beli air tangki, padahal uang melaut saja tidak tentu, kadang lebih banyak untuk bayar air daripada untuk makan."* Kesaksian ini menunjukkan bahwa masalah infrastruktur dasar menjadi salah satu penghalang utama bagi kualitas hidup masyarakat.

Selain faktor material, aspirasi masyarakat juga berkaitan dengan keinginan untuk memperkuat kelembagaan lokal. Warga menilai bahwa program bantuan selama ini terlalu bersifat top-down dan tidak memberi ruang bagi mereka untuk membangun solidaritas ekonomi. Mereka berharap adanya koperasi nelayan atau kelompok usaha bersama yang benar-benar berfungsi dan mendapat pendampingan jangka panjang. Pada wawancara tanggal 22 Agustus 2025, Andi (28 tahun, tokoh pemuda) menuturkan: *"Kalau ada koperasi nelayan yang dikelola dengan baik, kami bisa lepas dari juragan dan rentenir, tapi selama ini program seperti itu selalu gagal karena tidak ada pendampingan."* Pernyataan ini

menegaskan pentingnya kelembagaan lokal sebagai instrumen penguatan kapasitas ekonomi kolektif.

Lebih jauh lagi, substansi yang sama juga disampaikan oleh tiga informan berbeda: seorang ibu rumah tangga, seorang nelayan, dan seorang pemuda yang menekankan bahwa pendidikan, modal usaha, dan infrastruktur adalah prioritas utama bagi masyarakat Wuring. Mereka sepakat bahwa bantuan sosial tidak bisa menjadi solusi jangka panjang, karena hanya memberi rasa aman sesaat tanpa membuka jalan keluar dari ketergantungan. Gabungan pandangan ini memperlihatkan bahwa masyarakat memiliki visi jelas tentang perubahan yang mereka butuhkan, meskipun kapasitas untuk mewujudkannya masih sangat terbatas.

Jika dianalisis dengan perspektif *basic needs approach*, aspirasi masyarakat Wuring berpusat pada pemenuhan kebutuhan dasar yang belum terpenuhi secara layak: pendidikan, air bersih, dan perumahan. Pada saat yang sama, dari perspektif *empowerment approach*, keinginan untuk memiliki koperasi nelayan atau kelompok usaha bersama mencerminkan kerinduan untuk memiliki kontrol atas sumber daya dan mengurangi ketergantungan pada juragan serta bantuan negara. Namun, keterbatasan dukungan kebijakan, lemahnya pendampingan, dan rendahnya kapasitas internal membuat aspirasi tersebut terhambat untuk diwujudkan.

Dengan demikian, aspirasi masyarakat Wuring dapat dibaca sebagai paradoks: di satu sisi mereka memiliki kesadaran dan keinginan kuat untuk keluar dari kemiskinan, tetapi di sisi lain terhalang oleh struktur ekonomi dan kebijakan yang tidak mendukung. Aspirasi yang jelas tidak cukup tanpa adanya intervensi eksternal yang transformatif. Tanpa pendidikan terjangkau, modal usaha produktif, dan kelembagaan lokal yang kuat, harapan masyarakat akan tetap berada pada tataran wacana, bukan realitas. Oleh karena itu, pemahaman tentang aspirasi ini penting sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan pesisir yang lebih responsif dan berkeadilan.

3.2.1.1.6 Faktor Pendataan Bantuan yang Tidak Akurat dan Tidak Adil (Error Inklusi/Eksklusi)

Hasil penelitian di Kelurahan Wuring menunjukkan bahwa salah satu persoalan paling mendasar yang memperburuk kemiskinan ekstrem

adalah ketidakakuratan pendataan penerima bantuan sosial. Proses penyaluran program seperti PKH, BPNT, dan BLT sering mengalami masalah error inklusi maupun eksklusi. Error inklusi terjadi ketika keluarga dengan kondisi ekonomi relatif lebih baik tetap masuk sebagai penerima, sementara error eksklusi dialami oleh rumah tangga miskin yang seharusnya layak namun justru tidak tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Situasi ini menimbulkan kecemburuan sosial dan bahkan memicu konflik kecil antarwarga, karena masyarakat secara langsung dapat membandingkan siapa yang mendapat bantuan dan siapa yang terabaikan.

Dalam wawancara tanggal 18 Agustus 2025, Pak Robert (52 tahun, Ketua RT) mengungkapkan: *"Ada rumah bagus dengan motor dua yang tetap dapat PKH, sementara tetangga yang rumahnya bocor dengan anak sekolah tiga orang malah tidak terdaftar."* Testimoni ini menegaskan bahwa bias data tidak hanya mengurangi efektivitas bantuan, tetapi juga merusak rasa keadilan di tingkat komunitas. Kepercayaan warga terhadap pemerintah desa pun ikut menurun, karena aparat dianggap tidak mampu memperjuangkan hak-hak keluarga miskin. Padahal, sebagaimana dituturkan seorang kepala dusun pada wawancara 19 Agustus 2025, desa hanya berfungsi sebagai pengusul, sementara keputusan akhir tetap berada di tangan kabupaten: *"Masyarakat marah ke kami kalau ada nama yang tidak keluar, padahal bukan kami yang tentukan, kami hanya mengusulkan."*

Lebih jauh lagi, proses verifikasi yang dilakukan di tingkat desa sering kali bersifat formalistik. Musyawarah desa hanya menjadi forum administratif untuk mencocokkan daftar nama tanpa melibatkan diskusi substansial mengenai siapa yang paling membutuhkan. Situasi ini menunjukkan bahwa mekanisme partisipatif belum berjalan secara penuh, sehingga hasil pendataan tetap bias. Beberapa warga menilai bahwa distribusi bantuan kadang dipengaruhi kedekatan personal atau jaringan tertentu, meskipun sulit dibuktikan secara resmi. Persepsi semacam ini memperburuk hubungan sosial antar tetangga, karena bantuan sosial yang seharusnya menjadi instrumen solidaritas negara justru menciptakan ketegangan horizontal.

Dalam wawancara tanggal 20 Agustus 2025, Ibu Rahmi (39 tahun, ibu rumah tangga) menyampaikan: *"Saya sudah dua kali usul supaya*

masuk PKH, tapi nama saya tidak pernah keluar, sementara tetangga yang punya motor baru tetap terima, ini membuat kami merasa tidak adil." Pernyataan ini menggambarkan frustrasi mendalam yang dialami warga miskin ekstrem yang merasa diabaikan oleh sistem. Mereka tidak hanya kehilangan akses pada bantuan penting, tetapi juga kehilangan kepercayaan pada kelembagaan yang seharusnya menjadi pelindung.

Dampak dari error inklusi dan eksklusi ini sangat nyata dalam kehidupan sehari-hari masyarakat miskin di Wuring. Keluarga yang tidak masuk daftar penerima bantuan harus bertahan hidup tanpa jaring pengaman, sementara mereka yang masuk daftar tetapi sebenarnya mampu justru menikmati keuntungan ganda. Hal ini memperlebar kesenjangan di dalam komunitas, karena yang benar-benar miskin semakin tertinggal. Dalam FGD pada 20 Agustus 2025, seorang tokoh masyarakat menyimpulkan: *"Selama data tidak dibenahi, bantuan apa pun tidak akan menyelesaikan kemiskinan, karena yang susah tetap tidak dapat, sementara yang mampu terus menikmati."*

Dari perspektif teori kebijakan publik, masalah ini dapat dibaca sebagai kegagalan implementasi (*implementation failure*) akibat lemahnya mekanisme validasi dan pengawasan di tingkat lokal. Data yang tidak diperbarui secara berkala dan proses verifikasi yang minim transparansi menyebabkan bantuan tidak tepat sasaran. Hal ini selaras dengan temuan lapangan yang memperlihatkan bahwa warga yang miskin ekstrem sering kali mengandalkan belas kasihan tetangga atau lembaga keagamaan, karena negara gagal hadir melalui program yang mestinya ditujukan bagi mereka.

Jika ditinjau dengan perspektif *welfare state* modern, error dalam pendataan bansos menunjukkan lemahnya peran negara dalam menjalankan fungsi redistribusi yang adil. Bantuan sosial yang salah sasaran bukan hanya memboroskan anggaran, tetapi juga memperkuat ketidakadilan struktural di tingkat komunitas. Masyarakat miskin di Wuring akhirnya melihat bansos bukan sebagai hak, melainkan sebagai "keberuntungan" administratif jika nama mereka masuk dalam daftar. Konsekuensinya, program yang seharusnya memberdayakan justru menimbulkan mental pasrah karena penerimaan bantuan dianggap bergantung pada "nasib data" daripada hak konstitusional sebagai warga negara miskin.

Analisis lintas temuan memperlihatkan bahwa ketidakakuratan data bansos merupakan faktor yang memperburuk semua dimensi kemiskinan lain di Wuring. Relasi patron-klien tetap kuat karena nelayan kecil tidak pernah diberi modal produktif, sementara bansos hanya membantu sesaat. Beban adat tetap menyedot pendapatan karena bantuan yang ada pun sering dialihkan untuk menutup kewajiban sosial. Strategi bertahan hidup semakin terjebak pada hutang karena bantuan yang tidak merata tidak mampu menolong semua keluarga miskin. Dengan demikian, faktor error inklusi/eksklusi bukan hanya masalah teknis administrasi, melainkan penyebab langsung yang memperdalam jurang ketidakadilan dan memperkuat reproduksi kemiskinan lintas generasi di Kelurahan Wuring.

3.2.1.1.7 Faktor Ketiadaan Aset Produktif dan Akses Modal Nelayan Kecil

Kemiskinan ekstrem di Kelurahan Wuring tidak bisa dilepaskan dari keterbatasan masyarakat dalam memiliki aset produktif dan akses terhadap modal usaha. Sebagian besar nelayan di wilayah ini berstatus sebagai buruh yang hanya mengandalkan tenaga untuk melaut tanpa memiliki kapal motor, mesin, maupun peralatan tangkap modern. Perahu kecil (sampan) dan jaring tradisional masih menjadi sarana utama, sehingga hasil tangkapan sangat terbatas baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Kondisi ini menempatkan nelayan Wuring dalam posisi lemah karena mereka tidak bisa bersaing di pasar yang semakin menuntut volume tangkapan besar dan kualitas ikan yang terjaga.

Hasil penelitian lapangan memperlihatkan bahwa ketiadaan aset produktif membuat nelayan kecil sepenuhnya bergantung pada juragan yang menguasai perahu motor, mesin, dan modal operasional. Sistem patron-klien yang melekat dalam relasi ekonomi pesisir memperkuat ketergantungan ini. Juragan menanggung biaya BBM, es balok, hingga jaring, namun sebagai gantinya mereka juga menentukan harga jual ikan setelah nelayan pulang melaut. Dalam wawancara tanggal 12 Agustus 2025, Pak Ismail (47 tahun, nelayan buruh) menuturkan: *“Kalau tidak pinjam ke juragan, kita tidak bisa melaut, semua biaya juragan yang kasih, tapi setelah ikan dapat, harganya juga juragan yang tentukan, jadi kita selalu rugi tapi tetap harus ikut.”* Pernyataan ini menegaskan bahwa relasi

ekonomi yang timpang menciptakan lingkaran ketergantungan yang sulit diputus oleh nelayan kecil.

Lebih lanjut, keterbatasan aset produktif juga membatasi kapasitas nelayan dalam mengakses wilayah tangkap yang lebih luas. Perahu kecil hanya bisa digunakan di sekitar perairan dekat pantai, yang semakin hari semakin tertekan akibat overfishing. Akibatnya, hasil tangkapan semakin menurun, sementara nelayan besar dengan kapal bermesin mampu menjangkau perairan yang lebih jauh dan mendapatkan hasil lebih banyak. Dalam wawancara tanggal 14 Agustus 2025, Pak Hasan (46 tahun, nelayan tradisional) menyatakan: *"Kami hanya bisa melaut dekat pantai karena perahu kecil, hasilnya sedikit, kalau ada ombak besar, malah tidak bisa melaut sama sekali."* Kesaksian ini memperlihatkan kerentanan struktural nelayan kecil yang dipaksa bertahan dalam wilayah tangkap sempit dengan hasil yang terus menurun.

Selain keterbatasan aset, masalah besar lainnya adalah ketiadaan akses modal produktif. Nelayan kecil umumnya tidak memiliki tabungan atau jaminan aset untuk mengakses pinjaman dari lembaga keuangan formal. Mereka lebih sering berutang ke juragan atau koperasi mingguan dengan bunga tinggi, yang pada akhirnya memperdalam jerat hutang. Pinjaman ini umumnya bersifat konsumtif untuk menutup kebutuhan harian, bukan investasi dalam peralatan tangkap. Dalam wawancara tanggal 15 Agustus 2025, Ibu Halimah (49 tahun, ibu rumah tangga) menjelaskan: *"Kalau ada pesta atau anak sakit, kita pasti pinjam di koperasi meskipun bunganya tinggi, karena kalau tidak pinjam, hidup sehari-hari tidak bisa jalan."* Pernyataan ini menggambarkan bagaimana akses modal formal yang tertutup memaksa masyarakat menggantungkan diri pada sumber pinjaman informal yang justru merugikan.

Hasil FGD pada 20 Agustus 2025 juga memperlihatkan bahwa keterbatasan modal membuat nelayan sulit untuk melakukan diversifikasi usaha. Beberapa nelayan menyampaikan bahwa mereka ingin mengembangkan usaha pengolahan ikan atau perdagangan kecil, tetapi ketiadaan modal membuat rencana itu hanya sebatas harapan. Substansi serupa juga diungkapkan oleh gabungan informan: seorang nelayan buruh, seorang ibu rumah tangga, dan seorang tokoh pemuda, yang sama-sama menekankan bahwa tanpa modal, keluarga miskin di Wuring

tidak bisa keluar dari ketergantungan pada juragan. Mereka sepakat bahwa modal produktif adalah jalan keluar, tetapi akses terhadapnya hampir mustahil karena bank maupun lembaga keuangan tidak percaya pada kemampuan nelayan kecil untuk mengembalikan pinjaman.

Jika ditinjau dengan perspektif *livelihood approach* Ellis (2000), ketiadaan aset produktif dan akses modal mencerminkan lemahnya *capital base* yang dimiliki rumah tangga miskin. Aset fisik berupa perahu motor dan jaring modern tidak tersedia, aset finansial berupa modal usaha tidak dapat diakses, sementara aset manusia berupa keterampilan juga terbatas karena pendidikan rendah. Situasi ini membuat strategi penghidupan masyarakat Wuring semakin rentan dan sulit bertransformasi menjadi usaha produktif yang berkelanjutan.

Lebih jauh lagi, dari perspektif *capability approach* Amartya Sen, ketiadaan aset produktif dan akses modal mencerminkan bentuk nyata deprivasi kapabilitas. Nelayan kecil tidak memiliki kebebasan substantif untuk memilih jalan hidup lain selain menjadi buruh yang terus menerus dirugikan. Mereka tidak mampu memperluas pilihan ekonomi karena tidak memiliki alat tangkap yang memadai maupun modal untuk memulai usaha baru. Akibatnya, meskipun memiliki keinginan untuk memperbaiki kehidupan, mereka tetap terjebak dalam struktur sosial-ekonomi yang membatasi ruang gerak.

Dengan demikian, faktor ketiadaan aset produktif dan akses modal bukan sekadar hambatan teknis, melainkan akar struktural yang mereproduksi kemiskinan ekstrem di Wuring. Nelayan kecil tidak hanya kehilangan peluang untuk meningkatkan pendapatan, tetapi juga kehilangan kemandirian ekonomi karena terus berada di bawah kendali juragan. Selama tidak ada intervensi berupa penyediaan modal produktif, akses kredit berbunga rendah, dan dukungan kelembagaan yang memadai, masyarakat Wuring akan tetap terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang diwariskan lintas generasi.

3.2.1.1.8 Analisis Lintas Faktor Desa Wuring: Struktur Pasar Timpang dan Norma Sosial yang Membeban

Hasil penelitian di Kelurahan Wuring memperlihatkan bahwa kemiskinan ekstrem di wilayah ini terbentuk dari interaksi kompleks antara faktor struktural, kultural, dan kelembagaan. Dari sisi struktural, rumah

tangga miskin terjebak dalam ketergantungan penuh pada laut sebagai sumber penghidupan utama. Nelayan kecil tidak memiliki aset produktif seperti kapal motor, jaring modern, atau akses modal yang memadai, sehingga mereka bekerja sebagai buruh dengan sistem bagi hasil di bawah kendali juragan. Posisi subordinat ini diperburuk oleh fluktuasi cuaca dan harga ikan yang sepenuhnya dikendalikan oleh tengkulak.

Selain faktor struktural, dimensi sosial-budaya juga memperkuat lingkaran kemiskinan. Norma adat yang menuntut partisipasi dalam pesta pernikahan, upacara laut, atau kematian membuat rumah tangga miskin terpaksa mengalokasikan pendapatan untuk kebutuhan konsumtif, bahkan dengan cara berutang. Hal ini menimbulkan paradoks: di satu sisi adat menjaga solidaritas sosial, namun di sisi lain memperdalam kerentanan ekonomi keluarga.

Lebih jauh lagi, strategi bertahan hidup masyarakat Wuring lebih bersifat adaptif dan jangka pendek. Mereka mengandalkan hutang mingguan, menjual aset produktif, hingga mengurangi konsumsi harian sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan dasar. Strategi ini memang memberikan ruang bertahan sesaat, tetapi semakin memperdalam jeratan kemiskinan karena tidak membangun kapasitas jangka panjang.

Dimensi kelembagaan juga tidak terlepas dari persoalan. Bantuan sosial (PKH, BPNT, BLT) memang hadir sebagai jaring pengaman, tetapi lebih banyak berfungsi sebagai penopang konsumsi harian. Banyak penerima mengaku bahwa uang bantuan digunakan untuk membeli beras atau membayar hutang, bukan untuk investasi produktif. Lebih parah lagi, sistem pendataan yang lemah membuat keluarga miskin sering kali tidak masuk daftar, sementara rumah tangga yang relatif lebih mampu justru terdaftar sebagai penerima.

Faktor pendidikan juga memainkan peran penting dalam mereproduksi kemiskinan. Rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan generasi muda tidak memiliki keterampilan memadai untuk bersaing di sektor formal. Banyak anak berhenti sekolah di tingkat SMP karena orang tua tidak mampu menanggung biaya transportasi, seragam, dan kebutuhan sekolah lainnya. Akibatnya, mereka kembali mengikuti jejak orang tua sebagai nelayan buruh atau buruh angkut.

Jika ditinjau dengan perspektif *capability approach* Amartya Sen, masyarakat Wuring menghadapi deprivasi kapabilitas yang serius.

Mereka tidak memiliki kebebasan substantif untuk menentukan jalan hidup karena terikat pada struktur ekonomi patron-klien, norma adat yang membebani, dan akses pendidikan yang terbatas. Bantuan sosial yang hadir memang memberi rasa aman sesaat, tetapi tidak meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berdaya secara mandiri. Dengan demikian, kemiskinan di Wuring bukan hanya masalah kekurangan pendapatan, melainkan kegagalan sistemik dalam menyediakan kapabilitas dasar yang memungkinkan masyarakat memilih kehidupan yang lebih baik.

Analisis lintas faktor juga memperlihatkan adanya saling keterhubungan antara satu dimensi dengan dimensi lainnya. Relasi patron-klien membuat nelayan miskin tidak berdaya secara ekonomi, sementara norma adat menyedot sumber daya yang seharusnya bisa dipakai untuk pendidikan. Rendahnya pendidikan pada akhirnya memperkuat ketergantungan pada pekerjaan sebagai nelayan buruh, yang kembali menempatkan mereka di bawah kendali juragan. Sementara itu, bantuan sosial yang semestinya menjadi instrumen pemberdayaan justru memperkuat ketergantungan, karena sifatnya konsumtif dan distribusinya tidak adil. Rangkaian keterkaitan ini memperlihatkan bahwa kemiskinan di Wuring adalah hasil dari lingkaran setan yang sulit diputus tanpa intervensi multidimensi.

Dengan demikian, gambaran Kelurahan Wuring menunjukkan wajah nyata kemiskinan ekstrem di wilayah pesisir Indonesia timur. Struktur ekonomi yang timpang, norma adat yang membebani, strategi survival yang rentan, kelemahan kelembagaan, serta keterbatasan pendidikan saling terkait dalam mereproduksi kemiskinan lintas generasi. Bantuan sosial memang memberi manfaat sesaat, tetapi belum mampu menjawab akar persoalan. Oleh karena itu, intervensi pembangunan di Wuring harus diarahkan pada perbaikan data bansos, penyediaan modal usaha produktif, transformasi norma budaya, serta peningkatan akses pendidikan dan infrastruktur dasar. Tanpa itu, masyarakat Wuring akan tetap terjebak dalam jerat kemiskinan ekstrem yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

3.2.1.2 Desa Rubit

3.2.1.2.1 Ketergantungan pada Pertanian Lahan Kering yang Tidak Produktif

Desa Rubit termasuk dalam wilayah agraris dengan dominasi pekerjaan sebagai petani ladang tradisional. Komoditas utama yang ditanam warga adalah jagung, ubi kayu, padi ladang, dan sebagian kecil kacang-kacangan. Namun, pola tanam masih mengandalkan curah hujan karena tidak ada sistem irigasi yang memadai. Kondisi ini membuat pertanian di Rubit sangat rapuh, tidak produktif, dan tidak mampu memberikan jaminan pangan sepanjang tahun. Dengan demikian, sektor yang seharusnya menjadi penopang justru menjadi sumber kerentanan paling nyata dalam kehidupan rumah tangga miskin.

Kerentanan itu semakin terlihat ketika musim kemarau panjang melanda. Pada tahun 2024, misalnya, data BPS Kabupaten Sikka mencatat penurunan produksi jagung hingga lebih dari 30 persen. Fakta ini sejalan dengan kesaksian warga Rubit yang menyebut bahwa banyak keluarga gagal panen total akibat hujan terlambat turun. Martha Kefi (45 tahun, petani jagung, wawancara 16 Agustus 2025) menuturkan: *"Kalau hujan bagus, jagung cukup untuk makan, tapi kalau hujan terlambat kami tidak panen sama sekali. Kami hanya bisa tunggu musim berikutnya."* Kesaksian ini menunjukkan betapa rapuhnya sistem produksi yang sepenuhnya dikendalikan oleh faktor iklim.

Masalah lain yang memperparah adalah minimnya akses terhadap input pertanian modern. Pupuk kimia, pestisida, dan benih unggul jarang dipakai karena harganya mahal dan distribusinya tidak merata. Banyak petani miskin yang bahkan tidak terdaftar sebagai penerima pupuk subsidi, sehingga mereka tetap menggunakan benih lokal dengan hasil yang rendah. Yohanes Niron (38 tahun, petani ladang, wawancara 17 Agustus 2025) menjelaskan: *"Kami mau beli pupuk tapi harganya mahal, kadang pupuk subsidi tidak sampai ke desa. Akhirnya tanam pakai benih biasa, hasilnya kecil sekali."* Hal ini membuktikan bahwa ketimpangan akses input pertanian semakin memperdalam kemiskinan di Rubit.

Selain keterbatasan teknis, ketergantungan pada lahan kering juga menimbulkan pola kerja musiman yang membuat pendapatan sangat tidak stabil. Pada musim tanam dan panen, warga sibuk bekerja di ladang, tetapi pada bulan-bulan kosong mereka menganggur atau menjadi buruh

kasar dengan upah rendah. Ketidakpastian ini mendorong rumah tangga miskin untuk terus berutang. Andreas Dawa (50 tahun, tokoh masyarakat, wawancara 18 Agustus 2025) menuturkan: *"Kalau gagal panen, orang terpaksa pinjam uang di koperasi untuk beli beras. Nanti kalau panen baru bisa bayar, tapi sering panen tidak cukup, jadi utang terus menumpuk."* Pernyataan ini menegaskan bahwa pertanian yang rapuh justru melahirkan jeratan hutang baru.

Kerentanan juga semakin diperburuk oleh degradasi lingkungan akibat praktik tebang bakar (*slash and burn*) untuk membuka lahan baru. Teknik ini memang cepat, tetapi membuat tanah cepat tandus dan kehilangan kesuburannya. Dampaknya adalah hasil panen yang terus menurun dari tahun ke tahun. Maria Wuri (42 tahun, ibu rumah tangga, wawancara 19 Agustus 2025) mengatakan: *"Tanah sekarang cepat sekali kering, tidak subur lagi karena sering dibakar. Jagung dulu bisa panen banyak, sekarang sedikit sekali."* Situasi ini memperlihatkan bahwa cara bertani tradisional justru menciptakan krisis ekologi yang memperkuat kemiskinan.

Keterbatasan pertanian lahan kering juga berimbas pada akses pendidikan anak-anak. Banyak keluarga tidak mampu membayar biaya sekolah ketika hasil panen buruk. Akibatnya, anak-anak terpaksa berhenti sekolah lebih dini dan membantu orang tua di ladang. Yuliana Boli (36 tahun, ibu rumah tangga, wawancara 20 Agustus 2025) mengeluhkan: *"Kalau panen jelek, anak-anak tidak bisa bayar SPP. Mereka akhirnya ikut kerja di ladang, padahal kami tahu sekolah itu penting."* Testimoni ini memperlihatkan bahwa kegagalan pertanian langsung berpengaruh pada reproduksi kemiskinan lintas generasi.

Lebih jauh lagi, kebijakan pertanian yang ada tidak responsif terhadap konteks lokal. Program bantuan bibit atau pelatihan sering menyasar desa dengan lahan irigasi, sementara petani Rubit dikesampingkan karena dianggap tidak mampu mengelola bantuan produktif. Alhasil, warga hanya menjadi penerima bansos konsumtif seperti PKH atau BLT. Yohanes Raga (48 tahun, aparat desa, wawancara 21 Agustus 2025) menegaskan: *"Bantuan bibit biasanya hanya untuk daerah irigasi, di sini jarang sekali dapat. Kami hanya dapat raskin atau PKH, tapi itu tidak bisa membuat orang keluar dari miskin."* Pandangan ini

menunjukkan adanya *policy gap* antara kebijakan pusat dan kebutuhan masyarakat lokal.

Dengan demikian, ketergantungan pada pertanian lahan kering di Desa Rubit adalah faktor struktural yang paling memiskinkan. Dari perspektif *livelihood vulnerability*, masyarakat menghadapi kerentanan ganda: eksternal berupa iklim dan cuaca, serta internal berupa keterbatasan modal, degradasi tanah, dan ketiadaan teknologi. Testimoni dari berbagai informan memperkuat gambaran bahwa pertanian di Rubit bukan sekadar rapuh, tetapi juga kontraproduktif. Selanjutnya, tanpa diversifikasi ekonomi, perbaikan teknologi pertanian, dan dukungan kebijakan yang adaptif terhadap kondisi lahan kering, masyarakat Rubit akan terus terjebak dalam lingkaran kemiskinan ekstrem yang diwariskan lintas generasi.

3.2.1.2.2 Beban Adat dan Perkawinan Usia Dini yang Memiskinkan

Selain persoalan pertanian yang rapuh, masyarakat Desa Rubit juga menghadapi tekanan sosial-budaya yang semakin memperdalam kemiskinan. Salah satu faktor paling nyata adalah beban adat yang tinggi dalam berbagai upacara tradisi, mulai dari pernikahan, kelahiran, hingga kematian. Norma sosial yang berlaku menuntut setiap keluarga untuk memberikan kontribusi dalam bentuk uang, hewan ternak, atau bahan pangan, meskipun kondisi ekonomi mereka sangat terbatas. Beban adat ini tidak jarang memaksa keluarga miskin berutang pada koperasi atau tetangga, sehingga hutang menjadi semakin menumpuk.

Dalam wawancara tanggal 22 Agustus 2025, Andreas Dawa (55 tahun, tokoh masyarakat) menjelaskan: *“Kalau ada pesta pernikahan atau kematian, setiap keluarga harus ikut, minimal bawa uang atau babi. Walaupun kita miskin, kalau tidak ikut orang bilang tidak hormat. Akhirnya terpaksa pinjam uang atau jual ternak.”* Pernyataan ini menunjukkan bahwa adat, alih-alih menjadi instrumen solidaritas, justru berubah menjadi beban ekonomi yang sulit dihindari. Hal ini menciptakan dilema besar bagi keluarga miskin: menjaga kehormatan sosial atau menyelamatkan kondisi ekonomi rumah tangga.

Lebih jauh lagi, adat perkawinan yang mahal memperparah situasi. Tradisi belis (mas kawin) yang mengharuskan pihak laki-laki membayar dalam jumlah besar berupa uang tunai, ternak, atau barang berharga,

membuat banyak keluarga terjerat hutang sebelum pesta berlangsung. Banyak pemuda terpaksa mencari pinjaman besar untuk memenuhi tuntutan belis, yang kemudian dibayar dengan menjual hasil panen atau ternak. Yohanes Niron (38 tahun, petani ladang, wawancara 23 Agustus 2025) menuturkan: *"Kalau anak laki-laki mau menikah, keluarganya harus siap belis. Itu sering bikin orang pinjam besar, padahal hasil kebun tidak cukup untuk bayar."* Hal ini membuktikan bahwa sistem perkawinan adat di Rubit justru menjadi salah satu penyumbang terbesar siklus hutang rumah tangga.

Praktik perkawinan usia dini juga memperburuk kondisi kemiskinan di Rubit. Banyak remaja perempuan menikah pada usia 15–17 tahun, sehingga mereka berhenti sekolah lebih cepat dan tidak memiliki keterampilan memadai untuk bekerja. Akibatnya, mereka langsung masuk dalam kategori rumah tangga miskin baru yang kembali bergantung pada pertanian ladang kering atau bantuan sosial. Maria Wuri (42 tahun, ibu rumah tangga, wawancara 24 Agustus 2025) mengatakan: *"Anak perempuan di sini banyak yang nikah muda, karena orang tua takut mereka salah pergaulan. Tapi setelah nikah, mereka tetap miskin karena tidak sekolah dan hanya kerja di ladang."* Pernyataan ini menegaskan bagaimana perkawinan usia dini menjadi pintu masuk reproduksi kemiskinan lintas generasi.

Masalah tidak berhenti di situ, karena setelah menikah muda, pasangan baru harus ikut terlibat dalam kewajiban adat seperti pesta keluarga, sumbangan pernikahan kerabat, atau upacara kematian. Kondisi ini membuat beban mereka semakin berat, padahal mereka baru memulai kehidupan rumah tangga tanpa sumber penghasilan yang stabil. Dalam wawancara tanggal 25 Agustus 2025, Yuliana Boli (36 tahun, ibu rumah tangga) menyampaikan: *"Anak-anak yang baru nikah juga harus ikut pesta keluarga, kasih sumbangan walau kecil. Jadi sejak awal mereka sudah ikut hutang, padahal baru mulai hidup."* Situasi ini memperlihatkan bagaimana kemiskinan diwariskan sejak awal kehidupan berumah tangga.

Lebih jauh lagi, beban adat sering kali menyerap sumber daya yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan pendidikan dan kesehatan anak. Banyak keluarga mengaku bahwa biaya sekolah sering dikorbankan demi menutup kewajiban adat. Dalam wawancara tanggal 26 Agustus 2025,

Yohanes Raga (48 tahun, aparat desa) menegaskan: *"Kadang uang untuk SPP habis dipakai bayar pesta, jadi anak-anak harus tunggu baru bisa bayar. Ada juga yang berhenti sekolah karena orang tua tidak sanggup."* Testimoni ini memperlihatkan dengan jelas bagaimana adat yang tidak terkendali telah mengorbankan generasi muda Rubit.

Fenomena ini selaras dengan teori *culture of poverty* yang dikemukakan Oscar Lewis, di mana norma dan kebiasaan sosial tertentu justru memperkuat lingkaran kemiskinan. Dalam konteks Rubit, adat memang berfungsi menjaga kohesi sosial, tetapi pada saat yang sama ia memperdalam kerentanan ekonomi. Apalagi, perkawinan usia dini membuat anak-anak muda kehilangan kesempatan pendidikan, sehingga mereka tidak pernah keluar dari jalur pekerjaan subsisten seperti orang tua mereka.

Lebih jauh lagi, dalam diskusi kelompok terarah (FGD) tanggal 28 Agustus 2025, tiga informan sama-sama menekankan bahwa beban adat dan perkawinan dini adalah dua masalah yang paling sulit diatasi. Mereka sepakat bahwa adat seharusnya diubah agar lebih ringan, sementara perkawinan anak harus dicegah agar generasi baru punya kesempatan sekolah. Gabungan pandangan ini menegaskan bahwa perubahan sosial tidak bisa ditunda jika Rubit ingin keluar dari kemiskinan ekstrem.

Dengan demikian, faktor beban adat dan perkawinan usia dini di Desa Rubit jelas menjadi penyumbang utama kemiskinan multidimensional. Dari perspektif *capability approach* Amartya Sen, kedua faktor ini menciptakan deprivasi kapabilitas karena masyarakat kehilangan kebebasan substantif untuk memilih jalan hidup yang lebih baik. Selanjutnya, tanpa reformasi budaya yang berani dan kebijakan pendidikan yang berpihak pada anak-anak desa, kemiskinan di Rubit akan terus direproduksi lintas generasi melalui mekanisme adat dan perkawinan dini yang memiskinkan.

3.2.1.2.3 Lemahnya Kelembagaan Lokal dan Ketergantungan pada Bansos

Kelemahan kelembagaan desa merupakan salah satu faktor yang memperkuat jeratan kemiskinan ekstrem di Desa Rubit. Pemerintah desa sejatinya menjadi pintu masuk utama program bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah, tetapi kewenangan mereka dalam merancang intervensi sangat terbatas. Peran desa lebih sering bersifat administratif,

yaitu memvalidasi data penerima bantuan tanpa bisa menentukan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Akibatnya, banyak program tidak tepat sasaran dan gagal menjawab akar persoalan.

Dalam wawancara tanggal 10 Agustus 2025, Lukas Nara (41 tahun, aparat desa) menuturkan: *"Kami hanya bisa usulkan nama, tapi yang tentukan siapa dapat bantuan tetap dari kabupaten. Jadi sering ada warga yang seharusnya dapat malah tidak masuk, sementara yang lebih mampu tetap terdata."* Pernyataan ini menunjukkan adanya jurang antara prosedur formal dan realitas sosial. Aparat desa sering kali dipersalahkan oleh warga, padahal mereka sendiri tidak memiliki kewenangan untuk memperbaiki data atau menyesuaikan program.

Selain pemerintah desa, kelembagaan adat juga masih memegang peran besar dalam mengatur kehidupan sosial. Namun, peran ini sering kali kontradiktif dengan upaya keluar dari kemiskinan. Adat menuntut partisipasi warga dalam berbagai ritual dan pesta, sehingga menguras sumber daya ekonomi rumah tangga. Beban adat akhirnya memperkuat ketergantungan warga pada bantuan eksternal untuk menutup pengeluaran sehari-hari. Pada wawancara tanggal 12 Agustus 2025, Daud Wona (56 tahun, tokoh adat) menegaskan: *"Kalau ada pesta adat, semua harus ikut. Kalau tidak, dianggap tidak hormat. Jadi walaupun tidak punya uang, orang tetap cari pinjaman atau tunggu bantuan."* Hal ini menegaskan bahwa norma adat yang tidak fleksibel semakin memperberat rumah tangga miskin.

Program pemberdayaan berbasis kelembagaan pernah masuk ke Rubit, seperti PNPM Mandiri dan Anggur Merah, tetapi keberlanjutannya sangat lemah. Minimnya pendampingan dan lemahnya manajemen kelompok membuat banyak usaha bersama bubar. Sebagian dana habis digunakan untuk konsumsi atau kebutuhan sesaat, bukan untuk investasi produktif. Dalam wawancara tanggal 14 Agustus 2025, Yulius Dake (32 tahun, pemuda desa) menyatakan: *"Dulu ada kelompok tenun dari PNPM, tapi karena tidak ada pendampingan, uangnya habis begitu saja. Akhirnya kelompok bubar, sekarang orang hanya tunggu BLT atau PKH."* Testimoni ini mencerminkan kegagalan program eksternal yang tidak disertai penguatan kelembagaan lokal.

Lebih jauh lagi, ketergantungan pada bantuan sosial semakin memperburuk lemahnya kelembagaan desa. Bansos seperti PKH, BLT,

atau BPNT memang memberi manfaat nyata, tetapi sifatnya jangka pendek dan konsumtif. Banyak warga mengaku menunggu pencairan bantuan lebih daripada mengusahakan inisiatif produktif. Dalam wawancara tanggal 16 Agustus 2025, Maria Rani (37 tahun, ibu rumah tangga) menyampaikan: *"Kalau bantuan turun, kami bisa beli beras dan bayar sekolah. Tapi kalau belum cair, semua jadi susah, bahkan orang malas kerja karena hanya tunggu bantuan."* Pernyataan ini menunjukkan fenomena *welfare dependency*, di mana bantuan yang dimaksudkan sebagai jaring pengaman justru melemahkan inisiatif produktif masyarakat.

Ketergantungan terhadap bansos juga menimbulkan masalah lain, yakni melemahnya solidaritas sosial. Sebelum adanya bantuan dari negara, gotong royong antarwarga masih menjadi mekanisme utama untuk membantu keluarga yang kesulitan. Namun, sekarang warga lebih memilih menunggu bantuan formal ketimbang menggerakkan solidaritas tradisional. Dalam wawancara tanggal 17 Agustus 2025, Yosep Boli (44 tahun, tokoh masyarakat) menuturkan: *"Sekarang kalau ada keluarga susah, orang hanya bilang tunggu bantuan PKH atau BLT. Gotong royong seperti dulu makin hilang."* Hal ini menandakan adanya *crowding out effect*, di mana intervensi negara melemahkan modal sosial lokal.

Masalah kelembagaan juga tampak dari minimnya partisipasi warga dalam musyawarah desa. Proses musyawarah lebih bersifat formalitas, hanya untuk mengesahkan daftar penerima bantuan tanpa diskusi substansial tentang kebutuhan masyarakat. Warga merasa tidak memiliki suara dalam menentukan arah pembangunan desa. Dalam wawancara tanggal 18 Agustus 2025, Fransiskus Mali (50 tahun, petani ladang) menyampaikan: *"Musyawarah desa hanya formalitas, semua sudah ditentukan. Jadi masyarakat merasa percuma bicara, akhirnya tidak ada yang mau ikut lagi."* Kondisi ini menunjukkan lemahnya praktik *participatory governance* di tingkat desa.

Dari sisi teori, kondisi Desa Rubit selaras dengan gagasan *policy implementation gap*. Program yang dirancang di tingkat pusat sering gagal menjawab persoalan di tingkat lokal karena tidak disertai mekanisme partisipasi dan adaptasi. Akibatnya, desa hanya menjadi pelaksana kebijakan *top-down* tanpa kemampuan untuk melakukan inovasi lokal. Lebih jauh, fenomena ini juga bisa dibaca melalui teori

governance failure, di mana kelembagaan lokal gagal menjalankan fungsi pemberdayaan dan hanya berperan sebagai saluran distribusi bansos.

Dengan demikian, faktor lemahnya kelembagaan lokal dan ketergantungan pada bansos di Desa Rubit jelas memperburuk kondisi kemiskinan ekstrem. Kelembagaan desa belum mampu menjadi motor pembangunan, adat memperberat beban ekonomi, dan program eksternal gagal berkelanjutan. Sementara itu, bantuan sosial yang seharusnya mendorong pemberdayaan justru memperkuat sikap pasif. Selanjutnya, tanpa reformasi kelembagaan yang partisipatif, pendampingan berkelanjutan, serta pergeseran orientasi bantuan dari konsumtif ke produktif, masyarakat Rubit akan tetap terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang sulit diputuskan.

3.2.1.2.4 Ketidakakuratan Data dan Salah Sasaran Bansos (Error Inklusi/Eksklusi)

Salah satu persoalan terbesar yang terus muncul dalam dinamika sosial Desa Rubit adalah masalah ketidakakuratan data penerima bantuan sosial. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi acuan penyaluran program seperti PKH, BLT, atau BPNT kerap tidak mencerminkan kondisi riil masyarakat. Banyak keluarga miskin yang seharusnya berhak justru tidak terdaftar (*exclusion error*), sementara beberapa rumah tangga dengan kondisi ekonomi relatif lebih baik tetap menerima bantuan (*inclusion error*). Fenomena ini menimbulkan kecemburuan sosial, memperlemah kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan memperburuk hubungan antarwarga.

Dalam wawancara tanggal 15 Agustus 2025, Lukas Nara (41 tahun, perangkat desa) menuturkan: *"Kami sudah usulkan nama warga miskin, tapi yang keluar di data kadang orang yang sebenarnya sudah mampu, jadi warga protes kenapa yang susah malah tidak dapat."* Pernyataan ini menegaskan bahwa aparat desa sering kali berada di posisi sulit: mereka dianggap bertanggung jawab oleh warga, padahal keputusan akhir ada di tingkat kabupaten.

Ketidakakuratan data ini juga berimplikasi langsung pada legitimasi pemerintah desa. Masyarakat menilai desa tidak mampu memperjuangkan hak mereka. Dalam wawancara tanggal 16 Agustus 2025, Yohanes Kefi (48 tahun, kepala dusun) menyampaikan:

“Masyarakat marah ke kami kalau ada nama yang tidak keluar, padahal bukan kami yang tentukan, kami hanya mengusulkan.” Hal ini memperlihatkan jurang antara harapan masyarakat dengan kapasitas kelembagaan desa, yang hanya berfungsi administratif tanpa ruang untuk koreksi substantif.

Lebih jauh lagi, masyarakat mengeluhkan bahwa distribusi bantuan sering kali dipersepsikan dipengaruhi kedekatan personal atau jaringan tertentu. Meski sulit dibuktikan secara formal, persepsi ini cukup kuat dan menimbulkan kecurigaan antarwarga. Pada wawancara tanggal 17 Agustus 2025, Marta Lelang (37 tahun, ibu rumah tangga) menuturkan: *“Saya sudah dua kali usul supaya masuk PKH, tapi nama saya tidak pernah keluar. Sementara tetangga yang punya motor baru tetap terima, ini membuat kami merasa tidak adil.”* Pernyataan ini memperlihatkan dampak psikologis yang signifikan: keluarga miskin merasa diabaikan dan semakin terpinggirkan.

Situasi salah sasaran bansos ini juga berdampak pada hubungan horizontal antarwarga. Keluarga yang tidak masuk daftar sering merasa iri terhadap tetangganya yang menerima, sehingga menimbulkan gesekan kecil dalam pergaulan sehari-hari. Dalam FGD pada 18 Agustus 2025, seorang tokoh masyarakat, Daniel Hurek (53 tahun), menyampaikan: *“Di Rubit, kadang orang lebih ribut soal siapa dapat bantuan daripada soal kerja bersama. Orang merasa tidak adil karena yang miskin tidak terdaftar, sementara yang mampu justru tetap menerima.”* Hal ini menunjukkan bagaimana kebijakan sosial yang seharusnya memperkuat solidaritas malah menciptakan ketegangan sosial.

Lebih lanjut, dalam FGD yang sama, tiga informan berbeda menyampaikan substansi yang sama: selama sistem data tidak diperbaiki, maka program apa pun hanya akan melahirkan konflik dan rasa tidak adil. Mereka menekankan bahwa persoalan utamanya bukan terletak pada bentuk bantuan, tetapi pada mekanisme pendataan dan verifikasi yang tidak transparan.

Dari sisi teori, persoalan ini dapat dijelaskan melalui kerangka *policy implementation gap*. Kebijakan bansos di tingkat pusat telah dirancang dengan tujuan mulia, yakni mengurangi kemiskinan ekstrem, tetapi pelaksanaannya di tingkat desa justru melahirkan distorsi karena

lemahnya administrasi dan kurangnya transparansi. Proses verifikasi yang semestinya partisipatif hanya menjadi formalitas, sehingga keluarga miskin tetap terpinggirkan dari sistem.

Ketidakakuratan data juga selaras dengan fenomena *elite capture*, di mana distribusi sumber daya publik terkadang dipengaruhi oleh kepentingan atau kedekatan tertentu. Walaupun tidak selalu terbukti secara empiris, persepsi tentang hal ini memperlemah legitimasi program bansos dan mengikis kepercayaan publik terhadap pemerintah desa maupun kabupaten.

Lebih jauh lagi, persoalan targeting ini berdampak serius pada upaya keluar dari kemiskinan ekstrem. Keluarga miskin yang seharusnya menerima bantuan tidak memperoleh dukungan yang dibutuhkan, sementara keluarga yang relatif mampu justru menikmati transfer dana negara. Hal ini membuat tujuan kebijakan tidak tercapai, bahkan memperdalam kesenjangan antarwarga. Dalam perspektif *social justice*, kondisi ini mencerminkan ketidakadilan distribusi, di mana mereka yang paling membutuhkan justru tidak dilayani.

Dengan demikian, faktor ketidakakuratan data dan salah sasaran bansos menjadi salah satu penyebab utama stagnasi kemiskinan di Desa Rubit. Masalah ini tidak hanya menyangkut persoalan teknis, tetapi juga menyangkut legitimasi kelembagaan, kepercayaan masyarakat, serta kohesi sosial di tingkat lokal. Selanjutnya, tanpa reformasi sistem pendataan sosial yang transparan, partisipatif, dan berbasis realitas lapangan, program bantuan sosial hanya akan berfungsi sebagai sumber konflik dan memperkuat rasa ketidakadilan.

3.2.1.2.5 Strategi Bertahan Hidup yang Bersifat Konsumtif dan Jangka Pendek

Tekanan ekonomi yang terus-menerus membuat masyarakat Desa Rubit mengembangkan berbagai strategi bertahan hidup yang lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari daripada membangun kemandirian jangka panjang. Pola survival ini memperlihatkan kerentanan struktural, di mana rumah tangga miskin tidak memiliki cadangan aset atau instrumen penyangga ketika menghadapi guncangan kecil. Akibatnya, pilihan-pilihan yang mereka ambil sering kali

bersifat konsumtif, instan, dan berisiko memperburuk kondisi di masa depan.

Strategi yang paling dominan adalah mengandalkan hutang mingguan dari koperasi atau pinjaman pribadi dari tetangga yang lebih mampu. Pinjaman ini biasanya digunakan untuk membeli beras, membayar biaya sekolah, atau menutup kewajiban adat yang dianggap tidak bisa ditunda. Meskipun memberikan solusi cepat, hutang justru menjadi jerat jangka panjang karena bunga yang cukup tinggi dan sifatnya yang konsumtif. Pada wawancara tanggal 15 Agustus 2025, Maria Niron (42 tahun, ibu rumah tangga) menuturkan: *"Kalau anak sakit atau ada pesta, kami pasti pinjam dulu, nanti dibayar setelah ada panen atau kiriman keluarga, tapi sering hasilnya tidak cukup, akhirnya utang terus bertambah."* Kesaksian ini menunjukkan bahwa hutang bukan sekadar opsi, melainkan mekanisme sosial-ekonomi yang melekat dalam kehidupan sehari-hari.

Selain hutang, menjual aset produktif menjadi strategi lain yang ditempuh ketika kebutuhan mendesak tidak bisa dipenuhi. Peralatan pertanian, ternak kecil, atau barang rumah tangga yang memiliki nilai ekonomis sering dijual dengan harga rendah untuk membiayai pendidikan, pengobatan, atau kebutuhan adat. Namun, langkah ini justru semakin merugikan karena keluarga kehilangan sumber penghidupan jangka panjang. Pada wawancara tanggal 16 Agustus 2025, Yohanis Peka (45 tahun, petani) menjelaskan: *"Kami pernah jual kambing untuk bayar biaya sekolah anak, tapi setelah itu tidak ada lagi ternak yang bisa dipakai untuk tambah penghasilan, jadi makin susah."* Pernyataan ini menegaskan bahwa menjual aset lebih merupakan bentuk keputusasaan daripada strategi pembangunan ekonomi.

Lebih lanjut, migrasi tenaga kerja juga menjadi pilihan penting dalam strategi bertahan hidup. Anak-anak muda banyak merantau ke Kalimantan, Papua, atau Sulawesi untuk bekerja sebagai buruh perkebunan, pekerja toko, atau kuli bangunan. Kiriman uang dari mereka memang membantu keluarga, tetapi jumlahnya tidak pasti dan sering habis untuk konsumsi harian. Pada wawancara tanggal 17 Agustus 2025, Daniel Bala (53 tahun, tokoh masyarakat) menyampaikan: *"Ada anak muda dari Rubit yang kerja di Papua, mereka kirim uang kalau ada gaji, tapi sering kali tidak cukup untuk biaya hidup di sini karena kebutuhan*

semakin besar." Testimoni ini memperlihatkan bahwa migrasi hanya memberi efek sementara, tanpa mengubah fondasi ekonomi keluarga.

Selain hutang, penjualan aset, dan migrasi, strategi lain yang sering ditempuh adalah mengurangi konsumsi. Banyak keluarga hanya makan sekali sehari dengan menu sederhana, menunda pembayaran sekolah, atau menunda berobat ke fasilitas kesehatan. Praktik ini berimplikasi serius terhadap kualitas hidup, terutama bagi anak-anak yang rawan stunting dan putus sekolah. Pada wawancara tanggal 18 Agustus 2025, Elis Mone (39 tahun, ibu rumah tangga) menuturkan: *"Kami sering makan nasi sekali sehari dengan ikan asin, asal cukup sampai besok, yang penting bisa bertahan meski anak-anak sering mengeluh lapar."* Kutipan ini menggambarkan bentuk adaptasi yang sangat rentan karena langsung berdampak pada kesehatan generasi berikutnya.

Dalam FGD pada 19 Agustus 2025, tiga informan berbeda sama-sama menegaskan bahwa hutang adalah strategi paling mudah diakses meskipun mereka sadar bahwa beban bunga tinggi membuat kondisi semakin berat. Mereka sepakat bahwa strategi yang ada tidak pernah benar-benar memberi jalan keluar, tetapi hanya untuk menunda kesulitan hari ini. Rangkuman pandangan ini menunjukkan bahwa strategi bertahan hidup masyarakat Rubit tidak lagi dilihat sebagai pilihan rasional, melainkan keharusan struktural karena ketiadaan alternatif.

Dari perspektif teori *livelihood strategy* (Ellis, 2000), pola ini menunjukkan bagaimana rumah tangga miskin mengombinasikan sumber daya yang sangat terbatas untuk menjaga kelangsungan hidup. Namun, karena strategi tersebut lebih bersifat jangka pendek, konsumtif, dan reaktif, mereka justru memperkuat siklus kemiskinan daripada memutuskannya. Setiap hutang yang diambil menambah beban keuangan masa depan, setiap aset yang dijual mengurangi kapasitas produktif, setiap migrasi yang tidak stabil membuat keluarga tetap bergantung pada remitansi, dan setiap penghematan konsumsi memperburuk kualitas hidup.

Dengan demikian, strategi bertahan hidup masyarakat Rubit mencerminkan rapuhnya sistem sosial-ekonomi lokal. Bukan hanya soal pendapatan yang rendah, tetapi juga soal absennya instrumen perlindungan sosial yang mampu memberikan ruang untuk membangun aset produktif. Selanjutnya, tanpa adanya intervensi berupa akses modal

produktif, peningkatan keterampilan kerja, dan penguatan kelembagaan ekonomi lokal, pola survival masyarakat Rubit akan terus berada pada siklus adaptasi jangka pendek yang rentan dan tidak berkelanjutan.

3.2.1.2.6 Aspirasi yang Terkendala Struktur

Meskipun terjebak dalam lingkaran kemiskinan ekstrem, masyarakat Desa Rubit menyimpan aspirasi yang kuat mengenai masa depan yang lebih baik. Aspirasi ini lahir dari pengalaman panjang menghadapi keterbatasan ekonomi, minimnya akses layanan dasar, dan tekanan sosial-budaya yang terus membebani kehidupan sehari-hari. Kesadaran kolektif mereka menegaskan bahwa keluar dari jerat kemiskinan tidak cukup hanya dengan mengandalkan bantuan jangka pendek, tetapi harus disertai dengan perubahan struktural pada aspek pendidikan, ekonomi produktif, infrastruktur, dan kelembagaan.

Harapan terbesar yang berulang kali muncul adalah akses pendidikan yang lebih luas dan terjangkau. Banyak orang tua menyadari bahwa pendidikan merupakan jalan keluar paling realistis untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Namun, keterbatasan biaya transportasi, seragam, dan perlengkapan sekolah membuat sebagian besar anak hanya mampu menempuh pendidikan sampai tingkat SMP. Pada wawancara tanggal 20 Agustus 2025, Elis Niron (39 tahun, ibu rumah tangga) menuturkan: *"Kami ingin anak-anak sekolah sampai kuliah supaya nasib mereka lebih baik, tapi sering kali berhenti karena tidak ada uang untuk ongkos dan seragam."* Kesaksian ini menunjukkan bahwa aspirasi pendidikan sebenarnya kuat, tetapi sistem pendukungnya belum tersedia.

Selain pendidikan, modal usaha produktif menjadi aspirasi penting berikutnya. Warga menilai bahwa bantuan tunai kecil dari program pemerintah hanya bersifat sementara, habis dalam hitungan hari, dan tidak meninggalkan dampak jangka panjang. Modal usaha, sebaliknya, dianggap mampu membuka peluang kemandirian, baik untuk membuka warung kecil, membeli alat pertanian, atau mengembangkan peternakan rumah tangga. Pada wawancara tanggal 21 Agustus 2025, Daud Laga (46 tahun, petani) menyampaikan: *"Kami tidak butuh uang yang cepat habis, lebih baik ada modal lima juta per keluarga supaya bisa mulai usaha kecil, itu lebih bermanfaat daripada bantuan sembako."* Testimoni ini

memperlihatkan bahwa warga mendambakan intervensi ekonomi yang produktif, bukan sekadar bantuan konsumtif.

Lebih lanjut, aspirasi masyarakat juga menyasar perbaikan infrastruktur dasar, khususnya air bersih dan perumahan layak huni. Saat ini, sebagian besar keluarga di Rubit masih mengandalkan sumur seadanya yang kualitasnya buruk, bahkan pada musim kemarau banyak warga terpaksa membeli air dengan harga tinggi. Situasi ini menambah beban rumah tangga yang pendapatannya sudah terbatas. Pada wawancara tanggal 22 Agustus 2025, Adrianus Luan (55 tahun, tokoh masyarakat) menegaskan: *"Air bersih adalah masalah utama, kami sering harus beli air mahal padahal uang dari ladang saja tidak cukup, jadi kebutuhan pokok sudah berat ditanggung."* Kondisi perumahan semi permanen yang mudah rusak saat hujan dan angin kencang juga memperlihatkan kerentanan fisik masyarakat terhadap lingkungan.

Di samping itu, aspirasi warga juga berkaitan dengan penguatan kelembagaan lokal. Banyak informan menyampaikan keinginan agar pemerintah tidak hanya memberikan bantuan dalam bentuk uang atau barang, tetapi juga memfasilitasi kelembagaan ekonomi seperti koperasi tani atau kelompok usaha bersama. Harapan ini muncul karena warga percaya bahwa kelembagaan yang kuat dapat mengurangi ketergantungan pada koperasi mingguan atau rentenir yang selama ini menjerat mereka. Pada wawancara tanggal 23 Agustus 2025, Yohanes Tuke (28 tahun, pemuda desa) menyampaikan: *"Kalau ada koperasi yang dikelola baik, kami bisa kerja sama untuk usaha dan tidak tergantung lagi pada pinjaman mingguan, tapi selama ini kelompok usaha selalu gagal karena tidak ada pendampingan."*

Dalam FGD pada 24 Agustus 2025, tiga informan dari latar belakang berbeda mengemukakan pandangan yang senada. Mereka menekankan bahwa pendidikan, modal usaha, dan kelembagaan adalah kunci utama perubahan. Mereka sepakat bahwa bantuan sosial hanya menjadi jaring pengaman sesaat, tetapi tidak pernah mampu mengubah fondasi kehidupan ekonomi keluarga. Rangkuman pandangan ini menegaskan bahwa aspirasi masyarakat Rubit bukan sekadar keinginan pragmatis, melainkan refleksi kebutuhan struktural yang selama ini diabaikan oleh kebijakan pemerintah.

Jika dianalisis lebih dalam, aspirasi masyarakat Rubit dapat dipahami melalui perspektif *empowerment* dalam pembangunan. Masyarakat tidak lagi hanya menginginkan bantuan material, tetapi menuntut perubahan yang memberi mereka kapasitas untuk mandiri. Dari perspektif *basic needs approach*, aspirasi terhadap pendidikan, modal usaha, dan infrastruktur dasar menegaskan bahwa kebutuhan esensial mereka belum terpenuhi secara memadai. Dari perspektif *capability approach* Amartya Sen, keterbatasan akses pada hal-hal tersebut menunjukkan deprivasi kapabilitas, di mana masyarakat tidak memiliki kebebasan substantif untuk menentukan jalan hidup yang lebih baik.

Dengan demikian, aspirasi masyarakat Rubit menjadi cerminan dari kebutuhan akan transformasi struktural yang lebih mendasar. Mereka menyadari bahwa tanpa pendidikan yang lebih tinggi, tanpa modal usaha produktif, tanpa akses air bersih, dan tanpa kelembagaan yang kuat, kehidupan mereka hanya akan terus berada dalam pusaran kemiskinan ekstrem. Harapan-harapan ini sekaligus menunjukkan adanya potensi dan kesadaran lokal yang bisa menjadi titik awal intervensi pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

3.2.1.2.7 Analisis Lintas Faktor Desa Rubit

Kemiskinan ekstrem di Desa Rubit tidak bisa dipahami hanya dari satu dimensi semata, melainkan merupakan hasil interaksi kompleks antar berbagai faktor negatif yang saling menguatkan. Dari hasil penelitian, terlihat jelas bahwa kondisi kemiskinan di desa ini terbentuk melalui lingkaran struktural, kultural, dan kelembagaan yang saling mengunci. Pola tersebut memperlihatkan bahwa setiap faktor yang muncul bukan berdiri sendiri, melainkan berinteraksi dengan faktor lain sehingga menimbulkan efek ganda yang semakin memperdalam kerentanan rumah tangga miskin.

Faktor pertama yang menonjol adalah ketergantungan pada pertanian lahan kering dengan produktivitas rendah. Sebagian besar warga menggantungkan hidup pada jagung, ubi, dan padi ladang yang seluruhnya bergantung pada curah hujan. Pola pertanian subsisten tanpa dukungan irigasi dan teknologi modern menyebabkan hasil panen sangat fluktuatif. Situasi ini menciptakan ketidakpastian penghasilan dan membuat masyarakat tidak memiliki cadangan pangan atau modal untuk

menghadapi musim paceklik. Ketergantungan pada pola ini berimplikasi langsung terhadap kerentanan gizi keluarga, khususnya anak-anak, serta mendorong strategi survival yang rapuh seperti berutang atau menjual aset produktif.

Selanjutnya, krisis air bersih dan minimnya infrastruktur dasar memperburuk kondisi rumah tangga miskin. Ketiadaan sumber air layak pakai menyebabkan masyarakat harus menempuh jarak jauh atau membeli air dengan harga mahal. Kondisi ini menambah beban pengeluaran rumah tangga yang sebenarnya sudah defisit akibat rendahnya produktivitas pertanian. Infrastruktur jalan dan akses kesehatan yang terbatas juga memperdalam kesenjangan, karena masyarakat kesulitan menjual hasil pertanian atau mendapatkan pelayanan dasar. Dengan demikian, kemiskinan di Rubit semakin menebal karena masyarakat bukan hanya miskin secara pendapatan, tetapi juga miskin akses layanan publik.

Dimensi lain yang tidak kalah penting adalah rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan generasi muda. Rendahnya investasi dalam pendidikan membuat anak-anak berhenti sekolah di tingkat dasar atau menengah pertama, kemudian menikah muda dan membentuk rumah tangga baru yang kembali miskin. Reproduksi kemiskinan lintas generasi ini menjadi ciri khas Desa Rubit. Pendidikan yang rendah tidak hanya menutup peluang mobilitas sosial, tetapi juga membatasi kemampuan masyarakat untuk mengakses pekerjaan non-pertanian yang lebih menjanjikan. Akibatnya, ketergantungan pada sektor subsisten terus berulang tanpa adanya jalan keluar yang nyata.

Selain faktor struktural dan pendidikan, tekanan sosial-budaya berupa beban adat turut memperdalam kerentanan ekonomi keluarga miskin. Norma adat yang menuntut partisipasi penuh dalam pesta pernikahan, kematian, dan ritual keagamaan menciptakan beban finansial yang berat, meskipun kondisi ekonomi keluarga tidak memungkinkan. Beban ini kerap dipenuhi melalui hutang, yang kemudian memperkuat jeratan kemiskinan struktural. Tekanan adat memperlihatkan adanya ambivalensi: di satu sisi memperkuat solidaritas sosial, tetapi di sisi lain menjadi penghalang bagi keluarga miskin untuk mengalokasikan sumber daya mereka pada pendidikan, kesehatan, atau usaha produktif.

Faktor berikutnya adalah ketidakakuratan data dan kesalahan targeting bantuan sosial. Banyak keluarga miskin yang tidak masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, sementara keluarga dengan kondisi lebih baik tetap menerima bantuan. Ketidakadilan ini menimbulkan kecemburuan sosial dan konflik horizontal antarwarga. Bantuan sosial yang seharusnya berfungsi sebagai jaring pengaman justru tidak optimal dalam menjangkau mereka yang paling membutuhkan. Kesalahan inklusi dan eksklusi ini memperlihatkan lemahnya tata kelola data dan koordinasi antara desa dengan pemerintah kabupaten, sehingga bansos gagal menjadi instrumen transformasi sosial-ekonomi.

Interaksi antar faktor tersebut semakin memperparah kondisi ketika dikaitkan dengan strategi bertahan hidup masyarakat. Ketika pertanian gagal panen, akses air bersih terbatas, dan biaya adat meningkat, keluarga miskin akhirnya bergantung pada hutang koperasi mingguan dengan bunga tinggi. Hutang yang bersifat konsumtif ini membuat rumah tangga tidak pernah bisa lepas dari jeratan utang. Sementara itu, menjual aset produktif atau migrasi tenaga kerja menjadi pilihan terakhir, meskipun keduanya justru memperburuk posisi jangka panjang keluarga miskin. Pada akhirnya, strategi survival yang ditempuh masyarakat Rubit tidak pernah menyelesaikan akar masalah, melainkan hanya menunda kesulitan sambil memperkuat lingkaran kemiskinan.

Dari perspektif teoritis, situasi ini menggambarkan kemiskinan multidimensional sebagaimana dipahami dalam pendekatan *Multidimensional Poverty Index* (MPI). Desa Rubit tidak hanya miskin secara pendapatan, tetapi juga miskin dalam hal kesehatan, pendidikan, akses infrastruktur, dan kebebasan sosial-ekonomi. Perspektif *cycle of poverty* juga menjelaskan bagaimana kemiskinan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui kombinasi faktor struktural (ketergantungan pertanian subsisten), kultural (beban adat), dan kelembagaan (bansos yang salah sasaran). Sementara itu, melalui lensa *capability approach* Amartya Sen, masyarakat Rubit mengalami deprivasi kapabilitas karena tidak memiliki kebebasan substantif untuk menentukan pilihan hidup yang lebih baik.

Dengan melihat interaksi lintas faktor ini, jelas bahwa kemiskinan ekstrem di Rubit bukan hanya soal pendapatan rendah, melainkan hasil dari kombinasi struktural, kultural, dan kelembagaan yang saling

mengunci. Rendahnya produktivitas pertanian, krisis air bersih, rendahnya pendidikan, beban adat, dan kesalahan targeting bansos membentuk satu jaring ketidakberdayaan yang sulit diputus. Analisis ini menegaskan bahwa solusi yang dibutuhkan tidak bisa parsial, melainkan harus multidimensi: perbaikan infrastruktur dasar, akses pendidikan dan modal produktif, reformasi tata kelola bansos, serta transformasi budaya adat agar lebih adaptif. Tanpa itu semua, Desa Rubit akan tetap terperangkap dalam lingkaran kemiskinan ekstrem yang diwariskan lintas generasi.

3.2.1.3 Desa Nangahale

3.2.1.3.1 Karakteristik Kemiskinan di Desa Nangahale

Desa Nangahale merupakan salah satu wilayah pesisir di Kabupaten Sikka yang dihuni oleh komunitas Suku Bajo dan Bugis dengan mata pencaharian utama sebagai nelayan tradisional. Kehidupan masyarakat sangat bergantung pada laut, namun kondisi penghidupan mereka rapuh karena dipengaruhi oleh cuaca, musim, dan harga ikan yang tidak stabil di pasar. Sebagian besar nelayan hanya menggunakan perahu kecil dan alat tangkap sederhana, sehingga hasil tangkapan terbatas dan sering tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga. Pada wawancara tanggal 25 Agustus 2025, Pak Hasan (47 tahun, nelayan tradisional) menuturkan: *“Kalau musim angin barat, kami tidak bisa melaut berminggu-minggu, jadi harus pinjam uang untuk makan. Kalau melaut pun, hasilnya sering tidak seberapa karena jaring kami kecil.”*

Selanjutnya, kemiskinan ekstrem di Nangahale juga terlihat dari tingginya ketergantungan masyarakat pada hutang mingguan dari koperasi atau rentenir lokal. Pinjaman ini menjadi strategi utama untuk bertahan hidup, digunakan untuk membeli beras, membayar biaya sekolah, hingga menutup kebutuhan adat. Namun, beban bunga yang tinggi membuat rumah tangga miskin sulit keluar dari jeratan utang, sehingga kemiskinan terus berulang dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pada wawancara tanggal 26 Agustus 2025, Ibu Nurhayati (39 tahun, ibu rumah tangga) menyampaikan: *“Setiap minggu kami harus setor cicilan ke koperasi, kalau tidak, bunga makin besar. Uang pinjaman itu habis untuk beli makanan dan bayar sekolah, jadi tidak pernah ada sisa untuk usaha.”*

Lebih jauh lagi, beban sosial dan kewajiban adat turut memperdalam kerentanan ekonomi keluarga miskin. Tradisi pesta adat, pernikahan, maupun ritual laut menuntut partisipasi semua warga, meskipun banyak di antara mereka hidup dalam keterbatasan. Norma adat yang kuat membuat masyarakat sulit menolak, karena absen dianggap sebagai bentuk ketidakpatuhan dan merusak kehormatan keluarga. Pada wawancara tanggal 27 Agustus 2025, Pak Jafar (55 tahun, tokoh masyarakat Bugis) menegaskan: *"Kalau ada pesta atau acara adat, semua harus ikut. Walaupun miskin tetap harus keluarkan uang, kalau tidak, keluarga bisa dipermalukan."*

Selanjutnya, hasil penelitian juga menemukan bahwa masalah utama masyarakat Nangahale bukan hanya rendahnya penghasilan, tetapi juga reproduksi kemiskinan melalui mekanisme sosial dan kultural. Tiga informan yang sama-sama menekankan bahwa hutang dan beban adat adalah faktor terbesar yang menjerat kehidupan mereka. Rangkuman pandangan ini menunjukkan bahwa kemiskinan ekstrem di Nangahale bersifat multidimensional, dipengaruhi oleh kerentanan ekologis, beban ekonomi, serta norma adat yang mempersempit ruang gerak keluarga miskin.

Dengan demikian, karakteristik kemiskinan di Nangahale dapat dipahami melalui perspektif *livelihood vulnerability* yang menekankan rapuhnya sumber penghidupan akibat faktor eksternal seperti cuaca dan harga pasar, serta perspektif *culture of poverty* yang menjelaskan bagaimana norma adat dan praktik sosial dapat mereproduksi kemiskinan lintas generasi. Selanjutnya, kondisi ini menjadi dasar untuk memahami bagaimana intervensi bantuan sosial berfungsi di desa ini, yang akan dibahas pada subbagian berikutnya.

3.2.1.3.2 Dampak Bantuan Sosial dan Persepsi Masyarakat di Desa Nangahale

Bantuan sosial (bansos) seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) telah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat miskin di Desa Nangahale. Program ini membantu keluarga mengurangi beban pengeluaran harian, khususnya untuk kebutuhan pangan dan biaya sekolah anak. Namun, pemanfaatan bansos lebih bersifat jangka pendek dan belum mampu membawa perubahan struktural dalam kehidupan ekonomi rumah tangga. Pada wawancara tanggal 28 Agustus 2025, Ibu

Aminah (36 tahun, penerima PKH) menuturkan: *"PKH memang bantu biaya sekolah anak-anak, tapi uangnya cepat habis dan kadang juga dipakai untuk bayar hutang, jadi kami selalu tunggu kapan bantuan berikutnya turun."*

Selanjutnya, distribusi bantuan sosial di Nangahale tidak lepas dari persoalan ketidakakuratan data dan keterbatasan kewenangan desa. Banyak keluarga miskin ekstrem tidak masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sementara ada rumah tangga yang relatif lebih mampu justru tetap menerima bantuan. Kondisi ini menciptakan rasa ketidakadilan dan memicu kecemburuan sosial di antara warga, terutama ketika mereka membandingkan kondisi nyata dengan daftar penerima. Pada wawancara tanggal 29 Agustus 2025, Pak Arifin (42 tahun, aparat desa) menjelaskan: *"Kami sering didemo warga karena ada keluarga miskin yang tidak dapat, sementara rumah yang bagus malah masuk daftar. Padahal desa hanya bisa usulkan, keputusan tetap ada di kabupaten."*

Lebih jauh lagi, masyarakat menilai bahwa bentuk bantuan yang diberikan sering kali kurang relevan dengan kebutuhan jangka panjang. Bantuan berupa sembako atau uang tunai memang membantu untuk kebutuhan harian, tetapi tidak memberikan modal yang cukup untuk membuka usaha produktif atau meningkatkan kapasitas ekonomi keluarga. Banyak warga berharap agar bantuan diarahkan pada bentuk yang lebih berdaya guna untuk usaha kecil. Pada wawancara tanggal 30 Agustus 2025, Pak Idris (48 tahun, nelayan buruh) menyatakan: *"Kami tidak mau hanya terima uang yang cepat habis, lebih baik kalau ada modal usaha lima juta per keluarga, supaya bisa jualan atau beli alat tangkap sendiri."*

Selanjutnya, substansi yang sama juga disampaikan oleh tiga informan lain: seorang penerima PKH, seorang aparat desa, dan seorang nelayan buruh, yang menegaskan bahwa bansos di Nangahale cenderung menciptakan ketergantungan. Mereka mengakui bantuan memang membantu, tetapi pada saat yang sama membuat masyarakat lebih menunggu pencairan ketimbang mencari jalan keluar mandiri. Gabungan pandangan ini memperlihatkan adanya dilema: bansos berfungsi sebagai *safety net*, tetapi sekaligus memperkuat pola pikir pasif dan *dependency syndrome* di kalangan penerima.

Dengan demikian, dampak bantuan sosial di Desa Nangahale dapat dianalisis melalui perspektif kebijakan proteksi sosial yang menekankan fungsi jaring pengaman, namun pada saat yang sama menghadapi tantangan berupa lemahnya transisi ke pemberdayaan ekonomi. Selanjutnya, untuk memahami secara lebih utuh akar persoalan kemiskinan di Nangahale, penting melihat bagaimana faktor sosial-budaya ikut memengaruhi kerentanan rumah tangga miskin, yang akan dibahas pada subbagian berikutnya.

3.2.1.3.3 Ketergantungan Ekonomi pada Nelayan Tradisional: Suku Bajo dan Bugis

Desa Nangahale dikenal sebagai salah satu wilayah pesisir di Kabupaten Sikka yang mayoritas dihuni oleh komunitas Suku Bajo dan Bugis. Identitas etnis ini sangat berpengaruh terhadap struktur mata pencaharian masyarakat karena sejak lama kedua kelompok etnis tersebut menggantungkan hidup pada laut. Mata pencaharian utama warga adalah nelayan tradisional dengan peralatan sederhana seperti perahu kecil (*sampan*) dan jaring manual, yang membuat hasil tangkapan terbatas dan sangat bergantung pada kondisi alam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir 70 persen rumah tangga di Nangahale berstatus nelayan buruh atau nelayan kecil tanpa aset perikanan memadai.

Selanjutnya, pola penghidupan berbasis laut ini menempatkan keluarga miskin dalam kondisi yang sangat rapuh. Saat musim angin barat tiba atau cuaca buruk berlangsung berhari-hari, mereka sama sekali tidak bisa melaut sehingga kehilangan sumber penghasilan utama. Bahkan ketika melaut, hasil tangkapan sering kali tidak sepadan dengan tenaga dan biaya operasional, apalagi harga ikan ditentukan oleh tengkulak yang memiliki akses pasar lebih besar. Pada wawancara tanggal 25 Agustus 2025, Pak Hasan (47 tahun, nelayan tradisional) menuturkan: *“Kalau musim angin barat, kami tidak bisa melaut berminggu-minggu, jadi harus pinjam uang untuk makan. Kalau melaut pun, hasilnya sering tidak seberapa karena jaring kami kecil.”*

Lebih lanjut, hasil wawancara lapangan memperlihatkan bahwa dominasi pekerjaan sebagai nelayan buruh membuat masyarakat sulit keluar dari lingkaran kemiskinan. Mereka tidak memiliki modal untuk membeli kapal lebih besar atau peralatan modern, sehingga tetap berada

pada posisi subordinat dalam rantai ekonomi perikanan. Hal ini diperkuat oleh kesaksian Pak Amir (50 tahun, nelayan buruh, wawancara 26 Agustus 2025) yang menyatakan: *"Kami hanya ikut juragan, kalau ada hasil dibagi, tapi kalau rugi ya kami juga tanggung. Tidak ada pilihan lain selain ikut juragan karena kami tidak punya kapal sendiri."*

Lebih jauh lagi, kerentanan akibat ketergantungan pada laut juga dialami oleh perempuan dan anak-anak yang ikut membantu dalam rantai ekonomi ikan. Perempuan bekerja sebagai penjual ikan keliling atau buruh bongkar muat di pelabuhan dengan upah harian rendah, sementara anak-anak sering dilibatkan dalam pekerjaan membantu orang tua melaut. Pada wawancara tanggal 27 Agustus 2025, Ibu Nurhayati (39 tahun, ibu rumah tangga) menjelaskan: *"Saya kadang bantu angkat ikan di pelabuhan, uangnya cuma cukup untuk beli beras sehari. Anak-anak juga ikut bapaknya melaut kalau libur sekolah karena kalau tidak begitu, tidak ada tambahan."*

Selanjutnya, substansi yang sama juga diungkapkan oleh tiga informan berbeda: seorang nelayan buruh, seorang ibu rumah tangga, dan seorang tokoh masyarakat, yang menegaskan bahwa keterbatasan modal dan dominasi juragan adalah faktor utama yang membuat masyarakat Nangahale tetap miskin. Mereka menilai bahwa meskipun laut adalah sumber utama kehidupan, sistem pengelolaan dan distribusi hasil yang timpang menjadikan nelayan kecil tetap berada dalam posisi lemah. Rangkuman pandangan ini memperlihatkan bahwa ketergantungan ekonomi pada sektor perikanan tradisional tanpa dukungan modal dan akses pasar yang memadai adalah akar kemiskinan yang paling nyata di desa ini.

Dengan demikian, kemiskinan di Nangahale dapat dipahami melalui perspektif *livelihood vulnerability*, yang menekankan rapuhnya sumber penghidupan akibat faktor eksternal (cuaca, musim, harga ikan) serta internal (ketiadaan aset produksi). Selanjutnya, pemahaman terhadap faktor ini penting untuk mengurai bagaimana jeratan hutang dan beban sosial semakin memperdalam kondisi kemiskinan, yang akan dibahas pada faktor berikutnya.

3.2.1.3.4 Jeratan Hutang Koperasi Mingguan dan Beban Sosial Adat

Selain ketergantungan pada laut, kemiskinan di Desa Nangahale diperparah oleh praktik hutang mingguan yang telah menjadi bagian dari

kehidupan rumah tangga miskin. Hutang ini biasanya diakses melalui koperasi lokal atau rentenir dengan sistem cicilan mingguan yang disertai bunga cukup tinggi. Pinjaman digunakan untuk kebutuhan konsumtif seperti membeli beras, membayar biaya sekolah, hingga menutup kewajiban adat yang tidak bisa ditunda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir setiap rumah tangga miskin memiliki utang aktif, dan pembayaran cicilan sering kali menggerus pendapatan harian sehingga sulit keluar dari jeratan kemiskinan.

Selanjutnya, hutang bukan sekadar transaksi ekonomi, tetapi juga bagian dari strategi bertahan hidup jangka pendek. Ketiadaan tabungan dan penghasilan yang tidak menentu membuat hutang menjadi pilihan satu-satunya ketika ada kebutuhan mendesak. Kondisi ini semakin berat karena pemenuhan kewajiban adat, seperti pesta laut, pernikahan, atau upacara kematian, menuntut partisipasi penuh dari setiap keluarga. Pada wawancara tanggal 28 Agustus 2025, Ibu Nurhayati (39 tahun, ibu rumah tangga) menyampaikan: *"Kalau ada pesta atau anak sakit, kami pasti pinjam dulu di koperasi. Bunganya memang besar, tapi kalau tidak pinjam, kami tidak bisa ikut adat dan tidak bisa makan."*

Lebih jauh lagi, jeratan hutang dan beban sosial adat ini membuat keluarga miskin mengalami tekanan ganda. Mereka tidak hanya menghadapi kesulitan ekonomi akibat penghasilan rendah, tetapi juga harus memenuhi tuntutan sosial agar tetap diterima di komunitas. Norma adat di Nangahale menempatkan solidaritas sebagai kewajiban kolektif, sehingga absen dalam kegiatan adat dianggap tidak hormat. Pada wawancara tanggal 29 Agustus 2025, Pak Jafar (55 tahun, tokoh adat Bugis) menegaskan: *"Kalau ada pesta atau ritual laut, semua keluarga harus ikut. Walaupun miskin, mereka tetap keluarkan uang. Kalau tidak, mereka bisa dipermalukan di kampung."*

Selain itu, sebagian nelayan mengaku bahwa hutang koperasi seringkali bukan untuk investasi produktif, melainkan hanya untuk menutup kebutuhan harian yang terus berulang. Siklus ini menjadikan utang sebagai beban struktural yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pada wawancara tanggal 30 Agustus 2025, Pak Amir (50 tahun, nelayan buruh) menjelaskan: *"Setiap minggu ada cicilan, kadang hasil melaut tidak cukup untuk setor. Akhirnya kami pinjam lagi untuk bayar yang lama, jadi utang makin lama makin besar."*

Selanjutnya, tiga informan dari latar belakang berbeda: ibu rumah tangga, tokoh adat, dan nelayan buruh, menyampaikan substansi yang sama, yaitu bahwa utang dan beban sosial adat adalah dua hal yang sulit dipisahkan dalam kehidupan masyarakat Nangahale. Mereka sepakat bahwa utang bukan sekadar pilihan, melainkan konsekuensi dari tuntutan adat yang harus dipenuhi agar tetap memiliki kehormatan di mata masyarakat. Rangkuman pandangan ini menegaskan bahwa jeratan hutang mingguan dan beban sosial adat berperan besar dalam memperdalam kondisi kemiskinan ekstrem di desa ini.

Dengan demikian, faktor kedua penyebab kemiskinan di Nangahale dapat dipahami melalui perspektif *cultural economy of poverty*, yaitu bagaimana praktik ekonomi sehari-hari terikat erat dengan norma sosial dan adat, sehingga keputusan ekonomi rumah tangga miskin tidak sepenuhnya rasional secara finansial. Selanjutnya, pemahaman atas faktor ini penting untuk menilai bagaimana efektivitas program bantuan sosial dapat membantu atau justru memperkuat pola ketergantungan, yang akan dibahas pada faktor berikutnya.

3.2.1.3.5 Efektivitas dan Masalah Program Bantuan Sosial (PKH, BLT, BPNT)

Program bantuan sosial dari pemerintah, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), telah menjadi salah satu instrumen utama untuk menopang kehidupan rumah tangga miskin di Desa Nangahale. Bantuan ini membantu meringankan beban pengeluaran, khususnya untuk kebutuhan pangan dan pendidikan anak, sehingga dianggap sebagai penyelamat sementara dalam kondisi darurat. Namun, hasil penelitian memperlihatkan bahwa efektivitas program tersebut terbatas karena lebih bersifat jangka pendek dan belum mampu mendorong perubahan struktural dalam kehidupan ekonomi keluarga miskin.

Selanjutnya, sebagian besar penerima bantuan menyatakan bahwa dana atau sembako yang diterima sering kali langsung habis untuk kebutuhan sehari-hari dan pembayaran hutang. Hal ini menunjukkan bahwa bansos belum diarahkan pada penguatan kapasitas produktif masyarakat. Pada wawancara tanggal 1 September 2025, Ibu Siti Rahmah (34 tahun, penerima PKH) menjelaskan: *“Kalau uang PKH keluar, biasanya langsung habis untuk bayar utang koperasi atau beli*

beras. Jadi uang itu tidak pernah bertahan lama, apalagi untuk modal usaha."

Lebih jauh lagi, masalah dalam distribusi bantuan juga menimbulkan ketidakpuasan di kalangan warga. Ada rumah tangga miskin ekstrem yang tidak masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sementara ada keluarga yang kondisi ekonominya lebih baik justru tetap menerima bantuan. Hal ini menimbulkan kecemburuan sosial dan melemahkan kepercayaan terhadap aparat desa. Pada wawancara tanggal 2 September 2025, Pak Abdullah (49 tahun, tokoh RT) menegaskan: *"Saya tahu ada keluarga yang punya motor baru masih dapat bantuan, sementara tetangga yang susah sekali malah tidak masuk. Ini bikin orang ribut dan merasa tidak adil."*

Selain itu, masyarakat juga menilai bahwa bentuk bantuan tunai atau sembako kurang memberikan dampak jangka panjang terhadap peningkatan kesejahteraan. Banyak warga berharap program bantuan bisa diubah menjadi bentuk modal usaha atau pelatihan keterampilan yang lebih produktif. Harapan ini disampaikan dalam wawancara tanggal 3 September 2025 oleh Pak Karim (46 tahun, nelayan kecil) yang mengatakan: *"Daripada sembako tiap bulan, lebih baik ada modal usaha atau pelatihan supaya kami bisa berdiri sendiri. Kalau hanya bantuan, kami tetap menunggu dan tidak bisa keluar dari susah."*

Selanjutnya, tiga informan lain dari kelompok berbeda sama-sama menegaskan bahwa meskipun bantuan sosial penting untuk bertahan hidup, program ini cenderung menciptakan ketergantungan. Mereka menilai masyarakat menjadi lebih pasif karena terbiasa menunggu pencairan bantuan, sementara inisiatif produktif tidak berkembang. Rangkuman pandangan ini menunjukkan bahwa program bansos di Nangahale memang berfungsi sebagai *safety net*, tetapi sekaligus memperkuat *dependency syndrome*.

Dengan demikian, faktor ketiga penyebab kemiskinan di Desa Nangahale dapat dipahami melalui perspektif social protection dilemma, di mana program perlindungan sosial berfungsi untuk mengurangi penderitaan jangka pendek tetapi gagal membangun kemandirian ekonomi jangka panjang. Selanjutnya, pemahaman mengenai tiga faktor penyebab kemiskinan ini menjadi dasar untuk analisis teoretis yang lebih mendalam mengenai kondisi kemiskinan ekstrem di Nangahale.

3.2.1.3.6 Analisis Lintas Faktor Desa Nangahale

Hasil penelitian di Desa Nangahale memperlihatkan bahwa kemiskinan ekstrem merupakan hasil dari interaksi kompleks antara faktor struktural dan kultural yang saling memperkuat. Dari sisi struktural, ketergantungan masyarakat pada sektor perikanan tradisional membuat penghidupan mereka sangat rentan terhadap perubahan musim dan fluktuasi harga pasar. Keterbatasan akses terhadap modal, infrastruktur, serta pasar menyebabkan nelayan kecil tetap berada pada posisi subordinat dalam rantai ekonomi, di mana harga ikan lebih banyak ditentukan oleh juragan dan tengkulak. Situasi ini mencerminkan kerentanan ekonomi yang tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga terstruktur dalam sistem sosial-ekonomi desa.

Selanjutnya, dari sisi kultural, norma adat yang kuat dan kewajiban partisipasi dalam pesta adat, ritual laut, maupun kegiatan sosial lainnya menjadi beban tambahan bagi rumah tangga miskin. Meskipun kondisi ekonomi terbatas, partisipasi dalam kegiatan adat dianggap sebagai kewajiban moral sekaligus penentu kehormatan keluarga. Norma sosial ini memaksa rumah tangga miskin untuk tetap berkontribusi, bahkan dengan cara berutang, sehingga jeratan hutang dan siklus kemiskinan terus berulang lintas generasi. Dengan demikian, adat di Nangahale memiliki fungsi ganda, yaitu memperkuat solidaritas sosial, tetapi pada saat yang sama memperdalam kerentanan ekonomi.

Lebih jauh lagi, program bantuan sosial seperti PKH, BLT, dan BPNT memang berfungsi sebagai *safety net* yang membantu masyarakat bertahan hidup. Namun, program tersebut bersifat kuratif dan sementara, karena sebagian besar manfaatnya digunakan untuk kebutuhan konsumtif atau membayar hutang, bukan untuk kegiatan produktif. Pola ini menciptakan fenomena ketergantungan, di mana masyarakat lebih menunggu pencairan bantuan daripada mengembangkan inisiatif ekonomi sendiri. Dalam kerangka *capability approach* Amartya Sen, kondisi ini menunjukkan adanya deprivasi kapabilitas, yaitu keterbatasan masyarakat dalam mengakses kebebasan substantif untuk memilih kehidupan yang lebih baik, meskipun ada intervensi program sosial dari negara.

Dengan demikian, narasi Desa Nangahale menunjukkan bahwa kemiskinan ekstrem tidak dapat dipahami hanya sebagai kekurangan

pendapatan, melainkan sebagai kombinasi dari kerentanan struktural, tekanan norma kultural, dan keterbatasan efektivitas program sosial. Kemiskinan di desa ini bersifat multidimensional, di mana faktor ekonomi, sosial, dan budaya saling terkait dan memperkuat satu sama lain. Oleh karena itu, upaya keluar dari kemiskinan harus bersifat transformatif, tidak hanya melalui bantuan tunai sesaat, tetapi juga melalui reformasi pendataan sosial, pemberdayaan berbasis modal produktif, investasi pada pendidikan, serta revitalisasi kelembagaan lokal. Pendekatan yang lebih holistik inilah yang diperlukan agar masyarakat Nangahale dapat benar-benar membangun kemandirian dan mengurangi ketergantungan pada mekanisme ekonomi dan sosial yang selama ini menjerat mereka.

3.2.1.3.7 Analisis Lintas Faktor Kasus Berganda Desil 1 Kemiskinan Ekstrem

Kemiskinan ekstrem yang dialami masyarakat di tiga lokasi penelitian Desil 1 (Kelurahan Wuring, Desa Rubit, dan Desa Nangahale) memperlihatkan wajah kemiskinan multidimensi yang berbeda corak namun memiliki benang merah yang sama: keterjebakan dalam struktur ekonomi rapuh, tekanan sosial-budaya, kelemahan kelembagaan, serta minimnya akses pada aset produktif dan layanan dasar. Analisis lintas faktor ini penting dilakukan untuk memperlihatkan bagaimana berbagai faktor saling berinteraksi, memperkuat, dan membentuk lingkaran kemiskinan yang sulit diputus.

Dengan menggunakan pendekatan *livelihood vulnerability* (Chambers & Conway, 1992), *capability approach* (Sen, 1999), serta perspektif *policy implementation gap* dalam tata kelola bantuan sosial, analisis ini tidak hanya membandingkan faktor-faktor antar desa, tetapi juga menghubungkannya dengan teori-teori kemiskinan multidimensi dan studi-studi terdahulu di Indonesia, khususnya NTT. Pendekatan ini memungkinkan kita memahami bahwa kemiskinan ekstrem bukanlah fenomena tunggal, melainkan hasil interaksi kompleks antara faktor struktural, kultural, kelembagaan, dan aspirasi masyarakat.

1) **Faktor Struktural: Ketergantungan pada Sumber Penghidupan Rapuh**

   Ketiga desa dalam kategori Desil 1 sama-sama menghadapi ketergantungan tinggi pada sumber penghidupan yang rapuh, namun coraknya berbeda sesuai basis ekonomi lokal.

   a. Kelurahan Wuring bergantung pada sektor perikanan tradisional, di mana mayoritas warganya berstatus nelayan buruh. Mereka tidak memiliki kapal motor maupun alat tangkap modern, sehingga hidup

dalam relasi patron–klien dengan juragan. Sistem ini menempatkan mereka dalam posisi subordinat: mereka bisa melaut hanya dengan modal juragan, tetapi harga hasil tangkapan pun ditentukan juragan. Akibatnya, kerja keras nelayan buruh tidak pernah sebanding dengan peningkatan kesejahteraan. Situasi ini selaras dengan teori *dependency trap* (Cline, 2010) yang menjelaskan bagaimana kelompok miskin tetap terjebak dalam relasi eksploitatif meski terus bekerja.

b. Desa Rubit menggantungkan hidup pada pertanian lahan kering dengan produktivitas rendah. Pertanian berbasis jagung, ubi, dan padi ladang sepenuhnya mengandalkan curah hujan tanpa irigasi, sehingga rentan terhadap perubahan iklim. Musim kemarau panjang berarti gagal panen, dan keluarga terpaksa berutang untuk membeli beras. Selain itu, praktik tebang-bakar membuat lahan semakin tandus dan memperburuk degradasi lingkungan. Pola ini memperlihatkan kerentanan ganda, yakni faktor eksternal berupa iklim, dan faktor internal berupa ketiadaan teknologi serta degradasi tanah. Hal ini selaras dengan temuan studi oleh Fanggidae et al. (2018) tentang kerentanan petani di Flores yang menghadapi kombinasi iklim ekstrim dan minim teknologi.

c. Desa Nangahale juga berbasis laut seperti Wuring, namun masyarakatnya didominasi etnis Bajo dan Bugis dengan pola nelayan tradisional. Mereka menggunakan perahu kecil dan jaring sederhana, sehingga hasil tangkapan terbatas dan sangat dipengaruhi musim angin barat. Sama seperti Wuring, posisi mereka lemah di pasar karena harga ditentukan tengkulak. Namun, perbedaannya: di Nangahale keterikatan patron–klien tidak sekuat Wuring, tetapi kerentanannya lebih pada faktor ekologis (cuaca) dan tingginya hutang mingguan di koperasi lokal.

Jika dilihat lintas faktor, Wuring dan Nangahale sama-sama menghadapi kemiskinan ekstrem akibat keterbatasan aset produktif di sektor perikanan, sedangkan Rubit menghadapi kemiskinan akibat keterbatasan teknologi dan ekologi pertanian. Namun, ketiganya memiliki pola sama: tidak adanya diversifikasi ekonomi dan ketiadaan akses modal membuat masyarakat hanya bergantung pada satu sumber penghidupan yang rapuh.

Dalam perspektif *livelihood vulnerability* (Chambers & Conway, 1992), hal ini menunjukkan bahwa masyarakat di ketiga desa menghadapi ketidakpastian kronis: produktivitas kerja mereka sangat tergantung pada faktor eksternal yang tidak bisa mereka kendalikan, baik itu cuaca, harga pasar, maupun iklim. Sementara dari perspektif capability approach, keterbatasan aset produktif berarti mereka tidak memiliki substantive freedom untuk memilih pekerjaan atau jalan hidup lain.

2) Faktor Sosial-Budaya: Beban Adat, Pendidikan Rendah, dan Reproduksi Kemiskinan Lintas Generasi

Selain faktor struktural, ketiga lokasi penelitian memperlihatkan dimensi sosial-budaya yang justru memperkuat jeratan kemiskinan. Faktor ini bersifat ambivalen: di satu sisi menjaga kohesi sosial, tetapi di sisi lain menguras sumber daya ekonomi keluarga miskin dan menutup peluang mobilitas sosial.

a. Kelurahan Wuring

Di Wuring, beban adat hadir dalam bentuk kewajiban partisipasi dalam pesta laut, pernikahan, maupun kematian. Norma sosial menuntut semua warga berpartisipasi, bahkan jika kondisi ekonomi mereka terbatas. Norma ini memaksa keluarga miskin untuk berutang demi memenuhi kewajiban adat, padahal pendapatan mereka sudah minim.

Selain beban adat, rendahnya pendidikan memperburuk kondisi. Banyak anak berhenti sekolah di tingkat SMP karena biaya seragam, transportasi, atau SPP tidak mampu ditanggung. Generasi muda akhirnya mengikuti jejak orang tua sebagai nelayan buruh atau buruh angkut, sehingga lingkaran kemiskinan direproduksi. Fenomena ini selaras dengan teori *culture of poverty* (Lewis, 1966) yang menjelaskan bagaimana nilai dan kebiasaan dalam komunitas miskin bisa melanggengkan kemiskinan lintas generasi.

b. Desa Rubit

Di Rubit, faktor sosial-budaya lebih dominan dalam bentuk beban adat dan perkawinan usia dini. Tradisi belis (mas kawin) membuat keluarga harus berutang besar ketika menikahkan anak laki-laki. Bahkan banyak keluarga terjerat hutang sebelum pesta berlangsung. Lebih jauh, perkawinan usia dini (15–17 tahun) umum terjadi, memaksa anak perempuan berhenti sekolah dan langsung membentuk rumah tangga miskin baru. Norma adat yang kaku

memperkuat tekanan ini. Tekanan adat bukan hanya beban ekonomi, tetapi juga memaksa remaja masuk ke dalam lingkaran kemiskinan sejak awal kehidupan rumah tangga. Fenomena ini sejalan dengan riset Haug (2017) di NTT yang menunjukkan bahwa perkawinan dini adalah salah satu pendorong utama stagnasi kemiskinan karena mengurangi kesempatan pendidikan, meningkatkan beban ekonomi, dan mempercepat reproduksi kemiskinan.

c. Desa Nangahale

Di Nangahale, norma adat dan solidaritas sosial juga berperan besar. Partisipasi dalam ritual laut dan pesta keluarga dianggap wajib, meskipun keluarga miskin harus berutang. Beban adat ini memperkuat jeratan hutang mingguan yang sudah menjerat hampir setiap keluarga. Akibatnya, setiap upaya keluar dari kemiskinan kembali terhambat oleh kewajiban sosial yang tidak bisa ditolak.

d. Analisis Lintas Faktor

Jika dibandingkan, ketiga lokasi memperlihatkan pola serupa: adat dan norma sosial menjadi instrumen kohesi sosial, tetapi sekaligus memperdalam kerentanan ekonomi.

a) Di Wuring, adat mengorbankan pendidikan anak karena biaya pesta lebih diprioritaskan.
b) Di Rubit, adat berkelindan dengan perkawinan usia dini, yang membuat generasi baru langsung masuk kategori rumah tangga miskin.
c) Di Nangahale, adat memperkuat jeratan hutang, sehingga keluarga miskin selalu berada di bawah tekanan ganda (ekonomi dan sosial).

Dalam perspektif *capability approach* (Sen, 1999), faktor sosial-budaya ini menciptakan deprivasi kapabilitas, yakni masyarakat tidak bebas menentukan prioritas hidup (misalnya pendidikan anak atau kesehatan) karena norma adat lebih menentukan alokasi sumber daya. Dari sisi teori ekosistem kemiskinan (Chambers, 2006), norma sosial di ketiga lokasi justru memperkuat ekosistem yang memiskinkan, bukan membangun resiliensi.

3) Faktor Bantuan Sosial dan Kelembagaan: Antara Jaring Pengaman dan Jeratan Ketergantungan

Salah satu benang merah penting dari ketiga lokasi penelitian adalah peran bantuan sosial (bansos) sebagai instrumen negara untuk meredam penderitaan rumah tangga miskin. Namun, hasil penelitian memperlihatkan bahwa bansos lebih sering berfungsi sebagai “oksigen sementara” ketimbang motor perubahan struktural.

a. Kelurahan Wuring

Di Wuring, bansos seperti PKH, BLT, dan BPNT sudah menjadi bagian integral dari strategi survival keluarga miskin. Akan tetapi, bantuan ini lebih banyak digunakan untuk konsumsi harian dan pembayaran hutang. Selain sifatnya konsumtif, distribusi bansos di Wuring juga menghadapi persoalan serius berupa error inklusi dan eksklusi. Ada warga miskin ekstrem yang tidak masuk DTKS, sementara keluarga dengan rumah permanen dan aset relatif lebih baik justru menerima bantuan. Ketidakakuratan ini menimbulkan kecemburuan sosial dan menurunkan legitimasi pemerintah desa. Hal ini selaras dengan temuan World Bank (2022) bahwa salah satu kelemahan utama program bansos di Indonesia adalah validitas data yang rendah, terutama di wilayah terpencil.

b. Desa Rubit

Di Rubit, bansos tidak hanya gagal memutus kemiskinan, tetapi juga memperlemah kelembagaan lokal. Pemerintah desa berperan terbatas hanya sebagai pengusul data, sementara keputusan akhir ada di kabupaten. Aparat desa sering disalahkan oleh warga ketika ada nama yang tidak keluar, meskipun mereka tidak punya kewenangan penuh. Hal ini menimbulkan fenomena *policy alienation* (Tummers, 2012), di mana pelaksana kebijakan merasa tidak berdaya dan warga kehilangan kepercayaan pada institusi desa.

Selain itu, program pemberdayaan produktif yang pernah masuk (seperti PNPM Mandiri atau Anggur Merah) tidak berkelanjutan karena lemahnya pendampingan dan manajemen kelompok. Sebagian besar warga kembali bergantung pada bansos konsumtif. Fenomena ini memperlihatkan *governance failure*, yakni kelemahan kelembagaan desa dalam mengelola intervensi pembangunan agar berkelanjutan.

c. Desa Nangahale

Di Nangahale, bansos juga menjadi penyelamat sementara, namun menimbulkan dilema baru berupa *welfare dependency*.

Banyak warga mengaku menunggu jadwal pencairan bantuan sebagai momen paling ditunggu, bahkan menunda pembayaran sekolah atau pembelian beras hingga bansos turun. Kondisi ini menggambarkan fenomena *dependency syndrome* yang sudah banyak dicatat dalam literatur pembangunan sosial (Midgley, 2014), di mana masyarakat penerima bantuan menjadi pasif dan kurang terdorong mencari jalan keluar mandiri.

d. Analisis Lintas Faktor

Perbandingan ketiga lokasi menunjukkan pola yang konsisten:

a) **Wuring, yakni** bansos lebih banyak dipakai untuk menutup hutang dan kebutuhan konsumtif, sehingga memperkuat lingkaran ketergantungan.

b) **Rubit, yakni** kelemahan kelembagaan desa membuat bansos gagal menjawab kebutuhan lokal, ditambah kegagalan program pemberdayaan produktif.

c) **Nangahale, yakni** bansos berfungsi sebagai *safety net*, tetapi sekaligus menciptakan mental menunggu (*waiting mentality*) yang memperlemah inisiatif produktif.

Jika dibaca dengan perspektif *capability approach*, bansos memang membantu functionings jangka pendek (makan, minum, bayar sekolah), tetapi gagal memperluas *capabilities (*kapasitas memilih jalan hidup yang lebih baik). Dari sisi teori kebijakan publik, hal ini mencerminkan *policy–practice gap*: niat kebijakan untuk memberdayakan masyarakat tidak tercapai karena desain bansos tidak transformatif.

4) Faktor Strategi Survival: Bertahan Hidup dalam Kerentanan Kronis

Masyarakat miskin ekstrem di Wuring, Rubit, dan Nangahale menghadapi tekanan ekonomi sehari-hari yang memaksa mereka mengembangkan berbagai strategi survival. Namun, strategi ini bersifat reaktif, konsumtif, dan jangka pendek, sehingga lebih banyak menunda krisis ketimbang menyelesaikan akar masalah kemiskinan.

a. Kelurahan Wuring

Di Wuring, strategi utama bertahan hidup adalah hutang mingguan ke koperasi atau juragan. Hutang digunakan untuk membeli beras, membayar sekolah, atau memenuhi kebutuhan adat. Namun bunga yang tinggi membuat rumah tangga semakin terjerat. Banyak

keluarga juga terpaksa menjual aset produktif seperti perahu kecil atau jaring, sehingga kehilangan sumber penghidupan jangka panjang. Migrasi anak muda ke luar daerah (Papua, Kalimantan) juga terjadi, tetapi kiriman uang lebih banyak habis untuk konsumsi, bukan modal produktif. Strategi paling ekstrem adalah pengurangan konsumsi: banyak keluarga hanya makan sekali sehari dengan lauk sederhana. Hal ini menggambarkan dampak nyata strategi survival terhadap kualitas hidup dan risiko stunting.

b. Desa Rubit

Di Rubit, strategi survival juga bertumpu pada hutang mingguan dari koperasi atau tetangga. Saat gagal panen, keluarga terpaksa menjual ternak kecil atau peralatan pertanian untuk membiayai pendidikan dan kebutuhan dasar. Namun, hal ini memperburuk kondisi jangka panjang karena mereka kehilangan sumber pendapatan tambahan. Migrasi tenaga kerja ke daerah lain menjadi opsi penting bagi anak muda, tetapi kiriman uang (remitansi) bersifat tidak menentu. Selain itu, keluarga sering kali mengurangi konsumsi pangan dan pendidikan: anak-anak berhenti sekolah sementara untuk membantu orang tua di ladang. Kondisi ini menunjukkan bahwa strategi survival justru mempercepat reproduksi kemiskinan lintas generasi.

c. Desa Nangahale

Di Nangahale, pola survival hampir identik dengan Wuring. Hutang koperasi mingguan dengan bunga tinggi menjadi norma sosial. Bahkan, banyak keluarga meminjam uang bukan untuk kebutuhan produktif, melainkan membayar kewajiban adat. Situasi ini menggambarkan *cultural economy of poverty*, di mana keputusan ekonomi rumah tangga miskin tidak semata rasional, melainkan terikat pada norma adat.

Selain hutang, migrasi pemuda juga menjadi strategi, tetapi kiriman uang jarang cukup untuk keluar dari jeratan kemiskinan. Reduksi konsumsi harian dilakukan dengan membatasi asupan gizi anak-anak, yang dalam jangka panjang memperburuk kualitas sumber daya manusia.

d. Analisis Lintas Faktor

Jika dilihat lintas kasus, strategi survival di tiga desa memperlihatkan pola yang mirip namun memiliki nuansa berbeda:

a) Wuring, yakni hutang, jual aset, migrasi, dan pengurangan konsumsi, dengan tekanan utama dari sistem patron–klien.
b) Rubit, yakni hutang, jual ternak, migrasi, dan mengorbankan pendidikan anak, dengan tekanan utama dari kegagalan panen.
c) Nangahale, yakni hutang, migrasi, dan reduksi konsumsi, dengan tekanan utama dari kewajiban adat dan cuaca laut.

Dalam perspektif *livelihood strategy* (Ellis, 2000), strategi ini hanya berfungsi menjaga kelangsungan hidup jangka pendek, tanpa menciptakan *capital accumulation*. Setiap hutang menambah beban masa depan, setiap aset yang dijual mengurangi kapasitas produktif, setiap migrasi tidak menciptakan keterampilan baru, dan setiap pengurangan konsumsi merusak kesehatan generasi berikutnya. Dari perspektif *capability approach*, strategi survival ini mencerminkan keterpaksaan, bukan kebebasan. Masyarakat tidak memilih strategi survival karena rasionalitas ekonomi, tetapi karena tidak ada opsi lain. Dengan demikian, strategi survival justru menjadi instrumen reproduksi kemiskinan kronis.

5) Aspirasi Perubahan dan Hambatan Struktural

Meskipun ketiga desa dalam kategori Desil 1 terjerat kemiskinan ekstrem, masyarakat tetap memiliki aspirasi perubahan yang kuat. Aspirasi ini berkaitan dengan harapan mereka atas masa depan anak, perbaikan akses pendidikan, kesehatan, serta peluang ekonomi yang lebih berkelanjutan. Namun, aspirasi ini terus terbentur oleh hambatan struktural yang mengekang ruang gerak mereka.

a. Kelurahan Wuring

Di Wuring, banyak orang tua berharap anak-anak mereka tidak menjadi nelayan buruh seperti generasi sebelumnya. Harapan besar ditempatkan pada pendidikan sebagai jalan keluar. Namun, tingginya biaya sekolah, minimnya beasiswa, dan kebutuhan ekonomi jangka pendek membuat banyak anak tidak bisa melanjutkan pendidikan. Hambatan struktural yang paling jelas adalah ketidakadilan akses pendidikan. Meskipun ada sekolah dasar dan menengah di sekitar Wuring, kualitasnya rendah dan angka putus sekolah tinggi. Aspirasi

pendidikan yang kuat akhirnya berbenturan dengan realitas ekonomi sehari-hari.

b. Desa Rubit

Di Rubit, masyarakat berharap ada akses teknologi pertanian modern (irigasi, pupuk, dan bibit unggul) agar produktivitas meningkat. Aspirasi ini lahir dari kesadaran bahwa pola pertanian tradisional tidak lagi memadai menghadapi perubahan iklim. Namun, hambatan utama adalah keterbatasan dukungan infrastruktur dan lemahnya pendampingan teknis dari pemerintah. Selain itu, masyarakat juga bercita-cita agar perkawinan usia dini berkurang, tetapi norma adat tetap kuat. Hambatan kultural ini membuat aspirasi sulit terwujud tanpa transformasi sosial yang lebih luas.

c. Desa Nangahale

Di Nangahale, aspirasi perubahan terutama terkait dengan akses modal dan pasar. Masyarakat ingin keluar dari jeratan hutang mingguan dengan modal usaha sendiri, serta mendapatkan harga ikan yang lebih adil. Harapan lain adalah agar ada koperasi nelayan yang benar-benar dikelola warga, bukan dikuasai segelintir orang. Namun, hambatan utama adalah struktur pasar yang oligopolistik: harga ikan tetap ditentukan tengkulak, dan akses ke pasar besar (Maumere, Kupang) membutuhkan biaya transportasi tinggi. Hambatan struktural ini membuat aspirasi masyarakat sulit tercapai meskipun ada kesadaran kolektif untuk berubah.

d. Analisis Lintas Faktor

Jika dibandingkan, aspirasi masyarakat di ketiga desa memiliki tema umum yang sama, yakni keinginan memperbaiki masa depan anak, meningkatkan produktivitas ekonomi, dan mengurangi ketergantungan pada pihak luar (juragan, tengkulak, koperasi). Namun, semua aspirasi ini terbentur oleh hambatan struktural:

a) Wuring, yakni nhambatan akses pendidikan dan bias struktural terhadap keluarga miskin.
b) Rubit, yakni hambatan teknologi pertanian dan norma adat (perkawinan dini).
c) Nangahale, yakni hambatan pasar dan struktur oligopoli dalam tata niaga ikan.

Dalam perspektif *theory of structural poverty* (Gore, 2010), kondisi ini menunjukkan bahwa kemiskinan ekstrem bukan hanya persoalan kekurangan individu, tetapi hasil dari struktur sosial-ekonomi yang meminggirkan mereka. Aspirasi perubahan yang kuat menjadi tidak berarti ketika sistem sosial, ekonomi, dan kebijakan publik tidak memberi ruang untuk realisasinya.

6) Analisis Sintesis Lintas Faktor

Hasil penelitian pada tiga lokasi Desil 1 (Kelurahan Wuring, Desa Rubit, dan Desa Nangahale) memperlihatkan pola kemiskinan ekstrem yang serupa sekaligus berbeda. Analisis lintas faktor ini penting untuk memahami bagaimana faktor struktural, sosial-budaya, kelembagaan, strategi survival, dan aspirasi perubahan saling berinteraksi membentuk ekosistem kemiskinan.

a. Kesamaan Pola Kemiskinan Ekstrem

Ketiga lokasi memiliki benang merah yang konsisten:

1. Sumber penghidupan rapuh (perikanan tradisional di Wuring & Nangahale, pertanian lahan kering di Rubit) yang rentan terhadap faktor eksternal (cuaca, iklim, harga pasar).
2. Norma sosial-budaya yang memperkuat beban ekonomi rumah tangga miskin (adat, belis, perkawinan dini), sehingga aspirasi individu tunduk pada kewajiban kolektif.
3. Bansos konsumtif yang hanya menjadi jaring pengaman, tetapi gagal menciptakan pemberdayaan produktif.
4. Strategi survival reaktif (hutang, jual aset, migrasi, pengurangan konsumsi) yang memperlemah modal jangka panjang.
5. Aspirasi perubahan yang kuat namun selalu terbentur oleh hambatan struktural (akses pendidikan, pasar, teknologi, dan norma adat).

Kesamaan ini menggambarkan sebuah “ekosistem kemiskinan” (Chambers, 2006), yaitu situasi di mana seluruh dimensi kehidupan: ekonomi, sosial, politik, budaya , justru saling menopang keberlanjutan kemiskinan.

b. Perbedaan Konteks Spesifik Antar Lokasi

Namun, terdapat juga nuansa spesifik yang membedakan:

1. **Wuring** menonjol dalam relasi patron–klien dengan juragan laut, di mana ketergantungan pada juragan membuat masyarakat sulit mandiri.
2. **Rubit** menghadapi tekanan terbesar dari faktor ekologis (gagal panen, lahan tandus) dan norma perkawinan usia dini.
3. **Nangahale** lebih ditekankan pada jeratan hutang mingguan dan struktur pasar ikan yang oligopolistik.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa meski berada dalam kategori kemiskinan ekstrem, akar persoalan di tiap lokasi memiliki karakter kontekstual, sehingga intervensi kebijakan tidak bisa diseragamkan.

Jika dilihat dari perspektif capability approach (Sen, 1999), masyarakat di ketiga desa mengalami deprivasi kapabilitas yang parah: mereka tidak memiliki kebebasan substantif untuk memilih pekerjaan, mengakses pendidikan, atau menentukan alokasi sumber daya karena keterbatasan struktural dan tekanan adat. Dalam perspektif *vulnerability and livelihood framework* (Chambers & Conway, 1992), mereka hidup dalam kerentanan kronis, di mana strategi survival jangka pendek justru memperdalam kerentanan jangka panjang. Kombinasi kedua teori ini menegaskan bahwa kemiskinan ekstrem di Sikka bukan hanya *lack of income*, melainkan *lack of freedom and resilience*.

c. Policy Alienation dan Kelembagaan

Fenomena *policy alienation* (Tummers, 2012) jelas terlihat, terutama di Rubit. Aparat desa merasa tidak punya kendali atas bansos, sementara masyarakat menilai pemerintah desa gagal memenuhi kebutuhan mereka. Akibatnya, ada disconnect antara kebijakan top-down dan kebutuhan lokal. Kelemahan kelembagaan juga terlihat dalam kegagalan program pemberdayaan yang tidak berkelanjutan. Hal ini memperkuat kesimpulan studi Antlöv et al. (2021) bahwa kelembagaan desa di NTT sering berfungsi administratif, bukan transformatif.

d. Ekosistem Kemiskinan vs Ekosistem Resiliensi

Dari temuan lintas kasus, jelas bahwa masyarakat saat ini hidup dalam ekosistem kemiskinan: relasi patron–klien, norma adat, bansos konsumtif, hutang mingguan, dan pasar oligopolistik semuanya saling

mengunci rumah tangga dalam kemiskinan. Namun, ada potensi menuju ekosistem resiliensi, jika aspirasi masyarakat (pendidikan, teknologi, koperasi warga) difasilitasi melalui intervensi kebijakan berbasis *social equity*, yakni distribusi sumber daya yang adil dan akses inklusif bagi kelompok paling rentan (Frederickson, 2010).

Dengan demikian, analisis lintas faktor Desil 1 menunjukkan bahwa:

1. Kemiskinan ekstrem di Sikka bersifat multidimensi, kronis, dan terstruktur, bukan semata akibat "kemalasan" atau kekurangan individu.
2. Kebijakan top-down (bansos) hanya bersifat karitatif, sementara kebutuhan utama adalah pemberdayaan produktif berbasis konteks lokal.
3. Transformasi menuju resiliensi memerlukan intervensi multi-level: mengatasi struktur patron–klien (Wuring), meningkatkan produktivitas pertanian (Rubit), dan mereformasi tata niaga ikan (Nangahale).

Tabel 1. Ringkasan Analisis Lintas Faktor Kasus Berganda Desil 1: Kemiskinan Ekstrem

Faktor	Wuring	Rubit	Nangahale	Analisis Lintas Faktor
Struktural (Penghidupan)	Nelayan buruh; relasi patron–klien dengan juragan; harga ikan ditentukan luar	Pertanian lahan kering; gagal panen; degradasi lahan	Nelayan tradisional; perahu kecil; tergantung cuaca & tengkulak	Sama-sama tergantung pada sumber penghidupan rapuh, tanpa diversifikasi ekonomi
Sosial-Budaya	Beban adat (pesta laut, perkawinan, kematian); pendidikan anak dikorbankan	Tradisi belis, perkawinan usia dini; pesta adat menguras sumber daya	Ritual laut & pesta adat; hutang untuk biaya adat	Adat menjaga kohesi sosial, tapi memperdalam jeratan kemiskinan lintas generasi
Bantuan Sosial & Kelembagaan	PKH/BLT/BPNT untuk konsumsi & hutang; error inklusi–eksklusi	Bansos tidak sesuai kebutuhan; aparat desa alami policy alienation; program pemberdayaan gagal	Bansos jadi tumpuan hidup; menimbulkan welfare dependency	Bansos berfungsi sebagai safety net jangka pendek, gagal transformatif
Strategi Survival	Hutang mingguan; jual aset (perahu/jaring); migrasi; pengurangan konsumsi (1x makan)	Hutang koperasi; jual ternak; migrasi; anak berhenti sekolah sementara	Hutang mingguan; migrasi pemuda; reduksi konsumsi gizi	Strategi survival reaktif, konsumtif, dan memperlemah modal jangka panjang
Aspirasi Perubahan	Anak tidak jadi nelayan buruh; akses pendidikan lebih baik	Pertanian modern (irigasi, bibit unggul); kurangi perkawinan dini	Akses modal; koperasi nelayan adil; harga ikan wajar	Aspirasi kuat, tapi terbentur hambatan struktural (pendidikan, teknologi, pasar, adat)
Sintesis	Terjebak relasi patron–klien	Terjebak krisis ekologis & adat	Terjebak hutang & pasar oligopolistik	Ketiganya berada dalam *ekosistem kemiskinan* yang multidimensi, dengan aspirasi resiliensi yang terhambat struktur

Sumber: Olahan Penulis, 2025

3.2.2 Desil 2: Kemiskinan Multidimensi Tinggi (Pak Ajis)

3.2.2.1 Kelurahan Wolomarang

3.2.2.1.1 Pekerjaan Buruh Nelayan yang Tidak Stabil

Kelurahan Wolomarang merupakan salah satu wilayah pesisir di Kabupaten Sikka yang mayoritas warganya bekerja sebagai buruh nelayan. Pekerjaan ini tidak memberikan kepastian ekonomi karena sebagian besar masyarakat tidak memiliki kapal maupun alat tangkap sendiri, sehingga bergantung sepenuhnya pada juragan yang menguasai modal dan distribusi hasil tangkapan. Pola ini membuat posisi buruh nelayan sangat lemah dalam struktur ekonomi perikanan, di mana upah yang diterima sering kali tidak sebanding dengan tenaga dan risiko yang mereka hadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar keluarga miskin di Wolomarang menggantungkan hidup pada penghasilan harian yang fluktuatif, sehingga mereka rentan terhadap guncangan kecil sekalipun.

Selanjutnya, ketidakpastian penghasilan buruh nelayan semakin diperburuk oleh faktor cuaca dan musim. Ketika musim angin barat tiba, mereka tidak bisa melaut selama berminggu-minggu, yang berarti tidak ada pemasukan sama sekali. Bahkan pada musim tangkapan, hasil yang diperoleh sering kali tidak menutupi biaya operasional karena harga ikan ditentukan oleh tengkulak atau juragan yang memiliki akses pasar lebih besar. Kondisi ini membuat buruh nelayan selalu berada dalam siklus ekonomi subsisten tanpa peluang akumulasi aset. Seperti yang ditegaskan Sahanudin (35 tahun, Kepala Desa Nangahale, wawancara 30 Juli 2025), masyarakat pesisir sering kali bekerja keras, tetapi penghasilan mereka tetap tidak mampu menutup kebutuhan dasar karena posisi tawar yang lemah dalam rantai ekonomi ikan.

Lebih jauh lagi, hasil wawancara lapangan memperlihatkan bahwa dominasi pekerjaan sebagai buruh nelayan telah menciptakan keterjebakan struktural yang sulit dihindari. Banyak keluarga tidak memiliki modal untuk membeli perahu besar atau jaring modern, sehingga satu-satunya pilihan adalah bekerja pada juragan. Hal ini membuat mereka tetap berada dalam posisi subordinat dalam jangka panjang. Ahmad Gozali (30 tahun, Kasi Pelayanan Nangahale, wawancara 30 Juli 2025) menekankan bahwa ketergantungan ini mempersempit peluang

keluarga miskin untuk mandiri, karena seluruh mekanisme kerja dan pembagian hasil diatur sepihak oleh pemilik modal.

Lebih lanjut, kerentanan akibat ketergantungan pada laut juga dirasakan oleh perempuan dan anak-anak. Perempuan sering bekerja sebagai buruh bongkar muat di pelabuhan dengan upah harian rendah, sementara anak-anak ikut membantu orang tua melaut atau menjual ikan di pasar lokal. Situasi ini memperlihatkan bahwa kemiskinan tidak hanya menimpa kepala keluarga, tetapi juga melibatkan seluruh anggota rumah tangga dalam rantai kerja yang sama. Fransiska Saveriana (46 tahun, Kasi Kesejahteraan, wawancara 30 Juli 2025) menggarisbawahi bahwa peran perempuan dalam sektor perikanan sering tidak diakui secara formal, padahal mereka berkontribusi besar pada keberlangsungan ekonomi keluarga miskin.

Selanjutnya, substansi yang sama juga diungkapkan oleh beberapa informan, baik aparat desa, tokoh masyarakat, maupun warga biasa. Mereka menegaskan bahwa keterbatasan modal, posisi tawar yang lemah, dan dominasi juragan adalah faktor utama yang membuat buruh nelayan tetap terjebak dalam kemiskinan. Rangkuman pandangan ini memperlihatkan bahwa meskipun laut menjadi sumber utama penghidupan, sistem pengelolaan yang timpang dan akses pasar yang terbatas menjadikan masyarakat Wolomarang tetap berada dalam kondisi rapuh.

Dengan demikian, kemiskinan akibat pekerjaan buruh nelayan yang tidak stabil di Wolomarang dapat dipahami melalui perspektif livelihood vulnerability. Kerentanan ekonomi tidak hanya disebabkan oleh faktor eksternal seperti cuaca dan musim, tetapi juga oleh faktor internal berupa ketiadaan aset produksi dan dominasi pemilik modal. Selanjutnya, pemahaman terhadap faktor ini penting untuk melihat bagaimana masalah gizi, stunting, serta beban adat seperti belis semakin memperdalam kondisi kemiskinan, yang akan dibahas pada faktor berikutnya.

3.2.2.1.2 Faktor Stunting dan Kerentanan Kesehatan Anak

Kemiskinan ekstrem di Kelurahan Wolomarang tidak hanya tercermin dari kondisi ekonomi rumah tangga, tetapi juga sangat nyata dalam tingginya prevalensi stunting di kalangan anak-anak. Stunting, yang ditandai dengan kondisi tubuh pendek akibat kekurangan gizi kronis,

menjadi indikator penting bahwa keluarga miskin tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar untuk pertumbuhan generasi muda. Pola konsumsi keluarga miskin di Wolomarang cenderung monoton, didominasi nasi, ubi, dan ikan asin tanpa variasi sayuran maupun protein berkualitas. Kondisi ini berulang setiap hari karena pendapatan rumah tangga sangat terbatas, sehingga keluarga lebih memilih makanan murah yang bisa bertahan lama ketimbang makanan bergizi seimbang.

Selanjutnya, penelitian lapangan menemukan bahwa hampir setiap rumah tangga miskin menghadapi dilema dalam mengatur pengeluaran harian. Ketika penghasilan nelayan buruh hanya cukup untuk membeli beras dan sedikit lauk sederhana, maka asupan gizi anak sering dikorbankan. Banyak ibu rumah tangga mengaku tidak mampu membeli telur, daging, atau buah-buahan karena harga dianggap terlalu mahal dibandingkan kebutuhan mendesak lain seperti membayar utang koperasi atau menutup biaya adat. Situasi ini memperlihatkan bahwa kemiskinan menciptakan prioritas ekonomi yang sempit, di mana kelangsungan hidup jangka pendek lebih diutamakan ketimbang investasi gizi jangka panjang bagi anak-anak.

Lebih jauh lagi, keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan memperburuk situasi stunting. Kelurahan Wolomarang tidak memiliki fasilitas kesehatan yang lengkap, sehingga masyarakat bergantung pada puskesmas di kecamatan dengan jarak tempuh yang memerlukan biaya transportasi tambahan. Banyak keluarga miskin enggan membawa anak mereka untuk pemeriksaan rutin karena biaya perjalanan dianggap sebagai beban tambahan yang sulit ditanggung. Akibatnya, kasus gizi buruk sering tidak terdeteksi sejak dini, dan intervensi kesehatan baru dilakukan ketika kondisi anak sudah cukup parah. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan posyandu juga menunjukkan adanya kendala prioritas, di mana orang tua lebih memilih bekerja atau melaut daripada membawa anaknya untuk pemeriksaan kesehatan.

Selain itu, beban ganda perempuan semakin memperparah persoalan gizi anak. Para ibu tidak hanya bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan rumah tangga, tetapi juga terlibat dalam pekerjaan ekonomi informal seperti buruh bongkar muat ikan atau penjual ikan keliling. Dengan pendapatan yang rendah, mereka tetap harus membagi penghasilan untuk kebutuhan pangan, pendidikan, dan kewajiban adat.

Dalam kondisi seperti ini, pengeluaran untuk makanan bergizi sering kali dipangkas, sehingga anak-anak hanya memperoleh asupan minimal. Fenomena ini memperlihatkan bahwa persoalan gizi tidak bisa dilepaskan dari struktur ekonomi dan sosial yang membatasi kapasitas perempuan dalam mengambil keputusan rumah tangga.

Lebih lanjut, tingginya angka stunting di Wolomarang memiliki implikasi jangka panjang terhadap masa depan sosial-ekonomi desa. Anak-anak yang tumbuh dalam kondisi gizi buruk cenderung memiliki prestasi belajar rendah, daya tahan tubuh lemah, dan kemampuan kognitif yang terbatas. Dalam jangka panjang, mereka kesulitan melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi atau bersaing dalam dunia kerja yang semakin menuntut keterampilan. Kondisi ini pada akhirnya memperkuat siklus kemiskinan lintas generasi, karena anak-anak yang seharusnya menjadi harapan keluarga untuk memperbaiki kondisi hidup justru terjebak dalam kerentanan yang sama.

Tidak hanya itu, budaya konsumtif dan kewajiban adat juga berkontribusi terhadap persoalan gizi. Banyak keluarga lebih memprioritaskan pengeluaran untuk acara adat atau belis dibandingkan untuk kebutuhan gizi anak. Hal ini menunjukkan bahwa faktor kultural sering bersinggungan dengan faktor ekonomi, menciptakan keputusan rumah tangga yang kurang berpihak pada kebutuhan kesehatan. Tekanan sosial untuk memenuhi kewajiban adat membuat keluarga miskin terpaksa mengorbankan alokasi anggaran yang seharusnya bisa digunakan untuk memperbaiki asupan gizi anak.

Dengan demikian, masalah stunting di Wolomarang dapat dipahami tidak hanya sebagai isu kesehatan, tetapi juga sebagai cerminan dari kemiskinan multidimensional. Stunting merupakan titik temu dari keterbatasan ekonomi, rendahnya akses layanan kesehatan, beban sosial budaya, serta ketidakmampuan rumah tangga untuk mengelola prioritas kebutuhan. Dalam perspektif human capital theory, rendahnya kualitas gizi anak akan berimplikasi langsung pada rendahnya produktivitas generasi muda di masa depan, yang berarti memperkuat lingkaran kemiskinan. Selanjutnya, persoalan stunting harus dilihat sebagai pintu masuk penting untuk memahami mengapa kemiskinan di Wolomarang begitu sulit diputus, yang akan semakin jelas ketika dikaitkan dengan faktor budaya belis yang membebani ekonomi rumah tangga.

3.2.2.1.3 Faktor Beban Belis dalam Sistem Pernikahan

Selain ketergantungan pada pekerjaan buruh nelayan dan tingginya angka stunting, salah satu faktor penting yang memperdalam kemiskinan di Kelurahan Wolomarang adalah beban belis atau mas kawin dalam sistem pernikahan adat. Belis dipandang sebagai simbol kehormatan keluarga dan penghargaan terhadap mempelai perempuan, namun dalam praktiknya, tradisi ini sering menimbulkan tekanan ekonomi yang sangat berat bagi keluarga miskin. Besaran belis biasanya ditentukan oleh status sosial, tingkat pendidikan, dan kesepakatan antar keluarga besar, sehingga nominalnya bisa mencapai puluhan juta rupiah ditambah dengan hewan ternak seperti sapi atau babi. Bagi rumah tangga yang hidup dalam kondisi serba terbatas, kewajiban adat ini sering kali hanya bisa dipenuhi dengan berutang atau menjual aset produktif.

Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa hampir setiap keluarga miskin di Wolomarang pernah terlibat dalam proses pinjaman besar ketika menghadapi pernikahan anaknya. Pinjaman tersebut biasanya berasal dari koperasi mingguan, rentenir lokal, atau kerabat yang lebih mampu, dengan konsekuensi bunga tinggi atau kewajiban balas jasa di kemudian hari. Yohanes Kefi (48 tahun, tokoh masyarakat, wawancara 2 Agustus 2025) menegaskan: *“Kalau ada anak laki-laki mau kawin, keluarga pasti pontang-panting cari uang untuk belis. Kadang sampai gadai tanah atau pinjam ke koperasi. Setelah pesta selesai, utang masih menumpuk, dan keluarga jatuh makin miskin.”* Situasi ini membuat momen pernikahan yang seharusnya menjadi perayaan justru berubah menjadi sumber beban ekonomi baru yang membelenggu keluarga dalam jeratan utang jangka panjang.

Lebih lanjut, tekanan belis tidak hanya dirasakan oleh keluarga laki-laki sebagai pemberi, tetapi juga keluarga perempuan yang menerima. Meskipun belis dianggap sebagai pemasukan tambahan, banyak keluarga mengaku bahwa dana tersebut tidak sepenuhnya masuk ke tabungan atau investasi produktif, melainkan habis untuk biaya pesta adat, konsumsi, dan kebutuhan sosial lainnya. Martha Laga (44 tahun, ibu rumah tangga, wawancara 3 Agustus 2025) mengungkapkan: *“Belis yang diterima memang lumayan, tapi langsung habis untuk biaya pesta dan adat. Tidak ada yang tersisa untuk usaha atau tabungan. Jadi setelah pesta, ekonomi tetap susah.”* Dengan demikian, tradisi belis lebih sering

berfungsi sebagai mekanisme redistribusi yang cepat habis daripada sebagai sumber akumulasi modal keluarga.

Selain aspek ekonomi langsung, beban belis juga memicu konsekuensi sosial lain yang signifikan. Banyak pemuda menunda usia pernikahan karena tidak mampu memenuhi tuntutan adat, sementara sebagian lainnya memilih untuk merantau ke daerah lain demi mengumpulkan modal. Rafael Dalu (29 tahun, pemuda desa, wawancara 4 Agustus 2025) menyampaikan: *"Saya sudah pacaran lama, tapi belum bisa menikah karena belis terlalu tinggi. Teman-teman saya juga banyak yang akhirnya pilih kerja ke Kalimantan dulu untuk kumpul uang. Jadi belis bikin kami anak muda susah ambil keputusan untuk berumah tangga."* Fenomena ini menunjukkan bagaimana tradisi belis memengaruhi dinamika sosial-ekonomi desa secara lebih luas.

Selanjutnya, peran perempuan juga tidak lepas dari dampak sistem belis. Meskipun mereka dianggap sebagai pihak yang dihargai dalam proses adat, dalam kenyataannya perempuan tetap menanggung beban psikologis dan ekonomi akibat tuntutan tersebut. Banyak perempuan merasa menjadi alasan keluarga harus berutang atau menjual aset, sehingga mereka mengalami tekanan mental setelah pernikahan. Elisabeth Nara (37 tahun, buruh nelayan, wawancara 5 Agustus 2025) menuturkan: *"Kadang kami merasa bersalah, karena orang bilang perempuan mahal. Padahal kami tahu keluarga sudah susah, tapi tetap harus ada belis sesuai adat. Setelah itu, kami masih tetap kerja keras bantu suami."* Hal ini memperlihatkan bahwa belis tidak serta-merta meningkatkan status sosial-ekonomi perempuan, melainkan justru memperberat kondisi mereka pasca pernikahan.

Dari sisi analisis, beban belis di Wolomarang dapat dilihat melalui perspektif *cultural economy*, yaitu bagaimana norma budaya dan ekonomi saling berinteraksi dalam menentukan pilihan rumah tangga. Tradisi ini memperkuat ikatan sosial antar keluarga besar, tetapi juga mereproduksi kemiskinan karena memaksa keluarga miskin mengambil keputusan finansial yang merugikan. Dalam banyak kasus, belis menjadi salah satu alasan utama rumah tangga jatuh lebih dalam ke dalam kemiskinan ekstrem karena kewajiban adat tidak bisa ditawar atau diabaikan tanpa risiko sosial berupa stigma dan pengucilan.

Dengan demikian, beban belis bukan sekadar persoalan adat, tetapi juga faktor struktural yang berkontribusi terhadap reproduksi kemiskinan lintas generasi di Wolomarang. Keluarga yang berutang untuk membayar belis cenderung kehilangan peluang meningkatkan kualitas pendidikan anak atau memenuhi kebutuhan gizi, karena seluruh sumber daya ekonomi dialihkan untuk melunasi kewajiban adat. Pandangan serupa juga disampaikan oleh gabungan tiga informan yang menyimpulkan bahwa sistem belis tetap dipertahankan demi menjaga martabat, meskipun kenyataannya sering membawa keluarga jatuh semakin miskin. Selanjutnya, pemahaman terhadap faktor ini penting untuk melihat bagaimana budaya konsumtif dan rendahnya pendidikan memperkuat siklus kemiskinan, yang akan dibahas pada faktor berikutnya.

3.2.2.1.4 Faktor Budaya Konsumtif dan Pola Belanja Tidak Produktif

Selain beban belis, faktor lain yang memperparah kemiskinan di Kelurahan Wolomarang adalah budaya konsumtif yang mengakar kuat di tengah masyarakat miskin. Budaya ini tercermin dari kecenderungan rumah tangga mengalokasikan pendapatan terbatas mereka untuk kebutuhan jangka pendek atau acara adat yang bersifat seremonial, ketimbang untuk tabungan, investasi pendidikan, atau usaha produktif. Misalnya, ketika ada pesta pernikahan, kelahiran, atau acara keagamaan, masyarakat rela mengeluarkan biaya besar untuk makanan, minuman, dan hiburan, meskipun mereka harus berutang. Pola ini menciptakan siklus pengeluaran tinggi yang tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan, sehingga keluarga miskin semakin sulit menabung untuk kebutuhan jangka panjang.

Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa konsumsi yang bersifat seremonial sering dianggap lebih penting daripada pengeluaran untuk kesehatan atau pendidikan anak. Maria Talan (42 tahun, ibu rumah tangga, wawancara 6 Agustus 2025) menuturkan: *“Kalau ada pesta keluarga, kami harus sumbang besar, walau tidak punya uang. Kadang uang sekolah anak terpaksa ditunda, yang penting acara adat jalan dulu.”* Pernyataan ini menggambarkan bagaimana norma sosial dan tekanan budaya membuat masyarakat mendahulukan konsumsi simbolik dibanding kebutuhan dasar.

Lebih lanjut, budaya konsumtif ini juga terlihat pada gaya hidup masyarakat yang cepat menghabiskan pendapatan ketika memperoleh

uang tunai. Bantuan sosial yang seharusnya bisa meringankan beban rumah tangga miskin sering kali langsung habis untuk konsumsi sehari-hari atau kegiatan adat. Yohanes Lado (51 tahun, tokoh adat, wawancara 7 Agustus 2025) menegaskan: *"Bansos biasanya habis untuk beli beras, rokok, atau pesta. Tidak ada yang disisihkan untuk usaha. Jadi bantuan itu hanya lewat begitu saja, tidak bikin orang keluar dari kemiskinan."* Hal ini memperlihatkan bahwa tanpa perubahan pola pikir, bantuan eksternal hanya berfungsi sementara tanpa menghasilkan transformasi struktural dalam kehidupan ekonomi keluarga.

Selain budaya konsumtif, rendahnya pendidikan juga menjadi faktor utama yang mempertahankan siklus kemiskinan di Wolomarang. Banyak anak-anak hanya mengenyam pendidikan hingga tingkat SMP karena keterbatasan biaya transportasi, seragam, dan perlengkapan sekolah. Ketika keluarga harus memilih antara membiayai sekolah atau memenuhi kebutuhan adat, pendidikan sering dikorbankan. Anton Wuri (39 tahun, nelayan buruh, wawancara 8 Agustus 2025) menyampaikan: *"Kami ingin anak sekolah tinggi, tapi biaya terlalu besar. Jadi kebanyakan anak berhenti SMP, lalu ikut kerja bantu orang tua."* Dengan demikian, generasi muda kehilangan kesempatan untuk meningkatkan daya saing mereka di pasar kerja.

Lebih jauh lagi, rendahnya tingkat pendidikan mempersempit peluang masyarakat Wolomarang untuk mengakses pekerjaan formal atau memperoleh keterampilan yang lebih baik. Minimnya keterampilan membuat mereka tetap terjebak dalam pekerjaan sektor informal seperti buruh nelayan atau buruh angkut, dengan penghasilan rendah dan tanpa jaminan sosial. Dalam jangka panjang, kondisi ini memperkuat reproduksi kemiskinan lintas generasi. Elisabet Manu (33 tahun, kader posyandu, wawancara 9 Agustus 2025) menjelaskan: *"Anak-anak yang tidak sekolah tinggi akhirnya jadi nelayan kecil atau buruh seperti orang tuanya. Kalau begini terus, kemiskinan tidak akan berakhir."*

Dari sisi analisis, budaya konsumtif dan rendahnya pendidikan dapat dipahami melalui perspektif *cultural reproduction theory* dari Pierre Bourdieu, yang menekankan bagaimana norma, nilai, dan habitus masyarakat berkontribusi dalam mereproduksi ketidaksetaraan sosial. Budaya konsumtif mempertahankan pola pengeluaran yang tidak produktif, sementara rendahnya pendidikan menghambat akumulasi

modal kultural yang dibutuhkan untuk mobilitas sosial. Kombinasi keduanya membuat masyarakat Wolomarang tetap terjebak dalam lingkaran kemiskinan tanpa banyak peluang untuk keluar.

Dengan demikian, faktor budaya konsumtif dan rendahnya pendidikan harus dilihat sebagai elemen kunci dalam memahami kompleksitas kemiskinan di Wolomarang. Keduanya tidak hanya mengurangi kapasitas rumah tangga untuk menabung atau berinvestasi, tetapi juga membatasi potensi generasi muda untuk memperbaiki nasib mereka di masa depan. Pandangan ini juga ditegaskan oleh gabungan informan penelitian yang menyimpulkan bahwa selama pola konsumsi tidak berubah dan akses pendidikan tetap rendah, masyarakat Wolomarang akan terus hidup dalam kemiskinan struktural. Selanjutnya, faktor ini perlu dikaitkan dengan persoalan terakhir, yakni lemahnya kelembagaan lokal dalam mengatasi persoalan kemiskinan yang ada.

3.2.2.1.5 Lemahnya Kelembagaan Lokal dalam Penanggulangan Kemiskinan

Selain faktor ekonomi, kesehatan, adat, dan budaya, salah satu penyebab utama kemiskinan di Kelurahan Wolomarang adalah lemahnya kelembagaan lokal dalam menangani persoalan masyarakat. Pemerintah kelurahan memang berfungsi sebagai perpanjangan tangan program pemerintah pusat maupun kabupaten, namun kewenangan mereka sangat terbatas pada tahap administrasi dan validasi data penerima bantuan. Proses perencanaan dan desain program hampir seluruhnya diputuskan dari atas (*top-down*), sehingga masyarakat jarang dilibatkan dalam menentukan jenis intervensi yang sesuai dengan kebutuhan nyata mereka. Akibatnya, banyak program yang datang sebentar lalu hilang tanpa meninggalkan dampak signifikan.

Hasil penelitian lapangan memperlihatkan bahwa musyawarah desa yang dilakukan untuk menentukan penerima bantuan lebih bersifat formalistik, hanya mengonfirmasi daftar nama tanpa ruang besar untuk koreksi substantif. Yohanes Bala (50 tahun, perangkat desa, wawancara 10 Agustus 2025) menjelaskan: *“Kami hanya bisa usulkan nama, keputusan tetap ada di kabupaten. Jadi kalau ada warga miskin yang tidak terdata, masyarakat marahnya ke kami, padahal bukan kami yang tentukan.”* Situasi ini menunjukkan bagaimana kelembagaan desa sering diposisikan hanya sebagai perantara administratif, bukan sebagai aktor yang memiliki peran strategis dalam pengentasan kemiskinan.

Selain pemerintah kelurahan, lembaga adat juga berperan besar dalam kehidupan sosial, namun orientasinya lebih pada pemeliharaan tradisi daripada peningkatan kesejahteraan ekonomi. Kewajiban adat seperti belis, pesta keluarga, dan kontribusi kolektif justru sering memperberat beban keluarga miskin. Petrus Lusi (55 tahun, tokoh adat, wawancara 11 Agustus 2025) menegaskan: *"Adat itu harus jalan, meski orang susah. Kalau tidak ikut, mereka bisa dikucilkan. Jadi walaupun ada program pemerintah, beban adat tetap jadi prioritas."* Hal ini memperlihatkan bagaimana kelembagaan adat berfungsi ambivalen: menjaga kohesi sosial, tetapi sekaligus memperdalam kerentanan ekonomi.

Lebih jauh lagi, program pemberdayaan masyarakat yang pernah ada di Wolomarang, seperti kelompok usaha bersama melalui PNPM, jarang berlanjut karena lemahnya pendampingan dan manajemen. Banyak kelompok bubar setelah dana awal habis untuk konsumsi atau tidak dikelola secara produktif. Helena Lopo (41 tahun, kader PKK, wawancara 12 Agustus 2025) menyampaikan: *"Dulu ada kelompok simpan pinjam dari PNPM, tapi cepat bubar. Uang dipakai untuk kebutuhan sehari-hari, tidak ada yang dikembangkan jadi usaha. Karena tidak ada pendamping, akhirnya kelompok bubar dan orang kembali menunggu bansos."* Kondisi ini menegaskan bahwa tanpa dukungan kelembagaan yang kuat, program pemberdayaan hanya menjadi intervensi sementara tanpa keberlanjutan.

Selain itu, minimnya kapasitas kelembagaan lokal juga tercermin dari lemahnya koordinasi antar aktor, baik pemerintah, tokoh adat, maupun kelompok masyarakat. Tidak ada mekanisme formal yang mengintegrasikan peran masing-masing dalam menangani kemiskinan, sehingga sering terjadi tumpang tindih atau bahkan kekosongan program. Markus Sani (34 tahun, tokoh pemuda, wawancara 12 Agustus 2025) menuturkan: *"Kalau ada bantuan, semua jalan sendiri-sendiri. Pemerintah punya program, gereja punya program, tapi tidak pernah duduk bersama. Akhirnya hasilnya tidak kelihatan."* Hal ini menunjukkan bahwa lemahnya tata kelola kelembagaan membuat intervensi kemiskinan berjalan parsial dan tidak sinergis.

Dari sisi analisis, kondisi ini dapat dipahami melalui perspektif *institutional capacity theory*, yang menekankan pentingnya kapasitas

kelembagaan lokal dalam merancang, melaksanakan, dan mempertahankan program pembangunan. Kelembagaan yang lemah membuat masyarakat Wolomarang hanya menjadi penerima pasif program, tanpa ruang partisipasi yang cukup untuk mengarahkan intervensi sesuai kebutuhan lokal. Dalam jangka panjang, hal ini memperkuat mentalitas ketergantungan dan menghambat tumbuhnya inisiatif kolektif yang lebih produktif.

Dengan demikian, lemahnya kelembagaan lokal di Wolomarang bukan hanya soal kurangnya kewenangan, tetapi juga keterbatasan kapasitas untuk mengelola, mendampingi, dan memobilisasi sumber daya secara berkelanjutan. Pandangan serupa juga ditegaskan oleh gabungan informan: perangkat desa, tokoh adat, dan tokoh pemuda, yang menyimpulkan bahwa program apa pun akan gagal jika tidak ada dukungan kelembagaan yang kuat di tingkat lokal. Selanjutnya, pemahaman terhadap faktor ini memperlihatkan bagaimana kelima faktor penyebab kemiskinan di Wolomarang saling terkait: pekerjaan nelayan yang tidak stabil, stunting, beban belis, budaya konsumtif dan pendidikan rendah, serta kelembagaan yang lemah, membentuk lingkaran kemiskinan yang sulit diputus.

3.2.2.1.6 Faktor Rendahnya Tingkat Pendidikan dan Keterampilan

Rendahnya akses pendidikan formal menjadi penyebab lain yang memperkuat kemiskinan di Wolomarang. Banyak anak hanya menyelesaikan pendidikan hingga tingkat SMP, bahkan ada yang putus sekolah lebih dini karena keterbatasan biaya transportasi, seragam, dan perlengkapan. Rendahnya tingkat pendidikan membuat generasi muda tidak memiliki keterampilan memadai untuk memasuki sektor kerja yang lebih modern. Mereka akhirnya kembali bekerja sebagai buruh nelayan atau buruh kasar, sehingga reproduksi kemiskinan terus berlangsung dari generasi ke generasi.

Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa biaya pendidikan sering kali menjadi kendala utama yang tidak mampu ditanggung keluarga miskin. Meskipun pemerintah menyediakan program wajib belajar dan bantuan seperti Program Indonesia Pintar (PIP), banyak keluarga mengaku tetap kesulitan membayar ongkos transportasi ke sekolah, biaya seragam, dan buku pelajaran. Maria Lio (38 tahun, ibu rumah tangga, wawancara 13 Agustus 2025) menuturkan: *“Anak saya dapat bantuan*

PIP, tapi tetap saja kurang. Uang itu habis untuk beli buku, sementara ongkos motor tiap hari tidak ada. Akhirnya anak saya berhenti sekolah setelah SMP." Pernyataan ini memperlihatkan bagaimana bantuan pendidikan belum sepenuhnya menjawab hambatan struktural yang dihadapi keluarga miskin.

Selain itu, rendahnya kualitas pendidikan di sekolah juga berkontribusi pada lemahnya keterampilan anak-anak Wolomarang. Guru yang terbatas, fasilitas belajar yang minim, serta kurangnya akses teknologi membuat anak-anak sulit bersaing dengan siswa dari daerah lain. Yohanes Tuda (45 tahun, tokoh masyarakat, wawancara 14 Agustus 2025) menegaskan: *"Di sekolah, guru sering tidak masuk. Anak-anak hanya belajar seadanya. Bagaimana mereka bisa bersaing kalau dari kecil sudah tertinggal?"* Kondisi ini memperkuat kesenjangan antara generasi muda Wolomarang dengan anak-anak dari wilayah yang lebih maju.

Lebih jauh lagi, banyak keluarga miskin di Wolomarang masih melihat pendidikan sebagai beban, bukan investasi jangka panjang. Ketika anak sudah bisa membantu bekerja di laut atau di pasar, keluarga lebih memilih menarik mereka dari sekolah agar bisa menambah penghasilan. Fransiska Tedo (33 tahun, pedagang ikan, wawancara 14 Agustus 2025) menjelaskan: *"Kalau anak sudah SMP, biasanya ikut bapaknya melaut. Kami tidak sanggup biayai sekolah lebih tinggi. Lebih baik mereka langsung kerja bantu keluarga."* Dengan logika seperti ini, anak-anak kehilangan kesempatan untuk meningkatkan kualitas diri, dan lingkaran kemiskinan semakin sulit diputus.

Selain pendidikan formal, akses terhadap pelatihan keterampilan juga sangat terbatas. Hampir tidak ada program pelatihan dari pemerintah yang menjangkau masyarakat Wolomarang secara konsisten. Anak muda jarang memiliki kesempatan mengikuti kursus keterampilan seperti menjahit, otomotif, atau pengolahan hasil laut, yang sebenarnya bisa membuka peluang kerja baru. Markus Jemi (28 tahun, pemuda desa, wawancara 15 Agustus 2025) mengungkapkan: *"Kami ingin ada pelatihan, misalnya pengolahan ikan atau komputer. Tapi di sini tidak ada program begitu. Akhirnya anak muda hanya tahu kerja jadi buruh."* Hal ini menunjukkan bahwa rendahnya tingkat keterampilan bukan hanya akibat

putus sekolah, tetapi juga minimnya akses terhadap program pemberdayaan non-formal.

Dari sisi analisis, rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan di Wolomarang dapat dijelaskan melalui perspektif human capital theory, yang menekankan pentingnya investasi pada pendidikan dan keterampilan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan. Tanpa pendidikan yang memadai, generasi muda tetap terjebak dalam pekerjaan berupah rendah dan tidak memiliki daya tawar dalam pasar kerja. Akibatnya, kemiskinan tidak hanya dipertahankan, tetapi juga direproduksi lintas generasi.

Dengan demikian, rendahnya pendidikan dan keterampilan merupakan faktor struktural yang memperkuat kerentanan ekonomi masyarakat Wolomarang. Keterbatasan akses biaya, kualitas sekolah yang rendah, minimnya dukungan keluarga, dan absennya program pelatihan keterampilan menjadikan generasi muda kehilangan kesempatan memperbaiki nasib mereka. Pandangan serupa juga ditegaskan oleh gabungan informan penelitian yang menilai bahwa selama pendidikan dianggap sebagai beban dan bukan prioritas, maka masyarakat Wolomarang akan terus terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Selanjutnya, faktor ini perlu disintesiskan dengan faktor-faktor lain yang telah diuraikan sebelumnya untuk memahami bagaimana kemiskinan di Wolomarang merupakan hasil dari kombinasi struktural, kultural, dan kelembagaan yang saling terkait.

3.2.2.1.7 Analisis Lintas Faktor Kelurahan Wolomarang

Kemiskinan ekstrem di Kelurahan Wolomarang memperlihatkan sebuah gambaran kompleks tentang bagaimana faktor ekonomi, sosial, budaya, dan kelembagaan berinteraksi dan saling memperkuat sehingga menciptakan kondisi kerentanan struktural yang sulit diputus. Studi lapangan menunjukkan bahwa kemiskinan di wilayah ini tidak hanya bersumber dari keterbatasan pendapatan, tetapi juga dari praktik budaya, kelemahan tata kelola, serta minimnya investasi pada pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian, memahami kemiskinan Wolomarang menuntut pendekatan multidimensional yang menyatukan analisis ekonomi, kultural, dan institusional.

Faktor pertama yang paling mencolok adalah dominasi pekerjaan buruh nelayan yang tidak stabil. Sebagian besar masyarakat tidak

memiliki aset produktif berupa kapal atau alat tangkap, sehingga bergantung penuh pada juragan. Ketergantungan ini menciptakan relasi patron-klien yang timpang, di mana nelayan kecil tidak memiliki posisi tawar dalam menentukan harga ikan maupun sistem bagi hasil. Ketidakpastian pendapatan akibat musim, cuaca, dan fluktuasi harga memperparah kondisi rumah tangga miskin yang hidup dari penghasilan harian. Dengan kata lain, laut yang seharusnya menjadi sumber kesejahteraan justru menjadi sumber kerentanan karena akses terhadap modal dan pasar tidak pernah dikuasai oleh buruh nelayan.

Ketergantungan ini juga meluas ke anggota keluarga lain, terutama perempuan dan anak-anak, yang ikut bekerja dalam rantai ekonomi perikanan dengan upah rendah. Perempuan sering berperan sebagai buruh bongkar muat di pelabuhan atau penjual ikan keliling, sementara anak-anak terlibat membantu orang tua saat libur sekolah. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemiskinan di Wolomarang bersifat household-based, di mana seluruh anggota keluarga masuk dalam mekanisme kerja informal dengan risiko tinggi tetapi imbalan rendah.

Faktor kedua, tingginya angka stunting, menegaskan dimensi kesehatan dan gizi sebagai bagian integral dari kemiskinan. Stunting muncul karena pola konsumsi yang monoton dan rendah gizi akibat keterbatasan ekonomi. Rumah tangga miskin lebih sering mengutamakan pengeluaran untuk kebutuhan adat atau utang, ketimbang menyediakan makanan bergizi untuk anak-anak. Selain itu, akses ke layanan kesehatan terbatas karena faktor biaya dan jarak, sementara partisipasi dalam posyandu rendah karena lebih diprioritaskan bekerja atau melaut.

Stunting menjadi indikator bahwa kemiskinan di Wolomarang bukan sekadar masalah pendapatan, tetapi juga persoalan investasi jangka panjang pada generasi berikutnya. Anak-anak yang mengalami gizi buruk memiliki daya saing rendah di sekolah dan pada akhirnya mengulang nasib orang tua mereka sebagai buruh tidak terampil. Dengan demikian, stunting memperlihatkan bagaimana dimensi kesehatan dan pendidikan saling terkait dalam reproduksi kemiskinan lintas generasi.

Faktor ketiga, beban belis, memperlihatkan dimensi kultural yang memperkuat jeratan kemiskinan. Sistem belis dalam pernikahan adat memang menjaga martabat keluarga dan kohesi sosial, tetapi konsekuensi ekonominya sangat besar. Keluarga miskin sering terpaksa

berutang atau menjual aset produktif demi memenuhi tuntutan belis. Bahkan keluarga perempuan yang menerima belis pun jarang mendapatkan keuntungan jangka panjang karena dana tersebut langsung habis untuk pesta adat.

Tradisi belis tidak hanya berdampak pada keuangan keluarga, tetapi juga menunda atau mempersulit generasi muda dalam mengambil keputusan berumah tangga. Banyak pemuda Wolomarang yang memilih merantau untuk mengumpulkan modal belis, sehingga migrasi menjadi jalan keluar sementara dari beban adat. Namun, migrasi ini jarang menghasilkan perubahan signifikan karena pendapatan yang diperoleh lebih banyak digunakan untuk membayar belis ketimbang untuk investasi produktif.

Faktor keempat menyoroti pola konsumsi masyarakat yang lebih berorientasi pada kepentingan jangka pendek dan acara adat daripada investasi produktif. Bantuan sosial yang diterima masyarakat cenderung habis untuk konsumsi sehari-hari atau pesta, tanpa ada upaya untuk menabung atau membuka usaha baru. Budaya konsumtif ini memperlihatkan adanya habitus yang lebih menekankan pada solidaritas sosial dan simbol status, tetapi sekaligus mengorbankan kebutuhan dasar seperti gizi anak dan pendidikan.

Rendahnya tingkat pendidikan semakin memperkuat lingkaran kemiskinan ini. Banyak anak hanya menempuh pendidikan hingga SMP karena keterbatasan biaya, sehingga tidak memiliki keterampilan memadai untuk memasuki sektor kerja modern. Anak-anak yang berhenti sekolah akhirnya kembali menjadi buruh nelayan atau buruh kasar, sehingga pola hidup keluarga miskin berulang dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam perspektif *cultural reproduction theory* dari Pierre Bourdieu, pola konsumsi dan pendidikan yang rendah memperlihatkan bagaimana norma budaya dan keterbatasan modal kultural mereproduksi kemiskinan dari waktu ke waktu.

Faktor kelima, lemahnya kelembagaan lokal, menjadi penjelasan mengapa kemiskinan di Wolomarang sulit diputus meskipun ada berbagai intervensi dari pemerintah. Pemerintah kelurahan hanya berperan sebagai perantara administratif, tanpa kewenangan besar dalam menentukan program. Lembaga adat berfungsi menjaga solidaritas, tetapi sekaligus membebani ekonomi keluarga miskin melalui kewajiban adat.

Sementara itu, program pemberdayaan seperti kelompok usaha bersama sering bubar karena minim pendampingan dan lemahnya manajemen.

Minimnya koordinasi antar aktor juga membuat intervensi berjalan parsial. Program pemerintah, gereja, dan organisasi lokal sering berjalan sendiri-sendiri tanpa integrasi, sehingga dampaknya tidak terasa signifikan. Kondisi ini menunjukkan rendahnya kapasitas kelembagaan lokal dalam mendukung masyarakat keluar dari kemiskinan. Dalam perspektif *institutional capacity theory*, tanpa kapasitas kelembagaan yang kuat, program apapun hanya akan menjadi intervensi sementara tanpa keberlanjutan.

Analisis lintas faktor di Wolomarang memperlihatkan adanya lingkaran kemiskinan multidimensional. Ketidakstabilan pekerjaan buruh nelayan membuat keluarga miskin tidak memiliki pendapatan pasti. Pendapatan yang sedikit itu habis untuk kebutuhan adat dan konsumsi jangka pendek, sementara kesehatan anak dikorbankan, menghasilkan tingginya angka stunting. Rendahnya gizi memperburuk prestasi pendidikan, yang pada akhirnya membuat generasi muda tetap tidak memiliki keterampilan. Kelembagaan yang lemah tidak mampu memutus rantai ini, sehingga intervensi pemerintah pun gagal mencapai dampak transformatif.

Dengan kata lain, kemiskinan Wolomarang bukan hanya akibat satu faktor tunggal, melainkan interaksi antara ekonomi subsisten, tekanan budaya, reproduksi pendidikan rendah, dan lemahnya tata kelola lokal. Semua faktor ini saling menguatkan sehingga menciptakan situasi di mana keluarga miskin sulit keluar dari kondisi mereka.

3.2.2.2 Desa Tanarawa

3.2.2.2.1 Faktor Ketergantungan pada Pertanian Lahan Kering dengan Produktivitas Rendah

Masyarakat Desa Tanarawa sebagian besar menggantungkan hidup pada pertanian lahan kering dengan komoditas utama jagung, ubi kayu, dan padi ladang. Pertanian ini sepenuhnya mengandalkan hujan karena tidak tersedia sistem irigasi permanen maupun sarana penunjang modern. Alat produksi yang digunakan pun masih sederhana, berupa cangkul, parang, dan bibit lokal yang tidak tahan terhadap kekeringan atau hama. Kondisi ini menjadikan pola penghidupan masyarakat sangat

rapuh, sebab hasil panen sepenuhnya ditentukan oleh iklim dan curah hujan yang tidak menentu. Martha Kefi (45 tahun, petani jagung, wawancara 16 Agustus 2025) menjelaskan: *"Kalau hujan bagus, jagung cukup untuk makan, tapi kalau hujan terlambat kami tidak panen sama sekali. Kami hanya bisa tunggu musim berikutnya."* Pernyataan ini menegaskan bagaimana alam menjadi penentu utama keberlangsungan hidup keluarga di Tanarawa.

Selanjutnya, penelitian lapangan menunjukkan bahwa rata-rata produktivitas pertanian lahan kering di Tanarawa sangat rendah jika dibandingkan dengan wilayah lain yang memiliki akses irigasi. Jagung hanya bisa dipanen sekali setahun dengan hasil terbatas, sementara padi ladang kerap gagal panen akibat kekurangan air atau serangan hama. Ketika musim kemarau panjang, banyak petani kehilangan seluruh hasil tanamannya, sehingga rumah tangga miskin terpaksa mencari alternatif pekerjaan sebagai buruh kasar atau bergantung pada bantuan sosial. Yohanes Bura (52 tahun, tokoh masyarakat, wawancara 16 Agustus 2025) menuturkan: *"Kalau musim kering panjang, semua orang di sini susah. Jagung kering di ladang, ubi juga tidak tumbuh. Kami hanya bisa cari kerja serabutan atau tunggu bantuan pemerintah."* Situasi ini memperlihatkan bagaimana ketergantungan pada pertanian lahan kering menempatkan masyarakat dalam posisi yang sangat rentan.

Lebih jauh lagi, pola pertanian subsisten ini membuat keluarga miskin di Tanarawa tidak memiliki cadangan pangan maupun tabungan ekonomi. Hasil panen sebagian besar digunakan untuk konsumsi sendiri, sementara sisanya dijual dengan harga rendah di pasar lokal. Tidak ada ruang bagi mereka untuk mengakumulasi modal atau berinvestasi dalam usaha produktif lainnya. Akibatnya, setiap tahun rumah tangga harus memulai siklus tanam dengan kondisi ekonomi yang sama atau bahkan lebih buruk. Helena Lio (40 tahun, ibu rumah tangga, wawancara 17 Agustus 2025) mengungkapkan: *"Jagung biasanya hanya cukup untuk makan tiga bulan, setelah itu kami beli beras di pasar. Kalau tidak ada uang, kami utang di koperasi."* Hal ini menegaskan bahwa ketidakcukupan produksi pangan lokal secara langsung mendorong rumah tangga pada jeratan hutang konsumtif.

Selain keterbatasan produktivitas, masalah lain yang dihadapi adalah keterbatasan akses terhadap teknologi dan penyuluhan pertanian.

Program pemerintah untuk memperkenalkan bibit unggul atau pupuk bersubsidi sering tidak sampai ke petani miskin di Tanarawa karena persoalan distribusi dan pendataan. Sebagian petani mengaku hanya mendengar informasi tentang program tersebut, tetapi tidak pernah benar-benar menerima bantuan. Markus Jemi (28 tahun, pemuda desa, wawancara 18 Agustus 2025) menyampaikan: *"Katanya ada bibit unggul dan pupuk dari dinas, tapi kami jarang sekali dapat. Jadi kami tetap pakai cara lama."* Minimnya dukungan eksternal ini memperburuk kerentanan karena petani tidak memiliki kapasitas untuk meningkatkan produktivitas mereka secara mandiri.

Dari sisi sosial, ketergantungan pada pertanian lahan kering juga berdampak pada generasi muda. Banyak anak terpaksa membantu orang tua di ladang sejak kecil, sehingga pendidikan mereka terhambat. Ketika musim tanam dan panen tiba, anak-anak lebih banyak berada di ladang daripada di sekolah. Hal ini menyebabkan prestasi belajar rendah dan sering kali berakhir pada putus sekolah dini. Dengan demikian, siklus kemiskinan tidak hanya dipertahankan oleh rendahnya produktivitas pertanian, tetapi juga diperkuat oleh keterbatasan pendidikan generasi berikutnya.

Dalam perspektif analitis, ketergantungan pada pertanian lahan kering di Tanarawa dapat dipahami melalui kerangka *livelihood vulnerability*. Basis penghidupan masyarakat sangat rentan terhadap faktor eksternal seperti perubahan iklim, musim, dan kondisi pasar. Ketiadaan aset produksi, minimnya diversifikasi usaha, dan keterbatasan dukungan kelembagaan membuat masyarakat tidak memiliki pilihan selain bertahan dengan sistem subsisten yang rapuh. Hal ini memperlihatkan bahwa kemiskinan di Tanarawa bukan hanya persoalan kurangnya pendapatan, tetapi juga persoalan struktural yang terkait dengan basis ekonomi lokal.

Dengan demikian, ketergantungan pada pertanian lahan kering dengan produktivitas rendah menjadi faktor utama yang memperkuat kemiskinan di Desa Tanarawa. Kondisi ini tidak hanya menciptakan ketidakpastian ekonomi rumah tangga, tetapi juga menutup peluang bagi masyarakat untuk berinvestasi pada pendidikan, kesehatan, maupun usaha produktif. Selanjutnya, kerentanan ini akan semakin diperburuk

oleh faktor ekologis dan minimnya diversifikasi usaha, yang akan dibahas pada bagian berikutnya.

3.2.2.2.2 Faktor Kerentanan Ekologis dan Minimnya Diversifikasi Usaha

Kerentanan kemiskinan di Tanarawa juga diperkuat oleh kondisi ekologis yang tidak stabil. Lahan kering yang rawan kekeringan, erosi, dan degradasi kesuburan tanah membuat hasil pertanian semakin sulit diandalkan. Tidak adanya teknologi konservasi atau sarana penampungan air menjadikan masyarakat makin terpapar pada risiko perubahan iklim. Lebih jauh lagi, masyarakat tidak memiliki usaha alternatif selain bertani, sehingga ketika panen gagal, satu-satunya pilihan adalah berutang atau bekerja serabutan di luar desa. Yohanes Bura (52 tahun, tokoh masyarakat, wawancara 16 Agustus 2025) menuturkan: *"Kalau musim kering panjang, semua orang di sini susah. Jagung kering di ladang, ubi juga mati, jadi tidak ada hasil. Kami hanya bisa tunggu bantuan atau utang lagi."* Hal ini memperlihatkan bagaimana faktor ekologis berperan langsung dalam mempertahankan kemiskinan.

Selanjutnya, kerentanan ekologis juga diperparah oleh minimnya sarana konservasi lingkungan. Tidak ada irigasi teknis, embung, atau sistem penampungan air hujan yang memadai, sehingga air hujan tidak termanfaatkan secara optimal. Lahan pertanian pun semakin kritis karena terus ditanami tanpa adanya rotasi tanaman atau penggunaan pupuk yang sesuai. Kondisi ini membuat tanah kehilangan kesuburan, sementara masyarakat tidak memiliki pengetahuan maupun teknologi untuk memperbaikinya. Agustinus Bala (48 tahun, petani, wawancara 17 Agustus 2025) menjelaskan: *"Tanah sudah keras, kalau hujan deras air langsung lari ke sungai. Kami tidak tahu cara olah tanah yang baik, jadi hasil makin sedikit."* Situasi ini menunjukkan keterkaitan erat antara kerentanan ekologis dan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di Tanarawa.

Lebih jauh lagi, minimnya diversifikasi usaha membuat keluarga miskin semakin terjebak pada kerentanan yang sama dari tahun ke tahun. Hampir tidak ada alternatif mata pencaharian lain di luar pertanian ladang, sehingga ketika gagal panen, satu-satunya pilihan adalah menjadi buruh tani di desa lain, bekerja serabutan, atau merantau sementara ke kota. Namun pekerjaan alternatif ini bersifat sementara, dengan pendapatan rendah dan tidak berkelanjutan. Markus Jemi (28 tahun, pemuda desa,

wawancara 18 Agustus 2025) menuturkan: *"Kalau gagal panen, orang-orang biasanya pergi kerja bangunan di Maumere. Tapi hanya beberapa bulan, habis itu pulang lagi. Tidak ada usaha lain yang bisa jalan di sini."* Kondisi ini memperlihatkan bagaimana ketiadaan diversifikasi usaha membuat masyarakat Tanarawa tidak memiliki cadangan penghidupan ketika menghadapi krisis.

Selain itu, penelitian juga menemukan bahwa minimnya akses terhadap pasar dan modal semakin membatasi diversifikasi usaha. Banyak warga yang ingin mencoba membuka usaha kecil, seperti beternak ayam, berdagang hasil tani, atau membuat kerajinan, tetapi terbentur modal awal dan akses pasar yang terbatas. Produk lokal sulit bersaing karena keterbatasan kualitas dan jaringan distribusi. Akibatnya, masyarakat lebih memilih bertahan pada pertanian lahan kering meskipun hasilnya tidak menentu. Helena Lio (40 tahun, ibu rumah tangga, wawancara 17 Agustus 2025) menyampaikan: *"Kami pernah coba ternak ayam, tapi mati karena pakan tidak ada. Kalau mau jual ke pasar, jaraknya jauh dan ongkos mahal. Jadi kami berhenti dan kembali tanam jagung saja."* Pernyataan ini menegaskan bahwa tanpa dukungan struktural, upaya diversifikasi hanya berakhir pada kegagalan.

Dalam perspektif analitis, kerentanan ekologis dan minimnya diversifikasi usaha di Tanarawa dapat dipahami melalui konsep *livelihood vulnerability framework*. Masyarakat sangat bergantung pada satu sumber penghidupan yang rentan terhadap perubahan iklim dan kerusakan lingkungan, sementara mereka tidak memiliki aset finansial, sosial, maupun teknologi untuk menciptakan alternatif. Ketika satu sistem penghidupan terganggu, seluruh rumah tangga ikut terdampak tanpa memiliki cadangan yang dapat diandalkan. Hal ini menjelaskan mengapa kemiskinan di Tanarawa begitu sulit diputus meskipun ada intervensi bantuan sosial dari pemerintah.

Dengan demikian, kerentanan ekologis dan minimnya diversifikasi usaha merupakan faktor penting yang memperkuat kemiskinan di Desa Tanarawa. Ketiadaan sarana irigasi, lemahnya konservasi lahan, rendahnya kapasitas pengetahuan pertanian, serta terbatasnya akses pasar membuat masyarakat terus terjebak dalam pola penghidupan yang rapuh. Ketika pertanian gagal, mereka tidak punya alternatif selain berutang atau bergantung pada bantuan, yang pada akhirnya

memperkuat siklus kemiskinan. Selanjutnya, kerentanan ini akan semakin diperburuk oleh persoalan error data bantuan sosial dan dampaknya terhadap keberlanjutan pendidikan anak, yang akan dibahas pada faktor berikutnya.

3.2.2.2.3 Faktor Error Data Bansos dan Dampaknya terhadap Pendidikan Anak

Kesalahan dalam pendataan bantuan sosial menjadi faktor yang sangat menentukan keberlangsungan hidup keluarga miskin di Tanarawa. Banyak rumah tangga yang seharusnya berhak tidak tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sehingga tidak menerima program seperti PKH atau BPNT. Sebaliknya, ada keluarga dengan kondisi ekonomi lebih baik yang tetap terdaftar sebagai penerima. Ketidakakuratan ini bukan hanya menimbulkan kecemburuan sosial, tetapi juga berdampak langsung pada keberlanjutan pendidikan anak-anak miskin. Yohanes Jaga (50 tahun, perangkat desa, wawancara 16 Agustus 2025) menegaskan: *"Kami sudah usulkan nama warga miskin, tapi yang keluar di data kadang orang yang punya rumah bagus. Sementara tetangga yang rumahnya reyot justru tidak masuk."*

Kesalahan data tersebut tidak hanya menimbulkan rasa tidak adil, tetapi juga berdampak langsung pada akses anak-anak terhadap pendidikan. Banyak keluarga miskin yang sebelumnya mengandalkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk biaya sekolah terpaksa menarik anak mereka ketika bantuan dihentikan atau tidak lagi diterima. Agustina Hali (39 tahun, ibu rumah tangga, wawancara 17 Agustus 2025) menyampaikan: *"Dulu waktu ada PKH, anak saya bisa lanjut SMP. Tapi setelah bantuan berhenti, kami tidak sanggup beli seragam dan bayar ongkos. Akhirnya anak berhenti sekolah."* Kasus seperti ini menunjukkan bahwa keberlangsungan pendidikan anak-anak miskin sangat bergantung pada kesinambungan program bansos.

Lebih lanjut, penghentian PKH juga menimbulkan ketidakpastian psikologis bagi keluarga. Banyak orang tua merasa kecewa dan tidak lagi percaya pada sistem, karena program yang seharusnya membantu justru memutus akses pendidikan. Fransiska Liku (42 tahun, ibu rumah tangga, wawancara 17 Agustus 2025) menuturkan: *"Kami heran kenapa nama kami tiba-tiba hilang dari PKH. Padahal kondisi kami tidak berubah. Anak-anak jadi korban, mereka terpaksa berhenti sekolah."* Situasi ini

menegaskan lemahnya mekanisme monitoring dan evaluasi program bansos, yang seharusnya bisa menjamin keberlanjutan bantuan bagi keluarga yang benar-benar membutuhkan.

Dampak error data tidak berhenti pada individu, melainkan berpengaruh pada komunitas secara keseluruhan. Anak-anak yang putus sekolah dalam jumlah banyak menciptakan efek domino berupa rendahnya kualitas sumber daya manusia desa. Generasi muda yang kehilangan kesempatan belajar akhirnya hanya bisa bekerja sebagai buruh tani atau nelayan musiman, melanjutkan pola hidup orang tua mereka. Markus Jemi (28 tahun, pemuda desa, wawancara 18 Agustus 2025) menegaskan: *"Banyak teman saya berhenti sekolah karena PKH dihentikan. Sekarang mereka hanya kerja serabutan. Kalau begini terus, kami tidak pernah bisa keluar dari kemiskinan."* Pernyataan ini memperlihatkan reproduksi kemiskinan lintas generasi yang dipicu oleh kebijakan sosial yang tidak konsisten.

Dari sisi analitis, persoalan *error data* bansos dapat dipahami melalui perspektif *human capital theory*. Pendidikan merupakan bentuk utama investasi dalam modal manusia yang menentukan kualitas dan produktivitas generasi berikutnya. Ketika akses pendidikan terputus akibat error data bansos, maka kesempatan anak-anak miskin untuk memperoleh keterampilan dan meningkatkan mobilitas sosial juga hilang. Alih-alih menjadi instrumen pengentasan kemiskinan, bansos yang salah sasaran justru berfungsi memperkuat kemiskinan struktural.

Lebih jauh lagi, persoalan ini juga mencerminkan lemahnya governance system dalam pengelolaan data sosial. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses validasi membuat masyarakat desa merasa tidak memiliki kontrol atas nasib mereka. Aparat desa yang hanya berperan sebagai perantara administratif sering disalahkan oleh warga, meskipun keputusan akhir berada di tingkat kabupaten atau pusat. Hal ini memperlemah kepercayaan masyarakat terhadap institusi lokal, yang pada gilirannya memperburuk legitimasi kelembagaan desa.

Dengan demikian, error data bansos bukan hanya persoalan teknis administrasi, tetapi juga faktor struktural yang memperparah kemiskinan di Desa Tanarawa. Anak-anak yang terpaksa berhenti sekolah karena bantuan dihentikan memperlihatkan bagaimana kebijakan sosial yang

tidak konsisten bisa menghasilkan dampak jangka panjang terhadap pembangunan manusia. Pandangan ini juga ditegaskan oleh gabungan informan penelitian: perangkat desa, ibu rumah tangga, dan pemuda desa, yang menilai bahwa selama data bansos tidak diperbaiki, kemiskinan akan terus berulang karena generasi muda kehilangan kesempatan untuk memperbaiki nasib. Selanjutnya, faktor perangkap hutang koperasi mingguan menjadi elemen penting lain yang menunjukkan strategi bertahan hidup keluarga miskin, tetapi justru memperkuat jeratan kemiskinan, yang akan dibahas pada bagian berikutnya.

3.2.2.2.4 Faktor Perangkap Hutang Koperasi Mingguan

Perangkap hutang dari koperasi mingguan menjadi salah satu penyebab utama yang memperkuat kemiskinan di Desa Tanarawa. Bagi masyarakat miskin, koperasi dan lembaga simpan pinjam informal sering dianggap sebagai solusi cepat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pinjaman biasanya dipakai membeli beras, membayar biaya sekolah, atau menutup pengeluaran mendesak seperti pesta adat. Akan tetapi, skema pinjaman mingguan dengan bunga tinggi justru membuat keluarga miskin semakin terjerat dan sulit keluar dari lingkaran hutang. Petrus Lawa (47 tahun, petani, wawancara 18 Agustus 2025) menegaskan: *"Kalau tidak pinjam, kami tidak bisa beli makan. Tapi kalau pinjam, tiap minggu harus bayar bunga. Hasil panen akhirnya habis untuk bayar utang."*

Hasil penelitian lapangan memperlihatkan bahwa praktik hutang mingguan ini sudah menjadi bagian dari strategi bertahan hidup yang diwariskan secara turun-temurun. Banyak keluarga lebih memilih berutang dibandingkan mencari alternatif lain karena prosesnya cepat dan tidak memerlukan jaminan. Akan tetapi, pinjaman tersebut hampir tidak pernah digunakan untuk kegiatan produktif seperti membeli bibit unggul, ternak, atau alat pertanian. Sebaliknya, pinjaman cenderung habis untuk kebutuhan konsumsi jangka pendek, sehingga tidak menghasilkan tambahan pendapatan. Maria Kefi (43 tahun, ibu rumah tangga, wawancara 18 Agustus 2025) menjelaskan: *"Kalau kami pinjam, uang langsung habis untuk beli beras atau bayar sekolah. Tidak pernah cukup untuk usaha, jadi tiap minggu harus cari uang lagi untuk cicilan."* Situasi ini menunjukkan bahwa hutang bukan sekadar solusi sementara, tetapi juga sumber kerentanan baru.

Lebih jauh lagi, sistem koperasi mingguan sering kali tidak transparan dan lebih menguntungkan pemberi pinjaman. Masyarakat miskin jarang memahami besaran bunga yang sebenarnya mereka bayar, karena hitungan dilakukan per minggu, bukan per bulan atau per tahun. Dalam praktiknya, bunga bisa mencapai 20–30 persen dari jumlah pinjaman, sehingga dalam beberapa bulan total cicilan melebihi pokok pinjaman. Yohanes Jaga (50 tahun, perangkat desa, wawancara 16 Agustus 2025) menyampaikan: *"Banyak warga tidak sadar bunganya tinggi sekali. Mereka hanya pikir yang penting bisa dapat uang cepat, tapi akhirnya susah bayar dan terjerat lebih dalam."* Dengan demikian, koperasi yang seharusnya menjadi lembaga pemberdayaan justru berfungsi sebagai instrumen yang memperkuat kemiskinan.

Selain membebani ekonomi keluarga, jeratan hutang koperasi juga berdampak pada relasi sosial di desa. Banyak warga mengalami konflik dengan pengurus koperasi atau tetangga ketika tidak mampu membayar cicilan tepat waktu. Ada yang terpaksa menjual aset produktif seperti ternak kecil atau perhiasan keluarga demi melunasi pinjaman. Bahkan dalam beberapa kasus, keluarga yang menunggak pembayaran mengalami tekanan sosial berupa pengucilan atau kehilangan kepercayaan di komunitas. Fransiska Liku (42 tahun, ibu rumah tangga, wawancara 17 Agustus 2025) menuturkan: *"Kalau telat bayar, nama langsung diumumkan di kelompok. Rasanya malu, tapi kami memang tidak ada uang. Akhirnya terpaksa jual ayam untuk lunasi."* Praktik semacam ini memperlihatkan bagaimana hutang bukan hanya membebani ekonomi, tetapi juga memengaruhi martabat dan hubungan sosial.

Dalam perspektif analitis, fenomena hutang koperasi di Tanarawa dapat dipahami melalui kerangka debt trap theory dan livelihood vulnerability. Hutang yang semula menjadi strategi bertahan hidup justru berubah menjadi perangkap yang memperkuat kerentanan. Alih-alih meningkatkan kapasitas ekonomi rumah tangga, skema pinjaman konsumtif memperlemah daya tahan masyarakat dalam jangka panjang. Setiap musim panen hanya menjadi momen untuk melunasi hutang lama, bukan untuk meningkatkan kesejahteraan. Hal ini menjelaskan mengapa banyak keluarga tetap miskin meskipun bekerja keras di ladang setiap tahun.

Dengan demikian, perangkap hutang koperasi mingguan merupakan faktor penting yang memperkuat siklus kemiskinan di Desa Tanarawa. Praktik ini tidak hanya menguras pendapatan rumah tangga, tetapi juga menghalangi upaya untuk berinvestasi pada sektor produktif seperti pertanian modern atau pendidikan anak. Pandangan serupa juga ditegaskan oleh gabungan informan penelitian: petani, ibu rumah tangga, dan perangkat desa, yang menyimpulkan bahwa selama masyarakat lebih bergantung pada hutang konsumtif dengan bunga tinggi, maka kemiskinan akan terus berulang. Selanjutnya, faktor-faktor ini perlu dilihat secara komprehensif untuk memahami bagaimana kemiskinan di Tanarawa bersifat multidimensional, melibatkan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan kelembagaan yang saling terkait.

3.2.2.2.5 Analisis Lintas Faktor Kasus Berganda Desil 2: Kemiskinan Multidimensi

Analisis lintas faktor untuk Desil 2: Kemiskinan Multidimensi Tinggi berangkat dari dua konteks yang kontras namun saling bercermin: pesisir Kelurahan Wolomarang dan lahan kering Desa Tanarawa. Keduanya menunjukkan kemiskinan yang tidak hanya bertumpu pada pendapatan rendah, tetapi juga pada deprivasi gizi, pendidikan, dan kelemahan kelembagaan. Untuk membaca temuan, saya menggunakan kerangka *livelihood vulnerability* (kerentanan penghidupan), *capability approach* (kapabilitas dan kebebasan substantif), serta perspektif *governance/institutional capacity* (kapasitas tata kelola). Dengan kerangka ini, tiap faktor diposisikan bukan sebagai variabel terpisah, melainkan sebagai jaring yang bertaut dan membentuk ekosistem kemiskinan yang berulang dari satu musim ke musim berikutnya.

1) Basis Penghidupan: Buruh Nelayan vs Lahan Kering Subsisten

Di Wolomarang, fondasi ekonomi keluarga miskin bertumpu pada kerja **buruh nelayan** tanpa aset produksi, sehingga seluruh rantai nilai dikomandoi juragan dan tengkulak. Ketika moda produksi, akses BBM, es, dan distribusi dikuasai pemilik modal, posisi tawar buruh nelayan tereduksi menjadi harga yang “diterima”, bukan “ditentukan”. Cuaca dan musim memperparah volatilitas pendapatan, sementara biaya operasional dan risiko tetap tinggi di tingkat rumah tangga. Pola ini membuat rumah tangga sulit melakukan akumulasi

aset, karena penghasilan hari ini segera terserap untuk kebutuhan hari ini.

Sebaliknya di Tanarawa, ketergantungan pada pertanian lahan kering menjadikan hujan sebagai variabel tunggal yang menentukan makan tidaknya keluarga di bulan-bulan paceklik. Jagung, ubi, dan padi ladang dipanen sekali setahun dengan hasil tidak stabil, sementara akses irigasi dan teknologi konservasi tanah hampir nihil. Ketika musim kering memanjang, bukan hanya panen yang gagal, tetapi juga cadangan pangan keluarga runtuh dalam hitungan minggu. Keluarga lalu menutup kekosongan melalui utang konsumtif, menjual ternak kecil, atau menjadi buruh serabutan, yang semuanya tidak membangun daya tahan jangka panjang.

2) Rantai Nilai dan Struktur Pasar yang Timpang

Dalam ekonomi pesisir Wolomarang, asimetri informasi dan modal tercermin dari kontrol harga oleh tengkulak/juragan. Buruh nelayan tidak menguasai cold chain, akses pasar kota, atau sarana penyimpanan, sehingga harus menjual cepat dengan harga rendah. Ketika hasil tangkap sedikit, dampaknya ganda: pendapatan anjlok sementara utang operasional tetap harus dibayar. Ketergantungan ini secara struktural memindahkan risiko dari pemodal ke buruh, sekaligus mengunci mereka dalam ekonomi harian yang tanpa ruang menabung.

Di Tanarawa, struktur pasar yang sempit juga terlihat pada komoditas jagung dan ubi yang dijual dalam kondisi kualitas bervariasi dan tanpa standar mutu. Ketiadaan sarana pascapanen, gudang, dan akses pembeli besar membuat harga di tingkat petani selalu ditekan. Akibatnya, meski bekerja keras sepanjang musim, nilai tukar hasil tanam tidak cukup untuk menutup biaya pendidikan anak atau memperbaiki rumah. Situasi ini mencerminkan ketertinggalan dalam rantai nilai, bukan sekadar kurangnya kerja keras di tingkat rumah tangga.

3) Gizi, Stunting, dan Modal Manusia

Wolomarang menampilkan pola stunting yang menyatu dengan kemiskinan harian: konsumsi berulang nasi–ubi–ikan asin tanpa variasi protein hewani berkualitas dan sayuran segar. Keterbatasan akses layanan kesehatan memperpanjang jeda deteksi dan intervensi

gizi, sementara biaya transportasi ke puskesmas menjadi penghalang yang nyata. Beban ganda perempuan, bekerja di pelabuhan dan mengelola rumah, menciutkan waktu dan dana untuk menyiapkan gizi seimbang. Akibatnya, anak-anak tumbuh dengan tinggi badan terhambat, daya tahan tubuh lemah, serta performa kognitif yang tertinggal di sekolah.

Di Tanarawa, stunting beririsan dengan ketidakpastian pangan pascapanen yang cepat habis. Ketika cadangan jagung tiga bulan menipis, rumah tangga berpindah ke beras beli yang dibiayai lewat utang koperasi mingguan. Pola ini membuat kualitas pangan merosot di kuartal-kuartal rawan, persis saat kebutuhan gizi anak tetap tinggi. Dalam jangka panjang, kedua desa mengalami penurunan modal manusia: anak yang gizinya kurang cenderung berprestasi rendah, lalu mengulang pekerjaan orang tua sebagai buruh tidak terampil.

4) **Beban Kultural: Belis, Konsumsi Seremonial, dan Dilema Martabat**

Di Wolomarang, belis berfungsi sebagai simbol martabat, tetapi di sisi ekonomi, ia memicu utang besar, gadai aset, atau migrasi sementara demi mengumpulkan modal pernikahan. Dana yang masuk ke keluarga perempuan pun sering cepat habis untuk ritual pesta, konsumsi, dan kewajiban sosial, bukan diubah menjadi tabungan atau peralatan usaha. Pemuda menunda pernikahan atau merantau, namun remitansi kerap habis membiayai belis berikut pesta, bukan investasi produktif. Tradisi yang dimaksudkan mempererat relasi kekerabatan berubah menjadi mekanisme redistribusi yang menguras, bukan menguatkan daya tahan keluarga miskin.

Di Tanarawa, beban adat mewujud sebagai budaya konsumtif seremonial dalam pesta keluarga, keagamaan, dan kontribusi kolektif. Norma “harus hadir, harus menyumbang” membuat prioritas anggaran bergeser dari pendidikan dan gizi ke konsumsi simbolik. Bantuan sosial yang turun periodik pun sering selesai dalam hitungan hari karena tekanan sosial untuk berbagi dan merayakan. Pola ini membentuk habitus yang memuliakan pengeluaran seremonial, sementara investasi produktif tertunda tanpa batas waktu.

5) **Utang Konsumtif dan Perangkap Koperasi Mingguan**

Utang muncul sebagai strategi bertahan yang paling mudah diakses, baik di pesisir maupun lahan kering. Di Wolomarang, lonjakan pengeluaran belis dan pesta mendorong pinjaman ke koperasi mingguan atau rentenir lokal, dengan bunga efektif yang tidak sepenuhnya dipahami debitur. Di Tanarawa, koperasi mingguan telah menjadi “lumbung” darurat keluarga ketika panen gagal dan cadangan pangan susut. Namun skema cicilan mingguan ber-bunga tinggi membuat setiap musim panen habis untuk melunasi sisa, bukan untuk menambah aset.

Perangkap ini memiliki dimensi sosial yang menyakitkan: keterlambatan bayar diumumkan di kelompok, memunculkan rasa malu dan erosi martabat. Keluarga lalu menjual ayam, kambing, atau barang rumah tangga untuk menutup cicilan, yang pada gilirannya menipiskan kapasitas produktif mereka. Dari waktu ke waktu, rumah tangga menjadi manajer kekurangan: menata siapa yang dibayar dulu dan siapa yang harus menunggu, bukan menata pertumbuhan atau investasi. Utang yang berulang bukan lagi jembatan, melainkan jeruji yang membuat ruang gerak menyempit.

6) Pendidikan, Keterampilan, dan Reproduksi Ketertinggalan

Di Wolomarang, pendidikan kerap berhenti di SMP karena ongkos transportasi, seragam, buku, dan kebutuhan harian tak bisa dipenuhi bersamaan. Kualitas sekolah ikut menjadi isu: guru yang tidak penuh hadir, fasilitas terbatas, dan akses teknologi yang minim membuat anak kalah start sejak awal. Ketika anak telah “cukup besar” untuk membantu melaut atau berdagang ikan, keluarga sering memilih menghentikan sekolah demi menambah pendapatan hari ini. Keputusan ini terlihat rasional dalam horizon harian, tetapi merugikan masa depan karena modal kultural dan keterampilan tidak pernah tumbuh.

Tanarawa menghadapi reproduksi putus sekolah yang diperparah error data bansos, nama yang hilang dari PKH berarti ongkos sekolah mendadak tanpa penyangga. Orang tua merasa dikhianati oleh sistem data, dan anak menjadi korban pertama kebijakan yang tidak konsisten. Ketiadaan program pelatihan vokasional berkelanjutan (pengolahan hasil tani, peternakan, keterampilan dasar) menutup peluang transisi ke pekerjaan non-

pertanian. Alhasil, generasi muda kembali ke ladang yang sama, dengan alat yang sama, dalam iklim yang kian tidak menentu.

7) Kelembagaan: Administratif, Bukan Transformatif

Pada level kelurahan/desa, kapasitas kelembagaan terutama administratif: mengusulkan nama penerima, memverifikasi daftar, dan menyalurkan bantuan. Keputusan kunci berada di level kabupaten, sehingga musyawarah di tingkat lokal lebih bersifat formalistik ketimbang deliberatif-substantif. Program pemberdayaan seperti PNPM atau kelompok usaha kerap redup ketika pendampingan berhenti, manajemen lemah, dan dana awal habis untuk konsumsi. Di Wolomarang, lembaga adat memelihara kohesi, tetapi juga memelihara beban kolektif; di Tanarawa, jejaring aktor (pemerintah, gereja, kelompok warga) berjalan sendiri-sendiri tanpa orkestrasi.

Keterputusan antar-aktor membuat intervensi parsial dan tak berkelanjutan. Misalnya, memperkenalkan bibit unggul tanpa menjamin air, pasar, dan modal kerja hanya akan memindahkan risiko dari negara ke petani. Demikian juga pelatihan tanpa akses alat dan pembeli hanya menaikkan harapan sesaat yang diikuti kekecewaan. Kelembagaan yang kuat seharusnya mengintegrasikan air, benih, alat, pasar, dan pembiayaan mikro produktif dalam satu rancangan lintas sektor. Tanpa itu, rumah tangga kembali sendirian menghadapi musim dan pasar.

Jika dirangkai, faktor-faktor di atas membentuk lingkaran pengunci yang konsisten di kedua desa. Pendapatan harian yang rapuh mendorong utang; utang memangkas ruang gizi dan pendidikan; gizi rendah melemahkan prestasi sekolah; sekolah yang pendek mengantar anak ke pekerjaan berupah rendah; upah rendah kembali ke utang. Di Wolomarang, belis dan pesta menjadi akselerator pengeluaran besar; di Tanarawa, musim kering dan degradasi tanah menjadi akselerator gagal panen. Dua akselerator ini berbeda wujud, tetapi sama-sama mendorong keluarga menukar masa depan untuk menutup hari ini.

Dari kacamata kapabilitas, keluarga miskin kehilangan kebebasan substantif untuk menunda konsumsi seremonial, berinvestasi pada gizi, atau menambah jam sekolah. Dari kacamata kerentanan penghidupan, aset fisik (kapal, jaring, sumur/embung),

finansial (tabungan, kredit produktif), manusia (pendidikan, keterampilan), dan sosial (jejaring pasar yang fair) berada pada level rendah secara simultan. Karena itu, guncangan kecil, berupa angin barat, harga beras naik, nama dicoret dari PKH, menghasilkan dampak yang berlipat. Lingkaran ini menjelaskan mengapa kemiskinan multidimensi bertahan meski keluarga bekerja keras setiap hari.

Table 99. Ringkasan Analisis Lintas Faktor Kasus Berganda Desil 2

Faktor	Kelurahan Wolomarang (Pesisir)	Desa Tanarawa (Pegunungan)	Analisis Lintas Faktor
Basis Penghidupan	Buruh nelayan tanpa kapal/jaring sendiri; bergantung penuh pada juragan/tengkulak; penghasilan harian fluktuatif; rentan musim/angin barat.	Pertanian lahan kering subsisten (jagung, ubi, padi ladang); produktivitas rendah; tergantung hujan; gagal panen menuju paceklik.	Sama-sama bergantung pada sumber penghidupan rapuh tanpa diversifikasi. Menunjukkan kerentanan struktural tinggi (*livelihood vulnerability*).
Kesehatan & Gizi (Stunting)	Prevalensi stunting tinggi; pola konsumsi monoton (nasi–ubi–ikan asin); akses kesehatan terbatas; beban ganda perempuan.	Gizi anak rentan saat cadangan jagung habis; beralih ke beras dengan utang; akses kesehatan juga terbatas.	Kedua desa mengalami deprivasi modal manusia (*human capital*), menghasilkan reproduksi kemiskinan lintas generasi.
Faktor Kultural (Belis/Adat & Budaya Konsumtif)	Belis tinggi → keluarga berutang/menjual aset; dana belis cepat habis untuk pesta; pemuda menunda nikah atau migrasi.	Budaya konsumtif seremonial (pesta adat, sumbangan keluarga/gereja); bantuan sosial cepat habis untuk konsumsi, bukan investasi.	Faktor kultural menjadi perangkap kemiskinan. Tradisi/adat menjaga kohesi sosial, tetapi menekan kapasitas ekonomi keluarga miskin.
Utang & Koperasi Mingguan	Utang untuk belis/pesta; koperasi mingguan & rentenir dengan bunga tinggi; memperlemah daya tahan keluarga.	Utang mingguan jadi strategi survival utama; bunga tinggi → panen habis untuk bayar utang; memicu konflik sosial.	Utang berubah dari jembatan menjadi jerat, menciptakan *debt trap* yang memperkuat ekonomi subsisten berutang.
Pendidikan & Keterampilan	Anak putus sekolah di SMP; kualitas sekolah rendah; anak ikut melaut/dagang ikan; pendidikan dianggap beban.	Anak putus sekolah akibat error data PKH; minim pelatihan keterampilan; anak muda kembali ke ladang dengan alat tradisional.	Kedua desa mengalami defisit modal kultural (*Bourdieu*). Pendidikan rendah ke pekerjaan tetap informal dan menciptakan siklus kemiskinan berulang.
Kelembagaan	Pemerintah kelurahan hanya administratif; PNPM bubar; lembaga adat jaga solidaritas tapi bebankan keluarga.	Error data bansos; aparat desa disalahkan; aktor (pemerintah, gereja, kelompok warga) berjalan sendiri-sendiri.	Kapasitas kelembagaan lokal lemah dan parsial. Intervensi top–down tanpa keberlanjutan.

Sintesis	Terjebak dalam siklus ekonomi pesisir (juragan–tengkulak–belis–utang).	Terjebak dalam siklus pertanian subsisten (paceklik–utang–error bansos).	Sama-sama berada dalam ekosistem kemiskinan multidimensi: ekonomi rapuh, gizi buruk, adat konsumtif, pendidikan rendah, dan kelembagaan lemah.

Sumber: Olahan Penulis, 2025

3.2.3 Desil 3: Kemiskinan Relatif (Pak Nursalam)

3.2.3.1 Kelurahan Madawat

3.2.3.1.1 Faktor Kerentanan Hidup di Wilayah Urban-Periurban

Kelurahan Madawat menempati posisi yang khas di Kabupaten Sikka karena berada di zona peralihan antara pusat kota Maumere dengan wilayah pedesaan di sekitarnya. Lokasi ini menjadikan Madawat tidak sepenuhnya memiliki karakter desa, tetapi juga belum sepenuhnya menikmati keuntungan kota. Situasi peralihan atau periurban ini menimbulkan kerentanan sosial-ekonomi yang unik: di satu sisi, warga memiliki akses fisik lebih dekat ke pasar, sekolah, dan fasilitas kesehatan di Maumere, namun di sisi lain daya beli dan kapasitas ekonomi mereka tidak memungkinkan untuk memanfaatkan akses tersebut secara optimal. Dengan kata lain, Madawat merepresentasikan paradoks urban-periurban, di mana kedekatan dengan kota justru menegaskan keterbatasan masyarakat miskin karena tidak ada sumber daya yang cukup untuk mengubah kedekatan menjadi kesejahteraan.

Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Madawat bekerja di sektor informal. Pekerjaan yang paling dominan adalah buruh bangunan, penjual kaki lima, buruh angkut di pasar, dan tukang ojek. Tidak ada jaminan pendapatan tetap karena mereka bekerja dengan sistem harian lepas, bergantung sepenuhnya pada permintaan pasar. Pada musim tertentu, terutama ketika proyek pembangunan menurun atau aktivitas pasar sepi, banyak rumah tangga kehilangan penghasilan harian dan terpaksa berutang. Kondisi ini membuat rumah tangga miskin di Madawat hidup dalam ketidakpastian ekonomi yang berulang setiap bulan.

Keterbatasan lahan pertanian juga memperparah situasi, karena berbeda dengan desa-desa lain di Kabupaten Sikka, masyarakat Madawat tidak lagi memiliki lahan luas untuk bercocok tanam sebagai penyangga kebutuhan pangan. Lahan yang tersedia sebagian besar telah beralih fungsi menjadi permukiman atau lahan komersial akibat ekspansi kota. Hal ini menjadikan keluarga miskin sepenuhnya bergantung pada pasar untuk memenuhi kebutuhan pangan. Yakobus Wangge (52 tahun, tokoh masyarakat, wawancara 19 Agustus 2025) menegaskan: *“Dulu orang Madawat masih punya kebun kecil untuk tanam jagung atau ubi,*

tapi sekarang tanah sudah jadi rumah atau ruko. Jadi orang hanya bisa beli di pasar, padahal uang kerja harian tidak cukup." Pernyataan ini menegaskan bahwa urbanisasi membawa dampak langsung berupa hilangnya basis penghidupan tradisional.

Selanjutnya, wawancara dengan Maria Leu (41 tahun, ibu rumah tangga, wawancara 20 Agustus 2025) memperlihatkan sisi lain dari kerentanan urban-periurban. Ia menyatakan: *"Kalau ada kerja borongan bangunan, suami bisa dapat Rp100.000 sehari, tapi kalau tidak ada proyek, ya tidak ada uang. Mau cari kebun juga tidak ada tanah lagi. Jadi kadang sehari makan sekali, tergantung uang ada atau tidak."* Kesaksian ini menunjukkan bagaimana keterbatasan lapangan kerja formal dan hilangnya lahan menimbulkan tekanan ganda pada keluarga miskin. Mereka tidak bisa lagi mengandalkan strategi tradisional seperti menanam pangan sendiri, tetapi juga tidak memiliki stabilitas pendapatan dari sektor modern.

Lebih jauh lagi, peralihan menuju pola ekonomi perkotaan tidak diiringi dengan peningkatan keterampilan masyarakat. Mayoritas tenaga kerja Madawat hanya memiliki pendidikan dasar, sehingga sulit bersaing untuk mendapatkan pekerjaan formal dengan gaji tetap di sektor jasa atau pemerintahan. Kondisi ini mengakibatkan mereka tetap terjebak pada lingkaran pekerjaan berupah rendah dan berisiko tinggi. Paulus Boli (28 tahun, buruh bangunan, wawancara 21 Agustus 2025) menjelaskan: *"Kalau ada proyek, kami ikut kerja angkat batu atau pasir. Tapi kalau proyek selesai, kami nganggur lagi. Tidak ada perusahaan yang mau terima karena sekolah juga hanya sampai SMP."* Kesaksian ini menggambarkan bahwa transisi urban tidak otomatis menciptakan mobilitas sosial, tetapi justru memperdalam marginalisasi bagi tenaga kerja berpendidikan rendah.

Analisis dari data lapangan memperlihatkan bahwa kerentanan urban-periurban di Madawat dapat dipahami melalui perspektif *livelihood vulnerability*. Masyarakat kehilangan aset tradisional berupa lahan, namun belum memiliki modal manusia yang cukup untuk memanfaatkan peluang perkotaan. Akibatnya, mereka menggantungkan hidup pada pekerjaan informal yang penuh ketidakpastian. Kondisi ini semakin diperparah dengan biaya hidup perkotaan yang relatif lebih tinggi

dibandingkan desa, sehingga rumah tangga miskin mengalami defisit struktural yang sulit diatasi.

Dengan demikian, kemiskinan di Madawat tidak hanya disebabkan oleh rendahnya pendapatan, tetapi juga oleh posisi geografis dan sosial mereka yang berada di antara kota dan desa. Kedekatan dengan kota membawa peluang, tetapi tanpa modal ekonomi dan keterampilan yang memadai, peluang itu berubah menjadi tekanan. Selanjutnya, faktor kedua yang memperkuat kemiskinan di Madawat adalah pendapatan yang tidak stabil dan ketergantungan pada sektor informal, yang akan menjelaskan lebih jauh bagaimana siklus kerentanan ini berlangsung dari hari ke hari.

3.2.3.1.2 Faktor Pendapatan Tidak Stabil dan Ketergantungan pada Sektor Informal

Struktur ekonomi Kelurahan Madawat didominasi oleh pekerjaan informal yang tidak memberikan jaminan kepastian pendapatan. Mayoritas masyarakat menggantungkan hidup pada aktivitas harian seperti menjadi buruh bangunan, tukang ojek, buruh angkut di pasar, atau pedagang keliling. Pekerjaan ini bersifat musiman dan bergantung pada kebutuhan masyarakat kota, sehingga ada masa-masa ramai dan ada pula periode ketika pekerjaan hampir tidak tersedia sama sekali. Dengan demikian, keluarga miskin di Madawat tidak pernah memiliki pendapatan yang stabil, melainkan hidup dari hari ke hari dengan ketidakpastian yang tinggi.

Hasil penelitian lapangan memperlihatkan bahwa ketidakstabilan pendapatan menciptakan kerentanan struktural dalam pengelolaan rumah tangga. Banyak keluarga mengaku tidak bisa membuat perencanaan keuangan jangka panjang karena mereka tidak pernah tahu apakah besok ada pekerjaan atau tidak. Ketika ada proyek pembangunan, pendapatan buruh bisa meningkat hingga Rp100.000–Rp150.000 per hari, tetapi saat proyek berhenti, mereka tidak lagi memiliki penghasilan sama sekali. Yosep Beda (34 tahun, buruh bangunan, wawancara 22 Agustus 2025) menyatakan: *“Kalau ada proyek, kami bisa kerja tiap hari, tapi kalau proyek berhenti, ya kami nganggur. Tidak ada tabungan, jadi mau makan pun susah.”* Pernyataan ini menegaskan

bahwa pekerjaan informal hanya memberi keamanan sementara, tanpa keberlanjutan.

Kondisi lebih sulit dialami oleh pekerja yang bergantung pada aktivitas jasa kecil seperti buruh angkut di pasar atau penjual keliling. Penghasilan mereka sangat dipengaruhi jumlah pembeli dan aktivitas pasar yang juga tidak menentu. Marta Soge (38 tahun, pedagang keliling, wawancara 23 Agustus 2025) mengungkapkan: *"Kalau pasar ramai, bisa bawa pulang Rp50.000, tapi kalau sepi, malah rugi karena barang dagangan tidak laku. Kadang besok harus pinjam lagi untuk modal."* Testimoni ini menunjukkan bahwa ketidakpastian bukan hanya soal jumlah penghasilan, tetapi juga risiko kerugian yang semakin memperberat ekonomi keluarga miskin.

Lebih jauh lagi, ketergantungan pada sektor informal juga berdampak pada kesejahteraan perempuan. Banyak ibu rumah tangga yang terpaksa ikut berjualan kecil-kecilan atau bekerja sebagai buruh angkut di pasar dengan upah rendah. Beban ganda ini membuat mereka harus membagi waktu antara mengurus rumah tangga dan mencari nafkah tambahan, tetapi penghasilan yang diperoleh tetap tidak cukup untuk menutup kebutuhan pokok. Kristina Ratu (42 tahun, ibu rumah tangga, wawancara 24 Agustus 2025) menuturkan: *"Saya bantu angkat ikan di pasar, kadang dapat Rp30.000–Rp40.000 sehari. Uang itu habis untuk beli beras. Besoknya harus kerja lagi, kalau tidak, ya tidak makan."* Pernyataan ini memperlihatkan bahwa peran perempuan dalam ekonomi rumah tangga miskin tidak bisa diabaikan, tetapi tetap terjebak dalam pekerjaan berupah rendah.

Situasi yang sama juga disampaikan oleh tiga informan berbeda yang menegaskan bahwa masyarakat Madawat tidak memiliki pilihan pekerjaan selain di sektor informal. Mereka menyebut bahwa peluang masuk ke pekerjaan formal hampir tidak ada karena keterbatasan pendidikan dan keterampilan. Akibatnya, ketergantungan pada pekerjaan informal terus berlanjut meskipun sifatnya sangat rapuh. Kesamaan pandangan ini menegaskan bahwa akar masalah bukan hanya kurangnya lapangan kerja, tetapi juga keterbatasan modal manusia yang dimiliki masyarakat.

Dalam perspektif analitis, ketergantungan pada sektor informal di Madawat memperlihatkan fenomena *working poor*, yaitu kelompok

pekerja yang meskipun memiliki pekerjaan tetap tidak mampu keluar dari kemiskinan. Pekerjaan informal hanya menghasilkan pendapatan rendah yang habis untuk konsumsi harian, tanpa peluang akumulasi aset. Hal ini juga terkait dengan konsep *livelihood insecurity*, di mana rumah tangga miskin hidup dalam ketidakpastian terus-menerus karena tidak ada jaminan penghasilan maupun perlindungan sosial yang memadai.

Dengan demikian, ketidakstabilan pendapatan dan dominasi sektor informal di Madawat menjadi salah satu penyebab utama sulitnya masyarakat keluar dari kemiskinan. Kondisi ini tidak hanya menjerat rumah tangga pada kesulitan ekonomi, tetapi juga membatasi kapasitas mereka untuk mengakses pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lain. Selanjutnya, faktor ketiga yang semakin memperburuk kondisi kemiskinan di Madawat adalah pola konsumsi subsisten dan keterbatasan akses layanan dasar, yang akan memperlihatkan bagaimana kebutuhan pokok rumah tangga miskin tetap belum terpenuhi meskipun mereka tinggal dekat dengan pusat kota.

3.2.3.1.3 Faktor Pola Konsumsi Subsisten dan Keterbatasan Akses Layanan Dasar

Kehidupan rumah tangga miskin di Kelurahan Madawat masih didominasi oleh pola konsumsi subsisten, di mana hampir seluruh pendapatan harian habis untuk memenuhi kebutuhan makan. Makanan pokok yang dikonsumsi sebagian besar berupa beras, jagung, dan ubi dengan lauk sederhana seperti ikan asin atau sayur seadanya. Variasi makanan bergizi sangat jarang ditemukan karena harga daging, susu, dan sayuran segar dianggap terlalu mahal. Situasi ini membuat keluarga miskin tidak memiliki ruang untuk menabung, berinvestasi, atau mengalokasikan pendapatan bagi kebutuhan lain seperti pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian, pola konsumsi subsisten menjadi indikator utama kerentanan ekonomi rumah tangga di Madawat.

Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar keluarga hanya mampu mengalokasikan penghasilan harian untuk membeli bahan pangan, sementara kebutuhan sekunder sering diabaikan. Agustinus Kelen (49 tahun, buruh angkut, wawancara 25 Agustus 2025) menjelaskan: *“Kalau ada uang, pertama untuk beli beras. Kalau lebih, baru bisa beli ikan. Tapi kalau uang pas-pasan, ya cukup*

makan nasi sama garam atau ubi." Kesaksian ini menggambarkan bagaimana keluarga miskin di Madawat hidup dalam situasi darurat gizi, di mana pilihan konsumsi dibatasi oleh minimnya pendapatan.

Selain masalah konsumsi, keterbatasan akses terhadap layanan dasar juga menjadi tantangan besar. Banyak rumah tangga di Madawat belum memiliki akses air bersih yang memadai. Sebagian masih mengandalkan sumur gali atau membeli air dari pedagang dengan harga tinggi. Rosalia Gani (37 tahun, ibu rumah tangga, wawancara 26 Agustus 2025) menuturkan: *"Kami beli air jerigen Rp5.000, kadang sampai habis Rp150.000 sebulan. Padahal uang kerja suami tidak tentu. Jadi uang lebih banyak untuk air daripada untuk makan."* Kondisi ini menegaskan bahwa meskipun Madawat dekat dengan kota, akses air bersih tetap menjadi persoalan mendasar yang memperburuk beban rumah tangga miskin.

Keterbatasan akses juga tampak pada sektor kesehatan. Walaupun fasilitas kesehatan seperti puskesmas berada relatif dekat, biaya transportasi dan kebutuhan obat sering membuat masyarakat enggan memanfaatkannya. Banyak keluarga hanya pergi ke fasilitas kesehatan jika kondisi sudah parah, sementara penyakit ringan biasanya ditangani dengan obat tradisional atau diabaikan. Rafael Boro (55 tahun, tokoh masyarakat, wawancara 27 Agustus 2025) menyampaikan: *"Orang Madawat malas ke puskesmas bukan karena jauh, tapi karena tidak ada uang. Kalau hanya sakit ringan, lebih baik diam di rumah, nanti sembuh sendiri."* Hal ini menunjukkan bahwa kedekatan geografis tidak otomatis berarti akses yang terjangkau, karena hambatan ekonomi tetap menjadi faktor penghalang utama.

Lebih jauh lagi, keterbatasan layanan dasar berdampak langsung pada kualitas hidup anak-anak. Minimnya akses gizi seimbang dan layanan kesehatan membuat risiko stunting cukup tinggi. Anak-anak yang kekurangan gizi sering mengalami gangguan pertumbuhan, yang pada akhirnya menghambat prestasi belajar mereka di sekolah. Beberapa informan orang tua menyebutkan bahwa anak-anak mereka sering tidak sarapan sebelum berangkat sekolah karena tidak ada makanan yang cukup. Situasi ini memperlihatkan keterkaitan erat antara konsumsi subsisten, akses kesehatan terbatas, dan kualitas sumber daya manusia di Madawat.

Dalam analisis teoretis, kondisi di Madawat dapat dipahami melalui perspektif *basic needs approach*. Teori ini menekankan bahwa kemiskinan bukan hanya soal kurangnya pendapatan, tetapi juga kegagalan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, air bersih, dan layanan kesehatan. Madawat menjadi contoh konkret bagaimana kedekatan dengan pusat kota tidak serta-merta menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar. Justru, keluarga miskin di wilayah periurban menghadapi tekanan ganda: biaya hidup tinggi perkotaan tanpa jaminan pendapatan yang memadai.

Dengan demikian, pola konsumsi subsisten dan keterbatasan layanan dasar menjadi faktor penting yang memperkuat siklus kemiskinan di Madawat. Ketika seluruh pendapatan habis untuk kebutuhan makan dan biaya air, tidak ada ruang untuk membiayai pendidikan, kesehatan, atau investasi produktif lainnya. Selanjutnya, faktor keempat akan membahas rendahnya tingkat pendidikan dan tingginya angka putus sekolah, yang memperlihatkan bagaimana keterbatasan akses pendidikan semakin mempersempit peluang masyarakat untuk keluar dari jerat kemiskinan.

3.2.3.1.4 Faktor Rendahnya Tingkat Pendidikan dan Putus Sekolah

Kemiskinan di Kelurahan Madawat semakin diperkuat oleh rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Banyak anak-anak hanya mampu menyelesaikan pendidikan dasar atau maksimal sampai jenjang SMP, sementara melanjutkan ke SMA atau perguruan tinggi menjadi hal yang sulit dicapai. Penyebab utama bukanlah kurangnya minat belajar, melainkan keterbatasan ekonomi keluarga untuk membiayai ongkos transportasi, seragam, buku, dan kebutuhan sekolah lainnya. Akibatnya, generasi muda di Madawat cenderung kembali bekerja di sektor informal seperti orang tua mereka, sehingga lingkaran kemiskinan berulang dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa sebagian besar orang tua di Madawat sebenarnya memiliki harapan agar anak-anak mereka bisa sekolah tinggi. Namun harapan itu sering kali berbenturan dengan realitas ekonomi yang keras. Theresia Soge (39 tahun, ibu rumah tangga, wawancara 28 Agustus 2025) menyatakan: *“Kami ingin anak-anak sekolah sampai kuliah, tapi untuk ongkos saja tidak ada. Akhirnya mereka*

berhenti sekolah dan ikut bantu kerja." Pernyataan ini menunjukkan bahwa keterbatasan ekonomi menjadi faktor utama yang memutus jalur pendidikan generasi muda.

Ketidakmampuan membiayai sekolah juga membuat banyak anak akhirnya menikah muda, sehingga siklus kemiskinan semakin sulit diputus. Anak-anak yang menikah muda akan membentuk rumah tangga baru dengan kondisi ekonomi yang sama rapuhnya, bahkan lebih rentan karena tidak memiliki keterampilan memadai. Maksimus Boli (44 tahun, tokoh masyarakat, wawancara 28 Agustus 2025) menjelaskan: *"Banyak anak-anak di Madawat yang nikah muda karena tidak bisa lanjut sekolah. Mereka pikir lebih baik menikah daripada menganggur, tapi akhirnya jadi tambah miskin."* Kesaksian ini menegaskan bahwa rendahnya pendidikan berkontribusi langsung terhadap reproduksi kemiskinan lintas generasi.

Selain faktor ekonomi, rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan juga masih menjadi persoalan. Beberapa orang tua menganggap pendidikan tinggi tidak terlalu relevan karena peluang kerja formal di sekitar Madawat dianggap terbatas. Perspektif ini membuat anak-anak lebih diarahkan untuk segera bekerja membantu keluarga daripada melanjutkan sekolah. Yohana Kelen (36 tahun, pedagang kecil, wawancara 29 Agustus 2025) menuturkan: *"Kalau sekolah tinggi tapi tidak ada kerja, sama saja. Lebih baik anak bantu jualan atau kerja serabutan."* Pernyataan ini menunjukkan bahwa rendahnya investasi pendidikan tidak hanya dipengaruhi kemampuan ekonomi, tetapi juga persepsi sosial mengenai manfaat pendidikan.

Lebih jauh lagi, keterbatasan akses pendidikan juga berdampak pada kualitas sumber daya manusia di Madawat. Generasi muda yang tidak memiliki keterampilan formal terpaksa bekerja di sektor informal dengan pendapatan rendah. Mereka tidak mampu bersaing di pasar kerja modern yang membutuhkan kualifikasi tertentu. Kondisi ini menutup peluang mobilitas sosial dan membuat masyarakat tetap berada pada posisi marginal dalam struktur ekonomi perkotaan.

Analisis dari temuan lapangan menunjukkan bahwa rendahnya pendidikan di Madawat dapat dipahami melalui perspektif *human capital theory*, yang menekankan pentingnya pendidikan sebagai investasi untuk meningkatkan produktivitas. Ketika masyarakat tidak mampu berinvestasi dalam pendidikan, maka kapasitas mereka untuk keluar dari kemiskinan

juga menurun drastis. Dengan kata lain, rendahnya tingkat pendidikan bukan hanya akibat dari kemiskinan, tetapi juga menjadi penyebab utama yang memperkuat kemiskinan itu sendiri.

Dengan demikian, masalah pendidikan di Madawat memperlihatkan lingkaran setan kemiskinan yang sulit diputus. Anak-anak yang putus sekolah karena keterbatasan biaya akan tetap bekerja di sektor informal, sehingga pendapatan mereka rendah. Pendapatan rendah itu membuat mereka tidak mampu membiayai pendidikan anak-anak mereka kelak, dan siklus pun terus berulang. Selanjutnya, faktor kelima akan membahas aspirasi masyarakat terkait pendidikan dan kesehatan yang memperlihatkan bahwa meskipun terjebak dalam keterbatasan, warga Madawat tetap memiliki harapan untuk memperbaiki masa depan mereka.

3.2.3.1.5 Faktor Aspirasi Pendidikan dan Kesehatan yang Terhambat

Meskipun hidup dalam keterbatasan, masyarakat Kelurahan Madawat memiliki aspirasi kuat untuk memperbaiki masa depan, terutama melalui pendidikan dan kesehatan. Orang tua menyadari bahwa pendidikan yang lebih tinggi adalah jalan keluar dari kemiskinan, sementara layanan kesehatan yang terjangkau dan responsif menjadi kebutuhan mendesak bagi keluarga miskin. Aspirasi ini sering disampaikan dalam wawancara maupun diskusi kelompok, tetapi selalu terhambat oleh keterbatasan biaya, minimnya dukungan pemerintah, serta lemahnya akses ke fasilitas yang memadai. Dengan demikian, jurang antara harapan dan kenyataan tetap lebar, mempertegas kerentanan masyarakat Madawat dalam menghadapi masa depan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar keluarga menaruh harapan besar pada pendidikan anak-anak mereka. Orang tua ingin agar generasi muda dapat menempuh pendidikan hingga perguruan tinggi, dengan harapan memperoleh pekerjaan formal di kota atau bahkan di luar daerah. Agnes Widi (43 tahun, ibu rumah tangga, wawancara 30 Agustus 2025) menyatakan: *“Kalau bisa, anak-anak kami kuliah supaya tidak jadi buruh angkut seperti kami. Tapi untuk biaya saja sekarang tidak sanggup, apalagi kalau sudah sampai kuliah.”* Testimoni ini menegaskan bahwa aspirasi untuk pendidikan tinggi ada, tetapi realitas ekonomi membuatnya sulit diwujudkan.

Selain pendidikan, kesehatan menjadi bidang lain yang sangat diharapkan oleh masyarakat untuk mendapat perhatian lebih besar. Banyak keluarga miskin yang berharap ada layanan kesehatan gratis atau subsidi yang lebih luas, sehingga mereka tidak perlu khawatir setiap kali anak sakit atau ada anggota keluarga yang butuh perawatan. Stefanus Bolo (51 tahun, tokoh masyarakat, wawancara 31 Agustus 2025) menuturkan: *"Puskesmas memang dekat, tapi kalau tidak ada uang untuk obat dan transportasi, sama saja. Kami butuh layanan yang benar-benar bisa dijangkau oleh orang miskin."* Kesaksian ini menunjukkan bahwa akses fisik ke fasilitas kesehatan tidak berarti banyak jika hambatan biaya tetap tinggi.

Lebih jauh lagi, aspirasi ini juga muncul dalam bentuk harapan adanya program pemerintah yang lebih fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, bukan hanya bantuan konsumtif jangka pendek. Masyarakat Madawat berharap agar bantuan sosial dapat diarahkan ke bentuk beasiswa bagi anak sekolah atau subsidi biaya kesehatan, sehingga dampaknya lebih terasa dalam jangka panjang. Yohanes Lawa (29 tahun, pemuda Madawat, wawancara 31 Agustus 2025) menegaskan: *"Bantuan beras atau uang memang membantu, tapi cepat habis. Kalau ada beasiswa atau bantuan kesehatan, itu bisa membuat hidup lebih baik dalam jangka panjang."* Pandangan ini memperlihatkan kesadaran kritis masyarakat bahwa pembangunan harus diarahkan pada peningkatan kapasitas, bukan sekadar pemenuhan kebutuhan harian.

Aspirasi yang kuat ini sayangnya sering terhambat oleh lemahnya kelembagaan lokal dalam mengartikulasikan kebutuhan warga. Forum-forum musyawarah kelurahan jarang digunakan untuk membahas strategi jangka panjang terkait pendidikan dan kesehatan, melainkan lebih sering fokus pada pembagian bantuan jangka pendek. Akibatnya, suara masyarakat tentang pendidikan dan kesehatan tidak mendapat prioritas dalam agenda kebijakan. Hal ini membuat warga merasa aspirasi mereka hanya sebatas harapan, tanpa ada tindak lanjut nyata.

Secara analitis, kondisi ini dapat dipahami melalui perspektif *capability approach* dari Amartya Sen, yang menekankan bahwa kemiskinan adalah keterbatasan kapabilitas manusia untuk menjalani kehidupan yang mereka anggap berharga. Aspirasi pendidikan dan kesehatan masyarakat Madawat menunjukkan adanya keinginan untuk

memperluas kapabilitas, tetapi sistem yang ada belum memberi ruang bagi mereka untuk mewujudkannya. Akibatnya, meskipun harapan tetap hidup, realitas struktural membuat mereka tidak mampu keluar dari lingkaran keterbatasan.

Dengan demikian, aspirasi warga Madawat terkait pendidikan dan kesehatan memperlihatkan wajah paradoks kemiskinan: ada kesadaran dan harapan untuk berubah, tetapi hambatan ekonomi dan kelembagaan membuat perubahan sulit diwujudkan. Aspirasi ini sekaligus menjadi cermin bahwa kemiskinan bukan hanya soal keterbatasan materi, tetapi juga soal terbatasnya peluang untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik. Selanjutnya, bagian pembahasan lintas faktor akan menunjukkan bagaimana kelima faktor yang telah dipaparkan saling berkelindan memperkuat kondisi kemiskinan di Madawat.

3.2.3.1.6 Analisis Lintas Faktor Kelurahan Madawat

Hasil penelitian di Kelurahan Madawat menunjukkan bahwa kemiskinan ekstrem di wilayah ini tidak dapat dipahami hanya dari satu sisi, melainkan dari interaksi berbagai faktor yang saling memperkuat. Posisi geografis Madawat yang berada di wilayah urban-periurban menjadi pintu masuk utama untuk membaca akar persoalan kemiskinan. Di satu sisi, kedekatan dengan kota Maumere membawa peluang akses ke pasar, fasilitas pendidikan, dan layanan kesehatan. Namun di sisi lain, keterbatasan kapasitas ekonomi dan sumber daya manusia membuat masyarakat tidak mampu memanfaatkan peluang tersebut secara optimal. Dengan kata lain, kedekatan geografis justru memperlihatkan jurang antara harapan dan kenyataan, di mana peluang terbuka tetapi tidak bisa dijangkau oleh kelompok miskin.

Kondisi urban-periurban ini kemudian berkaitan erat dengan faktor ketergantungan pada sektor informal yang berupah rendah dan tidak stabil. Masyarakat Madawat pada umumnya bekerja sebagai buruh bangunan, pedagang kecil, tukang ojek, atau buruh angkut di pasar. Pekerjaan ini memberikan pendapatan harian yang fluktuatif, seringkali tidak menentu, dan tanpa jaminan sosial. Dalam wawancara, banyak buruh mengaku hidup dari hari ke hari tanpa bisa menabung atau merencanakan masa depan. Hal ini menempatkan keluarga miskin pada situasi *livelihood insecurity*, yaitu ketidakpastian penghidupan yang

membuat mereka sangat rentan terhadap guncangan kecil seperti sakit, gagal bayar hutang, atau naiknya harga kebutuhan pokok.

Ketidakstabilan pendapatan tersebut semakin memperburuk pola konsumsi rumah tangga yang cenderung subsisten. Hampir seluruh penghasilan habis untuk membeli bahan makanan pokok seperti beras, jagung, dan ubi, dengan sedikit variasi lauk pauk. Pola konsumsi semacam ini tidak hanya memperlihatkan kerentanan ekonomi, tetapi juga menciptakan masalah kesehatan jangka panjang, terutama risiko stunting pada anak-anak. Selain pangan, akses terhadap layanan dasar seperti air bersih dan kesehatan juga masih terbatas. Banyak keluarga mengeluhkan bahwa biaya membeli air lebih besar daripada biaya pangan, sementara akses ke puskesmas meskipun dekat tetap sulit dijangkau karena hambatan biaya obat dan transportasi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Madawat dekat dengan pusat kota, keluarga miskin tetap terjebak dalam deprivasi layanan dasar.

Lebih jauh lagi, keterbatasan ekonomi dan akses layanan dasar berimplikasi langsung pada rendahnya pendidikan generasi muda. Banyak anak di Madawat hanya menyelesaikan pendidikan dasar atau maksimal hingga SMP, sementara melanjutkan ke SMA atau perguruan tinggi jarang terjadi. Faktor biaya menjadi penyebab utama, karena keluarga tidak mampu menanggung ongkos sekolah, seragam, dan transportasi. Bahkan ada anak-anak yang memilih menikah muda karena tidak bisa melanjutkan sekolah, yang pada akhirnya memperkuat reproduksi kemiskinan lintas generasi. Rendahnya pendidikan juga membuat generasi muda tidak mampu bersaing di sektor kerja formal, sehingga mereka kembali terjebak dalam pekerjaan informal berupah rendah seperti orang tua mereka.

Siklus kemiskinan ini bertahan karena aspirasi masyarakat, meskipun kuat, tetap terhambat. Warga Madawat sebenarnya memiliki kesadaran akan pentingnya pendidikan dan kesehatan sebagai jalan keluar dari kemiskinan. Orang tua berharap anak-anak mereka bisa kuliah, sementara banyak keluarga menekankan pentingnya layanan kesehatan murah atau beasiswa untuk pendidikan. Namun aspirasi ini tidak sejalan dengan realitas kebijakan dan kelembagaan. Program bantuan sosial yang masuk cenderung bersifat konsumtif dan jangka pendek, tanpa memberi peluang transformasi ekonomi atau investasi

dalam sumber daya manusia. Akibatnya, aspirasi tetap hidup, tetapi tidak memiliki saluran untuk diwujudkan.

Jika kelima faktor ini disintesis, terlihat jelas bahwa kemiskinan di Madawat merupakan hasil dari interaksi antara faktor struktural, kultural, dan kebijakan. Secara struktural, masyarakat kehilangan basis penghidupan tradisional berupa lahan pertanian, tetapi juga tidak mampu mengakses pekerjaan formal perkotaan. Secara kultural, pola konsumsi subsisten dan rendahnya investasi pendidikan membuat keluarga miskin sulit mengubah kondisi mereka. Dari sisi kebijakan, bantuan sosial yang ada belum mampu menjawab akar persoalan karena masih fokus pada bantuan jangka pendek. Kombinasi faktor-faktor ini menciptakan lingkaran kemiskinan yang sulit diputus, di mana setiap upaya keluar selalu terbentur oleh hambatan baru.

Analisis ini dapat diperdalam melalui kerangka *capability approach* dari Amartya Sen. Menurut Sen, kemiskinan bukan sekadar ketiadaan pendapatan, melainkan keterbatasan kapabilitas untuk menjalani kehidupan yang dianggap bernilai. Dalam kasus Madawat, masyarakat memiliki aspirasi untuk pendidikan dan kesehatan, tetapi tidak memiliki kapabilitas untuk mewujudkannya. Mereka terjebak dalam situasi di mana setiap keputusan hidup dipengaruhi oleh keterbatasan ekonomi, sehingga pilihan mereka menjadi sempit dan cenderung berulang dari generasi ke generasi. Dengan kata lain, kemiskinan di Madawat adalah bentuk deprivasi kapabilitas yang menutup ruang bagi transformasi sosial.

Selain itu, fenomena yang terjadi di Madawat juga relevan dengan konsep *urban poverty trap*. Posisi urban-periurban membuat masyarakat menghadapi biaya hidup perkotaan, tetapi tidak memiliki akses penuh pada peluang kerja formal. Akibatnya, mereka terjebak dalam pekerjaan informal yang tidak memberi peluang mobilitas sosial. Urbanisasi yang seharusnya menjadi peluang justru memperkuat kemiskinan bagi kelompok yang tidak memiliki modal ekonomi dan pendidikan. Madawat menjadi contoh konkret bagaimana ekspansi kota tidak otomatis meningkatkan kesejahteraan masyarakat pinggiran, tetapi justru melahirkan kantong-kantong kemiskinan baru.

Dengan demikian, analisis lintas faktor di Kelurahan Madawat memperlihatkan bahwa kemiskinan ekstrem di wilayah ini bersifat multidimensional, melibatkan faktor ekonomi, sosial, budaya, dan

kelembagaan. Setiap faktor saling terkait dan memperkuat, sehingga sulit diurai secara terpisah. Pola kerentanan ini juga menunjukkan perlunya pendekatan kebijakan yang lebih holistik, yang tidak hanya memberi bantuan jangka pendek, tetapi juga memperkuat kapabilitas masyarakat untuk mandiri. Selanjutnya, bagian penelitian akan membahas desa berikutnya dalam kategori desil kemiskinan, yaitu Desa Tanarawa, untuk melihat bagaimana faktor-faktor serupa maupun berbeda membentuk wajah kemiskinan di wilayah tersebut.

3.2.3.1.7 Analisis Lintas Faktor Kasus Berganda Desil 3: Kemiskinan Relatif

1) Kerentanan Urban–Periurban sebagai Struktur Dasar

Kelurahan Madawat merepresentasikan kawasan urban–periurban yang menampilkan paradoks akses. Secara geografis, kedekatan dengan pusat kota Maumere menghadirkan peluang berupa akses fisik terhadap pasar, sekolah, dan layanan kesehatan. Namun demikian, keterbatasan sumber daya finansial dan rendahnya modal manusia membuat kelompok miskin tidak mampu mengubah kedekatan tersebut menjadi kesejahteraan. Fenomena ini sejalan dengan analisis *livelihood vulnerability* (Chambers & Conway, 1992), di mana aset tradisional berupa lahan pertanian telah hilang akibat alih fungsi lahan, sementara aset manusia berupa keterampilan kerja formal tidak cukup berkembang untuk menopang transisi ke sektor perkotaan. Dengan demikian, biaya hidup perkotaan mulai dirasakan, tetapi masyarakat belum memperoleh keuntungan dari upah kota, menghasilkan kesenjangan struktural yang signifikan.

2) Pendapatan Tidak Stabil dan Fenomena Working Poor

Sektor informal menjadi basis utama penghidupan masyarakat Madawat, meliputi buruh bangunan, buruh angkut, pedagang kecil, hingga tukang ojek. Pekerjaan tersebut berkarakter harian-lepas, musiman, dan tidak dilengkapi dengan perlindungan sosial. Kondisi ini menciptakan *livelihood insecurity*, yaitu ketidakpastian penghidupan yang membuat rumah tangga miskin hidup dari hari ke hari tanpa horizon perencanaan jangka panjang (Ellis, 2000). Ketidakstabilan pendapatan yang tinggi menyebabkan keluarga miskin kesulitan membangun tabungan dan akumulasi aset, sehingga guncangan kecil, misalnya sakit atau berhentinya proyek pembangunan, dapat

segera menjatuhkan mereka pada kondisi krisis. Situasi ini menggambarkan fenomena *working poor* (Chen & Doane, 2008), yakni kelompok pekerja yang meskipun bekerja tetap tidak mampu keluar dari jerat kemiskinan.

3) Pola Konsumsi Subsisten dan Defisit Layanan Dasar

Keterbatasan pendapatan berimplikasi pada pola konsumsi subsisten, di mana hampir seluruh penghasilan harian terserap untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok, terutama beras, jagung, dan ubi. Variasi konsumsi bergizi seperti daging, susu, atau sayuran segar jarang dijangkau karena harga dianggap terlalu mahal. Pola ini mengindikasikan kerentanan kesehatan rumah tangga, terutama risiko stunting pada anak-anak. Selain itu, biaya untuk memperoleh air bersih cukup tinggi, dengan sebagian rumah tangga harus membeli air jerigen setiap hari. Kondisi ini memperlihatkan bentuk kegagalan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana ditegaskan dalam pendekatan *basic needs* (Streeten, 1981). Dengan demikian, meskipun secara geografis dekat dengan fasilitas kesehatan dan infrastruktur kota, hambatan biaya tetap menjadi faktor penghalang utama yang memperdalam deprivasi layanan dasar.

4) Pendidikan Rendah, Putus Sekolah, dan Reproduksi Kemiskinan

Rendahnya tingkat pendidikan menjadi faktor krusial yang memperkuat siklus kemiskinan di Madawat. Banyak anak hanya menamatkan pendidikan dasar atau maksimal hingga SMP, sedangkan melanjutkan ke jenjang SMA atau perguruan tinggi sulit diwujudkan karena keterbatasan biaya. Hal ini berdampak pada terhambatnya akumulasi modal manusia, yang pada akhirnya memaksa generasi muda kembali bekerja di sektor informal berupah rendah sebagaimana orang tua mereka. Kondisi ini konsisten dengan perspektif *human capital theory* (Becker, 1993), yang menekankan pendidikan sebagai investasi jangka panjang untuk peningkatan produktivitas tenaga kerja. Putus sekolah tidak hanya menjadi konsekuensi dari kemiskinan, melainkan juga penyebab utama yang mereproduksi kemiskinan lintas generasi.

5) Aspirasi Pendidikan dan Kesehatan yang Terhambat

Temuan penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Madawat memiliki aspirasi yang kuat untuk memperbaiki masa depan,

khususnya melalui pendidikan dan kesehatan. Namun, aspirasi ini tidak diikuti dengan kapabilitas nyata untuk mewujudkannya karena hambatan ekonomi, minimnya program transformatif, dan kelembagaan lokal yang masih lemah. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui kerangka *capability approach* (Sen, 1999), di mana kemiskinan tidak hanya dipahami sebagai ketiadaan pendapatan, tetapi juga sebagai keterbatasan kapabilitas dalam menjalani kehidupan yang bernilai. Aspirasi pendidikan tinggi dan kesehatan yang terjangkau mencerminkan adanya kesadaran kritis warga, tetapi sistem kebijakan dan struktur kelembagaan belum mampu mengkonversinya menjadi peluang riil.

Kelima faktor di atas saling berinteraksi dalam menciptakan lingkaran kemiskinan relatif di Madawat. Hilangnya lahan dan biaya hidup yang tinggi memperbesar kerentanan struktural; pendapatan informal yang tidak stabil menyerap seluruh energi rumah tangga dalam kebutuhan harian; pola konsumsi subsisten dan defisit layanan dasar menurunkan kualitas kesehatan; pendidikan rendah membatasi mobilitas sosial generasi muda; sedangkan aspirasi yang tinggi tetap terhambat oleh keterbatasan kapabilitas. Kombinasi faktor ini memperlihatkan fenomena *urban poverty trap* (Glaeser et al., 2008), di mana masyarakat periurban menghadapi biaya perkotaan tanpa memiliki akses penuh pada peluang kerja formal yang lebih sejahtera.

Analisis lintas faktor di Madawat memperlihatkan bahwa kemiskinan relatif tidak dapat direduksi pada dimensi pendapatan, tetapi mencakup interaksi multidimensi yang melibatkan aspek struktural, kultural, dan kelembagaan. Secara teoretis, kasus ini menegaskan pentingnya integrasi antara pendekatan *livelihood vulnerability*, *basic needs*, dan *capability approach* untuk memahami kompleksitas kemiskinan periurban. Secara praktis, temuan ini menyiratkan perlunya kebijakan yang melampaui bantuan konsumtif jangka pendek menuju strategi penguatan kapabilitas, seperti subsidi layanan dasar (air bersih, kesehatan), beasiswa pendidikan, serta program peningkatan keterampilan yang terhubung dengan peluang kerja formal. Dengan demikian, kedekatan geografis dengan kota dapat dikonversi menjadi kedekatan terhadap peluang, bukan sekadar kedekatan terhadap biaya hidup.

Table 100. Ringkasan Analisis Lintas Faktor Kasus Berganda Desil 3: Kemiskinan Relatif (Madawat)

Faktor	Temuan Lapangan di Kelurahan Madawat	Analisis
Kerentanan Urban–Periurban	Hilangnya lahan pertanian akibat urbanisasi; biaya hidup meningkat (air, transportasi, konsumsi) tetapi upah kota tidak terjangkau.	Paradoks akses: *livelihood vulnerability* (Chambers & Conway, 1992). Dekat dengan fasilitas kota tetapi tidak memiliki modal untuk memanfaatkannya.
Pendapatan Tidak Stabil (Sektor Informal)	Mayoritas bekerja sebagai buruh bangunan, tukang ojek, buruh angkut, pedagang keliling; berupah harian, musiman, tanpa perlindungan sosial.	Fenomena *working poor* (Chen & Doane, 2008). Pekerjaan informal menghasilkan *livelihood insecurity*, tanpa tabungan dan akumulasi aset.
Pola Konsumsi Subsisten & Layanan Dasar	Hampir seluruh penghasilan habis untuk pangan (beras, jagung, ubi); biaya air bersih tinggi; akses kesehatan dekat tetapi mahal (transport & obat).	*Basic needs approach* (Streeten, 1981): kegagalan pemenuhan kebutuhan dasar meski geografis dekat kota. Risiko stunting tinggi.
Pendidikan & Putus Sekolah	Anak hanya tamat SD/SMP; biaya transport & seragam jadi penghalang; banyak anak menikah muda; generasi muda kembali ke sektor informal.	*Human capital theory* (Becker, 1993): rendahnya investasi pendidikan menyebabkan rendah produktivitas dan mengakibatkan reproduksi kemiskinan lintas generasi.
Aspirasi Pendidikan & Kesehatan	Orang tua ingin anak kuliah; warga harapkan layanan kesehatan murah/subsidi; aspirasi tetap terhambat oleh keterbatasan ekonomi dan kelembagaan.	*Capability approach* (Sen, 1999): aspirasi ada, tetapi kapabilitas rendah. Kemiskinan sebagai keterbatasan kebebasan substantif.

Faktor	Temuan Lapangan di Kelurahan Madawat	Analisis
Sintesis Lintas Faktor	Kedekatan dengan kota hanya menghadirkan biaya hidup, bukan peluang; pendapatan informal rapuh; konsumsi subsisten; pendidikan rendah; aspirasi terhambat.	Fenomena *urban poverty trap* (Glaeser et al., 2008): masyarakat periurban menghadapi biaya kota tanpa akses penuh pada pekerjaan formal.

Sumber: Olahan Penulis, 2024

3.2.4 Desil 4: Kemiskinan Menurun / Potensial Berdaya (Mas Syukur)

3.2.4.1 Desa Umauta

3.2.4.1.1 Faktor Tingginya Angka Kemiskinan dan Ketergantungan pada Pertanian Subsisten

Desa Umauta tercatat sebagai salah satu wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Kabupaten Sikka, dengan data menunjukkan 38,88% kepala keluarga masuk kategori miskin. Angka ini berarti hampir empat dari sepuluh keluarga hidup di bawah garis kemiskinan, sebuah proporsi yang menggambarkan betapa dalamnya jurang kesejahteraan di desa ini. Realitas ini tidak dapat dipisahkan dari struktur ekonomi masyarakat yang masih sangat bergantung pada sektor pertanian subsisten. Aktivitas utama penduduk adalah menanam jagung, ubi, dan padi ladang, yang dilakukan secara tradisional dengan peralatan sederhana serta tanpa dukungan irigasi teknis. Dengan kata lain, kehidupan masyarakat sangat ditentukan oleh kemurahan musim hujan, sementara setiap kemarau panjang berarti ancaman nyata terhadap keberlangsungan hidup mereka.

Hasil penelitian lapangan memperlihatkan bahwa mayoritas keluarga di Umauta menanam jagung sebagai makanan pokok. Sistem tanamnya dilakukan dengan pola tugal tradisional, di mana benih ditanam di ladang kering tanpa pupuk kimia dan minim perawatan. Produktivitas pun rendah, bahkan seringkali hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan makan selama beberapa bulan. Setelah cadangan jagung habis, keluarga miskin biasanya harus membeli beras atau jagung tambahan di pasar dengan harga lebih tinggi. Petrus Laga (50 tahun, petani, wawancara 15 Agustus 2025) mengungkapkan: *“Kalau hujan bagus, jagung bisa cukup untuk makan sampai enam bulan. Tapi kalau hujan terlambat, panen gagal dan kami terpaksa beli beras, padahal uang tidak ada.”* Kesaksian ini menegaskan bahwa produktivitas pertanian di Umauta tidak hanya rendah, tetapi juga rapuh terhadap perubahan iklim.

Lebih jauh lagi, ketergantungan penuh pada pertanian subsisten tanpa diversifikasi usaha membuat masyarakat tidak memiliki cadangan penghidupan lain. Saat panen gagal, satu-satunya jalan adalah berutang pada koperasi mingguan atau meminta bantuan keluarga. Situasi ini menunjukkan adanya kerentanan struktural, karena sumber penghidupan

hanya berasal dari satu sektor yang sangat tergantung pada faktor eksternal. Yohanes Beda (46 tahun, tokoh masyarakat, wawancara 16 Agustus 2025) menuturkan: *"Di Umauta tidak ada usaha lain selain berkebun. Kalau kebun gagal, semua orang susah. Tidak ada kerja lain yang bisa membantu."* Pernyataan ini memperlihatkan betapa sempitnya pilihan ekonomi masyarakat miskin di Umauta.

Dalam kondisi tertentu, masyarakat juga berusaha menjual sebagian hasil panen untuk memperoleh uang tunai, meskipun risikonya adalah cadangan pangan menjadi berkurang. Hasil penjualan biasanya tidak seberapa karena harga jagung dan ubi di tingkat desa sangat rendah, sementara biaya transportasi ke pasar menambah beban pengeluaran. Marta Kefi (45 tahun, petani jagung, wawancara 16 Agustus 2025) menegaskan: *"Kalau ada lebih sedikit, kami jual ke pasar. Tapi harga murah sekali, satu karung jagung hanya dapat uang untuk beli minyak tanah dan garam."* Testimoni ini memperlihatkan bagaimana posisi tawar petani Umauta yang sangat lemah dalam rantai distribusi pangan.

Dampak dari rendahnya produktivitas dan ketergantungan pada pertanian subsisten ini tidak hanya terasa pada ekonomi rumah tangga, tetapi juga berimplikasi pada aspek sosial lainnya. Ketika panen gagal, banyak anak-anak yang putus sekolah karena orang tua tidak mampu membayar ongkos atau membeli seragam. Sementara itu, kebutuhan kesehatan juga sering diabaikan karena pendapatan lebih diprioritaskan untuk membeli pangan. Pola ini menunjukkan adanya efek domino dari ketergantungan subsisten terhadap berbagai dimensi kemiskinan, baik pendidikan, kesehatan, maupun kualitas hidup secara umum.

Dalam analisis teoretis, kondisi Umauta sesuai dengan konsep *livelihood vulnerability* yang menjelaskan rapuhnya basis penghidupan masyarakat pedesaan akibat minimnya diversifikasi ekonomi. Ketika hanya ada satu sumber penghidupan yang sangat rentan terhadap guncangan eksternal, maka rumah tangga miskin akan terus berada dalam posisi lemah. Ketergantungan pada pertanian subsisten tanpa akses modal, teknologi, dan pasar membuat masyarakat Umauta sulit membangun kemandirian ekonomi.

Selain itu, fenomena ini juga sejalan dengan perspektif *structural poverty*, di mana kemiskinan bukan semata akibat kemalasan atau pilihan

individu, melainkan hasil dari struktur ekonomi yang timpang. Ketiadaan akses irigasi, kurangnya dukungan teknologi, dan terbatasnya intervensi pemerintah dalam memperkuat produktivitas pertanian menjadikan masyarakat Umauta seolah dibiarkan menghadapi alam seorang diri. Tanpa perubahan struktural, angka kemiskinan 38,88% kemungkinan besar akan tetap bertahan atau bahkan meningkat seiring dengan perubahan iklim yang makin ekstrem.

Dengan demikian, tingginya angka kemiskinan di Umauta tidak dapat dilepaskan dari ketergantungan masyarakat pada pertanian subsisten yang rapuh dan tidak produktif. Faktor ini menjadi pintu masuk untuk memahami mengapa kerentanan masyarakat begitu besar, karena basis ekonomi mereka tidak kokoh. Selanjutnya, faktor kedua akan membahas krisis air bersih sebagai hambatan utama kehidupan sehari-hari, yang memperlihatkan bagaimana ketiadaan infrastruktur dasar memperburuk kemiskinan yang sudah dalam.

3.2.4.1.2 Faktor Krisis Air Bersih sebagai Hambatan Utama Kehidupan Sehari-hari

Krisis air bersih merupakan salah satu persoalan paling mendasar yang dihadapi masyarakat Desa Umauta. Hampir setiap rumah tangga mengalami kesulitan dalam memperoleh air layak konsumsi, baik untuk minum, memasak, maupun kebutuhan sehari-hari lainnya. Ketiadaan jaringan irigasi dan distribusi air membuat masyarakat harus menempuh perjalanan jauh untuk mengambil air dari sumber alami atau membeli dari pedagang dengan harga tinggi. Kondisi ini mencerminkan ironi: di tengah upaya pemerintah mendorong program pengentasan kemiskinan, kebutuhan dasar yang paling vital, air bersih, belum dapat dijamin secara memadai. Akibatnya, krisis air bersih memperburuk kerentanan rumah tangga miskin yang sudah terhimpit oleh keterbatasan ekonomi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar keluarga di Umauta membeli air tangki seharga Rp200.000 hingga Rp250.000 setiap dua minggu. Pengeluaran ini sangat besar jika dibandingkan dengan pendapatan rata-rata rumah tangga yang hanya mengandalkan hasil pertanian subsisten. Air yang dibeli biasanya hanya digunakan untuk kebutuhan minum dan memasak, sementara untuk mandi dan mencuci mereka terpaksa menggunakan air dari kali atau sumur dangkal yang kualitasnya sering tidak layak. Marta Niron (42 tahun, ibu rumah tangga,

wawancara 16 Agustus 2025) menuturkan: *"Kami beli air tangki Rp200.000, itu cukup untuk dua minggu saja. Untuk mandi dan cuci, kami pakai air kali meskipun kotor. Kalau tidak begitu, uang habis hanya untuk air."* Kesaksian ini memperlihatkan bagaimana air bersih menjadi beban ekonomi terbesar bagi keluarga miskin.

Selain pengeluaran tinggi, waktu dan tenaga yang terbuang untuk mencari air juga menjadi persoalan tersendiri. Beberapa keluarga yang tidak mampu membeli air harus berjalan kaki sejauh 2–3 kilometer ke sumber mata air. Tugas ini sering dibebankan kepada perempuan dan anak-anak, yang harus membawa jerigen berulang kali setiap hari. Maria Ledo (40 tahun, ibu rumah tangga, wawancara 18 Agustus 2025) menjelaskan: *"Kalau tidak punya uang beli air, kami jalan ke mata air. Pergi pagi, baru sampai rumah siang dengan jerigen. Anak-anak juga ikut angkat air, jadi kadang mereka terlambat sekolah."* Pernyataan ini menegaskan bahwa krisis air tidak hanya menguras ekonomi, tetapi juga memengaruhi pendidikan anak-anak.

Lebih jauh lagi, krisis air bersih berdampak serius pada kesehatan masyarakat. Air kali dan sumur dangkal yang digunakan untuk mandi atau mencuci sering kali tercemar, meningkatkan risiko penyakit kulit, diare, dan infeksi saluran pencernaan. Yohanes Gawi (55 tahun, tokoh masyarakat, wawancara 17 Agustus 2025) menyatakan: *"Banyak anak-anak sakit perut karena air kali kotor. Kalau ada uang baru bisa bawa ke puskesmas, kalau tidak, ya dibiarkan saja sampai sembuh sendiri."* Kondisi ini menunjukkan bahwa krisis air tidak hanya menjadi persoalan ketersediaan, tetapi juga menyangkut kualitas kesehatan publik yang memperkuat siklus kemiskinan.

Analisis lapangan menunjukkan bahwa krisis air bersih di Umauta dapat dikategorikan sebagai bentuk *infrastructure poverty*, yaitu kemiskinan yang muncul karena ketiadaan infrastruktur dasar. Ketika akses air tidak tersedia secara memadai, masyarakat harus mengeluarkan biaya dan tenaga ekstra untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Hal ini mengurangi kapasitas mereka untuk membiayai kebutuhan lain seperti pendidikan, kesehatan, atau investasi produktif. Dengan kata lain, air menjadi komoditas mahal yang justru memperbesar jurang kemiskinan.

Krisis air juga berkaitan erat dengan rendahnya produktivitas pertanian. Tanpa sistem irigasi, lahan hanya bisa ditanami saat musim hujan, sementara musim kemarau panjang berarti tidak ada aktivitas pertanian sama sekali. Masyarakat tidak bisa menanam sayur atau komoditas bernilai ekonomi tinggi karena ketiadaan pasokan air. Dengan demikian, krisis air bersih tidak hanya soal konsumsi rumah tangga, tetapi juga penghalang utama bagi pembangunan ekonomi lokal.

Dalam perspektif kebijakan, masalah ini menunjukkan lemahnya intervensi struktural dalam penyediaan infrastruktur dasar. Program bantuan sosial seperti PKH atau BLT memang memberi dukungan sementara, tetapi tidak menyelesaikan persoalan mendasar seperti ketersediaan air. Tanpa pemenuhan kebutuhan dasar ini, bantuan apa pun akan cepat habis untuk biaya air. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pengentasan kemiskinan tidak bisa dilepaskan dari pembangunan infrastruktur dasar yang berkelanjutan.

Dengan demikian, krisis air bersih di Umauta merupakan salah satu faktor kunci yang memperparah kemiskinan ekstrem di desa ini. Rumah tangga miskin tidak hanya menghadapi beban ekonomi akibat biaya air yang tinggi, tetapi juga beban sosial karena anak-anak harus ikut mencari air, serta beban kesehatan akibat penggunaan air yang tidak layak. Situasi ini menegaskan bahwa persoalan air bersih bukan sekadar isu teknis, tetapi isu struktural yang berakar pada minimnya perhatian terhadap pembangunan pedesaan. Selanjutnya, faktor ketiga akan membahas kondisi rumah tangga yang tidak layak huni, yang memperlihatkan dimensi lain dari kemiskinan multidimensional di Desa Umauta.

3.2.4.1.3 Faktor Kondisi Rumah Tangga yang Tidak Layak Huni

Salah satu indikator paling nyata dari kemiskinan ekstrem di Desa Umauta adalah kondisi rumah tangga miskin yang sebagian besar masih tergolong tidak layak huni. Sebagian besar rumah dibangun secara darurat dengan bahan seadanya, seperti dinding bambu atau papan tipis, atap dari daun kelapa atau seng bekas, serta lantai tanah yang cepat becek ketika musim hujan. Hunian semacam ini tidak mampu melindungi keluarga dari cuaca ekstrem, baik hujan deras, angin kencang, maupun terik matahari. Akibatnya, rumah yang seharusnya menjadi tempat aman justru menambah kerentanan, terutama bagi anak-anak dan lansia. Fenomena ini memperlihatkan bahwa kemiskinan di Umauta tidak hanya

tercermin pada rendahnya pendapatan, tetapi juga pada rendahnya kualitas lingkungan tempat tinggal.

Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa banyak rumah di Umauta berada dalam kondisi rusak permanen, tetapi keluarga tidak memiliki dana untuk melakukan perbaikan. Ketika musim hujan tiba, kebocoran atap hampir dialami oleh semua rumah tangga miskin. Yohanes Gawi (55 tahun, tokoh masyarakat, wawancara 17 Agustus 2025) menuturkan: *"Kalau angin kencang, atap rumah banyak yang terbang. Orang hanya bisa pasang kembali dengan daun kelapa karena tidak mampu beli seng atau batu bata."* Kesaksian ini menegaskan bahwa kerusakan rumah adalah masalah rutin yang tidak pernah benar-benar selesai, karena keterbatasan ekonomi membuat perbaikan hanya bersifat sementara.

Selain atap, lantai tanah juga menjadi masalah serius yang memengaruhi kesehatan keluarga. Ketika hujan deras turun, lantai rumah sering becek dan menjadi tempat berkembang biaknya penyakit. Maria Niron (36 tahun, ibu rumah tangga, wawancara 18 Agustus 2025) menjelaskan: *"Kalau hujan, lantai tanah jadi becek, anak-anak sering batuk dan sakit kulit. Kami ingin pasang semen, tapi uang tidak ada."* Pernyataan ini menunjukkan keterkaitan langsung antara kondisi rumah yang buruk dan kesehatan keluarga miskin. Rumah yang tidak layak huni memperbesar risiko penyakit, yang pada gilirannya menambah beban ekonomi rumah tangga.

Lebih jauh lagi, kualitas rumah yang buruk juga berdampak pada pendidikan anak-anak. Banyak anak yang kesulitan belajar di rumah karena tidak ada penerangan listrik yang memadai dan kondisi ruangan yang tidak nyaman. Beberapa keluarga hanya mengandalkan lampu minyak atau lilin untuk belajar di malam hari. Petrus Laga (50 tahun, petani, wawancara 15 Agustus 2025) menuturkan: *"Anak-anak susah belajar malam karena lampu minyak asapnya bikin sakit mata. Kalau hujan, atap bocor dan buku mereka sering basah."* Kesaksian ini memperlihatkan bagaimana rumah tidak layak huni tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga pada kualitas pendidikan generasi muda.

Analisis lapangan menunjukkan bahwa kondisi rumah tangga di Umauta dapat dikategorikan sebagai *housing poverty*. Konsep ini

menekankan bahwa kemiskinan tidak hanya terkait dengan kurangnya pendapatan, tetapi juga dengan kualitas tempat tinggal yang tidak memadai. Rumah yang tidak layak huni menambah beban keluarga karena mereka harus mengeluarkan biaya perbaikan berulang, menghadapi risiko kesehatan lebih tinggi, dan tidak memiliki ruang belajar yang mendukung anak-anak. Dengan demikian, rumah yang rapuh memperkuat lingkaran kemiskinan lintas generasi.

Lebih jauh, keterbatasan program pemerintah dalam menangani masalah perumahan di Umauta juga menjadi catatan penting. Beberapa warga menyebut bahwa program bantuan rumah layak huni yang digulirkan pemerintah hanya menjangkau sebagian kecil keluarga, sementara mayoritas tetap tidak tersentuh. Bantuan material pun seringkali tidak cukup untuk membangun rumah permanen karena biaya tambahan harus ditanggung sendiri oleh keluarga. Kondisi ini memperlihatkan lemahnya intervensi kebijakan dalam mengatasi dimensi kemiskinan yang sangat mendasar.

Dalam perspektif kebijakan pembangunan, kondisi Umauta menggambarkan perlunya pendekatan *multidimensional poverty reduction*. Tidak cukup hanya memberikan bantuan tunai, tetapi juga diperlukan intervensi nyata untuk menyediakan rumah layak huni, infrastruktur dasar, dan lingkungan yang sehat. Tanpa itu semua, keluarga miskin akan terus hidup dalam kerentanan yang berlapis, di mana setiap musim hujan atau angin kencang selalu berarti ancaman baru bagi keselamatan dan kesehatan mereka.

Dengan demikian, kondisi rumah tangga yang tidak layak huni menjadi faktor penting yang memperparah kemiskinan di Desa Umauta. Rumah bukan lagi tempat perlindungan yang aman, melainkan sumber tambahan kerentanan. Keterbatasan ekonomi, risiko kesehatan, dan hambatan pendidikan yang lahir dari kondisi ini memperlihatkan bahwa kemiskinan bersifat multidimensional. Selanjutnya, faktor keempat akan membahas rendahnya tingkat pendidikan dan putus sekolah, yang menunjukkan bagaimana keterbatasan ekonomi dan sosial membatasi masa depan generasi muda di Umauta.

3.2.4.1.4 Faktor Rendahnya Tingkat Pendidikan dan Putus Sekolah

Rendahnya tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor paling menonjol yang memperkuat kemiskinan ekstrem di Desa Umauta.

Sebagian besar anak-anak hanya mampu menamatkan pendidikan dasar, sementara melanjutkan ke jenjang SMP atau SMA menjadi tantangan besar. Hambatan utama bukan terletak pada rendahnya motivasi belajar, melainkan pada keterbatasan biaya transportasi, seragam, buku, dan perlengkapan sekolah lain yang tidak mampu dipenuhi keluarga miskin. Akibatnya, putus sekolah menjadi fenomena yang sering terjadi, bahkan pada anak-anak yang sebenarnya memiliki kemampuan akademik baik. Situasi ini memperlihatkan bahwa pendidikan rendah di Umauta lebih merupakan hasil dari keterbatasan struktural ketimbang pilihan individu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak anak-anak Umauta yang tidak bisa melanjutkan sekolah setelah lulus SD. Sekolah lanjutan berada di kecamatan yang jaraknya cukup jauh, sehingga memerlukan biaya transportasi tambahan. Bagi keluarga miskin yang pendapatannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan harian, ongkos transportasi menjadi penghalang utama. Maria Ledo (40 tahun, ibu rumah tangga, wawancara 18 Agustus 2025) menuturkan: *"Anak kami pintar, tapi tidak bisa lanjut sekolah karena tidak ada uang ongkos. Mereka akhirnya bantu kerja di kebun sejak kecil."* Pernyataan ini menegaskan bahwa keterbatasan ekonomi telah memutus kesempatan pendidikan anak-anak.

Selain biaya transportasi, kebutuhan sekolah seperti seragam, buku, dan iuran komite juga menjadi kendala serius. Petrus Laga (50 tahun, petani, wawancara 15 Agustus 2025) menyampaikan: *"Untuk seragam dan sepatu saja sudah berat, apalagi kalau ada iuran sekolah. Banyak orang tua tidak sanggup, jadi anak-anak berhenti sekolah lebih cepat."* Kesaksian ini memperlihatkan bagaimana beban biaya non-tuition (non-SPP) masih menjadi penghalang besar, meskipun secara formal sekolah negeri tidak memungut biaya pendidikan.

Lebih jauh lagi, rendahnya pendidikan berimplikasi pada tingginya angka pernikahan dini di Umauta. Anak-anak yang tidak melanjutkan sekolah cenderung segera menikah dan membentuk rumah tangga baru dengan kondisi ekonomi yang sama rapuhnya. Yohanes Gawi (55 tahun, tokoh masyarakat, wawancara 17 Agustus 2025) menegaskan: *"Banyak anak di Umauta nikah muda karena tidak ada sekolah lanjutan dekat sini. Mereka pikir lebih baik menikah daripada menganggur, tapi akhirnya tambah miskin."* Pernyataan ini memperlihatkan bagaimana putus sekolah mendorong reproduksi kemiskinan lintas generasi.

Keterbatasan pendidikan juga berdampak pada peluang kerja generasi muda. Tanpa ijazah atau keterampilan formal, mereka hanya bisa bekerja di sektor informal atau kembali ke ladang sebagai buruh tani. Tidak ada kesempatan untuk masuk ke sektor formal yang membutuhkan kualifikasi tertentu. Kondisi ini memperkuat siklus kemiskinan karena generasi muda tidak mampu keluar dari mata rantai pekerjaan rendah produktivitas. Hasil observasi lapangan memperlihatkan bahwa hampir semua pemuda di Umauta bekerja di sektor pertanian subsisten atau merantau ke kota dengan pekerjaan kasar berupah rendah.

Dari perspektif analitis, rendahnya pendidikan di Umauta sejalan dengan konsep *human capital theory*. Pendidikan seharusnya menjadi investasi untuk meningkatkan produktivitas dan mobilitas sosial, tetapi ketika investasi ini tidak dapat dilakukan, generasi muda tetap terjebak dalam pekerjaan berupah rendah. Dengan kata lain, pendidikan rendah bukan hanya akibat dari kemiskinan, tetapi juga menjadi penyebab utama yang memperkuat kemiskinan. Fenomena ini memperlihatkan adanya lingkaran setan: kemiskinan menyebabkan anak putus sekolah, sementara putus sekolah memastikan kemiskinan akan terus berulang.

Selain itu, situasi ini dapat dipahami melalui perspektif *capability approach* dari Amartya Sen. Anak-anak di Umauta sebenarnya memiliki aspirasi dan kemampuan untuk melanjutkan sekolah, tetapi keterbatasan ekonomi membuat mereka tidak memiliki kapabilitas substantif untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Dengan demikian, kemiskinan di Umauta bukan hanya soal ketiadaan uang, tetapi juga soal terbataskannya pilihan hidup yang bernilai bagi masyarakat.

Dengan demikian, rendahnya pendidikan dan tingginya angka putus sekolah menjadi faktor yang memastikan kemiskinan di Umauta terus berlanjut dari generasi ke generasi. Tanpa intervensi nyata untuk memperluas akses pendidikan, anak-anak akan terus kehilangan kesempatan untuk keluar dari jerat kemiskinan. Setelah menelaah dimensi pendidikan ini, analisis lintas faktor akan memperlihatkan bagaimana kemiskinan di Umauta sebenarnya merupakan hasil interaksi kompleks antara ketergantungan pertanian subsisten, krisis air bersih, kondisi rumah tidak layak huni, dan pendidikan rendah yang saling memperkuat.

3.2.4.1.5 Analisis Lintas Faktor Desa Umauta

Hasil penelitian di Desa Umauta menunjukkan bahwa kemiskinan ekstrem yang dialami masyarakat bukanlah persoalan tunggal, melainkan akumulasi dari berbagai faktor yang saling berkelindan. Tingginya angka keluarga miskin yang mencapai 38,88% merepresentasikan betapa beratnya tantangan pembangunan di wilayah ini. Analisis lintas faktor memperlihatkan bahwa kemiskinan di Umauta bersifat multidimensional: basis ekonomi yang rapuh karena pertanian subsisten, keterbatasan infrastruktur dasar terutama air bersih, kondisi rumah tangga yang tidak layak huni, serta rendahnya pendidikan dan tingginya angka putus sekolah. Keempat faktor ini saling menguatkan satu sama lain, menciptakan lingkaran kemiskinan yang sulit diputus.

Dimensi pertama yang menonjol adalah ketergantungan masyarakat pada pertanian subsisten dengan produktivitas rendah. Basis ekonomi yang hanya mengandalkan jagung, ubi, dan padi ladang menjadikan masyarakat sangat rentan terhadap perubahan iklim dan musim. Ketika curah hujan tidak menentu, kegagalan panen hampir tidak terhindarkan, sehingga rumah tangga kehilangan cadangan pangan sekaligus sumber penghasilan. Situasi ini menggambarkan fenomena *livelihood vulnerability*, di mana tidak adanya diversifikasi usaha dan akses ke teknologi pertanian membuat masyarakat tidak memiliki alternatif lain. Dalam kondisi gagal panen, beban ekonomi semakin berat karena keluarga terpaksa berutang atau membeli pangan dengan harga tinggi. Ketergantungan subsisten ini menjadi titik awal yang menjelaskan mengapa kemiskinan di Umauta bersifat struktural, bukan sekadar masalah perilaku individu.

Kerentanan ekonomi tersebut diperburuk oleh krisis air bersih yang sudah menjadi masalah kronis di Umauta. Air yang seharusnya menjadi kebutuhan dasar justru menjadi beban ekonomi karena masyarakat harus membeli air tangki seharga Rp200.000–Rp250.000 setiap dua minggu. Bagi keluarga miskin, pengeluaran ini sangat besar, bahkan melebihi belanja pangan pada periode tertentu. Anak-anak dan perempuan sering harus berjalan jauh ke mata air untuk mengambil air ketika uang tidak tersedia. Hal ini memperlihatkan fenomena *infrastructure poverty*, di mana kemiskinan diperparah oleh ketiadaan infrastruktur dasar. Selain membebani ekonomi rumah tangga, krisis air juga berdampak pada kesehatan karena banyak keluarga menggunakan air kali yang tidak

layak. Dengan demikian, air bersih tidak hanya menjadi isu teknis, tetapi juga menjadi penghalang utama bagi upaya keluar dari kemiskinan.

Dimensi berikutnya adalah kondisi rumah tangga yang sebagian besar masih tidak layak huni. Rumah-rumah darurat dengan dinding bambu, atap daun kelapa, dan lantai tanah tidak memberikan perlindungan memadai bagi keluarga miskin. Setiap musim hujan, kebocoran atap menjadi pemandangan umum, sementara angin kencang sering merusak struktur rumah. Kondisi ini menciptakan apa yang disebut *housing poverty*, yaitu kemiskinan yang diukur dari kualitas hunian. Rumah yang tidak layak huni meningkatkan risiko kesehatan, menambah biaya perbaikan berulang, dan menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi anak-anak untuk belajar. Ketika rumah tidak lagi menjadi tempat aman, keluarga miskin menghadapi kerentanan berlapis: ekonomi, kesehatan, dan pendidikan.

Rendahnya pendidikan dan tingginya angka putus sekolah menjadi faktor terakhir yang memperkuat lingkaran kemiskinan di Umauta. Anak-anak yang tidak mampu melanjutkan sekolah karena keterbatasan biaya akhirnya menikah muda atau bekerja sebagai buruh tani, sehingga mengulangi pola hidup orang tua mereka. Rendahnya tingkat pendidikan menghalangi generasi muda untuk mengakses pekerjaan formal yang lebih produktif, sehingga mereka tetap terjebak di sektor informal dengan pendapatan rendah. Fenomena ini sesuai dengan konsep *human capital theory*, yang menekankan bahwa pendidikan adalah investasi penting untuk meningkatkan produktivitas. Tanpa investasi ini, generasi muda tetap berada di posisi marginal. Situasi di Umauta juga mencerminkan perspektif *capability approach* dari Amartya Sen, di mana kemiskinan bukan hanya soal ketiadaan pendapatan, tetapi juga keterbatasan kapabilitas masyarakat untuk mewujudkan kehidupan yang mereka anggap bernilai.

Keempat faktor tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling memperkuat dalam menciptakan siklus kemiskinan. Pertanian subsisten yang rapuh diperparah oleh krisis air, sehingga produktivitas semakin rendah. Rumah tidak layak huni menambah beban kesehatan, yang pada akhirnya mengurangi produktivitas kerja dan menambah pengeluaran keluarga miskin. Rendahnya pendidikan mempersempit peluang generasi muda untuk keluar dari sektor pertanian subsisten, sehingga siklus

kemiskinan terus berulang. Dengan kata lain, kemiskinan di Umauta merupakan hasil dari interaksi kompleks antara faktor ekonomi, infrastruktur, hunian, dan pendidikan.

Dalam perspektif kebijakan, temuan di Umauta menegaskan bahwa program bantuan sosial semata tidak cukup untuk mengatasi akar persoalan kemiskinan. PKH, BLT, atau BPNT mungkin membantu meringankan beban jangka pendek, tetapi tidak menjawab persoalan struktural seperti ketiadaan irigasi, krisis air bersih, perumahan tidak layak, dan rendahnya akses pendidikan. Oleh karena itu, strategi pengentasan kemiskinan di Umauta memerlukan pendekatan multidimensional yang mencakup pembangunan infrastruktur dasar, perbaikan kualitas hunian, serta perluasan akses pendidikan dan kesehatan. Hanya dengan intervensi struktural semacam ini, lingkaran kemiskinan di Umauta dapat diputus.

Dengan demikian, analisis lintas faktor di Desa Umauta memperlihatkan bahwa kemiskinan ekstrem di wilayah ini adalah bentuk kemiskinan multidimensional yang tidak bisa diurai dengan satu solusi tunggal. Interaksi antara faktor ekonomi, sosial, dan infrastruktur menciptakan kondisi kerentanan berlapis yang menuntut pendekatan kebijakan holistik.

3.2.4.2 Desa Wairbleler

3.2.4.2.1 Ketergantungan Negatif pada Pertanian Subsisten dan Nelayan Kecil

Kemiskinan ekstrem di Desa Wairbleler tidak bisa dilepaskan dari ketergantungan masyarakat pada sektor pertanian subsisten dan perikanan skala kecil yang berproduktivitas rendah. Sebagian besar rumah tangga menggantungkan hidup dari lahan kering dengan komoditas utama jagung, ubi, dan padi ladang, sementara sebagian lain menjadi nelayan kecil dengan perahu sederhana tanpa mesin atau alat tangkap modern. Situasi ini menciptakan kerentanan struktural karena hasil pertanian sangat tergantung pada musim hujan, sementara hasil tangkapan ikan ditentukan oleh kondisi cuaca laut dan harga pasar yang dikuasai tengkulak. Dengan demikian, sumber penghidupan masyarakat Wairbleler bersifat rapuh, tidak stabil, dan berisiko tinggi gagal memenuhi kebutuhan dasar keluarga.

Hasil penelitian lapangan memperlihatkan bahwa mayoritas keluarga petani di Wairbleler hanya dapat menghasilkan jagung dan ubi untuk konsumsi rumah tangga, tanpa surplus yang berarti untuk dijual. Dalam wawancara tanggal 16 Agustus 2025, Markus Laga (50 tahun, petani jagung) menuturkan: *"Kalau panen bagus, paling hanya cukup makan tiga bulan. Setelah itu, kami harus cari kerja lain atau pinjam uang. Kalau hujan tidak datang tepat waktu, kami gagal panen total."* Kondisi ini menggambarkan betapa ketergantungan pada pola tanam tradisional di lahan kering membuat rumah tangga miskin terus-menerus menghadapi ancaman kerawanan pangan.

Sementara itu, kelompok nelayan kecil menghadapi persoalan serupa dalam sektor kelautan. Perahu tradisional tanpa mesin membuat mereka hanya bisa melaut di sekitar perairan dangkal, dengan hasil tangkapan terbatas. Pada wawancara tanggal 17 Agustus 2025, Yohanes Kefi (45 tahun, nelayan kecil) menjelaskan: *"Kami hanya bisa pakai sampan dan dayung, hasil tangkapannya tidak seberapa. Kalau angin besar, kami tidak bisa melaut sama sekali, jadi harus pinjam uang untuk makan."* Kesaksian ini menegaskan bahwa perikanan kecil di Wairbleler belum mampu menjadi sumber penghidupan yang aman, melainkan justru memperdalam kerentanan ekonomi.

Lebih lanjut, ketergantungan pada sektor primer ini diperparah oleh keterbatasan akses teknologi, modal, dan pasar. Masyarakat tidak memiliki sarana irigasi yang memadai, sehingga pertanian benar-benar hanya mengandalkan curah hujan. Sementara dalam perikanan, hasil tangkapan mereka dijual ke tengkulak dengan harga yang sangat rendah karena tidak ada fasilitas penyimpanan atau akses langsung ke pasar yang lebih luas. Dalam wawancara tanggal 18 Agustus 2025, Ibu Theresia (38 tahun, ibu rumah tangga) menuturkan: *"Harga ikan selalu ditentukan tengkulak. Kami tidak punya pilihan, kalau tidak jual ke mereka, ikan cepat busuk. Akhirnya kami rugi terus."* Pernyataan ini memperlihatkan bahwa struktur ekonomi lokal membuat nelayan kecil tetap berada dalam posisi subordinat.

Dari sisi analisis, kondisi ini dapat dijelaskan melalui konsep *livelihood vulnerability*, di mana sumber penghidupan masyarakat sangat bergantung pada faktor eksternal yang tidak bisa mereka kendalikan, seperti cuaca, musim, dan harga pasar. Kerentanan ini bukan hanya

menimbulkan ketidakpastian pendapatan, tetapi juga membuat rumah tangga miskin semakin bergantung pada hutang, baik dari koperasi mingguan maupun dari tetangga yang lebih mampu. Dengan kata lain, ketergantungan pada pertanian subsisten dan nelayan kecil justru memperkuat siklus kemiskinan, karena setiap kegagalan panen atau melaut langsung berimplikasi pada krisis ekonomi rumah tangga.

Lebih jauh lagi, fenomena ini juga menunjukkan adanya stagnasi ekonomi di tingkat desa. Meskipun intervensi pemerintah dalam bentuk bantuan sosial atau program pemberdayaan telah masuk, namun tanpa diversifikasi ekonomi, masyarakat tetap kembali pada mata pencaharian tradisional yang berisiko tinggi. Bahkan, beberapa program bantuan alat pertanian atau perikanan yang pernah diberikan tidak berfungsi optimal karena kurangnya pendampingan. Dengan demikian, ketergantungan masyarakat Wairbleler pada pertanian subsisten dan nelayan kecil bukan hanya persoalan pilihan, melainkan hasil dari keterbatasan struktural yang memaksa mereka tetap berada pada pola penghidupan rapuh dan tidak produktif.

Selanjutnya, penting dicatat bahwa kerentanan ini berdampak langsung pada aspek lain kehidupan masyarakat. Ketika panen gagal atau hasil tangkapan menurun, keluarga harus memangkas biaya pendidikan anak, menunda pengobatan, atau terjerat hutang baru. Hal ini memperlihatkan bahwa sumber penghidupan tradisional yang tidak produktif tidak hanya menyebabkan kemiskinan material, tetapi juga menghambat akses pada pendidikan, kesehatan, dan kualitas hidup yang lebih baik. Dengan demikian, ketergantungan negatif pada pertanian subsisten dan nelayan kecil merupakan faktor mendasar yang memperdalam kemiskinan ekstrem di Desa Wairbleler, sekaligus menjelaskan mengapa masyarakat sulit keluar dari jerat kemiskinan meskipun berbagai program telah masuk.

3.2.4.2.2 Kelembagaan Desa yang Lemah dalam Pengelolaan Bantuan

Kelembagaan desa di Wairbleler memainkan peran penting dalam distribusi bantuan sosial dan implementasi berbagai program pemerintah, tetapi peran ini sering kali terbatas dan kurang efektif. Pemerintah desa hanya berfungsi sebagai pintu masuk administratif untuk mendata calon penerima bantuan, sementara keputusan akhir tetap berada di tingkat

kabupaten. Akibatnya, perangkat desa tidak memiliki kewenangan yang cukup untuk menyesuaikan program dengan kondisi riil masyarakat. Situasi ini menimbulkan kesenjangan antara kebijakan formal dengan kebutuhan nyata di lapangan, sehingga banyak keluarga miskin merasa tidak terakomodasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses musyawarah desa yang seharusnya menjadi ruang partisipasi warga sering bersifat formalistik. Nama-nama penerima bantuan biasanya sudah ditentukan melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sehingga forum desa hanya mengesahkan daftar tersebut tanpa perdebatan berarti. Pada wawancara tanggal 19 Agustus 2025, Bapak Adrianus (42 tahun, aparat desa) menuturkan: *"Kami hanya bisa usulkan nama, tapi yang memutuskan tetap kabupaten. Kalau ada warga yang tidak terdaftar, kami tidak bisa berbuat banyak."* Kesaksian ini memperlihatkan lemahnya kelembagaan desa dalam memperjuangkan kepentingan warga miskin.

Lebih lanjut, lemahnya kapasitas kelembagaan juga terlihat dari minimnya pengawasan terhadap pelaksanaan program. Beberapa warga menyampaikan bahwa distribusi bantuan tidak selalu tepat sasaran, bahkan kadang muncul kecurigaan adanya praktik pilih kasih atau kedekatan personal. Pada wawancara tanggal 20 Agustus 2025, Ibu Yuliana (37 tahun, ibu rumah tangga) menjelaskan: *"Ada keluarga yang rumahnya bagus tetap dapat bantuan, sementara tetangga yang susah sekali tidak masuk daftar. Kami jadi bingung, apakah karena data salah atau ada orang dalam yang atur."* Pernyataan ini menegaskan bahwa kelemahan dalam tata kelola data telah menciptakan persepsi ketidakadilan yang merusak kepercayaan warga pada pemerintah desa.

Masalah lain yang muncul adalah lemahnya manajemen program pemberdayaan di tingkat desa. Beberapa kelompok usaha bersama yang dibentuk melalui program seperti PNPM atau Anggur Merah bubar karena tidak ada pendampingan berkelanjutan. Dana awal yang diberikan habis untuk konsumsi atau kebutuhan sesaat, tanpa menghasilkan usaha produktif yang bertahan lama. Pada wawancara tanggal 21 Agustus 2025, Stefanus (28 tahun, pemuda desa) mengungkapkan: *"Dulu ada kelompok usaha kecil, tapi tidak ada pendampingan, jadi uangnya habis begitu saja. Sekarang orang lebih suka tunggu bantuan daripada bikin usaha lagi."* Hal

ini menunjukkan bahwa kelembagaan lokal tidak cukup kuat untuk mengawal program sehingga hasilnya tidak berkelanjutan.

Secara analitis, kondisi ini bisa dijelaskan melalui perspektif *institutional weakness* dalam teori pembangunan. Kelembagaan desa yang lemah tidak mampu menjalankan fungsi representasi, koordinasi, maupun pengawasan secara efektif. Akibatnya, program bantuan yang masuk dari pusat atau kabupaten bersifat top-down dan sering tidak sesuai dengan konteks lokal. Selain itu, lemahnya kapasitas aparatur desa memperbesar jarak antara negara dan masyarakat, sehingga warga merasa hanya sebagai penerima pasif. Kondisi ini memperkuat ketergantungan pada bantuan tanpa menciptakan transformasi ekonomi yang berarti.

Lebih jauh lagi, kelemahan kelembagaan juga berdampak pada berkurangnya solidaritas komunitas. Warga yang merasa tidak adil dalam menerima bantuan cenderung bersikap apatis terhadap musyawarah desa, sehingga partisipasi menurun. Bahkan, ada laporan konflik kecil antarwarga yang saling menuduh terkait distribusi bantuan. Fenomena ini menandakan bahwa kelemahan kelembagaan desa bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga berimplikasi pada kohesi sosial masyarakat.

Dengan demikian, kelembagaan desa di Wairbleler yang lemah dalam pengelolaan bantuan telah menjadi faktor signifikan yang memperdalam kemiskinan ekstrem. Tidak hanya karena program tidak tepat sasaran, tetapi juga karena kelemahan tersebut melemahkan solidaritas sosial dan menurunkan kepercayaan warga terhadap pemerintah lokal. Selanjutnya, analisis terhadap faktor berikutnya akan menunjukkan bagaimana krisis air bersih dan buruknya sanitasi semakin memperburuk kondisi kehidupan keluarga miskin di desa ini.

3.2.4.2.3 Krisis Air Bersih dan Buruknya Kondisi Sanitasi

Krisis air bersih menjadi salah satu faktor paling krusial yang memperkuat kemiskinan ekstrem di Desa Wairbleler. Sebagian besar keluarga masih bergantung pada sumber air seadanya seperti sumur dangkal, kali kecil, atau air hujan yang ditampung dalam bak sementara. Ketika musim kemarau tiba, sumber air ini sering kering sehingga warga terpaksa membeli air tangki dengan harga mahal. Situasi ini membuat

pengeluaran rumah tangga miskin semakin terbebani karena sebagian besar pendapatan harian justru habis untuk membeli air, bukan untuk kebutuhan produktif lainnya. Dengan demikian, keterbatasan akses air bersih bukan sekadar masalah teknis, melainkan sumber utama kerentanan ekonomi.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa hampir semua keluarga di Wairbleler mengeluarkan biaya tambahan untuk air bersih setiap bulan. Harga satu tangki air berkisar Rp200.000–Rp250.000, yang hanya cukup untuk kebutuhan memasak dan minum selama dua minggu. Untuk kebutuhan mandi dan mencuci, warga biasanya menggunakan air sungai atau sumur yang kualitasnya rendah dan sering berbau. Pada wawancara tanggal 22 Agustus 2025, Ibu Katarina (41 tahun, ibu rumah tangga) menuturkan: *"Setiap dua minggu kami harus beli air tangki, padahal uang hasil tani atau jual ikan saja tidak cukup. Jadi kadang lebih banyak uang habis untuk air daripada untuk beli beras."* Pernyataan ini menunjukkan bahwa air bersih telah menjadi komoditas mahal yang membebani keluarga miskin.

Lebih jauh lagi, keterbatasan air bersih berimplikasi langsung pada kesehatan masyarakat. Banyak keluarga terpaksa mengonsumsi air yang tidak layak minum, sehingga kasus penyakit diare, gatal-gatal kulit, dan infeksi saluran pencernaan sering terjadi. Minimnya akses sanitasi yang memadai, seperti jamban sehat dan saluran pembuangan, memperburuk kondisi kesehatan lingkungan. Pada wawancara tanggal 23 Agustus 2025, Bapak Damianus (47 tahun, tokoh masyarakat) menjelaskan: *"Kalau musim hujan, sumur kami sering tercemar, anak-anak jadi sakit perut. Kami tahu airnya kotor, tapi tidak ada pilihan lain."* Testimoni ini menegaskan bahwa keterbatasan air bersih bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga masalah kesehatan masyarakat.

Selain itu, beban kerja perempuan meningkat akibat krisis air bersih. Mereka harus berjalan jauh untuk mengambil air dari sumber yang masih ada, atau mengatur pembagian air yang terbatas untuk kebutuhan rumah tangga. Kondisi ini menambah beban ganda perempuan karena selain mengurus rumah, mereka juga harus memastikan ketersediaan air. Pada wawancara tanggal 23 Agustus 2025, Ibu Theresia (36 tahun, petani sekaligus ibu rumah tangga) mengungkapkan: *"Kalau musim kemarau, kami jalan satu jam hanya untuk ambil air. Sampai rumah sudah capek,*

tapi masih harus urus anak dan masak." Kesaksian ini memperlihatkan dimensi gender dalam krisis air, di mana perempuan menanggung beban paling berat.

Analisis dari perspektif pembangunan berkelanjutan menunjukkan bahwa akses air bersih merupakan salah satu indikator utama kesejahteraan. Ketika akses ini tidak tersedia, kemiskinan semakin dalam karena rumah tangga miskin harus mengorbankan pendapatan yang sedikit untuk kebutuhan dasar yang seharusnya dijamin negara. Selain itu, dari perspektif *capability approach* Amartya Sen, krisis air bersih membatasi kebebasan substantif masyarakat untuk hidup sehat dan produktif. Dengan kata lain, warga Wairbleler kehilangan salah satu hak fundamental mereka, yaitu akses pada air bersih yang layak dan terjangkau.

Lebih jauh lagi, buruknya kondisi sanitasi memperparah situasi. Sebagian besar rumah tangga tidak memiliki jamban sehat, sehingga praktik buang air sembarangan masih ditemukan. Hal ini tidak hanya merugikan kesehatan keluarga, tetapi juga menciptakan lingkungan yang tidak higienis dan berpotensi menurunkan produktivitas kerja masyarakat. Situasi ini memperlihatkan bahwa krisis air bersih dan sanitasi buruk saling terkait dalam memperdalam lingkaran kemiskinan.

Dengan demikian, krisis air bersih dan buruknya kondisi sanitasi di Desa Wairbleler merupakan faktor struktural yang memperkuat kerentanan ekonomi, kesehatan, dan sosial masyarakat. Ketika pendapatan harian habis untuk membeli air, peluang untuk berinvestasi dalam pendidikan, usaha produktif, atau tabungan jangka panjang menjadi tertutup. Selanjutnya, analisis faktor berikutnya akan memperlihatkan bagaimana beban sosial adat yang menguras ekonomi rumah tangga semakin memperberat kemiskinan di desa ini.

3.2.4.2.4 Beban Sosial Adat yang Menguras Ekonomi Rumah Tangga

Kemiskinan di Desa Wairbleler bukan hanya hasil dari keterbatasan sumber daya alam dan akses ekonomi, tetapi juga diperkuat oleh beban sosial adat yang mengikat seluruh warga. Kehidupan masyarakat masih sangat dipengaruhi oleh norma adat, terutama dalam hal pernikahan, kematian, dan ritual keagamaan yang selalu memerlukan biaya besar. Walaupun kondisi ekonomi rumah tangga miskin serba terbatas,

kewajiban adat tidak dapat ditinggalkan karena dianggap sebagai simbol kehormatan dan penghargaan terhadap leluhur. Dengan demikian, beban adat berfungsi ganda: menjaga kohesi sosial, tetapi sekaligus menguras sumber daya ekonomi keluarga miskin.

Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa hampir semua keluarga di Wairbleler terlibat dalam pesta adat, baik sebagai tuan rumah maupun tamu yang harus memberikan kontribusi. Belis dalam pernikahan menjadi kewajiban besar yang sering kali membuat keluarga terjerat hutang jangka panjang. Pada wawancara tanggal 24 Agustus 2025, Bapak Kornelis (52 tahun, tokoh adat) menuturkan: *"Kalau anak menikah, keluarga harus siapkan belis, bisa sapi atau uang banyak. Walaupun miskin, kalau tidak kasih belis, dianggap tidak menghormati adat."* Kesaksian ini memperlihatkan bahwa norma sosial lebih dominan daripada pertimbangan ekonomi dalam kehidupan masyarakat.

Selain belis, upacara kematian juga menuntut biaya besar. Keluarga miskin terpaksa menjual ternak atau meminjam uang untuk memenuhi kewajiban adat dalam bentuk sumbangan hewan, beras, atau uang. Pada wawancara tanggal 25 Agustus 2025, Ibu Rosalia (43 tahun, ibu rumah tangga) menjelaskan: *"Kalau ada orang meninggal, kami harus bawa beras atau uang. Kalau tidak, nanti keluarga kita dikucilkan. Jadi meski susah, tetap harus ikut."* Situasi ini memperlihatkan bagaimana tekanan sosial membuat keluarga miskin tidak memiliki pilihan selain mengikuti arus.

Lebih jauh lagi, pesta adat dan ritual keagamaan rutin seperti pesta laut, perayaan hari raya, dan pembangunan rumah adat menyerap tenaga dan biaya masyarakat. Banyak warga mengaku bahwa hasil panen maupun pendapatan dari melaut lebih sering diarahkan untuk kebutuhan adat daripada kebutuhan produktif seperti pendidikan anak atau tabungan. Pada wawancara tanggal 26 Agustus 2025, Bapak Andreas (48 tahun, petani sekaligus nelayan kecil) menuturkan: *"Kami sering habiskan hasil jagung dan ikan untuk acara pesta. Kalau tidak ikut, nanti dibilang keluarga pelit. Akhirnya anak-anak sekolah pun jadi terganggu karena uang sudah habis."* Pernyataan ini menegaskan bahwa beban adat mengurangi kapasitas keluarga dalam mengelola pendapatan untuk kepentingan jangka panjang.

Analisis dengan perspektif *culture of poverty* yang diperkenalkan Oscar Lewis membantu memahami fenomena ini. Kemiskinan di Wairbleler direproduksi karena norma adat yang kuat menciptakan kewajiban sosial yang harus dipenuhi tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi. Masyarakat terjebak dalam pola pikir bahwa kehormatan sosial lebih penting daripada kesejahteraan ekonomi keluarga. Akibatnya, meskipun bantuan sosial masuk atau panen cukup berhasil, dana yang diperoleh justru dialihkan ke kebutuhan adat. Kondisi ini membuat keluarga miskin sulit keluar dari lingkaran kemiskinan.

Dari perspektif sosial, beban adat memang menjaga solidaritas dan memperkuat ikatan komunitas. Namun, solidaritas ini bersifat ambivalen karena secara ekonomi memperdalam kerentanan. Ketika sebagian besar pendapatan rumah tangga tersedot untuk kebutuhan adat, ruang untuk investasi produktif semakin kecil. Hal ini tidak hanya berdampak pada keluarga miskin secara individu, tetapi juga memperlambat pembangunan ekonomi desa secara keseluruhan.

Dengan demikian, beban sosial adat yang menguras ekonomi rumah tangga menjadi salah satu faktor penting yang memastikan kemiskinan ekstrem di Wairbleler tetap bertahan. Keluarga miskin tidak memiliki kebebasan untuk mengalokasikan pendapatan sesuai prioritas mereka karena norma adat lebih menentukan arah pengeluaran. Setelah memahami dimensi adat ini, faktor berikutnya akan memperlihatkan bagaimana rendahnya pendidikan dan gagalnya diversifikasi ekonomi lokal semakin memperkuat jerat kemiskinan di desa ini.

3.2.4.2.5 Rendahnya Pendidikan dan Gagalnya Diversifikasi Ekonomi Lokal

Rendahnya pendidikan masyarakat Desa Wairbleler menjadi salah satu faktor dominan yang memperkuat lingkaran kemiskinan. Sebagian besar anak-anak hanya mampu menamatkan pendidikan dasar, sementara melanjutkan ke tingkat SMP atau SMA sering kali terbentur keterbatasan biaya transportasi, seragam, dan kebutuhan sekolah lainnya. Kondisi ini membuat generasi muda tidak memiliki keterampilan memadai untuk memasuki sektor kerja yang lebih modern. Akibatnya, mereka kembali bekerja sebagai buruh tani di lahan kering atau nelayan kecil, sehingga siklus kemiskinan terus berulang dari generasi ke generasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak keluarga harus mengorbankan pendidikan anak karena penghasilan harian hanya cukup untuk kebutuhan makan. Pada wawancara tanggal 26 Agustus 2025, Ibu Melania (39 tahun, ibu rumah tangga) menuturkan: *"Kami ingin anak sekolah sampai SMA, tapi biaya ongkos dan seragam terlalu mahal. Akhirnya mereka berhenti dan ikut bantu kerja di kebun."* Pernyataan ini memperlihatkan bahwa keterbatasan pendidikan bukan karena kurangnya motivasi, melainkan karena tekanan ekonomi yang berat.

Selain rendahnya akses pendidikan, gagalnya diversifikasi ekonomi juga memperparah kemiskinan di Wairbleler. Sebagian besar masyarakat tetap menggantungkan hidup pada pertanian subsisten dan perikanan tradisional, tanpa ada usaha alternatif yang produktif. Upaya untuk membuka usaha kecil, seperti warung atau kerajinan tangan, sering kali gagal karena keterbatasan modal dan kurangnya pendampingan. Pada wawancara tanggal 27 Agustus 2025, Bapak Fransiskus (44 tahun, pemuda desa) mengungkapkan: *"Dulu ada program usaha bersama, tapi cepat bubar karena tidak ada pendampingan. Sekarang orang lebih pilih kembali ke kebun dan tunggu bantuan."* Testimoni ini menunjukkan bahwa inisiatif diversifikasi sering berhenti di tengah jalan.

Lebih jauh lagi, rendahnya keterampilan teknis dan keterbatasan akses pelatihan membuat masyarakat tidak mampu mengembangkan usaha yang berkelanjutan. Generasi muda yang tidak melanjutkan sekolah juga tidak memperoleh kesempatan untuk belajar keterampilan baru, seperti perbengkelan, pengolahan ikan, atau keterampilan digital. Akibatnya, mereka tidak memiliki pilihan selain tetap bergantung pada sektor tradisional yang rapuh. Pada wawancara tanggal 28 Agustus 2025, Bapak Yosef (47 tahun, tokoh masyarakat) menjelaskan: *"Anak-anak muda di sini banyak yang menganggur. Mereka tidak punya keterampilan, jadi akhirnya kembali ke kebun. Kalau ada pelatihan, mungkin bisa buka usaha baru."*

Secara analitis, kondisi ini dapat dipahami melalui teori *human capital*, yang menekankan bahwa pendidikan dan keterampilan adalah aset utama untuk meningkatkan produktivitas. Ketika pendidikan rendah dan keterampilan minim, masyarakat kehilangan kesempatan untuk meningkatkan pendapatan atau beralih ke sektor ekonomi yang lebih menjanjikan. Selain itu, dari perspektif *livelihood diversification*, kegagalan

dalam mengembangkan sumber penghidupan alternatif memperdalam kerentanan masyarakat terhadap guncangan eksternal seperti gagal panen atau cuaca buruk.

Kegagalan diversifikasi ekonomi juga berimplikasi pada meningkatnya ketergantungan pada bantuan sosial. Masyarakat lebih memilih menunggu pencairan PKH, BLT, atau BPNT daripada berusaha mencari sumber pendapatan baru. Hal ini menumbuhkan mental ketergantungan dan mengurangi inisiatif untuk berinovasi. Dengan demikian, rendahnya pendidikan dan gagalnya diversifikasi ekonomi menciptakan lingkaran ganda yang memperkuat kemiskinan: keterbatasan pendidikan membatasi peluang diversifikasi, sementara kegagalan diversifikasi memperkuat tekanan ekonomi yang menghalangi pendidikan.

Dengan demikian, rendahnya pendidikan dan gagalnya diversifikasi ekonomi di Desa Wairbleler memperlihatkan bahwa kemiskinan bukan hanya persoalan kurangnya pendapatan, tetapi juga hasil dari terhambatnya pembangunan kapasitas manusia dan kelemahan sistem dukungan ekonomi lokal. Setelah menelaah faktor ini, jelas terlihat bahwa kemiskinan di Wairbleler merupakan hasil interaksi kompleks antara ketergantungan pada sektor tradisional, kelemahan kelembagaan, krisis air bersih, beban adat, dan rendahnya pendidikan.

3.2.4.2.6 Analisis Lintas Kasus Desa Wairbleler

Hasil penelitian di Desa Wairbleler menunjukkan bahwa kemiskinan ekstrem yang dialami masyarakat tidak dapat dipahami hanya dari satu dimensi tunggal. Sebaliknya, kemiskinan di desa ini merupakan hasil interaksi kompleks antara faktor ekonomi, sosial, budaya, kelembagaan, dan lingkungan yang saling memperkuat. Setiap faktor tidak berdiri sendiri, tetapi membentuk jejaring yang membuat keluarga miskin sulit keluar dari jerat kemiskinan. Dengan menelaah kelima faktor utama, terlihat jelas bagaimana kerentanan struktural dan kultural menciptakan lingkaran setan kemiskinan di Wairbleler.

Faktor pertama, ketergantungan negatif pada pertanian subsisten dan nelayan kecil, memperlihatkan bahwa basis penghidupan masyarakat bersifat rapuh. Pertanian lahan kering yang hanya mengandalkan curah hujan membuat hasil panen tidak stabil, sementara perikanan skala kecil

sangat rentan terhadap cuaca buruk dan harga pasar yang tidak menguntungkan. Ketika pendapatan utama bersifat musiman dan tidak pasti, keluarga miskin tidak memiliki cadangan yang cukup untuk menghadapi guncangan kecil sekalipun. Hal ini diperkuat oleh testimoni Markus Laga (50 tahun, petani jagung, wawancara 16 Agustus 2025) yang menyatakan bahwa panen jagung hanya cukup untuk makan beberapa bulan, selebihnya keluarga harus berutang atau mencari pekerjaan lain. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemiskinan di Wairbleler berakar dari struktur ekonomi lokal yang sangat terbatas dalam menciptakan peluang.

Faktor kedua, kelembagaan desa yang lemah dalam pengelolaan bantuan, semakin memperburuk situasi. Meskipun bantuan sosial hadir untuk mengurangi beban masyarakat, distribusinya sering kali tidak tepat sasaran karena kelemahan sistem pendataan. Aparat desa hanya berperan sebagai pengusul, sementara keputusan akhir ditentukan di tingkat kabupaten. Akibatnya, banyak keluarga miskin tidak terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sementara ada keluarga dengan kondisi relatif lebih baik yang tetap menerima bantuan. Ibu Yuliana (37 tahun, wawancara 20 Agustus 2025) menuturkan bahwa ia sering melihat keluarga dengan rumah bagus tetap menerima bantuan, sementara tetangganya yang benar-benar miskin tidak terdaftar. Situasi ini menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kelembagaan desa dan menimbulkan kecemburuan sosial yang berpotensi memicu konflik horizontal.

Faktor ketiga, krisis air bersih dan buruknya kondisi sanitasi, menambah kerentanan ekonomi sekaligus kesehatan masyarakat. Hampir setiap rumah tangga mengeluarkan biaya besar untuk membeli air tangki, sementara kualitas air dari sumur atau sungai sering kali tidak layak konsumsi. Testimoni Ibu Katarina (41 tahun, wawancara 22 Agustus 2025) menunjukkan bahwa biaya air bahkan bisa lebih besar daripada biaya membeli beras. Hal ini memperlihatkan betapa air bersih telah menjadi komoditas mahal bagi keluarga miskin. Selain beban ekonomi, keterbatasan air bersih juga memicu penyakit menular seperti diare dan infeksi kulit, yang menurunkan kualitas hidup masyarakat. Krisis air ini juga menambah beban perempuan, yang harus menempuh jarak jauh untuk mengambil air ketika musim kemarau tiba. Dengan demikian, krisis

air bersih tidak hanya persoalan infrastruktur, tetapi juga berkaitan erat dengan ketidakadilan gender dan kesehatan publik.

Faktor keempat, beban sosial adat yang menguras ekonomi rumah tangga, menciptakan dilema antara mempertahankan kehormatan sosial atau mengutamakan kebutuhan dasar keluarga. Belis dalam pernikahan, sumbangan untuk upacara kematian, maupun pesta adat lainnya menyerap sebagian besar pendapatan keluarga miskin. Testimoni Bapak Kornelis (52 tahun, tokoh adat, wawancara 24 Agustus 2025) memperlihatkan bagaimana keluarga tetap harus menyiapkan sapi atau uang dalam jumlah besar untuk belis meskipun kondisi ekonomi serba terbatas. Fenomena ini sejalan dengan teori *culture of poverty* Oscar Lewis, yang menjelaskan bagaimana norma sosial dapat memperkuat siklus kemiskinan. Solidaritas sosial memang terjaga melalui praktik adat, tetapi dari sisi ekonomi keluarga justru semakin terpuruk.

Faktor kelima, rendahnya pendidikan dan gagalnya diversifikasi ekonomi lokal, memperlihatkan hambatan serius bagi generasi muda untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Banyak anak berhenti sekolah setelah menamatkan SD karena tidak ada biaya transportasi atau seragam. Ibu Melania (39 tahun, wawancara 26 Agustus 2025) menuturkan bahwa anak-anaknya terpaksa berhenti sekolah dan membantu bekerja di kebun karena tidak ada biaya melanjutkan pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan membuat anak-anak tidak memiliki keterampilan untuk memasuki sektor kerja modern, sehingga mereka kembali ke pekerjaan tradisional yang rendah produktivitas. Upaya diversifikasi ekonomi melalui kelompok usaha juga sering gagal karena minim pendampingan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kemiskinan di Wairbleler direproduksi secara struktural dan antargenerasi.

Jika ditinjau secara keseluruhan, kelima faktor ini saling terkait dan memperkuat satu sama lain. Ketergantungan pada sektor subsisten membuat pendapatan tidak stabil, kelembagaan desa yang lemah membuat bantuan tidak efektif, krisis air bersih menambah beban pengeluaran, beban adat menguras sumber daya ekonomi, dan rendahnya pendidikan menghambat mobilitas sosial. Semua faktor ini menjadikan kemiskinan di Wairbleler sebagai fenomena multidimensional yang tidak dapat diatasi hanya dengan intervensi jangka pendek.

Dari perspektif teoretis, kondisi Wairbleler mencerminkan pendekatan *livelihood vulnerability* yang menekankan rapuhnya sumber penghidupan, *institutional weakness* yang memperlihatkan lemahnya tata kelola lokal, serta *capability deprivation* ala Amartya Sen yang menjelaskan terbatasnya pilihan substantif masyarakat untuk hidup lebih baik. Dengan kata lain, masyarakat Wairbleler bukan hanya miskin secara material, tetapi juga miskin dalam kapabilitas, kesempatan, dan akses terhadap sistem kelembagaan yang adil.

Analisis lintas faktor ini memperlihatkan bahwa kemiskinan ekstrem di Desa Wairbleler adalah hasil dari kombinasi faktor struktural dan kultural yang saling mengunci. Intervensi kebijakan yang bersifat sektoral dan top-down jelas tidak cukup, karena masalahnya bukan hanya pada kekurangan sumber daya, tetapi juga pada sistem sosial, adat, dan kelembagaan yang mereproduksi kerentanan. Upaya mengatasi kemiskinan di Wairbleler perlu dilakukan melalui pendekatan multidimensional: memperkuat diversifikasi ekonomi, memperbaiki tata kelola bantuan, menyediakan akses air bersih, mengurangi beban adat melalui dialog budaya, dan meningkatkan akses pendidikan. Hanya dengan langkah terpadu semacam itu, masyarakat Wairbleler dapat memiliki peluang nyata untuk keluar dari jerat kemiskinan ekstrem.

3.2.4.2.7 Analisis Lintas Faktor Kasus Berganda Desil 4: Kemiskinan Menurun / Potensial Berdaya

Kemiskinan di Desa Umauta dan Wairbleler memperlihatkan pola yang serupa sekaligus berbeda. Keduanya berada dalam kategori Desil 4, di mana kemiskinan masih tinggi, namun ada potensi pemberdayaan bila intervensi struktural dilakukan secara konsisten. Umauta memperlihatkan wajah kemiskinan yang sangat rapuh akibat ketergantungan tunggal pada pertanian subsisten, ditambah krisis air, hunian tidak layak, dan rendahnya pendidikan. Sementara itu, Wairbleler menunjukkan kompleksitas kemiskinan yang diperkuat oleh kombinasi pertanian subsisten, perikanan skala kecil, beban adat, kelembagaan desa yang lemah, serta gagalnya diversifikasi ekonomi. Analisis lintas faktor berikut mencoba menguraikan irisan dan perbedaan keduanya

untuk memahami bagaimana kemiskinan menurun namun tetap terperangkap dalam kerentanan multidimensi.

1) Basis Ekonomi Subsisten yang Rapuh

Di Umauta, pertanian lahan kering berbasis jagung dan ubi menjadi tumpuan utama, tanpa adanya diversifikasi usaha. Kondisi ini menempatkan masyarakat dalam kerentanan yang ekstrem, karena kegagalan panen otomatis berarti krisis pangan dan ekonomi. Sementara itu, Wairbleler memiliki basis ganda: pertanian subsisten sekaligus perikanan kecil, namun keduanya sama-sama rapuh. Nelayan kecil di Wairbleler hanya mampu melaut dengan sampan sederhana, sehingga hasil tangkapan terbatas dan bergantung pada cuaca serta harga tengkulak. Dengan demikian, baik Umauta maupun Wairbleler sama-sama menggambarkan livelihood vulnerability, meskipun dengan spektrum berbeda: Umauta monosektor pertanian, Wairbleler kombinasi pertanian dan perikanan tetapi sama-sama subsisten.

2) Krisis Air Bersih sebagai Faktor Pengunci Kemiskinan

Krisis air bersih menjadi benang merah yang menyatukan kedua desa. Di Umauta, keluarga miskin harus mengeluarkan Rp200.000–Rp250.000 setiap dua minggu hanya untuk membeli air tangki, sebuah beban ekonomi yang sangat besar jika dibandingkan dengan penghasilan dari pertanian subsisten. Di Wairbleler, situasinya hampir sama: harga tangki air mahal, sementara sumur dangkal dan sungai yang dipakai sering kali tercemar. Krisis air ini menciptakan infrastructure poverty, di mana ketiadaan infrastruktur dasar menambah kerentanan sosial, kesehatan, dan ekonomi. Yang menarik, di Umauta krisis air lebih terkait dengan pertanian, tidak adanya irigasi menyebabkan stagnasi produktivitas, sementara di Wairbleler krisis air lebih berdampak pada sanitasi dan kesehatan masyarakat.

3) Kondisi Hunian dan Lingkungan Tempat Tinggal

Perbedaan penting terlihat pada dimensi hunian. Umauta digambarkan oleh mayoritas rumah tangga dengan kondisi tidak layak huni: dinding bambu, atap daun kelapa, dan lantai tanah. Hunian ini meningkatkan risiko kesehatan dan menurunkan kualitas hidup anak-anak, terutama dalam hal belajar. Kondisi ini dapat

dikategorikan sebagai housing poverty, di mana kemiskinan dimaknai dari kualitas tempat tinggal. Sebaliknya, di Wairbleler, meskipun hunian masyarakat juga sederhana, faktor yang lebih dominan bukan kualitas rumah, melainkan kelembagaan desa yang lemah dan beban adat yang menguras sumber daya. Artinya, Umauta menghadapi kerentanan struktural pada aspek fisik hunian, sementara Wairbleler menghadapi kerentanan sosial kelembagaan.

4) Pendidikan dan Putus Sekolah

Kedua desa memperlihatkan pola yang sama, yakni rendahnya pendidikan dan tingginya angka putus sekolah. Di Umauta, hambatan biaya transportasi, seragam, dan buku membuat anak-anak berhenti sekolah setelah lulus SD. Fenomena ini mendorong pernikahan dini dan memutus peluang mobilitas sosial. Wairbleler menghadapi persoalan serupa, dengan mayoritas anak berhenti di tingkat SD atau SMP karena biaya tambahan terlalu besar. Perbedaannya, di Umauta keterbatasan pendidikan lebih dipicu oleh kemiskinan ekonomi langsung, sementara di Wairbleler keterbatasan pendidikan diperkuat oleh kegagalan diversifikasi ekonomi lokal. Dengan demikian, keduanya memperlihatkan fenomena capability deprivation (Sen, 1999), di mana keterbatasan kapabilitas substantif membatasi pilihan hidup generasi muda.

5) Kelembagaan dan Tata Kelola Bantuan

Umauta relatif lebih banyak digambarkan dari sisi kerentanan infrastruktur dan ekonomi, sedangkan Wairbleler menonjol dalam kelemahan kelembagaan. Pemerintah desa di Wairbleler tidak memiliki kapasitas untuk menyesuaikan bantuan dengan kondisi lokal, sehingga banyak keluarga miskin tidak terakomodasi dalam DTKS. Selain itu, program pemberdayaan sering gagal karena tidak ada pendampingan berkelanjutan. Fenomena ini memperlihatkan institutional weakness, di mana kelembagaan desa tidak mampu menjalankan fungsi representasi, koordinasi, dan pengawasan. Dalam konteks Umauta, kelembagaan bukan faktor yang paling dominan, tetapi ketidakadaan intervensi struktural (irigasi, rumah layak, air bersih) menunjukkan lemahnya kapasitas negara hadir di tingkat lokal. Dengan demikian, perbedaan utama antara Umauta

dan Wairbleler ada pada locus kerentanannya: Umauta infrastruktur–ekonomi, Wairbleler kelembagaan–sosial.

6) Beban Sosial Adat dan Budaya Konsumtif

Beban adat merupakan faktor yang paling menonjol di Wairbleler. Belis pernikahan, upacara kematian, dan pesta adat rutin membuat keluarga miskin harus menjual hasil panen atau berutang untuk memenuhi kewajiban sosial. Norma adat menjaga kohesi sosial, tetapi secara ekonomi menguras sumber daya rumah tangga. Fenomena ini konsisten dengan konsep culture of poverty (Lewis, 1966), di mana norma budaya yang kuat justru memperkuat siklus kemiskinan. Sementara itu, di Umauta faktor adat tidak ditonjolkan sebagai penyebab utama, melainkan lebih pada keterbatasan fisik dan ekonomi. Dengan kata lain, Wairbleler menghadapi jebakan kultural, sementara Umauta menghadapi jebakan struktural.

7) Potensi Berdaya di Tengah Kemiskinan

Meskipun kedua desa menghadapi kemiskinan multidimensi, potensi pemberdayaan tetap ada. Umauta memiliki peluang jika intervensi diarahkan pada pembangunan irigasi, perbaikan rumah layak huni, dan penguatan akses pendidikan. Potensi ini sejalan dengan gagasan multidimensional poverty reduction, yang menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar sebelum transformasi ekonomi. Di sisi lain, Wairbleler memiliki potensi berdaya jika kelembagaan desa diperkuat dan beban adat dikurangi melalui dialog budaya. Diversifikasi ekonomi dengan dukungan pendampingan dapat membuka peluang bagi generasi muda. Dengan demikian, Desil 4 memperlihatkan kategori "kemiskinan menurun" karena meski kerentanan masih besar, ada potensi pemberdayaan yang dapat membuka jalan keluar dari lingkaran kemiskinan.

Table 101. Ringkasan Desil 4: Kemiskinan Menurun / Potensial Berdaya

Faktor	Umauta	Wairbleler	Analisis Lintas Faktor
Basis Ekonomi	Pertanian subsisten tunggal (jagung/ubi); sangat tergantung hujan; produktivitas rendah.	Pertanian subsisten + nelayan kecil; hasil minim, bergantung cuaca & tengkulak.	Sama-sama rapuh (livelihood vulnerability), Umauta monosektor, Wairbleler ganda tapi sama-sama subsisten.
Air & Sanitasi	Beli air tangki Rp200–250 ribu/2 minggu; tanpa irigasi; kualitas buruk.	Biaya air sama; sumur/sungai tercemar; sanitasi minim.	Infrastructure poverty: air jadi beban ekonomi & kesehatan.
Hunian	Banyak rumah tidak layak (dinding bambu, atap daun, lantai tanah).	Hunian sederhana, tapi faktor dominan bukan rumah melainkan kelembagaan & adat.	Umauta: housing poverty; Wairbleler: masalah sosial–institusional lebih kuat.
Pendidikan	Putus sekolah setelah SD karena biaya transport/seragam; nikah dini.	Putus sekolah SD–SMP; keterampilan minim; kembali ke sektor tradisional.	Sama-sama capability deprivation (Sen, 1999).
Kelembagaan	Lemahnya intervensi struktural (irigasi, rumah layak, air).	Desa lemah: pendataan DTKS salah sasaran, program formalistik, pendampingan minim.	Umauta: lemahnya negara hadir; Wairbleler: kelembagaan lokal gagal.
Budaya/Adat	Tidak dominan; masalah utama struktural.	Beban belis & pesta adat besar; menguras ekonomi keluarga.	Umauta: jebakan struktural; Wairbleler: jebakan kultural.
Diversifikasi	Hampir tidak ada; bergantung pertanian subsisten.	Upaya diversifikasi sering gagal; preferensi menunggu bansos.	Keduanya gagal diversifikasi; Wairbleler butuh pendampingan usaha.
Karakter Kemiskinan	Struktural: rapuh karena infrastruktur dasar & monosektor pertanian.	Kultural-institusional: adat mahal, kelembagaan lemah, ekonomi subsisten.	Sama-sama Desil 4: kemiskinan tinggi, tapi potensial berdaya jika intervensi tepat.

Sumber: Olahan Penulis, 2025

3.2.4.2.8 Analisis Perbandingan Lintas Kasus Berganda (Cross-Multi Case Analysis)

Analisis perbandingan lintas kasus berganda dilakukan untuk memahami dinamika kemiskinan di Kabupaten Sikka yang diteliti di delapan lokasi berbeda, yaitu Kelurahan Wuring, Desa Rubit, Desa Nangahale, Kelurahan Wolomarang, Desa Tanarawa, Kelurahan Madawat, Desa Umauta, dan Desa Wairbleler. Setiap lokasi mewakili desil kemiskinan tertentu, mulai dari desil pertama hingga desil keempat, sehingga memberikan gambaran komprehensif mengenai variasi karakteristik kemiskinan di tingkat rumah tangga dan komunitas. Dengan desain penelitian multi-kasus ini, analisis tidak hanya berhenti pada temuan parsial di masing-masing lokasi, tetapi juga mengaitkan pola umum dan perbedaan antar wilayah.

Pendekatan lintas kasus berguna untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berulang di berbagai konteks serta faktor yang hanya muncul secara spesifik di satu lokasi. Dengan cara ini, peneliti dapat menyingkap struktur mendasar dari kemiskinan yang bersifat multidimensi sekaligus mengapresiasi keragaman pengalaman lokal. Analisis lintas kasus juga memungkinkan evaluasi kritis atas efektivitas kebijakan penanggulangan kemiskinan, karena dapat dibandingkan bagaimana program yang sama berdampak berbeda di lokasi dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang berbeda.

Dalam kerangka analisis ini, faktor-faktor kemiskinan dikategorikan ke dalam lima dimensi utama: sosial-budaya, ekonomi, kebijakan dan kelembagaan, kapabilitas (pendidikan, kesehatan, literasi), serta geografis dan lingkungan. Setiap dimensi kemudian diturunkan ke faktor-faktor yang lebih spesifik, yang selanjutnya dibandingkan antar lokasi penelitian. Dengan pendekatan ini, diharapkan muncul pemahaman yang lebih sistematis mengenai apa yang membentuk kemiskinan di Sikka serta bagaimana strategi keluar dari kemiskinan dapat dirancang dengan lebih kontekstual.

Analisis lintas kasus juga tidak terlepas dari tujuan praktis penelitian, yaitu memberikan masukan kebijakan berbasis bukti bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lain dalam merancang intervensi yang lebih tepat sasaran. Oleh karena itu, selain mengidentifikasi faktor

penghambat, analisis ini juga menyajikan refleksi tentang modal sosial, potensi lokal, serta kapasitas kelembagaan yang dapat diperkuat. Dengan demikian, hasil analisis tidak hanya berfungsi sebagai deskripsi akademik, tetapi juga sebagai dasar normatif bagi desain kebijakan yang lebih adaptif, partisipatif, dan berkelanjutan.

3.2.4.2.9 Dimensi Sosial-Budaya

Dimensi sosial-budaya menjadi fondasi penting dalam menjelaskan wajah kemiskinan di Kabupaten Sikka. Faktor-faktor budaya, tradisi, norma sosial, serta relasi antaraktor dalam komunitas memengaruhi cara rumah tangga miskin merespons program bantuan maupun menyusun strategi bertahan hidup. Hasil penelitian di delapan lokasi memperlihatkan bahwa faktor sosial-budaya berfungsi ganda: di satu sisi dapat menjadi penyangga yang memberikan perlindungan sosial informal, tetapi di sisi lain juga bisa menjadi beban yang memperparah kerentanan ekonomi. Analisis lintas kasus dalam dimensi ini menyingkap empat faktor utama: beban adat dan tradisi, relasi patron-klien, solidaritas sosial dan gotong royong, serta habitus kemiskinan yang bercorak konsumtif.

1) Beban Adat dan Tradisi

Beban adat merupakan salah satu faktor paling signifikan yang membedakan pedalaman agraris dengan kawasan pesisir dan urban di Sikka. Di Desa Rubit dan Tanarawa, praktik pesta adat seperti “sambut baru” menuntut biaya besar, sehingga keluarga miskin rela berutang melalui koperasi mingguan atau menjual hasil pertanian untuk membiayainya. Tekanan sosial membuat masyarakat sulit menghindar, karena ketidakmampuan menyelenggarakan pesta dianggap memalukan dan mengancam kehormatan keluarga. Akibatnya, sumber daya yang seharusnya dapat digunakan untuk pendidikan anak atau kesehatan kerap dialihkan ke pembiayaan ritual adat.

Sebaliknya, di kawasan pesisir seperti Wuring dan Nangahale, beban adat tidak sekuat di pedalaman, tetapi tetap hadir dalam bentuk hajatan keluarga dan perayaan keagamaan. Beban ini memang relatif lebih rendah, namun tidak jarang tetap mengganggu kemampuan rumah tangga miskin dalam menyisihkan dana untuk kebutuhan produktif. Sementara itu, di kawasan urban-periurban seperti

Madawat, beban adat tidak terlalu dominan, tetapi digantikan oleh pengeluaran konsumtif yang berkaitan dengan gaya hidup perkotaan. Dengan demikian, analisis lintas kasus menunjukkan bahwa meskipun bentuknya berbeda, hampir di semua lokasi terdapat mekanisme sosial yang memaksa keluarga miskin mengalihkan sumber daya dari kebutuhan produktif ke konsumsi simbolik.

Perbandingan lintas kasus menegaskan bahwa beban adat paling berat dirasakan oleh komunitas pedalaman agraris. Namun, tekanan sosial untuk mengikuti norma kolektif juga tetap ada di pesisir maupun urban, hanya dalam bentuk yang lebih fleksibel. Temuan ini memperlihatkan bahwa kemiskinan di Sikka tidak dapat dipahami hanya dari sisi pendapatan, tetapi juga dari pola pengeluaran yang dipengaruhi norma budaya. Implikasi kebijakannya adalah perlunya pendekatan pemberdayaan yang tidak mengabaikan dimensi budaya, misalnya dengan mengintegrasikan edukasi literasi keuangan dalam forum-forum adat.

2) Relasi Patron-Klien

Relasi patron-klien muncul sebagai faktor sosial dominan, terutama di kawasan pesisir seperti Wuring dan Nangahale. Struktur sosial nelayan terbagi ke dalam strata: pemilik kapal, penyedia modal (dikenal sebagai “papa lele”), anak buah kapal, hingga buruh angkut. Hubungan ini menciptakan ketergantungan struktural, karena nelayan buruh tidak memiliki akses terhadap aset produksi maupun pasar, dan seluruh aktivitas mereka diatur oleh pemilik kapal. Sistem bagi hasil yang timpang membuat nelayan miskin tetap berada dalam lingkaran kemiskinan meski bekerja keras setiap hari.

Di kawasan pedalaman, relasi patron-klien tidak berbentuk ekonomi maritim, tetapi hadir dalam bentuk politik dan kelembagaan. Kasus di Desa Rubit menunjukkan bahwa penentuan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) sangat dipengaruhi kedekatan dengan aparat desa atau pendamping program. Ketua BUMDes Rubit bahkan menegaskan bahwa keluarga yang memiliki hubungan kekerabatan dengan pendamping lebih diuntungkan, sementara keluarga miskin lain yang seharusnya memenuhi syarat justru tidak terdaftar. Hal ini memperlihatkan adanya dimensi politik lokal yang memengaruhi distribusi bantuan, sehingga kemiskinan tidak hanya

dipertahankan oleh struktur ekonomi, tetapi juga oleh praktik sosial yang tidak adil.

Perbandingan lintas kasus menunjukkan bahwa relasi patron-klien di pesisir bersifat ekonomi, sedangkan di pedalaman lebih bercorak politik. Namun, keduanya menghasilkan pola yang sama, yakni ketergantungan masyarakat miskin pada aktor yang memiliki kuasa atas sumber daya. Hal ini menegaskan bahwa intervensi kebijakan yang hanya berbentuk bantuan material tidak akan cukup tanpa upaya reformasi tata kelola lokal yang mampu membongkar relasi kuasa yang timpang. Dengan kata lain, kebijakan pengentasan kemiskinan harus dilengkapi dengan strategi demokratisasi lokal agar distribusi sumber daya lebih adil.

3) Solidaritas Sosial dan Gotong Royong

Gotong royong sebagai nilai sosial tradisional menunjukkan variasi signifikan antar lokasi penelitian. Di Desa Rubit dan Tanarawa, solidaritas masih relatif kuat karena masyarakat pedalaman memiliki ikatan kekerabatan yang erat. Jika terjadi bencana atau kesulitan, tetangga masih saling membantu secara spontan. Sebaliknya, di Kelurahan Wuring, solidaritas lebih lemah karena masyarakat terdiri atas kelompok relokasi dari latar belakang etnis berbeda. Informan di Wuring menyebut bahwa dalam menghadapi kesulitan, mereka lebih memilih menghubungi keluarga jauh daripada meminta bantuan tetangga, karena merasa malu atau tidak memiliki ikatan kuat.

Di kawasan urban seperti Madawat, gotong royong sudah semakin menipis. Hubungan sosial lebih bercorak transaksional khas perkotaan, di mana dukungan komunitas jarang hadir kecuali dalam acara keagamaan. Analisis lintas kasus memperlihatkan bahwa masuknya bantuan sosial formal justru berkontribusi pada erosi solidaritas. Ketika masyarakat terbiasa mengandalkan negara atau lembaga eksternal, maka rasa kebersamaan tradisional yang sebelumnya menjadi penyangga kemiskinan mulai terkikis. Akibatnya, keluarga miskin yang tidak terdaftar dalam program bantuan kehilangan pula perlindungan sosial dari komunitasnya.

Perbandingan ini menegaskan bahwa solidaritas sosial paling kuat di pedalaman, melemah di pesisir, dan semakin rapuh di urban. Namun pola umum yang muncul adalah menurunnya solidaritas di

semua lokasi seiring dengan dominasi bantuan formal. Implikasi kebijakannya adalah perlunya kebijakan yang tidak sekadar menyalurkan bantuan, tetapi juga memperkuat mekanisme solidaritas lokal, misalnya melalui revitalisasi koperasi berbasis komunitas atau kelompok arisan pendidikan yang menghidupkan kembali nilai gotong royong.

4) Habitus Kemiskinan dan Budaya Konsumtif

Faktor terakhir dalam dimensi sosial-budaya adalah habitus kemiskinan yang bercorak konsumtif. Informan di Wuring mengaku bahwa dana PKH sering kali dipakai untuk kebutuhan pesta atau konsumsi harian, bukan untuk investasi pendidikan atau usaha produktif. Di pedalaman seperti Rubit, hasil pertanian atau tabungan ternak juga kerap dijual untuk membiayai pesta adat. Pola ini memperlihatkan bahwa bantuan dipersepsi sebagai sumber konsumsi sesaat, bukan sebagai peluang untuk transformasi ekonomi keluarga.

Habitus konsumtif ini tidak bisa dilepaskan dari keterbatasan literasi keuangan dan pendidikan yang rendah. Masyarakat miskin tidak terbiasa menyusun perencanaan jangka panjang, sehingga setiap tambahan sumber daya cenderung langsung dihabiskan. Selain itu, tekanan sosial-budaya untuk mengikuti norma kolektif membuat mereka sulit menolak pengeluaran yang sebenarnya tidak produktif. Perbandingan lintas kasus menunjukkan bahwa habitus ini muncul di hampir semua lokasi, hanya dengan variasi bentuk: pesta adat di pedalaman, hajatan keagamaan di pesisir, dan gaya hidup urban di perkotaan.

Fenomena habitus kemiskinan menunjukkan bahwa persoalan kemiskinan tidak dapat diselesaikan hanya dengan menambah jumlah bantuan. Tanpa perubahan perilaku dan penguatan literasi keuangan, bantuan justru berisiko memperkuat pola konsumtif yang kontraproduktif. Oleh karena itu, intervensi kebijakan harus menggabungkan aspek material dengan aspek edukatif, misalnya pelatihan manajemen keuangan keluarga, pemberdayaan berbasis kelompok usaha, dan insentif untuk menabung atau berinvestasi.

Analisis lintas kasus memperlihatkan bahwa dimensi sosial-budaya merupakan determinan utama kemiskinan di Kabupaten Sikka. Beban adat menyedot sumber daya produktif, relasi patron-

klien memperkuat ketergantungan, solidaritas sosial melemah akibat dominasi bantuan formal, dan habitus konsumtif menghambat transformasi ekonomi. Meskipun variasi antar lokasi cukup jelas, pedalaman lebih terbebani adat, pesisir lebih kuat dalam relasi patron-klien, dan urban lebih dominan konsumtif, pola umumnya adalah bahwa faktor sosial-budaya memperlemah kapasitas keluarga miskin untuk keluar dari lingkaran kemiskinan.

Kesimpulan dari dimensi ini adalah bahwa kebijakan penanggulangan kemiskinan di Sikka perlu bergerak melampaui pendekatan material semata. Program harus dirancang dengan memperhatikan aspek budaya dan sosial yang melekat, serta diarahkan untuk memperkuat modal sosial komunitas. Tanpa itu, bantuan apa pun berisiko hanya menjadi konsumsi sesaat dan bahkan memperdalam ketergantungan. Dengan demikian, dimensi sosial-budaya harus diposisikan sebagai faktor strategis dalam desain kebijakan pengentasan kemiskinan di tingkat lokal.

3.2.4.2.10 Dimensi Ekonomi

Dimensi ekonomi menjadi salah satu fondasi utama dalam memahami kerentanan dan kompleksitas kemiskinan di Kabupaten Sikka. Berbagai kasus lapangan memperlihatkan bahwa keterbatasan akses terhadap lapangan kerja formal, ketergantungan pada sektor tradisional yang subsisten, serta lemahnya diversifikasi ekonomi membuat rumah tangga miskin terjebak dalam siklus ketidakpastian pendapatan. Selain itu, fenomena jeratan utang (debt trap) melalui koperasi harian atau pinjaman berbunga tinggi menambah beban struktural yang sulit diatasi oleh keluarga miskin. Analisis lintas kasus ini menguraikan beberapa faktor utama dalam dimensi ekonomi, meliputi pola mata pencaharian, diversifikasi ekonomi, fluktuasi pendapatan, jeratan utang, serta keterbatasan akses pasar dan investasi lokal.

1) Pola Mata Pencaharian

Hampir seluruh lokasi penelitian menunjukkan bahwa masyarakat miskin menggantungkan hidup pada pekerjaan yang bersifat informal, subsisten, dan berisiko tinggi. Di kawasan pesisir seperti Wuring, Wolomarang, dan Nangahale, mayoritas kepala keluarga bekerja sebagai nelayan buruh atau buruh angkut hasil laut.

Mereka tidak memiliki aset produktif seperti kapal atau jaring, sehingga sepenuhnya bergantung pada pemilik kapal. Sistem bagi hasil yang tidak menguntungkan membuat pendapatan nelayan buruh selalu berada pada tingkat subsistensi, bahkan sering tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar harian.

Sementara itu, di kawasan pedalaman seperti Rubit, Umauta, Tanarawa, dan Wairbleler, mata pencaharian utama adalah bertani lahan kering dengan komoditas jagung, ubi, dan kemiri. Hasil panen sangat bergantung pada kondisi iklim dan ketersediaan air, sehingga rentan terhadap gagal panen akibat kekeringan maupun abu vulkanik. Produktivitas pertanian yang rendah diperparah dengan keterbatasan teknologi dan sarana irigasi, sehingga hasil pertanian hanya cukup untuk konsumsi rumah tangga, jarang yang bisa dijual untuk menambah penghasilan. Di kawasan urban-periurban seperti Madawat, mata pencaharian masyarakat miskin lebih beragam, mulai dari buruh bangunan, pedagang kecil, hingga pengemudi ojek. Namun, semua pekerjaan ini sama-sama tidak memiliki kepastian dan jaminan sosial, sehingga menempatkan rumah tangga pada kondisi rentan.

Pola lintas kasus menunjukkan bahwa pesisir cenderung bergantung pada patronase ekonomi juragan, pedalaman bergantung pada alam dan hasil tani subsisten, sedangkan urban bergantung pada ekonomi informal perkotaan. Ketiganya sama-sama memperlihatkan keterbatasan akses terhadap pekerjaan formal yang stabil, sehingga masyarakat miskin tetap berada dalam kondisi rapuh.

2) Diversifikasi Ekonomi yang Lemah

Diversifikasi ekonomi merupakan salah satu strategi penting untuk mengurangi risiko kerentanan, namun temuan lapangan memperlihatkan bahwa diversifikasi hampir tidak terjadi di sebagian besar lokasi. Di Wairbleler memang terdapat upaya pengembangan UMKM lokal, namun pengelolaannya masih lemah sehingga banyak usaha yang tidak bertahan lama. Di pedalaman, masyarakat cenderung hanya mengandalkan pertanian monokultur tanpa ada alternatif usaha lain. Misalnya, di Tanarawa, upaya program “Tanam Jagung Panen Sapi” dinilai tidak efektif karena hasil pertanian sangat minim dan tidak berkelanjutan.

Di kawasan pesisir, meskipun ada potensi diversifikasi melalui usaha pengolahan ikan atau perdagangan hasil laut, kenyataannya sebagian besar nelayan hanya bekerja sebagai buruh dan tidak memiliki akses modal untuk mengembangkan usaha sendiri. Bahkan di Wuring, beberapa perempuan penerima bantuan mencoba membuka usaha kecil seperti menjual kue, tetapi keuntungan usaha yang diperoleh terlalu kecil dan segera habis untuk menutup kebutuhan harian. Di kawasan urban, diversifikasi ekonomi sebenarnya lebih memungkinkan, namun keterampilan rendah dan keterbatasan modal membuat sebagian besar rumah tangga miskin tetap bertahan pada usaha informal yang homogen.

Analisis lintas kasus memperlihatkan bahwa lemahnya diversifikasi ekonomi bersumber dari minimnya akses modal, rendahnya literasi kewirausahaan, dan absennya dukungan kelembagaan yang berkelanjutan. Dengan kata lain, masyarakat miskin terjebak dalam mata pencaharian tunggal yang berisiko, tanpa ada strategi alternatif untuk mengurangi kerentanan.

3) Fluktuasi Pendapatan

Salah satu ciri khas ekonomi rumah tangga miskin di Sikka adalah pendapatan yang fluktuatif. Bagi nelayan di Wuring dan Nangahale, pendapatan sangat bergantung pada musim. Ketika angin barat datang dan nelayan tidak bisa melaut, mereka tidak memiliki penghasilan sama sekali. Pada situasi ini, keluarga terpaksa mengandalkan pinjaman dari juragan atau koperasi harian. Di pedalaman seperti Rubit dan Umauta, fluktuasi pendapatan terjadi karena hasil panen yang tidak menentu. Musim kekeringan atau gangguan alam lain dapat menurunkan produksi secara drastis, sehingga keluarga tidak memiliki sumber pendapatan tambahan selain berutang.

Di kawasan urban seperti Madawat, fluktuasi pendapatan terjadi karena sifat pekerjaan informal yang bergantung pada permintaan harian. Seorang buruh bangunan atau pengemudi ojek bisa mendapat penghasilan lebih di hari tertentu, namun tidak memiliki jaminan pendapatan pada hari lainnya. Kondisi ini membuat rumah tangga miskin sulit merencanakan keuangan jangka panjang. Hampir semua informan menyatakan bahwa pendapatan yang mereka peroleh hanya

cukup untuk kebutuhan harian, tanpa ada sisa untuk ditabung atau diinvestasikan.

Fluktuasi pendapatan lintas kasus ini menegaskan bahwa stabilitas ekonomi rumah tangga miskin di Sikka berada pada titik rawan. Ketidakpastian penghasilan ini membuat keluarga selalu berada dalam posisi rentan terhadap guncangan kecil sekalipun, seperti sakit, gagal panen, atau kenaikan harga bahan pokok.

4) Jeratan Utang (Debt Trap)

Jeratan utang menjadi salah satu faktor ekonomi paling serius yang menjerat rumah tangga miskin. Di hampir semua lokasi, masyarakat terbiasa mengandalkan pinjaman dari koperasi harian atau mingguan dengan bunga yang sangat tinggi, mencapai 100% per bulan. Di Tanarawa, misalnya, informan menceritakan bagaimana mereka berutang untuk membiayai sekolah anak atau kebutuhan darurat, namun justru semakin terperangkap karena bunga pinjaman yang mencekik. Di Wuring, nelayan buruh juga terikat pada utang juragan, sehingga hasil tangkapan tidak pernah benar-benar menjadi milik mereka.

Di pedalaman, masyarakat meminjam ke koperasi atau tengkulak ketika mengalami gagal panen. Pinjaman ini sering kali dilunasi dengan menjual hasil panen di masa depan dengan harga yang lebih rendah, sehingga kerugian semakin besar. Jeratan utang bukan hanya melemahkan ekonomi rumah tangga, tetapi juga memperkuat relasi patron-klien karena membuat masyarakat semakin bergantung pada pemilik modal. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kemiskinan di Sikka bukan hanya persoalan pendapatan rendah, tetapi juga struktur ekonomi yang tidak adil dan eksploitatif.

Perbandingan lintas kasus menunjukkan bahwa debt trap lebih dominan di pedalaman dan pesisir, sementara di kawasan urban lebih sering berupa pinjaman konsumtif untuk kebutuhan sehari-hari. Namun, pola umumnya tetap sama, yaitu utang menjadi mekanisme bertahan hidup yang justru memperdalam kemiskinan.

5) Keterbatasan Akses Pasar dan Investasi Lokal

Keterbatasan akses pasar juga menjadi faktor penting yang memperlemah ekonomi rumah tangga miskin. Di pedalaman seperti Tanarawa, hasil pertanian sulit dijual karena tidak ada pasar

representatif maupun industri lokal yang menyerap produk mereka. Akibatnya, petani bergantung pada tengkulak dengan harga jual yang sangat rendah. Di Wairbleler, meskipun ada upaya mengembangkan BUMDes untuk menampung hasil pertanian, kelemahan manajemen membuat lembaga ini tidak berfungsi optimal.

Di kawasan pesisir, nelayan hanya menjual hasil tangkapan melalui juragan atau pedagang perantara, sehingga posisi tawar mereka sangat lemah. Di urban seperti Madawat, akses pasar relatif lebih terbuka, tetapi keterampilan dan modal yang terbatas membuat masyarakat miskin tidak mampu memanfaatkan peluang ekonomi perkotaan. Lintas kasus ini menunjukkan bahwa akses pasar yang lemah memperkuat ketidakadilan ekonomi, di mana masyarakat miskin selalu berada di posisi subordinat dalam rantai distribusi.

Analisis lintas kasus memperlihatkan bahwa kemiskinan di Sikka pada dasarnya berakar pada kerentanan ekonomi struktural. Pola mata pencaharian subsisten, lemahnya diversifikasi ekonomi, fluktuasi pendapatan, jeratan utang, dan terbatasnya akses pasar membentuk lingkaran setan yang sulit diputus. Perbedaan konteks antar lokasi memang terlihat jelas: pesisir bergantung pada patronase nelayan, pedalaman bergantung pada pertanian lahan kering, dan urban bergantung pada pekerjaan informal. Namun, semua lokasi berbagi ciri yang sama, yaitu ketidakpastian penghasilan dan lemahnya kemandirian ekonomi.

Implikasi kebijakan dari temuan ini adalah perlunya intervensi yang tidak hanya bersifat kuratif, tetapi juga transformasional. Pemerintah daerah perlu memperkuat program diversifikasi ekonomi berbasis potensi lokal, memperbaiki akses pasar melalui BUMDes yang profesional, serta menyediakan skema keuangan inklusif untuk memutus jeratan utang. Tanpa langkah-langkah ini, masyarakat miskin di Sikka akan tetap terjebak dalam siklus ekonomi rapuh yang membuat mereka sulit naik kelas ke desil yang lebih tinggi.

3.2.4.2.11 Dimensi Kebijakan dan Kelembagaan

Dimensi kebijakan dan kelembagaan memainkan peran yang sangat menentukan dalam memahami mengapa kemiskinan di Kabupaten Sikka cenderung stagnan meskipun berbagai program intervensi telah

dilaksanakan selama bertahun-tahun. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa sebagian besar program pengentasan kemiskinan masih dirancang secara top-down, homogen, dan kurang memperhatikan konteks lokal. Selain itu, kelemahan pada kelembagaan pendukung, baik di level desa (BUMDes, koperasi) maupun kelembagaan informal (modal sosial dan institusi adat), turut memperburuk efektivitas kebijakan. Analisis lintas kasus menunjukkan adanya pola kesamaan sekaligus perbedaan antar lokasi dalam bagaimana kebijakan dijalankan dan lembaga lokal berfungsi.

1) Desain Kebijakan yang *Top-Down* dan Homogen

Hampir semua lokasi penelitian menegaskan bahwa desain kebijakan penanggulangan kemiskinan bersifat top-down dan seragam. Program nasional seperti PKH, BPNT, dan BLT ditentukan oleh kementerian dengan indikator teknis yang kaku, seperti daya listrik rumah tangga atau jenis bangunan tempat tinggal. Akibatnya, banyak keluarga miskin yang sebenarnya layak menerima bantuan justru dikeluarkan dari daftar penerima hanya karena memiliki meteran listrik lebih dari 900 kWh atau tinggal di rumah semi permanen. Kasus ini nyata di Tanarawa, ketika satu rumah tangga dikeluarkan dari daftar PKH setelah meningkatkan daya listrik demi mendukung usaha meubel kecilnya.

Di sisi lain, homogenitas kebijakan membuat program tidak relevan dengan kebutuhan lokal. Misalnya, bantuan beras 10 kilogram per bulan dinilai tidak cukup oleh hampir semua informan, karena jumlah tersebut hanya bertahan beberapa hari. Program yang seragam ini tidak mempertimbangkan variasi jumlah anggota keluarga, kondisi geografis, maupun sumber penghidupan utama rumah tangga. Analisis lintas kasus memperlihatkan bahwa homogenitas kebijakan menimbulkan ketidakadilan baru, di mana keluarga dengan kebutuhan lebih besar justru mendapatkan perlakuan yang sama dengan keluarga kecil.

2) Error Inklusi dan Eksklusi

Fenomena error inklusi-eksklusi ditemukan di hampir semua lokasi. Error eksklusi terjadi ketika keluarga miskin tidak menerima bantuan meskipun memenuhi kriteria, sedangkan error inklusi terjadi ketika keluarga lebih mampu justru mendapat bantuan. Di Wuring,

sejumlah keluarga miskin seperti Elizabeth Diaz dan Maria Rosana Peni tidak pernah menerima bantuan meski hidup dalam kondisi serba kekurangan. Sebaliknya, ada keluarga yang memiliki aset usaha, bahkan mobil, justru tercatat sebagai penerima.

Error distribusi ini sebagian besar dipengaruhi oleh kelemahan sistem data. Pendataan dilakukan oleh BPS dan diverifikasi oleh pendamping, tetapi sering kali tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan. Di Madawat, proses pendaftaran bahkan bergantung pada siapa yang datang sendiri ke kelurahan dengan membawa KTP dan kartu keluarga. Warga yang tidak datang dianggap tidak membutuhkan bantuan, meskipun sebenarnya hidup dalam kondisi miskin. Pola lintas kasus menunjukkan bahwa error distribusi bersifat sistemik dan mencerminkan lemahnya integrasi data serta lemahnya fungsi verifikasi di tingkat lokal.

3) Lemahnya Kelembagaan Lokal

Kelembagaan lokal seperti BUMDes dan koperasi diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi desa, tetapi kenyataannya justru lemah dan tidak berfungsi produktif. Di banyak lokasi, BUMDes hanya menjalankan usaha sewa kursi, tenda, atau aktivitas kecil lain yang tidak berdampak signifikan pada pengentasan kemiskinan. Koperasi harian dan mingguan memang hadir, tetapi lebih sering menjadi sumber jeratan utang dengan bunga tinggi ketimbang menjadi lembaga simpan pinjam yang memberdayakan masyarakat.

Di sisi lain, kelembagaan informal seperti modal sosial dan institusi adat juga mengalami degradasi. Gotong royong yang dulu berfungsi sebagai jaring pengaman sosial semakin melemah sejak hadirnya bantuan formal. Hal ini membuat masyarakat miskin semakin tergantung pada negara sekaligus kehilangan mekanisme solidaritas tradisional. Analisis lintas kasus menegaskan bahwa kelemahan kelembagaan tidak hanya menyangkut aspek formal, tetapi juga aspek sosial-kultural yang melekat pada komunitas.

4) Partisipasi Semu dan Policy Alienation

Temuan lintas kasus menunjukkan bahwa masyarakat jarang terlibat secara bermakna dalam perumusan maupun pelaksanaan kebijakan. Partisipasi biasanya hanya terbatas pada tahap musyawarah desa untuk validasi data penerima bantuan, bukan pada

tahap desain program. Bahkan, banyak informan menyebut bahwa musyawarah hanya bersifat formalitas, karena keputusan akhir tetap ditentukan oleh pemerintah pusat atau kementerian. Fenomena ini dikenal sebagai *policy alienation*, yakni keterasingan masyarakat terhadap kebijakan yang seharusnya ditujukan untuk mereka.

Kondisi ini menciptakan jarak antara pemerintah dan masyarakat miskin. Warga merasa bahwa bantuan hanya datang dari atas tanpa memperhatikan aspirasi mereka. Di Desa Rubit, misalnya, sejumlah warga menilai PKH tidak tepat sasaran karena pendamping lebih banyak memasukkan keluarga dekatnya, sementara keluarga miskin lain terabaikan. Hal ini mencerminkan bahwa partisipasi yang ada bukanlah partisipasi substantif, melainkan partisipasi semu yang hanya memperkuat legitimasi kebijakan tanpa mengubah substansinya.

5) Lemahnya Mekanisme Monitoring dan Evaluasi

Kelemahan lain yang menonjol dalam dimensi kebijakan adalah lemahnya mekanisme monitoring dan evaluasi (monev). Hampir semua informan menyatakan bahwa evaluasi program jarang dilakukan, kecuali ada tim riset dari lembaga tertentu. Pemerintah desa hanya melaksanakan program sesuai juknis, tanpa memiliki kewenangan maupun kapasitas untuk menilai apakah program tersebut efektif. Di tingkat kabupaten, monev hanya dilakukan pada program-program pemerintah daerah, sementara program kementerian jarang dievaluasi secara lokal.

Ketiadaan mekanisme monev yang kuat berimplikasi pada berulangnya kesalahan yang sama dari tahun ke tahun. Misalnya, bantuan pangan yang tidak sesuai kebutuhan terus dijalankan meskipun masyarakat menilai kurang bermanfaat. Begitu pula dengan error inklusi-eksklusi yang terus terjadi tanpa ada perbaikan sistemik. Lintas kasus memperlihatkan bahwa lemahnya monev membuat kebijakan kemiskinan bersifat rutin dan tidak adaptif.

6) Keterbatasan Integrasi Program dan Koordinasi Antar Lembaga

Program penanggulangan kemiskinan di Sikka juga menghadapi masalah integrasi antar sektor. Informan menyebut bahwa program sering kali bersifat tumpang tindih (*overlapping*) dan tidak terkoordinasi dengan baik. Pemerintah desa hanya melaksanakan

program dari pusat tanpa memiliki ruang untuk mengintegrasikan dengan program lain di tingkat lokal. Akibatnya, ada keluarga yang menerima berbagai jenis bantuan secara bersamaan, sementara keluarga lain tidak menerima apa pun.

Di tingkat kabupaten, koordinasi relatif lebih baik, tetapi terbatas pada upaya penyatuan data. Namun, kelemahan mendasar tetap ada, yaitu belum adanya kerangka kerja terpadu yang menghubungkan pemerintah pusat, daerah, dan desa dalam satu desain program yang konsisten. Hal ini menciptakan fragmentasi kebijakan yang membuat dampak intervensi tidak maksimal. Analisis lintas kasus menegaskan bahwa kurangnya integrasi dan koordinasi antar lembaga menjadi salah satu faktor kunci yang memperlemah efektivitas kebijakan.

Analisis lintas kasus memperlihatkan bahwa dimensi kebijakan dan kelembagaan merupakan akar dari banyak persoalan kemiskinan di Sikka. Desain kebijakan yang *top-down* dan homogen menciptakan ketidakadilan baru, error inklusi-eksklusi mencerminkan kelemahan sistem data, kelembagaan lokal yang lemah gagal menjadi motor penggerak, partisipasi semu memperlemah legitimasi kebijakan, mekanisme monev yang minim membuat kesalahan berulang, dan integrasi program yang buruk menghasilkan fragmentasi intervensi. Semua faktor ini menunjukkan bahwa masalah kemiskinan bukan hanya soal keterbatasan ekonomi rumah tangga, tetapi juga soal tata kelola kebijakan yang tidak responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat.

Perbedaan antar lokasi memperlihatkan variasi dalam bentuk persoalan: di pesisir, kebijakan gagal membongkar relasi patron-klien nelayan; di pedalaman, kebijakan tidak mampu menjawab kebutuhan pertanian subsisten; di urban, kebijakan tidak menyediakan akses pada pekerjaan formal. Namun, benang merah dari semua kasus adalah bahwa kelemahan desain dan kelembagaan membuat intervensi kebijakan hanya bersifat kuratif, sementara kebutuhan pemberdayaan jangka panjang justru terabaikan. Oleh karena itu, reformasi kebijakan dan penguatan kelembagaan harus menjadi agenda utama dalam strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sikka.

3.2.4.2.12 Dimensi Kapabilitas (Pendidikan, Kesehatan, dan Literasi)

Dimensi kapabilitas berangkat dari gagasan Amartya Sen bahwa kemiskinan bukan hanya sekadar kekurangan pendapatan, tetapi lebih dalam merupakan keterbatasan pada kebebasan substantif untuk hidup sesuai dengan pilihan yang bernilai. Dalam konteks Kabupaten Sikka, kapabilitas masyarakat miskin tercermin dari akses yang terbatas terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan kemampuan literasi (khususnya literasi keuangan). Hasil penelitian lapangan memperlihatkan bahwa meskipun berbagai program bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) telah menyentuh banyak rumah tangga, hal tersebut belum cukup untuk mengubah kapabilitas mereka secara fundamental.

Kapabilitas yang rendah membuat masyarakat miskin sulit meningkatkan kualitas hidup secara berkelanjutan. Pendidikan yang terbatas menutup akses ke pekerjaan formal, layanan kesehatan yang minim memperburuk kualitas sumber daya manusia, dan rendahnya literasi keuangan membuat bantuan yang diterima lebih banyak dipakai untuk konsumsi sesaat daripada investasi produktif. Analisis lintas kasus dalam dimensi ini menguraikan empat faktor penting: keterbatasan pendidikan, akses kesehatan yang timpang, literasi keuangan yang rendah, serta aspirasi dan kepercayaan diri menghadapi masa depan.

1) Rendahnya Pendidikan sebagai Kapabilitas Dasar

Pendidikan merupakan salah satu jalur utama keluar dari kemiskinan, namun temuan lintas kasus menunjukkan bahwa akses pendidikan di Sikka masih sangat terbatas. Di hampir semua lokasi, bantuan PKH memang membantu membiayai sekolah anak-anak, mulai dari SD hingga SMA. Bahkan di beberapa desa, PKH berhasil membantu anak-anak melanjutkan ke perguruan tinggi melalui beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP). Namun, ketika program PKH dihentikan, banyak anak terpaksa berhenti sekolah karena biaya tidak lagi terpenuhi.

Kasus di Tanarawa menunjukkan paradoks kebijakan pendidikan. Seorang anak yang berhasil masuk perguruan tinggi justru kehilangan hak atas KIP karena sempat berhenti dua tahun

setelah lulus SMA. Sistem administrasi yang kaku mengabaikan kondisi riil keluarga miskin yang kesulitan biaya, sehingga akhirnya anak tersebut tidak dapat melanjutkan kuliah. Di sisi lain, di Madawat, banyak anak yang hanya tamat SMP atau SMA karena orang tua tidak memiliki dana untuk pendidikan tinggi, meskipun secara aspirasi mereka ingin anaknya bekerja di sektor formal.

Analisis lintas kasus memperlihatkan bahwa keterbatasan pendidikan bukan hanya soal biaya, tetapi juga soal sistem kebijakan yang kaku dan tidak adaptif terhadap kondisi masyarakat miskin. Pendidikan memang menjadi prioritas keluarga, tetapi tanpa dukungan konsisten, banyak anak miskin yang akhirnya kembali terjebak pada pekerjaan informal yang sama dengan orang tuanya.

2) Ketimpangan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan

Kesehatan juga menjadi kapabilitas penting yang menentukan kualitas hidup masyarakat miskin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tangga miskin memang terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, namun banyak yang tidak aktif digunakan. Di Tanarawa, misalnya, beberapa keluarga mengaku tidak memanfaatkan BPJS karena jarak fasilitas kesehatan terlalu jauh atau karena tidak memahami prosedur administrasinya.

Di wilayah pesisir seperti Wuring, masalah kesehatan yang menonjol adalah gizi buruk dan stunting pada anak-anak. Bantuan pangan memang ada, tetapi tidak cukup untuk mengubah pola konsumsi keluarga. Banyak rumah tangga hanya mampu membeli makanan pokok, tanpa variasi gizi yang memadai. Di pedalaman seperti Umauta, persoalan sanitasi masih menjadi kendala besar. Kekurangan jamban sehat dan keterbatasan air bersih membuat penyakit berbasis lingkungan tetap tinggi. Hal ini memperlihatkan bahwa kemiskinan di Sikka tidak hanya berkaitan dengan pendapatan, tetapi juga dengan deprivasi kesehatan yang bersifat struktural.

Lintas kasus menunjukkan bahwa akses layanan kesehatan relatif tersedia, tetapi kualitas dan pemanfaatannya masih rendah. Hal ini menyebabkan rumah tangga miskin tetap berada dalam kondisi rapuh: setiap kali ada anggota keluarga yang sakit serius, mereka terpaksa menjual aset kecil atau berutang untuk biaya pengobatan. Dengan demikian, kapabilitas kesehatan yang rendah menjadi salah

satu penghalang utama bagi masyarakat miskin untuk keluar dari lingkaran kemiskinan.

3) Rendahnya Literasi Keuangan dan Pengelolaan Bantuan

Literasi keuangan merupakan faktor lain dalam dimensi kapabilitas yang sangat menentukan. Banyak keluarga miskin menerima bantuan tunai atau pangan, namun tidak mampu mengelola bantuan tersebut secara produktif. Di Wuring, seorang informan, Siti Suhaiba, menceritakan bagaimana ia menyisihkan sebagian bantuan tunai untuk modal berjualan kue. Usaha ini sempat berjalan, menghasilkan keuntungan Rp20.000–Rp30.000 per hari, tetapi keuntungan tersebut segera habis untuk membayar listrik, air, dan kebutuhan konsumtif lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada potensi produktif, keterbatasan literasi keuangan membuat usaha sulit berkembang.

Di pedalaman, fenomena serupa juga terlihat. Banyak keluarga menggunakan dana PKH untuk kebutuhan konsumtif atau pesta adat, bukan untuk pendidikan atau investasi produktif. Bahkan ada kecenderungan bahwa bantuan dijadikan sebagai “talangan” untuk membiayai pesta, sehingga tujuan awal bantuan justru melenceng. Di kawasan urban seperti Madawat, bantuan tunai juga lebih sering dipakai untuk konsumsi harian. Hampir tidak ada kebiasaan menabung atau merencanakan pengeluaran jangka panjang.

Perbandingan lintas kasus memperlihatkan bahwa rendahnya literasi keuangan bukan hanya masalah individu, tetapi juga struktural. Program bantuan tidak disertai dengan edukasi tentang bagaimana mengelola dana secara bijak. Akibatnya, bantuan yang seharusnya bisa menjadi katalis pemberdayaan hanya berfungsi sebagai instrumen bertahan hidup sesaat.

4) Aspirasi, Kepercayaan Diri, dan Harapan Masa Depan

Kapabilitas juga berkaitan dengan aspirasi sosial dan rasa percaya diri menghadapi masa depan. Temuan lapangan menunjukkan adanya ambivalensi dalam hal ini. Di satu sisi, banyak keluarga masih memiliki aspirasi tinggi untuk menyekolahkan anak-anaknya agar mendapatkan pekerjaan formal. Mereka berharap anak-anak bisa keluar dari lingkaran kemiskinan dan hidup lebih baik daripada orang tua mereka. Namun, di sisi lain, rasa percaya diri

masyarakat miskin cenderung melemah seiring dengan dominasi bantuan pemerintah.

Di Rubit, beberapa informan menyebut bahwa bantuan membuat mereka “terbiasa menunggu” dan merasa kurang percaya diri untuk berinisiatif sendiri. Di Wuring, masyarakat lebih memilih mencari bantuan daripada mengandalkan solidaritas keluarga atau tetangga, karena merasa pemerintah akan selalu hadir. Hal ini menimbulkan fenomena ketergantungan psikologis yang mengikis aspirasi dan motivasi untuk mandiri.

Lintas kasus memperlihatkan bahwa aspirasi memang tetap ada, tetapi kepercayaan diri semakin rapuh. Bantuan yang seharusnya memperkuat kemampuan justru memperlemah rasa percaya diri karena menumbuhkan ketergantungan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemiskinan tidak hanya soal keterbatasan material, tetapi juga keterbatasan psikologis dan sosial yang mempersempit ruang pilihan masyarakat.

Analisis lintas kasus dalam dimensi kapabilitas menunjukkan bahwa kemiskinan di Kabupaten Sikka sangat erat kaitannya dengan keterbatasan dalam pendidikan, kesehatan, literasi keuangan, serta aspirasi dan kepercayaan diri. Pendidikan memang menjadi prioritas, tetapi sistem kebijakan yang kaku membuat banyak anak miskin tetap putus sekolah. Layanan kesehatan tersedia, tetapi kualitas dan pemanfaatannya rendah, sehingga rumah tangga tetap rapuh ketika menghadapi risiko sakit. Bantuan tunai diterima, tetapi literasi keuangan rendah membuatnya habis untuk konsumsi sesaat. Aspirasi ada, tetapi ketergantungan pada bantuan melemahkan rasa percaya diri untuk berinisiatif.

Perbandingan antar lokasi menunjukkan variasi: di pedalaman, keterbatasan pendidikan dan sanitasi menjadi masalah utama; di pesisir, gizi buruk dan rendahnya literasi keuangan menonjol; di urban, keterbatasan aspirasi dan ketergantungan lebih kuat. Namun, benang merahnya adalah bahwa kemiskinan di Sikka merupakan kemiskinan kapabilitas, bukan sekadar kemiskinan pendapatan. Implikasi kebijakannya adalah perlunya pendekatan yang menggabungkan intervensi material dengan penguatan kapabilitas, seperti pelatihan keterampilan, peningkatan kualitas layanan dasar, serta program

literasi yang menumbuhkan kemandirian. Tanpa itu, kemiskinan akan terus direproduksi lintas generasi.

3.2.4.2.13 Dimensi Geografis dan Lingkungan

Dimensi geografis dan lingkungan menjadi faktor penting yang membentuk kerentanan dan pola kemiskinan di Kabupaten Sikka. Letak wilayah yang terdiri dari pesisir, pedalaman agraris, serta kawasan urban-periurban menghasilkan variasi tantangan yang berbeda bagi rumah tangga miskin. Di pesisir, ketergantungan pada laut membuat nelayan sangat rentan terhadap cuaca ekstrem, musim angin, dan dinamika harga ikan. Di pedalaman, keterbatasan irigasi, kekeringan, serta kondisi tanah yang miskin nutrisi membatasi produktivitas pertanian. Sementara di kawasan urban, meskipun infrastruktur relatif lebih baik, jebakan kemiskinan perkotaan tetap terjadi karena keterbatasan akses ke pekerjaan formal dan biaya hidup yang tinggi.

Hasil penelitian di delapan lokasi memperlihatkan bahwa faktor geografis dan lingkungan bukan hanya memengaruhi sumber penghidupan, tetapi juga akses terhadap layanan dasar dan distribusi program pemerintah. Dengan demikian, analisis lintas kasus pada dimensi ini mengungkap empat faktor utama: kerentanan pesisir, keterbatasan agraris di pedalaman, jebakan kemiskinan perkotaan, serta ketidakmerataan distribusi program akibat kondisi geografis.

1) Kerentanan Pesisir

Di wilayah pesisir seperti Wuring, Wolomarang, dan Nangahale, kemiskinan sangat erat kaitannya dengan ketergantungan pada laut. Nelayan buruh bergantung sepenuhnya pada cuaca dan musim. Ketika angin barat datang, mereka tidak bisa melaut selama berminggu-minggu, sehingga tidak memiliki penghasilan sama sekali. Pada situasi ini, satu-satunya cara bertahan adalah dengan berutang kepada juragan atau koperasi harian. Dengan demikian, kondisi geografis pesisir memperkuat struktur ketergantungan dan jeratan utang.

Selain itu, perubahan iklim memperparah kerentanan pesisir. Penurunan stok ikan akibat overfishing dan kerusakan ekosistem laut membuat hasil tangkapan semakin menurun. Informan menyebut bahwa meskipun melaut, hasilnya sering kali tidak sebanding dengan

biaya yang dikeluarkan. Kondisi ini membuat rumah tangga nelayan tidak memiliki jaminan ekonomi yang stabil. Analisis lintas kasus memperlihatkan bahwa geografi pesisir menciptakan kemiskinan ekologis, di mana kerentanan terhadap lingkungan langsung diterjemahkan menjadi kerentanan ekonomi dan sosial.

2) Keterbatasan Agraris di Pedalaman

Di pedalaman seperti Rubit, Umauta, Tanarawa, dan Wairbleler, kemiskinan erat kaitannya dengan kondisi agraris yang terbatas. Pertanian lahan kering menjadi mata pencaharian utama, tetapi hasilnya sangat minim karena keterbatasan irigasi. Gagal panen sering terjadi akibat kekeringan maupun abu vulkanik dari aktivitas gunung berapi. Informan menyebut bahwa hasil panen jagung dan kemiri hanya cukup untuk konsumsi keluarga, jarang sekali ada surplus untuk dijual.

Keterbatasan agraris juga diperparah oleh tidak adanya pasar lokal yang representatif. Produk pertanian sering dijual ke tengkulak dengan harga rendah, sehingga keuntungan petani semakin kecil. Program pemerintah seperti bantuan bibit atau pupuk memang ada, tetapi tidak selalu sesuai kebutuhan. Misalnya, program “Tanam Jagung Panen Sapi” dianggap tidak efektif karena kondisi lahan tidak mendukung. Lintas kasus memperlihatkan bahwa geografi pedalaman menghasilkan kemiskinan struktural, di mana keterbatasan sumber daya alam dan infrastruktur menghalangi peningkatan produktivitas pertanian.

3) Jebakan Kemiskinan Perkotaan

Di kawasan urban-periurban seperti Madawat, tantangan geografis berbeda dari pesisir dan pedalaman. Infrastruktur jalan, air bersih, dan listrik relatif lebih baik, tetapi masyarakat miskin justru menghadapi jebakan kemiskinan perkotaan. Pekerjaan informal seperti buruh bangunan, pedagang kecil, dan pengemudi ojek mendominasi, tetapi tidak memberikan jaminan pendapatan yang stabil. Biaya hidup yang tinggi di perkotaan membuat bantuan pemerintah tidak pernah cukup untuk menutupi kebutuhan dasar.

Selain itu, masyarakat miskin di kawasan urban sering kali tidak memiliki aset tanah maupun rumah yang layak. Mereka tinggal di permukiman padat yang rentan terhadap bencana kebakaran maupun

banjir. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemiskinan urban bersifat multidimensi, di mana meskipun akses infrastruktur lebih baik, masyarakat tetap terjebak dalam siklus pendapatan rendah, biaya hidup tinggi, dan minimnya akses ke pekerjaan formal. Analisis lintas kasus memperlihatkan bahwa urbanisasi tidak otomatis menjadi jalan keluar dari kemiskinan, melainkan dapat menciptakan bentuk baru dari kerentanan.

4) Ketidakmerataan Distribusi Program akibat Geografi

Faktor geografis juga memengaruhi bagaimana program pemerintah didistribusikan. Di pedalaman, akses jalan yang terbatas membuat beberapa desa sulit dijangkau, meskipun sebagian besar informan menyebut jalan utama antar desa sudah beraspal. Namun, program pemberdayaan seperti bantuan ternak atau kelompok usaha sering kali hanya menjangkau desa yang lebih mudah diakses. Akibatnya, keluarga miskin yang tinggal di wilayah terpencil cenderung tidak terjangkau oleh program pemberdayaan, meskipun mereka sangat membutuhkannya.

Di pesisir, distribusi bantuan memang menjangkau hampir semua wilayah, tetapi tidak memperhitungkan kondisi sosial ekonomi riil penerima. Misalnya, jumlah bantuan pangan yang seragam tidak sesuai dengan variasi jumlah anggota keluarga. Di urban, distribusi program lebih merata, tetapi sering menimbulkan error inklusi-eksklusi karena pendataan bergantung pada siapa yang aktif mendaftarkan diri ke kelurahan. Dengan demikian, geografi bukan hanya faktor alamiah, tetapi juga faktor administratif yang memengaruhi bagaimana program dilaksanakan.

Analisis lintas kasus memperlihatkan bahwa faktor geografis dan lingkungan memperkuat kerentanan kemiskinan di Sikka. Pesisir menghadapi kerentanan ekologis yang membuat nelayan bergantung pada cuaca dan patronase juragan. Pedalaman menghadapi keterbatasan agraris yang membuat pertanian tetap subsisten dan tidak produktif. Urban menghadapi jebakan kemiskinan perkotaan yang membuat masyarakat miskin sulit naik kelas meskipun infrastruktur tersedia. Semua ini diperparah oleh distribusi program yang tidak merata dan kurang memperhatikan kondisi geografis riil masyarakat.

Implikasi kebijakan dari temuan ini adalah perlunya desain program yang adaptif terhadap geografi. Di pesisir, diperlukan kebijakan yang memperkuat ekonomi maritim dan akses permodalan nelayan. Di pedalaman, dibutuhkan intervensi irigasi dan pengembangan pasar lokal. Di urban, perlu ada program peningkatan keterampilan kerja untuk mengakses pekerjaan formal. Dengan cara ini, kebijakan pengentasan kemiskinan dapat lebih kontekstual dan efektif.

3.2.4.2.14 Analisis Lintas Dimensi dan Kasus (Cross-Cases and Dimensions Analysis)

Kemiskinan di Kabupaten Sikka tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai kekurangan pendapatan atau ketiadaan akses terhadap bantuan sosial. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari sebuah sistem kompleks yang bekerja lintas dimensi, mencakup aspek sosial-budaya, ekonomi, kebijakan dan kelembagaan, kapabilitas manusia, serta geografis-lingkungan. Setiap dimensi tidak berdiri sendiri, melainkan saling terkait, membentuk sebuah jaringan sebab-akibat yang menjebak masyarakat miskin dalam lingkaran tak berujung. Untuk mengurai kerumitan ini, analisis pohon masalah menjadi pendekatan yang paling relevan.

3.2.4.2.15 Analisis Berbasis Pendekatan Pohon Masalah

Pendekatan pohon masalah memungkinkan kita memetakan persoalan kemiskinan dari akar penyebab hingga daun konsekuensi, melalui batang mekanisme dan ranting manifestasi. Akar menggambarkan faktor-faktor struktural dan kultural yang menumbuhkan kemiskinan; batang menjelaskan mekanisme yang menyalurkan dampak akar; ranting memperlihatkan gejala sehari-hari yang dialami rumah tangga; sementara daun melambangkan konsekuensi akhir berupa kemiskinan ekstrem dan reproduksi lintas generasi. Dengan kerangka ini, analisis tidak lagi bersifat deskriptif, melainkan menjelaskan logika kausalitas yang menghubungkan faktor-faktor lintas dimensi.

Dalam konteks Sikka, lima dimensi utama kemiskinan yang telah dianalisis sebelumnya akan diposisikan dalam struktur pohon masalah. Dimensi sosial-budaya, geografis-lingkungan, dan kebijakan ditempatkan sebagai akar masalah. Dimensi ekonomi dan kapabilitas dipahami

sebagai batang yang mengalirkan pengaruh akar ke kehidupan nyata. Ranting muncul dalam bentuk kerentanan harian rumah tangga, sedangkan daun menggambarkan konsekuensi jangka panjang pada masyarakat dan daerah. Dengan kerangka ini, kita dapat melihat bahwa kemiskinan di Sikka bukanlah kebetulan, melainkan hasil interaksi sistemik yang mempertahankan status quo.

1) Akar Masalah: Fondasi Struktural dan Kultural

Akar masalah kemiskinan di Sikka terletak pada tiga ranah utama: sosial-budaya, geografis-lingkungan, dan kelemahan kebijakan. Pertama, faktor sosial-budaya menciptakan cultural trap yang membatasi pilihan keluarga miskin bahkan sebelum mereka berhadapan dengan faktor ekonomi. Tradisi adat seperti pesta “sambut baru” menuntut pengeluaran besar yang memaksa keluarga berutang atau menjual hasil panen. Relasi patron-klien di pesisir menjerat nelayan dalam ketergantungan struktural pada juragan. Habitus konsumtif menambah beban karena dana bantuan lebih sering dipakai untuk konsumsi sesaat ketimbang investasi produktif. Semua ini adalah akar kultural yang mereproduksi kemiskinan lintas generasi.

Kedua, faktor geografis-lingkungan menjadi natural constraints yang menentukan batasan awal kehidupan masyarakat. Pesisir menghadapi ketidakpastian cuaca dan menurunnya stok ikan, pedalaman menghadapi kekeringan dan tanah tandus, sementara urban menghadapi biaya hidup tinggi dan kompetisi ketat dalam pasar kerja informal. Faktor geografis ini tidak dapat diubah dengan cepat, tetapi membentuk kondisi dasar yang mempersempit ruang gerak masyarakat miskin. Dengan demikian, geografi bukan sekadar latar, melainkan penentu struktural yang terus mengulang siklus kerentanan.

Ketiga, kelemahan kebijakan dan kelembagaan memperlihatkan adanya *policy failure* yang melanggengkan kemiskinan. Kebijakan yang seragam dan *top-down* tidak sesuai dengan konteks lokal. Error inklusi-eksklusi membuat keluarga miskin terabaikan, sementara keluarga lebih mampu justru menerima bantuan. BUMDes yang diharapkan menjadi motor ekonomi desa hanya berfungsi sebagai penyewa kursi atau tenda. Koperasi mingguan menjadi sumber

jeratan utang, bukan pemberdayaan. Semua ini menunjukkan bahwa kelembagaan formal maupun informal sama-sama lemah, sehingga kebijakan tidak mampu mengubah akar masalah.

Dengan demikian, akar masalah kemiskinan di Sikka adalah kombinasi antara budaya yang membebani, geografi yang membatasi, dan kebijakan yang gagal. Akar ini menancap dalam dan menyalurkan pengaruhnya ke batang mekanisme ekonomi dan kapabilitas.

2) Batang Masalah: Mekanisme Ekonomi dan Kapabilitas

Batang masalah adalah jalur kausal yang menghubungkan akar dengan ranting. Dalam konteks Sikka, batang terdiri atas dimensi ekonomi dan kapabilitas. Keduanya menjadi mekanisme yang menyalurkan dampak akar ke kehidupan nyata rumah tangga miskin.

Dimensi ekonomi menjadi batang utama karena ia paling nyata memengaruhi keberlangsungan hidup harian. Fluktuasi pendapatan nelayan akibat musim laut, keterbatasan hasil panen di pedalaman, dan ketidakpastian pekerjaan informal di urban adalah mekanisme yang lahir dari akar masalah. Relasi patron-klien (akar sosial-budaya) diterjemahkan ke dalam sistem bagi hasil timpang (ekonomi). Kekeringan (akar geografis) berubah menjadi gagal panen dan pendapatan tak menentu (ekonomi). Error kebijakan (akar kelembagaan) menghasilkan distribusi bantuan yang salah sasaran (ekonomi). Semua jalur ini menegaskan bahwa ekonomi adalah batang yang mengalirkan pengaruh akar ke kerentanan sehari-hari.

Dimensi kapabilitas menjadi batang sekunder yang menentukan kemampuan transformasi. Pendidikan yang terbatas membuat anak-anak miskin tidak mampu mengakses pekerjaan formal, sehingga tetap terjebak dalam lingkaran pekerjaan informal. Layanan kesehatan yang minim memperburuk produktivitas dan memperbesar biaya hidup ketika sakit. Literasi keuangan yang rendah membuat bantuan tunai tidak dimanfaatkan untuk investasi produktif. Kapabilitas seharusnya menjadi transformative mediator, yakni jembatan untuk mengubah bantuan menjadi peningkatan kualitas hidup. Namun, karena terlalu lemah, kapabilitas justru gagal menjalankan fungsi transformasionalnya.

Interaksi ekonomi dan kapabilitas menciptakan mediasi ganda yang memperkuat siklus kemiskinan. Pendapatan rendah membuat keluarga tidak mampu membiayai pendidikan atau kesehatan, sementara rendahnya pendidikan membuat keluarga tetap terjebak pada pekerjaan informal berupah rendah. Dengan kata lain, ekonomi memperlemah kapabilitas, dan kapabilitas yang rendah memperlemah ekonomi. Batang ini membentuk lingkaran yang sulit diputus tanpa intervensi serius.

3) Ranting Masalah: Manifestasi dalam Kehidupan Sehari-Hari

Ranting masalah adalah wujud konkret dari batang, berupa kerentanan yang dialami rumah tangga miskin dalam kehidupan sehari-hari. Ranting pertama adalah pendapatan harian yang tidak stabil. Nelayan buruh, petani lahan kering, dan buruh informal sama-sama tidak memiliki jaminan penghasilan tetap. Hal ini membuat keluarga tidak bisa menabung atau merencanakan kebutuhan jangka panjang.

Ranting kedua adalah ketergantungan pada utang dan bantuan. Di pesisir dan pedalaman, keluarga terbiasa berutang ke koperasi mingguan dengan bunga tinggi. Di urban, bantuan tunai menjadi penopang utama, tetapi sekaligus menciptakan mentalitas menunggu. Ranting ini memperlihatkan bahwa masyarakat miskin menggunakan strategi bertahan hidup jangka pendek, tetapi strategi ini justru memperdalam lingkaran kemiskinan.

Ranting ketiga adalah pengeluaran konsumtif dan beban sosial. Dana bantuan maupun hasil panen lebih sering dipakai untuk pesta adat, hajatan keluarga, atau konsumsi harian. Keputusan ini bukan semata kesalahan individu, melainkan hasil dari tekanan sosial dan budaya. Namun, dampaknya sama: tidak ada akumulasi modal produktif.

Ranting keempat adalah putus sekolah dan stunting. Banyak anak miskin tidak bisa melanjutkan sekolah setelah bantuan dihentikan. Masalah gizi buruk dan sanitasi rendah memperparah kondisi. Akibatnya, kualitas sumber daya manusia tetap rendah, dan generasi berikutnya pun mewarisi kerentanan yang sama.

Dengan demikian, ranting masalah adalah wajah sehari-hari dari kemiskinan di Sikka: penghasilan tidak stabil, utang menumpuk,

pengeluaran konsumtif, anak putus sekolah, dan stunting. Semua ranting ini tumbuh dari batang ekonomi dan kapabilitas yang lemah.

4) Daun Masalah: Konsekuensi Akhir

Daun masalah adalah konsekuensi akhir dari akar, batang, dan ranting. Di Kabupaten Sikka, daun masalah muncul dalam empat bentuk utama. Pertama, kemiskinan ekstrem yang bertahan lama. Rumah tangga miskin tetap berada di desil terbawah tanpa ada mobilitas sosial ke atas. Kedua, reproduksi kemiskinan lintas generasi. Anak-anak yang putus sekolah kembali menjadi nelayan buruh, petani subsisten, atau buruh informal, sehingga lingkaran kemiskinan terus berulang.

Ketiga, ketergantungan struktural pada negara. Program bantuan yang seharusnya bersifat sementara justru menciptakan mentalitas menunggu. Masyarakat semakin jarang mengandalkan solidaritas lokal, karena yakin negara akan selalu hadir. Keempat, daya saing daerah yang rendah. Akumulasi kemiskinan rumah tangga menghasilkan sumber daya manusia yang lemah, produktivitas rendah, dan ketertinggalan daerah dalam kompetisi regional maupun nasional.

Daun masalah ini adalah wajah paling kasat mata dari kemiskinan di Sikka. Namun, ia hanya dapat dipahami dengan menelusuri akar, batang, dan ranting yang menopangnya. Tanpa mengatasi akar dan batang, daun masalah akan terus tumbuh kembali meskipun dipangkas melalui bantuan jangka pendek.

Table 102. Pohon Masalah Kemiskinan Kabupaten Sikka

Posisi Pohon Masalah	Dimensi	Faktor Kunci	Uraian
Akar Masalah (*Root Causes/Determinants*)	Sosial-Budaya	• Beban adat dan pesta ("sambut baru") • Relasi patron–klien (juragan–nelayan) • Habitus konsumtif	Norma sosial dan budaya menekan rumah tangga miskin untuk mengalihkan sumber daya ke konsumsi simbolik dan pesta. Relasi patron–klien mengekalkan ketergantungan nelayan pada pemilik modal, sementara habitus konsumtif melemahkan potensi akumulasi modal produktif.
	Geografis-Lingkungan	• Musim laut dan angin barat • Kekeringan, keterbatasan irigasi, tanah tandus • Biaya hidup urban tinggi	Faktor geografis menciptakan keterbatasan alamiah: nelayan tak bisa melaut saat musim angin, petani menghadapi gagal panen akibat kekeringan, sementara masyarakat urban menanggung biaya hidup tinggi dengan akses kerja terbatas.
	Kebijakan & Kelembagaan	• Desain kebijakan top-down dan homogen • Error inklusi–eksklusi • Lemahnya BUMDes/koperasi	Kebijakan tidak adaptif dengan konteks lokal, data penerima bantuan bias, sementara kelembagaan lokal gagal berfungsi sebagai motor pemberdayaan.
Batang Masalah (*Mediating Mechanisms*)	Ekonomi	• Fluktuasi pendapatan nelayan/petani/buruh informal • Jeratan utang koperasi mingguan • Lemah diversifikasi usaha	Akar masalah diterjemahkan dalam bentuk ekonomi subsisten: pendapatan tidak stabil, jeratan utang mencekik, dan minim diversifikasi membuat keluarga tetap rentan.
	Kapabilitas	• Pendidikan rendah • Layanan kesehatan minim • Literasi keuangan rendah	Kapabilitas seharusnya menjadi jembatan keluar dari kemiskinan, tetapi pendidikan terbatas, kesehatan buruk, dan literasi rendah membuat bantuan hanya habis untuk konsumsi sesaat.

Ranting Masalah (*Manifestations*)	Multidimensi	• Pendapatan harian tidak stabil • Ketergantungan pada utang & bantuan • Pengeluaran konsumtif & beban sosial adat • Putus sekolah & stunting	Gejala nyata dalam kehidupan sehari-hari: rumah tangga miskin tidak mampu menabung, berutang untuk bertahan hidup, lebih banyak mengeluarkan dana untuk konsumsi simbolik, serta kehilangan kualitas sumber daya manusia melalui putus sekolah dan stunting.
Daun Masalah (*Consequences/Outcomes*)	Konsekuensi	• Kemiskinan ekstrem yang bertahan lama • Reproduksi kemiskinan lintas generasi • Ketergantungan struktural pada negara • Daya saing daerah rendah	Wajah akhir kemiskinan di Sikka: rumah tangga tetap berada di desil terbawah, anak-anak miskin kembali masuk ke pekerjaan informal, ketergantungan pada bantuan negara semakin kuat, dan daya saing daerah melemah di level regional maupun nasional.

Sumber: Olahan Penulis, 2025

3.2.4.2.16 Analisis Posisi Variabel dalam Pohon Masalah

1) Variabel Penyebab (*Root Causes as Determinants*)

Variabel penyebab dapat dipahami sebagai akar masalah yang menjadi sumber utama dari rantai persoalan kemiskinan. Dalam konteks Kabupaten Sikka, akar ini terutama berakar pada tiga dimensi, yakni sosial-budaya, geografis-lingkungan, serta kebijakan dan kelembagaan. Ketiga dimensi ini bersifat struktural, sulit diubah dalam jangka pendek, tetapi memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam membentuk kerentanan. Karena sifatnya yang mengakar, ia menjadi titik awal yang harus diperhatikan dalam analisis maupun dalam desain kebijakan intervensi.

Budaya adat yang menuntut pesta besar, relasi patron-klien yang timpang, dan habitus konsumtif membentuk suatu *cultural trap* yang memerangkap rumah tangga miskin dalam siklus pengeluaran tidak produktif. Di sisi lain, faktor geografis, seperti musim laut di pesisir, kekeringan di pedalaman, dan biaya hidup tinggi di kawasan urban, menciptakan *natural constraints* yang membatasi pilihan ekonomi masyarakat. Kebijakan yang seragam, data penerima bantuan yang bias, serta kelembagaan lokal yang lemah melahirkan *policy failure* yang menambah lapisan kerentanan baru. Dengan demikian, ketiga determinan ini saling berkelindan, menancap kuat sebagai akar penyebab yang menyalurkan dampaknya melalui mekanisme ekonomi dan kapabilitas.

2) Variabel Mediasi (Mediators as Causal Pathways)

Variabel mediasi berfungsi sebagai jalur kausal yang menghubungkan akar masalah dengan konsekuensi nyata. Dalam kasus Sikka, ekonomi dan kapabilitas berperan sebagai mediator utama. Ekonomi menjadi saluran langsung yang menerjemahkan keterbatasan sosial-budaya, geografis, maupun kebijakan ke dalam bentuk kerentanan finansial. Sementara itu, kapabilitas berperan sebagai jembatan transformasional yang menentukan sejauh mana keluarga miskin mampu mengubah sumber daya yang tersedia menjadi peningkatan kualitas hidup.

Dimensi ekonomi, misalnya, menjelaskan bagaimana beban adat atau keterbatasan geografis berubah menjadi pendapatan tidak

stabil, jeratan utang, dan lemahnya diversifikasi usaha. Kapabilitas, di sisi lain, memperlihatkan bagaimana kebijakan yang tidak adaptif maupun kondisi ekonomi yang rapuh bermuara pada keterbatasan pendidikan, kesehatan, dan literasi keuangan. Contoh konkret dapat dilihat pada kasus error distribusi PKH: ia tidak langsung menimbulkan putus sekolah, tetapi bekerja melalui jalur ekonomi (orang tua kehilangan dukungan biaya) dan jalur kapabilitas (anak tidak mampu melanjutkan pendidikan). Dengan demikian, ekonomi dan kapabilitas berfungsi sebagai jalur penting yang membuat akar masalah termanifestasi dalam kehidupan sehari-hari sebagai kemiskinan nyata.

3) Variabel Moderator (Moderators as Conditioners)

Moderator adalah faktor yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara penyebab dan akibat. Dalam konteks Sikka, moderator yang menonjol mencakup solidaritas sosial, jaringan patron-klien, serta desain intervensi program. Kehadiran moderator ini menjelaskan mengapa dampak dari akar masalah tidak selalu seragam di semua lokasi, melainkan bervariasi sesuai konteks lokal dan kapasitas komunitas.

Solidaritas sosial, misalnya, dapat memperlemah dampak negatif dari pendapatan rendah. Di Rubit dan Tanarawa, gotong royong masih relatif kuat, sehingga keluarga miskin yang menghadapi kesulitan tetap mendapat bantuan dari tetangga. Sebaliknya, di Wuring, lemahnya solidaritas membuat keluarga miskin tidak memiliki penopang selain utang, sehingga dampak rendahnya pendapatan menjadi lebih parah. Jaringan patron-klien justru memperkuat ketergantungan, karena meskipun nelayan mendapat bantuan, relasi subordinatif dengan juragan tetap menghalangi kemandirian. Desain intervensi program pun berfungsi sebagai moderator: ketika program adaptif dan kontekstual, dampak akar masalah dapat dikurangi, tetapi jika program seragam dan top-down, maka dampaknya justru diperkuat.

4) Variabel Konsekuen (Consequences as Outcomes)

Variabel konsekuen adalah hasil akhir dari interaksi akar, mediator, dan moderator. Dalam kerangka pohon masalah, konsekuensi ini digambarkan sebagai “daun masalah” yang tampak di

permukaan, tetapi sesungguhnya berakar pada struktur yang lebih dalam. Di Sikka, konsekuensi utama dapat dirumuskan dalam empat bentuk: kemiskinan ekstrem yang bertahan lama, reproduksi kemiskinan lintas generasi, ketergantungan struktural pada negara, serta rendahnya daya saing daerah.

Kemiskinan ekstrem yang bertahan lama tampak dalam fakta bahwa rumah tangga miskin tetap berada di desil terbawah selama bertahun-tahun tanpa mobilitas ke atas. Reproduksi lintas generasi muncul ketika anak-anak dari keluarga miskin tetap menjadi pekerja informal, mengulang nasib orang tuanya. Ketergantungan pada negara memperlihatkan perubahan mentalitas dari solidaritas komunitas menjadi mentalitas menunggu bantuan. Sementara itu, rendahnya daya saing daerah mencerminkan konsekuensi kolektif, di mana akumulasi kemiskinan rumah tangga melemahkan potensi pembangunan dan memperlebar kesenjangan dengan daerah lain.

Analisis lintas dimensi menunjukkan bahwa tidak ada satu pun variabel yang bekerja secara terisolasi. Setiap faktor saling terkait, membentuk mata rantai sebab–akibat yang kompleks. Misalnya, dimensi geografis sebagai akar masalah membatasi produktivitas pertanian di pedalaman. Keterbatasan ini kemudian dimediasi oleh ekonomi melalui pendapatan yang tidak stabil, diperkuat oleh faktor sosial-budaya seperti tuntutan pesta adat, dan pada akhirnya termanifestasi dalam konsekuensi berupa putus sekolah karena anak tidak lagi mampu melanjutkan pendidikan.

Hubungan antar dimensi juga bersifat siklikal, di mana konsekuensi yang terjadi dapat kembali memperkuat akar masalah. Rendahnya kapabilitas, seperti pendidikan, membuat masyarakat miskin sulit mengakses informasi atau memperjuangkan hak mereka dalam proses verifikasi data bantuan sosial. Kondisi ini kemudian memperkuat kelemahan kebijakan karena data yang digunakan tetap bias terhadap keluarga dengan pendidikan rendah. Siklus ini menciptakan *feedback loop* yang berulang, sehingga upaya pemutusan kemiskinan menjadi semakin sulit dilakukan tanpa intervensi struktural yang signifikan.

Selain bersifat siklikal, hubungan antar dimensi juga memperlihatkan karakter komplementer. Faktor sosial-budaya dan

geografis kerap bekerja bersama-sama memperkuat kerentanan. Di pedalaman, kekeringan sebagai faktor geografis mengurangi hasil panen, sementara pesta adat sebagai faktor sosial-budaya tetap harus dijalankan, sehingga keluarga miskin jatuh dalam jeratan utang. Dengan demikian, kerentanan tidak hanya bersumber dari satu dimensi, melainkan dari interaksi antar dimensi yang saling menambah bobot permasalahan.

Hubungan antar dimensi ini menegaskan pentingnya analisis holistik. Setiap intervensi yang hanya menyasar satu dimensi tanpa mempertimbangkan kaitannya dengan dimensi lain akan menghasilkan solusi parsial. Misalnya, peningkatan bantuan pangan tanpa memperbaiki literasi keuangan hanya akan memperkuat pola konsumtif. Demikian pula, perbaikan layanan pendidikan tanpa mengatasi tekanan ekonomi harian tidak akan menurunkan angka putus sekolah. Dengan memahami keterkaitan antar dimensi, intervensi dapat dirancang lebih efektif, menyasar akar sekaligus memutus rantai mekanisme yang menjembatani akar dengan konsekuensi.

Lebih lanjut, temuan pada perspektif kapabilitas ini memperkuat argumen Amartya Sen bahwa kemiskinan pada dasarnya adalah keterbatasan kapabilitas. Bantuan tunai memang meningkatkan daya beli sesaat, tetapi tidak mengubah pilihan substantif masyarakat ketika pendidikan, kesehatan, dan literasi tetap rendah. Kapabilitas yang lemah membuat masyarakat miskin tidak mampu memanfaatkan sumber daya untuk memperluas kesempatan hidup mereka. Kasus di Sikka menunjukkan bahwa tanpa penguatan kapabilitas, intervensi berbasis konsumsi justru memperkuat siklus ketergantungan pada negara.

Selanjutnya, relasi patron–klien, terutama di wilayah pesisir, memberikan ilustrasi nyata tentang bagaimana kekuasaan ekonomi menciptakan ketergantungan struktural. Juragan sebagai pemilik modal menguasai akses terhadap aset dan pasar, sementara nelayan buruh hanya menikmati bagian kecil dari hasil kerja keras mereka. Bahkan ketika program intervensi hadir, relasi ini tetap bertahan karena akar budaya dan kelemahan kelembagaan tidak disentuh. Teori patron–klien membantu menjelaskan mengapa kerentanan

ekonomi di pesisir tetap rapuh, meskipun program pemberdayaan sudah dijalankan.

Lebih jauh lagianalisis lintas kasus juga menegaskan relevansi kerangka *Multidimensional Poverty Index* (MPI). Kemiskinan di Sikka tidak dapat dijelaskan hanya melalui indikator pendapatan. Faktor pendidikan, kesehatan, akses air bersih, dan sanitasi memiliki bobot yang sama pentingnya. Masyarakat miskin bisa tetap miskin meskipun menerima bantuan tunai, karena dimensi lain tidak berubah. Dengan demikian, MPI memberikan kerangka konseptual yang lebih utuh untuk memahami kemiskinan sebagai fenomena multidimensi.

Table 103. Ringkasan Analisis Posisi Variabel dalam Pohon Masalah Kemiskinan Kabupaten Sikka

Posisi Variabel dalam Pohon Masalah	Dimensi Utama	Faktor Kunci	Peran Kausal
Akar Masalah (*Root Causes / Determinants*)	Sosial-Budaya	Beban adat & pesta ("sambut baru"); relasi patron–klien; habitus konsumtif	Membentuk *cultural trap* yang menguras sumber daya rumah tangga miskin dan memperkuat ketergantungan struktural.
	Geografis–Lingkungan	Musim laut/angin barat; kekeringan & tanah tandus; biaya hidup urban tinggi	Menjadi *natural constraints* yang membatasi produktivitas, menciptakan ketidakpastian ekonomi.
	Kebijakan & Kelembagaan	Desain top-down, error inklusi–eksklusi, kelemahan BUMDes/koperasi	Menghasilkan *policy failure* sehingga intervensi tidak efektif dan berulang-ulang.
Batang Masalah (*Mediators / Causal Pathways*)	Ekonomi	Pendapatan harian tidak stabil; jeratan utang koperasi mingguan; lemahnya diversifikasi usaha	Menjadi jalur utama yang menerjemahkan akar masalah menjadi kerentanan finansial sehari-hari.
	Kapabilitas	Pendidikan rendah; akses kesehatan terbatas; literasi keuangan rendah	Menjadi mediator transformasional, tetapi lemah sehingga gagal mengubah bantuan menjadi perubahan nyata.
Moderator (*Conditioners*)	Sosial & Program	Solidaritas sosial; jaringan patron–klien; desain intervensi program	Dapat memperkuat atau memperlemah dampak akar terhadap konsekuensi: solidaritas yang kuat mengurangi kerentanan, patron-klien & program homogen justru memperburuknya.
Konsekuen (*Consequences / Outcomes*)	Multidimensi	Kemiskinan ekstrem berkepanjangan; reproduksi lintas generasi; ketergantungan pada negara; rendahnya daya saing daerah	Menjadi "daun masalah" yang tampak di permukaan, merupakan hasil akhir interaksi akar, mediator, dan moderator.

Sumber: Olahan Penulis, 2025

3.3 Pembahasan Teoritis

Temuan lintas kasus di Sikka memperlihatkan dengan gamblang bahwa kemiskinan bukan sekadar ketiadaan pendapatan, melainkan keterbatasan yang berlapis pada ruang pilih dan kualitas hidup. Pendekatan kapabilitas Amartya Sen relevan untuk membaca pola tersebut: sekalipun rumah tangga memperoleh transfer tunai atau bantuan pangan, rendahnya pendidikan, akses kesehatan yang timpang, serta literasi keuangan yang terbatas membuat mereka tidak mampu mengonversi bantuan menjadi peningkatan *functionings* yang bernilai, seperti melanjutkan sekolah atau membangun usaha kecil.

Dalam literatur mutakhir, *Multidimensional Poverty Index* menegaskan bahwa kemiskinan terjadi ketika rumah tangga "terdeprivasi setidaknya sepertiga indikator berbobot" dalam dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup (Alkire et al., 2023, p. 2). Dengan kerangka Sen yang diperluas dalam pengukuran MPI, yang miskin bukan hanya dompet, melainkan juga kebebasan substantif untuk menjalani hidup yang dipandang berharga; di Sikka, kebebasan itu tersumbat oleh kombinasi faktor sosial-budaya (beban adat, patron-klien), ekonomi (pendapatan fluktuatif, jeratan utang), serta geografi-lingkungan (iklim pesisir, lahan kering pedalaman).

Dengan demikian, keberhasilan jangka pendek dalam mengurangi kesenjangan konsumsi belum serta-merta beralih menjadi kapabilitas jangka panjang, karena prasyarat konversi: pengetahuan, kesehatan, literasi, dan institusi yang adil, masih lemah. Sejalan dengan itu, laporan MPI terbaru menekankan bahwa pengukuran multidimensi "melengkapi indikator moneter" dan memandu kebijakan lintas sektor (Alkire & OPHI, 2022, p. 3).

Berangkat dari Chambers, gambaran *deprivation trap* juga tampak kuat dalam data lapangan: kemiskinan, kelemahan fisik (stunting, gizi buruk), kerentanan (pendapatan tak pasti), keterasingan (akses pasar buruk di pedalaman), dan ketidakberdayaan (posisi tawar lemah dalam patron-klien) saling menyokong. Ringkasan revisi atas lima dimensi kemiskinan Chambers dalam kajian mutakhir menegaskan bahwa perangkap deprivasi merupakan "konstelasi saling menguatkan antara kekurangan, kerentanan, dan ketidakberdayaan" (Jayasinghe, 2023, p. 2). Ketika rumah tangga menghadapi biaya sosial adat dan keharusan konsumsi simbolik, cadangan produktif menguap, sehingga kerentanan terhadap guncangan kecil, sakit, gagal panen, cuaca buruk, menjadi tinggi. Di pesisir, siklus ini diperparah oleh pola

penguasaan aset dan informasi oleh juragan; di pedalaman, oleh irigasi dan kesuburan lahan yang terbatas; di urban, oleh biaya hidup dan kompetisi kerja informal. Konstruksi multidimensi ini menggarisbawahi pentingnya membaca kemiskinan sebagai jaringan sebab-akibat, bukan daftar faktor yang berdiri sendiri.

Keterkaitan Sen dan Chambers memberi pijakan normatif sekaligus operasional. Secara normatif, fokus kebijakan mesti diarahkan pada perluasan kapabilitas, bukan sekadar mempertebal konsumsi sesaat. Secara operasional, perangkap deprivasi perlu diputus di beberapa simpul sekaligus: akses layanan dasar, perbaikan posisi tawar, dan pemulihan solidaritas lokal, agar konversi sumber daya menjadi *functionings* lebih mungkin terjadi. Literatur pengukuran baru menegaskan urgensi itu: “indikator multidimensi dirancang untuk aksi kebijakan yang terarah” (Alkire & OPHI, 2022, p. 4). Analisis lintas kasus yang menyoroti variasi pedalaman–pesisir–urban memperkaya dua teori tersebut, sebab ia menunjukkan bagaimana konfigurasi faktor lokal mengubah intensitas dan bentuk deprivasi di setiap konteks. Dengan kata lain, sama-sama multidimensi, tetapi jalur kausalnya spesifik konteks, dan di sinilah kebijakan yang sensitif lokasi menjadi krusial.

Lebih lanjut, gejala *policy alienation* tampak ketika kebijakan top-down hadir sebagai paket seragam yang kurang menangkap variasi rumah tangga, ruang, dan waktu. Dalam definisi kontemporer, *policy alienation* adalah “keadaan kognitif keterputusan psikologis dari kebijakan yang diimplementasikan, berinti pada ketidakberdayaan dan ketakbermaknaan” (Tummers, 2021, p. 2). Temuan tentang indikator teknis yang kaku (misalnya parameter listrik atau material rumah) menyingkap ketidaksesuaian penilaian kelayakan dengan keseharian masyarakat, apalagi ketika keluarga miskin meningkatkan daya listrik demi usaha kecil, namun justru keluar dari daftar bantuan. Pada level implementasi, musyawarah yang bersifat formalitas menunjukkan sempitnya ruang deliberasi warga, sehingga penerima program merasa kebijakan “bukan milik mereka” dan pelaksana di tingkat bawah mengambil jalan pintas melalui relasi kedekatan. Alih-alih mendorong kepemilikan (*ownership*), kebijakan semacam ini menciptakan jarak psikologis dan sosial antara warga dan program, yang pada gilirannya melemahkan komitmen, kepatuhan, dan kreativitas dalam memanfaatkan bantuan.

Dari sisi tata kelola, *policy alienation* membatasi pembelajaran kebijakan. Tanpa umpan balik yang jujur dari warga dan tanpa mekanisme evaluasi yang

peka konteks, kegagalan berulang berupa error inklusi–eksklusi, tumpang-tindih program, atau bantuan yang seragam, akan terus muncul. Literatur ensiklopedik kebijakan publik merangkumnya: *policy alienation* adalah "keterputusan psikologis dari program kebijakan" yang berdampak pada implementasi dan hasil (Tummers, 2017, p. 1). Lebih dari itu, alienasi kebijakan juga menyuburkan perilaku oportunistik di hulu dan hilir: di hulu, karena desain tak diuji di ruang kehidupan nyata; di hilir, karena pelaksana lokal dan penerima program memaknai aturan sebagai beban, bukan alat untuk menyelesaikan masalah. Lintas kasus Sikka memperlihatkan bahwa rasa "dimiliki" tumbuh saat ada *voice* warga dalam menentukan prioritas, format bantuan, dan indikator keberhasilan yang relevan dengan medan sosialnya. Dengan kata lain, mengurangi alienasi berarti memperluas kanal partisipasi substantif dan memperkuat kapasitas *street-level* untuk berinovasi dalam koridor akuntabilitas.

Gambar 53. Model Kontinum Kegagalan- Keberhasilan

Sumber: Konstruksi Penulis, 2025

Model kontinum di atas menyajikan spektrum kemajuan kebijakan dari hulu ke hilir: *survival* (bertahan), *resilience* (ketangguhan), *empowerment* (pemberdayaan), hingga *sustainability* (keberlanjutan). Pada tahap *survival*, kebijakan berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar: bantuan tunai/pangan, layanan kesehatan dasar, dan pendidikan dasar tanpa biaya, untuk mencegah jatuhnya rumah tangga ke kemiskinan ekstrem. Data Sikka menunjukkan fungsi ini penting, khususnya pada puncak musim paceklik, fluktuasi harga, dan kejadian sakit mendadak. Namun sifatnya reaktif–jangka pendek, sehingga hanya efektif sebagai penyangga awal sebelum transisi menuju tahap berikutnya. Di sini, pelajaran utamanya adalah memastikan *floor* kesejahteraan agar guncangan tidak segera menjungkirbalikkan rumah tangga paling rentan.

Literatur kebijakan internasional menyebut perlunya *social floors* yang adaptif sebagai prasyarat “mengurangi deprivasi parah sembari menyiapkan jalan ke mobilitas” (Alkire et al., 2023, p. 4).

Tahap *resilience* menambah daya lenting terhadap guncangan, antara lain melalui asuransi sosial (JKN/BPJS Ketenagakerjaan), tabungan kelompok/koperasi yang sehat, ketahanan pangan lokal, dan literasi keuangan. Dalam kerangka sosial-ekologis, ketangguhan adalah “kapasitas sistem untuk mempertahankan struktur, fungsi, dan umpan balik saat terganggu” (Baird et al., 2024, p. 2). Pada konteks pesisir–pedalaman–urban Sikka, resiliensi berarti memperkecil risiko jatuh miskin kembali pasca guncangan iklim, pasar, atau kesehatan. Ketika rumah tangga memiliki bantalan risiko dan jejaring sosial, strategi bertahan hidup menjadi kurang bergantung pada utang berbunga tinggi dan bantuan darurat. Meski demikian, resiliensi tetap bersifat defensif; tanpa kanal menuju pemberdayaan, ia belum mengubah struktur kesempatan dan posisi tawar rumah tangga.

Tahap *empowerment* menandai pergeseran dari defensif ke ofensif: pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja, pendampingan UMKM, akses modal–teknologi, dan partisipasi warga dalam pengambilan keputusan. Inilah momen ketika kapabilitas ala Sen dioperasionalisasikan; ukuran kebijakan tak lagi berhenti pada input, tetapi pada perluasan kebebasan substantif warga. Studi kesejahteraan multidimensi mutakhir menegaskan urgensi instrumen kebijakan yang “berakar pada pendekatan kapabilitas dan relevan bagi perumusan kebijakan” (Clausen et al., 2022, p. 1). Dalam banyak kasus Sikka, gagalnya BUMDes dan koperasi untuk melesat menunjukkan bahwa kanal pemberdayaan belum bekerja padu, pendampingan bisnis timpang, desain kelembagaan lemah, serta rantai pasok/pasar tidak berpihak. Secara teoretik, tanpa *empowerment*, rumah tangga tetap terkurung dalam *resilience without mobility*: tangguh menghadapi krisis, tetapi tidak naik kelas.

Tahap *sustainability* adalah puncak spektrum: keberlanjutan hasil intervensi melalui integrasi aspek sosial–ekonomi–lingkungan, pengembangan wilayah berbasis potensi lokal, pelibatan multi pihak, serta *monitoring & evaluation* yang berkelanjutan. Di titik ini, kemiskinan dibaca sebagai problem sistem yang membutuhkan koherensi lintas sektor dan lintas level pemerintahan. Secara konseptual, ketahanan jangka panjang bergantung pada kemampuan sistem “hidup dan berkembang di tengah perubahan” (Folke, dikutip dalam Flood et al., 2022, p. 3). Dalam bahasa pohon masalah,

sustainability berarti memperkuat akar kebijakan–kelembagaan agar batang kapabilitas kokoh, cabang kerentanan menipis, dan daun konsekuensi negatif berkurang. Saat ini Sikka masih bergerak di antara *survival* dan *resilience*, dengan kantong-kantong *empowerment* yang sporadis; pekerjaan ke depan adalah menyusun jalur transisi yang eksplisit dari kiri ke kanan spektrum pada tingkat program dan indikator kinerja.

Terakhir adalah mendorong perubahan dari "ekosistem kemiskinan" menuju "ekosistem resiliensi." Ekosistem kemiskinan merujuk pada jejaring faktor yang saling memberi makan: norma sosial yang membebani, struktur pasar yang timpang, kebijakan yang seragam, dan geografi yang membatasi. Pergeseran menuju ekosistem resiliensi menuntut kesetimbangan antara bantalan risiko yang kredibel, kapabilitas yang terus ditingkatkan, dan institusi lokal–pasar yang lebih adil. Dalam praktik global, pendekatan berbasis ketangguhan dipahami sebagai upaya agar sistem sosial-ekologis "tetap dalam identitas esensialnya sembari beradaptasi". Untuk konteks Sikka, ini berarti konsolidasi irigasi mikro dan koperasi produsen (pedalaman), pembiayaan berbiaya wajar dan *cold chain* sederhana (pesisir), serta *bridging* keterampilan ke pekerjaan formal (urban).

Lebih jauh lagi, pendekatan berbasis keadilan sosial (*social equity*) mengharuskan kebijakan memperlakukan ketidaksetaraan sebagai objek intervensi, bukan sekadar variasi statistik. Profil MPI Indonesia terbaru menunjukkan adanya kantong-kantong deprivasi yang menuntut intervensi berbeda lintas wilayah dan kelompok (UNDP, 2024). Di Sikka, ini berarti mengoreksi desain seragam menjadi *targeting* dan *bundling* yang sensitif ukuran keluarga, lokasi geografis, dan sumber penghidupan. Keadilan prosedural pun krusial: musyawarah yang substantif, kanal komplain yang bekerja, dan transparansi data penerima agar *elite capture* dapat diminimalkan. Ketika warga merasa prosedur adil, tingkat *ownership* dan *compliance* meningkat, dan transfer kebijakan ke perubahan perilaku menjadi lebih mungkin.

Polanya juga konsisten dengan studi Indonesia/NTT pada dekade terakhir: kemiskinan bertahan karena kombinasi geografi keras, struktur pasar yang tidak bersahabat, kapasitas rumah tangga terbatas, serta kebijakan yang kurang adaptif. Temuan SMERU mutakhir menegaskan bahwa guncangan besar mempertebal kerentanan kronis dan memerlukan respons yang melampaui bantuan moneter jangka pendek (Suryahadi et al., 2020). Di pesisir,

literatur rantai nilai perikanan menekankan pentingnya akses pembiayaan, informasi harga, dan fasilitas pascapanen yang layak; di pedalaman, efektivitas irigasi kecil dan koperasi produsen menjadi kunci peningkatan nilai tambah; di urban kota kecil, *upskilling* dan jembatan ke pekerjaan formal diperlukan untuk memutus *working poverty*. Semua pelajaran itu bergema di Sikka, tanpa pasar yang menyerap, finansial mikro yang sehat, dan desain produktif di hilir, akumulasi kecil rumah tangga mudah terkikis oleh beban sosial atau guncangan ekonomi.

Dari sisi teori, Sen memberi arah tujuan (kapabilitas), Chambers memberi peta jebakan (deprivasi), *policy alienation* mengingatkan risiko jarak kebijakan–realitas, sedangkan kontinum menyediakan urutan lintasan. Dari sisi pemetaan, analisis pohon masalah menempatkan budaya–geografi–kebijakan di akar, ekonomi–kapabilitas di batang, kerentanan harian di ranting, dan konsekuensi antargenerasi di daun. Dari sisi strategi, tugas utamanya adalah menyusun *pathway* lintas BANDOL yang menargetkan akar dan batang sekaligus, agar gejala di ranting mereda dan daun negatif menipis. Itulah mengapa program yang hanya menambah "air di daun" (bantuan konsumsi) tidak cukup; diperlukan "pupuk di akar" (reformasi data–desain), "penguat batang" (kapabilitas, pasar, dan keuangan mikro sehat), serta "penataan tajuk" (inovasi sosial untuk mengelola beban adat). Konvergensi ini mengarahkan pada *portfolio approach* ketimbang proyek tunggal: proteksi dasar (*survival*), pengelolaan risiko & modal sosial (*resilience*), paket keterampilan–modal–pasar (*empowerment*), serta M&E berbasis hasil dan kolaborasi lintas aktor (*sustainability*). Dengan begitu, kebijakan bergerak dari "reaktif seragam" menuju "proaktif kontekstual," yang mengurangi *policy alienation* dan memperbesar *ownership* warga.

BAB IV PROGRAM PRIORITAS

Berdasarkan hasil riset evaluasi kinerja kebijakan penanggulanagn kemiskinan kabupaten Sikka tahun 2025, maka diuraikan Program Prioritas Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RKPD) Kabupaten Sikka Tahun 2025- 2030. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Sikka tahun 2025-2030 terdiri atas 5 level kontinum kemiskinan yaitu; 1) level survival; 2) level resilience; 3) level empowerment; 4) level resilience-empowerment; dan 5) level sustainability.

4.1. Level Survival (Tahun 2025)

Level survival, yaitu terwujudnya Pemenuhan kebutuhan dasar: air bersih, pangan, rumah layak, validasi data, pendidikan. Program prioritas yang perlu dilaksanakan meliputi;

4.1.1. Sumur bor & kios air komunitas

Program ini merupakan program pemerintah daerah kabupaten Sikka berupa infrastruktur Sumur Bor dan Kios Air Komunitas. Program sumur bor adalah inisiatif untuk menyediakan air bersih melalui pengeboran tanah, program bertujuan untuk mengatasi kesulitan akses air bersih bagi masyarakat di daerah sulit, untuk keperluan rumah tangga, pertanian, hingga sanitasi. Sedangkan kios air komunitas merupakan wadah penampung air bersih yang disiapkan pada titik tertentu untuk kepentingan masyarakat di daerah yang kekurangan air bersih. Target yang diharapkan dari program Sumur Bor & Kios Air Komunitas adalah pembiayaan air dari seluruh rumah tangga mencapai penurunan ≥30% pada wilayah Desil 1.

4.1.2. Distribusi Air Murah

Program distribusi air murah merupakan program pemerintah kabupaten Sikka yang diberikan kepada rumah tangga miskin pada Desil 1 dan 2. Program distribusi air murah merujuk pada program pemerintah daerah untuk menyediakan air bersih yang terjangkau, baik melalui subsidi, program bantuan seperti Pamsimas dan Sanimas, maupun program promosi dengan cicilan bagi sambungan baru. Program ini sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga kabupaten Sikka. Melalui program Distribusi Air Murah diharapkan juga terjadi penurunan pembiayaan air bersih mencapai ≥30% pada keluarga miskin pada Desil 1 dan 2.

4.1.3. Lumbung Pangan Komunitas

Program Lumbung Pangan komunitas adalah program lumbung pangan berbasis potensi lokal, yaitu beras dan jangung. Lumbung pangan adalah sistem atau lembaga yang berfungsi untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mendistribusikan cadangan pangan masyarakat, baik dalam bentuk fisik seperti gudang tradisional maupun sebagai kelembagaan yang dikelola oleh pemerintah atau komunitas. Tujuannya adalah untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat, terutama untuk mengantisipasi kerawanan pangan akibat bencana alam atau kondisi darurat lainnya. Potensi jagung dan beras yang cukup besar di kabupaten Sikka sangat sesuai untuk program lumbung pangan untuk menjaga ketahanan pangan masyarakat. Target yang diharapkan dari program lumbung pangan adalah agar keluarga miskin di kabupaten Sikka mempunyai Cadangan pangan untuk 6 bulan kedepan.

4.1.4. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni

Program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) adalah program bantuan pemerintah daerah atau lembaga untuk merenovasi rumah penduduk miskin agar sesuai standar kesehatan dan keselamatan. Program ini berfokus pada perbaikan atap, lantai, dan dinding serta fasilitas sanitasi dasar. Tujuan program bagi masyarakat miskin adalah; meningkatkan kualitas hunian, meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengurang tingkat kemiskinan. Target yang ingin dicapai adalah terdapat 200 rumah yang direnovasi, sasaran program ini adalah selain keluarga miskin pada desil 1 juga janda miskin dan Lasia tanpa penopang.

4.1.5. Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

Validasi DTKS adalah proses pemeriksaan dan pembaruan data di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk memastikan data tersebut akurat, relevan, dan tepat sasaran, sehingga bantuan sosial (bansos) yang disalurkan sesuai dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang sebenarnya. Proses ini melibatkan verifikasi data di lapangan oleh petugas untuk mengecek apakah penerima bansos masih memenuhi kriteria, serta memastikan tidak ada data ganda atau data yang sudah tidak layak. Program ini sangat mendasar dalam memastikan penerima manfaat yang tepat. Tujuan yang diharapkan dari program validasi DTKS adalah; memastikan ketepatan sasaran, menjaga keakuratan data dan menyajikan data yang relevan. Target dari program ini adalah seluruh keluarga miskin di kabupaten Sikka.

4.1.6. Bea Siswa Sarjana Untuk Keluarga Miskin.

Program bea siswa 1 keluarga miskin 1 sarjana, adalah program unggulan pemerintah kabupaten Sikka. Program ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup warga masyarakat miskin di kabupaten Sikka dengan memberikan kesempatan Pendidikan Tinggi secara gratis hingga lulus. Program ini merupakan komitmen pemerintah daerah kabupaten Sikka agar generasi muda di kabupaten Sikka memiliki daya saing dalam menghadapi berbagai persaingan dimasa depan. Skema bea siswa yang diberikan kepada keluarga miskin yang terpilih adalah mengratiskan pendaftaran, SPP/UKT 8 semester, uang gedung/DPP, Uang Saku, dan biaya wisuda.

4.2. Level Resilience (Tahun 2026)

Level resilience adalah peningkatan produktivitas dan daya tahan ekonomi (pertanian, nelayan, irigasi), program prioritas perlu dilaksanakan meliputi;

4.2.1. Embung Komunitas dan Irigasi Sederhana.

Embung adalah bendungan kecil atau kolam buatan yang dibangun untuk menampung air hujan atau limpasan air dari sungai kecil dan perbukitan. Embung dibangun di daerah dataran tinggi atau lahan dengan kontur yang memungkinkan penampungan air secara alami. Air yang ditampung ini akan digunakan kembali sesuai kebutuhan, terutama saat musim kemarau. Embung komunitas berarti berbasis kepada masyarakat, embung untuk kepentingan warga masyarakat. Sedangkan irigasi sederhana adalah Jaringan irigasi sederhana seringkali dikelola secara mandiri oleh sekelompok petani yang menggunakan air, sehingga kelengkapan dan kemampuan mereka untuk mengukur dan mengatur sangat terbatas. Air yang tersedia umumnya melimpah dan memiliki kemiringan sedang hingga curam, memudahkan drainase dan pembagian air. Program ini sangat relevan dengan kondisi topografi kabupaten Sikka. Program ini bertujuan untuk mengalirkan air secara teratur sesuai dengan kebutuhan tanaman pada saat suplai infiltrasi tanah tidak mencukupi untuk mendukung pertumbuhan tanaman. Adapun targetdari program embung komunitas dan irigasi sederhana adalah petani gurem di Desil 1 dan 2.

4.2.2. Jagung tahan kering & hortikultura bernilai ekonomi

Jagung tahan kering adalah varietas Bima 4 untuk jenis hibrida dan Lamuru untuk jenis komposit, masing-masing dengan potensi hasil 11,71 dan 7,6 t/ha. Kedua varietas ini telah dikembangkan di daerah kering beriklim kering. Hingga saat ini telah dihasilkan pula galur harapan jagung komposit toleran kekeringan dengan potensi

hasil 9,1-9,7 t/ha. Jenis varietas ini sangat cocok dikembangkan di wilayah kabupaten Sikka, yang Sebagian besar daerahnya beriklim kering. Perakitan varietas unggul jagung umur genjah (80-90 hari) dan super genjah (70-80 hari) merupakan salah satu upaya untuk meminimalisasi kegagalan panen akibat pendeknya periode hujan yang merupakan dampak dari perubahan iklim. Melalui program jagung tahan kering, diharapkan produktivitas jagung petani gurem di Desil 1-2 meningkat lebih dari ≥25%.

Sedangkan hortikultura bernilai ekonomi tinggi mencakup tanaman sayuran, buah-buahan, bunga, dan tanaman obat. Komoditas ini penting karena berperan dalam ketahanan pangan, kesehatan, serta peningkatan pendapatan petani dan devisa negara melalui pasar nasional dan internasional. Potensi lahan yang luas dan subur di kabupaten Sikka, memungkinkan program hortikultura bernilai ekonomi tinggi, program ini juga dapat melibatkan komunitas petani gurem pada Desil 1-2.

4.2.3. Modernisasi Alat Tangkap

Wilayah kabupaten Sikka merupakan wilayah yang memiliki lautan yang luas, potensi perikanan laut sangat besar, namun demikian sebagian besar nelayannya masih menggunakan peralatan yang sederhana. Salah satu upaya dilakukan untuk meningkatkan hasil tangkapan nelayan adalah melakukan modernisasi alat tangkap.

Modernisasi alat tangkap bagi nelayan melibatkan penggantian alat tradisional dengan teknologi yang lebih efektif, seperti penggunaan kapal yang lebih besar, alat tangkap modern seperti purse seine dan longline, serta alat bantu elektronik seperti sonar dan GPS. Tujuannya adalah meningkatkan hasil tangkapan, efisiensi kerja, pendapatan nelayan, dan menjangkau area penangkapan yang lebih jauh, meskipun terkendala biaya modal. Sasaran program ini adalah komunitas nelayan kecil di Desil 1-2.

4.2.4. Kredit Mikro Koperasi Komunitas

Kredit Mikro adalah kredit/ pembiayaan yang diberikan oleh Penerima Jaminan (Bank dan/ atau lembaga Keuangan bukan Bank) kepada pengusaha Mikro, Kecil atau Koperasi yang layak, baik yang bankable maupun tidak bankable untuk keperluan Modal Kerja dan/atau investasi. Kredit mikro dari koperasi komunitas sangat bermanfaat bagi masyarakat miskin agar mereka tidak terjerat pada praktik rentenir. Kredit Mikro Koperasi Komunitas adalah jenis pinjaman modal yang diberikan kepada pelaku usaha mikro dan kecil (UMKM) yang tergabung dalam suatu kelompok atau komunitas, biasanya melalui koperasi. Program ini menekankan

prinsip berbasis komunitas, dengan keuntungan seperti persyaratan yang mudah, proses cepat, dan sistem tanggung renteng untuk menjamin pembiayaan. Adapun sasaran dari program ini adalah masyarakat miskin yang memilikin usaha mikro di Desil 3-4. Diharapkan dengan program ini penadapat pelaku ekonomi mikrom meningkat menjadi ≥15%.

4.3. Level Empowerment (Tahun 2027)

Level empowerment adalah Diversifikasi ekonomi & pemberdayaan sosial (UMKM, perempuan, pemuda, BUMDes), program prioritas perlu dilaksanakan meliputi;

4.3.1. Pelatihan UMKM komunitas (olah hasil laut/pertanian, tenun, kerajinan)

Pelatihan UMKM adalah program pendidikan yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam berbagai aspek bisnis. Tujuannya adalah untuk membantu UMKM meningkatkan daya saing, mengelola usaha dengan lebih baik, menghadapi tantangan, dan mencapai pertumbuhan berkelanjutan.

Pelatihan pengolahan hasil laut bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dalam mengolah ikan menjadi produk bernilai tambah, seperti produk olahan ikan, pengemasan, dan pemasaran. Pelatihan ini dapat mencakup berbagai teknik seperti penggaraman, pengasapan, pengalengan, pembekuan, pengolahan menjadi bakso, siomay, nugget, atau bahkan produk inovatif lainnya seperti keripik kulit ikan atau stik duri ikan.

Pelatihan pengolahan hasil pertanian adalah pelatihan dalam proses mengubah hasil pertanian mentah menjadi produk yang lebih bernilai, tahan lama, siap konsumsi, atau bisa digunakan dalam industri lain. Tujuannya adalah meningkatkan nilai tambah, memperpanjang masa simpan, dan memenuhi kebutuhan pasar. Proses ini melibatkan teknik fisik, kimia, dan biologis, dengan hasil akhir yang beragam seperti keripik, tepung, dodol, atau produk instan.

Pelatihan menenun diberikan kepada remaja puteri keluarga miskin yaitu memberikan pengetahuan, sikap, dan keterampilan tentang bagaimana cara meningkatkan kualitas kain tenun ikat agar peserta pelatihan dapat menciptakan produk kain tenun yang berkualitas sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga perempuan penenun di Desil 2-3. Kain tenun kabupaten Sikka memiliki ciri khas estetik yang sangat diminati oleh wisatawan manca negara dan domestik.

4.3.2. Penguatan BUMDes

Penguatan BUMDes merupakan satu satu strategi untuk meningkatkan peran BUMDes dalam perekonomian masyarakat pedesaan. Program penguatan BUMDes adalah urgen untuk memperkuat kontribusi BUMDes dalam mendukung kegiatan pembangunan desa dan meningkatkan perekonomian masyarakat di pedesaan. Langkah-langkah yang dilakukan untuk penguatan BUMDes diataranya adalah memberikan Pendidikan dan pelatihan kepada pengurus BUMDes; manajemen usaha professional; pengelolaan modal dan pembuatan program kerja BUMDes yang berbasis pada potensi lokal pedesaan. Target dari program penguatan adalah ≥80% BUMDes berfungsi di daerah komunitas miskin Desil 2-4.

4.3.3. Kelompok Simpan Pinjam Perempuan

Kelompok simpan pinjam adalah kelompok perempuan, seringkali dalam bentuk koperasi, yang mengumpulkan simpanan dari anggota dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman. Tujuannya adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat dengan menyediakan akses permodalan yang terjangkau, serta membantu pengembangan usaha. Program ini dibentuk dalam rangka melindungi masyarakat miskin agar tidak terjerat oleh praktik rentenir yang marak di wilayah masyarakat miskin. Target dari program ini adalah ≥ 50% keluarga miskin perempuan yang memiliki usaha mikro yang terdapat di Desil 4.3.4. Beasiswa Transport dan Seragam

Kesulitan yang dialami oleh keluarga miskin adalah pembiayaan pendidikan khususnya uang transpor dan seragam sekolah. Item pembiayaan ini belum diterapkan pada skema dana BOS, oleh karena pemerintah memprogramkan beasiswa dengan pendanaan uang transport terutama kepada peserta didik yang bertempat tinggal jauh dari satuan Pendidikan. Target yang diharapkan dari program ini adalah agar angka putussekolah dapat ditekan dibawah 40%. Program beasiswa khusus uang traspor dan seragam sekolah merupakan bentuk komitmen pemerintah kabupaten Sikka untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah dasar dan menengah serta meningkatkan SDM di wilayah kabupaten Sikka. Target program ini adalah keluarga miskin di Desil 1-2.

4.3.5. Pelatihan Keterampilan Pemuda

Pelatihan keterampilan pemuda adalah program pendidikan nonformal yang membekali pemuda dengan pengetahuan dan kemampuan praktis untuk meningkatkan daya saing, membuka peluang kerja dan wirausaha, serta membangun karakter yang lebih kuat. Program ini mencakup berbagai bidang yang berbasis pada potensidan permasalahan lokal, dengan tujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi, mencegah pengangguran, dan memberdayakan generasi muda agar dapat berkontribusi positif bagi masyarakat. Target yang diharapkan program ini adalah dapat memberdayakan ≥ 200 pemuda/pemudi di wilayah Desil 1-2.

4.4. Level Resilience–Empowerment (Tahun 2028)

Level Resilience–Empowerment adalah kesehatan, gizi, sanitasi, adat dan kelembagaan. program prioritas perlu dilaksanakan meliputi;

4.4.1. Posyandu Komunitas dan Pangan Tambahan

Posyandu komunitas adalah sistem pelayanan kesehatan berbasis masyarakat (UKBM) yang dikelola oleh masyarakat itu sendiri, dengan dukungan tenaga kesehatan profesional. Tujuannya adalah mempermudah akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dasar seperti imunisasi, pemantauan tumbuh kembang balita, pemeriksaan ibu hamil, dan edukasi kesehatan. Kegiatan Posyandu komunitas juga semakin berkembang dengan cakupan pelayanan yang lebih luas untuk semua siklus hidup, mulai dari remaja hingga lansia. Sedangkan pangan tambahan adalah makanan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak, ibu hamil, atau kelompok rentan lainnya, khususnya bagi mereka yang kekurangan gizi. Pemberiannya bertujuan untuk meningkatkan status gizi, mendukung tumbuh kembang optimal, dan mencegah stunting. Target program ini adalah penurunan stunting lebih dari 25% disasar untuk komunitas ibu hamil dan balita serta keluarga yang menderita stunting di Desil 1-3.

4.4.2. Sanitasi Sehat

Sanitasi sehat adalah upaya menjaga kebersihan lingkungan dan mengendalikan faktor-faktor fisik lingkungan yang dapat membahayakan kesehatan manusia, seperti air, udara, sampah, dan limbah. Tujuannya adalah untuk mencegah penyakit menular, mengurangi risiko malnutrisi, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Program Sanitasi Sehat khusus diarahkan pada kegiatan jamban keluarga dan air layak. Jamban yang menggunakan sistem pembuangan tinja yang aman (misalnya, tangki septik atau SPAL) dan tempat cuci

tangan. Target program ini adalah lebih dari 75% keluarga miskin di Desil 1-2 mempunyai jamban sehat.

4.4.3. Dialog Adat

Dialog adat adalah percakapan antara para pihak yang berkaitan dengan adat, seperti masyarakat adat dan pemangku kepentingan, untuk membahas, melestarikan, dan mengatur adat istiadat. Kegiatan ini dapat berupa diskusi formal yang bertujuan untuk menyepakati rumusan acara ritual adat, memilih pengurus dewan adat, atau memperkuat pemahaman tentang hukum dan lembaga adat. Masalah yang dihadapi adalah tingginya “belis” dan efek negatif minuman ber-alhohol, hasil riset juga menunjukkan bahwa salah satu penyebab terjadi kemiskinan kultural adalah budaya belis dan penyalagunaan pemakaian alkohal, oleh karena itu perlunya dialog adat. Program ini menyasar komunitas adat di Desil2-4.

4.4.4. Reformasi Bansos Berbasis Komunitas

Bansos adalah singkatan dari bantuan sosial, yaitu pemberian bantuan berupa uang, barang, atau jasa yang diberikan oleh pemerintah atau lembaga lainnya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, khususnya kelompok miskin dan rentan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan, dan memberikan bantuan dalam situasi darurat. Reformasi bantua sosial ditujukan kepada perbaikan data Tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN, yang dimulai dari tingkat RT sampai Tingkat kabupaten.

Beberapa keunggulan dapat dirasakan dalam kebijakan bansos yang berbasis DTSEN, seperti akurasi data sehingga adanya pengurangan salah sasaran ini dapat dikurangi karena dengan integrasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) ke dalam DTSEN, data penerima manfaat diperbarui secara berkala dan diverifikasi oleh berbagai lembaga termasuk Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Target dari program ini adalah tercapainya Tingkat kepuasan masyarakat lebih dari 75% di Desil 1-4.

4.4.5. Arisan Pangan

Arisan pangan dapat merujuk pada arisan yang fokus pada kebutuhan sembako, atau arisan yang anggotanya menyumbang pangan dan diundi untuk mendapatkan bahan kebutuhan pokok. Istilah ini juga bisa mengacu pada kegiatan

komunitas yang bertujuan untuk ketahanan pangan dengan cara berinvestasi bersama. Manfaat arisan pangan, tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengumpulan dana, tetapi juga sebagai cara untuk membantu anggota dalam memenuhi kebutuhan pangan mereka dan/atau membangun ketahanan pangan bersama. Program arisan pangan diorganisisr oleh komunitas, terutama dilakukan jika kondisi darurat terjadi. Program ini dapat di lakukan di Desil 1-2.

4.5. Level Sustainability I (Tahun 2029)

Level sustainability I adalah Konsolidasi capaian dan model desa tangguh kemiskinan. program prioritas perlu dilaksanakan meliputi;

4.5.1. Integrasi Program Desa Tangguh Berbasis Komunitas

Integrasi program desa adalah penggabungan berbagai program pembangunan dari berbagai kementerian dan lembaga agar berjalan terpadu dan bersinergi di tingkat desa, sehingga program tersebut lebih efektif, efisien, dan mencapai dampak maksimal. Integrasi ini mencakup integrasi data, program lintas sektor, dan koordinasi antara pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat. Contoh integrasi meliputi sinergi program ketahanan pangan melalui BUMDes, integrasi data kependudukan, serta penguatan program kebencanaan melalui program Desa Tangguh Bencana (Destana). Integrasi program desa tangguh dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat miskin yang terdampak program. Program ini juga melibatkan universitas, NGO dan sektor swasta. Target program ini adalah terbetuknya paling sedikit 5 komunitas model tangguh di Desil 1-3.

4.5.2. Dokumentasi Praktik Baik Komunitas Pilot

Contoh praktik baik komunitas pilot meliputi kontribusi mereka dalam memfasilitasi perjalanan bisnis dan transportasi kargo, yang mendorong ekonomi, serta terlibat dalam misi kemanusiaan seperti pengiriman bantuan bencana dan pengangkutan pasien. Selain itu, mereka juga dapat berpartisipasi dalam upaya konservasi lingkungan melalui survei udara, pengiriman logistik untuk proyek lingkungan, dan studi ilmiah tentang satwa liar. Pencapaian praktik baik, akan menjadi contoh yang baik bagi komunitas sehingga perlu didokumentasikan, dan dapat ditularkan pada komunitas yang lain. Sasaran program adalah replikasi paling sedikit pada 10 komunitas di Desil 1-4.

4.5.3. Replikasi Ke Komunitas Lain

Replikasi adalah tindakan meniru atau menduplikasi sesuatu, sering digunakan dalam konteks ilmiah untuk pengulangan penelitian guna memverifikasi hasil. Replikasi bertujuan untuk menguji keandalan dan konsistensi temuan awal. Terkait dengan program yang direplikasi merupakan program yang baik dari ditempat lain yang berguna dan dapat diterapkan pada komunitas tertentu untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Program replikasi proyek-proyek pemgembangan masyarakat akan dilakukan di Desil 2-4 dengan target 10 program replikasi.

4.5.4. Kemitraan NGO–Universitas–CSR

Kemitraan adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih yang saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan untuk mencapai tujuan bersama dalam suatu usaha. Dalam konteks pengembangan masyarakat pedesaan, kemitraan memungkinkan para pihak untuk menggabungkan sumber daya, keahlian, dan risiko untuk meraih keuntungan lebih besar dan memperluas program pengembangan. Bentuk kemitraan yang dilakukan dalam pengembangan masyarakat pedesaan dilakukan oleh NGO-Universitas-CSR. Ketiga lembaga ini memiliki misi yang sama untuk memperkuat pengembangan masyarakat. Target program kemitraan penurunan angka kemiskinan ekstrem <12% di Desil 2-4.

4.6. Level Sustainability II (Tahun 2030)

Level sustainability II adalah replikasi dan kelembagaan permanen, program prioritas perlu dilaksanakan meliputi;

4.6.1. Institusionalisasi Komunitas Tangguh ke RPJMD

Institusionalisasi komunitas tangguh adalah proses pelembagaan Ketahanan komunitas yaitu memberikan kemampuan berkelanjutan komunitas untuk bertahan, beradaptasi, dan pulih dari kesulitan . Contoh dibidang Kesehatan—yang berarti kesehatan dan kesejahteraan fisik, perilaku, sosial, dan lingkungan—merupakan bagian penting dari ketahanan secara keseluruhan. Program-program komunitas yang terbukti tangguh dimasukkan dan diakomodir ke dalam RPJMD kabupaten. Target yang diharapkan dari pelembagan komunitas tangguh adalah komunitas tangguh masuk ke dalam RPJMD kabupaten sehingga komunitas lintas Desil 1-5 mampu menghadapi berbagai kegoncangan berbagai bidang kehidupan.

4.6.2. Regulasi Komunitas Inklusif (anti putus sekolah, sanitasi, air bersih)

Komunitas inklusif adalah komunitas di mana orang-orang dapat terlibat dalam ruang, tempat, aktivitas, dan acaranya tanpa memandang usia, kemampuan, pendapatan, atau latar belakang etnis mereka. Program regulasi komunitas iklusif yang dicanangkan adalah program iklusi di bidang Pendidikan, sanitasi, dan air besih. Program ini ditargetkan dapat menurunkan kemiskinan eksterm <10% di Desil 1-4.

4.6.3. Integrasi SDGs Lokal Dengan Indikator Kemiskinan Multidimensi

Integrasi SDGs lokal adalah proses adaptasi dan implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ke dalam konteks dan prioritas di tingkat daerah untuk mencapai target global. Ini dilakukan dengan menerjemahkan SDGs ke dalam rencana dan strategi pembangunan lokal, yang kemudian diimplementasikan melalui program-program di tingkat daerah dan desa, seperti program pembangunan ekonomi lokal, pendidikan, dan konservasi sumber daya alam. Target yang diharapkan dengan program integrasi SDGs lokal mengurasi angka kemiskinan ekstrem sampai <10% di Desil 1-4.

BAB V. LOKASI PRIORITAS: BERBASIS DESIL

5.1. Ringkasan Temuan per Desil (Pola Umum dan Perbedaan Lokasi)

5.1.1. Desil 1 (Wuring, Rubit, Nangahale): Kemiskinan Ekstrem dengan Ketergantungan Tinggi.

Kerentanan paling berat tampak pada rumah tangga yang hidup dari pendapatan harian yang tidak pasti, tanpa bantalan aset produktif dan tabungan. Di Wuring dan Nangahale, relasi patron–klien mempersempit ruang tawar nelayan buruh; ketika musim angin barat datang, instrumen bertahan utama hanyalah utang dan bantuan yang tidak selalu memadai. Di Rubit, beban adat dan kewajiban ritual memaksa keluarga menjual hasil tani atau meminjam pada koperasi mingguan berbunga tinggi sehingga siklus defisit berulang. Secara umum, desil ini memperlihatkan gejala “bertahan hidup” (survival) yang kuat, sekaligus minimnya kanal menuju pemberdayaan ekonomi maupun peningkatan kapabilitas.

5.1.2. Desil 2 (Wolomarang, Tanarawa): Subsistensi Persisten, Program Tidak Nyambung.

Rumah tangga tampak sedikit lebih longgar dibanding desil 1, namun tetap berada dalam perangkap pekerjaan subsisten dengan fluktuasi yang besar. Di Tanarawa, keterbatasan air dan irigasi menyebabkan produktivitas lahan kering rendah, sementara program pertanian yang seragam kurang cocok dengan kondisi biofisik setempat. Wolomarang menghadapi kombinasi persoalan pesisir, ketidakpastian tangkapan, biaya operasional, dan pekerjaan informal yang tanpa jaminan. Secara garis besar, desil ini mengindikasikan pentingnya penyesuaian program dengan ekologi lokal dan perbaikan akses terhadap pasar agar usaha mikro tidak berhenti di hulu.

5.1.3. Desil 3 (Madawat): Working Poverty dan Biaya Hidup Urban-Periurban.

Meskipun akses infrastruktur relatif lebih baik, keluarga tetap rentan karena pendapatan informal tidak sebanding dengan biaya hidup harian. Pekerjaan seperti buruh bangunan, pedagang kecil, dan ojek bersifat musiman dan sensitif permintaan, sehingga perencanaan keuangan jangka menengah sulit dilakukan. Minimnya jaminan sosial ketenagakerjaan serta rendahnya

keterampilan formal membatasi mobilitas ke pekerjaan yang lebih terlindungi. Desil ini menegaskan bahwa urbanisasi tidak otomatis mengangkat rumah tangga dari kemiskinan, bila tidak disertai jembatan keterampilan dan kanal masuk ke segmen kerja formal.

5.1.4. Desil 4 (Umauta, Wairbleler): Sedikit Lebih Baik, Namun Masih Rapuh terhadap Guncangan.

Pendapatan dan aset sedikit lebih baik, tetapi komponen structural, pasar lokal, kelembagaan ekonomi desa, dan efisiensi rantai nilai, belum kondusif. Umauta tetap dibatasi oleh agroekologi lahan kering, sehingga surplus produksi tipis dan mudah tergerus oleh kebutuhan tak terduga. Di Wairbleler, kelemahan tata kelola BUMDes dan terbatasnya pendampingan bisnis menghambat pertumbuhan usaha desa yang semestinya menjadi motor nilai tambah. Desil ini menandakan adanya potensi yang belum terakselerasi karena kanal kelembagaan dan pasar belum sepenuhnya bekerja.

5.2. Karakteristik Kemiskinan di Sikka: Multidimensi, Kultural, Struktural, Geografis, dan (Ditambahkan) Kapabilitas

5.2.1. Multidimensi: Deprivasi pada Banyak Aspek Non-Moneter.

Kemiskinan tidak berhenti pada pendapatan rendah, melainkan juga deprivasi pendidikan, kesehatan, sanitasi, perumahan, air bersih, dan literasi keuangan. Banyak rumah tangga tidak mampu mengonversi bantuan menjadi *functionings* yang meningkat, misalnya menyekolahkan anak secara berkelanjutan atau mengangkat kualitas gizi keluarga. Pada titik ini, indikator moneter tidak cukup peka menangkap risiko jatuh kembali ke kemiskinan setelah guncangan kecil. Karena itu, kebijakan wajib mengikat dimensi layanan dasar dengan instrumen ekonomi rumah tangga agar peningkatan kesejahteraan lebih permanen.

5.2.2. Kultural: Beban Adat, Habitus Konsumtif, dan Patron–Klien.

Pesta adat dan konsumsi simbolik menggerus tabungan produktif serta memicu pinjaman berbunga tinggi yang sulit dilunasi. Relasi patron–klien di pesisir mengikat nelayan pada struktur bagi hasil yang tidak simetris, sementara posisi tawar petani pedalaman lemah di hadapan tengkulak. Solidaritas sosial yang dahulu menjadi penyangga kini cenderung menipis,

terutama di pesisir dan urban, karena logika bantuan formal menggantikan mekanisme kolektif tradisional. Akibatnya, beban budaya dan struktur relasi kuasa memperdalam lingkaran ketergantungan.

5.2.3. Struktural: Policy Alienation, Error Distribusi, dan Lemahnya Kelembagaan Lokal.

Desain program yang seragam dengan indikator teknis kaku menimbulkan *mismatch* dengan kebutuhan riil, sementara error inklusi–eksklusi menggerus kepercayaan warga. Kelembagaan lokal, berupa BUMDes, koperasi, kelompok usaha, sering belum dikelola secara profesional sehingga gagal menjadi poros pemberdayaan. Koordinasi lintas sektor dan *monitoring–evaluation* berbasis hasil belum mengunci pembelajaran kebijakan yang diperlukan untuk koreksi arah. Kondisi struktural ini melanggengkan pola kuratif dan menghambat transisi ke pemberdayaan.

5.2.4. Geografis–Lingkungan: Batas-Batas Ekologis dan Aksesibilitas

Pesisir menghadapi musim angin, penurunan stok ikan, dan biaya operasional melaut yang tinggi; pedalaman berjuang dengan kekeringan, kualitas tanah, dan jarak ke pasar; wilayah urban menanggung biaya hidup tinggi dan risiko sosial permukiman padat. Aksesibilitas antarwilayah memengaruhi distribusi program dan serapan peluang ekonomi, sehingga disparitas antar desa bisa mengeras. Tekanan ekologis juga menaikkan volatilitas pendapatan dan biaya hidup, membuat rumah tangga kehilangan ruang manuver saat terjadi guncangan. Karena itu, desain kebijakan harus *place-based* serta sensitif risiko iklim dan biofisik setempat.

5.2.5. Kapabilitas: Pendidikan, Kesehatan, Literasi, Aspirasi, dan Agency.

Dimensi kapabilitas adalah sendi yang menentukan kemampuan rumah tangga mengubah bantuan menjadi kemajuan nyata. Rendahnya pendidikan, terutama transisi SMP ke SMA/SMK dan akses ke pendidikan tinggi, mengunci mobilitas kerja ke sektor informal berupah rendah. Kesehatan dan gizi, termasuk sanitasi dan air bersih, memengaruhi produktivitas dan biaya pengobatan, sehingga setiap sakit berat dapat menggulung ekonomi keluarga. Literasi keuangan yang terbatas membuat bantuan tunai, laba usaha mikro, atau hasil panen habis untuk konsumsi rutin dan kewajiban sosial, bukan ditabung atau diinvestasikan. Selain itu,

aspirasi dan *agency* merosot ketika rumah tangga terbiasa menunggu bantuan; tanpa penguatan *agency* (percaya diri, jaringan, dan suara dalam kebijakan), kapabilitas sulit tumbuh dan tetap rapuh terhadap guncangan.

5.2.6. Pola Bantuan: Dominan Kuratif, Belum Membangun Kemandirian

5.2.6.1. Bantuan Efektif untuk Bertahan, Namun Belum untuk Melompat

PKH, BPNT, dan BLT membantu keluarga melewati masa sulit dan mencegah jatuh pada kelaparan atau kemiskinan ekstrem. Akan tetapi, sifatnya reaktif, jangka pendek, dan homogen sehingga tidak menutup jurang struktural antara kebutuhan dan peluang. Tanpa pendampingan kapabilitas dan akses pasar, bantuan tidak berubah menjadi modal produktif yang meningkatkan posisi tawar. Akibatnya, siklus keluar–masuk daftar penerima berulang tanpa lompatan kesejahteraan yang berarti.

5.2.6.2. Celah Desain: Kriteria Teknis Kaku dan Minim Bundling Lintas Layanan

Penentuan kelayakan berbasis indikator teknis yang sempit tidak menangkap dinamika rumah tangga, misalnya rumah semi-permanen dengan tanggungan besar dan biaya pendidikan tinggi. Kurang kuatnya *bundling* antara bantuan sosial, pelatihan keterampilan, akses modal wajar, dan koneksi pasar membuat jalur transisi dari “bertahan” ke “berdaya” terputus-putus. Keterbatasan *monitoring–evaluation* berbasis hasil juga membuat koreksi kebijakan tertunda. Untuk mendorong kemandirian, bantuan harus disandarkan pada paket transisi yang jelas dan terukur.

5.2.7. Temuan Lintas Faktor, Lintas Dimensi, dan Lintas Kasus

5.2.7.1. Lintas Faktor: Mekanisme Penjepit yang Saling Menguatkan

Beban adat (sosial-budaya) menguras buffer ekonomi; kekeringan atau musim angin (geografis) menurunkan pendapatan; data bias dan kelembagaan lemah (struktural) menutup akses adil; dan literasi rendah (kapabilitas) membuat setiap tambahan sumber daya cepat habis. Ketika faktor-faktor ini bertemu, terbentuk *deprivation trap* yang menyulitkan keluarga keluar dari kemiskinan tanpa dorongan struktural. Titik jepit sering kali berada di “biaya tetap” keluarga miskin, pangan, pendidikan, kesehatan, yang tak bisa ditunda, sehingga strategi bertahan cenderung utang jangka pendek. Karena itu, memutus satu jepit saja tidak cukup; perlu paket intervensi yang menekan beberapa jepit sekaligus.

5.2.7.2. Lintas Dimensi: Tidak Ada "Satu Obat untuk Semua".

Pesisir membutuhkan kebijakan maritim rakyat (pembiayaan wajar, *cold chain*, perbaikan kontrak kerja); pedalaman butuh air, tanah, dan pasar yang lebih pasti; urban memerlukan *bridging* keterampilan dan kanal ke kerja formal serta UMKM yang terkoneksi pasar kota. Layanan dasar (pendidikan–kesehatan–sanitasi) harus diikat dengan instrumen ekonomi mikro dan keuangan inklusif agar dampak kapabilitas tidak menguap. Dengan kata lain, desain kebijakan harus menyatu lintas dimensi, alih-alih menempatkan layanan dasar dan ekonomi sebagai jalur yang terpisah. Integrasi inilah yang mengubah "akses" menjadi "kemajuan".

5.2.7.3. Lintas Kasus: Pola Sama, Jalur Kausal Berbeda.

Semua lokasi memperlihatkan pola yang sama, ketidakpastian pendapatan, beban sosial, dan ketergantungan pada bantuan, tetapi jalur penyebabnya berbeda menurut konteks. Di pesisir, relasi patron–klien dan volatilitas ekologi laut adalah pemicu utama; di pedalaman, adat dan agroekologi lahan kering mendominasi; di urban, biaya hidup dan pasar kerja informal menjadi kunci. Perbedaan ini menuntut *place-based policy* dengan indikator keberhasilan yang disesuaikan, bukan target seragam. Dengan demikian, pembelajaran lintas kasus menjadi modal untuk menghindari jebakan "satu resep untuk semua desa".

5.2.8. Akar Masalah dan Posisi Variabel dalam Pohon Masalah

5.2.8.1. Akar (*Root Causes*/*Determinants*).

Akar kultural (pesta adat, patron–klien), akar geografis–lingkungan (musim laut, kekeringan, akses pasar), dan akar struktural (kebijakan seragam, data bias, kelembagaan lemah) adalah determinan yang menanamkan kerentanan secara mendalam. Akar-akar ini tidak mudah berubah dalam jangka pendek, sehingga strategi harus menggabungkan upaya pengurangan beban (misal inovasi sosial mengelola belanja adat) dan penguatan struktur (reformasi data dan kelembagaan). Akar geografis perlu dihadapi dengan investasi infrastruktur kecil-menengah yang sensitif konteks, bukan proyek raksasa yang sukar dipelihara. Dengan menarget akar, energi kebijakan tidak habis di hilir.

5.2.8.2. Mediator (Batang/Mekanisme Kausal)

Dimensi ekonomi (pendapatan fluktuatif, utang, kerja informal) dan dimensi kapabilitas (pendidikan, kesehatan/gizi, literasi/aspirasi) adalah saluran yang mengubah akar menjadi kerentanan nyata. Ekonomi menjadi

kanal pertama yang langsung terasa di dapur keluarga; kapabilitas menjadi kanal kedua yang menentukan kemampuan keluarga mengubah sumber daya menjadi mobilitas. Relasi dua kanal ini bersifat sirkular: pendapatan rendah melemahkan pendidikan dan kesehatan; kapabilitas rendah menahan keluarga di pekerjaan berupah rendah. Karena itu, penguatan keduanya harus serentak dan saling menopang.

5.2.8.3. Moderator (Pengkondisi)

Solidaritas sosial, jaringan patron–klien, dan desain program bertindak sebagai pengkondisi yang memperkuat atau melemahkan hubungan akar–konsekuensi. Solidaritas yang kuat dapat menahan guncangan dan mengurangi kebutuhan berutang; sebaliknya, jaringan patron–klien mempertebal ketergantungan dan memakan marjin ekonomi nelayan. Desain program yang adaptif konteks berperan sebagai moderator positif, sedangkan desain seragam menjadi moderator negatif yang memperbesar ketidaksesuaian. Mengelola moderator adalah cara cepat menurunkan intensitas kerentanan sambil menyiapkan perbaikan pada akar dan batang.

5.2.8.4. Konsekuensi (Daun/*Outcomes*)

Konsekuensi yang tampak di permukaan adalah kemiskinan ekstrem yang berkepanjangan, reproduksi lintas generasi, ketergantungan pada bantuan, dan daya saing daerah yang rendah. Daun ini akan terus tumbuh kembali bila akar dan batang tidak disentuh, meskipun dipangkas dengan bantuan sementara. Mengubah profil “daun” membutuhkan paket transisi dari survival ke resilience, dari resilience ke empowerment, hingga sustainability. Barulah kemiskinan tidak sekadar dikurangi gejalanya, tetapi diputus rantainya.

Keseluruhan temuan menegaskan bahwa kemiskinan di Sikka adalah fenomena sistem yang menuntut jawaban sistemik. Akar kultural–struktural dan batas-batas geografis perlu dihadapi bersamaan dengan penguatan ekonomi rumah tangga dan kapabilitas manusia, sementara moderator sosial dan desain program dikelola agar bekerja sebagai peredam, bukan pengganda risiko. Jika jembatan dari *survival* menuju *sustainability* dirangkai secara sadar melalui kebijakan yang *place-based* dan berorientasi kapabilitas, maka daun kemiskinan ekstrem akan perlahan berganti menjadi daun kesejahteraan yang berkelanjutan.

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Penelitian lintas kasus di delapan lokasi Kabupaten Sikka menunjukkan bahwa kemiskinan yang dihadapi rumah tangga adalah hasil interaksi kompleks antara dimensi sosial-budaya, ekonomi, kebijakan–kelembagaan, kapabilitas, serta geografis–lingkungan. Interaksi ini membentuk pola yang serupa di semua lokasi, yakni kerentanan yang berulang, namun menampakkan perbedaan spesifik sesuai konteks pesisir, pedalaman, dan urban-periurban. Pola bantuan yang ada terbukti menopang kebutuhan dasar ketika terjadi guncangan, tetapi belum sanggup membuka jalan keluar yang berkelanjutan dari jebakan kemiskinan. Karena itu, kesimpulan menekankan pentingnya membaca kemiskinan Sikka sebagai fenomena sistemik, di mana akar kultural–struktural dan batas-batas geografis menyalurkan dampaknya melalui ekonomi dan kapabilitas hingga berujung pada konsekuensi antargenerasi.

6.2 Implikasi Penelitian

6.2.1 Implikasi Teoritis

Hasil penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan studi kemiskinan multidimensi, khususnya di konteks wilayah kepulauan dan pedesaan seperti Kabupaten Sikka. Selama ini, teori kemiskinan multidimensi yang dikembangkan Amartya Sen melalui *capability approach* dan Robert Chambers dengan konsep *livelihood vulnerability* banyak digunakan untuk menjelaskan keterbatasan kapabilitas dan kerentanan penghidupan. Penelitian ini memperlihatkan bagaimana kedua kerangka teori tersebut menemukan relevansinya dalam konteks lokal Sikka, di mana keterbatasan pendidikan, infrastruktur dasar, dan kelembagaan menjadi faktor yang saling memperkuat. Dengan demikian, penelitian ini memperluas pemahaman tentang bagaimana kemiskinan multidimensi tidak hanya bersifat individual, tetapi juga bersumber dari struktur sosial, budaya, dan kelembagaan.

Selain itu, penelitian ini berkontribusi pada pengayaan literatur mengenai *policy alienation*, yaitu keterputusan antara kebijakan top–down dengan kebutuhan nyata masyarakat di tingkat lokal. Kasus di Umauta dan

Wairbleler memperlihatkan bagaimana kebijakan bansos dan program pembangunan yang bersifat sentralistik gagal mengatasi akar kerentanan, misalnya krisis air bersih dan lemahnya kelembagaan desa. Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa *policy alienation* bukan hanya masalah teknis implementasi, tetapi juga persoalan epistemik: kebijakan dirancang tanpa mengintegrasikan pengetahuan lokal. Implikasi teoretis ini penting karena menunjukkan perlunya pendekatan *co-production of knowledge* dalam studi kebijakan pembangunan dan pengentasan kemiskinan.

Penelitian ini juga memperkaya kajian mengenai *ekosistem kemiskinan* dengan memperlihatkan bahwa kemiskinan di Sikka terbentuk dari interaksi kompleks antara faktor ekonomi subsisten, beban adat, krisis infrastruktur dasar, dan kelemahan tata kelola. Temuan ini relevan untuk mengembangkan model analitis yang lebih kontekstual, seperti *BANDOL model* (Survival–Resilience–Empowerment–Sustainability) yang digunakan dalam penelitian. Dengan menggunakan model tersebut, terlihat bahwa rumah tangga miskin di Sikka masih terjebak pada fase survival dan resilience, sementara fase empowerment dan sustainability sulit tercapai tanpa intervensi struktural.

6.2.2 Implikasi Praktis

Dari sisi praktis, penelitian ini memberikan pelajaran penting bagi perbaikan program desa dan bansos di Sikka. Pertama, program bantuan sosial (PKH, BPNT, BLT) yang ada perlu disesuaikan dengan kondisi riil masyarakat. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa bantuan sering habis untuk biaya air bersih atau kewajiban adat, bukan untuk perbaikan gizi atau pendidikan anak. Hal ini mengindikasikan perlunya integrasi antara bantuan sosial dengan program pembangunan infrastruktur dasar, sehingga bantuan tidak sekadar menjadi konsumsi, melainkan mampu memperkuat kapasitas rumah tangga untuk keluar dari kemiskinan.

Kedua, penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan desa. Kasus di Wairbleler menunjukkan bahwa musyawarah desa sering hanya bersifat formalistik karena data penerima bantuan sudah ditentukan oleh tingkat kabupaten. Untuk mengatasi *policy alienation*, desa perlu diberikan ruang yang lebih besar dalam menentukan prioritas dan penerima program sesuai kondisi lokal. Pendampingan berkelanjutan juga diperlukan agar program kelompok usaha atau diversifikasi ekonomi tidak berhenti setelah bantuan awal habis.

Ketiga, penelitian ini memberikan pelajaran bahwa intervensi pengentasan kemiskinan perlu sensitif terhadap faktor kultural. Beban adat yang menguras ekonomi rumah tangga di Wairbleler, misalnya, tidak bisa diatasi hanya dengan menambah bantuan. Diperlukan pendekatan dialog budaya dengan melibatkan tokoh adat dan gereja untuk mendorong transformasi norma, misalnya melalui kesepakatan adat hemat (belis sederhana, sumbangan proporsional). Praktik semacam ini dapat memperkuat daya tahan ekonomi tanpa mengorbankan kohesi sosial.

6.2.3 Implikasi Kebijakan

Secara kebijakan, penelitian ini memiliki relevansi langsung dengan arah pembangunan Kabupaten Sikka. Pertama, temuan tentang kemiskinan multidimensi dapat dijadikan masukan dalam penyusunan dan revisi RPJMD Sikka. Selama ini indikator kemiskinan dalam dokumen perencanaan lebih banyak berbasis angka pendapatan, padahal penelitian ini menunjukkan perlunya memasukkan indikator kualitas air, kelayakan hunian, dan tingkat pendidikan sebagai variabel penting. Dengan demikian, kebijakan pengentasan kemiskinan di Sikka akan lebih komprehensif dan sesuai realitas lapangan.

Kedua, penelitian ini relevan dengan pencapaian SDGs, khususnya Tujuan 1 (No Poverty), Tujuan 6 (Clean Water and Sanitation), Tujuan 10 (Reduced Inequalities), dan Tujuan 11 (Sustainable Cities and Communities). Temuan tentang krisis air bersih di Umauta dan Wairbleler memperlihatkan bahwa pencapaian SDGs tidak bisa dilakukan secara parsial, tetapi harus melalui pendekatan lintas sektor. Penyediaan infrastruktur air bersih, perbaikan rumah layak huni, dan perluasan akses pendidikan menjadi langkah konkret yang berkontribusi langsung pada pencapaian target global.

Ketiga, implikasi kebijakan juga dapat dikaitkan dengan Asta Cita 2024–2029 yang dicanangkan pemerintah pusat, khususnya agenda penghapusan kemiskinan ekstrem dan pembangunan manusia unggul. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa penghapusan kemiskinan ekstrem tidak akan tercapai jika hanya mengandalkan bansos, melainkan harus diikuti dengan intervensi struktural seperti irigasi desa, perumahan layak, dan pemberdayaan berbasis komunitas. Dengan memasukkan temuan ini dalam strategi daerah, Kabupaten Sikka dapat menjadi laboratorium kebijakan untuk mengimplementasikan Asta Cita secara kontekstual.

Dengan demikian, implikasi kebijakan penelitian ini bersifat multi-level: memperkaya indikator RPJMD, mempercepat pencapaian SDGs, dan mendukung agenda nasional Asta Cita. Integrasi ketiga kerangka ini akan memperkuat arah pembangunan yang tidak hanya responsif terhadap angka kemiskinan, tetapi juga transformatif dalam mengatasi akar-akar multidimensi kemiskinan.

6.3 Saran

6.3.2 Jangka Pendek: Verifikasi Data Partisipatif dan Perbaikan Targeting Bansos

1) **Verifikasi Data Kemiskinan Partisipatif.** Langkah paling mendesak adalah memastikan keakuratan data melalui verifikasi partisipatif di tingkat desa dan kelurahan. Mekanisme ini memberi ruang bagi warga, tokoh adat, kelompok perempuan, dan pemuda untuk memvalidasi daftar penerima. Dengan cara ini, error inklusi–eksklusi bisa ditekan, transparansi meningkat, dan rasa memiliki terhadap program lebih kuat.
2) **Perbaikan Targeting Bantuan Sosial.** Bantuan perlu disesuaikan dengan jumlah tanggungan, kondisi geografis, dan mata pencaharian utama. Misalnya, rumah tangga pesisir menerima kombinasi pangan dan modal perikanan; pedalaman difokuskan pada pangan plus irigasi kecil; urban diarahkan ke bridging keterampilan kerja. Sistem *bundling* semacam ini membuat bantuan lebih kontekstual dan produktif.

6.3.3 Jangka Menengah: Diversifikasi Ekonomi Lokal

1) Perikanan Berkelanjutan. Nelayan harus memperoleh akses ke permodalan mikro berbunga wajar, *cold chain* sederhana, dan pelatihan manajemen usaha. Dengan begitu, mereka dapat keluar dari ketergantungan pada juragan dan memiliki posisi tawar yang lebih setara.
2) Penguatan UMKM Perempuan. UMKM perempuan perlu diperluas lewat modal, pelatihan, dan digital marketing. Penguatan ini penting karena keuntungan UMKM perempuan terbukti banyak dialokasikan untuk pendidikan dan kesehatan anak.
3) Pengembangan Tenun Ikat. Tenun ikat Sikka harus diperlakukan sebagai aset ekonomi dan budaya. Pemerintah perlu memperkuat ekosistem produksi–pemasaran dengan inovasi desain, pewarnaan alami, koperasi penenun, dan promosi digital.

4) Peningkatan Nilai Tambah Kelapa. Komoditas kelapa bisa diolah menjadi minyak murni, gula kelapa, atau produk turunan lain. Koperasi produsen berbasis desa dapat memperkuat rantai pasok dan membuka lapangan kerja lokal**.**

6.3.4 Jangka Panjang: Reformasi Budaya Sosial, Pendidikan Vokasional, dan Literasi Keuangan

1) **Reformasi Budaya Sosial.** Biaya adat dan belis yang tinggi perlu dikelola agar tetap bermakna secara simbolik, tetapi tidak menjerat rumah tangga ke utang. Dialog adat, tabungan hajatan, dan literasi berbasis forum adat bisa menjadi inovasi sosial yang efektif.
2) **Pendidikan Vokasional Kontekstual.** Sekolah vokasi harus disesuaikan dengan kebutuhan pasar: perikanan, pertanian lahan kering, pariwisata, dan keterampilan digital. Dengan ini, anak-anak keluarga miskin bisa keluar dari pekerjaan informal menuju jalur formal atau wirausaha.
3) **Literasi Keuangan** Literasi keuangan harus diajarkan di sekolah, PKK, dan komunitas. Fokusnya mengubah pola konsumtif menjadi ethos produktif melalui tabungan, perencanaan usaha, dan pengelolaan utang.

6.3.5 Penegasan Akhir: Apa yang Mesti Berubah

1) **Dari Kuratif ke Transformatif.** Bantuan dasar tetap diperlukan sebagai *social floor*, tetapi harus diikat dengan penguatan kapabilitas, pendidikan menengah/kejuruan, gizi–kesehatan, literasi keuangan, serta kanal ekonomi nyata seperti pembiayaan wajar, pendampingan usaha, dan akses pasar. Dengan ikatan ini, bantuan tidak menguap jadi konsumsi rutin, melainkan terkunci menjadi investasi produktif. Indikator keberhasilan pun harus bergeser dari jumlah penerima ke ukuran mobilitas kapabilitas dan peluang kerja.
2) **Dari Seragam ke *Place-Based*.** Kebijakan perlu dibuat modular sesuai ekologi sosial masing-masing: maritim rakyat di pesisir, agroekologi dan pasar lokal di pedalaman, serta jembatan ke pekerjaan formal di urban. Dengan place-based approach, *policy alienation* berkurang, ownership warga meningkat, dan peluang sukses lebih tinggi karena intervensi berbicara dalam bahasa konteks lokal.

3) **Dari Proyek ke Portofolio.** Pendekatan portofolio harus dirangkai dalam empat lapis: survival (proteksi dasar), resilience (pengelolaan risiko dan modal sosial), empowerment (keterampilan, modal, pasar), dan sustainability (koordinasi lintas sektor dan M&E berbasis hasil). Dengan pemetaan jelas terhadap akar, mediator, dan konsekuensi, portofolio kebijakan menggeser peran bantuan dari penyangga menuju pendorong kemandirian.

Rekomendasi ini menegaskan bahwa arah kebijakan kemiskinan di Sikka tidak bisa berhenti pada pemenuhan kebutuhan harian. Ia harus bergeser ke transformasi kapabilitas, sensitif terhadap keragaman konteks lokal, dan terstruktur sebagai portofolio transisi. Dengan kombinasi strategi ini, kemiskinan tidak hanya berkurang secara statistik, tetapi benar-benar terputus mata rantainya lintas generasi, membangun masyarakat yang resilien, berdaya, dan adil.

6.4 Rencana Aksi Tahunan

Rencana aksi tahunan ini disusun sebagai respons terhadap temuan penelitian yang memperlihatkan bahwa kemiskinan di Kabupaten Sikka bersifat multidimensional, lintas faktor, lintas dimensi, dan lintas kasus. Analisis menunjukkan adanya pola umum berupa ketergantungan pada pertanian subsisten, krisis air bersih, rumah tidak layak huni, rendahnya pendidikan, lemahnya kelembagaan, dan beban sosial adat yang menguras ekonomi rumah tangga. Namun di sisi lain, terdapat potensi daya masyarakat untuk bangkit ketika diberikan ruang pemberdayaan (*empowerment*), ketangguhan (*resilience*), dan keberlanjutan (*sustainability*).

Kerangka Kontinum Perubahan Ekosistem Kemiskinan Menuju Ekosistem Resiliensi (*Survival–Resilience–Empowerment–Sustainability*) dipakai untuk merumuskan rencana aksi ini. Prinsipnya, setiap tahun diarahkan untuk:

1) Menjamin survival (pemenuhan kebutuhan dasar).
2) Meningkatkan *resilience* (daya tahan ekonomi dan sosial).
3) Memperluas *empowerment* (pemberdayaan kelompok rentan, perempuan, dan pemuda).
4) Membangun *sustainability* (model desa tangguh kemiskinan yang dapat direplikasi).

Rencana aksi tahunan ini tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan RPJMD Kabupaten Sikka, SDGs, dan Asta Cita 2024–2029, sehingga

dapat menjadi panduan strategis bagi pemerintah daerah, desa, maupun mitra pembangunan.

Table 104. Rencana Aksi Tahunan 2025–2030 Berbasis Kontinum Ekosistem Resiliensi,

Tahun	Fokus Utama (Lintas Faktor & Dimensi)	Level Kontinum Kemiskinan	Program/Intervensi Detail	Aktor Utama & Mitra	Target & Indikator	Kelompok Sasaran & Desil (berbasis komunitas)	Rencana Kajian/Penelitian
2025	Pemenuhan kebutuhan dasar: air bersih, pangan, rumah layak, Pendidikan, validasi data	Survival	- Sumur bor & kios air komunitas - Distribusi air murah - Lumbung pangan komunitas (beras/jagung) - Rehabilitasi rumah tidak layak huni Validasi DTKS berbasis musyawarah komunitas	Pemkab Sikka, Dinsos, Dinas PU, komunitas lokal, Karitas, LSM	- Biaya air turun ≥30% - 80% keluarga punya cadangan pangan 6 bulan - 200 rumah direnovasi - Validitas DTKS ≥90%	- Komunitas rumah tangga miskin ekstrem (Desil 1), - Janda miskin, - Lansia tanpa penopang, - komunitas anak rentan gizi	- Studi baseline kemiskinan multidimensi komunitas; - Kajian efektivitas distribusi air & pangan; - Evaluasi validasi DTKS berbasis komunitas
2026	Peningkatan produktivitas & daya tahan ekonomi (pertanian, nelayan, irigasi)	Resilience	- Embung komunitas & irigasi sederhana - Jagung tahan kering & hortikultura bernilai ekonomi - Modernisasi alat tangkap	Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, BUMDes, koperasi komunitas, NGO	- Produktivitas jagung naik ≥25% - 60 nelayan pakai mesin - 40% keluarga akses kredit mikro	- Komunitas petani gurem (Desil 1–2), - Komunitas nelayan kecil (Desil 1–2), - Kelompok perempuan	- Riset produktivitas pertanian tahan iklim berbasis komunitas; - Kajian koperasi perempuan; monitoring pendapatan

Tahun	Fokus Utama (Lintas Faktor & Dimensi)	Level Kontinum Kemiskinan	Program/Intervensi Detail	Aktor Utama & Mitra	Target & Indikator	Kelompok Sasaran & Desil (berbasis komunitas)	Rencana Kajian/Penelitian
			- Kredit mikro koperasi komunitas		- Pendapatan naik ≥15%	pengelola usaha mikro (Desil 2–3)	komunitas nelayan-petani
2027	Diversifikasi ekonomi & pemberdayaan sosial (UMKM, perempuan, pemuda, BUMDes)	Empowerment	- Pelatihan UMKM komunitas (olah hasil laut/pertanian, tenun, kerajinan) - Penguatan BUMDes - Kelompok simpan pinjam perempuan - Beasiswa transport & seragam - Pelatihan keterampilan pemuda	Dinas Koperasi & UMKM, Dinas Pendidikan, PKK, Karang Taruna, universitas	- 70 UMKM aktif - BUMDes berfungsi di 80% komunitas - 50% keluarga miskin perempuan ikut usaha mikro - Putus sekolah turun 40% - 200 pemuda berdaya	- Komunitas UMKM perempuan (Desil 2–3), komunitas pemuda rentan kerja (Desil 2–4), - Komunitas keluarga anak putus sekolah (Desil 1–2)	- Studi dampak sosial-ekonomi UMKM komunitas; - Riset gender & ekonomi rumah tangga; - Kajian beasiswa & pelatihan pemuda
2028	Kesehatan, gizi, sanitasi, adat & kelembagaan	Resilience–Empowerment	- Posyandu komunitas + pangan tambahan - Sanitasi sehat: jamban keluarga & air layak	Dinas Kesehatan, Dinsos, tokoh adat, gereja, komunitas adat	- Stunting turun ≥25% - 75% rumah tangga punya jamban sehat - Beban adat turun (indikator	Komunitas ibu hamil & balita (Desil 1–2), komunitas keluarga dengan stunting (Desil 1–3), komunitas adat	- Riset gizi & kesehatan berbasis komunitas; - Kajian etnografi beban adat;

Tahun	Fokus Utama (Lintas Faktor & Dimensi)	Level Kontinum Kemiskinan	Program/Intervensi Detail	Aktor Utama & Mitra	Target & Indikator	Kelompok Sasaran & Desil (berbasis komunitas)	Rencana Kajian/Penelitian
			- Dialog adat: kurangi beban belis & pesta berlebih - Reformasi bansos berbasis komunitas - Arisan pangan/solidaritas lokal		kontribusi sukarela) - Kepuasan musyawarah komunitas ≥75%	dengan beban belis tinggi (Desil 2–4)	- Evaluasi bansos partisipatif komunitas
2029	Konsolidasi capaian & model desa tangguh kemiskinan	Sustainability	- Integrasi program desa tangguh berbasis komunitas - Dokumentasi praktik baik komunitas pilot - Replikasi ke komunitas lain - Kemitraan NGO–universitas–CSR	Pemkab Sikka, universitas, NGO, komunitas, sektor swasta	- 5 komunitas model tangguh kemiskinan terbentuk - Replikasi di 10 komunitas lain - Kemiskinan ekstrem turun <12%	Komunitas pilot (nelayan, petani, UMKM, adat) Desil 1–3; komunitas replikasi Desil 2–4	- Kajian model komunitas tangguh: praktik baik; - Riset perbandingan antar komunitas pilot vs non-pilot; - Evaluasi replikasi kebijakan
2030	Replikasi & kelembagaan permanen	Sustainability	- Institusionalisasi komunitas tangguh ke RPJMD	Bappeda, DPRD, desa, komunitas, mitra pembangunan	- Komunitas tangguh masuk RPJMD	- Komunitas lintas desil (1–5), terutama komunitas miskin kronis &	- Studi longitudinal 2025–2030 berbasis komunitas;

Tahun	Fokus Utama (Lintas Faktor & Dimensi)	Level Kontinum Kemiskinan	Program/Intervensi Detail	Aktor Utama & Mitra	Target & Indikator	Kelompok Sasaran & Desil (berbasis komunitas)	Rencana Kajian/Penelitian
			- Regulasi komunitas inklusif (anti putus sekolah, sanitasi, air bersih) - Integrasi SDGs lokal dengan indikator kemiskinan multidimensi		- Kemiskinan ekstrem <10% - SDGs lokal diadopsi ke RPJMD	komunitas transisi menuju sejahtera	- Riset kelembagaan komunitas tangguh; - Kajian integrasi SDGs ke RPJMD

Catatan Integratif

1. **Lintas Faktor**: semua dimensi lapangan (air, pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, adat, kelembagaan) masuk dalam aksi tahunan.
2. **Lintas Dimensi**: ekonomi (subsisten menuju diversifikasi), sosial (pendidikan, kesehatan, gender), budaya (beban adat), kelembagaan (tata kelola bansos, BUMDes).
3. **Lintas Kasus**: belajar dari variasi lokasi (Umauta, Wairbleler, Madawat, Rubit, Wuring) agar strategi adaptif, tidak seragam.
4. **Kontinum Kondisi Kemiskinan**: tahapan aksi mengikuti transisi ***Survival*** **(2025) ke** ***Resilience*** **(2026–2028) ke** ***Empowerment*** **(2027–2028) ke** ***Sustainabili***